LUWU CEMERLANG 2045

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2026



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
10. Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-20245 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbagda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RKPD Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan Daerah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:
a. pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2026; dan
b. secara normatif, menjadi dasar KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2026.

BAB III
PELAKSANAAN RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
g. penutup.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD tahun 2026;
b. pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS tahun anggaran 2026; dan
c. bahan sinkronisasi rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026.

(2) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

(4) Bappelitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD.

(5) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah yang meliputi Renja PD tahun 2026 dan RKPD tahun 2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
(3) Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD.
(2) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD.
(3) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 17

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026 diimplementasikan dengan:

a. tetap memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
b. memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program *(money follows program),* serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; DAN
c. melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen RKPD tahun 2026 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dalam bentuk nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi rancangan APBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPD tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD tahun 2026 agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing PD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan PD pada posisi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagai berikut:

a. untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing PD agar menyempurnakan Renja PD tahun 2026;
b. PD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program yang ada di RKPD tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
c. masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
d. untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
e. pada akhir tahun anggaran 2026, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, PD, DPRD melalui pokok fikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026.

3. Pelaksanaan pembangunan Daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijkan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu: "Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Infrastruktur Dalam Mendukung Peningkatan Masyarakat Berbasis Komoditas Unggulan Daerah" sehingga program kegiatan di masing-masing PD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD tahun 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan Daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara *sharing* pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD Provinsi Selawesi Selatan maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4. Maksud Dan Tujuan Penyusunan RKPD I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2. Kondisi Topografi II-4
2.1.3. Kondisi Geologi II-9
2.1.4. Kondisi Hidrologi II-12
2.1.5. Kondisi Klimatologi II-15
2.1.6. Potensi Sumber Daya Alam II-16
2.1.7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-23
2.1.8. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-26
2.1.9. Lingkungan Hidup Berkualitas II-38
2.1.10. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-51
2.1.11. Demografi II-55
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-63
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-63
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi II-63
b. Tingkat Kemiskinan II-66
c. Kemiskinan Ekstrem II-68
d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita II-69
e. Tingkat Pengangguran Terbuka II-71
f. Indeks Gini II-74
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya II-75
2.2.2.1. Kesehatan Untuk Semua II-75

2.2.2.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-87
2.2.2.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-106
2.2.2.4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-111
2.2.2.5. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif..... II-113
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-120
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia..... II-121
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi..... II-127
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-139
2.3.4. Transformasi Digital II-140
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-147
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-150
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro II-159
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-163
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-164
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial II-173
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-181
2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-183
2.4.4.1. Urusan Wajib Dasar II-183
2.4.4.2. Urusan Wajib Non Dasar II-231
2.4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-268
2.4.4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-274
2.4.5. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah II-278
2.4.4.1. Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-278
2.4.4.2. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal..... II-281
2.4.4.3. Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* II-287
2.4.6. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

dan Realisasi RPJMD Tahun 2024 ..... II-311
2.4.6.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2024 ..... II-311
2.4.7. Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Luwu II-357
2.4.7.1. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-357
2.4.7.2. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* II-359
2.4.7.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) .. II-383
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis II-493
2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-493
2.5.2. Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah II-503
2.5.3. Isu Strategis II-508
2.5.3.1. Isu Strategis Global II-508
2.5.3.2. Isu Strategis Nasional II-515
2.5.3.3. Isu Strategis Kabupaten Luwu II-519
2.6. Inovasi Daerah II-529
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah III-2
3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah III-2
3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global III-3
3.1.1.3. Tantangan Perekonomian Nasional III-4
3.1.1.4. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan III-6
3.1.1.5. Tantangan Perekonomian Kabupaten Luwu III-7
3.1.1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB .. III-8
3.1.1.5.2. PDRB Perkapita III-9
3.1.1.5.3. Inflasi III-10
3.1.1.5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka III-11
3.1.1.5.5. Tingkat Kemiskinan III-13

3.1.1.5.6. Gini Rasio III-14
3.1.1.5.7. Indeks Pembangunan Manusia III-15
3.1.2. Arah Kebijakan Nasional III-16
3.1.2.1. Prospek Perekonomian Daerah III-9
3.1.2.2. Tantangan Perekonomian Global III-9
3.1.2.3. Tantangan Perekonomian Nasional III-10
3.1.2.4. Tantangan Perekonomian Provinsi III-13
3.1.2.5. Tantangan Perekonomian Daerah III-13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-18
3.2.1.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023-2027 ..... III-21
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-23
3.2.2.1. Belanja Operasi III-24
3.2.2.1.1. Belanja Pegawai III-24
3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa III-24
3.2.2.1.3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial III-25
3.2.2.2. Belanja Modal III-25
3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga III-26
3.2.2.4. Belanja Transfer III-26
3.2.2.4.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa ... III-26
3.2.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan III-26
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-56
3.2.4. Pendanaan Pembangunan Lainnya III-58
3.2.4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-58
3.2.4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-58

BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-11
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional IV-11
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-17
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu IV-25
4.2.3.1. Target Indikator Makro Pembangunan IV-27
4.2.3.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-28

4.2.3.3. Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-50
4.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah IV-159
4.3.1. Strategi Pembangunan Daerah IV-159
4.3.2. Arah Kebijakan IV-159
4.3.3. Arah Kebijakan Wilayah IV-172
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2026 ..... V-1
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026..... V-3
5.3. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... V-20
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Indikator Makro Pembangunan VI-1
6.2. Indikator Kinerja Utama..... VI-4
6.3. Indikator Kinerja Kunci VI-5
6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal VI-25
6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) VI-28
BAB VII PENUTUP..... VII-1
7.1. Kaidah Pelaksanaan..... VII-1
7.2. Kesimpulan..... VII-3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan). Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Seiring dengan berkembangnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif.

Berangkat dari hal tersebut, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk rencana pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk rencana pembangunan 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun RKPD Tahun 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap target dan capaian pembangunan tahun sebelumnya serta dinamika dampak sosial dan

ekonomi. Adapun capaian indikator ekonomi Makro Kabupaten Luwu tahun 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69%, inflasi 5,13%, gini ratio 0,364%, Indeks Pembangunan Manusia 71,36%, Kemiskinan 12,49% Tingkat Pengangguran Terbuka 3,85%, dan PDRB Perkapita 54,03 Juta. Untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/ kegiatan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, RKPD disusun dengan mengacu pada rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota.

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 merupakan penjabaran Tahun ke 2 (dua) dalam pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 telah mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah.

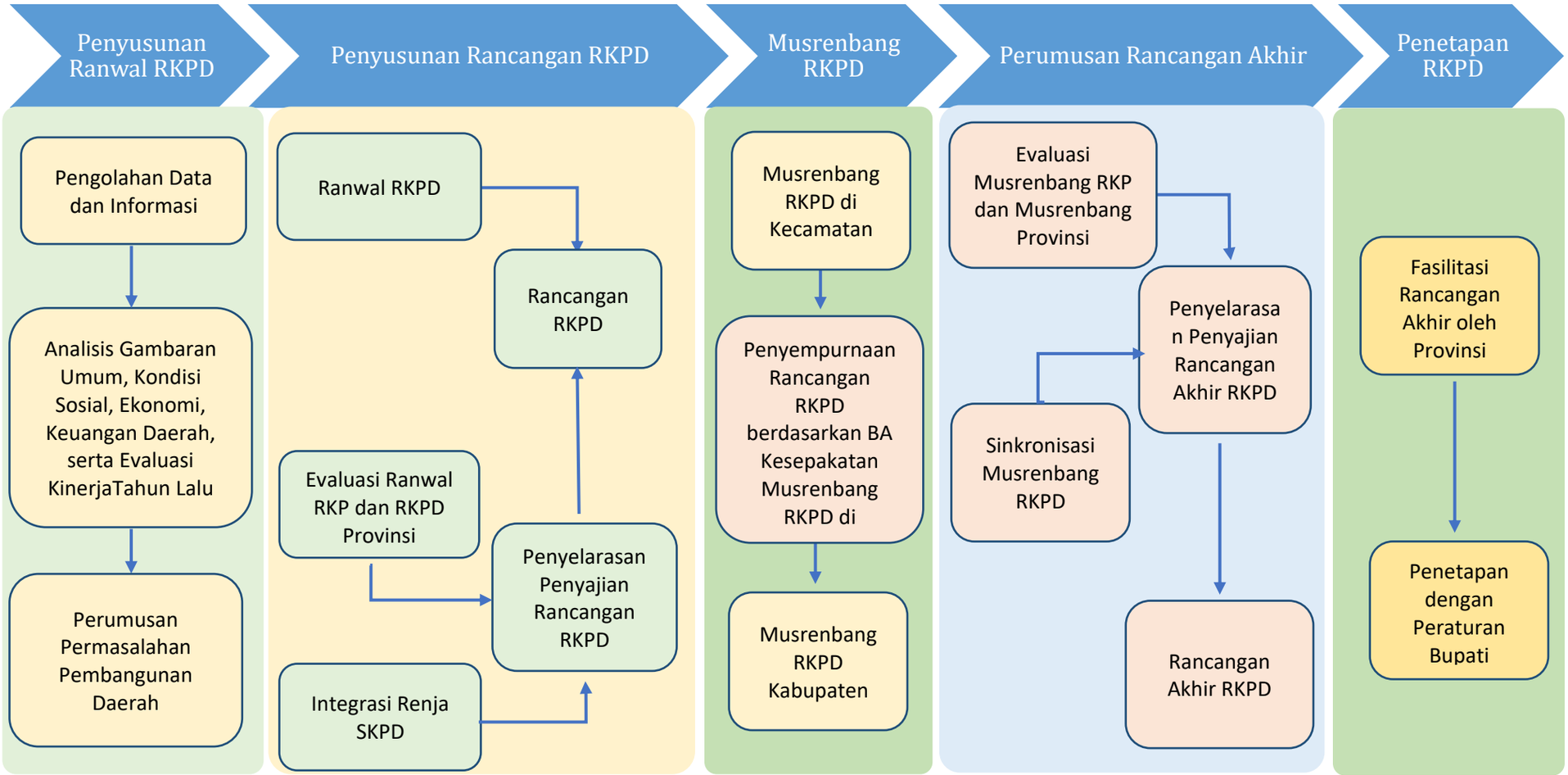
RKPD Kabupaten Luwu telah mempedomani RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/Program Strategis Nasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah teknokratik, partisipatif, politik, serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui: (1) penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Luwu, kebijakan pemerintah pusat pada RKP, kebijakan pemerintah provinsi pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu; (2) melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan; (3) menyelaraskan hasil perencanaan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional; (4) menajamkan program prioritas pembangunan daerah; (5) mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta (6) mempertimbangkan dimensi tata ruang daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan, penyusunan RKPD tahun 2026 dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang RKPD (baik tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan), penyusunan rancangan akhir, fasilitasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, penetapan RKPD dan klarifikasi peraturan bupati tentang RKPD. Selengkapnya, bagan alur tahapan penyusunan RKPD adalah sebagaimana pada bagan berikut ini.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan

Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Gambar 1.1.
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah.

Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui proses *E-Planning* dengan mengunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Dalam upaya memastikan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor .....);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Rencana Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD kabupaten terhubung dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional (RKP/program strategis nasional), provinsi (RKPD Provinsi), dan kabupaten (RPJMD Kabupaten). Secara singkat, hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

➢ RKPD Kabupaten Luwu dengan RPD Kabupaten Luwu

RKPD Kabupaten Luwu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RPD Kabupaten Luwu pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPD. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan perencanaan yang partisipatif, RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

➢ RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

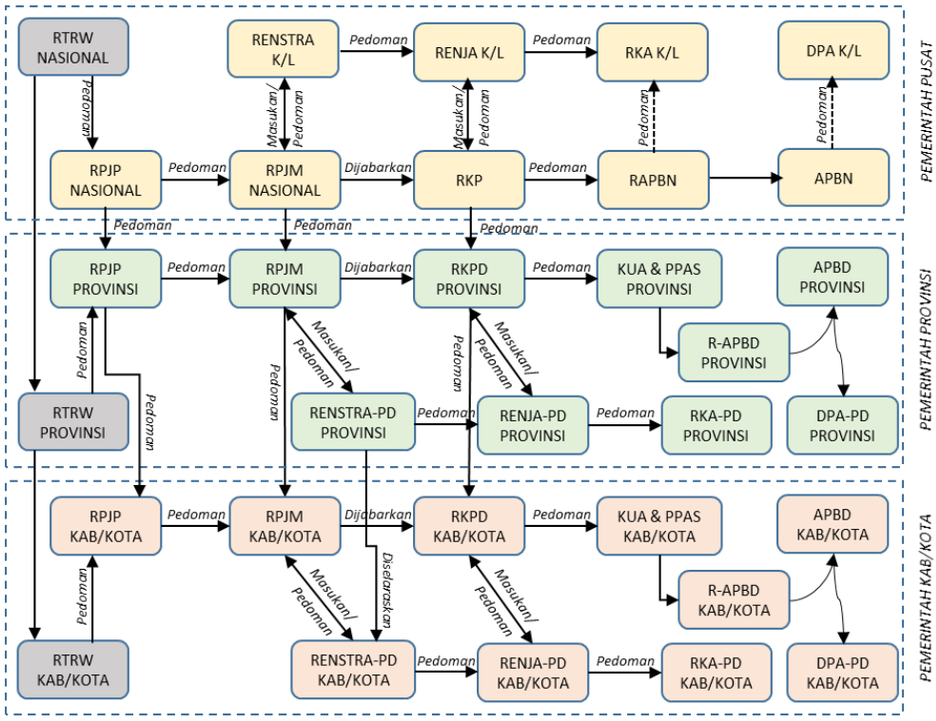
➢ RKPD Kabupaten Luwu dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Kabupaten Luwu disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 merupakan hasil penajaman program prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RPD Kabupaten Luwu yang dipetakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyempurnaan renja perangkat daerah. RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementaran (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS merupakan bahan dalam pembahasan antara pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu untuk disepakati sebagai rancangan APBD Kabupaten Luwu.

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Perlunya Penajaman program prioritas daerah yang dimuat dalam RKPD.

Tujuan dan sasaran disusunnya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kabupaten Tahun 2026.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menguraikan kondisi daerah dan gambaran pembangunan daerah dari berbagai aspek, meliputi Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD, Permasalahan Pembangunan Daerah, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator makro ekonomi pembangunan, keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator makro ekonomi pembangunan, dukungan terhadap prioritas pembangunan provinsi, integritas tujuan pembangunan prioritas pembangunan provinsi, integrasi SPM, serta inovasi daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan kerangka pendanaan tahun 2026 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten terluas yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu merupakan kabupaten ke- 4 terluas berdasarkan data BPS tahun 2023. Dengan potensi wilayah yang luas ini, Kabupaten Luwu telah menjadi salah satu penyanggah pangan dan energi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi sekitarnya sekaligus menjadi salah satu kabupaten penghasil mineral bumi untuk suplai kebutuhan nasional dan global.

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah 3.000,25 km^2. Kecamatan Latimojong menjadi kecamatan dengan wilayah terluas yakni 467,75 km^2 atau 15,59 persen dari total luas wilayah sedangkan Kecamatan Belopa Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni hanya seluas 34,73 km^2 atau 1,16 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu diapit oleh enam Kabupaten, satu Kota dan Teluk. Letak geografis wilayah Kabupaten Luwu menghampar antara 2°3’45” - 3°37’30” Lintang Selatan dan 119°15” - 121°43’11” Bujur Timur. Posisi Kabupaten Luwu secara geografis dikelilingi oleh struktur morfologi wilayah yang lengkap mulai dari dataran tinggi dan pegunungan seluas 63,99% dari total wilayah, dataran rendah sampai ke pesisir mencakup 36.01 % dari total wilayah dan garis pantai yang

cukup panjang di Teluk Bone yakni +/-135 km. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Luwu dideskripsikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- Sebelah Timur : Berbatasn dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Selain itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Keberadaan infrastruktur tersebut diperkuat dengan adanya pengembangan pelabuhan di Taddette, Ulo-Ulo, dan Balambang. Selain itu, Bandara Bua di Kabupaten Luwu terus mengalami pengembangan kapasitasnya dari tahun ke tahun. Semua ini memberikan kontribusi signifikan terhadap aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Luwu dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Luwu



Sumber : GTIG Kabupaten Luwu 2025.

Merujuk prespektif pendekatan pembangunan kewilayahan, Kabupaten Luwu berada pada posisi yang strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasioanal (RPJMN) 2025-2029 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029 terdapat delapan Prioritas Nasional yang mana salah satunya terintegrasi dengan rancana pembangunan Kabupaten Luwu yang mengusung peningkatan perekoniam berbasis sumber daya alam yakni megembangkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Kebutuhan pangan secara nasional terus mengalami peningkatan. Target Indeks ketahanan pangan nasional tahun 2025 ke tahun 2029 yaitu 73,2 ke 82,0. Kabupaten Luwu dalam dalam Peraturan Bupati Nomor 832 Tahun 2023 menetapkan lahan sawah seluas 34.238,7 Ha untuk memastikan jumlah produksi pangan kabupaten Luwu dapat terus meningkat. Peningkatan produksi ini diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Luwu sebagai salah satu penyanggah pangan nasional ke depannya.

Ketersediaan infrastruktur penunjang untuk mengoptimalkan posisi strategis kabupaten Luwu sebagai wilayah yang mendukung kawasan disekitarnya cukup memadai. Kabupaten Luwu dilintasi oleh jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Tengah. Keberadaan infrastruktur tersebut diperkuat dengan adanya pengembangan pelabuhan di Taddette, Ulo-Ulo, dan Balambang. Selain itu, Bandara Bua di Kabupaten Luwu terus mengalami pengembangan kapasitasnya dari tahun ke tahun. Seluruh infrastruktur tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Luwu dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

2.1.2. Kondisi Topografi

Secara umum wilayah Kabupaten Luwu memiliki ketinggian wilayah diatas 1000 mdpl dengan luas wilayah sekitar 59.249,94 Ha atau 19,55% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, Hal tersebut

memberikan gambaran bahwa morfologi Kabupaten Luwu memiliki kondisi beragam, mulai dari morofologi data, berombak/bergelombang lemah, bergelombang kuat, bergelombang sedang, berbukit, bergunung-gunung hingga memiliki sungai. Disisi lain terdapat wilayah dengan ketinggian dibawah 1000mdpl dengan luas 243.763,55 Ha atau 80,45% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu. Secara rinci terkait ketinggian wilayah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

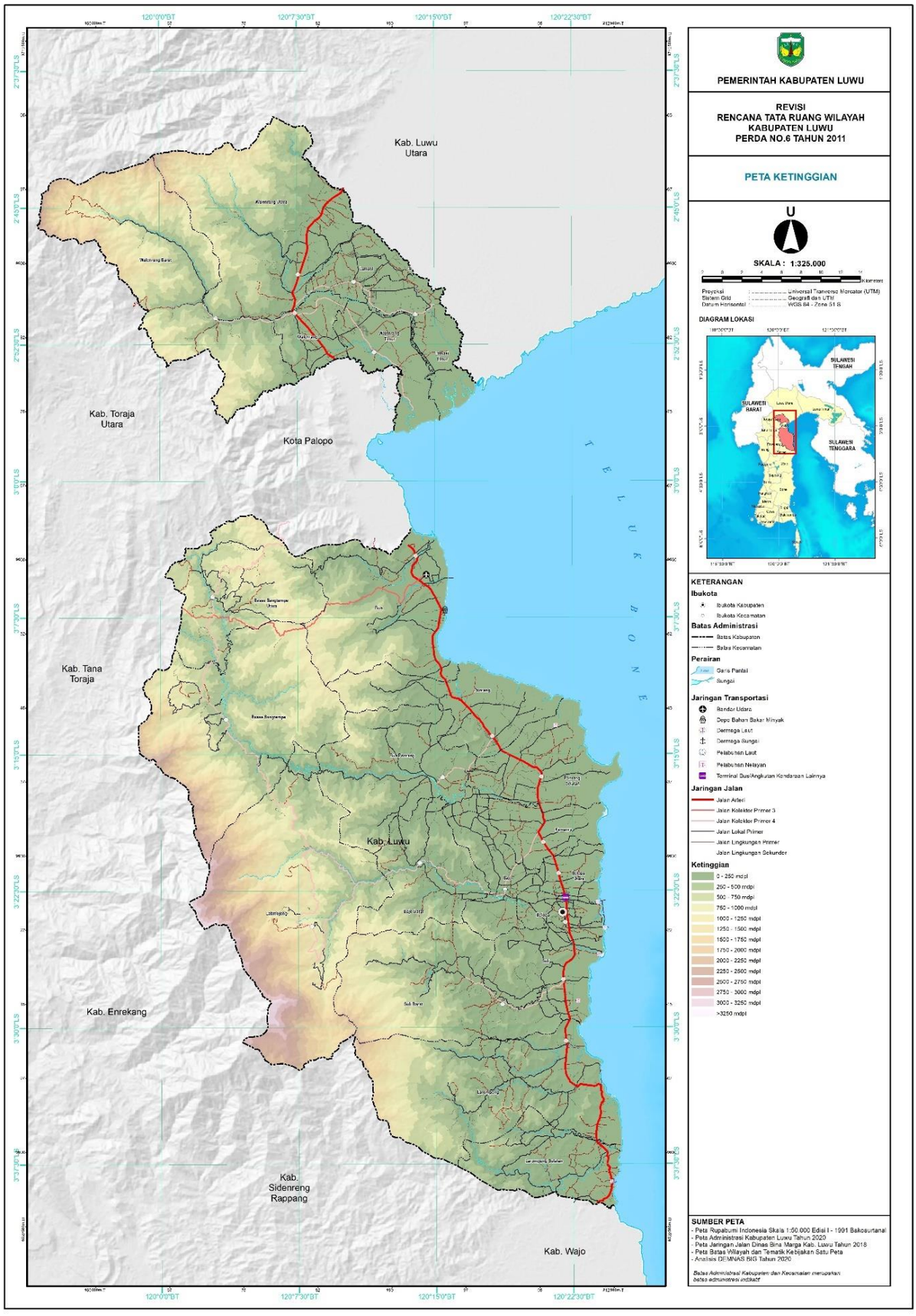
Tabel 2.1.

Topografi di Kabupaten Luwu ditinjau dari Ketinggiannya

No	Kecamatan	Elevasi							Total (Ha)
		0-300	300-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500	
1	Bajo	4.805,21	260,43	67,83					5.133,47
2	BajoBarat	6.401,18	2.111,05	1.819,84	216,74				10.548,80
3	BasseSangtempe	1.720,52	5.105,40	11.406,14	4.416,11	2.559,25	1.040,02		26.247,44
4	BasseSangtempeUtara	273,85	4.514,74	15.197,61	2.443,43	10,54			22.440,17
5	Belopa	3.228,90							3.228,90
6	BelopaUtara	3.058,47							3.058,47
7	Bua	9.787,45	2.503,33	4.012,56	882,91				17.186,24
8	BuaPonrang	10.048,22	2.098,91	2.182,73	14,00				14.343,85
9	Kamanre	5.721,62							5.721,62
10	Lamasi	4.393,87							4.393,87
11	LamasiTimur	6.404,05							6.404,05
12	Larompong	13.063,74	4.843,01	3.307,23	2.166,12	888,58	113,04		24.381,73
13	LarompongSelatan	10.076,28	802,25	34,65					10.913,19
14	Latimojong	1.224,35	3.190,82	8.997,46	6.788,68	6.481,73	5.117,47	4.085,08	35.885,60
15	Ponrang	8.818,98	667,36	1.365,68	287,11				11.139,13
16	PonrangSelatan	8.984,25							8.984,25
17	Suli	8.123,68	548,74	27,99					8.700,42
18	SuliBarat	6.715,34	2.602,68	5.210,00	2.735,10	938,14	45,73		18.246,98
19	Walenrang	4.656,37	950,62	1.396,61	644,17				7.647,77
20	WalenrangBarat	1.510,01	3.171,55	9.322,74	6.439,18	5.069,16	2.247,10		27.759,75
21	WalenrangTimur	6.314,39	8,90						6.323,30
22	WalenrangUtara	9.115,26	4.175,06	7.413,63	2.696,48	792,76	131,31		24.324,50
TOTAL		**134.446,00**	**37.554,86**	**71.762,68**	**29.730,04**	**16.740,15**	**8.694,67**	**4.085,08**	**303.013,48**

Sumber : KLHS Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2023-2042.

Gambar 2.1.
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Luwu



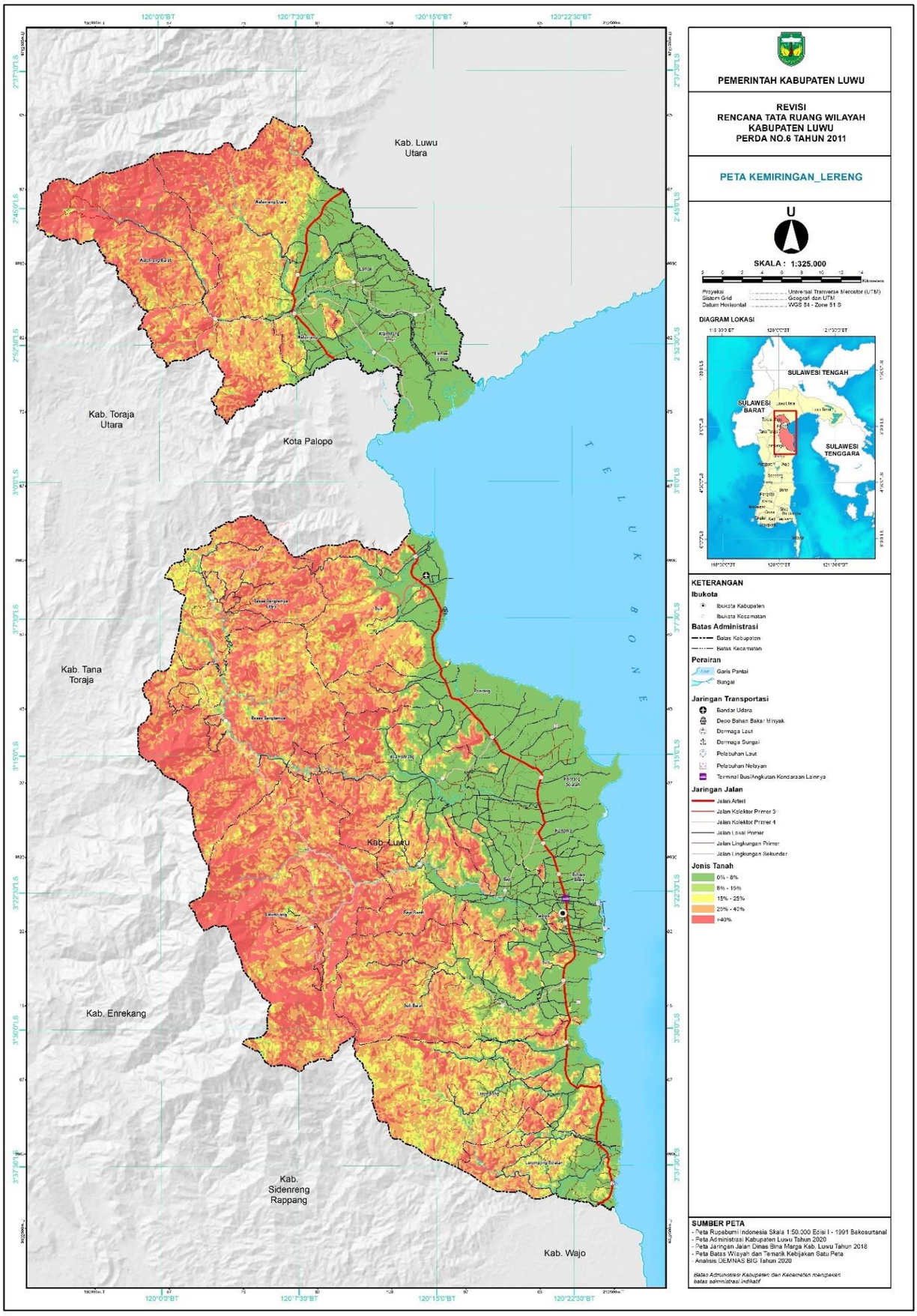
Wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 40.098,28 Ha atau 13.23% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan dibawah 40% dengan luas 262.915,21 Ha atau 86,76% dari total Luas Wilayah Kabupaten Luwu. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.2.
Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Kemiringannya

No	Kecamatan	Kelerengan						Total(Ha)
		(0-2) %	(2-5) %	(5-15) %	(15-30) %	(30-40) %	(>40) %	
1	Bajo	2.413,27	777,70	611,41	921,74	180,03	229,33	5.133,47
2	Bajo Barat	539,67	627,49	2.706,90	3.931,92	1.505,26	1.237,55	10.548,80
3	Basse Sangtempe			1.771,09	11.651,97	6.188,59	6.635,79	26.247,44
4	Basse Sangtempe Utara		84,93	4.583,52	12.325,16	3.913,45	1.533,10	22.440,17
5	Belopa	2.692,95	150,34	138,77	246,84			3.228,90
6	Belopa Utara	2.938,01	36,99	83,47				3.058,47
7	Bua	3.785,40	1.489,23	2.131,82	6.423,27	2.170,73	1.185,79	17.186,24
8	Bua Ponrang	3.172,35	2.156,67	2.864,46	3.871,73	1.081,80	1.196,85	14.343,85
9	Kamanre	5.673,30	46,70	1,62				5.721,62
10	Lamasi	4.118,80	69,77	130,17	75,13			4.393,87
11	Lamasi Timur	6.404,05						6.404,05
12	Larompong	1.582,24	830,11	6.297,50	13.313,39	1.718,08	640,40	24.381,73
13	Larompong Selatan	3.670,78	784,61	3.615,89	2.604,44	237,26	0,22	10.913,19
14	Latimojong			1.119,12	11.582,08	9.878,78	13.305,62	35.885,60
15	Ponrang	6.777,03	475,42	736,15	1.924,69	684,60	541,24	11.139,13
16	Ponrang Selatan	8.887,63		96,61				8.984,25
17	Suli	4.893,96	334,11	848,58	2.198,09	376,42	49,26	8.700,42
18	Suli Barat	733,43	482,17	3.184,08	9.509,13	2.700,52	1.637,64	18.246,98
19	Walenrang	2.244,09	460,72	944,56	2.964,74	783,65	250,02	7.647,77
20	Walenrang Barat	6,13		922,21	12.610,38	5.513,63	8.707,41	27.759,75
21	Walenrang Timur	6.193,91		0,25	97,37	31,78		6.323,30
22	Walenrang Utara	3.470,08	502,03	3.089,32	11.093,37	3.221,64	2.948,07	24.324,50
Total (Ha)		**70.197,07**	**9.308,99**	**35.877,50**	**107.345,44**	**40.186,21**	**40.098,28**	**303.013,48**

Sumber: KLHS Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2023-2042.

Gambar 2.2.
Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Luwu



2.1.3. Kondisi Geologi

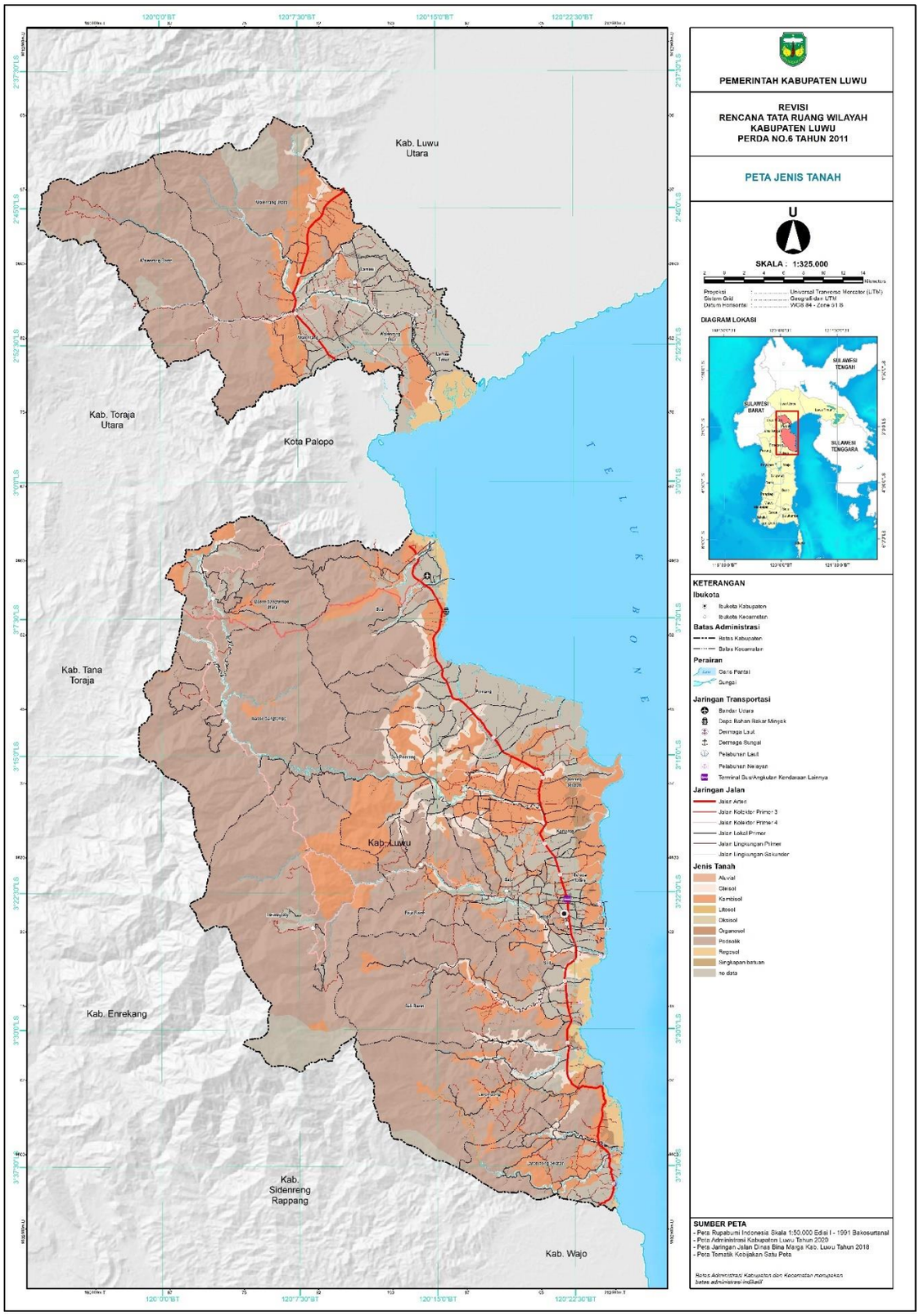
Sumber daya tanah wilayah Kabupaten Luwu bervariasi ditiap kecamatan baik yang tersebar di daerah pegunungan ataupun di daerah pesisir. Lingkup daerah pesisir cenderung memiliki bentuk tanah datar dengan jenis tanah aluvial coklat kekelabuan di Kecamatan Larompong. Kecamatan Larompong juga terdapat daerah perbukitan dengan jenis tanah gromusol kelabu dan mediteran coklat kelabuan dengan struktur bahan induk batu gamping & serpih. Daerah sepanjang pesisir memiliki jenis tanah yang hampir sama dari selatan Larompong hingga utara Kecamatan Bua dari garis pantai dan bagian daratan utama banyak endapan lumpur dan menjadi daerah pemanfaatan pertambakan. Permukaan tanah yang berbukit berada diketinggiad di atas 60 meter di Kecamatan Bajo Barat dengan jenis tanah gromusol kelabu dengan batuan induk batu gamping dan serpih merupakan daerah pemanfaatan perkebunan untuk komoditas unggulan Luwu yaitu Kakao. Kondisi yang sama juga terdapat di Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Besseng Tempe yang berada diketinggian diatas 100 meter memiliki jenis tanah mediteran coklat kelabuan, grumusol kelabu, aluvial hidromorf (daerah basah), aluvial hidromorf (daerah basah), podsolik merah kekuningan. Berikut ini data potensi jenis tanah di wilayah Kabupaten Luwu.

2.1.4. Formasi Jenis Tanah dan Luas Penyebarannya Di Kabupaten Luwu

NO.	JENIS TANAH	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Aluvial	0,61	0,00
2	Gleisol	14.333,55	4,93
3	Kambisol	49.301,50	16,95
4	Litosol	32,27	0,01
5	Oksisol	3,97	0,00
6	Organosol	1.228,05	0,42
7	Podsolik	167.182,71	57,47
8	Regosol	4.760,48	1,64
9	Singkapan Batuan	1,39	0,00
10	No Data	54.064,24	18,58
TOTAL		**290.908,78**	**100,00**

Sumber: Perda Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2022-2042.

Gambar 2.3.
Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Luwu



Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo.

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu:

- Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan Latimojong.
- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur.
- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

2.1.4. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat kearah timur atau ke wilayah Teluk Bone.

Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman (Noling) melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 – 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

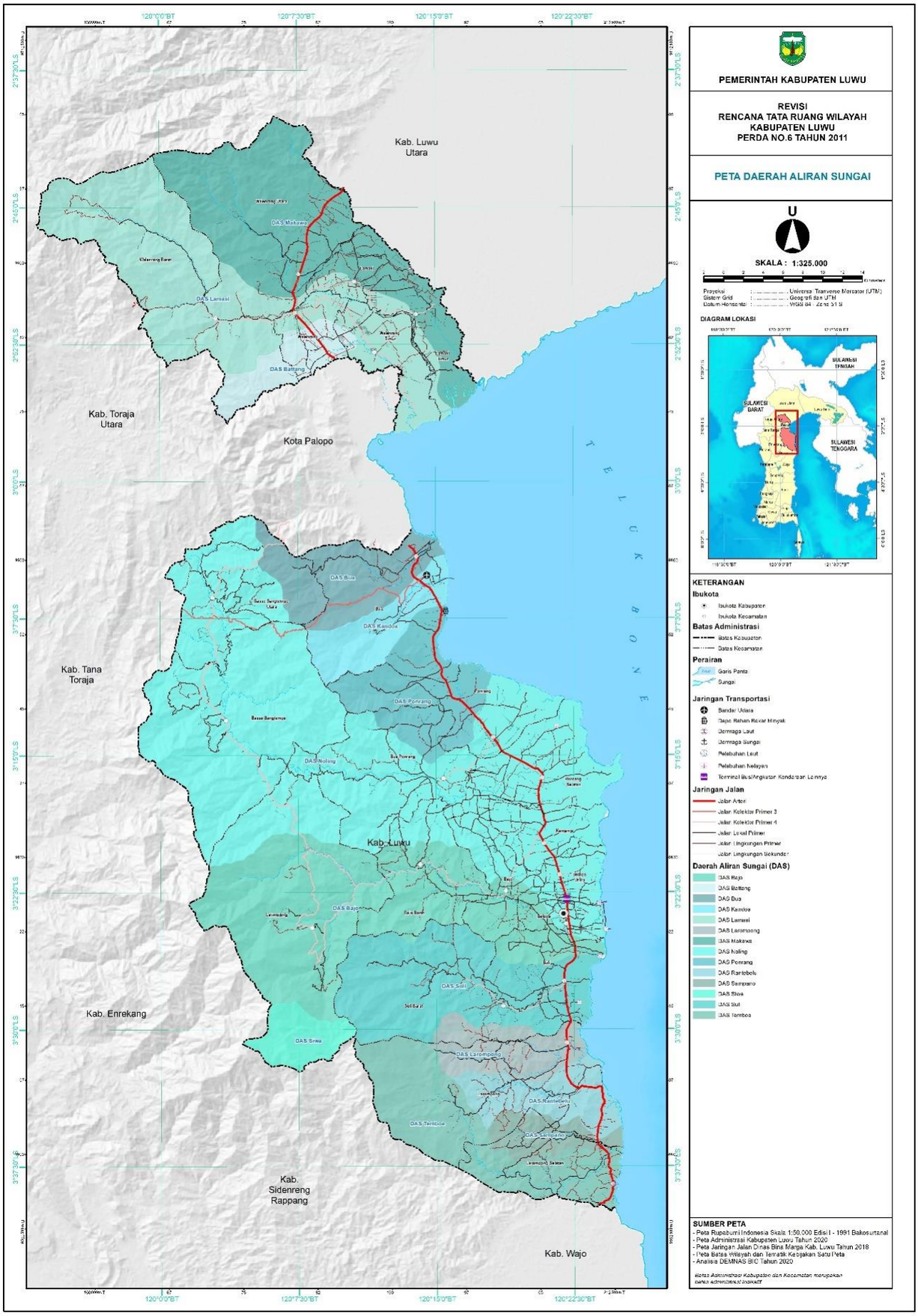
Tabel 2.3.
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Luwu

NO.	DAS	SWS	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	DAS Bajo	WS Pongpengan-Larona 05-14	37.668,24	12,95
2	DAS Battang	WS Pongpengan-Larona 05-15	5.721,21	1,97
3	DAS Bua	WS Pongpengan-Larona 05-16	11.166,15	3,84
4	DAS Kandoa	WS Pongpengan-Larona 05-17	6.812,21	2,34
5	DAS Lamasi	WS Pongpengan-Larona 05-18	36.334,37	12,49
6	DAS Larompong	WS Pongpengan-Larona 05-19	7.312,70	2,51
7	DAS Makawa	WS Pongpengan-Larona 05-20	29.374,21	10,10
8	DAS Noling	WS Pongpengan-Larona 05-21	88.503,07	30,42
9	DAS Ponrang	WS Pongpengan-Larona 05-22	12.744,54	4,38
10	DAS Rantebelu	WS Pongpengan-Larona 05-23	7.404,30	2,55
11	DAS Sampano	WS Pongpengan-Larona 05-24	4.284,10	1,47
12	DAS Siwa	WS Pongpengan-Larona 05-25	4.521,74	1,55

NO.	DAS	SWS	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
13	DAS Suli	WS Pongpengan-Larona 05-26	22.001,66	7,56
14	DAS Temboe	WS Pongpengan-Larona 05-27	17.060,28	5,86
TOTAL			**290.908,78**	**100,00**

Sumber: Perda Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2022-2042.

Gambar 2.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Luwu



2.1.5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 41,1 mm per tahun hingga 982,10 mm per tahun.

Wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan April sampai dengan bulan September. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperatur udara pada tahun 2023 berkisar dari 20,60°C sampai dengan 30,60°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 20°C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 1,7 knot sampai 18 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehinga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.

Keadaan Iklim di Kabupaten Luwu, Tahun 2024

No	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Curah Hujan (mm/ tahun)	Hari Hujan (hari)
		Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max		
1	Januari	23,60	27,83	35,60	53,00	81,24	98,00	0,00	0,98	6,70	444,50	18,00
2	Februari	23,40	27,65	34,70	56,00	82,62	98,00	0,00	1,01	6,20	736,90	24,00
3	Maret	23,70	28,20	35,20	57,00	82,86	98,00	0,00	0,81	5,10	353,20	24,00
4	April	23,40	27,81	34,60	58,00	84,28	98,00	0,00	0,88	5,70	467,60	27,00
5	Mei	23,40	27,65	34,20	56,00	85,11	98,00	0,00	0,77	5,10	751,50	29,00
6	Juni	22,40	27,20	33,80	57,00	83,66	98,00	0,00	0,65	4,60	386,20	26,00
7	Juli	22,10	26,40	32,60	66,00	85,83	98,00	0,00	0,68	4,12	736,80	30,00
8	Agustus	22,40	26,44	32,70	74,25	83,17	92,25	0,00	0,61	10,20	319,60	31,00
9	September	22,00	27,71	34,80	65,50	76,87	87,00	0,00	0,74	4,63	110,10	30,00
10	Oktober	23,20	28,27	35,20	70,50	77,53	88,00	0,00	1,01	5,14	245,00	31,00
11	November	22,80	28,26	36,40	73,50	79,79	85,75	0,00	1,06	5,66	403,90	30,00
12	Desember	23,10	27,55	34,80	74,00	82,32	92,00	0,00	0,82	5,66	501,90	31,00

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, 2025.

2.1.6. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Luwu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ada beberapa sektor sumber daya alam yang potensial dan telah menjadi sumber PDRB di kabupaten Luwu yakni sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Pertambangan.

- **Sektor Pertanian dan perkebunan.** Kabupaten Luwu memiliki lahan subur yang cocok untuk berbagai komoditas pertanian, perkebunan serta tanaman hortikultura, seperti padi, jagung, kakao, cengkeh, kopi, durian dan lainnya. Peningkatan produktivitas pertanian dapat dicapai dengan menerapkan praktik berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik serta teknik irigasi yang lebih efisien. Pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan akses pasar, juga menjadi faktor penting dalam

meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.1.

Produksi Perkebunan Kabupaten Luwu 2020-2024

No	Uraian	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Dalam	3.700,00	700	1.001	1.000,19	999,95
2	Kelapa Hibrida	200	158	188	187,35	187,36
3	Kopi Robusta	455	489	513	510,08	510,08
4	Kopi Arabika	1.965	1.965	894	866,37	852,74
5	Cengkeh	8.000	9.261	9.41	9.547,34	9.525,79
6	Kakao	22.000	22.000	13.69	13.137,47	13.139,17
7	Pala	31	46	49,4	51,06	51,06
8	Lada	290	409	411	413,38	410,78
9	Kapuk	3	1	1	1,29	1,22
10	Kemiri	68	62,94	64	64,21	64,22
11	Jambu Mente	330	205	247	207,92	207,77
12	Kelapa Sawit	300	428	58	298,8	299,8
13	Sagu	920	663	701	675,01	675,01
14	Aren	179	158	178	179,38	179,57
15	Pinang	5	7	7	6,88	6,88
16	Tembakau	5	10	7,15	5,86	87,83

(Sumber : Data Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2025)

Potensi sektor pertanian kabupaten Luwu ini diarahkan agar dapat menjadi penyanggah utama pangan yang ada di Sulawesi selatan. Tanah yang subur, sumber air sungai yang melimpah serta lahan yang luas membuat sektor pertanian menjadi sumber pendapatan utama dari masyarakat kabupaten Luwu. Luas lahan sawah dikabupaten Luwu adalah 34.238,70 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 22.117,92 Ha dan Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.935,44 Ha. Dengan luas area tersebut, Kabupaten Luwu mampu memproduksi padi dengan hasil yang relatif meningkat setiap tahun.

Tabel 2.2.

Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	404.918,08	443.642,36	463.890,52	453.643,82	443.417,52
2	Jagung	31.068,51	50.640,54	33.288,60	26.940,99	28.076,71
3	Ubi Kayu	940,4	514,4	466,2	547,4	446,6
4	Ubi Jalar	1.097,80	651,5	713,07	759,2	412,11
5	Kacang Tanah	43,5	31,6	28,2	35,6	23,7
6	Kacang Kedelai	-	1,5	120,6	16,5	0
7	Kacang Hijau	34,5	14,5	1,5	10,5	7

(Sumber : Data Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2025)

Data di atas menujukan adanya fluktuasi jumlah produksi pada komuditas padi, jagung, ubi, dan kacang di Kabupaten Luwu terutama dua tahun pencatatan terakhir. Hal tersebut terkjadi akibat adanya fenomena iklim global seperti *La Nina* dan *El Nino*, adanya serangan hama, bencana alam, ketersediaan dan pemerataan distribusi pupuk yang belum maksimal, ketersediaan bibit unggul, kondisi inftrastruktur pertanian yang belum maksimal serta ketersediaan alat dan mesin pertanian belum merata ke petani. Namun dengan volume produksi yang belum maksimal tersebut, wilayah kabupaten Luwu masih surplus dan masih mampu memenuhi kebutuhan domestik serta kebutuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat potensi pertanian yang ada sekarang, kabupaten Luwu masih berada pada kondusi produktivitas yang masih belum maksimal. Oleh karena itu, Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang akan menjadi isu strategis yang perlu di ditingkatakan kinerjanya pada periode Rencana Jangka Menengah ini. Sehingga sumber daya alam yang melimpah dalam wilayah kabupaten Luwu dapat dikelolah secara optimal dan berkelanjutan.

- **Sektor Perikanan.** Potensi perikanan di Kabupaten Luwu sangat menjanjikan, terutama di wilayah pesisir. Pengembangan budidaya perikanan dapat dilakukan dengan menerapkan metode yang berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengelolaan stok ikan yang baik. Hal ini akan

memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Posisi kabupaten Luwu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masuk dalam wilayah Afirmasi Teluk Bone. Sehingga, pada periode ini kabupaten Luwu diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan-dukungan yang bersumber dari pusat. Kinerja pemerintah pusat diarahkan untuk langsung menginterfensi masyarakat kabupaten Luwu yang mau mengelolah sektor perikanan.

Merespon kebutuhan daerah dan rencana Pembangunan nasional, kabupaten Luwu menyiapkan rancana di bidang perikanan melalui dukungan kebijakan saran dan prasarana penunjang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Penyadiaan alat tangkap, bibit, pakan, gudang dan prasarana lainnya menjadi agenda pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan untuk mendoron industri sektor ini juga merupakan satu kesatuan rangkaian yang menjadi agenda pengelolahan yang berkelanjutan bagi pemerintah kabupaten Luwu pada periode lima tahun kedepan.

Grafik 2.1.
Produksi dan Komsumsi Ikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Produksi Perikanan**					
	Produksi perikanan (ton)	644,286.15	645,919.16	666,829.06	666,787.25	671,054.41
	Target Daerah (Ton)	641,505.99	659,972.12	679,923.92	703,536.37	729,274.81
	Persentase Produksi Perikanan					
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap (Kg/Trip)	133.30	141.23	119.93	147.87	150.22
3.	Produktivitas Perikanan Budidaya (Kg/m2)	6.66	7.30	7.80	7.86	8.04
4.	**Konsumsi Ikan**					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	54.01	54.21	54.84	55.89	56.26

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Target Daerah (Kg)	50.36	54.65	55.96	56.96	57.26
	Persentase Konsumsi Ikan	107.25	99.01	98	98.12	98.25

(Sumber : Data Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu 2025)

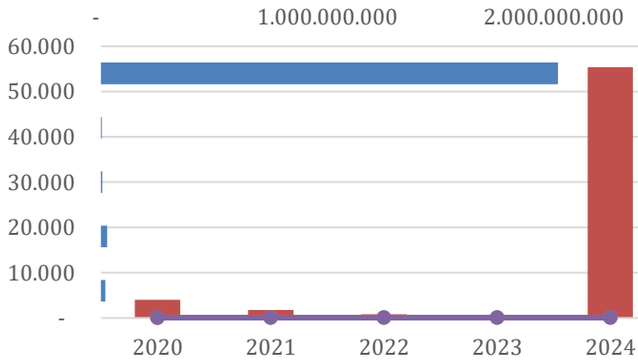
Data Produksi ikan di kabupaten Luwu menjukan adanya peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2024 produksi ikan meningkat 4,16% dari tahun 2020. Disisi lalin, komsumsi ikan kabupaten Luwu juga mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian ini menunjuka bahwa kabupaten Luwu merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang perikanan. Data peningkatan produksi perikanan serta peningkatan konsumsi ikan menjadi indikator positif adanya potensi besar pada sektor ini sehingga pemerinta kabupaten Luwu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kedepan sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Luwu secara khusus dan masyarakat provinsi Sulawesi selatan secara umum.

- **Sektor Pariwisata**. Kabupaten Luwu adalah wilayah yang memiliki keindahan alam yang melimpah. Fitur-fitur alam yang dimiliki oleh kabupaten Luwu seperti pegunungan, sungai, dan pantai dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. Destinasi wisata yang ada dalam wilayah kabupayten Luwu digolongkan menjadi beberapa objek wisata diantaranya objek wisata Pantai, objek wisata Alam, objek wisata Sejarah, objek wisata Budaya, objek wisata seni, objek wisata Agrowisata, serta objek wisata buatan. Dengan banyaknya opsi objek wisata yang ada di kabupaten Luwu, maka sektor ini memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah lainnya yang perlu dikelolah secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yang memperhatikan dampak lingkungan dan melibatkan masyarakat

lokal. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata juga akan menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Grafik 2.2.
Capaian Sektor Pariwisata Kabupaten Luwu tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	4.000	1.800	800	308	55.354
PAD sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	19.790.000	28.000.000	5.920.000	3.869.000	2.018.963.251
Jumlah Objek Wisata yang dikelola	4	4	4	4	4
Jumlah Objek Wisata	65	66	66	66	66

Sumber : Data Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu 2025.

Data capaian sektor pertambangan terkait jumlah kunjungan wisata dengan penerimaan sektor wisata kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 di atas menunjukan adanya fluktuasi yang besar terutama pada tahun 2020 sampai ke 2023 dengan data capaian tahun 2024. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 ke tahun 2023 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata sebanyak 4000 orang kemudian turun menjadi 308 orang pada tahun 2023. Akibatnya, penerimaan sektor pariwisata juga mengalami penurunan. Penurunan kinerja bidang Pariwisata terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang baru dinayatan berakhir di tahun 2023 melalui Keppres Nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan status pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Sektor pariwisata baru berjalan normal di tahun 2024 sehingga jumlah pariwisata meningkat tajam dari 308 pengunjung pada tahun 2023 menjadi 55.354 pengunjung di tahun 2024.

Pengelolaan pariwisata kabupaten Luwu belum memperoleh perhatian yang maksimal. Berdasarkan data capaian sektor

pariwisata, jumlah objek wisata di kabupaten Luwu tercatat 66 objek pada tahun 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan hanya satu objek wisata dalam lima tahun terakhir. Namun jika dilihat jumlah wisata yang dikelolah pemerintah dan swasta hanya empat lokasi. Satu lokasi dikelola oleh pemerintah dan tiga dikelolah oleh swasta. Capaian ini menunjukan bahwa masih banyak objek wisata yang belum mendapat pengelolaan sehingga potensi yang ada belum diberdayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Sektor Industri dan Pertambangan**. Kabupaten Luwu memiliki potensi pengembangan yang sangat baik pada sektor industri dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayan ini harus digerakan menuju ke arah industrialisasi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Hasil alam dari sektor perkebunan dan pertanian, kelautan dan perikanan serta kandungan mineral-mineral yang bernilai tinggi harus mendapat pengelolaan lebih jauh lagi. Namun, pengelolaan sektor industri dan pertambangan harus dilakukan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan peneratapan konstruksi sistem yang baik, demi meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya.

  Untuk menjawab tantangan kegiatan Industri serta eksplorasi mineral bumi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu telah menyediakan wilayah yang cukup dan memang memiliki potensi. Kecamatan Bua, Latimojong dan beberapa kecamatan lainnya telah diatur pola ruangnya agar kedepan tidak terjadi tumpang tindih zonasi wilayah sebagai wujud dari penataan ruang yang baik.

  Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, Kabupaten Luwu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam membangun daerah yang lebih baik. Dengan demikian, Kabupaten Luwu tidak hanya akan menjadi daerah yang

maju secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang

2.1.7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu terkait daya dukung Lingkungan yang ada di wilayah kabupaten Luwu bahwa ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2026-2029 yakni :

1. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Luwu hanya melaksanakan 15 tujuan yang terbagi dalam 212 indikator, yaitu:
    a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu: pilar sosial 53,13% (51 dari 96 indikator), pilar ekonomi sebesar 48,21% (27 dari 56 indikator), pilar hukum sebesar 52,38% (11 dari 21), dan pilar lingkungan sebesar 27,03% (10 dari 37).
    b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 33 (34,38%), pilar ekonomi 15 (26,79%), pilar lingkungan 9 (24,32%) dan pilar hukum dan tata kelola 5 (23,81%).
    c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan

4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 11 (11,46%), pilar ekonomi 10 (17,86%), pilar lingkungan 11 (29,73%), dan pilar hukum dan tata kelola adalah 4 (19,05%).

d. Indikator TPB yang yang tidak tersedia datanya di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 1 (1,04%), pilar ekonomi 4 (7,14%), pilar lingkungan 7 (18,92%), pilar hukum dan tata kelola adalah 1 (4,76%).

2. Hasil pemeringkatan isu strategis dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan ditetapkan 11 (sebelas) isu TPB prioritas sebagai berikut:
   - TPB 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
   - TPB 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
   - TPB 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
   - TPB 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
   - TPB 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
   - TPB 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
   - TPB 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
   - TPB 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
   - TPB 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

- TPB 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- TPB 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

3. OPD yang sudah melaksanakan TPB berdasarkan Kategori pencapaian TPB sebagai berikut :
   a. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 28 OPD dengan total 101 indikator.
   b. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 18 OPD dengan total 62 indikator
   c. OPD yang belum melaksanakan sehingga belum mencapai target sebanyak 14 OPD dengan total 36 indicator.
   d. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 7 OPD dengan total 13 indikator.
4. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
   a. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
      - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 9 indikator strategis
      - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 3 indikator strategis
   b. Perlu upaya tambahan, meliputi :
      - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 8 indikator strategis
      - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 7 indikator strategis
      - Belum/tidak ada data sebanyak 3 indikator strategis prioritas
5. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
   a. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
      - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 90 isu strategis

- Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 8 indikator strategis

b. Perlu upaya tambahan, meliputi
   - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 43 indikator strategis
   - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target 29 indikator strategis
   - Belum/tidak ada data sebanyak 10 indikator strategis

6. Indikator TPB yang telah mencapai target dengan rekomendasi "diperhatikan" sebanyak 9 indikator dan rekomendasi "dipertahankan" sebanyak 101 indikator.
7. Indikator TPB yang belum mencapai target dengan rekomendasi "ditingkatkan" sebanyak 87 indikator dan rekomendasi "ditambahkan" sebanyak 13 indikator.

2.1.8. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kebutuhan terhadap energi, Air, dan Pangan yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap masyarakat. Pemenuhan atas energi, air dan pangan masyarakat merupakan isu krusial yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap ke tiga hal tersebut harus memenuhi kriteria yang andal dan terjangkau oleh masyarakat. Energi, air dan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat dan industri.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur penunjang, pengaturan harga, dan pengembangan sumber daya terbarukan. Kebijakan yang tepat dan dukungan investasi yang memadai sangat krusial untuk mendorong ketersediaannya dan memastikan akses energi,air dan dapangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sagat berpotensi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan energi, air dan pangan masyarakatnya. Kabupate luwu memiliki delapan sungai besar, lahan sawah dan perkebunan yang

luas, serta daerah pesisir dan garis yang pantai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atas energi, air dan pangan. Namun demikian, pemeanfaatan terhadap potensi tersebut harus terus ditingkatkan secara berasama sama oleh seluruh *stake holder* yang ada.

Indikator-indikator capaiaan Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum merupakan barometer kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir dalam menunjang kebutuhan energi, Air dan Pangan Masyarakat. Upaya kabupaten Luwu dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap energi, air dan Pangan lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

a. Ketahanan Energi

Ketersediaan energi merupakan isu global yang terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam upaya penyediaan kebutuhan energi, pemerintah melalui rancana tata ruang di Sulawesi khususnya di kabupaten Luwu terus melakukan pembangunan guna menyadiakan sumber energi yang baru. Dalam rencana struktur ruang (RTR) sulawesi terdapat rencana sistem jaringan pembangkit tenaga Listrik berupa PLTG dan PLTM di Batusitanduk, PLTM Palangka 1 dan PLTM Rante Balla. Upaya tersebut dalam rangka pemenuhan konsumsi listrik masyarakat yang ada di kabupaten Luwu. Berikut Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024.

Tabel 2.3.

Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Jenis/Item	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pelanggan/*Costumer*	53.331	56.598	59.093	61.761	61.761
Jumlah Penduduk	365.608	367.454	369.820	379.300	379.300
Listrik Terjual/ *Electricity Sold* (Kwh)	83.914.080	n.a	93.291.310	9.489.818.157	9.489.818.157
Daya Terpasang / *Installed Electricity Power* (KW)	29.915.150	n.a	67.601	74.482.502	74.482.502
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)	229,52	n.a	252,26	25.019,29	25.019,29

Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2024.

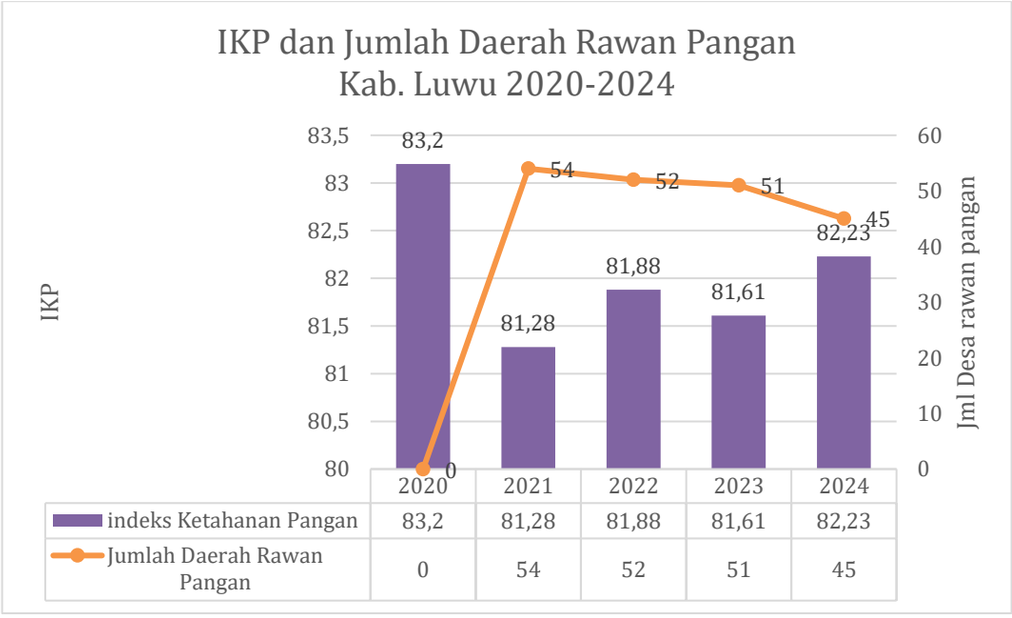
Ketahanan energi mengacu pada kemampuan daerah untuk bertahan dan pulih dari gangguan pasokan energi sambil memastikan penyediaan energi yang handal dan terjangkau secara terus-menerus. Berdasarkan pencatatan data elektrifikasi kabupaten Luwu, jumlah pelanggan Kabupaten Luwu tahun 2023 sebesar 61.761 dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 25.019 Kwh. Adanya peningkatan drastis konsumsi listrik per kapita pada tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya listrik terjual akibat pemakaian besar-besaran dari perusahaan besar. Data pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan adanya peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi listrik kabupaten Luwu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan energi melihat jumlah kebutuhan energi yang terus bertambah.

Disisi lain, pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut telah melakukan upaya-upaya konkret di lapangan agar pasokan listrik untuk masyarakat dapat terus tersedia. Di tahun 2024 sejumlah proyek penyediaan energi listrik di kabupaten Luwu sedang dilakasankan. Dengan memanfaatkan sumber daya air dari sungai yang ada di Kabupaten Luwu, pasokan energi sangat mungkin untuk di sediakan.

b. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kecukupan atas pangan merupan salah satu isu yang harus terus kita capai agar manusia dapat hidup secara berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Luwu terus melakukan upaya dalam rangka penyediaan pangan. Upaya tersebut berupa penyediaan infrastruktur penunjang ketersediaan pangan, pengembangan pangan berkualitas, dan memastikan tersedianya akses yang luas dan terjangkau terhadap pemenuhan pangan seluruh masyarakat.

Grafik 2.3.
Indeks Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2020-2024

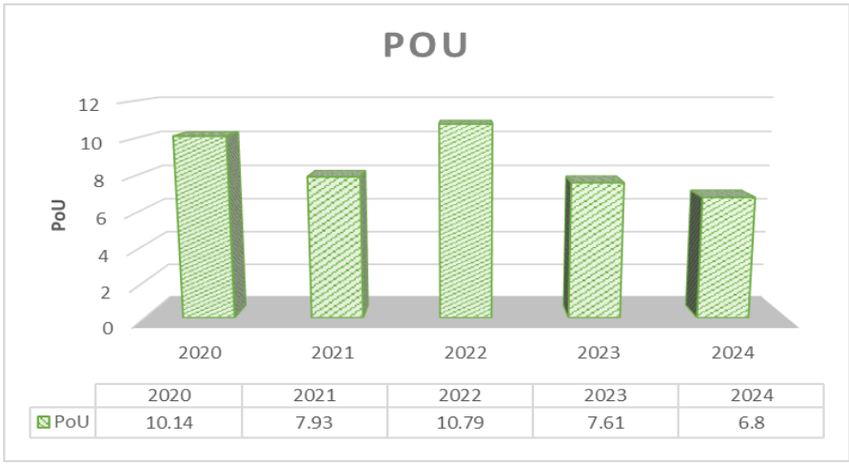


Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2025.

Ketahanan pangan di Kabupaten Luwu dalam kurun lima tahun menunjukan kinerja yang fluktuatif. Capaian tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2020 dimana nilai capaiannya perada pada angka 83,20. Pada skala nasional pada tahun 2024, indeks Ketahan Pangan kabupaten Luwu berada pada urutan 180 dan berada pada level tujuh terbawah di sulawesi selatan. Capaian tersebut mengindikasikan perlu adanya penguatan program untuk menunjang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Luwu kedepannya.

Data jumlah daerah rawan pangan di kabupaten Luwu mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir menunjukan adanya upaya pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah daerah yang mengalami kerawanan pangan. Masalah kerawanan pangan merupakan masalah yang holistik dan multisektor. Perlu adanya kolompok kerja yang bertugas secara terintegrasi agar langkah-langkah yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif. Komitmen dalam pengurangan wilayah rawan pangan merupakan isu yang terus diupayakan untuk mencapai masyarakat Kabupaten Luwu yang unggul

Grafik 2.4.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan
Kab. Luwu Tahun 2020-2024



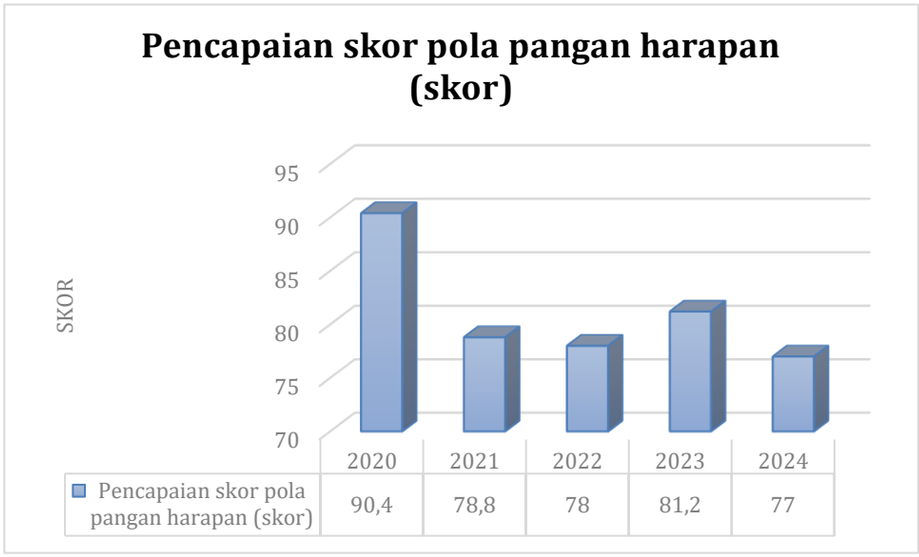
(Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2025)

Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan isu global yang teruang dalam SGDs yang berkaitan dengan targel *Zero Hungry* (Nol Kelaparan) pada tahun 2030. Data dari lima tahun terakhir Terkait Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menunjukan adanya fluktuasi nilai yang cenderung menurun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 di mana capainnya sebesar 10,79 sedangkan angka terendah terjadi di tahun 2024 sebesar 6,8. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian serius secara nasioanal dan kabupaten dalam upaya menurunkan angka stunting di masyarakat. Sehingga, rencana program dalam periode ini juga diarahkan untuk menangani masalah ketidakcukupan konsumsi pangan.

Menurut *Food Agricultural Organisation-Regional Office for Asia and Pacific* (FAO-RAPA), Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat lainnya. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan

bergizi seimbang (maksimal 100). Berikut Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024.

Grafik 2.5.
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu 2025.

Data skor pola pangan harapan menunjukan adanya penurunan dalam lima tahun terakhir. Pencapaian skor ini didasarkan atas aspek keberagam pangan, proporsi komsumsi dan kecukupan gizi. Hasil pencapaian skor pola pangan harapan dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kondisi yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal kecukupan gizi yang sangat erat kaitannya dengan kondisi stunting khususnya bagi balita dan ibu hamil.

c. Ketahanan Air

Dalam rangka tercapainya derajat kesehatan masayarat yang prima, dukungan ketersediaan air merupaka faktor yang sangat penting. Upaya penyedian air baku di kabupaten Luwu terus dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyedia air melalui perluasan jaringan pipa, penyediaan sambungan rumah panambahan jumlah unit layanan serta peningkatan kapasitas pengelolahan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan agar semua masyarakat kabupaten Luwu dapat memperoleh akses terhadap air yang layak. Selain itu, untuk memastikan tercapainya tujuan ini pemerintah terus melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan

monitoring serta evlauasi serta pelaporan capaian secara berkala. Pemantauan terkait kapasitas air baku yang telah ada serta persentase akses rumah tangga terhadap air siap minum perpiaan merupakan hal yang minimal dilakukan oleh pemerintah.

- Kapasitas air baku

  Upaya Peningkatan dan pemantauan kapasitas air baku merupakan langkah yang harus terus dilakukan guna memastikan ketersediaan air untuk masyarakat kabupaten Luwu dapat terus terpenuhi baik kapasitas maupun kualitasnya. Meskipun, kabupaten Luwu merupakan daerah yang memiliki sumber air yang melimpah namun penurunan kapasitas dan kualitas air merupakan tantangan global yang harus terus diperhatikan. Penuruan kualitas lingkungan merupakan salah satu tantangan dalam penediaan air baku sehingga perlu untuk memformulasikan langka-langkah yang tepat dan berkelanjutan terkait aspek penyediaan air baku ini. Berikut tabel data kapasitas air baku kabupaten Luwu.

Tabel 2.4.

Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu

NO	NAMA	AIR BAKU INDUK	JENIS	KAPASITAS (L/DET)	KAPASITAS TERPAKAI (L/DET)
1	SUNGAI SALU BUA	-	Sungai	20	20
2	SUNGAI SUSO	-	Sungai	100	40
3	SUNGAI BALLUTAN	-	Sungai	250	50
4	SUNGAI KOMPI	-	Sungai	100	20
5	SUNGAI TAMPA	-	Sungai	250	20
6	SUNGAI LAROMPONG	-	Sungai	100	50
7	SUNGAI PAKALOLO	-	Sungai	1	30
8	SUNGAI LIMBONG	-	Sungai	250	60
9	SUNGAI BINTURU	-	Sungai	40	20

Sumber : Aplikasi SIMPSPAM.

Potensi sumber daya air kabupaten Luwu masih dapat ditingkatkan lagi. Berdasarkan tabel di atas, tercatat ada sembilan sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku di kabupaten Luwu. Masih ada sejumlah sungai yang belum

dijadikan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten Luwu. Setidaknya tercatat ada sebelas sungai yang cukup besar yang berada di kabupaten Luwu. Sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan air, wilayah ini masih dapat ditingkatkan lebih jauh lagi.

Tabel 2.5.

Jumlah Unit SPAM, Alokasi Air baku Serta Kapasitas Air baku Kabupaten Luwu

*dalam L/detik

Kab.	Jumlah Unit SPAM	Alokasi Air Baku*	Kap. Terpasang *	Kap Produksi *	Kap Distribusi *	Kap Air Terjual *	Idel Cap. Terpasang *	Idel Cap. Terpasang *
Luwu	95	448.51	350.01	311.01	287.27	249.44	90	47

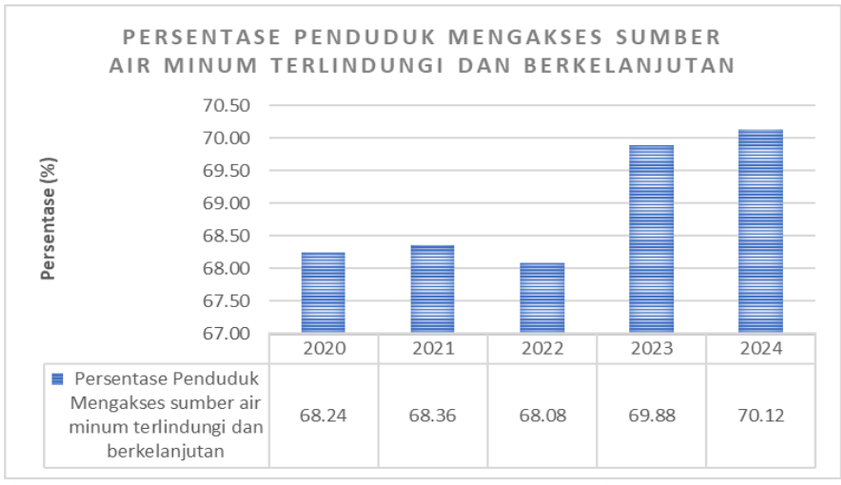
Sumber : Aplikasi SIMPSPAM.

- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Perkotaan merupakan wilayah yang sangat bersinggungan dengan ketersediaan air. Aktifitas di perkotaan yang konsumtif serta intensitas dalam penggunaan air menyebapkan ketersedaiaan air harus terus kontiniu.

Grafik 2.6.

Persentase Penduduk Mengakses Sumber Air Minum Terlindungi dan Berkelanjutan Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2025.

Akses masyarakat terhadap sumber air minum yang terlindungi di kabupaten Luwu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data capaian terakhir di tahun 2024 penduduk yang telah mengakses sumber air minum terlindungi di kabupaten Luwu sebanyak 70.12 persen. Meskipun dalam kurun lima

tahun tersebut telah terjadi peningkatan sebanyak 1,88 persen, namun capaian terakhir di tahun 2024, masih ada 29,88 persen penduduk kabupaten Luwu belum memiliki akses terhadap sumber air minum yan terlindungi. Angka teresebut masih sangat tinggi mengingat kebutuhan akan airminum yang berkualias merupakan kebutuhan dasar manusia.

Untuk menyediakan layanan air minum yang aman bagi masyarakat, salah satu langkah yang mudah ditempuh adalah dengan menyediakan air yang terdistribusi melalui perpipaan. Jaringan pipa merupakan upaya untuk melindungi kualitas air untuk sampai ke masyarakat tidak bercampur dengan kontaminan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan data SIMSPAM Kementerian PUTR bahwa capaian pesentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Perpipaan yaitu sebesar 19.346 Sambungan Rumah serta persentase akses air minum perpipaan sebesar 25,41 persen.

Tabel 2.6.

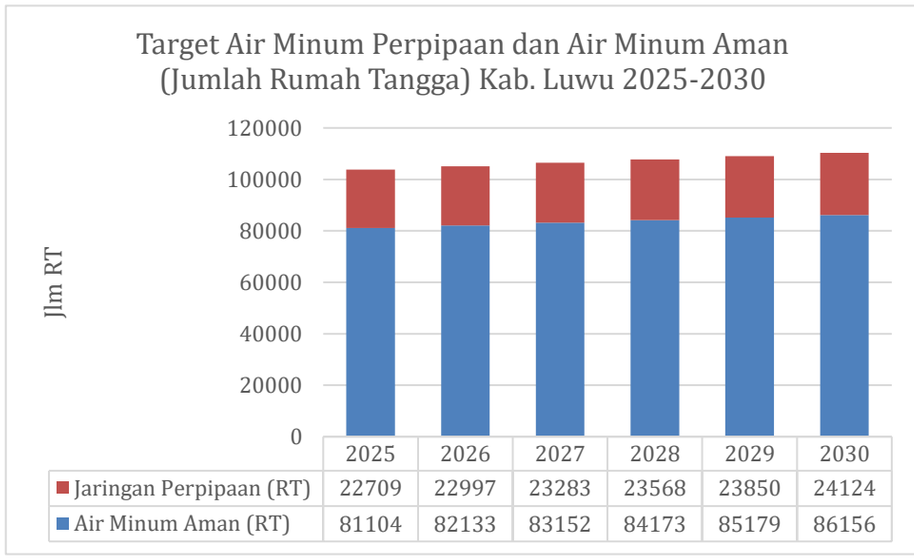
Tabel Jumlah Sambungan Rumah Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Luwu

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH UNIT SPAM	ALOKASI AIR BAKU (Liter/Detik)	KAPASITAS TERPASANG (Liter/Detik)	KAPASITAS PRODUKSI (Liter/Detik)	KAPASITAS DISTRIBUSI (Liter/Detik)	KAPASITAS AIR TERJUAL (Liter/Detik)	IDLE CAP TERPASANG (Liter/Detik)	IDLE CAP PRODUKSI (Liter/Detik)	NRW (%)	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH (SR)		
											PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
1	KEP.SELAYAR	83	244,04	203,84	148,14	137,48	119,36	40,20	55,7	13,18	3.967	11.285	15.252
2	BULUKUMBA	129	492,68	350,68	226,73	162,74	126,65	142,00	123,95	22,18	7.281	12.410	19.691
3	BANTAENG	54	473,81	472,13	351,80	277,20	149,62	1,68	120,33	46,02	14.470	11.466	25.936
4	JENEPONTO	82	263,76	263,76	245,76	221,87	204,68	-	18,00	7,75	9.596	15.372	24.968
5	TAKALAR	57	244,47	241,97	193,04	182,64	145,23	2,50	48,93	20,48	11.089	14.378	25.467
6	GOWA	101	807,55	787,05	695,98	530,32	364,34	20,50	91,07	31,30	41394	9.877	51271
7	SINJAI	70	340,82	320,82	278,82	272,68	271,72	20,00	42,00	0,35	14.224	10.837	25.061
8	MAROS	61	498,93	378,03	348,82	341,09	238,02	120,90	29,21	30,22	19.861	7.215	27.076
9	PANGKEP	53	277,57	227,57	161,20	145,94	108,61	50,00	66,37	25,58	4.548	11.171	15.719
10	BARRU	40	312,29	310,71	188,51	147,79	106,03	1,58	122,20	28,26	9.535	5.924	15.459
11	BONE	124	1.015,53	392,53	285,03	235,03	187,16	623,00	107,50	20,37	14.773	8.027	22.800
12	SOPPENG	39	655,61	445,06	393,02	373,05	220,37	210,55	52,04	40,93	8.202	6.980	15.182
13	WAJO	124	448,35	445,23	399,31	347,70	273,68	3,12	45,92	21,29	18.060	12.667	30.727
14	SIDRAP	87	780,65	260,65	217,65	184,46	145,94	520,00	43,00	20,88	6.056	10.471	16.527
15	PINRANG	84	263,40	281,90	149,40	124,68	120,10	- 18,50	132,50	3,67	561	10.173	10.734
16	ENREKANG	87	477,66	402,66	334,66	311,21	288,79	25,00	68,00	7,20	6.603	19.105	25.508
17	LUWU	95	448,01	358,01	311,01	287,27	249,44	90,00	47,00	13,17	8.447	10.899	19.346
18	TANA TORAJA	145	536,00	534,00	489,70	338,45	246,07	2,00	44,30	27,30	5.138	23.164	28.302
19	LUWU UTARA	103	363,59	375,13	337,82	317,12	231,83	- 11,54	37,31	26,90	5.750	13.924	19.674
20	LUWU TIMUR	46	588,77	268,77	222,00	179,64	129,14	320,00	44,77	28,11	11.289	13.635	24.924
21	TORAJA UTARA	93	251,55	251,05	229,52	186,61	133,93	0,50	21,53	28,23	3.752	17.048	20.800
22	MAKASSAR	71	3.482,60	3.466,80	3.397,80	2.967,61	1.633,70	15,80	69,00	44,95	174.585	140	174.725
23	PAREPARE	1	342,00	342,00	232,00	230,00	147,21	-	110,00	36,00	27.202	62	27.264
24	PALOPO	21	1.477,40	579,34	522,34	511,84	332,50	898,06	57,00	35,04	38.481	3.682	42163
	SULAWESI SELATAN	1.850	15.037,04	11.959,69	10.360,06	9.014,42	6.174,12	3.077,35	1.599,63	31,51	464.664	259.912	724.576

Sumber : SIMSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Penyedian layanan air minum perpipaan dalam rencana Pembangunan Kabupaten Luwu harus terus ditingkatkan. Melihat capaian kinerja penyediaan layanan air minum perpipaan di atas, perlu adanya langkah penetapan target rumah tangga lima tahun ke depan. Target ini merupakan upaya untuk mengukur sejauh mana kineja dalam upaya penyediaan air bersih yang aman kepada masyarakat di kabupaten Luwu selama lima tahun mendatang.

Grafik 2.7.
Target Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum
Tahun 2025-2030



Sumber: Data perencanaan Dinas PUTR Kab. Luwu.

Akses terhadapa sumber air minum terlindungi merupakan salah satu Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Target ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap target capaain nasional dan provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menyediakan layanan air minum yang berkualitas, pemerintah dapat menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Luwu.

Ketersediaan air minum yang berkualitas memerlukan pemantauan yang intensif guna menyediakan hasil data pantau yang lebih akurat. Pemantauan berkala ini bertujuan untuk menvalidasi sekaligus melakukan control terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh Masyarakat di lapangan.

Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) memiliki urgensi kritis sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman kesehatan masyarakat akibat konsumsi air tercemar. Data dari survei ini menjadi fondasi ilmiah untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan krisis air bersih, terutama di wilayah rentan seperti kawasan industri, daerah pesisir, atau lokasi dengan sanitasi buruk. Dengan mendeteksi kontaminan berbahaya seperti bakteri E.coli, logam berat, atau zat kimia beracun, pemerintah dapat segera melakukan intervensi tepat sasaran - mulai dari distribusi filter air darurat hingga pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Tanpa survei

berkala ini, ribuan rumah tangga berisiko terpapar penyakit bawaan air seperti diare kronis, gangguan ginjal, bahkan keracunan logam berat yang berdampak jangka panjang pada generasi penerus.

SKAMRT memegang peran strategis dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dan pencapaian target SDGs. Survei ini tidak hanya menyelamatkan nyawa dari ancaman langsung penyakit akibat air, tetapi juga menjadi basis data untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, alokasi anggaran prioritas, dan penguatan sistem surveilans kesehatan lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim yang memperparah krisis air bersih, data SKAMRT menjadi penentu kebijakan adaptasi di tingkat komunitas hingga nasional. Urgensinya semakin kentara mengingat air minum yang terkontaminasi seringkali tidak menunjukkan tanda fisik yang kasat mata, sehingga hanya melalui survei ilmiah inilah ancaman kesehatan tersembunyi dapat terungkap dan ditangani sebelum berkembang menjadi wabah yang lebih luas.

Grafik 2.8.
Kesiapan Akses Air Minum Perpipaan Kabupaten Luwu

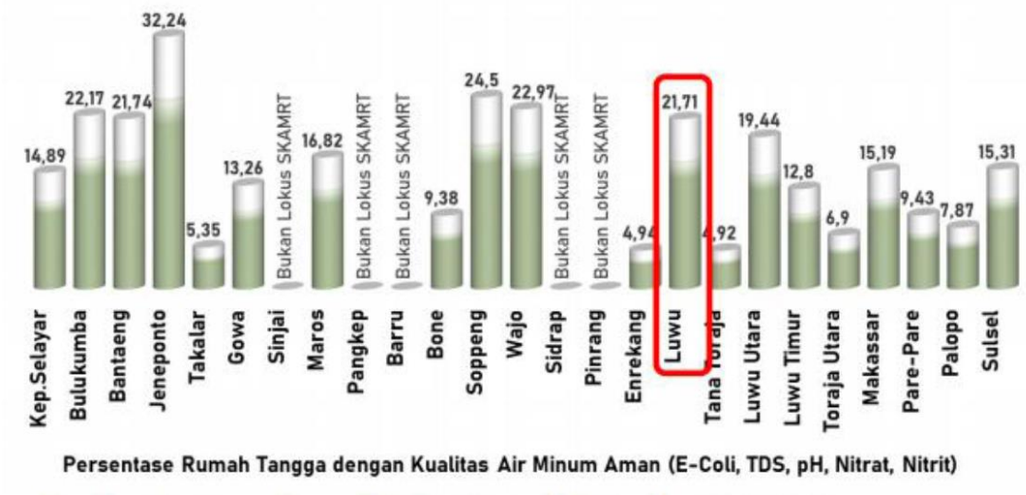


Sumber : SIMSPAM Kementerian Pekerjaa Umum, data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel

Pada tahun 2024, Kabupaten Luwu telah mencapai capaian sambungan air minum sebesar 44,76 persen dengan total 19.346 Sambungan Rumah (SR), namun angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari separuh rumah tangga di wilayah tersebut yang belum memiliki akses terhadap air minum perpipaan yang aman. Perlunya percepatan penyediaan sambungan air minum menjadi prioritas utama guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh

akses air bersih yang layak, mengingat air minum yang aman merupakan kebutuhan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan melalui beberapa strategi, seperti peningkatan investasi infrastruktur, optimalisasi program pemerintah, kolaborasi dengan pihak swasta, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air bersih. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Luwu dapat mempercepat perluasan jaringan perpipaan sehingga target universal akses air minum yang aman bagi seluruh rumah tangga dapat tercapai dalam waktu yang lebih efisien.

Grafik 2.9.
Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil Survey SKAMRT



Sumber : Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2023

Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) di Kabupaten Luwu menunjukan capaian yang memprihatinkan, dimana hanya 21,71% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang memenuhi standar keamanan. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional dan mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyediaan air bersih di wilayah tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, mengingat air minum yang tidak memenuhi standar dapat menjadi media penularan penyakit seperti diare, disentri, bahkan keracunan logam berat jangka panjang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi segera dan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah strategis yang

dapat dilakukan meliputi: (1) percepatan pembangunan infrastruktur air minum perpipaan, (2) penyediaan unit pengolahan air sederhana bagi daerah terpencil, (3) peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air minum rumah tangga, serta (4) penguatan sistem pemantauan kualitas air secara berkala. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan akses air minum aman, sekaligus mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak bagi semua.

2.1.9. Lingkungan Hidup Berkualitas

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan pendekatan sistemik dan terintegrasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Untuk melaksanakan agenda tersebut, pemerintah Kabupaten Luwu sebelumnya telah melakukan beberapa langkah-langkah mulai dari pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), pemantauan dan evaluasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Pemerintah secara aktif mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan penguatan program pengolahan limbah yang efisien untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Strategi ini juga meliputi penguatan sistem informasi dan data lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis ilmiah.

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan kerusakan serta pelestarian lingkungan hidup, pemerintah juga berupaya untuk menarik partisipasi aktif masyarakat menjaga lingkungan hidup melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk

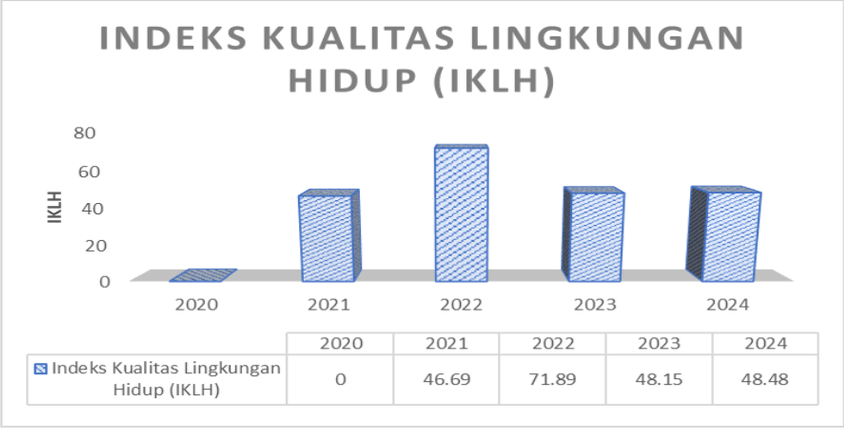
menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam upaya pelaksanaan program bidang lingkungan hidup, pemerintah perlu menetapkan indikator agar dapat senantiasa melakukan pemantauan, evaluasi serta inovasi. Indikator yang dipilih harus dapat menggambarkan kinerja yang relevan serta besaran yang realistis. Untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang berkualitas, Kabupaten Luwu dalam periode lima tahun ke depan melakukan paralelisasi program untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah seperti capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, dan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah. Sebagai gambaran awal, berikut sajian capaian indikator yang diperoleh kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu telah menunjukkan dinamis dalam capaian kualitas lingkungan hidup selama lima tahun terakhir, dengan pola perkembangan yang fluktuatif. Terdapat tantangan di tahun 2020 dimana pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat dilaksanakan akibat proses penyesuaian indikator, sehingga baru dapat dimulai secara konsisten pada tahun 2021. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan skor 71.89, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan, namun diikuti dengan fluktuasi di tahun-tahun berikutnya.

Grafik 2.10.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Luwu
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0	46.69	71.89	48.15	48.48

(Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2025).

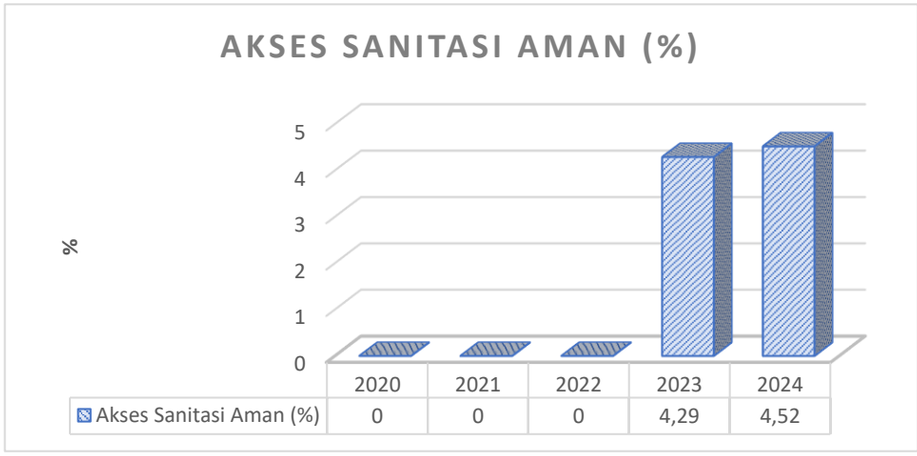
Fluktuasi capaian IKLH ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian khusus meliputi: (1) konsistensi dalam penerapan kebijakan lingkungan, (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan, (3) penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, serta (4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur, Kabupaten Luwu untuk meningkatkan capaian IKLH jauh lebih baik lagi di masa mendatang, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan secara nasional.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukan tren kenaikan. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukan tidak adanya nilai karena pada periode tersebut belum dilakukan pengukuran. Barulah pada tahun 2023 ke tahun 2024 kabupaten Luwu mulai melakukan pengukuran terkait persentasi rumah tangga dengan akses sanitasi aman yang mana terlihat adanya kenaikan nilai capaian. Meskipun kenaikan capaian indikator ini relatif kecil yaitu 0,23 persen dati tahun 2023 ke 2024, namun penguatan program

sanitasi aman di Kabupaten Luwu terus diupayakan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2025.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman serta tertata dengan baik. Masalah sanitasi pada kawasan perumahan merupakan maslah yang kompleks. Hal ini terjadi karena lingkungan perumahan yang baik harus menyediakan fasiltas untuk pengelolaan lingkungannya. SPAL Domestik Terpusat atau SPAL Domestik-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumbernya secara kolektif ke sub sistem pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Fasilitas ini bertujuan untuk mengelolah hasil limbah rumah tangga yang dialirkan ke suatu wadah pengelolahan terpusat. Infrastruktur ini disediakan agar limbah rumah tangga tidak mencemari lingkungan sekitar perumahan.

Sistem pengelolahan air limbah domestik terpadu (SPALD-T) di kabupaten Luwu telah dilaksanakan. Namun kinerja pelayanan dari kegiatan ini baru dilakukan pencatatan di tahun 2024 sengga data capaiaan SPALD-T belum dapat dimuat untuk tahun 2020 sampai 2023. Berikut hasil capaian layanan SPALD-T pada tahun 2020 ke 2024.

Tabel 2.7.
Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani SPALD-T kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Rumah dengan SPALD-T	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	na	na	na	na	41319
Jumlah Rumah Tangga yang Sudah Dilayani	na	na	na	na	440
Persentase	na	na	na	na	1.06

(sumber: Data perencanaan Dinas PUTR Kab. Luwu 2025)

Berdasarkan data layanan system penglolahan air limbah domestik terpadu di kabupaten Luwu, perlu adanya peningkatan layanan tersebut. Persentase layanan hanya 1.06 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pada program kegiatan ini dengan melakukan penyediaan sarana dan prasara pendukun serta peningkatan tata kelola agar masayarakat kabupaten Luwu dapat terlindung dari pencemaran limbah khususnya limbah domestik. Dengan layanan tersebut, lingkungan perumahan dapat terhindar dari kumuh sehingga masayarakat yang menghuni kawasan perumahn dapat lehih sehat. Disamping itu, pencatatan kinerja pelayannan ini harus dilakukan guna menyediakan data capaian dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan secara khusus pada organisasi pemerintahan yang membidangi sektor tersebut.

c. Persampahan

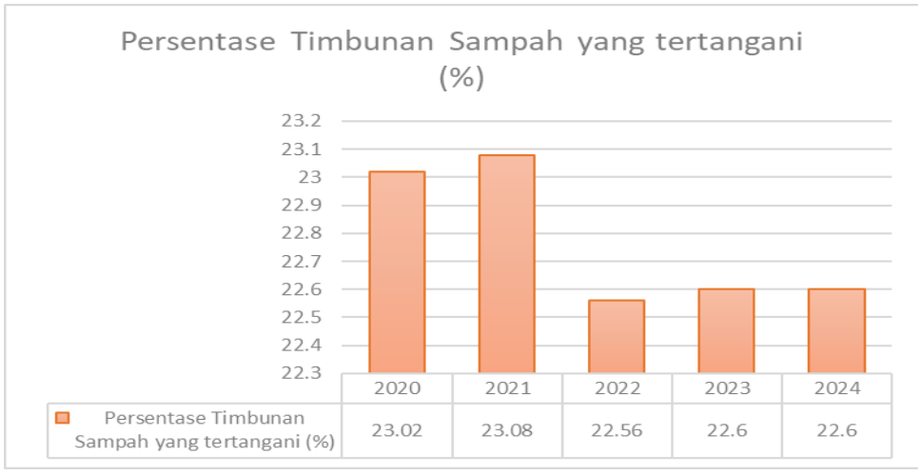
Masalah persampahan merupakan tantangan yang besar siring dengan laju pertumbuhan penduduk serta intensitas kegitan manusia serta alam itu sendiri. Permasalahan sampah perkotaan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Solusi tidak dapat lagi hanya bertumpu pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai lokasi pembuangan akhir, melainkan harus dimulai dari pengurangan sampah di sumbernya, yaitu rumah tangga dan industri. Strategi pengelolaan sampah yang efektif melibatkan kombinasi upaya pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), yang dikenal sebagai konsep 3R.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penting untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengelolaan Sampah

Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan menggalakkan program bank sampah. Ini akan membantu memilah sampah sejak awal, mengubahnya menjadi nilai ekonomi, dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sarana dan prasarana pengangkutan sampah, meningkatkan kapasitas pengolahan, serta memanfaatkan teknologi inovatif seperti pengomposan, biogasifikasi, atau bahkan konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang berwawasan lingkungan, tentunya dengan memperhatikan dampak lingkungannya.

Partisipasi aktif dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Sosialisasi masif mengenai pentingnya pemilahan sampah, edukasi tentang dampak negatif sampah, serta pelatihan pengolahan sampah mandiri harus terus digencarkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, diharapkan masalah persampahan dapat ditangani secara sistematis, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Grafik 2.12.
Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani Kab. Luwu
Tahun 2020-2024

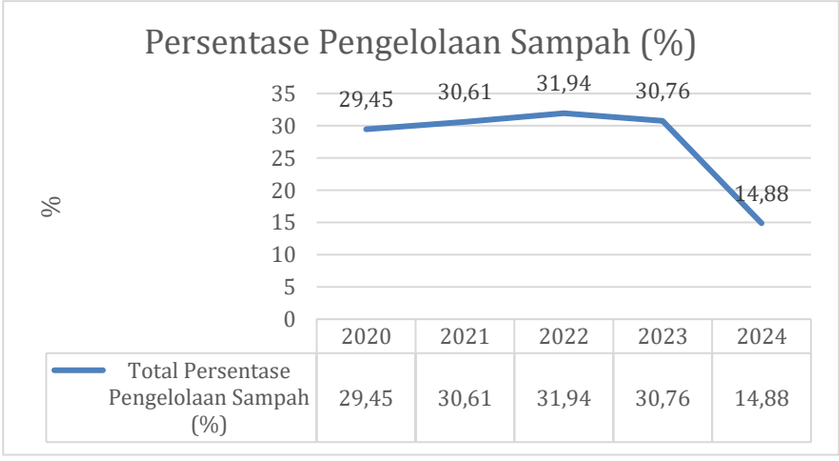


Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Penanganan sampah di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukan adanya tren menurun yang fluktuatif. Penanganan sampah pada tahun 2021 dan 2022 menunjukan hasil yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan capaian tahun 2022 ke tahun 2024.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penanganan timbunan sampah paling tinggi dilakukan di tahun 2021 dengan nilai persentase 23.08 sedangkan persentas pengangan timbunan sampah palin rendah dilakukan di tahun 2023 dengan nilai 22.56 persen.

Grafik 2.13.
Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Kinerja capaian Kabupaten Luwu terhadap penanganan timbunan sampah masih belum optimal. Ketersedian sarana untuk pelaksanaan kegiatan *sanitary landfill* menjadi salah satu penyebab timbunan sampah belum mendapatkan penangan yang semestinya. Oleh karena itu, terkait masalah sampah pemerintah kabupaten Luwu berupaya untuk terus meningkatkan penyediaan sarana dapa prasarana persampahan yang lebih andal. Kondisi saarana yang digunakan dalam kegiatan penimbunan sampah saat ini dalam keadaan rusak dan perlu untuk dilakukan penambahan armada dan perbaikan.

Disamping itu penguatan kapasitas oraganisasi melalui penerbitan perda persampahan dan penguatan pendanaan juga merupakan agenda yang krusal untuk segera dilaksanakan.

Grafik 2.14.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kab. Luwu Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Berdasarkan data capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah kurun lima tahun terakhir di Kabupaten Luwu. Terlihat kinerja yang stagnan di angka 0,5. Dari data capaian mengindikasingan perlu adanya peningkatan layannan di bidang persampahan khususnya penanganan sampah domestik. Peningkatan Kapasistas kelembagaan, Peningkatan jumlah sarana dan prasarana serta ekskalasi layanan persampahan perumahan di seluruh wilyah Kabupaten Luwu.

Untuk menjamin hal tersebut, perlu adanya langkah-langkah jitu untuk menyusun sebuah pemodelan penganangannan sampah yang lebih konperhensif. Penanganan sampah merupakan program yang melibatkan banyak stake holder, mulai dari skala lingkungan sebagai ujung tangan dari pemerintah daerah dalam rangkah menarik partisipasi aktif oleh masyarakat sampai ke pemerintah daerah sebagai bagian yang menyusun konsep dalam bentuk produk- produk hukum dan mengkoordinir kinerja setiap satuan. Pemerintah daerah juga berperan untuk menarik serta merangkul *resource* non pemerintahan serta lembanga-lembaga lain yang memiliki keinginan untuk berkintribusi terhadap kelestarian lingkungan khususnya masalah persampahan.

Tabel 2.8.

Persentase Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2021-2024 di Kabupaten Luwu

Tahun	Timbunan sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Pengurangan sampah Tahunan (Ton/tahun)	%pengurangan sampah tahunan	Penanganan sampah tahunan (ton/tahun)	% Penangan Sampah	Sampah Terkelolah Tahunan (Ton/tahun)	Sampah Masuk Ke TPA (Ton/Tahun)	Timbunan sampah terkelolah di Fasilitas Pengelolah sampah(%)	Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/Tahun)	Daur Ulang Sampah Tahunan (%)
2021	55544	4172	7.53	12818.85	23.08	17001.55	12475.65	8.15	845.99	1.52
2022	56932.99	4645.13	8.16	13536.43	23.78	18182.56	12812.85	9.42	1303.8	2.29
2023	57957.77	4731.17	8.16	13094.4	22.59	17805.57	13536.43	7.4	1268	2.19
2024	56104.88	1123.88	2	13924.75	24.82	15048.63	13924.75	2	582.92	1.04

Sumber: SISPN, data diolah Bappelitbangda Provinsi.

Berdasarkan data tabel yang ada, kondisi pengelolaan timbunan sampah di Kabupaten Luwu menunjukkan beberapa tantangan signifikan. Kabupaten Luwu tercatat memiliki timbunan sampah tahunan yang cenderung mengalami peningkatan, dengan volume tertinggi mencapai 57.957,77 Ton/Tahun pada tahun 2023. Meskipun ada upaya pengelolaan, persentase penanganan sampah di wilayah ini masih tergolong rendah, yakni rata-rata hanya sebesar 23,57%. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal melalui metode daur ulang, pengomposan, atau pemanfaatan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar.

Rendahnya persentase penanganan ini berdampak langsung pada volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan tonase tertinggi sebesar 13.924,75 Ton/Tahun pada tahun 2024. Tekanan terhadap fasilitas TPA menjadi semakin besar, berimplikasi pada kapasitas, umur pakai, dan potensi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini menyoroti urgensi peningkatan kinerja pengelolaan timbunan sampah secara menyeluruh di Kabupaten Luwu. Diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pengangkutan ke TPA, tetapi juga pada penguatan upaya pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan kapasitas pemilahan, daur ulang, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tabel yang disajikan, Kabupaten Luwu menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampahnya.

Meskipun tercatat volume sampah terkelola sebesar 47.001,55 Ton/Tahun dari total timbunan sampah tahunan 55.544,39 Ton/Tahun, persentase penanganan sampah di wilayah ini masih tergolong rendah, hanya mencapai 23,08%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat sampah yang dihasilkan belum tertangani secara optimal melalui proses pengurangan, penggunaan kembali, atau daur ulang. Akibatnya, sebagian besar volume sampah, yaitu 17.001,55 Ton/Tahun, masih terus dialirkan dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kondisi ini menimbulkan beban berat bagi TPA dan mengindikasikan urgensi peningkatan kinerja pengelolaan sampah secara komprehensif. Upaya-upaya yang perlu laksanakan meliputi penguatan fasilitas pemilahan sampah di sumbernya (rumah tangga dan komersial), peningkatan kapasitas daur ulang dan pengomposan, serta pengembangan infrastruktur pengolahan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi kunci vital untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Luwu.

d. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

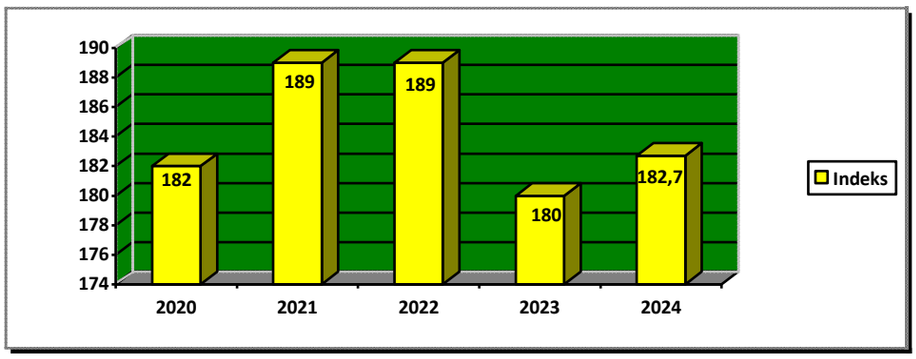
Proporsi ralisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Luwu masih sangat rendah, Meskipun pupuk organik memiliki banyak manfaat bagi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, perbaikan struktur tanah, dan keberlanjutan Lingkungan namun penggunaannya oleh masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu tahun 2024 proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia hanya sebesar 0,37%.

e. Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman pada padi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas atau frekuensi penanaman padi dalam

satu tahun pada suatu lahan sawah. Berikut ini data IP pada padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.15.
Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



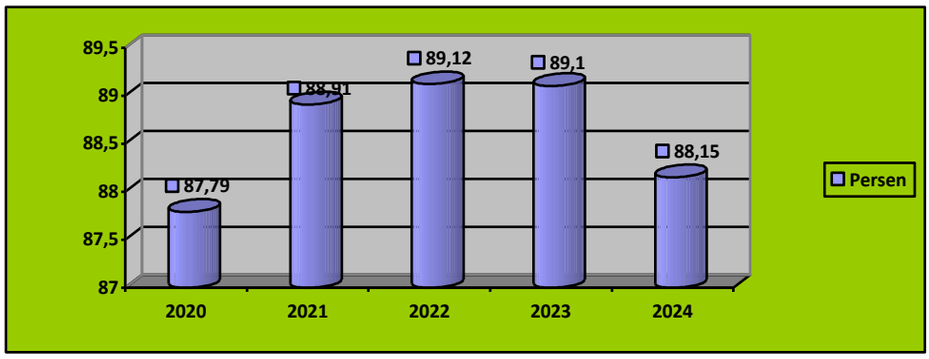
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, IP Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 189 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap hektar lahan sawah di Kabupaten Luwu ditanami padi sebanyak 1,89 kali dalam setahun. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 1,80 kali tanam dalam setahun, dan pada tahun 2024 adalah 182,7 kali pertahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain ketersediaan sarana dan prasaranan, kondisi geografis, dan cuaca.

f. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi adalah perbandingan luas lahan sawah yang diairi secara teratur dengan sistem irigasi terhadap total luas lahan sawah. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa besar bagian dari lahan sawah yang mendapatkan pasokan air secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan padi. Namun masih ada lahan sawah yang belum beririgasi atau tada hujan. Berikut ini data proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.16.
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



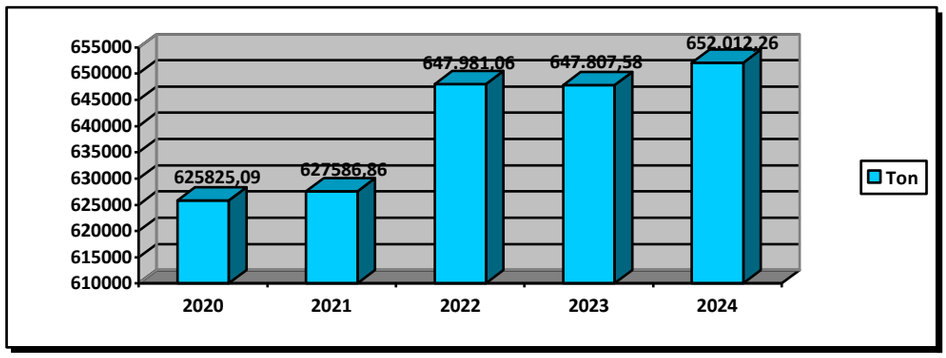
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2020-2024) berfluktuasi. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 87,79 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 89,12 persen, Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 82,15 persen. Penyebab utama penurunan proporsi sawah irigasi di tahun 2024 adalah kerusakan infrastruktur irigasi akibat banjir dan adanya catak sawah baru yang tidak dibarengi dengan pembangunan irigasi.

g. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Kabupaten Luwu memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya baik perikanan air Laut maupun air tawar seperti Ikan Bandeng, Udang, Rumput Laut, Ikan Nila, Ikan Mas dan Ikan Lele. Pengembangan Perikanan Budidaya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17.
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



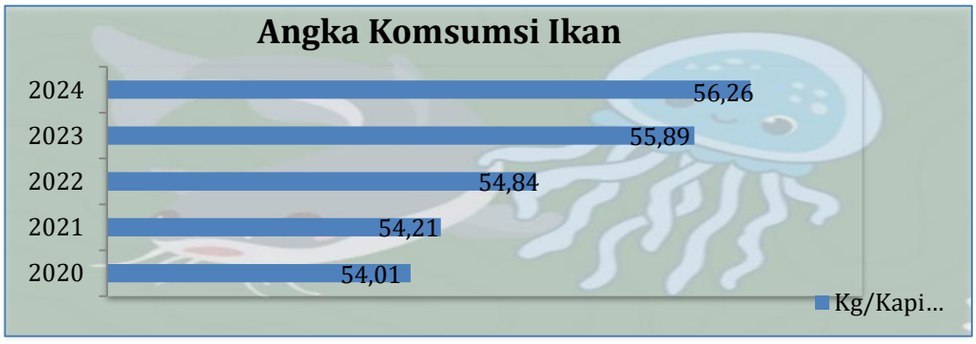
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2025.

Grafik diatas menunjukan jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Luwu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 mencapai 625.925,09 ton, tahun 2021 sebesar 627.586,86 ton, meningkat di tahun 2022 menjadi 647.981,06 ton dan pada tahun 2024 mencapai 652.012,26 ton.

h. Angka Komsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan (AKI) adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat konsumsi makan ikan masyarakat pada suatu wilayah. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Berikut ini Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.18.
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa AKI di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 54,01 Kg/Kapita/Tahun menjadi 56,26 Kg/Kapita/Tahun. konsumsi atau pola konsumsi pangan seperti ikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya ekonomi tetapi juga budaya, ketersediaan, *aksesibilitas*, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya.

2.1.10. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

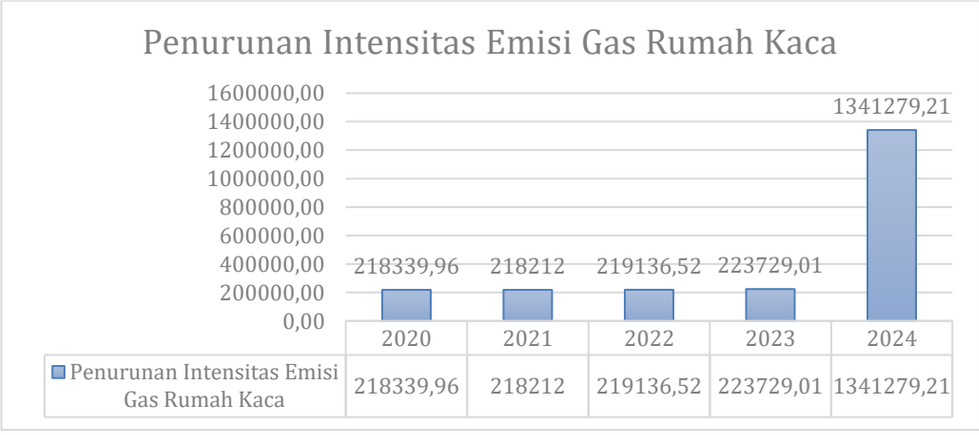
Ketahanan suatu wilayah terhadap dampak perubahan iklim global dan bencana alam merupakan hasil interaksi kompleks antara kemampuan masyarakat, daya tahan infrastruktur, dan kesehatan ekosistem. Masyarakat yang tangguh terhadap bencana ditandai dengan pengetahuan mengenai cara merespon dengan cepat saat sebelum sampai dengan pasca bencana. Jaringan sosial yang kuat, kepemimpinan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan dan meringankan dampak bencana. Daya tahan infrastruktur yang andal ditandai tersedianya fasilitas yang kokoh dan tepat untuk memberikan perlindungan serta peringatan dini sebelum dan setelah terjadi bencana. dengan Selain itu, sistem peringatan dini yang handal dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai merupakan faktor penentu dalam meminimalisir dampak negatif dan mempercepat pemulihan.

Infrastruktur yang tahan bencana merupakan pilar penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ini mencakup bangunan tahan gempa dan banjir, sistem drainase yang efisien, jaringan transportasi yang andal, dan sistem energi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur hijau, seperti taman kota, hutan kota, dan sistem pengolahan air hujan, tidak hanya meningkatkan ketahanan ekosistem tetapi juga mengurangi risiko bencana. Penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses pembangunan. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang handal juga krusial untuk koordinasi tanggap darurat dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ekosistem yang sehat dan lestari berperan sebagai penyangga utama dalam menghadapi dampak iklim ekstrem. Keanekaragaman hayati yang tinggi meningkatkan kemampuan ekosistem untuk menyerap guncangan, seperti banjir dan kekeringan. Hutan, bakau, dan lahan basah berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bencana dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem sangat penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan deforestasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan langkah-langkah krusial dalam membangun ekosistem yang tangguh.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk memberikan penekatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan katangguhan daerah yang berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana. Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana merupakan barometer pokok dalam mengukur kinerja pemerintah terkait kebencanaan. Sebagai gambaran awal, berikut capaian perolehan indikator tersebut dalam kurun lima tahun terakhir.

Grafik 2.19.
Intensitas Penurunan Emisi GRK Kab. Luwu
Tahun 2020-2024



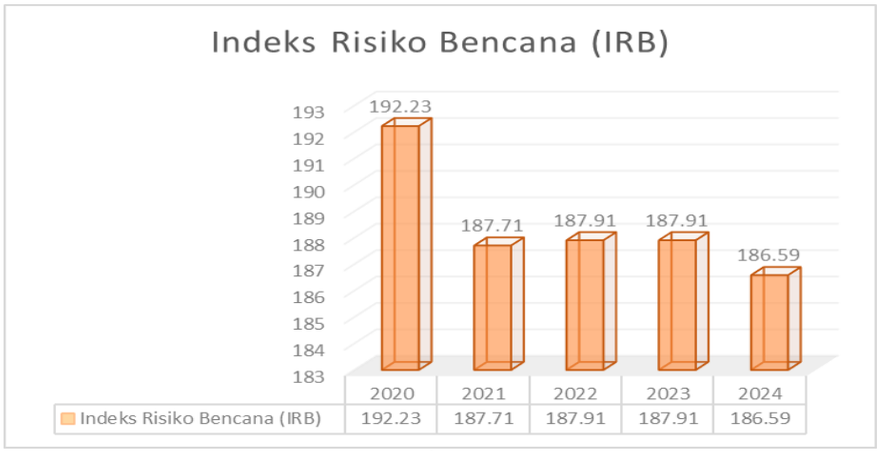
Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Berdasarkan data capaian di atas, terlihat bahawa adanya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kabupaten Luwu. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi lingkungan yang berkaitan jumlah emisi karbon dari aktivitas manusia, peningkatan ekosistem pengurai karbon, serta penurunan penggunaan bahan-

bahan pemicu Efek Rumah Kaca. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bahwa adanya peningkatan terkait penanganan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Empat tahun terakhir yakni tahun 2020 ke 2023 terlihat adanya staknasi dari upaya penangan penuruan emisi. Penurunan dalam kurun waktu tersebut sangat kecil yakni 5389.05 ton CO^2 eq. Namun, pada tahun 2024 capaian penurunan GRK meningkat besar. Hal tersebut merupakan implikasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Ada enam kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan GRK di kabupaten Luwu diantaranya, pengadaan bibit jagung di dua lokasi, pengadaan benih padi di tiga tempat dan pengadaan bibit alpukat. Kegiatan tersebut menyumbang penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 1.341.279,41 ton CO^2eq di tahun 2024. Emisi GRK kumulatif Kabupaten Luwu hingga tahun 2024 tercatat sebesar 1.346.101,27 ton CO^2eq, mencerminkan akumulasi dampak aktivitas pengurangan karbon terutama dari sektor lahan pertanian, perkebunan dan reboisasi hutan untuk percepatan implementasi strategi mitigasi berbasis pertanian dan perkebunan rendah karbon yang inklusif. Terkait Emisi Gas Ruma Kaca (GRK) di kabupaten Luwu, pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk melakukan kegiatan penghijauan terutama di daerah hulu Das dengan melakukan peningkatan program penanaman Pohon buah-buahan unggulan daerah seperti pembagian bibit Pohon alpukat, mangga dan durian.

Pengukuran Intensitas Penurunan Emisi gas Rumah Kaca merupakan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan rencana aksi mandiri dalam rangka mengatasi efek global dari Emisi Gas Rumah Kaca. Pengendalian lingkungan khususnya pelesatarian tanaman untuk pengendalian produksi karbon sebagian besar dilaksanakan di daerah yang memiliki tutupan lahan hutan. Peran pemerintah daerah sangat krusial dimana interfensi program langsung dilaksanakan di daerah masing masing. Program-program pengendalian efek rumah kaca sangat dekat dengan masyarakat khususnya di pedesaan yang pemukimannnya berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Grafik 2.20.
Indeks Resiko Bencana Kab. Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan BPBD Kabupaten Luwu 2025.

Di sisi lain, indeks resiko bencana kabupaten Luwu mengalami tren penurunan nilai dari tahun 2020 sebesar 192.23 ke 186.59 pada tahun 2024. Meskipun perolehan nilai dalam kurun lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namum secara keseluruhan indeks resiko bencan kabupaten Luwu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai langkah mitigasi yang dipadukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan Penguatan kapasitas kawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang dilaksanakan oleh BPBD, pihak swasta dan akademisi yaitu PT Masmindo bekerja sama dengan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) dan BPBD membentuk Desa Tangguh Bencana dan melaksanakan edukasi mitigasi bencana;
2. Pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System) banjir oleh PT Masmindo;
3. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah yang melibatkan stakeholder;
4. Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana yang bekerja sama dengan Unhas;
5. Pemasangan Tsunami gauge (deteksi tsunami) dan WRS INATEWS (deteksi gempa bumi)

Adapun jumlah kejadian bencana di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian		
		Tanah Longsor	Banjir	Puting Beliung
1	Larompong	2	7	-
2	Larompong Selatan	2	5	-
3	Suli	1	7	1
4	Suli Barat	3	6	-
5	Belopa	1	3	2
6	Kamanre	1	1	-
7	Belopa Utara	1	1	1
8	Bajo	1	1	-
9	Bajo Barat	3	1	
10	Bassesangtempe	1	-	-
11	Latimojong	7	1	-
12	Bassesangtempe Utara	1	-	-
13	Bupon	2	6	1
14	Ponrang	1	3	1
15	Ponrang Selatan	-	2	-
16	Bua	1	3	1
17	Walenrang	-	-	-
18	Walenrang Timur	-	2	-
19	Lamasi	-	-	-
20	Walenrang Utara	-	2	-
21	Walerang Barat	5	-	-
22	Lamasi Timur	-	6	1
Jumlah		**33**	**57**	**8**

Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di tahun 2024 dengan jumlah kejadian sebanyak 57 kali, diikuti bencana tanah longsor sebanyak 33 kali dan puting beliung sebanyak 8 kali kejadian.

2.1.11. Demografi

Aspek demografi wilayah mencakup berbagai elemen penting yang menggambarkan karakteristik populasi di suatu daerah. Aspek demografi suatu wilayah mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk serta keberagaman sosial masyarakat. Kabupaten Luwu memiliki karakteristik demografi yang unik dan dinamis. Data

kependudukan menunjukkan bahwa wilayah kabupaten Luwu dihuni oleh beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda. Distribusi penduduk tidak merata, dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di daerah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi seperti Belopa, Padang Sappa, Suli, Larompong, Sakti, Lamasi dan pusat kegiatan di kecamatan lainnya. Proporsi penduduk usia produktif cukup besar, yang menunjukkan potensi ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran, dan kematian juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kependudukan di Kabupaten Luwu. Dengan demikian, perencanaan yang baik harus memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk dalam wilayahnya. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebanyak 385.361 jiwa. Proyeksi Penduduk kabupaten Luwu dalam lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu 2025-2030

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2025	389300
2026	394240
2027	399130
2028	404030
2029	408860
2030	413550

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Luwu 2025-2045.

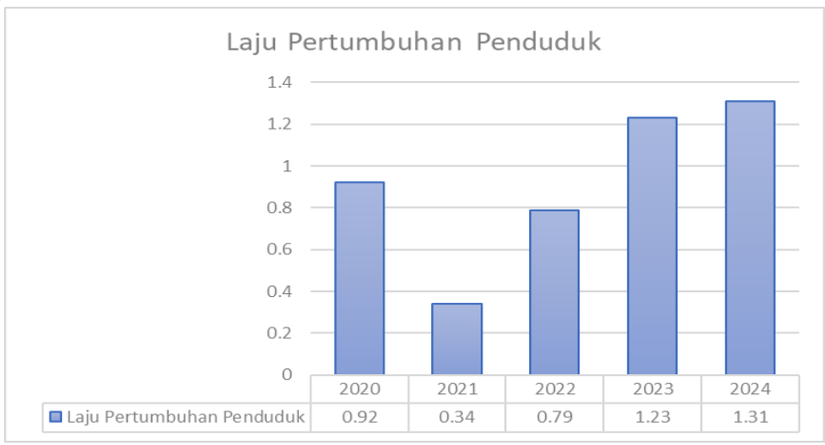
Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sampai tahun 2030 menunjukan ada peningkatan jumlah penduduk sebesar 6,22 persen atau terjadi prediksi pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 24.250 jiwa selama lima tahun ke depan. Dinamika pertumbuhan penduduk ini akan mempengaruhi kebutuhan inrfastruktur, peningkatan kebutuhan masyarakat akan sumberdaya alam, perekonomian masyarakat serta kondisi sosial budaya. Sehingga, perhatian pemerintah terkait data demografi penduduk

diharapkan terus dibenahi. Sinergitas antara organisasi pemerintah daerah menjadi kunci dalam validitas pencatatan domografi penduduk. Jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi diupayakan agar terkelola sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam hal pencatatan kondisi demografi agar diperoleh data yang lebih presisi guna tercapainya perencanaan yang lebih berkualitas.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perubahan persentase dalam jumlah penduduk suatu wilayah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.21.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu mengalami peningkatan berdasarkan data lima tahun terakhir. Grafik di atas menunjukan adanya tren peningkatan laju pertumbuhan Penduduk. Nilai laju pertumbuhan terendah dalam kurun lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yakni 0.34 sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2024 yakni di angka 1.31. Adapun proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu selama lima tahun ke depan sebagai berikut.

Grafik 2.22.
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030



Sumber : Data BPS diolah.

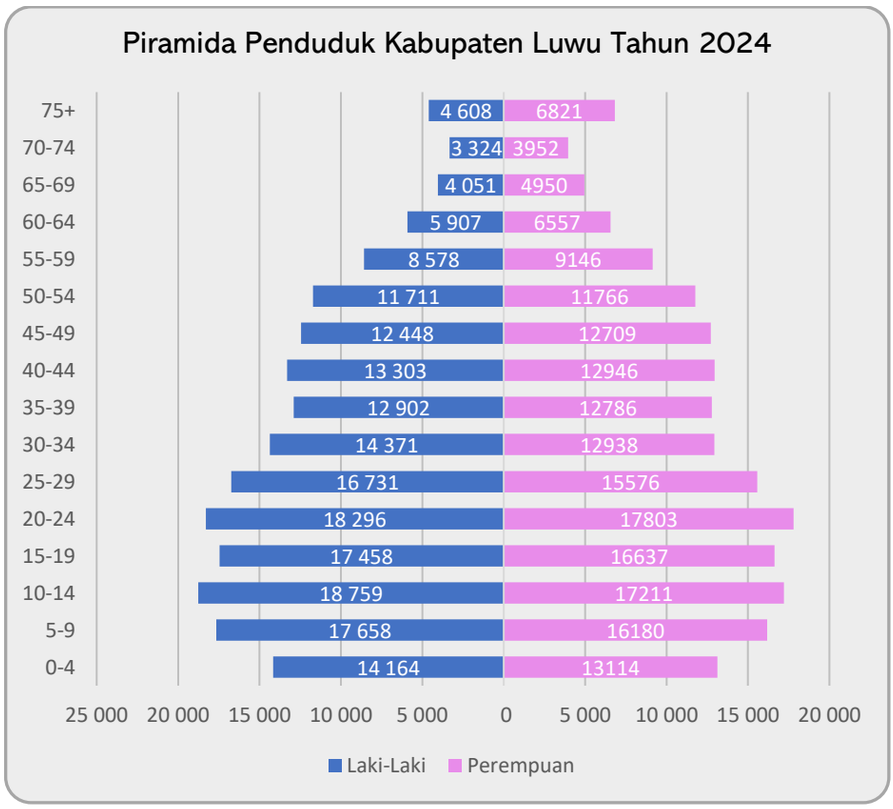
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun ke depan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu terus mengalami penurunan, yakni dari 1,26% pada tahun 2025 menjadi 1,13% di tahun 2030. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti angka kelahiran yang menurun karena penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan sehingga angka perkawinan menurun, peningkatan angka kematian dan migrasi keluar yang lebih tinggi daripada migrasi masuk.

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan gambaran struktur populasi berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Komposisi usia, misalnya, menunjukkan proporsi penduduk di berbagai kelompok umur, seperti anak-anak, usia produktif, dan lansia. Ini memberikan informasi penting tentang potensi ekonomi, beban sosial, dan kebutuhan layanan publik. Rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, menunjukkan kesetaraan gender dan dinamika sosial. Tingkat pendidikan dan status pekerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi suatu wilayah. Memahami komposisi penduduk secara menyeluruh sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,

guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Berikut Komposisi Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Grafik 2.23.
Komposisi Penduduk Kab. Luwu Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2024.

Grafik 2.24.
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030



Sumber : Data BPS diolah.

Data tahun 2024 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia 20-24 tahun (36.099 jiwa), diikuti kelompok usia 10-14 tahun (35.970 jiwa),

dan 15-19 tahun (34.095 jiwa). Konsentrasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) ini mencerminkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk usia non-produktif. Potensi ini dapat menjadi modal utama pembangunan Kabupaten Luwu yakni dengan cara mengelola bonus demografi dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, dilain sisi berdasarkan data BPS bahwa dalam kurun tahun 2025-2030 rasio ketergantungan di Kabupaten Luwu semakin meningkat yakni dari 45,27% pada tahun 2025 menjadi 46,72% di tahun 2030. Hal ini berarti bahwa semakin bertambahnya penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) yang menjadi tanggungan bagi penduduk usia produktif.

3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jika rasio jenis kelamin lebih dari 100, maka jumlah penduduk laki-laki pada daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berikut data rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

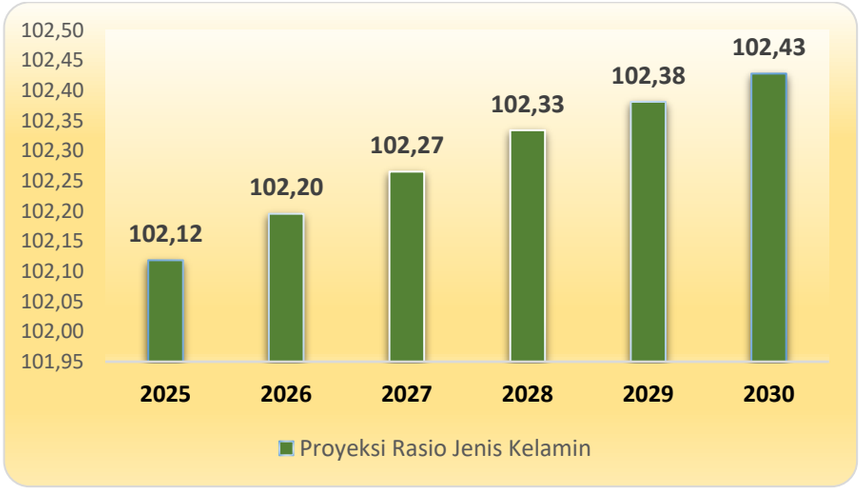
Grafik 2.25.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai angka lebih dari 100. Sementara itu, rasio jenis kelamin di Kabupaten Luwu dari tahun 2025-2030 diproyeksikan terus meningkat sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 2.26.
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2030



Sumber : Data BPS diolah.

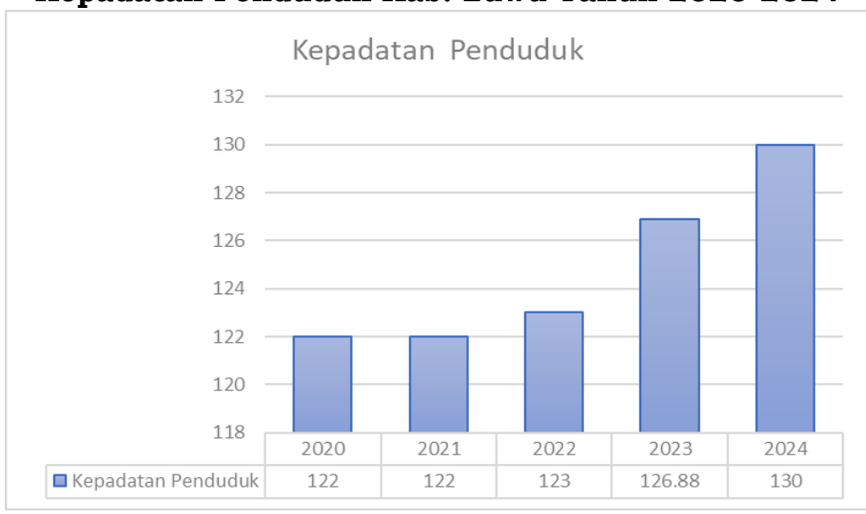
Dari data pada grafik di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2025-2030 rasio jenis kelamin semakin meningkat, hal ini berarti bahwa ke depannya jumlah penduduk laki-laki akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Banyaknya penduduk laki-laki terutama pada usia produktif dapat meningkatkan pasokan tenaga kerja. Namun, disisi lain dapat meningkatkan persaingan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, dampak lainnya adalah meningkatnya ketimpangan gender, penurunan angka perkawinan dan angka kelahiran.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut,

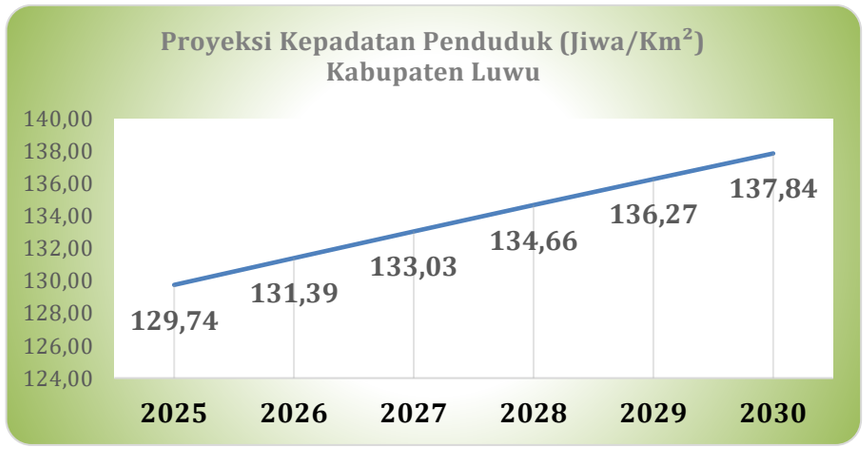
biasanya diukur dalam satuan per kilometer persegi. Berikut adalah data grafik kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.27.
Kepadatan Penduduk Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

Grafik 2.28.
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030



Sumber : Data BPS diolah.

Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS kabupaten Luwu tahun 2025, kepadatan penduduk meningkat relatif pesat pada tahun 2024 yakni berada pada angka 130 dan diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2030. Peningkatan kepadatan penduduk secara langsung akan menyebabkan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan publik mencanangkan beberapa program yang bertujuan untuk

memberikan pelayanan yang prima agar tercapai dearajat kesejahteraan yang lebih baik. Penyediaan akses terhadap pangan yang sehat dan terjangkau, akses layanan kesehatan prima, akses terhadap infrastruktur penunjang perekonomian merupakan agenda yang akan dilaksankan dalam kurun lima tahun kedepan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki pendapatan yang berkelanjutan, di Kabupaten Luwu gambaran kesejahteraan ekonomi dicerminkan antara lain melalui kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Gini sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan persentase perubahan dalam ukuran ekonomi suatu negara atau wilayah dari tahun ke tahun, adapun Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Adapun Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengn pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan dan menurunnya tingkat kemiskinan. Berikut adalah data perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu :

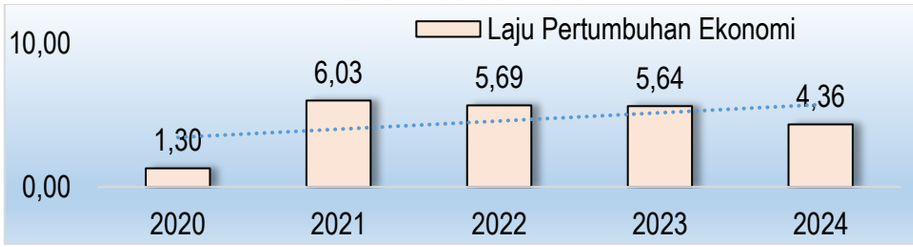
Tabel 2.11.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

NO	WILAYAH	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	NASIONAL	-2.07	3.70	5.31	5.05	5,03
2.	SULSEL	-0.71	4.64	5.10	4.51	5,02
3.	**LUWU**	**1.30**	**6.03**	**5.69**	**5.64**	**4,36**

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Grafik 2.29.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Tabel 2.12.

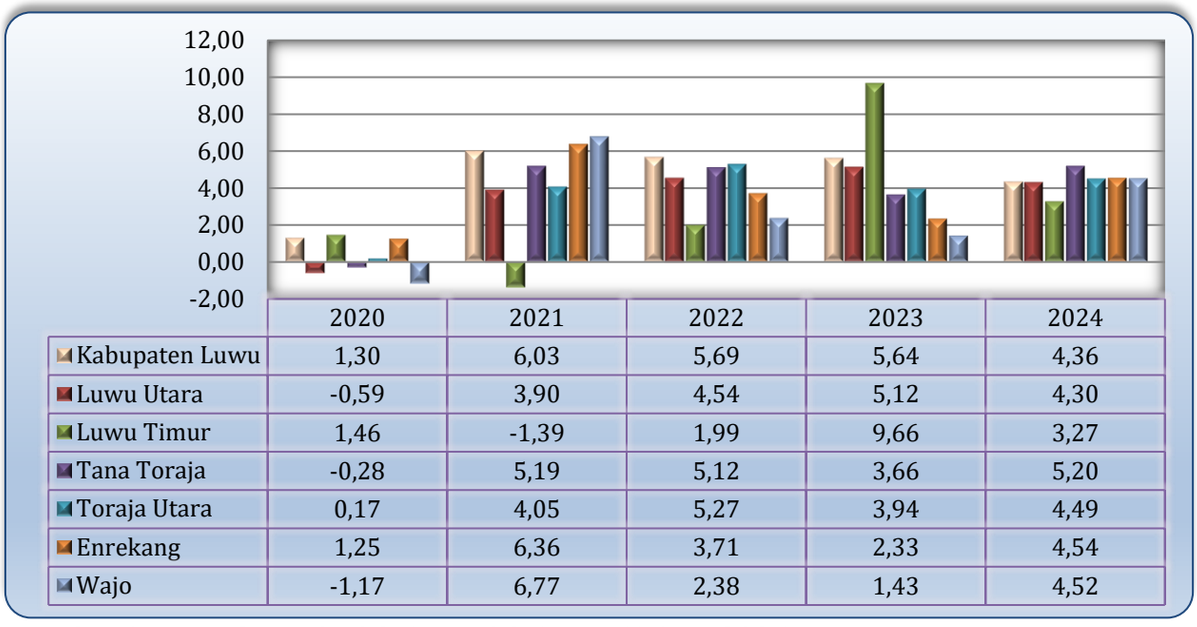
PDRB ADHK 2010 Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.762.221,67	5.014.205,84	5.265.649,50	5.386.399,90	5.480.000,12
B.Pertambangan dan Penggalian	231.823,86	240.566,13	250.950,10	275.432,20	290.000,27
C. Industri Pengolahan	426.677,56	459.377,52	480.108,50	501.005,20	577.000,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12.595,25	13.272,90	13.882,50	15.712,30	17.000,48
E. Pengadaan Air	1.678,06	1.696,04	1.856,40	1.917,20	1.000,92
F. Konstruksi	839.598,28	854.231,98	934.478,80	1.081.242,00	1.115.000,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.166.657,36	1.279.600,92	1.391.380,10	1.531.722,30	1.655.000,38
H. Transportasi dan Pergudangan	73.765,82	79.510,61	92.690,00	100.820,60	107.000,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.698,25	76.846,54	90.356,00	101.229,60	108.000,19
J. Informasi dan Komunikasi	349.736,74	377.130,94	398.979,70	433.679,40	467.000,47
K. Jasa Keuangan	144.483,83	157.130,94	158.321,10	153.556,40	159.000,81
L. Real Estate	605.591,68	642.735,77	673.486,80	711.015,20	753.000,90
M,N. Jasa Perusahaan	2.453,36	2.553,04	2.887,60	3.165,80	3.000,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	446.081,77	473.055,33	471.699,00	489.235,80	488.000,54

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
P. Jasa Pendidikan	380.694,20	399.928,80	416.222,80	450.795,10	479.000,30
Q. Jasa Kesehatan	313.272,29	346.238,87	367.715,20	393.955,20	426.000,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	28.881,34	31.270,49	34.006,70	37.256,30	43.091,09
PDRB ADHK	**9.855.911,31**	**10.449.750,24**	**11.044.670,90**	**11.668.140,40**	**12.176.488,90**

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.30.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Luwu	1,30	6,03	5,69	5,64	4,36
Luwu Utara	-0,59	3,90	4,54	5,12	4,30
Luwu Timur	1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27
Tana Toraja	-0,28	5,19	5,12	3,66	5,20
Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94	4,49
Enrekang	1,25	6,36	3,71	2,33	4,54
Wajo	-1,17	6,77	2,38	1,43	4,52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Dari masing-masing data tersebut di atas, nampak bahwa sektor ekonomi Kabupaten Luwu kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami pertumbuhan, namun pada tahun 2024 telah terjadi perlambatan pada beberapa sektor seperti pengadaan air, dan pengelolaan limbah sehingga nilai capaian *laju pertumbuhan ekonomi* Kabupaten Luwu menurun menjadi sebesar 4,36 persen hal tersebut terlihat dari capaian pada tahun sebelumnya yakni sebesar 5,64 persen.

Kemudian berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupten Luwu mengalami kenaikan dari Rp.11,67 Triliun rupiah di tahun 2023 menjadi Rp. 12,17 Triliun pada tahun 2024. Adapun kenaikan nilai PDRB disebabkan oleh meningkatnya produksi di masing-masing lapangan usaha.

Selanjutnya untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen pada tahu 2024, adapun peningkatan tersebut masih relevan dengan laju pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Luwu, dimana pada tahun yang sama telah mengalami peningkatan sebesar 4,36 persen.

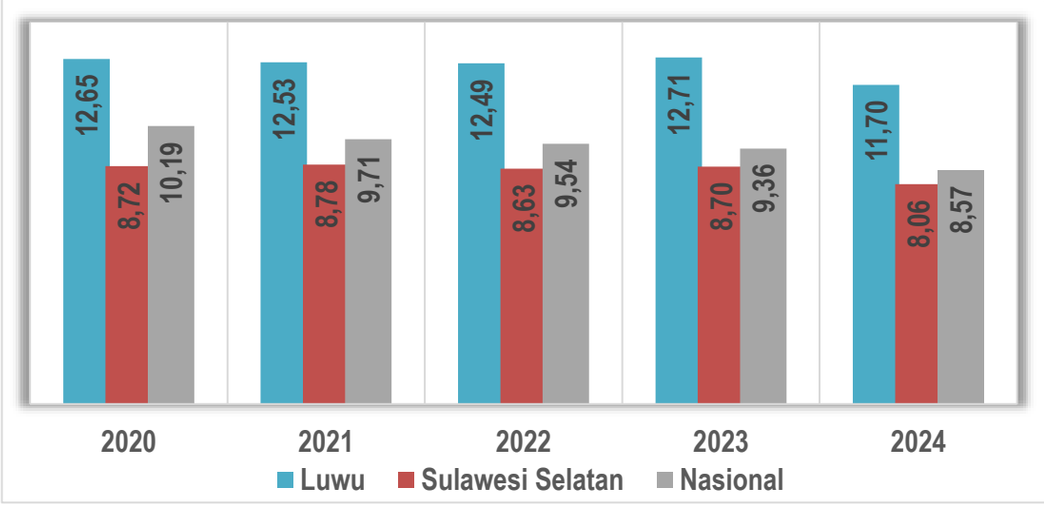
Kemudian berdasarkan harga konstan 2010, PDRB mengalami kenaikan dari Rp.11,67 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi Rp.12,17 triliun rupiah di tahun 2024. adapun kenaikan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi tersebut disebabkan oleh meningkatnya nilai produksi diseluruh lapangan usaha dan bukan dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2024 berada di posisi ke lima di bawah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Toraja Utara.

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk pada suatu wilayah. Berikut data perkembangan kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.31.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

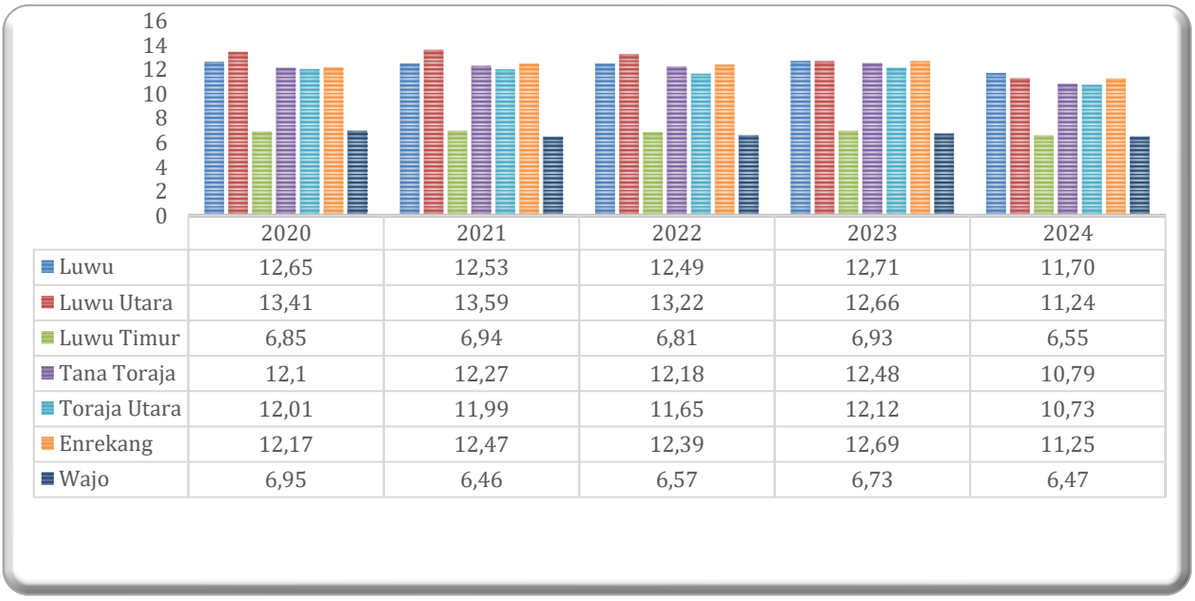


Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,01 persen atau menjadi sebesar 11,70 persen, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 12,71 persen. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,24 persen, adapun capaian rata-rata Kabupaten Luwu tersebut berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 0,17 persen, dan dibawah capaian rata-rata Nasional yakni sebesar 0,41 persen.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan wilayah setara pada tahun 2024, Kabupaten Luwu berada pada posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 11,70% diikuti oleh Kabupaten Enrekang sebesar 11,25% dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 11,24%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.32.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



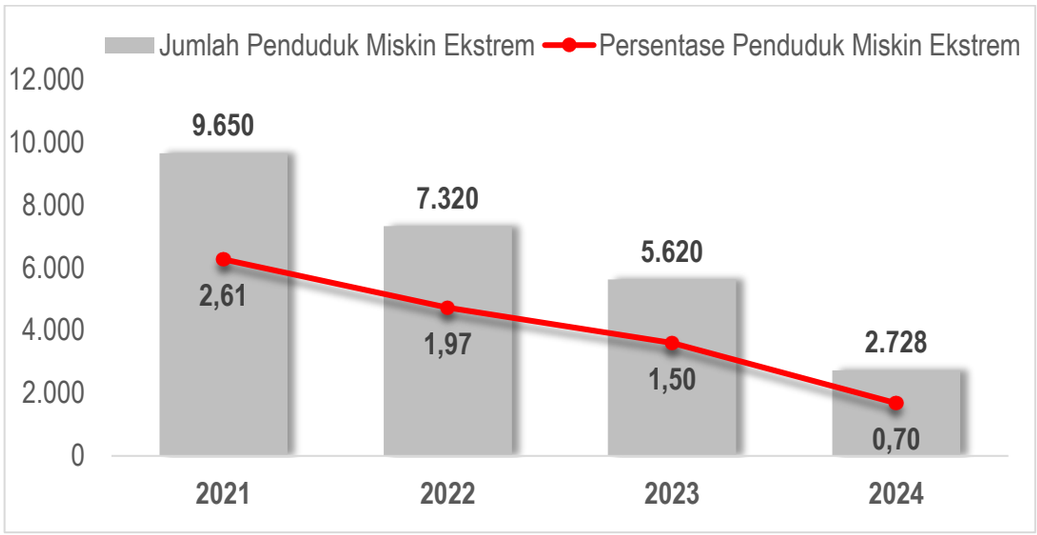
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
Luwu Utara	13,41	13,59	13,22	12,66	11,24
Luwu Timur	6,85	6,94	6,81	6,93	6,55
Tana Toraja	12,1	12,27	12,18	12,48	10,79
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73
Enrekang	12,17	12,47	12,39	12,69	11,25
Wajo	6,95	6,46	6,57	6,73	6,47

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

c. Kemiskinan Ekstrem

Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari 4 (empat) orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori Miskin Ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan capaian penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Luwu periode 2021-2024 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Luwu sebanyak 9.650 Jiwa atau sebesar 2,61 persen, mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 2.728 jiwa atau sebesar 0,70 persen, capaian penurunan kemiskinan ekstrem tersebut pada periode yang sama mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,48 persen, untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan perkembangan capaian dalam bentuk grafik periode tahun 2021-2024.

Grafik 2.33.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sul-Sel Tahun 2025.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, dimana nilai PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB perkapita tercatat sebesar 43,91 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 59,73 juta rupiah. Begitupun dengan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga terus meningkat. Pada tahun 2020 nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar 26,99 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2024 menjadi sebesar 31,68 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.

Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	9.855.911,31	10.449.750,24	11.044.670,90	11.668.140,40	12.176.000,49
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	16.031.067,61	17.839.990,46	19.980.972,20	21.755.643,50	22.952.200,00
Jumlah Penduduk (Jiwa)	365.608	367.454	369.820	380.679	385.361
PDRB ADHK Perkapita (juta rupiah)	26,99	28,29	29,51	30,76	31,68
PDRB ADHB Perkapita (juta rupiah)	43,91	48,29	53,38	57,36	59,73

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025.

Di Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2020-2024 nilai pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.43,91 juta, mengalami peningkatan sebesar 15,82 juta atau menjadi sebesar Rp.59,73 juta pada tahun 2024. Adapun peningkatan PDRB ADHB tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang mampu tumbuh dengan baik sepanjang periode tersebut. Capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB per kapita ADHB Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional yang masing-masing mencapai 73,57 juta dan 78,62 juta pada tahun 2024.

Sementara itu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama juga terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 pendapatan perkapita ADHK mencapai Rp.26,99 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.4,69 juta atau menjadi sebesar Rp.31,68 juta pada tahun 2024. Capaian tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing mencapai Rp.41,86 juta dan Rp.45,88 juta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

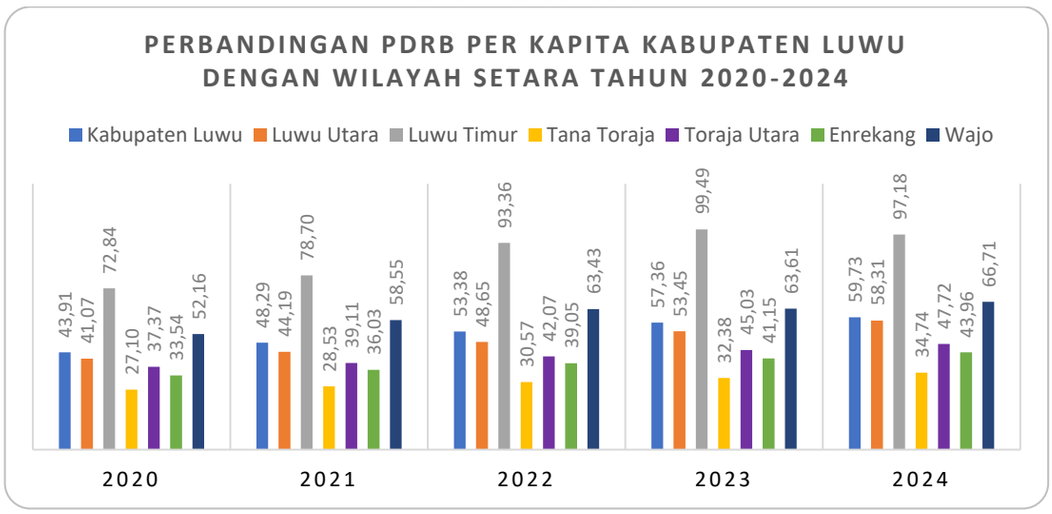
Tahun	Kabupaten Luwu		Provinsi Sulawesi Selatan		Nasional	
	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)
2020	43,91	26,99	55,68	36,25	57,29	39,78

Tahun	Kabupaten Luwu		Provinsi Sulawesi Selatan		Nasional	
	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)
2021	48,29	28,29	59,50	37,50	62,26	40,78
2022	53,38	29,51	65,35	38,98	71,04	42,47
2023	57,36	30,76	69,71	40,29	74,96	44,14
2024	59,73	31,68	73,57	41,86	78,62	45,88

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara, PDRB per kapita Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir berada di urutan ketiga tertinggi di bawah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Wajo. Dimana pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Luwu sebesar Rp. 59,73 juta atau meningkat sebesar Rp. 2,37 juta dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.34.
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu, masih menjadi masalah aktual. Berikut Grafik yang menggambarkan perkembngan TPT di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir :

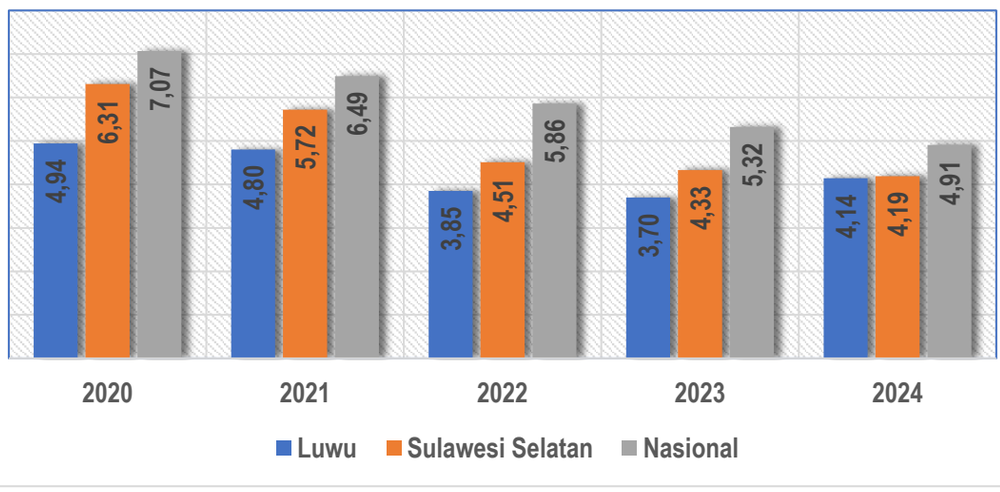
Grafik 2.35.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025.

Berdasarkan data perkembangan TPT Kabupaten Luwu tersebut di atas, nampak bahwa angka TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 4,14 persen, capian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,44, dimana pada tahun 2023 capaian TPT Kabupaten Luwu sebesar 3,70 persen. adapun kenaikan TPT di Kabupaten Luwu antara lain disebabkan adanya kejadian bencana alam berupa tanah longsor dan banjir yang melanda beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lahan pertanian, lahan perkebunan, dan perikanan.

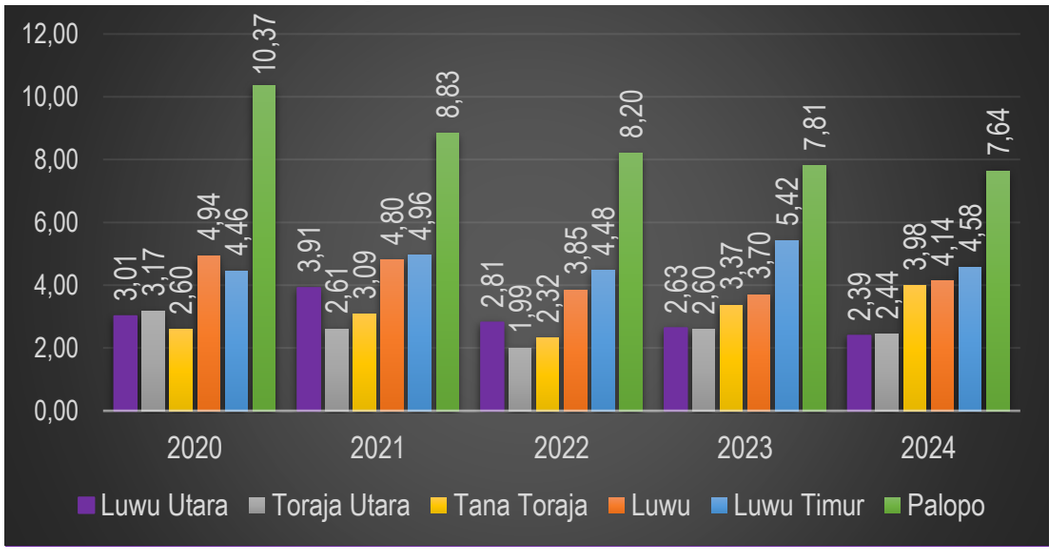
Grafik 2.36.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025

Dengan memperhatikan data perkembangan capaian persentase TPT masing-masing wilayah tersebut di atas, maka untuk Kabupaten Luwu, pada tahun 2020-2024 persentase penurunan TPT Kabupaten Luwu berada dibawah capaian persentase TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana capaian persentase TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 4,14 persen, sementara pada tingkat Provinsi Sulawesi selatan sebesar 4,19 persen dan Nasional sebesar 4,91 persen. Menurunnya tingkat Penganguran Terbuka tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Grafik 2.37.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



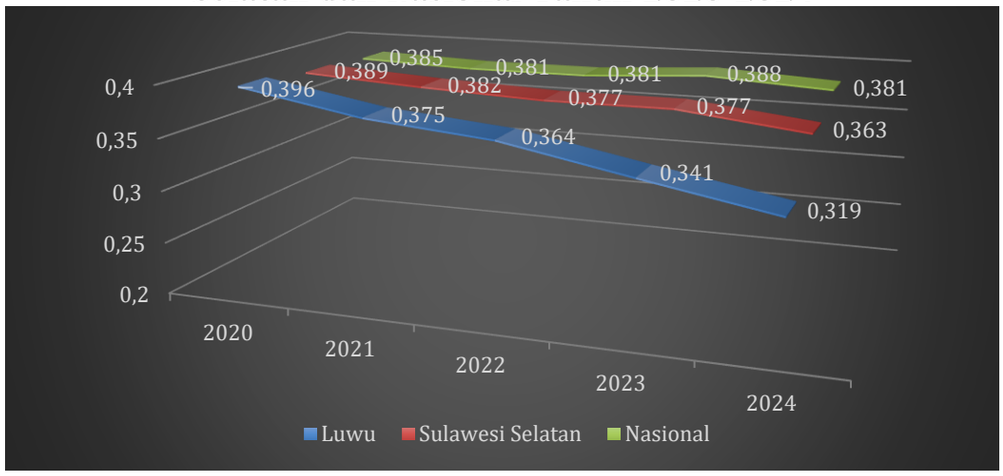
Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Dari grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian persentase TPT Kabupaten Luwu berada pada urutan keempat terkecil dari 6 kabupaten/kota sekitar. Adapun capaian Kabupaten Luwu yakni sebsar 2,39 persen, capaian tersebut lebih tinggi dari Kabupaten Tana Toraja dengan capaian sebesar 3,98 persen, Toraja Utara sebesar 2,44 persen Luwu Utara sebesar 2,39 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya jumlah serapan angkatan kerja, dimana yang berstatus bekerja hanya sebesar 198.230 jiwa dan yang bekerja diantaranya sebanyak 190.018 jiwa.

f. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran suatu masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara **0** (atau nol persen) dan **1** (atau 100 persen). Nilai indeks gini yang semakin mendekati **1** mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berikut perkembangan indeks gini di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

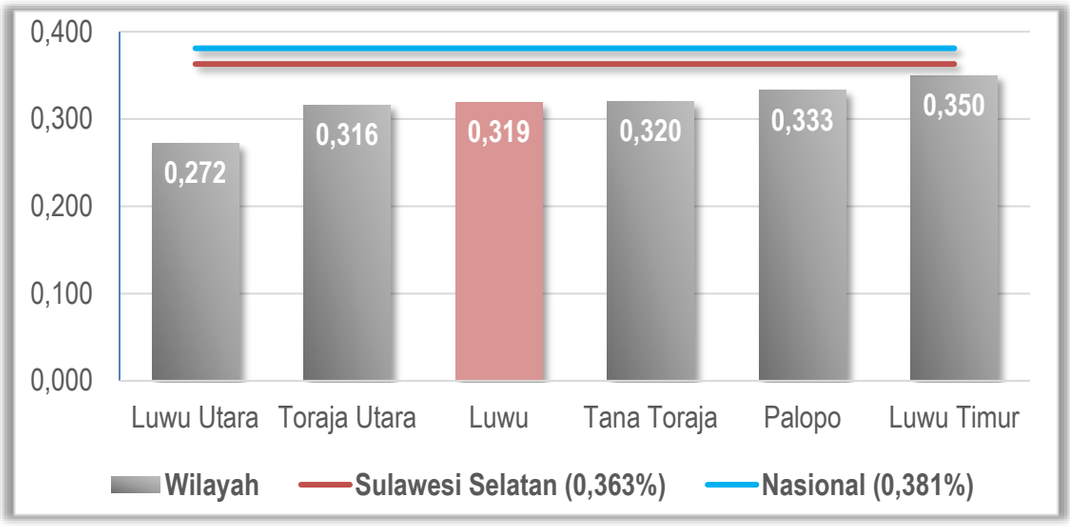
Grafik 2.38.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Berdasarkan grafik diatas, indeks gini di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,396 dan terendah pada tahun 2024 yakni sebesar 0,319. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dengan realisasi pada tahun 2024 masing-masing sebesar 0,363 dan 0,381. Hal ini menandakan bahwa semakin meratanya pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.39.
Indeks Gini Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara
Tahun 2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara pada kawasan Palopo dan sekitarnya, nampak bahwa indeks gini Kabupaten Luwu pada tahun 2024 berada di posisi ketiga tertinggi dengan nilai sebesar 0,319. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Luwu semakin merata.

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan pribadi atau keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif, di Kabupaten Luwu gambaran kesehatan untuk semua dicerminkan antaran lain melalui Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang disajikan di bawah ini :

Tabel 2.15.
Perkembangan Capaian Indiator Bidang Kesehatan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,66	72,76	73,06	73,30	73,52
Usia Harapan Hidup Laki-Laki	Tahun	70,70	70,79	71,04	71,20	71,34

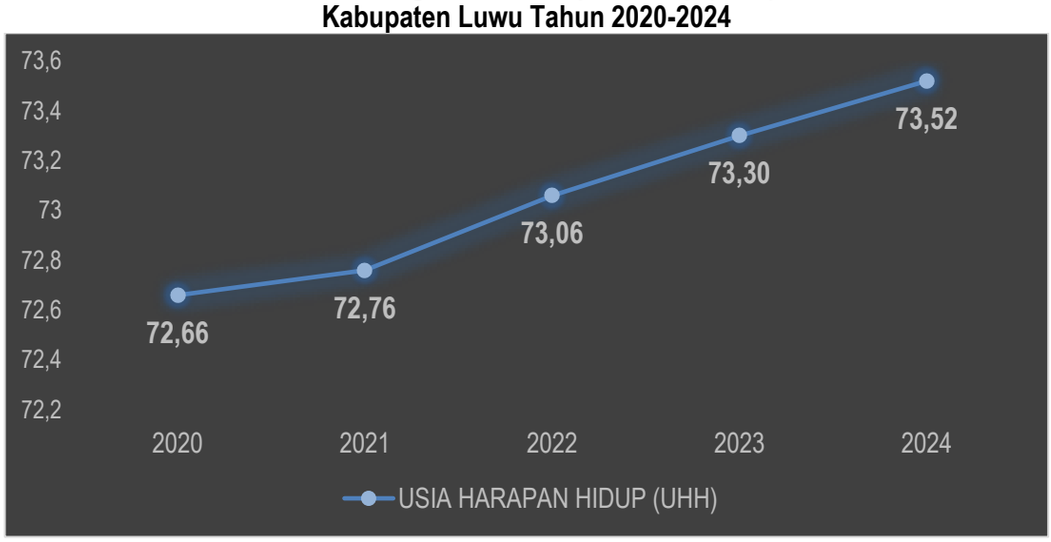
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup Perempuan	Tahun	74,23	74,82	75,17	75,50	75,80
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	160,46	233,75	181,70	129,39	166,29
Prevalensi Stunting	Persen	-	22,80	26,70	32,10	23,60
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	39,02	43,98	54,91	45,18	54,00
Anga Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate)	Persen	90,91	87,00	87,69	85,28	89,00
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	Persen	89,27	84,26	88,71	85,38	88,42

Sumber :

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai perkiraan jumlah tahun atau seberapa lama seseorang diharapkan dapat hidup. Semakin tinggi rata-rata usia harapan hidup, maka perkiraan lama hidup seseorang akan semakin panjang. Berikut perkembangan usia haraoan hidup Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dan data perbandingan wilayah kabupaten/kota sekitar.

Grafik 2.40.
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

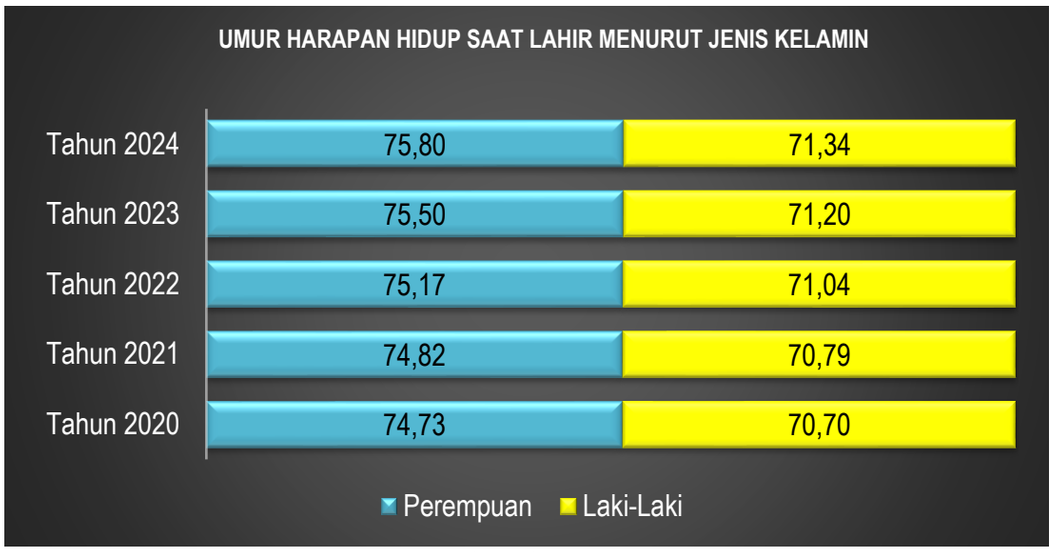


Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Pada tahun 2024, nilai UHH Kabupaten Luwu berdasarkan hasil LF2020 telah mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin atau mengalami peningkatan menjadi sebesar 73,52 Tahun, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 73,30 Tahun. Meningkatnya capaian UHH Kabupaten Luwu antara lain dipengaruhi oleh persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan selama sebulan terakhir, dimana capaiannya cukup membaik, sebagaimana dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebesar 26,35 persen, angka tersebut kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 24,04 persen pada tahun 2024 dan adapun faktor lain dalam meningkatkan dan menjaga kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Luwu yakni antara lain melalui peningkatan jumlah keluarga yang memiliki akses sarana air bersih dan sanitasi layak, untuk tahun 2024, persentase penduduk yang berakses air minum layak sebesar 80,41 persen atau sebanyak 308.112 dari total jumlah penduduk sebanyak 383.198 jiwa, sedangkan yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 75,98 persen atau sebanyak 60.402 Rumah Tangga.

Kemudian untuk Usia Harapan Hidup perjenis kelamin di Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tahun 2020-2024 masih di dominasi oleh jenis kelamin perempuan, dimana pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 74,73 tahun dan jenis kelamin laki-laki sebesar 70,70 tahun, kemudian pada tahun 2024 usia harapan hidup perempuan kembali menempati angka capaian yang lebih tinggi dari jens kelamin Laki-laki yang menandakan bahwa usia harapan hidup jenis kelamin perempuan hidup lebih lama dibanding Laki-laki, dimana pada tahun 2024 UHH perempuan mencapai 75,80 tahun, sedangkan usia harapan hidup Laki-laki sebesar 71,34 tahun. Oleh karena itu kesenjangan harapan hidup antara perempuan dan laki-laki perlu menjadi perhatian agar kedepan arah kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga dapat berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup dan menekan kesenjangan usia harapan hidup antara Laki-Laki dan perempuan.

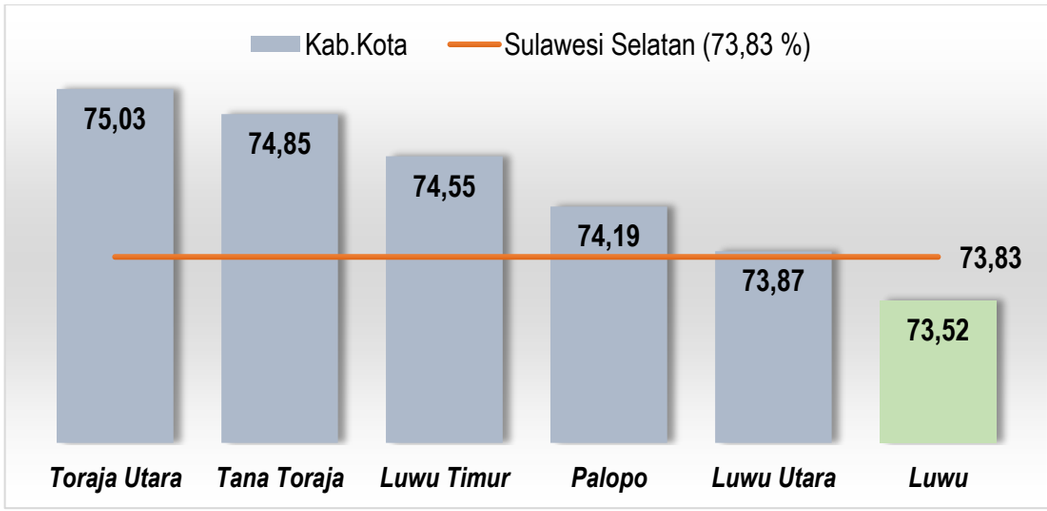
Grafik 2.41.
Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun) Per Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Selanjutnya untuk perbandingan antar Kabupaten Kota sekitar, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 capaian Kabupaten Luwu masih berada dibawah Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan kota palopo dengan nilai selisih kurang lebih sebesar 1 (Satu) tahun untuk provinsi dan sekitar kurang lebih 2 (Dua) tahun untuk Kota Palopo.

Grafik 2.42.
Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

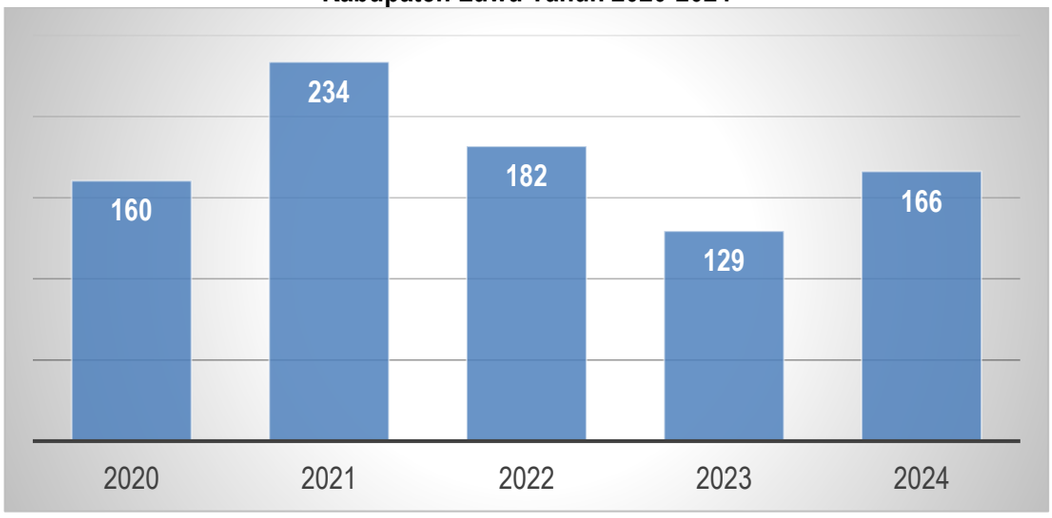


Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

b. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

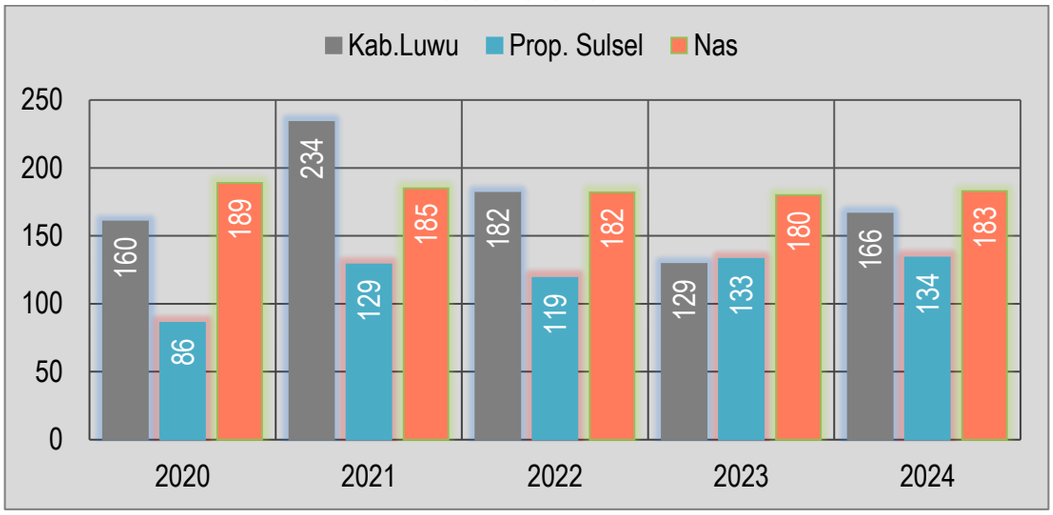
Angka Kematian Ibu atau (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, angka kematian ibu melahirkan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah kasus mencapai 15 kasus kematian dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.417 jiwa, melihat masih tingginya jumlah kasus kematian pada ibu yang menandakan bahwa telah terjadi masalah dalam sistem kesehatan an masyarakat di Kabupaten Luwu, oleh karena itu Pemerintah Kabupate Luwu dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu berupaya lebih maksimal dalam pencegahan angka kematian ibu. di bawah ini disajikan perkembangan capaian Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dalam bentuk grafik.

Grafik 2.43.
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.44.
Perbandingan Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan grafik perkembangan dan perbandingan capaian tersebut di atas, nampak bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 234 per 100.000 kelahiran hidup, namun jika dilihat dari jumlah kunjungan ibu hamil K4 pada tahun yang sama, nampak bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 tergolong tinggi yakni dengan nilai sebesar 84,11 persen dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal K4 sebanyak 6.315 ibu hamil, kemudian Angka Kematian Ibu tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 166 per 100.000 kelahiran hidup atau dengan jumlah kasus kematian sebanyak 8 kasus pada tahun 2024 dengan cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar 53,56 persen dari total sasaran ibu hamil sebanyak 8.645 orang. Penurunan angka kematian ibu dalam kurun waktu tahun 2020-2024 tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan kesehatan pada ibu hamil dan melahirkan. Kemudian Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Propinsi dan Nasional pada tahun 2024, nampak bahwa capaian Kabupaten Luwu masih berada di bawah capain tingkat Nasional, dan di atas capaian Propinsi Sulawesi Selatan, dimana capaian Nasional sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dan propinsi Sulawesi Selatan sebesar 134 per 100.000 kelahiran hidup, masih tingginya AKI

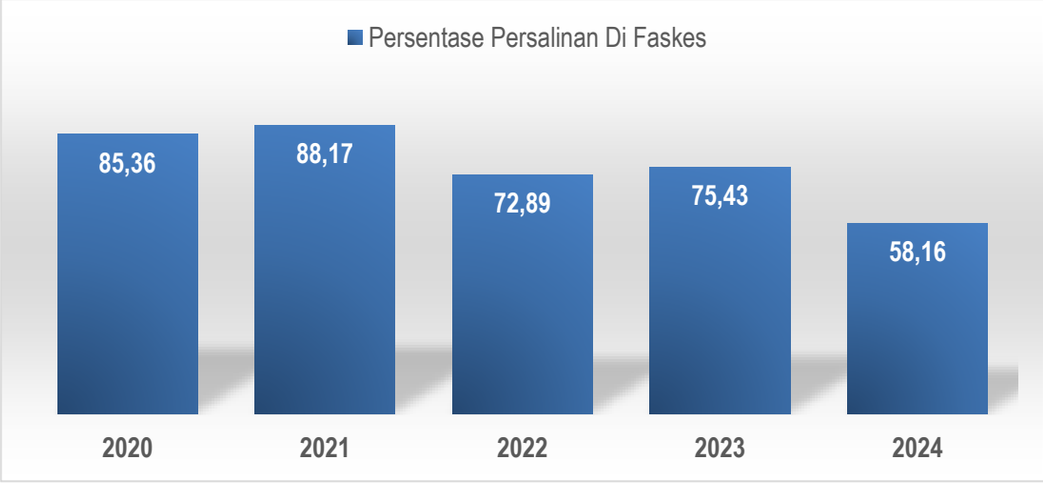
Kabupaten Luwu dengan nilai sebesar 166 per 100.000 kelahiran hidup disebabkan antara lain karena faktor geografis, dimana masih terdapat beberapa wilayah tergolong daerah terpencil yang menyebabkan kurangnya akses layanan seperti kegawatdaruratan di tingkat dasar (pustu maupun poskesdes) serta terbatasnya sumberdaya tenaga kesehatan terkait kegawat daruratan.

c. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan adalah merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri, adapun tempat yang paling ideal untuk persalinan adalah fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan, sebagaimana diketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan segala sarana dan prasarana alat atau tempat yang dapat menunjang kesehatan atau dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Di Kabupaten Luwu berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta pemerataan pelayanan kesehatan kehamilan dan persalinan yang ada di masyarakat dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu. Berdasarkan data dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 jumlah ibu melahirkan di fasilitas kesehatan sebanyak 6.117 orang dengan jumlah sasaran ibu bersalin sebanyak 7.166 orang, mengalami peningkatan pada thun 2021 menjadi sebanyak 6.318 orang dengan sasaran sebanyak 7.166 orang, kemudian pada tahun 2022 jumlah ibu melahirkan mengalami penurunan menjasi sebanyak 6.015 orang dengan sasaran sebanyak 8.252 orang, menurun lagi menjadi sebesar 5.376 orang dengan sasaran sebanyak 7.127 orang, selanjutnya pada tahun 2024, jumlah ibu melahirkan kembali mengalami penurunan sebesar 577 orang atau menjadi sebanyak 4.799 dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 8.252 orang. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data

persentse persalinan yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 :

Grafik 2.45.
Perkembangan Persentase Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

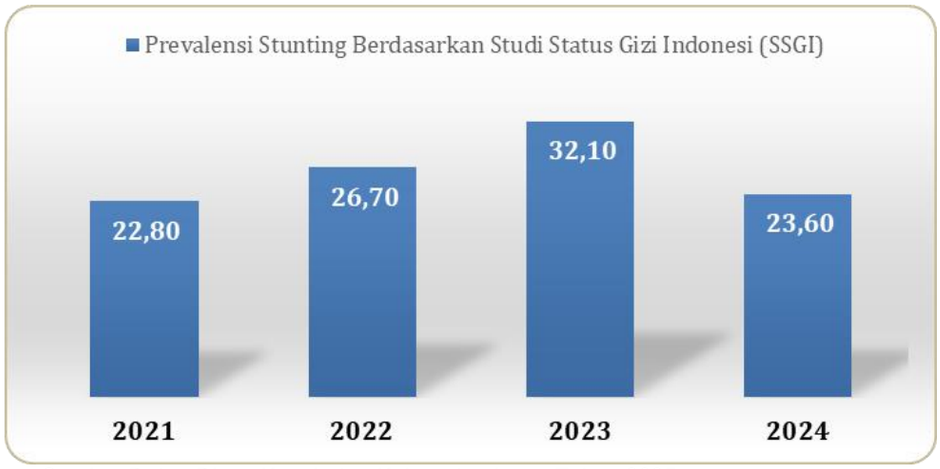


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

d. Prevalensi Stunting

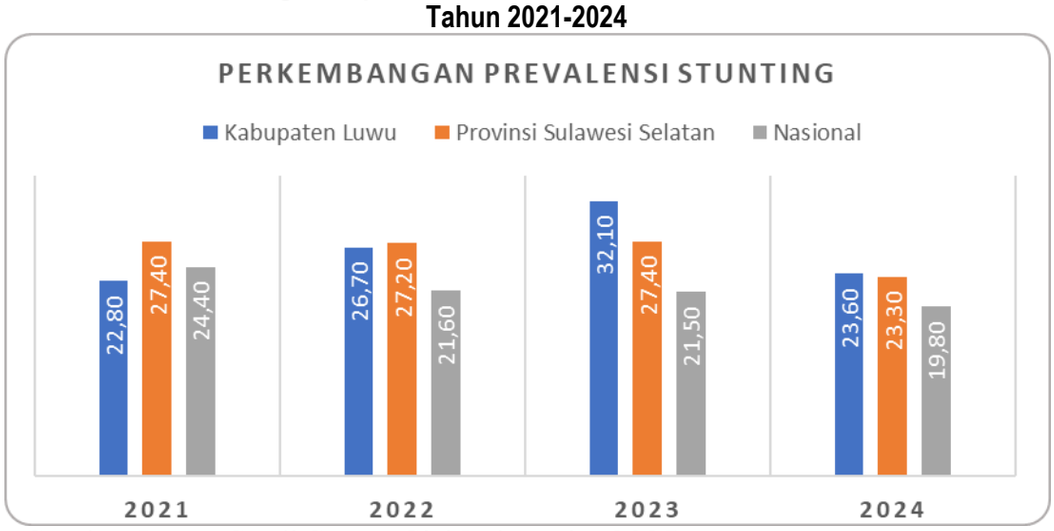
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Upaya dalam menangani masalah *stunting* pada balita secara nasional telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Keseriusan Pemerintah dalam percepatan penanganan masalah stunting dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Salah satu tujuan dalam Stranas tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun, Berikut ini disajikan data perbandingan capaian prevalensi stunting Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Grafik 2.46.
Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.47.
Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Studi Status Gizi Indonesia, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2024 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia telah mengalami peningkatan yaitu dari 22,80 persen pada tahun 2021 menjadi 23,60 persen di tahun 2024. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, nampak bahwa Capaian prevalensi stunting Kabupaten Luwu masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tingkat Nasional dimana realisasi pada tahun 2024 sebesar 23,30 persen dan untuk tingkat Nasional sebesar 19,80 persen, adapun beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting di Kabupaten Luwu diantaranya dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain yakni cakupan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang belum maksimal, cakupan layanan penduduk berakses air minum bersih serta adanya perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2024 cakupan Pemberian makanan tambahan gizi masih dengan nilai sebesar 59,60 persen, kemudian cakupan layanan penduduk yang berakses air minum bersih dengan niai sebesar 80,41 persen, selanjutnya untuk wasting (gizi buruk dan gizi kurang) yang berpotensi melahirkan stunting baru juga masih tergolong cukup tinggi dengan nilai sebesar 2,3 persen. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu kedepan akan lebih meningkatkan koordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sehingga diharapkan dapat berdampak pada sasaran intervensi bisa tepat sasaran, serta meningkatkan penyebaran tenaga gizi agar sebarannya merata pada masing-masing wilayah.

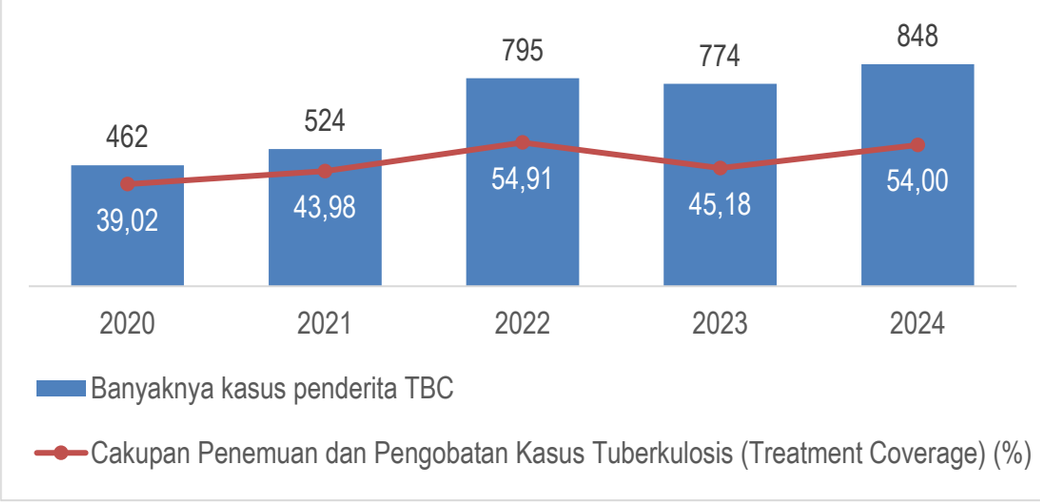
e. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang memengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru dan disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Penyakit TBC masih merupakan masalah Kesehatan di Indonesia yang hingga sekarang belum terselesaikan. Oleh karena itu, berbagai terobosan telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya percepatan menuju eliminasi Tuberkulosis, salah satunya adalah penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis secara aktif, masif dan intensif.

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Berikut data perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus

Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.48.
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2025

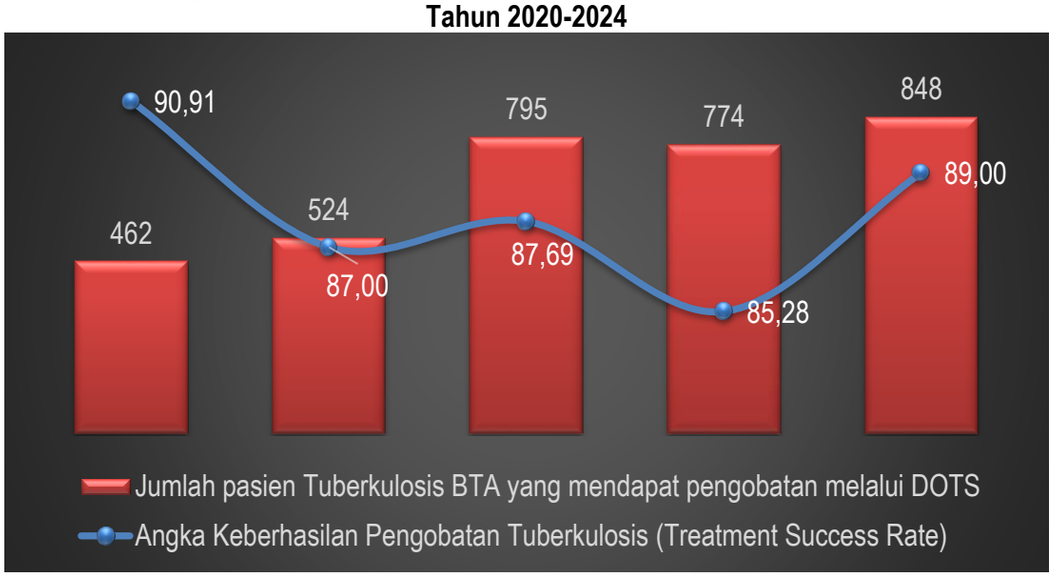
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) mengalami fluktuasi. cakupan penemuan kasus tuberkulosis tertinggi berada pada tahun 2022 yakni sebesar 54,91 persen, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10,93 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 43,98 persen atau meningkat dengan jumlah kasus sebanyak 795 kasus dari jumlah penduduk sebanyak 369.820 jiwa, kemudian pada tahun 2024 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB sebesar 54 persen dengan jumlah kasus pasien penderita TB sebanyak 848 kasus dengan jumlah penduduk sebanyak 380.679 jiwa.

f. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan

tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%. Berikut data perkembangan *treatment success rate* tuberculosis di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 - 2024.

Grafik 2.49.
Perkembangan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2025

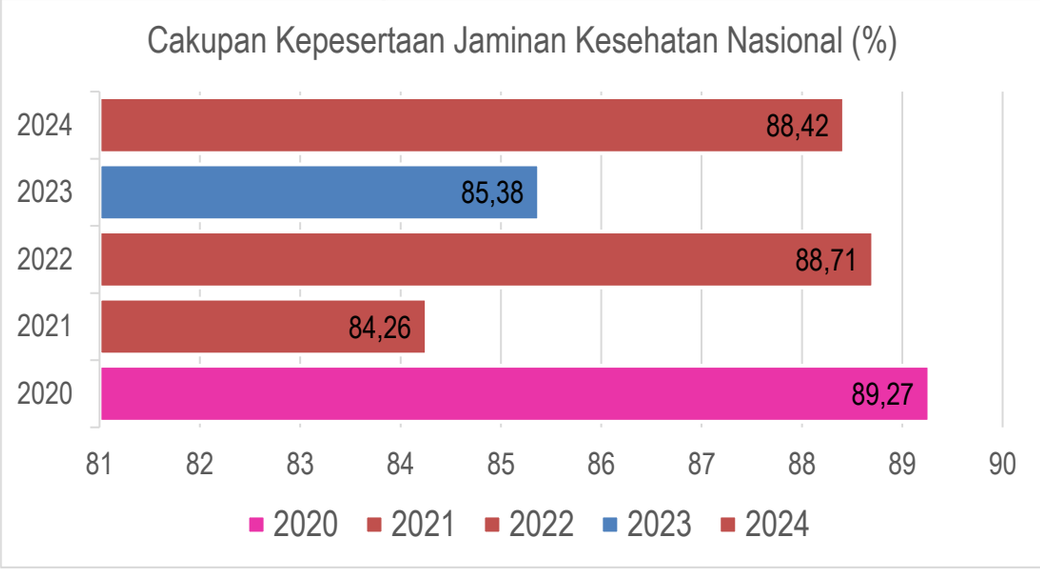
Berdasarkan grafik diatas, angka keberhasilan pengobatan tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 capaian Kabupaten Luwu sebesar 90,91 persen mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 yakni sebesar 85,28 persen, kemudian pada tahun 2024 angka keberhasilan pengobatan mengalami peningkatan sebesar 3,72 persen atau menjadi sebesar 89,00 persen, dari capaian tersebut nampak bahwa capaian keberhasiln Kabupten Luwu masih jauh dari target minimal keberhasilan pengobatan untuk semua kasus tuberkulosis, dimana angka keberhasilan capaian yakni sebesar 90 persen.

g. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis maupun non medis, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative dan seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran peserta. Berikut

data perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.50.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, cakupan kepesertaan JKN selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi sebesar 89,72 persen pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,26 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami dan tidak menyadari pentingnya JKN.

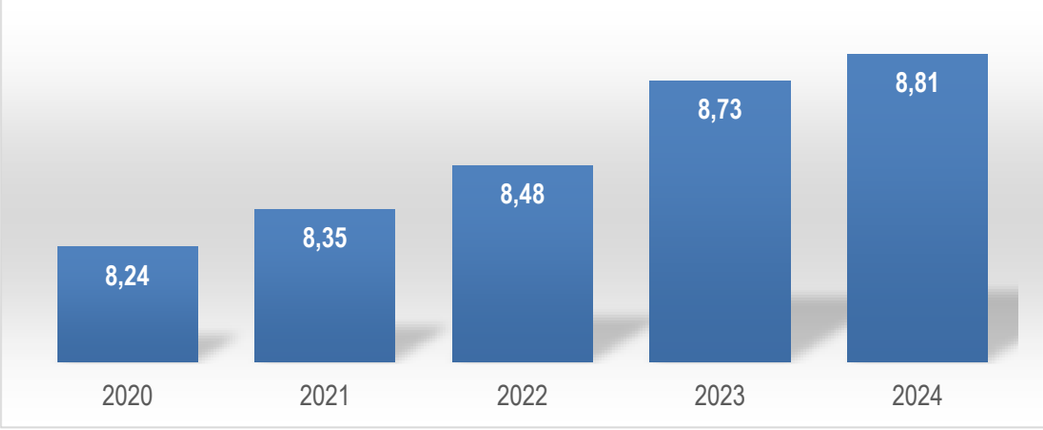
2.2.2.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata didefinisikan sebagai setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis untuk mewujudkan kehidupan masyaralat dan bangsa yang bermartabat., di Kabupaten Luwu gambaran pendidikan berkualitas yang merata dicerminkan antara lain melalui Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembngunan Literasi Masyrakat, Indeks Literasi Digital sebagai berikut :

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

Angka RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, meningkatkan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di Kabupaten Luwu capaian angka RLS penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 8,73 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,8 poin atau menjadi sebesar 8,81 tahun pada tahun 2024, hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaen Luwu adalah setara kelas satu SMP/Sederajat. Dari capaian RLS ini masih menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu belum sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun, oleh karena itu kedepan Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus berupaya meningkatkan capaian RLS karena semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. Di bawah ini disajikan perkembangan RLS Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 :

Grafik 2.51.
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

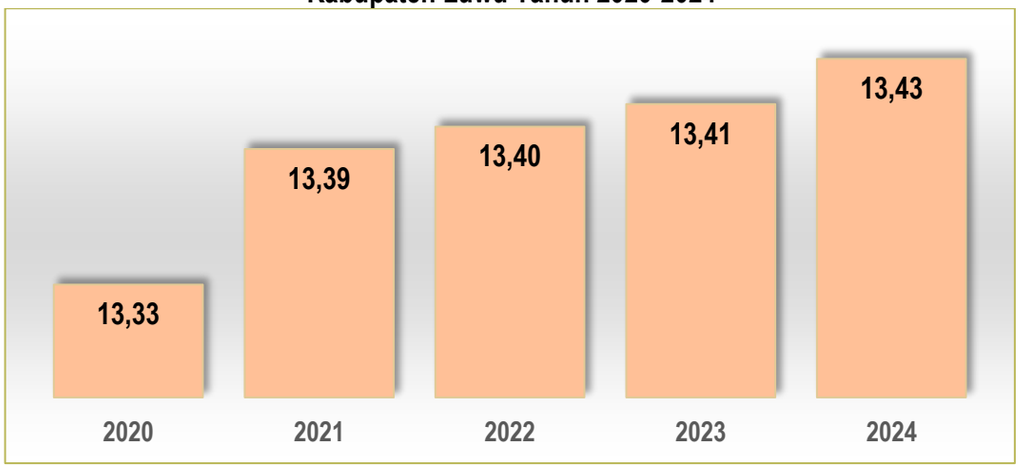


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk lebih jelanya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik terkait capaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu selama periode tahun 2020-2024.

Grafik 2.52.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

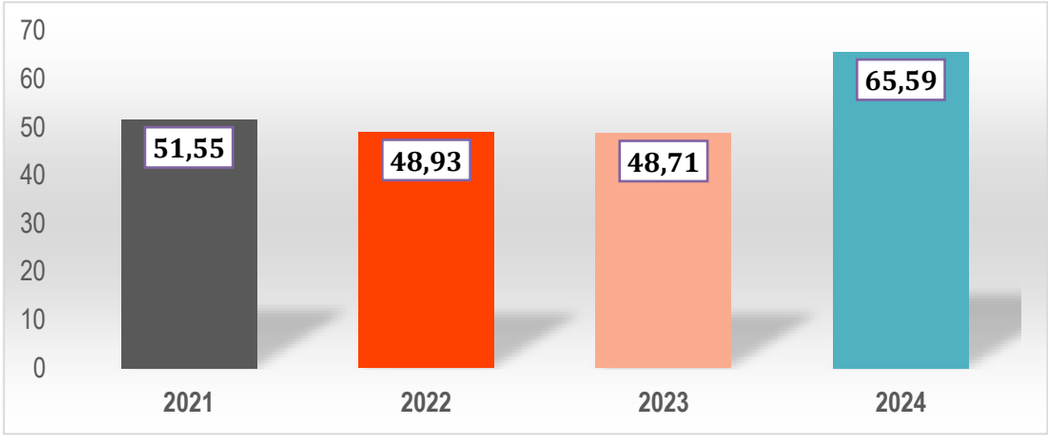
Dari perkembngan grafik tersebut di atas, diketahui bhwa capaian Kbupaten Luwu terus mengalami peningkatan, Dimana. Pada tahun 2020 sebesar 13,33 tahun, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 13,43 tahun. Hal ini menandakan bahwa saat ini infrastruktur pendidikan di Kabupaten Luwu semakin memadai sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat setiap tahunnya.

c. Angka Literasi

Literasi menurut *International Literacy Association* (ILA) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan symbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan.

Definisi ini menegaskan bahwa konsep literasi perlu mengakomodasi dua komponen penting, yaitu *teks dan kecakapan berpikir*. Adapun Angka Literasi yakni ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat melek huruf dalam suatu wilayah atau negara. Angka ini mengindikasikan persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa tertentu. Pada tahun 2021, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu capaian nilai Angka Literasi Kabupaten Luwu sebesar 51,55 persen, hal tersebut mengindikasikan bahwa ada tingkat melek huruf di Kabupaten Luwu, dimana Nilai Angka Literasi dipengaruhi oleh faktor banyaknya jumlah penduduk dalam wilayah atau negara tersebut memiliki kemampuan membaca dan menulis. Peningkatan melek huruf dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan individu, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Penting diketahui bahwa Angka Literasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pendidikan, akses terhadap pendidikan, dan kualitas pendidikan. Di bawah ini disajikan data perkembangan angka literasi Kabupaten Luwu tahun 2021-2024.

Grafik 2.53.
Perkembangan Angka Literasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, 2025.

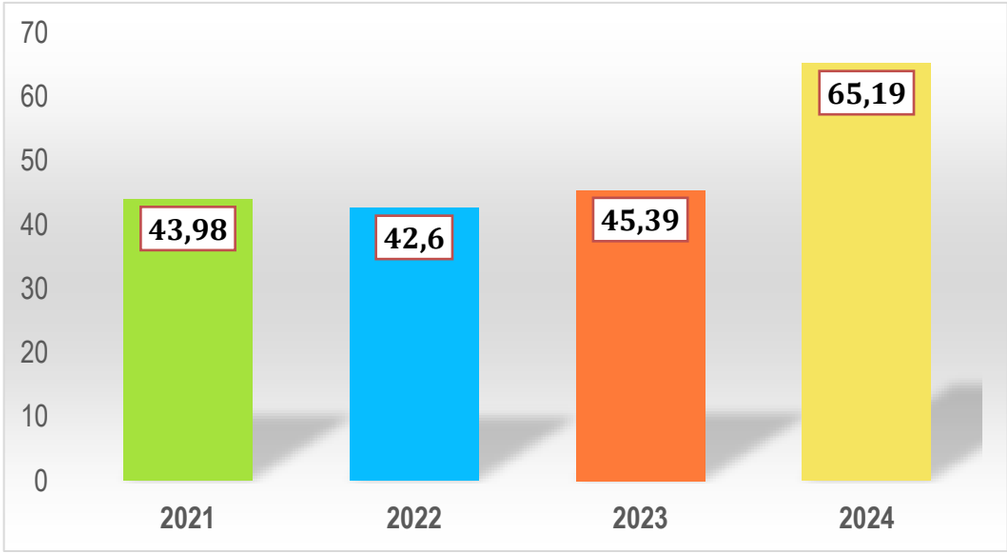
Berdasarkan grafik di atas nampak bahwa kemampuan literasi Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 65,59 persen, peningkatan tersebut disebabkan antara lain makin

meningkatnya kualitas tenaga pendidik, dan banyaknya anak-anak yang mahir dalam memahami teks bacaan.

d. Angka Numerasi

Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mengasah dan menguatkan pengetahuan serta keterampilan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan serta dapat memprediksi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis. Perlu diketahui bahwa numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari, yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis. Adapun angka numerasi yakni ukuran yang mengindikasikan persentase penduduk yang memiliki kemampuan matematika atau numerasi yang baik, seperti pemahaman terhadap konsep-konsep matematika dasar. Pada tahun 2021, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, nilai Angka Numerasi Kabupaten Luwu sebesar 43,98 persen, capaian terssbut mengindikasikan penduduk Kabupaten Luwu memiliki kemampuan matematika yang baik, sebgimana diketahui bahwa kemampuan matematika yang baik dapat memiliki dampak positif pada banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Penting untuk diketahui bahwa Angka Numerasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem pendidikan, akses terhadap pendidikan matematika, dan kualitas pendidikan. Berikut perkembangan capaian angka numerasi Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2024.

Grafik 2.54.
Perkembangan Angka Numerasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan data grafik tersebut di atas, nampak bahwa kemampuan numerasi pada Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 65,19 persen, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, capain Kabupaten Luwu yakni sebesar 45,39 persen atau telah mengalami peningkatan sebanyak 19,8 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang Pendidikan.

e. Angka Partisipsi Sekolah

Angka Partisipsi Sekolah atau biasa disebut APS adalah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.16.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	92,17	93,66	90,12	40,98	54,09
SD/MI	%	93,94	94,14	94,35	98,48	79,48
SMP/MTs	%	94,28	96,08	95,06	79,76	75,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 capaian APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 92,17 persen menurun menjadi 54,09 persen pada tahun 2024. Kemudian untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 93,94 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 79,48 persen. selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 94,28 persen pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 75,70 persen pada tahun 2024. Perkembangan persentase APS di Kabupaten Luwu pada kurun waktu tahun 2020-2024 menandakan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 54 persen anak usia 4-6 tahun sedang mengikuti proses pembelajaran, adapun capaian angka tersebut merupakan angka capaian terendah jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya pada tahun yang sama.

Selanjutnya jika dilihat dari angka kelulusan, nampak bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami fluktuasi. Tahun 2020 angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,84 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 99,33 persen pada tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 96,78 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,81 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.17.

Angka Kelulusan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	%	93,84	95,58	96,58	93,73	99,33
SMP/MTs	%	96,78	97,46	97,04	80,98	97,81

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Kemudian untuk Angka Melanjutkan (AM), sebagaimana diketahui bahwa angka ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dan capaian tertinggi angka melanjutkan terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan nilai capaian sebesar dari 102,40 persen dan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 69,85 persen. Berikut data perkembangan capaian Angka Melanjutkan Kabupaten Luwu periode tahun 2020-2024.

Tabel 2.18.

Perkembangan Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI ke SMP/MTs	%	102,40	101,15	100,96	69,85	99,33

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025

Selanjutnya mengenai pencapaian masing-masing jenjang pendidikan dalam rangka percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Luwu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Anak Tidak Sekolah atau disebut ATS adalah merupakan Anak usia sekolah yang tidak pernah/belum sekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, dan lulus tidak melanjutkan atau berpartisipasi dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Pada tahun 2024 jumlah anak usia 7 sampai 12 tahun yang mengenyam pendidikan sesuai usia jenjang pendidikan sebanyak 36.050 orang dengan jumlah anak tidak tamat SD/Sederajat sebesar 0,13 persen atau sebanyak 46 0rang. Sementara jumlah anak usia 13 sampai 15 tahun yang tidak tamat SMP/Sederajat sebesar 0,30 persen dari jumlah total anak usia 13-15 tahun sebanyak 13.829 orang pd tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data perkembangan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024:

Tabel 2.19.

Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)

Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024

Tahun	Satuan	Usia 7-12 Tahun		Usia 13-15 Tahun	
		Jumlah Anak	Tidak Tamat SD/Sederajat	Jumlah Anak	Tidak Tamat SMP/Sederajat
2021	Orang	36.936	48	15.222	111
2022	Orang	37.305	55	13.832	35
2023	Orang	36.756	59	13.371	76
2024	Orang	36.050	46	13.829	42

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

f. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar atau APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 93,94 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 79,47 persen pada tahun 2024. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B terjadi penurunan dari 98,68 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 75,70 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.20.

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2021	2023	2024
SD/MI/ Paket A	%	93,94	94,14	94,14	98,48	79,47
SMP/MTs/ Paket B	%	98,68	96,08	96,08	79,76	75,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

.

g. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang

bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 capaian nilai APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,94 persen tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 79,57 persen di tahun 2024. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 98,68 persen pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 76,53 persen.

Tabel 2.21.

Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

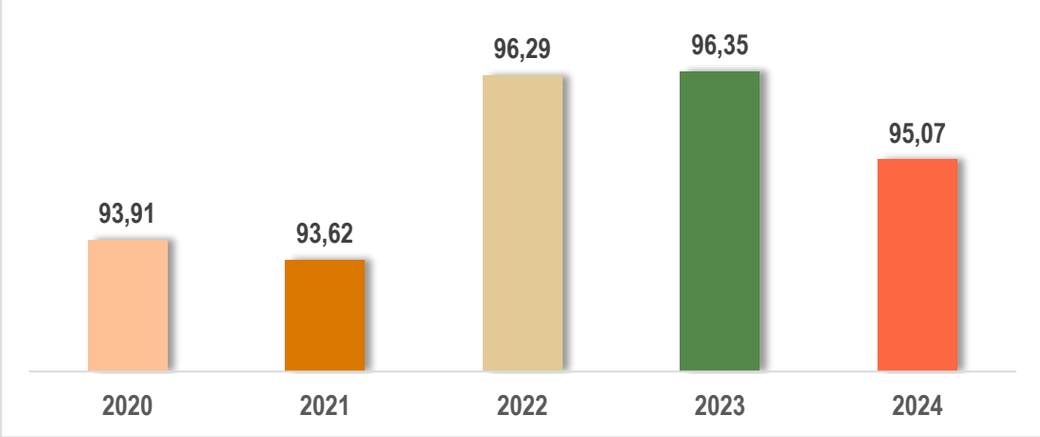
Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/ Paket A	%	93,94	94,14	93,63	98,48	79,57
SMP/MTs/ Paket B	%	98,68	96,56	94,49	79,76	76,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

h. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan tingkat keberhasilan program pendidikan begitu pula sebaliknya. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Berikut perkembangan AMH Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024.

Grafik 2.55.
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

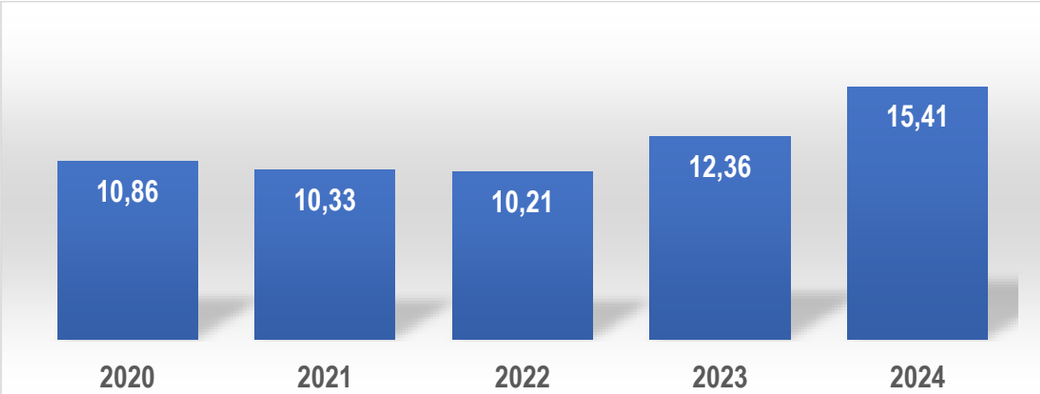


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

i. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV; S1; S2; S2 Terapan; dan S3. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% yang artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Berikut perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.56.
Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Luwu dalam Angka, 2020-2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi selama tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi namun, memiliki tren yang meningkat. Dimana pada tahun 2020 dengan nilai mencapai 10,86 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 15,41 persen persen pada tahun 2024, hal tersebut menandakan bahwa hanya terdapat 15,41 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi dari total jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 290.190 jiwa. Rendahnya penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ini menggambarkan kualitas penduduk di Kabupaten Luwu dari segi pendidikan masih belum maksimal.

j. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 16,33 persen menjadi sebesar 92,18 persen. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 35,27 persen meningkat menjadi sebesar 96,61 persen pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebanyak 50,04 persen.

Tabel 2.22.

Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	438	441	453	2.356	2.240
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	2.683	2.683	2.743	4.043	2.430
Persentase	**%**	**16,33**	**16,44**	**16,51**	**58,27**	**92,18**
SMP/MTs						

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	401	413	407	472	1.001
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	1.137	1.137	1.132	1.003	1.047
Persentase	**%**	**35,27**	**36,32**	**35,95**	**47,05**	**95,61**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

k. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia tersebut. Sebagaimana tabel di bawah dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar selama lima tahun terakhir mengalami tren penurunan, dimana Pada tahun 2020 capaian nilainya sebesar 65,50 poin. Angka ini menurun menjadi sebesar 61,71 poin pada tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah sekolah pada periode yang sama, nampak bahwa pada tahun 2020 jumlah sekolah yang tersedia sebanyak 250 unit, meningkat menjadi sebanyak 252 unit sekolah pada tahun 2024, adapun jumlah sekolah tertinggi berada pada tahun 2023 dengan jumlah sekolah sebanyak 267 unit sekolah.

Tabel 2.23.

Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (Per 10.000 penduduk)	Rasio	65,50	67,25	67,36	64,27	61,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

l. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah

tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 1:12. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 12 murid.

Tabel 2.24.

Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI + SMP/MTs	Guru : Murid	1:14	1:15	1:14	1:17	1:12
SMA/SMK/MA	Guru : Murid	1:12	1:12	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

m. Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat

Persentase ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2023 meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 38,30% dari 1,86% di tahun 2022 Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat pada jenjang SD/MI juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu dari 16,94% pada tahun 2019 menjadi 14,06% pada tahun 2023.

Sementara itu, ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan drastis yaitu dari 54,10% pada tahun 2019 menurun menjadi 35,07% pada tahun 2023. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat juga mengalami trend yang menurun yaitu dari 8,51% di tahun 2019 menjadi 2,40% di tahun 2022 namun untuk tahun 2023 kembali meningkat menjadi 9,00 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.

Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	1.053	996	46	784	202
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2356
Persentase	**%**	**45,68**	**42,71**	**1,86**	**38,30**	**8,57**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	324	295	28	288	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2.356
Persentase	**%**	**15,85**	**14,06**	**12,65**	**14,06**	**0,34**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	489	461	28	296	107
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**50,36**	**46,90**	**2,69**	**35,07**	**5,58**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	77	61	25	76	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**7,92**	**6,20**	**2,40**	**9,00**	**0,42**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

n. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Persentase penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukan kondisi yang fluktuatif namun memiliki tren yang cenderung menurun. Jika melihat data tabel di bawah menunjukkan angka melek huruf belum mencapai angka 100 persen, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang melek huruf adalah sebesar 93,91 persen dari jumlah total penduduk usia yang sama sebanyak 329.791 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 95,07 persen atau dengan total keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 349.391 jiwa.

Tabel 2.26.

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	93,91	93,62	96,29	96,35	95,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

o. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Secara umum, jika melihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu antara tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, yaitu 70,36 persen pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 84,28 persen pada tahun 2024, jika dilihat perkembangan pada tahun 2023-2024, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 12,71 persen, dimana pada tahun 2023, capainnya sebeasar 72,11 persen. Adapun hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkait capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi pada masa mendatang adalah tetap memperhatikan tingkat keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.27.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	70,36	62,85	76,52	72,11	84,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

p. Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta didik non formal mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024, dari 1.731 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.754 orang di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan menjadi 513 orang di tahun 2024. Penurunan terbanyak terjadi pada

pendidikan Paket C yaitu dari 1.185 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 286 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

Tabel 2.28.

Pendidikan Non Formal
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

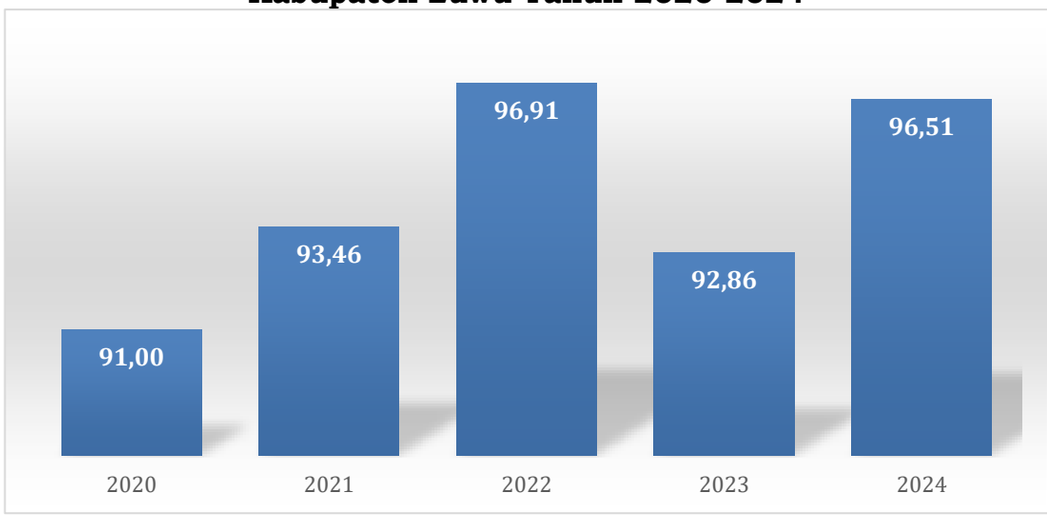
Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Paket A	Orang	92	307	101	126	44
Paket B	Orang	454	604	420	200	183
Paket C	Orang	1.185	1.843	1.145	711	286
Jumlah	Orang	**1.731**	**2.754**	**1.666**	**1.037**	**513**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

q. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah merupakan jenjang pendidikan tertinggi seseorang atau anggota masyarakat yang telah diselesaikan dengan memperoleh surat tanda tamat dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya, sebagaimana diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, tertuama pada sektor formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu pada tahun 2020-2024, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tinggi *(program diploma, program sarjana, dst)* yang ditamatkan setiap tahunnya mengalami perubahan yang cenderung memiliki tren meningkat, dimana pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 19.628 jiwa atau sebesar 91 persen. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan perkembangan capaian Kabupaten Luwu dalam bentuk grafik.

Grafik 2.57.
Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

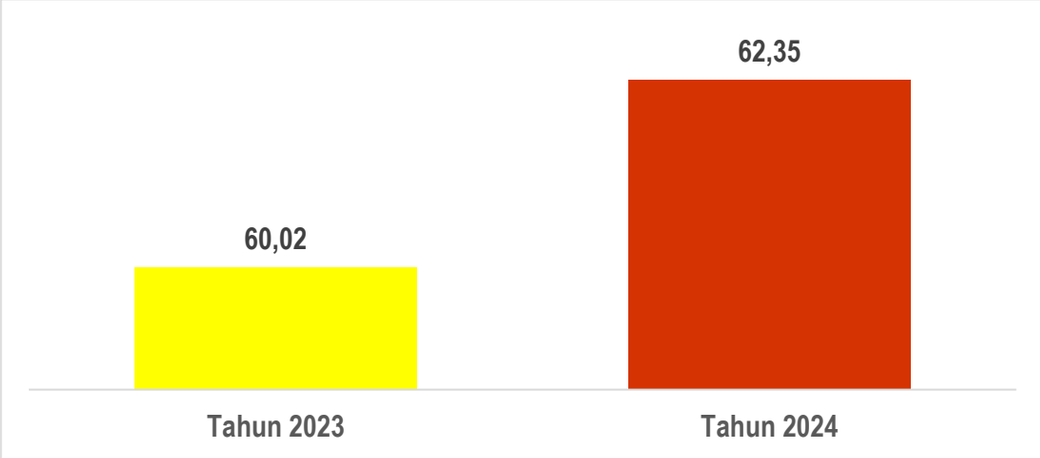


Sumber Data : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2025

r. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

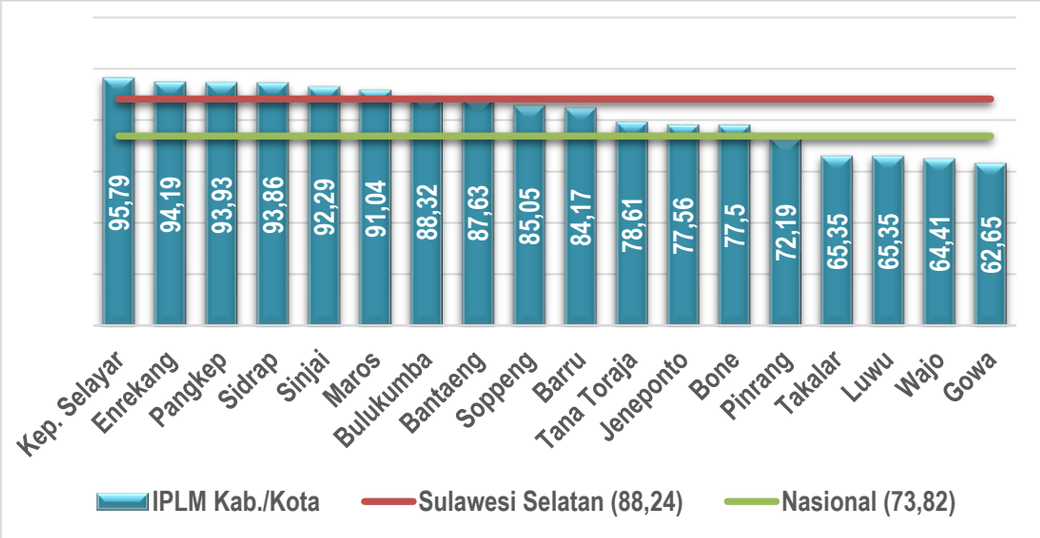
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau disebut IPLM digunakan sebagai alat ukur terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan Pengukuran IPLM agar dapat diketahui kondisi mengenai jenis perpustakaan, baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pemustaka itu sendiri. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun pengukuran IPLM dihitung melalui skor indeks (skala level 100*), untuk tingkat 0-30 kategori skor rendah, 30-50 kategori rendah, 50-80 kategori sedang, 80-90 kategori tinggi, dan 90-100 kategori sangat tinggi.* Di bawah ini disajikan pencapaian IPLM Kabupaten Luwu periode Tahun 2023-2024.

Grafik 2.58.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Luwu Tahun 2023-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Grafik 2.59.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten/Kota,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, nampak bahwa capaian IPLM Kabupaten Luwu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,33 poin atau meningkat menjadi sebesar 65,35 poin, jika dibandingkan dengan pencapaian Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Nampak bahwa capaian Kabupaten Luwu masih dikategorikan pencapaian sedang karena berada pada rentang angka 50-80, capaian tersebut juga menempatkan Kabupaten Luwu berada dibawah capaian Provisni

Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 88,24 poin dan Nasional dengan nilai sebesar 73,82 poin serta berada di atas capaian Kabupaten Wajo dan Gowa pada tahun 2024.

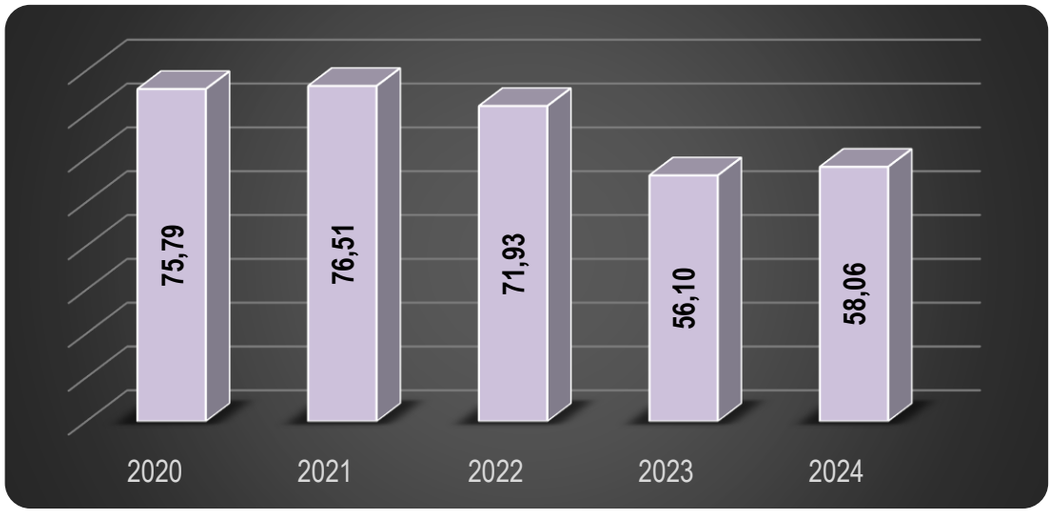
2.2.2.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Yang Adaptif didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat diharapkan memiliki ketahanan dan kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai resiko dan krisis serta memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik dalam rangka mempertahankan kehiduan yang layak., di Kabupaten Luwu gambaran perlindungan soaial yang adaptif dicerminkan antara lain melalui indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Angka Ketergantungan, PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial, dan Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial sebagai berikut :

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemerintah terus mengupayakan pembangunan pada sektor ketenagakerjaan sebagai dari bagian pembangunan sumberdaya manusia serta perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pekerja juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, para pekerja harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berikut data cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.60.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Disnakertrans Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 75,79 persen kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 56,10 persen. Selanjutnya untuk tahun 2024 telah mengalami peningkatan sebanyak 1,96 persen atau menjadi sebesar 58,06 persen. Hal tersebut terjadi disebabkan meningkatnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja serta adanya kesadaran pekerja akan pentingnya kepesertaan jaminan sosial sebagai perlindungan dasar terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul dikemudian hari.

b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Istilah "disabilitas" digunakan secara umum untuk menggambarkan kondisi yang mengalami keterbatasan fungsi tubuh maupun keterbatasan struktur tubuh, keterbatasan dan juga hambatan dalam melakukan aktivitas (WHO, 2007). Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak . di

Kabupaten Luwu pemberdayaan penyandang disabilitas telah dilakukan melalui pelibatan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah seperti penciptaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut dilakukan guna memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan potensi yang mereka miliki.

Di Kabupaten Luwu perkembangan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal pada tahun 2023 sebesar 0,9 persen, kemudian pada tahun 2024 capaian tersebut tidak mengalami perubahan, dimana jumlah total penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal hanya sebanyak 1 (satu) orang dari total jumlah penyandang disabilitas sebanyak 103 orang.

Tabel 2.29.

Perkembangan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal	Orang	N.a	N.a	N.a	1	1
2	Jumlah Penyandang Disabilitas	Orang	N.a	N.a	N.a	103	103
	Persentase Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal	Persen	N.a	N.a	N.a	0,90	0,90

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025

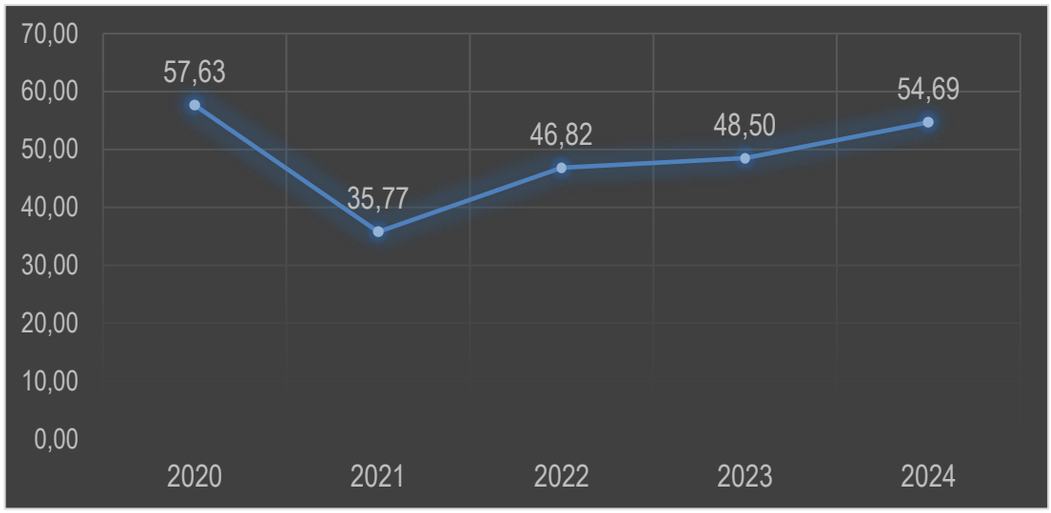
Dari Grafik tersebut di atas, nampak bahwa Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal belum maksimal. Hal itu disebabkan karena setiap individu penyandang disabilitas awalnya memang memiliki keterbatasan masing-masing untuk masuk ke pasar kerja. Selain itu dari permintaan tenaga kerja tidak banyak yang bisa menerima tenaga kerja yang memiliki keterbatasan seperti Penyandang Disabilitas. Mengingat adanya keterbatasan dari Penyandang Disabilitas untuk bekerja sesuai kompetensinya, baik itu pekerjaan secara umum atau yang formal, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu atau pun pihak terkait lainnya kedepan akan berupaya memberi perhatian khusus untuk membantu para penyandang disabilitas mempersiapkan diri dalam penguatan

kemampuan agar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berkontribusi pada sektor formal sesuai kompetensi yang diersyaratkan.

c. PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan Perseorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sosialnya secara wajar. Di Kabupaten Luwu perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2024, untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik.

Grafik 2.61.
Perkembangan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2020-2024



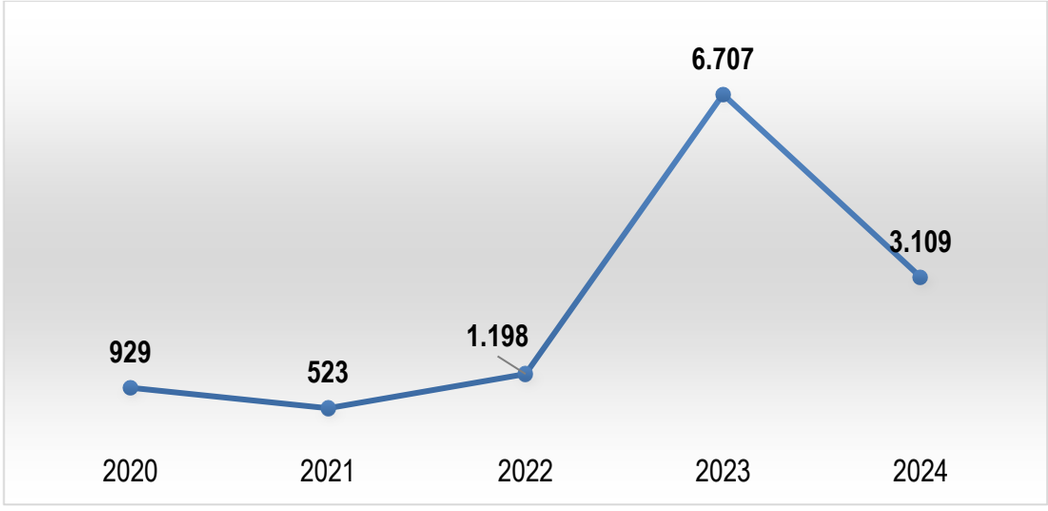
Sumber Data : Dinas Sosil Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Dari grafik perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun tersebut di atas, dapat diketahui bahwa persentase PMKS penerima bantuan tertinggi berada pada tahun 2020 dengan nilai capaian sebesar 57,63 persen, kemudian mengalami penurunan sebanyak 21 poin atau menjadi sebesar 35,77 persen pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,69 persen atau dengan jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 44.470 orng dengan jumlah total PMKS sebanyak 81.313 orang.

d. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tnggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yng dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana yng bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Di Kabupaten Luwu perkembangan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat telah mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana jumlah korban penerima bantuan sosial kejadian bencana tertinggi berada pada tahun 2022, Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data perkembangan jumlah korban bencan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2020-2024

Grafik 2.62.
Perkembangan Korban Bencana penerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Sosil Kabupaten Luwu Tahun 2025

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Luwu, jumlah korban bencana penerima bantuan sosial sebagaimana telah digambarkan pada grafik tersebut di atas, nampak bahwa pada tahun 2020 jumlah korban penerima bantuan soaial sebanyak 929 orang dengan jumlah kejadian bencana sebanyak 19 kasus kejadian, kemudian jumlah penerima tersebut mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2022 dengan jumlah korban penerima sebanyak 6.707 orang dengan jumlah kejadian sebanyak 32 kasus bencana, selanjutnya mengalami penurunan jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2024 sebanyak 3.109 orang dengan jumlah kasus kejadian sebnyak 31 kejadian.

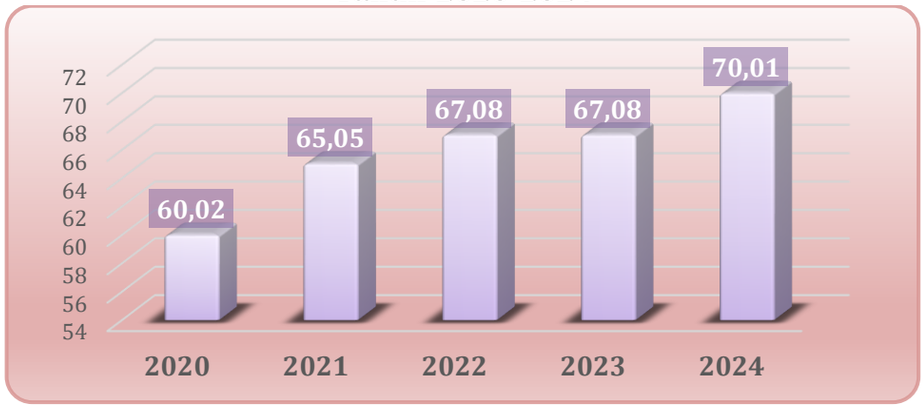
2.2.2.4. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju

Gambaran beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju di Kabupaten Luwu dicerminkan dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan indeks kerukunan umat beragama, sebagai berikut:

a. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan jumlah cagar budaya yang telah dilindungi atau dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya. Berikut data persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.63.
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



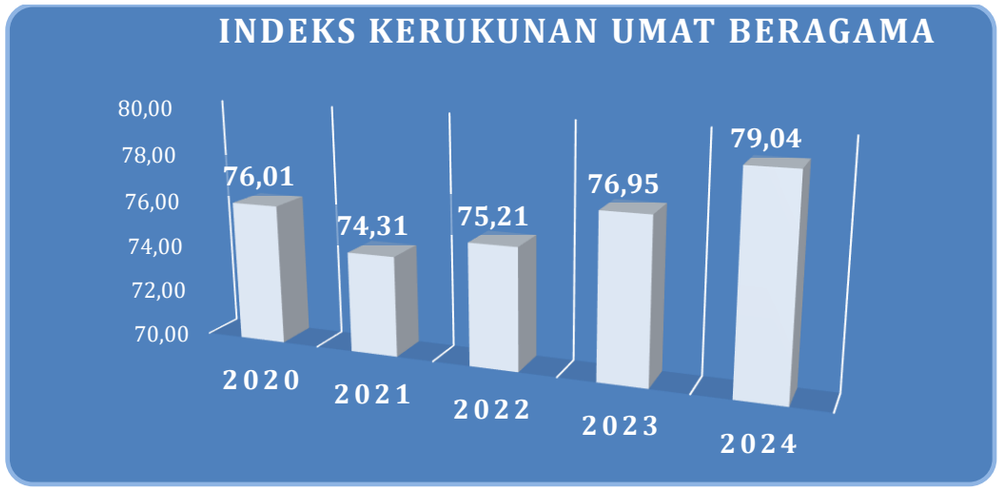
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar 60,02% kemudian meningkat menjadi 70,01% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya dukungan anggaran pemeliharaan dari pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga situs cagar budaya.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Survei ini dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program kerukunan. IKUB mengukur kerukunan berdasarkan tiga dimensi utama: toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja sama antar umat beragama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain. Berikut data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga 2024.

Grafik 2.64.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Kemenag Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan data diatas, nilai IKUB Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi cenderung meningkat dengan realisasi tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 79,04 dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 74,31. Tren ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di kabupaten Luwu cenderung membaik, Salah satu faktor meningkatnya nilai IKUB

yaitu adanya sikap toleransi yang tinggi dan saling menghormati antar sesama umat beragama.

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memfasilitasi berbagai Kegiatan keagamaan untuk mendukung kehidupan beragama masyarakat. Berikut data persentase Kegiatan keagamaan tahun 2020-2024 yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah:

Tabel 2.30.

Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah

No.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemda	12	10	11	10	11
2	Jumlah kegiatan keagamaan dalam 1 tahun	12	10	11	10	11
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

2.2.2.5. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan pemuda, dan indeks ketimpangan gender sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Keluarga

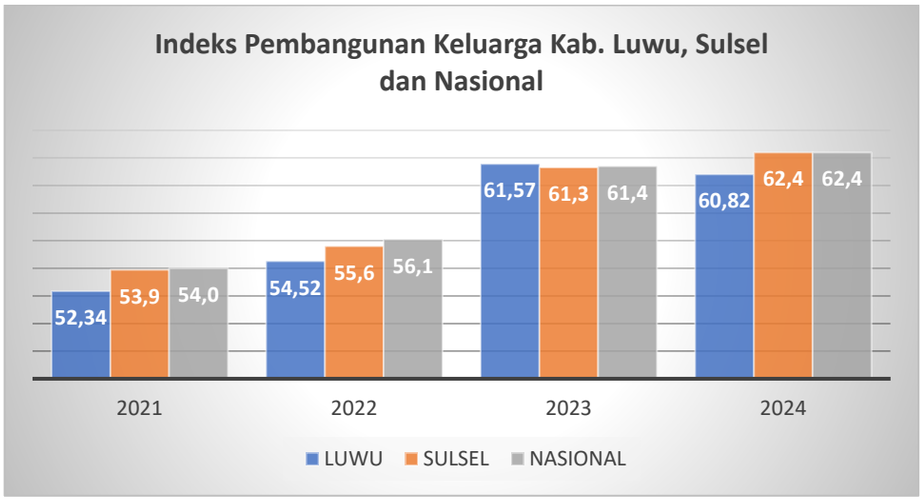
Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/ program/kegiatan.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai IPKK berkisar antara 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut :

- IPKK yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- IPKK yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70.
- IPKK yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Berikut data IPK di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2021 sampai 2024.

Grafik 2.65.
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021-2024



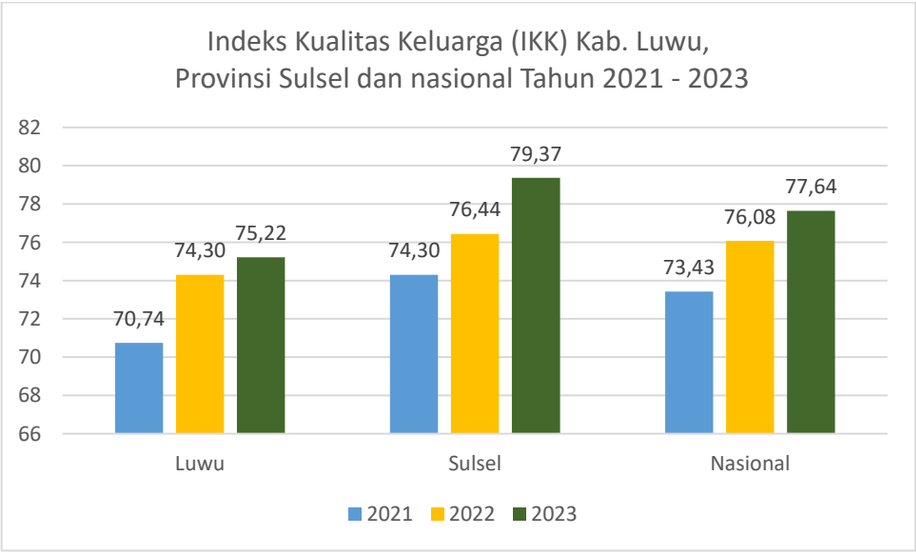
Sumber : BKKBN, 2025.

Pada tahun 2021 nilai IPK Kabupaten Luwu berada dibawah nilai provinsi dan nasional yaitu 52,34, namun begitu pada tahun 2023 meningkat mencapai 61,57 di atas nilai provinsi (61,3) dan nasional (61,4), dan pada tahun 2024 nilai IPK Kabupaten Luwu turun 1 poin menjadi 60,82. Faktor pendukung naiknya nilai Indeks Pembangunan Keluarga meliputi peningkatan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hal ini dapat dicapai melalui beragam upaya, seperti peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas hidup dan dukungan pemerintah serta stakeholder terkait.

b. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) terdiri dari 5 dimensi utama yaitu : 1) Kualitas legalitas dan struktur; 2) Kualitas ketahanan fisik; 3) Kualitas ketahanan ekonomi; 4) Kualitas Ketahanan sosial psikologi; 5) Kualitas ketahanan sosial budaya. Berikut data Indeks Kualitas keluarga di Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2020 sampai 2023.

Grafik 2.66.
Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu, Sulsel dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Luwu, 2025

Di kabupaten Luwu, Indeks Kualitas Keluarga mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 dan berada dibawah IKK Sulsel dan Nasional, dimana tahun 2023 nilai IKK Kabupaten Luwu sebesar 75,22 namun masih berada dibawah IKK Sulsel (79,37) dan Nasional (77,64).

c. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang digunakan untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan salah satu indikator dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berikut data Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.67.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Luwu, 2025.

Nilai IPA kabupaten Luwu kurun waktu 2020 – 2024 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 57,03 dan capaian terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 56,26. Salah satu penyebab menurunnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) di kabupaten Luwu yaitu masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meninkatkan indeks perlindungan anak, salahsatunya memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP merupakan komposit yang menggambarkan tiga domain pembangunan pemuda, yaitu: Pembangunan individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam rangka mengejawantahkan konsep pembangunan manusia seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya serta keluasan untuk meningkatkan kemampuannya. IPP disusun berdasarkan 15 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 domain: Pendidikan, Kesehatan dan

kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, Partisipasi dan kepemimpinan, Gender dan diskriminasi.

Di kabupaten Luwu jumlah organisasi pemuda pada tahun 2020 sebanyak 30 dan meningkat pada tahun 2022 yaitu 51 organisasi yang masih aktif sampai saat ini. Faktor yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah organisasi pemuda antara lain adalah kebutuhan pemuda untuk wadah kegiatan dan pengembangan diri, meningkatnya kesadaran akan peran pemuda dalam pembangunan, serta dorongan dari pemerintah dan pihak terkait untuk melibatkan pemuda dalam berbagai Kegiatan pembangunan.

Grafik 2.68.
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



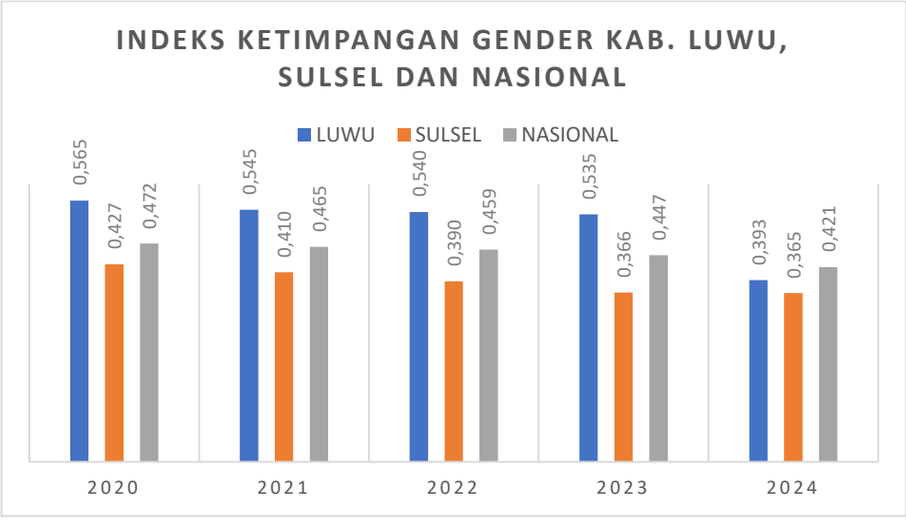
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025.

e. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu (1) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi Perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), (2) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta (3) dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Berikut data IKG di Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berikut data IKG di Kabupaten Luwu, Sulsel dan nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024

Grafik 2.69.
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

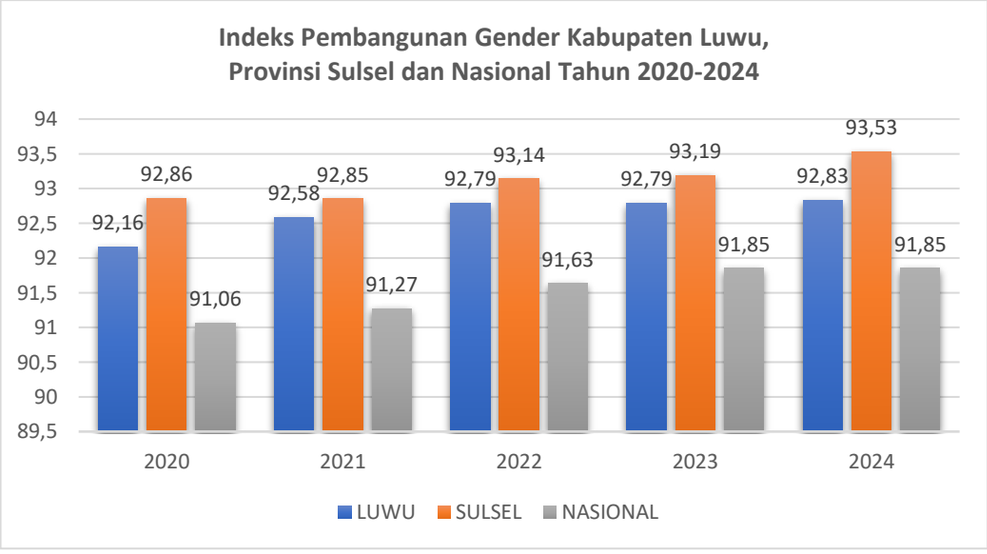
Berdasrkan grafik diatas, nilai IKG di Kabupaten Luwu terus mengalami penurunan. Dimana nilai IKG tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 0,565 dan IKG terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,393. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin rendah atau meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Luwu. Namun jika dibandingkan nilai IKG Sulawesi Selatan dan nasional, Kabupaten Luwu Masih cukup tinggi, dimana tahun 2023 IKG Kabupaten Luwu mencapai 0,535 sedangkan Sulawesi selatan 0,366 dan 0,447 untuk nasional. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) disebabkan oleh perbaikan di berbagai dimensi yang menjadi indikator IKG, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pasar tenaga kerja.

f. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah

mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.70.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

Berdasarkan grafik di atas terlihat data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 tercatat 92,16 dan tahun 2024 mencapai nilai 92.83. Jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional Indeks Pembangunan Gender kabupaten Luwu berada di bawah dari capaian provinsi dan lebih tinggi dari nilai IPG nasional. Salah satu faktor meningkatnya nilai IPG di Kabupaten Luwu yaitu peningkatan partisipasi Angkatan kerja perempuan.

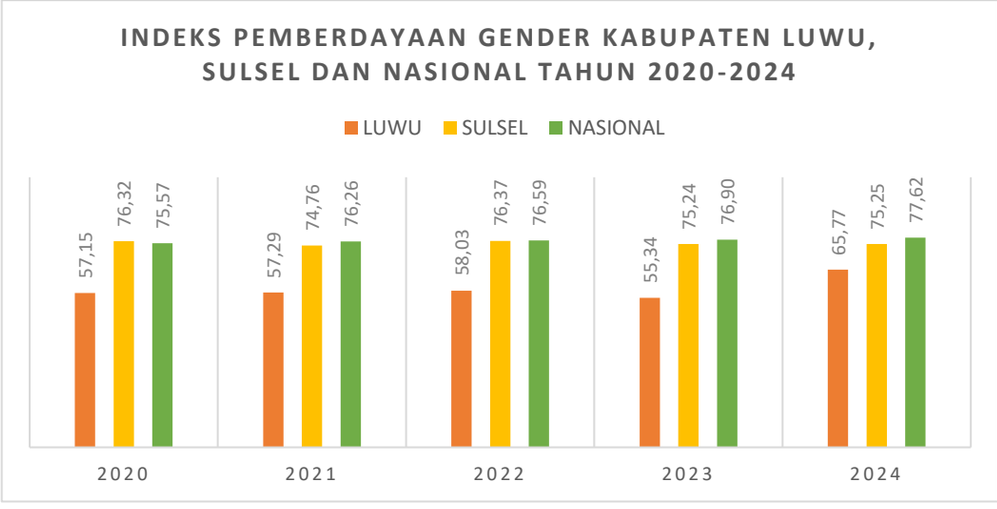
g. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan dan laki-laki

dalam kegiatan ekonomi dan politik, dengan fokus pada kesetaraan gender dalam peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur kesetaraan gender dalam hal partisipasi di berbagai bidang, seperti partisipasi di parlemen, kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga, dan peran perempuan sebagai tenaga profesional.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di kabupaten Luwu pada tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif cenderung meningkat walaupun di tahun 2023 mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2024, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, parlemen dan swasta menjadi faktor meningkatnya nilai IDG di kabupaten Luwu. Adapun nilai ini juga masih rendah dibandingkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tingkat Provinsi Sulsel dan nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.71.
IPG Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Gambaran daya saing daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain Daya Saing Sumber Daya Manusia; Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Perkotaan dan

Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; dan Stabilitas Ekonomi Makro yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah karena Sumber Daya Manusia berperan dalam mengolah dan mengelola faktor produksi lainnya. Daya Saing Sumber Daya Manusia daerah di Kabupaten Luwu sendiri dicerminkan dari berbagai kondisi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan pensiunan) dengan jumlah individu yang aktif secara ekonomi (anggota angkatan kerja). Ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat beban yang diberikan oleh populasi yang tidak aktif secara ekonomi terhadap populasi yang aktif dalam menghasilkan pendapatan. Berikut adalah grafik angka ketergantungan di Kabupaten Luwu :

Grafik 2.72.
Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024.

Berdasarkan data penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan Angka Ketergantungan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan secara terus menerus. Menurunnya Angka Ketergantungan dapat diartikan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Kondisi ini

termasuk dalam bonus demografi yang harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memprecepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta perkembangan teknologi. Berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, bonus demografi di Kabupaten Luwu di proyeksi masih berlangsung hingga tahun 2030. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.

Proyeksi *Dependency Ratio* Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2030

Uraian	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (ribu)	Orang	121,31	122,82	124,72	126,92	129,28	131,69
Jumlah Penduduk Usia Produktif (ribu)	Orang	267,98	271,38	274,41	277,10	279,55	281,89
Dependency Ratio	**Persen**	**45,27**	**45,26**	**45,45**	**45,80**	**46,25**	**46,72**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai poin utama dari pembangunan daerah. IPM didefinisikan sebagai kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Nasional Bruto Perkapita. IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian yang direpresentasikan oleh 3 komponen meliputi: Indeks Kesehatan panjang umur dalam menjalani hidup sehat, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Indeks (RLS), dan Indeks paritas daya beli/Purchasing Power Party (PPP).

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, adapun peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan capaian pada masing-masing komponen perhitungan seperti AHH, HLS, dan Pengeluaran Perkapita yang merupakan pendorong utama capaian IPM.

Tabel 2.32.

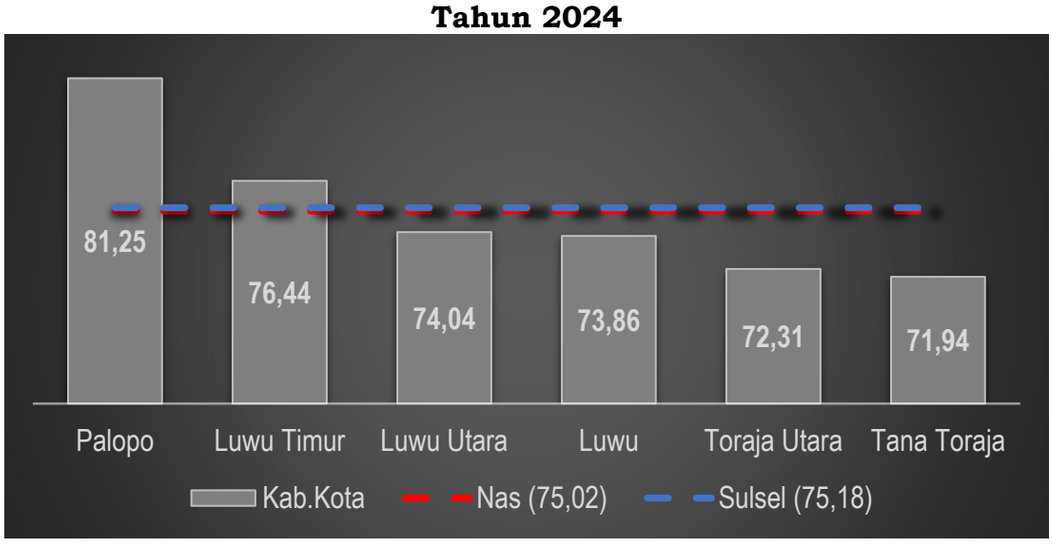
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

KOMPONEN IPM	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,66	72,76	73,06	73,30	73,52
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,33	13,39	13,40	13,41	13,43
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,24	8,35	8,48	8,73	8,81
Indeks Paritas Daya Beli (PPP)	Rupiah	-	Rp10.116,00	Rp10.308,00	Rp10.691,00	Rp11.121,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,58	71,92	72,42	73,23	73,86
Ranking Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan	Angka	11	13	14	14	15

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.73.

Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

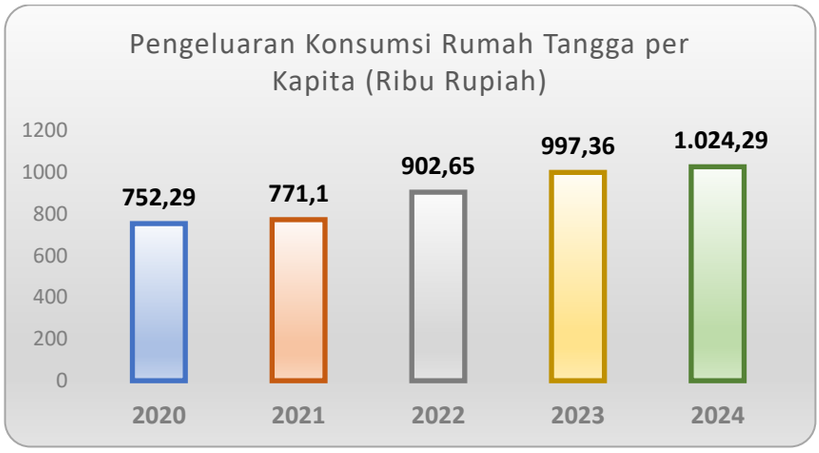
Pada tahun 2024 capaian nilai IPM Kabupaten Luwu telah mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin atau menjadi sebesar 73,86 persen, dimana pada tahun 2023 sebesar 73,23 persen, adapun capaian tersebut menempatkan Kabupaten Luwu berada pada peringkat ke sembilan tertinggi se Sulawesi Selatan dan tergolong sebagai IPM tinggi menurut angka UHH Hasil LF SP2020.

c. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pola konsumsi rumah tangga menggambarkan daya saing sumber daya manusia. Manusia yang sehat memiliki kesempatan

lebih baik untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya, disisi lain mereka yang tidak sehat cenderung memiliki produktivitas yang rendah sehingga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang juga rendah. Pengeluaran konsumsi perkapita juga menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah. Konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.74.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasrkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 752.290 per kapita menjadi Rp. 1.024.290 per kapita di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir.

d. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun di tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 61.190,61 per Angkatan kerja pada tahun 2020 menjadi Rp. 61.426,07 per Angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai PDRB ADHK. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uarian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	**Jiwa**	161.069	171.503	183.067	195.683	198.230
PDRB ADHK	Miliar Rupiah	9.855,91	10.449,75	11.044,67	11.668,14	12.176,49
Produktivitas Total Daerah	**Rp/ Angkatan Kerja**	**61.190,61**	**60.930,42**	**60.331,30**	**59.627,76**	**61.426,07**

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

e. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah desa berstatus swasembada terhadap total desa pada suatu wilayah. Berikut data persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.34.
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	87,23	89,41	89,41	93,94	n.a

Sumber : DPMD Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa selama empat tahun terakhir persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa mengalami peningkatan yaitu dari 87,23% di tahun 2020 menjadi 93,94% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar desa di Kabupaten Luwu telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

f. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB atau indikator keterbukaan ekonomi menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Keterbukaan

ekonomi memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Keuntungan dari keterbukaan ekonomi melalui perdagangan diantaranya berupa pembukaan akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Tabel 2.35.
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	%	0,78	0,79	0,83	0,83	-0,15

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Luwu selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ekspor dan impor perdagangan di Kabupaten Luwu selama periode tersebut. Namun pada tahun 2024 capaian rasio ekspor dan impor terhadap PDRB bernilai negatif yaitu -0,15%. Hal ini disebabkan karena nilai impor yang lebih besar terhadap nilai ekspor pada tahun tersebut.

g. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka Kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan pada intansi yang berwenang, dan mendapat penagangan dan dapat teratasi. Rilis data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Luwu memperlihatkan adanya peningkatan siginifikan terhadap angka kriminalitas yang tertangani, yang sebelumnya sebesar 67,30% pada tahun 2022 menjadi 92,72 % di tahun 2023 namum kembali menurun menjadi 87,84% di tahun 2024. Hal ini memperlihatkan jika pada dasarnya kinerja dari intansi terkait sudah cukup baik. Namun perlu konsistensi dalam upaya penanganan tindak kriminal agar tidak terjadi penurunan seperti yang terjadi di tahun 2024.

Keberhasilan penanganan kasus tindak kriminal sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan sumber daya, sarana prasarana baik itu dalam hal jumlah personil kepolisian maupun ketersedian peralatan investigasi dan peralatan pendukung

lainnya, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait kasus yang ditagani.

Secara umum, dalam lima tahun terkahir, persentase tindak kriminal yang diatasi cenderung meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2024. Adapun data Angka Kriminalitas yang tertangani tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36.
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kriminalitas yang tertangani	%	55,31	66,33	67,30	92,72	87,84

Sumber : Kepolisian Resor Luwu Tahun 2025.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

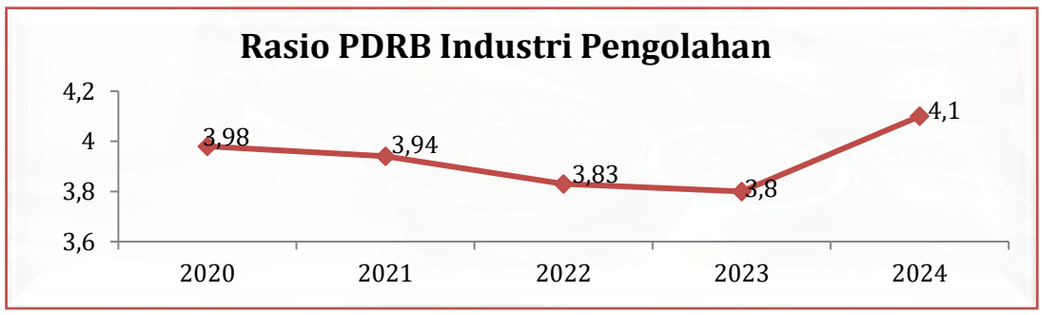
Iptek dan Inovasi memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan, peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan kualitas produk dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah akan turut membentuk kompleksitas daya saing suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Perkembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Luwu dicerminkan dari berbagai kondisi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten

Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan akiba dari adanya bencana covid 19 dan masih kurangnya penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi. Pada tahun 2020 Rasio PDRB sektor industri pengolahan sebesar 3,98 turun menjadi 3,8 pada tahun 2023, pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,1 persen. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.75.
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

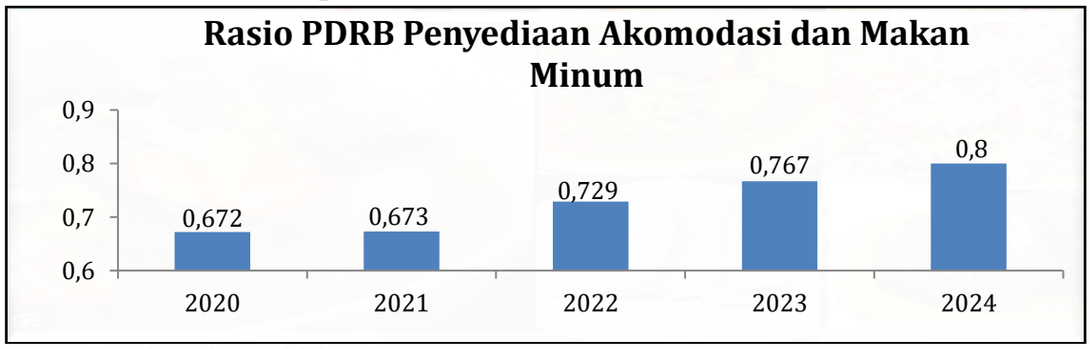


Sumber data BPS Kabupaten Luwu.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga 2024 masih sangat rendah dibanding sektor lainnya, Walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 0,672, naik menjadi 0,767 pada 2023 dan 0,8 pada tahun 2024. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.76.
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber data BPS Kabupaten Luwu.

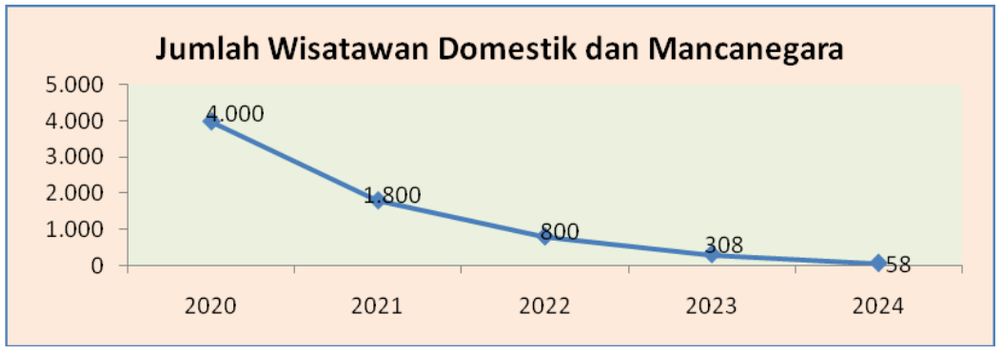
Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat rendah akibat dari beberapa faktor diantaranya

kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Luwu.

c. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Pada sektor pariwisata Kabupaten Luwu mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan seperti wisata alam, wisata pantai dan wisata budaya. Berdasarkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Kabupaten Luwu selama kurung waktu 2020-2024 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar 4.000, turun menjadi 58 pada tahun 2024. Menurunnya jumlah kunjungan wisata yang sangat signifikan tidak hanya berdampak pada konrtibusi sektor pariwisata terhadap PDRB tapi juga pada PAD Kabupaten Luwu.

Grafik 2.77.
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

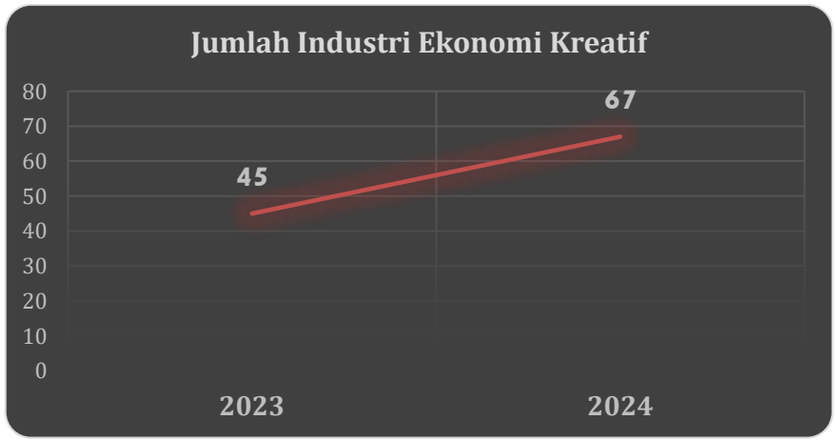


Sumber : Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu,2025.

d. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2008, terdapat 14 subsektor industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, software, televisi/radio, dan riset & pengembangan. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebanyak 45 industri meningkat pada tahun 2024 menjadi 67 industri yang terdiri dari subsektor desain produk, kuliner, fashion, fotografi, desain komunikasi visual, seni pertunjukkan, dan televisi.

Grafik 2.78.
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten Luwu
Tahun 2023-2024

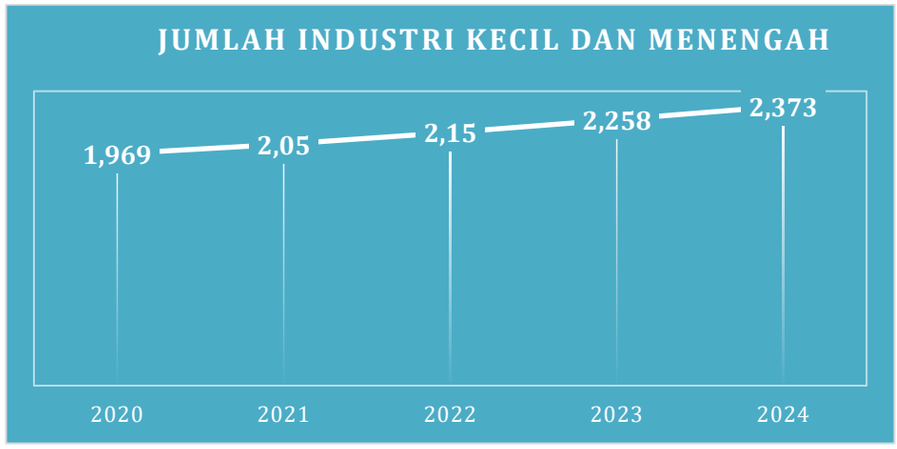


Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, 2025.

e. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sebesar 1.964 terus menerus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 2.373. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.79.
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



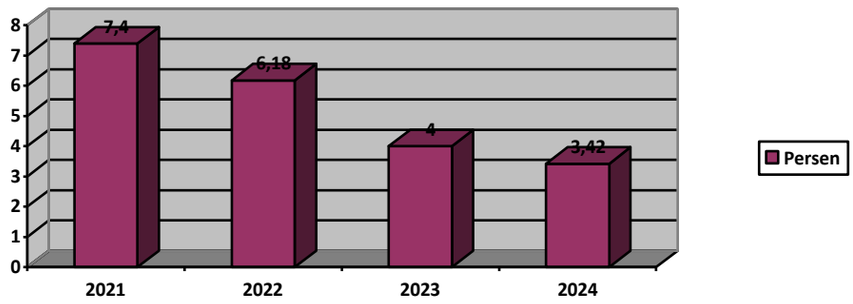
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2025.

f. Persentase Koperasi Sehat

Kopersai yang sehat merupakan koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi, menerapkan manajemen yang baik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Peran koperasi dalam

kegiatan ekonomi di berbagai sektor bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi, menerapkan manajemen yang baik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu pada tahun 2021 hingga tahun 2024 terus meneruas mengalami dimana pada tahun 2021 sebesar 7,4 persen, pada tahun 2022 sebesar 6,18, pada tahun 2023 sebesar 4 persen dan tahun 2024 sebesar 3,42%.

Grafik 2.80.
Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

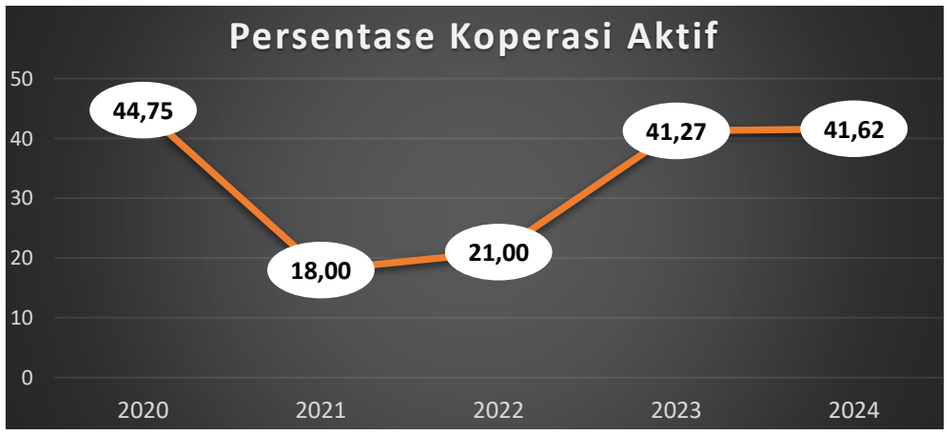


Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Tahun 2020-2024.

g. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 44,75% pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 18,00% yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid 19 yang membuat perekonomian melambat. Kemudian pada tahun 2023 hingga tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 41,62% atau sebanyak 179 koperasi aktif dari 430 jumlah koperasi di Kabupaten Luwu. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.81.
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

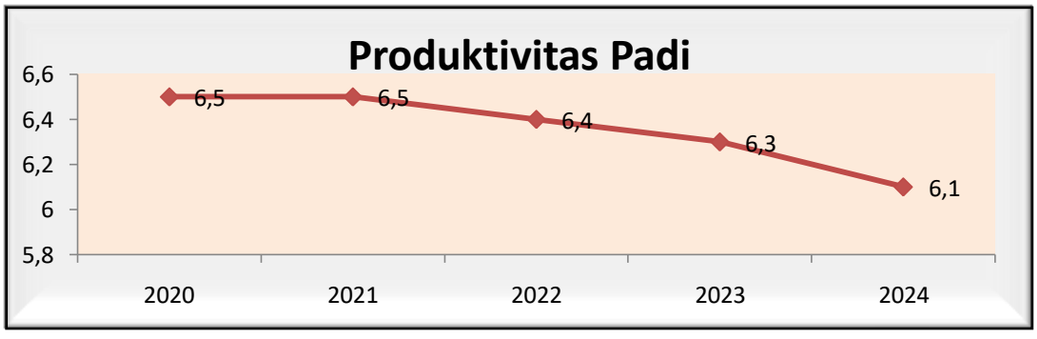


Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Tahun 2020-2024.

h. Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah ukuran seberapa banyak gabah kering giling (GKG) yang dapat dihasilkan dari satu hektar sawah dalam satu musim tanam. Ini merupakan indikator penting bagi ketahanan pangan suatu daerah. Dengan produktivitas yang tinggi, dapat menjamin ketersediaan beras sebagai makanan pokok bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini data produktivitas Padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.82.
Produktivitas Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2025.

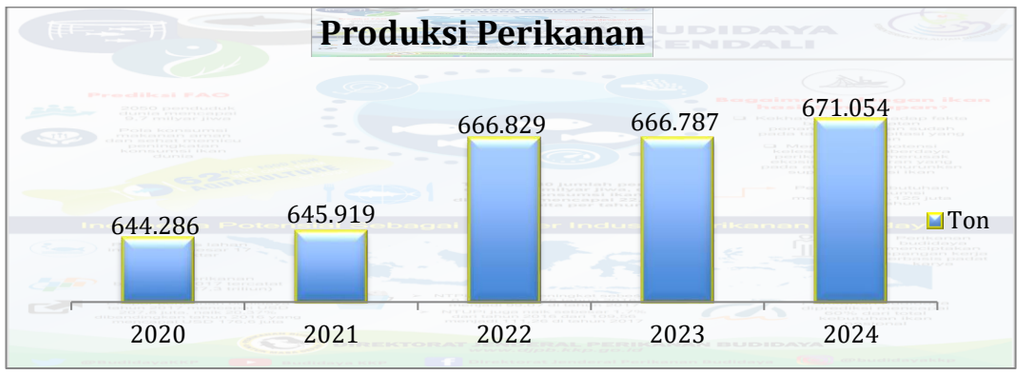
Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 sampai tahun 2021 produktivitas padi di Kabupaten Luwu terus mencapai 6,50 Ton/Ha. Selanjutnya dari tahun 2022 hingga tahun 2024 produktivitas padi mengalami

penurunan menjadi 6,1 Ton/Ha. Penurunan produktivitas padi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain varietas padi, kualitas tanah, ketersediaan air, pupuk dan pestisida, teknologi pertanian dan iklim.

i. Jumlah Produksi Perikanan

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi perikanan melalui berbagai kebijakan, seperti pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Total produksi perikanan Kabupaten Luwu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan produksi sektor perikanan belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga pendapatan masyarakat sektor perikanan masih rendah. Produksi perikanan Kabupaten luwu lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.83.
Produksi Perikanan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2025.

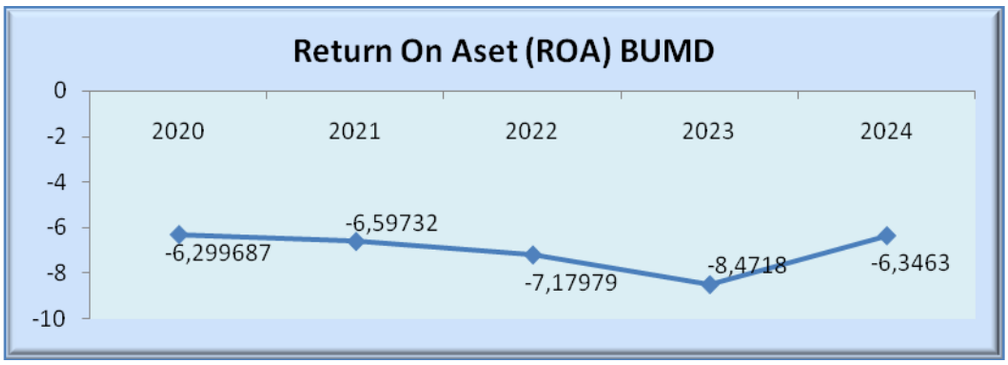
Berdasarkan grafik diatas Total Produksi Perikanan Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 644.286,15 ton meningkat pada tahun 2021 sebesar 645.919,16 ton, kemudian pada tahun 2022 sebesar 666.829,06 ton dan pada tahun 2024 mencapai 671.054,41 ton.

j. Return on Aset (ROA) BUMD

Return on aset (ROA) merupakan ukuran nilai keuntungan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dalam kurung waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 return on aset PDAM Kabupaten Luwu minus karena laba merugi akibat dari biaya tidak langsung atau biaya penyusutan aset. Pada tahun 2020 sebesar -

9,299 menjadi -8,471 pada tahun 2023, kemudian di tahun 2024 sebesar -6,346. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.84.
***Return on Asset* (ROA) Kabupaten Luwu**
Tahun 2020-2024

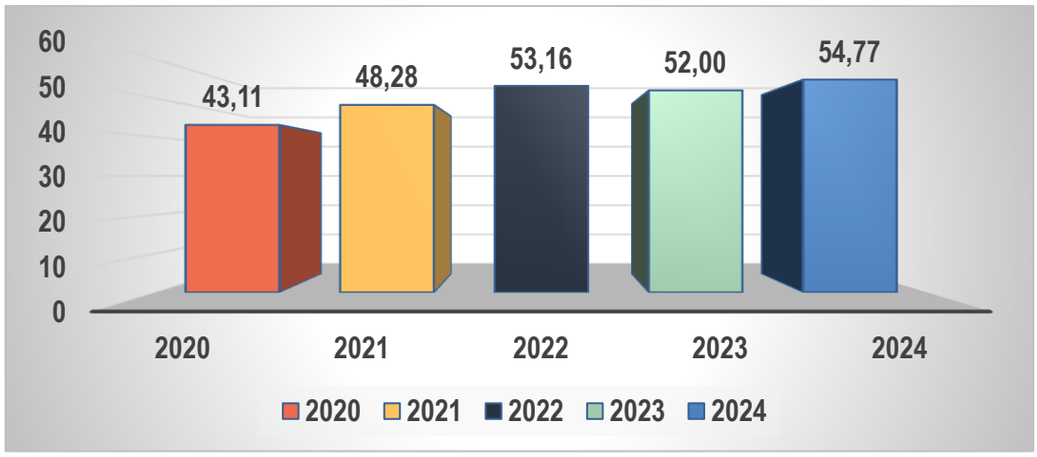


Sumber : PDAM Kabupaten Luwu.

k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja. Berikut Grafik yang menggambarkan TPAKP selama 5 (Lima) Tahun terakhir.

Grafik 2.85.
TPAKP di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

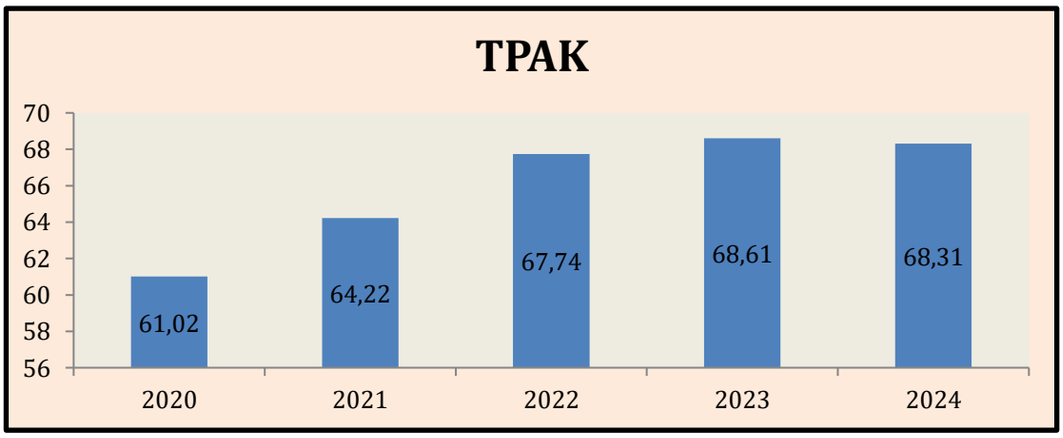
Grafik diatas menunjukkan capaian TPAKP Kabupaten Luwu. pada tahun 2020 TPAKP sebesar 43,11 persen. Kemudian pada tahun 2021-2022 terus mengalami peningkatan sebesar 10,05 poin atau menjadi sebesar 53,16 persen dan kembali mengalami peningkatan sebesar 1,61 poin atau menjadi sebesar 54,77 persen pada tahun 2024.

Dengan memperhatikan masing-masing grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Dari total 290.190 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu, 68,31% (198.230 jiwa) masuk dalam angkatan kerja, sedangkan 31,69% (91.960 jiwa) bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja, 95,86% (190.018 jiwa) telah bekerja, sementara 4,14% (8.212 jiwa) masih menganggur. Partisipasi tenaga kerja laki-laki lebih tinggi (119.075 jiwa) dibanding perempuan (79.155 jiwa), sedangkan dalam kategori bukan angkatan kerja, perempuan mendominasi terutama dalam pekerjaan domestik (46.330 jiwa). Hal ini menunjukkan masih kuatnya peran gender dalam pembagian kerja, di mana laki-laki lebih aktif dalam sektor ekonomi dibanding perempuan yang lebih banyak berperan dalam pekerjaan rumah tangga. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu kedepan akan lebih berupaya dalam mengarhkan kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor formal serta memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja informal.

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Berikut Grafik Tingkat Partispasi angkatan Kerja di Kabupten Luwu Tahun 2020-2024.

Grafik 2.86.
Perkembangan TPAK Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

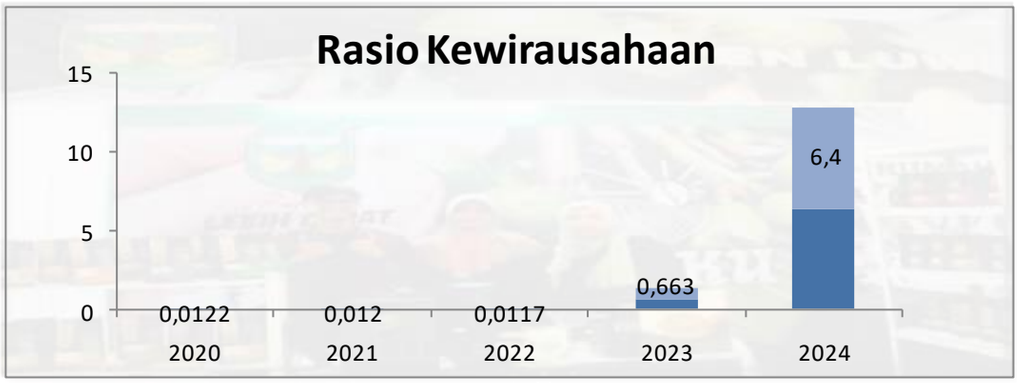
Grafik di atas menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu untuk lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tetapi masih berfluktuasi dimana TPAK pada tahun 2020 sebesar 61,02 persen terjadi peningkatan hinga tahun 2023 sebesar 68,61 persen kemudian menurun lagi pada tahun 2024 sebesar 68,31 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Luwu.

l. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan mengacu pada perbandingan jumlah usaha atau bisnis baru yang didirikan dalam suatu wilayah atau negara dalam satu tahun tertentu terhadap jumlah total penduduk atau angkatan kerja pada tahun yang sama. Ini digunakan untuk

mengevaluasi tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu wilayah atau negara. Berikut adalah data tabel rasio kewirausahaan di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.87.
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2025.

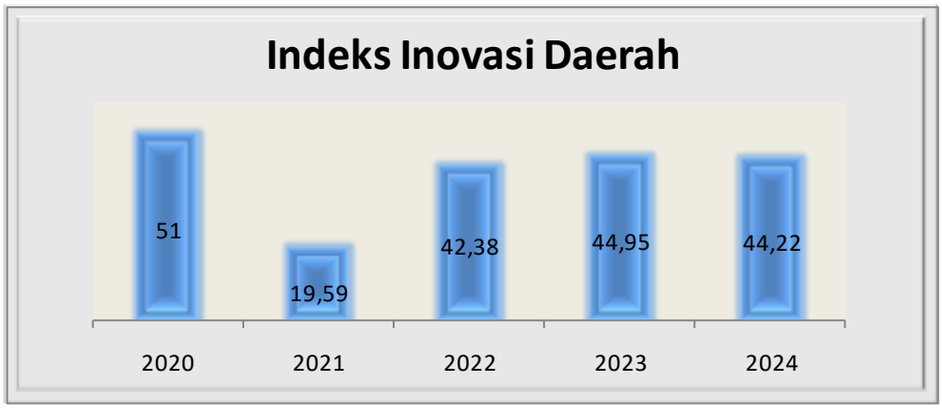
Data tabel diatas menunjukkan terkait data "Rasio Kewirausahaan" dari tahun 2020 hingga tahun 2024 di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2020, terlihat nilai Rasio Kewirausahaan sebesar 0,012, hingga tahun 2022 stagnan kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,663, dan pada tahun 2024 sebesar 6,4 persen. Nilai Rasio Kewirausahaan yang meningkat mengindikasikan tingkat aktivitas kewirausahaan yang dapat dianggap sebagai tanda Positif untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Aktivitas kewirausahaan yang sehat dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi daerah. Penting untuk dicatat bahwa Rasio Kewirausahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, lingkungan bisnis, akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan.

m. Indeks Inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kemampuan daerah atau wilayah dalam mengembangkan solusi kreatif dan baru untuk berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Hal ini mencakup berbagai aspek inovasi, seperti penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi, dan kemitraan inovatif. Penilaian tingkat inovasi daerah dapat bervariasi berdasarkan metodologi yang

digunakan dalam pengukuran, dan faktor-faktor seperti investasi dalam inovasi dan kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat memengaruhi perubahan dalam nilai Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data indeks inovasi daerah di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.88.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri.

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa indeks inovasi daerah berfluktuatif dimana pada tahun 2020 mencapai 51, kemudian pada tahun 2021 menurun drastis menjadi 19,59 akibat adanya perubahan cara perhitungan, kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2023 meningkat menjadi 44,95, dan pada tahun 2024 turun menjadi 44,22 dengan kategori masih inovatif.

n. Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah

Indeks Kapabilitas Inovasi daerah adalah salah satu pilar Indeks Daya Saing Daerah yang mengukur kemampuan daerah dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, yang bertujuan untuk menperoleh ukuran daya saing daerah. Dalam mengukur indeks kapabilitas inovasi menekankan pentingnya kualitas inovasi dari pada kuantitas. Perkembangan indeks kapabilitas inovasi daerah Kabupaten Luwu berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2023 dengan nilai 1,05 dan pada tahun 2024 dengan nilai 1,56.

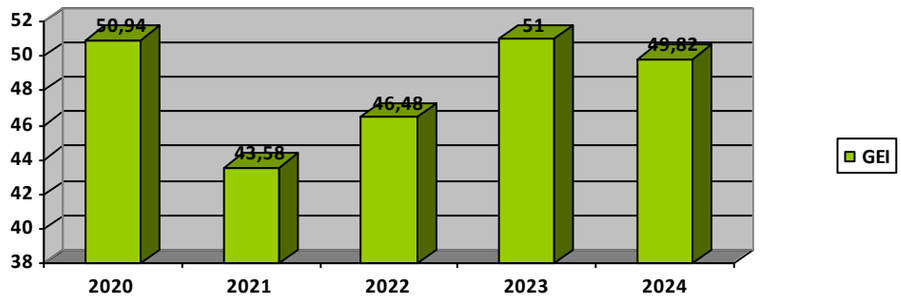
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau atau Green Economy Index (GEI) adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi**.** Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin baik.

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi, namun masih dalam kategori Sedang. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan capaian 51,00 poin, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 49,82 poin. Selengkapnya dapat dilihaat pada grafik berikut.

Grafik 2.89.
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber: Litbang Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

Indeks Ekonomi Biru menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari 0-100 dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. Indeks Ekonomi Biru disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. Skor Indeks Ekonomi Biru yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup.

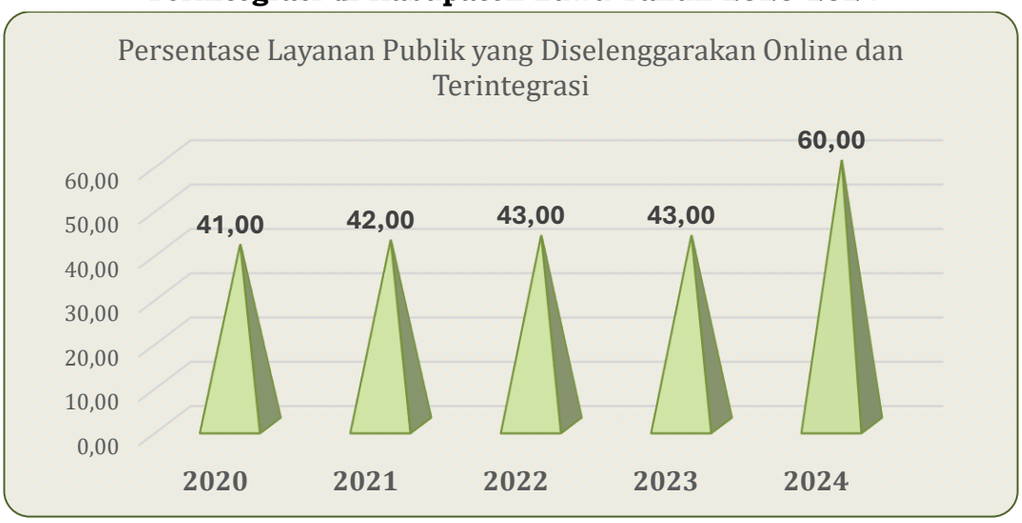
Skor Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah sebesar 79,47 poin. Jika dibandingkan dengan wilayah setara, Kabupaten Luwu memiliki skor tertinggi disusul oleh Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dengan skor masing-masing sebesar 79,58 dan 77,08. Pada tahun 2024 Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu mencapai 90,31.

2.3.4. Transformasi Digital

a. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi

Layanan publik *online* dan terintegrasi adalah suatu sistem dimana berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses secara digital dan terhubung satu sama lain. Sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administratif, seperti perizinan, kependudukan, pembayaran pajak, atau pelaporan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut ini data persentase Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024.

Grafik 2.90.
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2025.

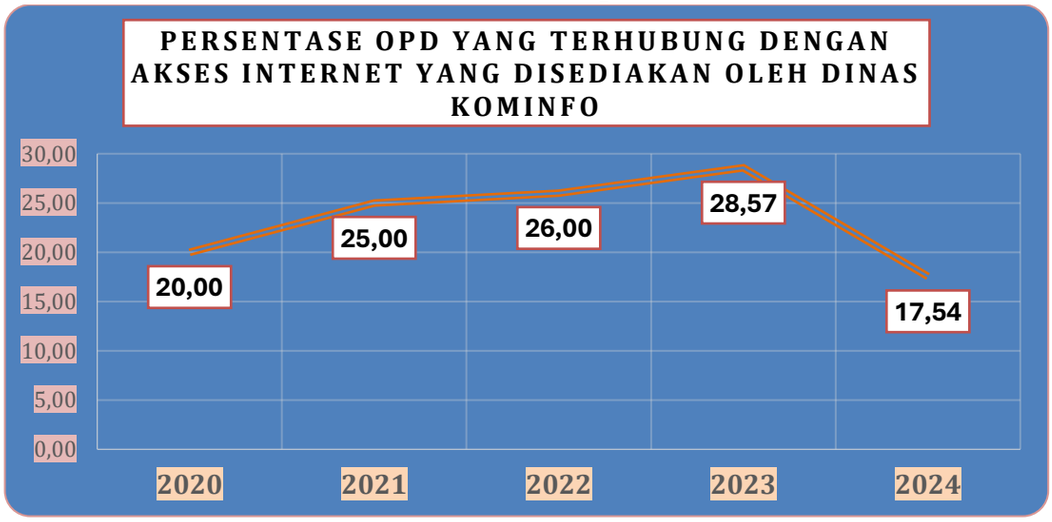
Berdasarkan grafik diatas, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 41,00% meningkat menjadi 60,00% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya layanan publik yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi di Kabupaten Luwu.

b. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo adalah Indikator yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disambungkan sistem jaringan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Indikator ini untuk menilai kinerja Diskominfo dalam menyediakan akses sistem jaringan informasi kepada OPD. Indikator ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi.

Berikut grafik data capaian Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024:

Grafik 2.91.
Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2025.

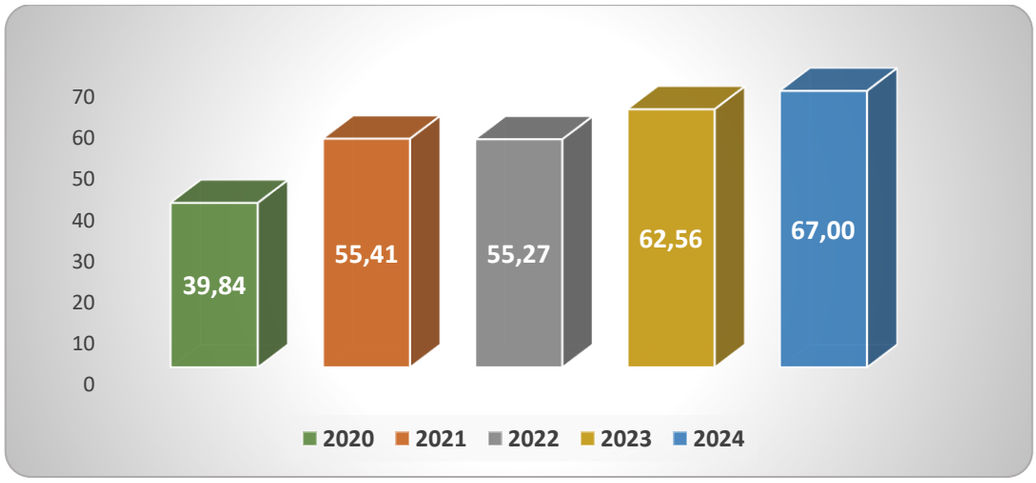
Berdasarkan grafik data persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo di kabupaten luwu tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu dari 20,00% menjadi 28,57%. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi perubahan perhitungan indikator sehingga capaiannya menjadi sebesar 17,54%. Namun demikian, perolehan tersebut masih tergolong rendah dimana masih ada gap sebesar 82,46 persen OPD yang belum mengakses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan seluruh Organisasi Perangkat daerah dapat terhubung dengan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu untuk mewujudkan tersedianya sebuah jaringan informasi yang lebih mudah diakses dan lebih Akuntabel dalam satu server.

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet adalah ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana masyarakat telah terhubung dengan dunia digital. Indikator ini juga dapat mencerminkan kemajuan beberapa aspek seperti kemajuan digital, inklusi sosial, dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga semakin tinggi proporsi indikator ini, maka semakin besar potensi suatu wilayah untuk memanfaatkan

peluang di era digital. Berikut perkembangan nilai proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.92.
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 39,84% pada tahun 2020 menjadi 67,00% pada tahun 2024. Dari data tersebut masih terdapat 33,00% rumah tangga yang belum mendapatkan akses internet sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat mengentaskan area *blankspot* sehingga semua wilayah di Kabupaten Luwu bisa mendapatkan akses internet.

d. Jumlah dan Lokasi *Blankspot*

Blankspot adalah wilayah yang belum memiliki akses komunikasi dan informasi, baik analog maupun digital. Di era serba digital seperti sekarang, keberadaan *blankspot* menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah. Ketidaktersediaan akses komunikasi dapat menghambat berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, hingga akses ke layanan darurat. Berikut data lokasi *blankspot* di Kabupaten Luwu tahun 2024.

Tabel 2.37.

Lokasi *Blankspot* di Kabupaten Luwu
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Bajo Barat	Desa Bonelemo
2	Bajo Barat	Desa Bonelemo Barat
3	Basse Sangtempe	Desa Sinaji
4	Basse Sangtempe	Desa Lange
5	Basse Sangtempe	Desa Ledan
6	Basse Sangtempe	Desa Tabi
7	Basse Sangtempe Utara	Desa Dampan
8	Bua	Desa Bukit Harapan
9	Larompong	Desa Bukit Sutra
10	Walenrang Barat	Desa Ilan Batu
11	Bua Ponrang	Desa Tampumia
12	Bua Ponrang	Desa Padang Ma'Bud
13	Ponrang	Desa Tampa
14	Latimojong	Desa Boneposi
15	Latimojong	Desa Kadundung
16	Latimojong	Desa Rante Balla
17	Walenrang Utara	Desa Siteba
18	Walenrang Utara	Desa Limbong
19	Suli Barat	Desa Kaladi Darussalam
20	Suli Barat	Desa Kaili
21	Suli Barat	Desa Muhajirin

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 21 Desa dari 11 Kecamatan yang masuk dalam lokasi *blankspot*. Basse Sangtempe merupakan kecamatan dengan Lokasi blankspot terbanyak yaitu terdapat 4 desa, kemudian disusul Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Suli Barat dengan masing-masing 3 desa.

e. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

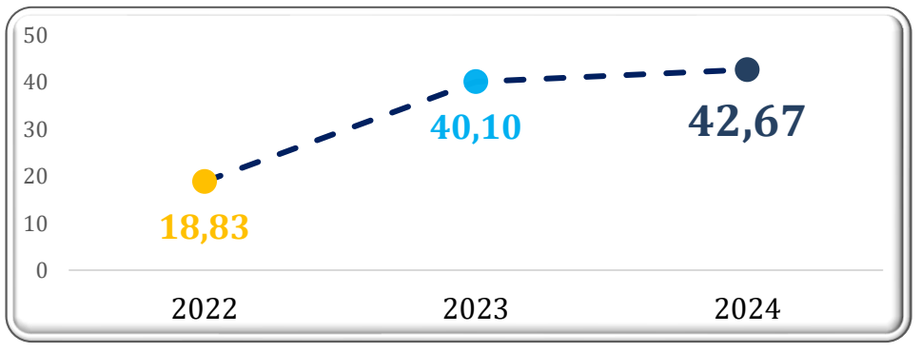
Masyarakat digital adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Proses digitalisasi membentuk karakter esensial mereka, dengan aktivitas yang dilakukan secara elektronik dan bebas kertas. Seluruh kegiatan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, kini sepenuhnya berbasis teknologi. Pengukuran IMDI secara rutin dilakukan mulai dari tahun 2022, untuk memantau perkembangan kompetensi digital

masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Kerangka kerja IMDI terdiri dari tiga komponen, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Adapun komponen pilar terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Infrastruktur dan ekosistem;
2) Keterampilan Digital;
3) Pemberdayaan; dan
4) Pekerjaan.

Pilar-pilar tersebut bersama-sama mewujudkan pengukuran keterampilan digital yang komprehensif, objektif, dan terstandarisasi. Masing-masing pilar dijabarkan menjadi sepuluh subpilar spesifik, yang kemudian diukur melalui indikator-indikator yang berasal dari data primer dan sekunder. Berikut nilai IMDI Kabupaten Luwu tahun 2022-2024.

Grafik 2.93.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024



Tabel 2.38.
Nilai dan Kategori IMDI Kabupaten Luwu Tahun 2024
Berdasarkan Pilar

Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Pilar				Kategori
	Infrastruktur dan Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	
42,67	48,76	63,29	23,22	35,85	Cukup

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025.

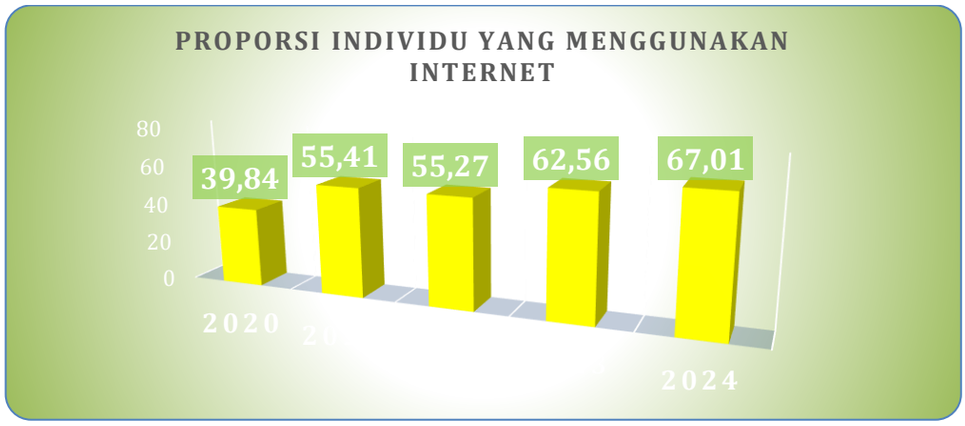
Berdasarkan data di atas, nilai IMDI Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yaitu dari 18,83 pada tahun 2022 menjadi 42,67 pada tahun 2024 dengan kategori “Cukup”. Pilar Pemberdayaan dan Pekerjaan menjadi pilar yang memiliki nilai paling rendah. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kemampuan masyarakat

dalam menggunakan teknologi digital untuk aktivitas digital yang produktif baik sebagai pengguna ataupun penyedia serta masih kurangnya adopsi teknologi digital pada industri dan kebutuhan keterampilan digital sebagian besar industri masih di level dasar (*basic*).

f. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet

Proporsi Individu yang menggunakan internet merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah persentase penduduk yang mengakses dan menggunakan internet. Indikator ini memungkinkan untuk memahami perkembangan digitalisasi suatu daerah. Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang dilakukan pengukuran terkait jumlah penggunaan internet oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu. Berikut grafik Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024:

Grafik 2.94.
Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi individu yang menggunakan internet memiliki tren yang meningkat. Data tahun 2020 tercatat sebanyak 39,84 persen penduduk Kabupaten Luwu mengakses internet kemudian meningkat menjadi 67,01 persen pada tahun 2024. Terjadi peningkatan sebesar 27,7 persen selama lima tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup baik, namun data diatas menunjukan masih ada 32,99 persen masyarakat

yang belum mengakses internet sehingga kedepan rencana pembangunan diarahkan untuk melakukan perluasan jangkauan internet secara merata sampai ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Luwu.

Pemerataan akses internet di wilayah kabupaten Luwu merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akses internet yang merata memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, akses internet juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah terpencil, seperti melalui e-commerce dan pariwisata digital. Dengan demikian, pemerataan akses internet dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh cakupan wilayah Kabupaten Luwu.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

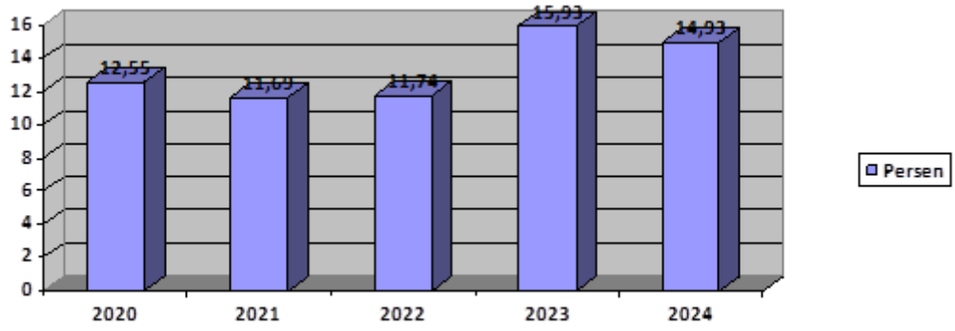
Integrasi ekonomi domestik dan global adalah pengaturan antar negara yang mencakup pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Integrasi ekonomi domestik dan global yaitu proses penggabungan ekonomi suatu Negara dengan ekonomi global sehingga terjadi peningkatan perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi antar Negara. integrasi ekonomi di Kabupaten Luwu dapat digambarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut.

a. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga antar waktu kebutuhan pokok adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data

semakin heterogen atau bervariasi. Secara umum, koefisien variasi harga sebesar ≤5% dianggap baik, sedangkan koefisien variasi harga sebesar ≥10% dianggap buruk. Berikut ini data persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.95.
Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



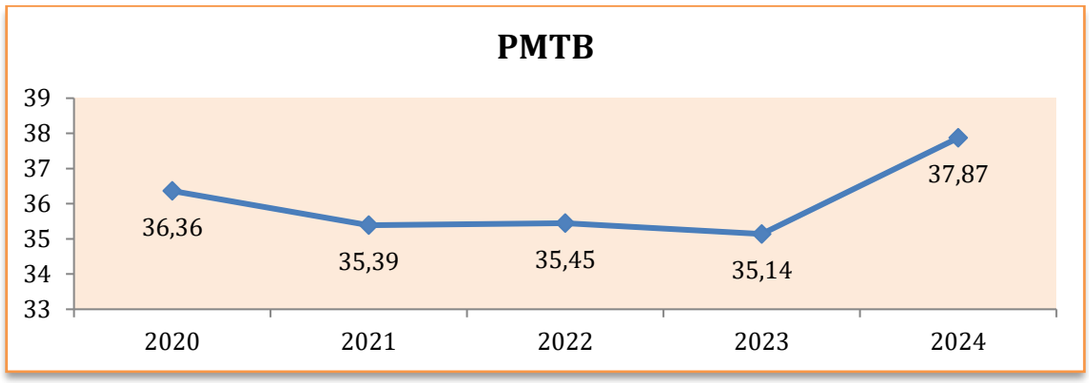
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat selama tahun 2020 hingga tahun 2024 koefisien variasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu berada di atas 10% dan memiliki tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan dalam keadaan yang tidak stabil yang berarti dalam satu tahun terjadi perubahan harga kebutuhan pokok yang cukup drastis.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. PMTB memiliki kontribusi yang relatif besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar 36,36 turun pada tahun 2023 menjadi 35,14, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 37,87 persen. Persentase Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.96.
PMTB Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

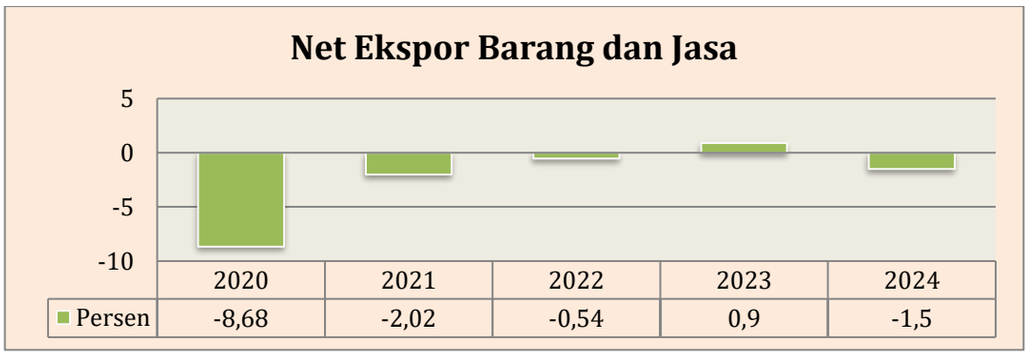


Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

c. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Net ekspor bernilai positif manakala ekspor lebih besar daripada impor dan net ekspor bernilai negatif manakala impor lebih besar daripada ekspor. Berikut ini data net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.97.
Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu selalu bernilai negatif yang berarti impor lebih besar daripada ekspor. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan net ekspor menjadi 0,91%. Peningkatan tersebut memberikan indikasi yang baik, dimana ekspor lebih besar dibandingkan impor. Hal ini juga menggambarkan bahwa perekonomian daerah mengalami surplus. Namun di tahun 2024 kembli mengalami penurunan sebesar -1,5.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan yang maju harus beriringan dengan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep kota sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju harus dipadukan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Hal ini berarti kota harus menyediakan akses yang adil terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi bagi seluruh warganya, tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi hijau menjadi kunci keberhasilannya. Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus diarahkan pada kemandirian ekonomi dan sosial. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Integrasi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting, di mana kota dapat berfungsi sebagai pusat layanan dan pasar bagi produk-produk dari desa, sementara desa dapat menyediakan ruang terbuka hijau dan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan kota. Dengan demikian, pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

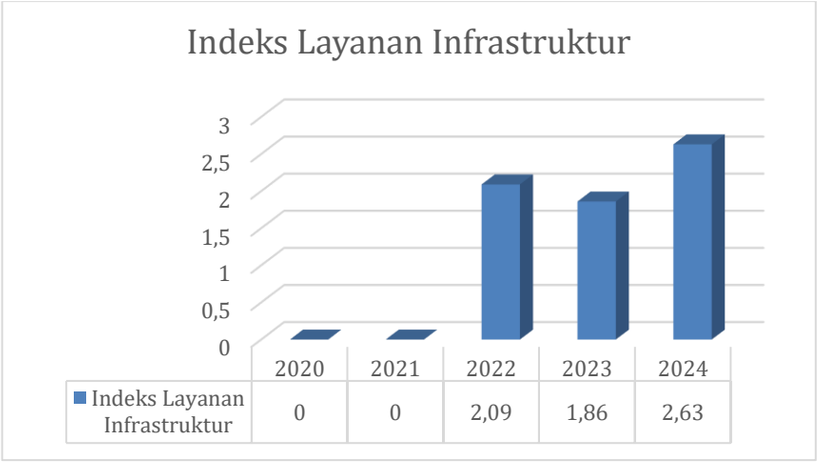
Untuk merencanakan konsep perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten Luwu dalam lima tahun kedepan, perlu melakukan peninjauan terhadap gambaran capaian indikator kinerja kabupaten luwu selama lima tahun terakhir. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam perencanaan penataan kota dan pedesaan yakni Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri.

a. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni:

ketersediaan infrastruktur, fungsi infrastruktur, kondisi infrastruktur, manfaat infrastruktur, mutu dan kualitas infrastruktur. Indikator ini merupakan ukuran yang penting untuk melihat sajauh mana pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang memiliki nilai kualitas yang tinggi serta memiliki kriteria andal yang baik.

Grafik 2.98.
Indeks Layanan Infrastruktur Kab. Luwu Tahun 2020-2024



(Sumber : BRIN 2025).

Pengukuran Indeks ini baru dilaksanakan pada tahun 2022 ke tahun 2024 sehingga capaian tahun 2020 ke 2021 menjadi tidak terukur atau nol. Perolehan nilai pengukuran Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu dalam Lima tahun terakhir secara umum menunjukan adanya performa yang fluktuatif. Pada tahun 2022 layanan infrastruktur kabupaten Luwu berada pada skor 2,09 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dimana skornya meningkat menjadi 2,63. Capaian nilai tersebut diukur bedasarkan beberapa indikator, idantaranya Pemenuhan SPM Jalan, Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Kereta api, Layanan Infrastruktur Bandara, Layanan Infrastruktur Pelabuhan, Rasio Elektrifikasi, susut energi listrik, penyediaan Akses Air Minum Layak dan Tingkat kehilangan Air.

Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang Agraris dimana sebagian besar pendapatan masyarakat bertumpuh pada kegiatan pertanian perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, pembagunan infrastruktur kedepan akan memberikan porsi yang optimal untuk mengangkat daya pada sektor-

sektor unggulan daerah tersebut. Konektifitas antar pusat kegiatan masyarakakat khususnya jalan jalan antar koneksi kecamatan, jalan Tani dan jalan Perikanan, Infrastruktur Pertanian, Pengadaan Fasilitas Pengolahan hasil bumi, pusat niaga, akses air bersih, Infrastruktur kesehatan, Infrastruktur Pendidikan, jaringan internet menjadi beberapa agenda utama Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kurun lima tahun kedepan.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang berkualitas, pencapaan target Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan. Indikator ini mengambarkan hunian yang memenuhi standar minimal kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Di dalam indikator tersebut terkandung empat komponen kriteria yang menjadi barometer pembentuk. Pertama, ketahanan bangunan memastikan struktur rumah mampu melindungi penghuninya dari ancaman bencana alam dan kondisi cuaca ekstrem, serta menjamin keamanan jangka panjang tanpa risiko keruntuhan. Kedua, kecukupan luas menekankan pentingnya ruang yang memadai bagi setiap anggota keluarga, mencegah kepadatan berlebihan yang dapat memicu masalah kesehatan, privasi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketiga akses air minum yang layak Akses air minum layak berarti setiap rumah tangga memiliki ketersediaan air bersih yang aman untuk dikonsumsi, mudah diakses, dan terjangkau, sehingga meminimalkan risiko penyakit bawaan air dan mendukung praktik kebersihan pribadi dan yang keempat yaitu akses sanitasi layak menjamin ketersediaan fasilitas jamban yang higienis dan sistem pembuangan limbah yang memadai. Komponen ini krusial untuk mencegah penyebaran penyakit menular, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara kolektif, membentuk fondasi hunian yang sehat. Kurangnya akses terhadap toilet yang bersih dan aman, serta sistem pengelolaan limbah yang tidak efektif, dapat memicu penyebaran penyakit menular seperti diare dan kolera, terutama di kalangan anak-anak. Oleh karena itu,

investasi dalam infrastruktur sanitasi, edukasi publik tentang praktik higiene, dan kebijakan yang inklusif merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

Tabel 2.39.
Capaian Akses Rumah Layak Huni menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024

Kab/kota	Rumah Layak Huni	Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Air Minum Layak	Sanitasi Layak
Luwu	71.53	93.48	96.01	82.05	92.91
Palopo	85.73	95.11	92.18	99.26	96.57
Wajo	80.31	93.37	93.35	91.39	95.93
Luwu Utara	81.64	96.65	97.59	88.12	97.14
Enrekang	74.6	96.18	93.73	83.34	96.63

(Sumber:Bps 2024).

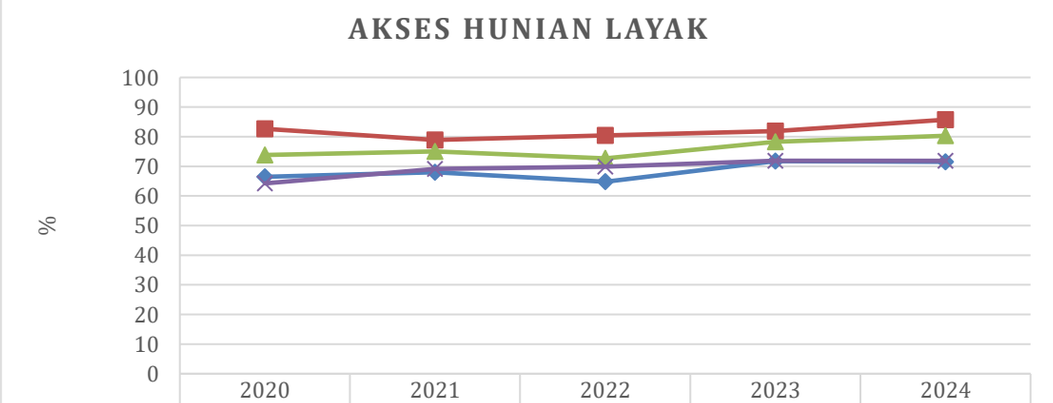
Data pencatatan capaian rumah layak huni menunjukan bahwa nilai yang diperoleh kabupaten Luwu paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang berbatasan di sekitarnya. Dari empat aspek kelayakan huni, Luwu hanya unggul dari Wajo dari aspek Ketahan Bangunan. Dari Aspek Kecukupan Luas menunjukan Luwu unggun dari Palopo, Wajo dan Enrekang. Dilihat dari aspek Air Minum, Kabupaten Luwu berpredikat paling rendah dan dari aspek Sanitasi Layak Luwu Juga memiliki nilai yang paling rendah dari Kabupaten di sekitarnya. Melihat hasil penilaian kelayakan huni di atas, kabupaten Luwu perlu untuk melakukan peningkatan kinerja untuk program rumah layak huni.

Pemerintah daerah harus memulai dengan melakukan pendataan komprehensif untuk mengidentifikasi rumah tangga yang belum memenuhi kriteria kelayakan pada keempat komponen tersebut. Berdasarkan data ini, program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat diintensifkan, didukung dengan penyediaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau milik (Rusunami) di perkotaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan memenuhi kebutuhan kecukupan luas. Penegakan regulasi dan

standar bangunan untuk memastikan setiap pembangunan hunian baru memenuhi kriteria kelayakan sejak awal.

Di sisi lain, peningkatan akses air minum layak dan sanitasi layak menuntut investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur. Perluasan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan instalasi pengolahan air minum, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat atau komunal yang efektif harus menjadi prioritas. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air bersih dan praktik sanitasi yang benar juga tak kalah penting. Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencapai target indikator ini, demi terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.99.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Luwu, Wilayah Sekitar dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu	66,43	68,04	64,79	71,75	71,53
Palopo	82,62	78,9	80,39	81,91	85,73
Wajo	73,85	75	72,68	78,31	80,31
Sulsel	64,24	69,11	69,9	71,88	71,86

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan peningkatan persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak di seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan. Secara umum rumah tangga yang dapat mengakses hunian yang layak di kabupaten Luwu cenderung mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan Kota, kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Wajo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terlihat

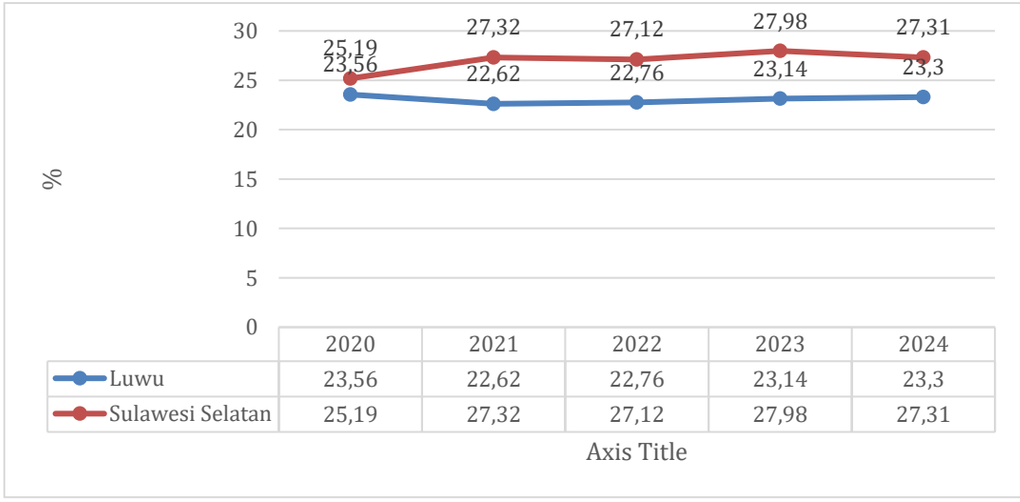
capaian Kabupaten Luwu Masih berada dibawah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan capaan ini agar masyarakat kabupaten Luwu dapat secara menyelru memperoleh akses hunian yang layak.

Akses terhadap hunian yang layak sangat erat kaitannya dengan faktor keterjangkauan secara ekonomi oleh masyarakat. Untuk memperoleh hunia yang layak saat ini perlu mengeluarkan dana yang cukup besar yang kemungkinan agak sulit untuk dijangkau. Perlu adanya upaya pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat untuk meringankan pengeluaran untuk memperoleh hunian yang layak

Akses terhadap hunian yang layak tidak dapat dipisahkan dari faktor keterjangkauan secara ekonomi bagi masyarakat. Biaya untuk memperoleh hunian yang memenuhi standar kelayakan seringkali memerlukan pengeluaran dana yang lebih besar. Hal tersebut menjadi batasan yang menimbulkan tantangan besar bagi mayoritas lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kesenjangan antara harga properti yang terus meningkat dengan daya beli masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan impian memiliki rumah yang aman dan nyaman. Tanpa intervensi yang optimal dari pemerintah, kondisi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peran pemerintah menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan keterjangkauan ini. Diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memberikan bantuan yang meringankan beban finansial masyarakat dalam mengakses hunian layak. Bantuan ini dapat berbentuk beragam, mulai dari skema subsidi bunga kredit perumahan, penyediaan lahan yang terjangkau untuk pembangunan perumahan bersubsidi, program bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah swadaya, hingga fasilitasi kepemilikan melalui skema sewa-beli atau rumah susun sederhana. Dengan dukungan kebijakan dan program yang tepat sasaran, pemerintah dapat secara signifikan membantu masyarakat mewujudkan hak dasar mereka atas hunian yang layak, sehingga berdampak positif pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik 2.100.
Data capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

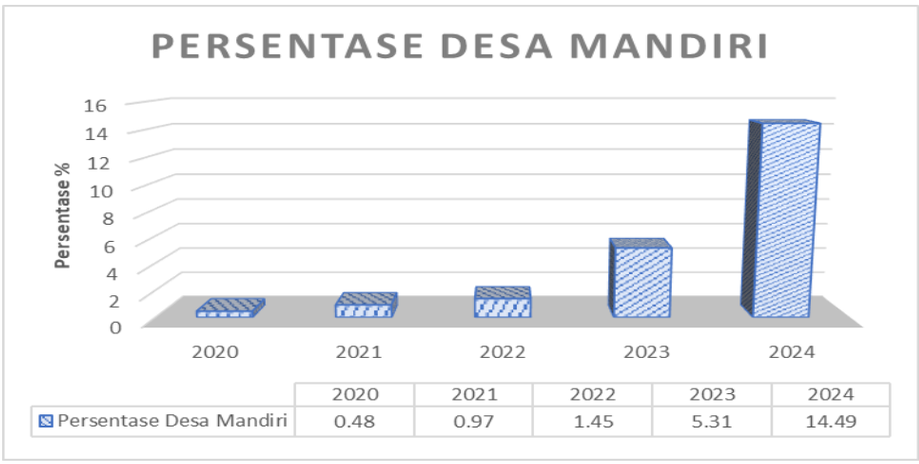
Meskipun pada data persentase pengeluaran perkapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga di kabupaten Luwu masih di bawah dari capaian provinsi Sulawesi Selatan, namun proporsi tersebut masih relatif tinggi. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan stimulan yang lebih proporsional seperti bantuan listrik, air, dan kebersihan hunian sebagai upaya yang konkret. Dengan menurunkan pengeluaran perkapita intuk kebutuhan perumahan untuk memberikan porsi pengeluaran yang sifatnya produktif seperti untuk membiayai permodalan untuk usaha dan investasi lainnya maka diharapkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.

c. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu predikat/Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Peraturan Kementerian Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melakukan kinerja dalam upaya mengentaskan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Persentase status desa mandiri kabupaten Luwu pada tahun 2023 tercatat 5,31 persen dari 207 desa. Berdasarkan data pencatatan dari dinas DPMD kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang memperoleh status Desa Mandiri sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.101.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan Dinas DPMD Kab Luwu tahun 2025.

Desa mandiri di kabupaten Luwu terus meningkat jumlahnya. Keberhasilan tersebut mengindikasi kan adanya pengelolaan administrasi yang baik oleh pemerintah desa dan adanya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan terus ditingkatkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat luwu. Kerja sama yang serius akan terus ditingkatkan dengan adanya program-program yang tujuannya memberikan penguatan kepada pemerintah desa untuk menuntaskan permasalahan yang ada di desa terutama perogram yang menjadi prioritas nasional dan kabupaten seperti penurunan stunting, anak tidak sekolah dan lainnya.

Pencapaian derajat desa mandiri ditinjau berdasarkan beberpa aspek. Aspek ketahanan sosial, aspek ketahanan ekonomi dan aspek ketahanan ekologi/lingkungan menjadi rangkaian komposit yang harus dikembangkan untuk memaksimalkan potensi desa itu sendiri. Kemandirian suatu desa dapat dilihat dari cara desa memanfaatkan potensi yang ada melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat perekonomiannya. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengaktifkan

badan usaha milik desa. Badan usaha yang dimiliki oleh desa, baik seluruhnya maupun sebagian besar modalnya, dan didirikan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui badan usaha ini, bantuan pemodalan dapat diberikan untuk usaha yang akan dijalankan oleh masayakat. Namun demikian, BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi yang baik harus dilakukan agar badan ini dapat bejalan dengan baik.

Pemeringkatan BUMDes dan BUMDes Bersama yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui evaluasi kinerja dan potensi badan usaha milik desa. Penilaian mencakup beberapa aspek yakni aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek usaha dan unit usaha, aspek kemitraan, aspek aset dan permodalan, aspek administrasi laporan Keuangan dan akuntabilitas, aspek keuntungan dan mafaat bagi desan dan masyarakat. Bagi BUMDes yang berkinerja baik, pemeringkatan ini membuka peluang untuk mendapatkan penghargaan, pendampingan, dan akses pendanaan, sehingga mendorong percepatan pengembangan usaha desa. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong persaingan sehat antardesa dalam mengelola BUMDes secara profesional dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kriteria penilaian yang komprehensif, pemeringkatan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai panduan pengembangan bagi BUMDes untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing. Bagi desa-desa berprestasi, program ini memberikan insentif berupa penghargaan, pendampingan teknis, dan akses pendanaan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui mekanisme ini, Kemendesa PDTT berupaya menciptakan ekosistem BUMDes yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi penggerak utama

kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemeringkatan BUMDes bukan sekadar kompetisi, melainkan langkah nyata menuju kemandirian ekonomi desa. Berikut Pemeringkatan BUMDes di Kabupaten Luwu pada tahun 2024.

Tabel 2.40.
Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Luwu Tahun 2025

Kecamatan	Pemeringkatan			
	Berkembang	Pemula	Perintis	Maju
Bajo	4	2	4	1
Bajo Barat	0	3	3	0
Basse Sangtempe	1	1	6	0
Basse Sangtempe Utara	0	2	10	0
Belopa	1	3	1	0
Belopa Utara	2	4	0	0
Bua	4	5	5	0
Bua Ponrang	0	4	4	0
Kamanre	2	0	3	0
Lamasi	2	7	0	0
Lamasi Timur	3	1	5	0
Larompong	0	2	10	0
Larompong Selatan	0	3	6	0
Latimojong	1	2	9	0
Ponrang	0	1	6	0
Ponrang Selatan	0	2	9	0
Suli	0	8	4	0
Suli Barat	1	3	3	0
Walenrang	0	0	7	0
Walenrang Barat	0	2	3	0
Walenrang Timur	0	2	4	0
Walenrang Utara	0	4	6	0

Sumber : DPMD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pemeringkatan BUMDes dikabupaten Luwu tahun 2025, terlihat bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi. Pemerintah Kabupaten Luwu perlu meningkatkan fasilitasi dalam rangka pembinaan BUMDes sehingga organisasi tingkat desa ini dapat bemberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan kemandirian desa.

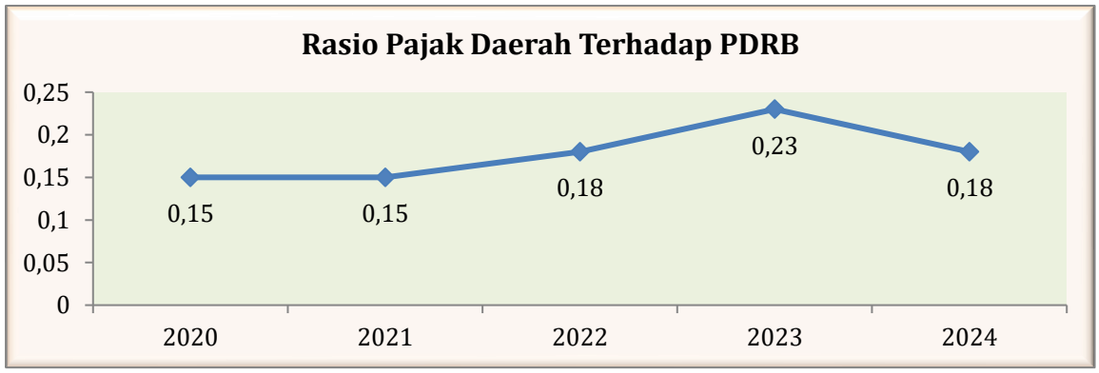
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

setempat. Pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengatur dan mengumpulkan penerimaan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskalnya. Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 berada pada level 0,15 naik pada tahun 2023 menjadi 0,23 persen. Namun pada tahun 2024 turun menjadi 0,18 persen. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.102.
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

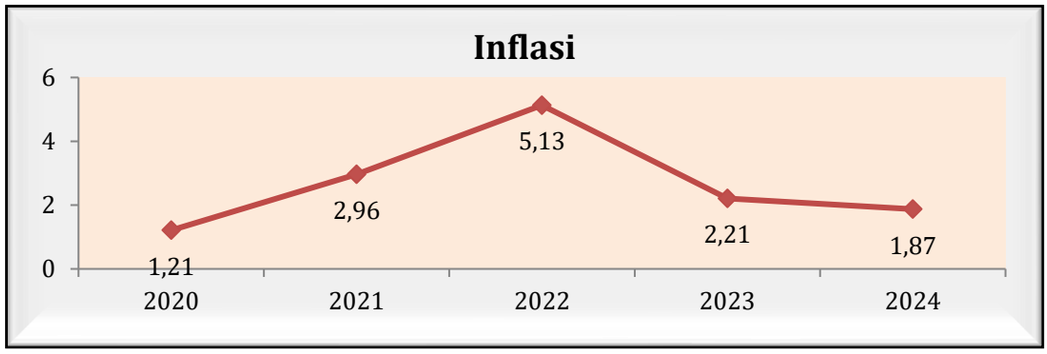


Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

b. Tingkat Inflasi Gabungan

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK Kota Palopo. Nilai inflasi zona Kota Palopo lima tahun terakhir (2020-2024) berfluktuasi, terendah pada tahun 2020 sebesar 1,21, naik pada tahun 2021 sebesar 2,96, tertinggi di tahun 2022 sebesar 5,13 kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 2,21, dan pada tahun 2024 sebesar 1,87. Perkembangan laju inflasi IHK Palopo dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.103.
Inflasi Kabupten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

c. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan investasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dinamika perekonomian suatu daerah. Investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.41.
Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Realisasi Investasi (Rp)	357.000.000.000	336.613.519.167	1.876.267.703.941	2.570.604.531.514	1.290.283.000.000
Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	-	-5,88	457,40	37,01	-50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025.

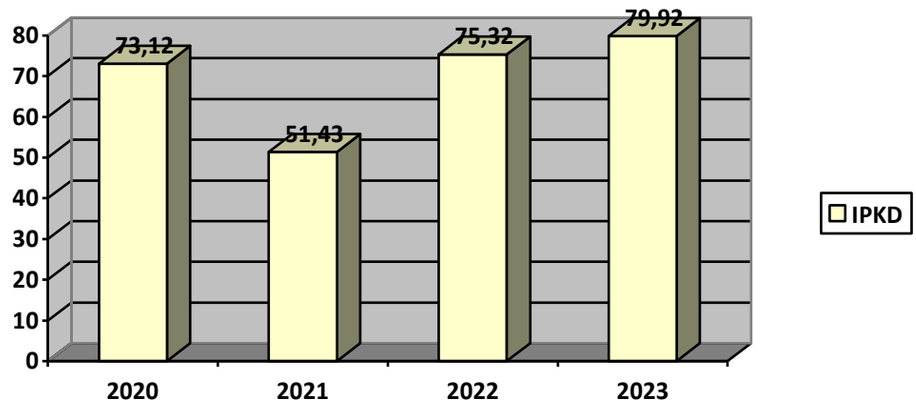
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu bahwa pertumbuhan investasi Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2023 sangat fluktuatif. Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan investasi bernilai negatif yaitu -5,88 atau menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian

meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 457,40% dengan nilai realisasi investasi sebesar 1,87 triliun rupiah. Pada tahun 2023 pertumbuhan investasi di Kabupaten Luwu meningkat sebesar 37,01% dengan nilai realisasi investasi sebesar 2,57 triliun rupiah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -50% dengan nilai investasi sebesar 1,29 triliun.

d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks pengelolaan keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola kuangan daerah. Dengan mengukur berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sebagai gambaran seberapa baik pengelolaan anggaran daerah. Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.104.
IPKD Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2023



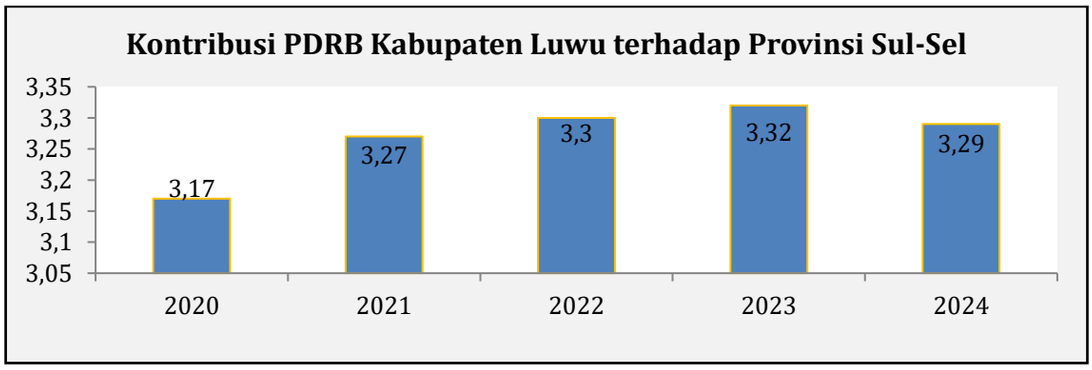
Sumber : SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2025.

Pada grafik diatas menunjukan nilai indek pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu yaitu pada tahun 2020 sebesar 73,12, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 51,43, kemudian meningkat di tahun 2022 hingga 2023 sebesar 75,32 dan 79,92 (perlu perbaikan) atau nilai B.

e. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Terhadap Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi masih rendah walaupun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 Kabupaten Luwu hanya menopan perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 3,17 persen meningkat menjadi 3,32 pada tahun 2023, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,29 persen. Kontribusi PDRB kabupaten luwu terhadap provinsi lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.105.
Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bentuk kebijakan atau program layanan publik yang diberikan oleh satu pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan dasar, mendorong pembangunan yang insklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Aspek pelayanan umum digambarkan dalam: (1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaftif; (2) hukum yang berkeadilan,

keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi subtansial; (3) ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan; dan (4) kinerja setiap urusan pemerintah daerah, yang tercerminkan dalam pencapaian indikator – indikatornya sebagai berikut:

2.4.1.Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Perbaikan Penyelenggaraan pemerintahan harus di topang dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga mampu menyesuaikan dengan tuntunan zaman saat ini dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kehandalan dalam pelayanan pemerintahan.

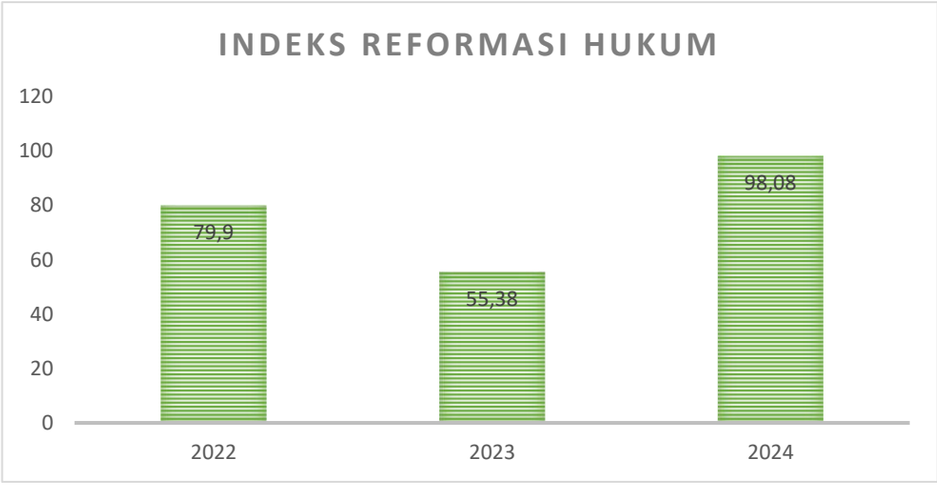
a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum (IRH) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya reformasi di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran indeks reformasi hukum ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi nilai indeks reformasi hukum maka semakin berhasil pelaksanaan komponen reformasi hukum.

Data indeks reformasi hukum yang dirlis oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik indonesia memperlihatkan jika nilai indeks reformasi hukum di Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah 98,08 (kategori AA) dengan predikat sangat baik. Nilai ini meningkatkan signifikan dari tahun sebelumnya, dimana nilai indeks reformasi hukum tahun 2023 adalah 55,3 (kategori CC) dengan predikat cukup. Hal ini mengindikasikan jia upaya upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel sudah sangat baik. Hasil ini menjadi tantangan kedepanya untuk dapat dipertahankan bahkan di

tingkatkan sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Adapun data capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu dapat di lihat pada garik di bawah ini :

Grafik 2.106.
Indeks Reformasi Hukum Kab. Luwu Tahun 2022 - 2024



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, 2025

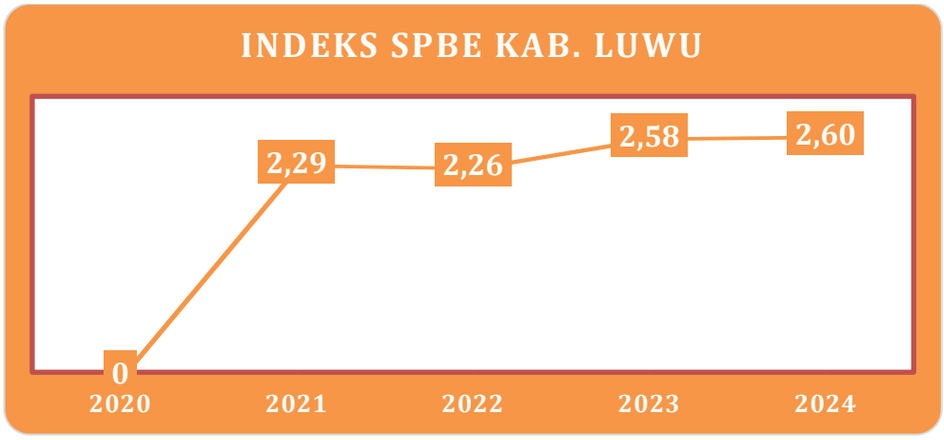
.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemanfataan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yang penerapanya bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah layanan pemerintahan. Indeks pemerintahan berbasis elektronik digunakan untuk mengukur sejauh mana negara atau daerah telah mengadopsi dan memanfaatkan tekonologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan. Indeks ini merepresentasikan tingkat kematangan dan efektivitas implementasi E-Goverment yang mencakup penyediaan layanan publik secara digital, transparansi, partisipasi masyarakat, serta integrasi sistem pemerintahan.

Data nilai indeks SPBE Kabupaten Luwu dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.107.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian PAN RB, 2024.

Grafik diatas memperlihatkan jika indeks SPBE tahun 2024 sebesar 2,60 poin meningkat dari tahun 2023 sebesar 2,58 poin, hal ini menunjukkan jika sudah ada upaya peningkatan dalam pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Luwu meskipun belum maksimal sehingga peningkatannya belum cukup signifikan. Kedepannya Pelayanan berbbasis digital ini harus terus di tingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

c. Indeks Pelayanan Publik

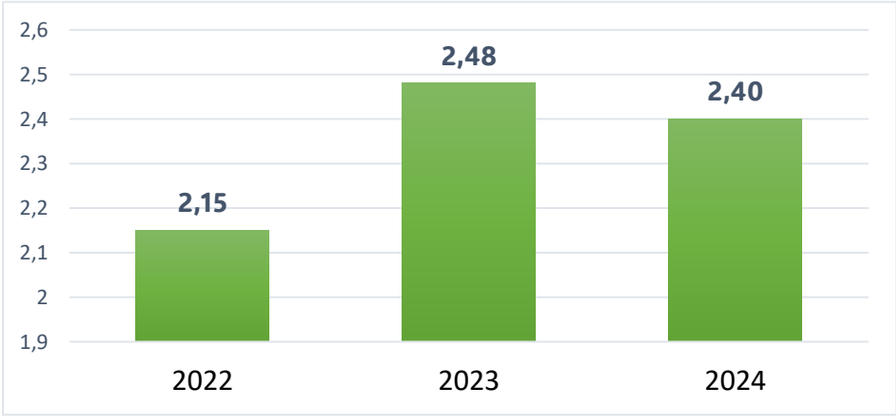
Pelayanan publik merupakan hal yang kerap mendapat perhatian dari pimpinan daerah karena ini menjadi gambaran awal dari penyelenggaran pemerintah di suatu daerah. pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam rentang waktu tahun 2022 - 2024 menempatkan

Kabupaten Luwu dalam kategori C (Cukup), dengan nilai skor indeks 2,15 di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 2,48 di tahun 2023, namum kemudian menurun menjadi 2,40 di tahun 2024. Nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu yang masih berada dalam kategori C ini mengindikasikan masih rendahya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Luwu, karenanya upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua aspek harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten di tahun-tahun mendatang agar nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu meingkat menjadi kategori Baik. Adapun data indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.108.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024



Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

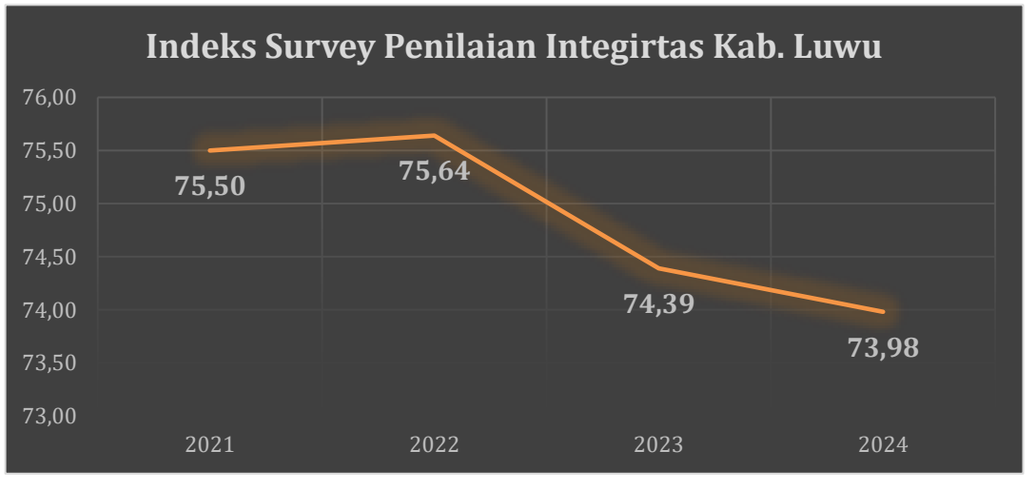
d. Survei Penilaiain Integritas

Pelayanan pemerintahan yang berintegritas adalah pelayanan yang dilakukan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab tampa adanya niat untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang berintegritas menjadi syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Indeks integritas nasional merupakan alat untuk mengukur atau menilai tingkat kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rilis hasil survey penilaian integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperlihatkan jika pada tahun 2024 Kabupaten luwu berada dalam kategori waspada dengan

nilai indeks 73,98 poin. Nilai indeks ini mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana di tahun 2023 nilai indeks SPI sebesar 74,39 poin, meskipun masih di kategori yang sama yakni waspada. Nilai Indeks SPI tahun 2024 yang menempatkan Kabupaten Luwu dalam kategori waspada ini menunjukkan jika upaya pencegahan korupsi yang di lakukan di Kabupaten Luwu masih sangat rendah. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari segenap stakeholder yang ada untuk menciptakan pememerintahan yang lebih bersih dan transparan. Adapun indeks penilaian integritas Kabupaten Luwu selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Adapun indeks penilaian integritas Kabupaten Luwu selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.109.
Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025.

Trend penurunan nilai Indeks SPI terjadi di dua tahun terakhir seperti yang terlihat di grafik diatas dimana di tahun 2023 dan 2024 menurun setelah sebelumnya di Tahun 2022 nilai indeks SPI Kabupaten Luwu mencapai nilai 75,64 yang merupakan nilai tertinggi selama survey SPI dilakukan di Kabupaten Luwu meskipun juga masih dalam kategori Waspada. Hal ini menunjukkan jika upaya pencegahan korupsi yang di lakukan di Kabupaten Luwu masih sangat rendah, untuk itu perlu upaya serius dari segenap stakeholder yang ada untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan pememerintahan yang lebih bersih dan transparan dengan melakukan pengawasan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan

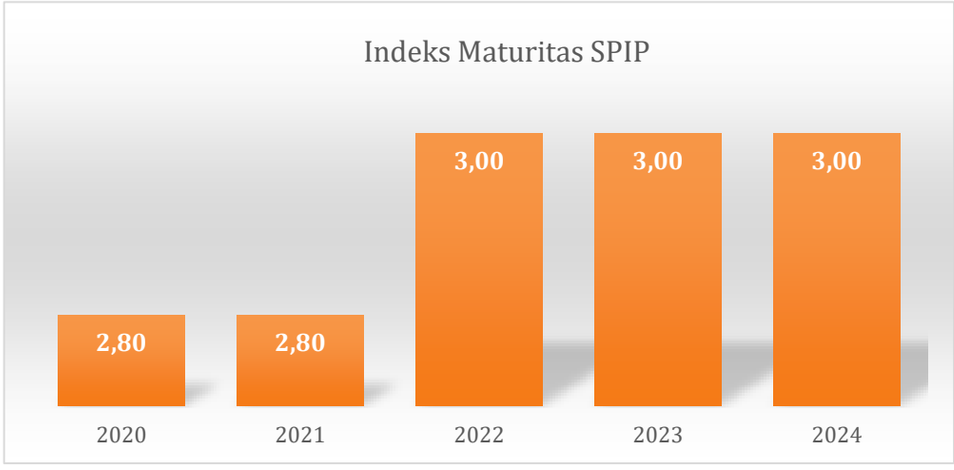
integritas ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

e. Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang dirancang untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Penilaian SPIP ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan model maturitas SPIP yang mengacu pada lima komponen utama yakni : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring pengendalian.

Indeks Maturitas SPIP ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan (maturty level) penerapan SPIP yang di klasifikasikan dengan level 0 – 5, semakin tinggi nilai indeks maturitas semakin menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP di suatu Pemerintah Daerah. Adapun data Indeks Maturitas SPIP Kabuaten Luwu tahun 2020 – 2024 tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.110.
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangungan, 2025.

Rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti yang tersaji di grafik diatas memperlihatkan jika indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu dalam tiga tahun terkahir mencapai level 3 (terdefenisi). Hal ini mengindikasikan jika kualitas penyelenggaran SPIP di Kabupaten

Luwu sudah baik, pencapaian ini tentunya di dukung oleh sistem pengendalian yang terstruktur dengan dokumentasi dan mekanisme pengukuran yang jelas. Kedepanya sistem yang sudah baik ini harus lebih dioptimalkan lagi agar level indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu dapat ditingkatkan menjadi level 4 (terkelola).

Indeks maturitas bukan hanya menjadi sekedar alat ukur tetapi menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih efektif dan bertingteritas. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan prinsip good governance, transparan dan bebas korupsi. Penetapan target peningkatan level maturitas SPIP diharapkan dapat meminimalkan resiko, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif.

f. *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK

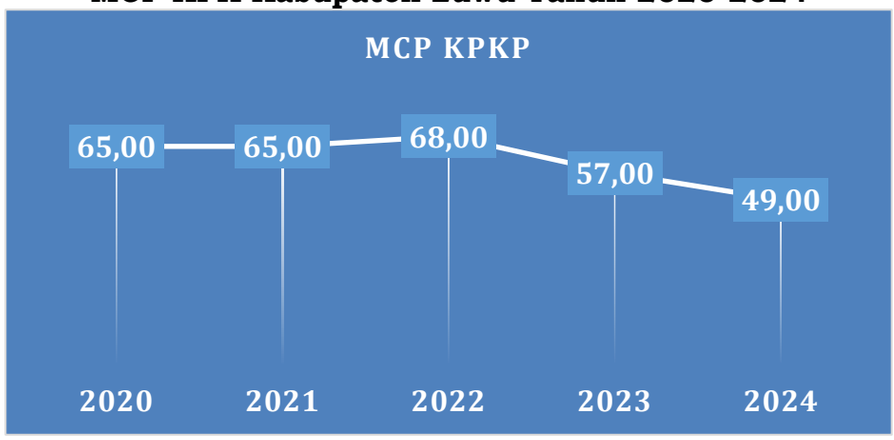
Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk memastikan adanya regulasi dan sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sistem *Monitoring Center For Prevention* (MCP) untuk memantau dan mengidentifikasi resiko korupsi di suatu pemerintah daerah.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK merupakan program monitoring capaian kinerja program, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK yang bertujuan untuk memantau titik–titik rawan korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada delapan area intervensi MCP yang menjadi fokus yakni manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Skor MCP KPK merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan

pencegahan korupsi. Peningkatan skor MCP ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan. Skor MCP KPK Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.111.
MCP KPK Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Grafik diatas memperlihatkan jika terjadi penurunan skor MCP KPK dalam dua tahun terakhir yakni 57 di tahun 2023 dan menurun lagi menjadi 49 di tahun 2024 setelah sebelumnya di tahun 2022 mencapai 68 yang merupakan skor tertinggi yang pernah dicapai Kabupaten Luwu dalam rentang waktu tahun 2020 - 2024.

Penurunan skor MCP KPK di tahun 2024 menjadi 49 (kategori rentan) ini menjadi warning bagi Pemerintahan Kabupaten Luwu karena hal ini mengindikasikan jika pemerintah daerah belum baik dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu harus fokus dalam peningkatan efektivitas di delapan area intervensi utama dan meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di tingkat opd serta membuat sistem pengawasan internal yang lebih baik.

Upaya intervnesi delapan fokus utama ini dapat berupa : perencanaan dan penganggaran yang transpran, pengadaan barang dan jasa yang efesien, pelayanan publik prima, pengawasan apip yang efektif, manajemen ASN yang profesional, pengelolaan BMD yang tepat, optimalisasi pajak daerah, pembentukan tim asistensi dan verifikasi, kolaborasi dengan Kejaksanan dan KPK untuk pendampingan, pengawasan dan evaluasi berkala. Dengan upaya

perbaikan pada delapan intervensi ini diharapkan dapat meningkatan skor MCP KPK kedepannya sehingga Kabupaten Luwu dapat keluar dari kategori rentan dalam upaya pencegahan Korupsi.

g. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja secara transparan, akuntabel dan terukur sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penilaian sakip bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas, mendorong kinerja yang efektif dan efesien, transparasi dan partisipasi publik, serta sebagai dasar dalam evaluasi kebijakan.

Peningkatan nilai sakip menjadi indikasi adanya komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, dan menjadi gambaran utuh perbaikan tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan akuntabilitas kinerja. Capaian nilai sakip Kabupaten Luwu sudah cukup baik, dimana dalam kurun waktu empat tahun terakhir Kabupaten meraih kategori baik (B) dalam penilaian sakip. Adapun nilai Sakip Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.112.
Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Tahun 2020 - 2024



Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

Capaian nilai sakip Kabupaten Luwu seperti yang di sajikan pada grafik diatas memperlihatkan konsistensi Kabupaten Luwu yang selalu berada dalam kategori baik (B) dalam penilaian Sakip. hal ini

menunjukkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Luwu sudah cukup baik, namum kedepanya masih diperlukan lagi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan komitmen dalam manajemen kinerja agar nilai sakip dapat ditingkatkan untuk menjadi kategori sangat baik (BB).

2.4.2. Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi subtansial merupakah elemen penting yang saling terkait dan harus dikuatkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dengan stabilitas politik dan keamanan yang selalu kondusif. Ketika ketiga elemen ini terjaga maka pembangunan nasional dapat lebih cepat dilakukan karena dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga harmonisasi sosial antar warga negara sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Negara maju dan berdaulat hanya dapat di wujudkan jika ketiga elemen penting ini menjadi kuat. Hukum yang berkadilan dapat memastikan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Keamanan nasional yang tangguh mengggambarkan kemampuan negara melindungi kedaulatan, keutuhan wilayahnya dan keamanan masyarakatnya dari segala bentuk ancaman, dan Demokrasi subtansial memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk berekpresi dan mengemukakan pendapat dan turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

a. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan mengacu pada tingkat atau persentase keberhasilan penegakan Perda dan Perkada yang ditetapkan. Berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten sudah terlaksana secara maksimal, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun

2024, nilai persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Luwu adalah 100 persen. Hal ini mengindikasikan konsistensi dari OPD terkait dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, dan juga menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Perda dan Perkada yang ditetapkan.

Kemampuan suatu daerah dalam penegakan Perda dan Perkada disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah : sosialisasi Perda dan Perkada yang efektif, penegakan aturan hukum, keberadaan intitusi yang kuat dan terpercaya, Perda dan Perkada yang jelas dan dapat di terapkan, kerjasama antar stakholder terkait, serta kesadaran dari masyarakat dalam mematuhi perda dan perkada yang ditetapkan.

b. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Selesaikan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, dan tertib. Untuk mewujudkan kondusifitas lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu maka diperlukan usaha bersama dari seluruh stakeholder terkait dan juga seluruh elemen masyarakat. Kondisi Trantinbum di Kab. Luwu sudah sangat baik, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mencapai skor sempurna yakni 100 persen dalam mencegah dan meredam gangguan Tratinbum di Kabupaten Luwu. Kedepanya kondisi ini tentu harus tetap dipertahankan dengan upaya deteksi dini segenap potensi gangguan tratinbum sehingga upaya pencegahan ganguan trantinbum dapat lebih cepat dilakukan.

c. Persentase Tindak Kriminal Yang Diatasi

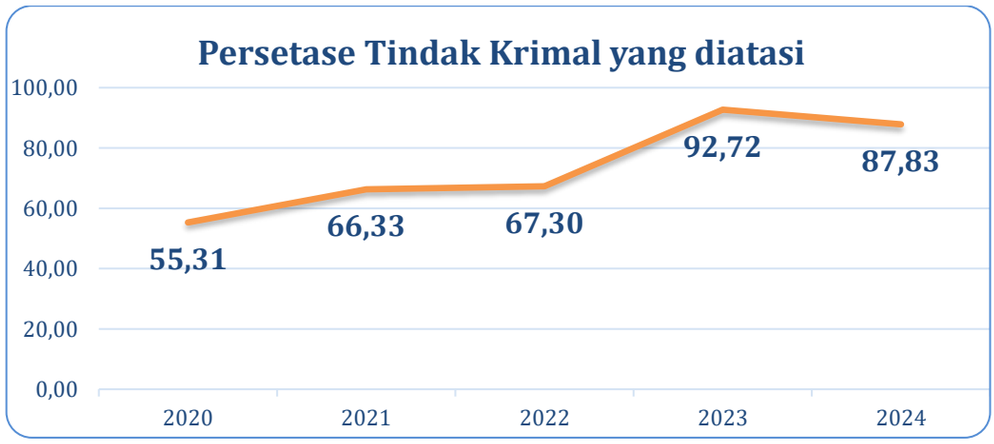
Persentase tindak kriminal yang diatasi menunjukkan jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan pada intansi yang berwenang, dan mendapat penagangan dan dapat teratasi. Rilis data tindak kriminal yang diatasi, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Luwu memeperlihatkan adanya peningkatan siginifikan dari persentase tindak kriminal yang diatasi, yang sebelumnya sebesar 67, 3 % pada tahun 2022 menjadi 92, 72 % di tahun 2023 namum kembali

menurun menjadi 87,83 % di tahun 2024. Hal ini memperlihatkan jika pada dasarnya kinerja dari intansi terkait sudah cukup baik. Namun perlu konsistensi dalam upaya penanganan tindak kriminal agar tidak terjadi penurunan seperti yang terjadi di tahun 2024.

Keberhasilan penanganan kasus tindak kriminal sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan sumber daya, sarana prasarana baik itu dalam hal jumlah personil kepolisian maupun ketersedian peralatan investigasi dan peralatan pendukung lainnya, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait kasus yang ditagani.

Secara umum, dalam lima tahun terkahir, persentase tindak kriminal yang diatasi cenderung meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2024 dengan nilai persentase sebesar 87,83 % setelah di tahun sebelumnya di tahun 2023 memperoleh nilai persentase sebesar 92,72 % yang merupakan nilai persentase tertinggi dalam kurun lima tahun terkahir. adapun data persentase tindak kriminal yang diatasi tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.113.
Persentase Tindak Kriminal Yang Diatasi
Tahun 2020-2024



Sumber : Kepolisian Resor Luwu Tahun 2025.

Penurunan nilai persentase di tahun 2024 sebesar 87, 83 % seperti yang terlihat pada grafik diatas diharapkan tidak berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, namum sebalinya kembali dapat ditingkatkan, untuk itu diperlukan upaya berupa peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung,

peningkatan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, sosialisasi terkait jenis dan pencegahan tindak kriminal, serta pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi tindak kriminal yang terjadi wilayah masing-masing. Dengan komptensi SDM yang cukup dan di tunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta didukung peran aktif masyarakat, maka diharpakan kondisi keamanan dapat lebih terjaga sehingga masyarakat dapat beraktiftitas dengan tenang dan nyaman.

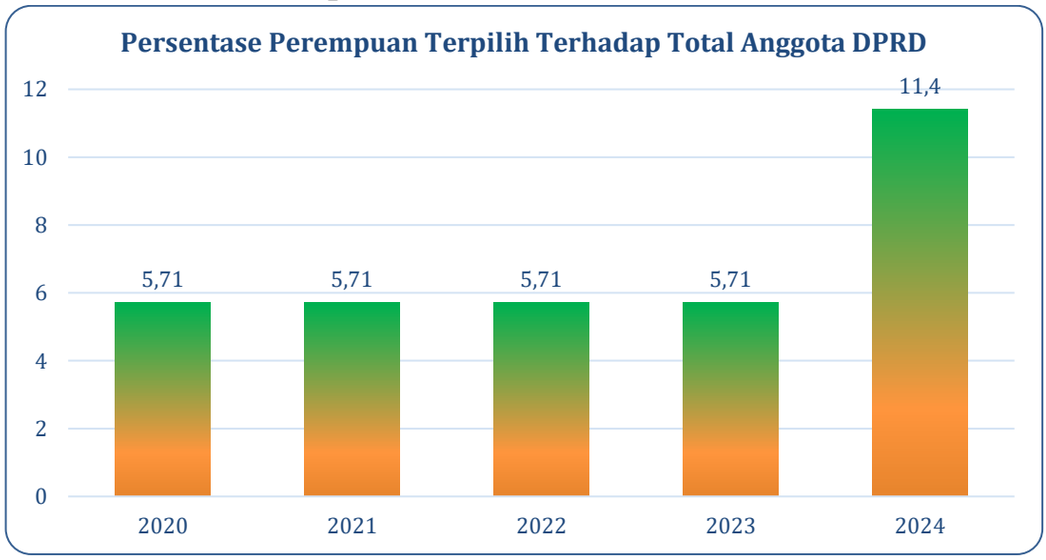
d. Pesentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Isu kesetaraan gender menjadi konsen dalam penyelengaraan pemerintahan, hal ini dimaksudkan agar kaum perempuan mengambil peran dalam jalannya pemerintahan dengan memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Dalam hal partisipasi politik, isu kesetaraan gender ini di akomodir dengan mensyaratkan tiap partai politik mengusung minimal 30 % kaum perempuan sebagai caleg dalam pemilihan legislatif.

Besarnya partisipasi perempuan dalam politik dan besarnya keterwakilan suara Perempuan dalam pengambilan keputusan tercerminkan dalam besarnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keterwakilan perempuan di Dewan DPRD merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat inklusivitas demokrasi di tingkat lokal.

Pemilihan legislatif Tahun 2024, menepatkan 4 orang perempuan dari 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu, atau 11, 4 % dari total anggota DPRD Kabupaten Luwu. Persentase perempuan terpilih tahun 2024 ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 5,71 %. Meskipun persentase perempuan terpilih tahun 2024 ini meningkat, namun pada dasarnya nilai ini masih tergolong rendah karena capaiannya yang masih kurang dari kuota 30 % untuk anggota DPRD perempuan. adapun data persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dapat lihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 2.114.
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2025.

Grafik di atas memperlihatkan jika dalam rentang waktu lima tahun terakhir, persentase perempuan terpilih dari total anggota DPRD Kabupaten Luwu masih dibawah 30 %, hal mengindikasikan bahwa tingkat partispasi perempuan dalam politk masih cukup rendah sehingga akan berpengaruh pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkhusus lagi terhadap isu-isu keseteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Kurangnya perempuan yang terpilih bisa disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah faktor budaya patriarki di masyarakat yang masih memandang persoalan politik merupakan dunia laki-laki sehingga pemilih cenderung lebih memilih calon laki – laki untuk menjadi aggota DPRD, rekrutmen dan kaderisasi partai pada kader perempuan yang belum berjalan dengan baik sehingga kader perempuan dengan kapasitas yang baik masih kurang sehingga kecenderungan calon legislatif perempuang yang didorong untuk maju dalam pemilihan legislatif terkadang bukan hadir dari kaderisasi partai dan seleksi yang ketat tapi hanya semata untuk memenuhi syarat pengajuan 30 % caleg perempuan.

Untuk itu kedepanya, pemerintah bersama dengan partai politik perlu berupaya upaya mendorong pendidikan politik bagi kaum

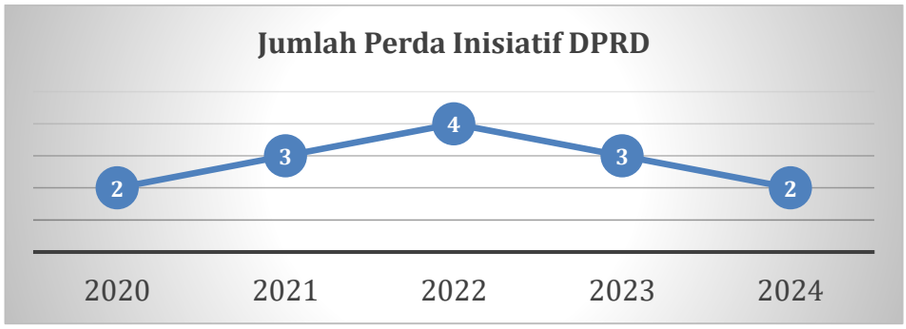
perempuan dengan mengakitfkan organisasi-organisasi perempuan, melakukan pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, sosialisasi terkait pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD, pengembangan kapasistas dan pendampingan calon perempuan sehingga dengan itu diharapkan persentase perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD dapat meningkat.

e. PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki 3 fungsi utama, yang salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi ini mencakup penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Daerah baik itu inisaitif DPRD maupun usulan dari pihak eksekutif, dan melakukan pengesahaan Ranperda menjadi Perda. Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD merupakan peraturan yang digagas dan diajukan oleh anggota DPRD sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan perda yang diusulkan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah), Perda inisiatif ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang di angkat melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.

Jumlah perda inisiatif DPRD menjadi gambaran seberapa besar DPRD Kabupaten Luwu menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. Adapun jumlah perda inisiatif DPRD Kabupaten Luwu yang di buat dalam rentang waktu tahun 2020 – 2024 tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.115.
Jumlah PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas terlihat jika perda inisatif DPRD yang dibuat dalam kurun 5 waktu terakhir masih cendreung fluktuatif, tahun 2022 merupakan tahun dengan jumlah Perda tertinggi dengan jumlah 4 perda, yang kemudian menurun di dua tahun terkahir yakni 3 perda di tahun 2023 dan terkahir 2 Perda di tahun 2024. hal ini dapat mengindentifikasian jika anggota DPRD belum memaksimalkan hak inisiatifnya dalam pembentukan perda, ataukah perda usulan dari pihak eksekutif sudah mengakomodir aspirasi masyarakat, yang menjadi indikasi positif jika pihak pemerintah sudah cukup baik dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

DPRD memiliki hak inisiatif dalam pembentukan Perda yang diperoleh dari aspirasi masyarakat. Kedepannya, DPRD Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengajukan lebih banyak Perda yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti kondisi dan keinginan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah Perda inisiatif DPRD maka bertambah pula aspirasi masyarakat yang diakomodir menjadi peraturan daerah yang nantinya akan menjadi payung hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan fungsinya dalam hal pembangunan, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

f. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Partai Politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik memiliki nilai yang strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintahan yang inklusif dan kebijakan yang responsif. Keterlibatan perempuan diharapkan dapat lebih mampu mengadvokasi isu-isu yang lebih lekat dengan kaum perempuan seperti perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi, dll.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui berbagai regulasi, pendidikan politik, maupun dukungan partai politik, namun tantangannya masih tetap ada, yang salah satunya masih kuatnya budaya patriarki yang masih

menganggap politik sebagai urusan laki-laki, sehingga perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, partai politik, masyarakat, dan perempuan sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dalam politik. Adapun data persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.116.
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase Perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 stagnan di angka 25,27%, namum meningkat menjadi 30 % di tahun 2024. Peningkatan ini menjadi tanda positif bagi keterlibatan perempuan dalam partai politk dan mengindikasikan jika ruang ekpresi politik bagi kaum perempuan sudah cukup terbuka, dan mengindentifikasikan jika masyarakat sudah mulai memberikan dukungan bagi perempuan yang hendak masuk dalam dunia politik.Dengan memiliki pengurus perempuan, maka partai politik sebagai lembaga penopang demokrasi akan lebih mudah dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan perempuan baik berupa pelatihan kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Keterlibatan perempuan sebagai pengurus partai politik bukan hanya tentang keadilan gender tetapi juga tentang kualitas demokrasi. Partai politik yang inklusif akan melahirkan kebijakan yang lebih adil

dan kepemimpinan yang representatif. Untuk itu dibutuhkan komitmen yanag kuat dari partai politik, pemeritah dan masyarakat dalam membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat berperan aktif dalam politik sehingga perempuan dapat lebih berdaya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terutama pada hal-hal yang terkait langsung dengan kaum perempuan.

2.4.3.Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi adalah kemampuan suatu negara untuk secara adaptif merespon tantangan dalam hubungan internasionalnya sedang pertahanan berdaya gentar kawasan adalah kemampuan suatu negara untuk mencegah ancaman dan serangan dari pihak lain dengan menunjukkan kekuatan dan kesiapan yang memadai.

Diplomasi dan pertahanan harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional diberbagai bidang, dan tetap memelihara hubungan internasional yang konstruktif. Diplomasi yang kuat dan didukung oleh pertahanan yang tangguh akan meningkatkan posisi tawar yang tinggi dalam geopolitik dunia sehingga kita tidak hanya menjaga kedaulatan negara Indonesia, tetapi juga mampu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

a. Indeks daya saing daerah

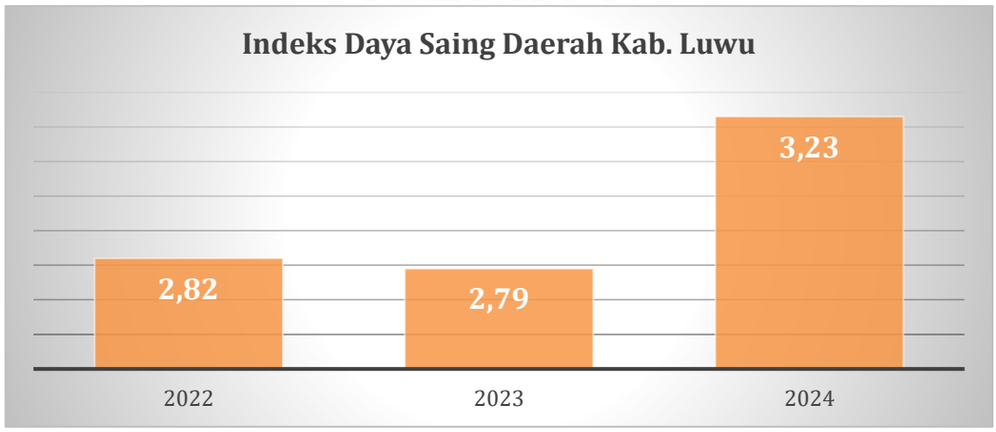
Indeks daya saing daerah digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya, potensi dan peluang yang dimilikinya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks ini menjadi informasi yang digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu daerah, dan menjadi acuan dalam menyusun program prioritas suatu daerah sehingga dapat dirumuskan konsep dan strategi pengembangan suatu daerah.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktifitas di tiga lini yakni : produktifitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong efesiensi, dan produktifitas yang di dorong oleh inovasi yang dituangkan dalam 4

komponen utama yang terdiri dari : lingkungan pendukung, SDM, Pasar, Ekosistem Inovasi dan dijabarkan dalam 12 pilar daya saing.

Pengukuran Indeks daya saing daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimaksudkan untuk menyediakan data dasar yang akurat dengan mengkur produktifitas dan kemajuan daerah menggunakan kerangka global competitivesnes indeks (GCI) dari word economic forum (WEF). Adapun data indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.117.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN, 2025.

Grafik di atas memperlihatkan jika Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu masih fluktuatif. Indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu mengalami penurunanan yang sebelumnya sebesar 2,82 di tahun 2022 menjadi 2,79 di tahun 2023, namum kembali meningkat menjadi 3,23 di tahun 2024. Peningkatan indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu di tahun 2024 ini mengindikasikan jika Kabupaten Luu sudah cukup mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saingnya meskipun belum cukup maksimal. Peningkatan ini tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan indeks daya daerah ini tentunya harus dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan dengan melakukan intervensi pada aspek-aspek pendukung daya saing daerah sehingga Kabupaten Luwu dapat berkembang menjadi daerah yang lebih kompetitif dengan daerah lain.

b. Jumlah Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti

Dalam upaya memajukan pembangunan daerah di berbagai sektor, Pemerintah Kabupaten luwu telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta dan Universitas. Kerjasama daerah dengan berbagai pihak ini merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potesi sumber daya, mengatasi permasalahan dan keterbatasan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten telah menjalin kerjasama di berbagai bidang diantaranya : kesehatan, hukum, infrasturuktur, pengembangan desa/Pemerintahan, ekonomi, penanggulangan bencana, pengembangan SDM, pendidikan dan penelitian, pertanahan, ketahanan pangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang nyata.

Adapun jumlah kerjasama daerah yang ditindaklanjuti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.42.
Jumlah Kerjasama Daerah Yang Ditindaklanjuti
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kerjasama
1.	2020	4
2.	2021	3
3.	2022	3
4.	2023	37
5.	2024	6

Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.4.2.1. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah

perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.43.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	92,17	93,66	90,12	40,98	54,10
SD/MI	%	93,94	94,14	94,35	98,48	79,48
SMP/MTs	%	94,28	96,08	95,06	79,76	55,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 92,17%, menurun menjadi 54,10% pada tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2020 mencapai 93,94%, sedangkan pada tahun 2024 APS SD/MI menurun menjadi sebesar 79,48%. Jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2020 sebesar 94,28%, menurun menjadi 55,35% pada tahun 2024.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A terjadi penurunan dari 93,94% pada tahun 2020 menjadi 79,47% pada tahun 2024. Jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B juga terjadi penurunan dari 98,68% pada tahun 2020 menjadi 75,70% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2021	2023	2024
SD/MI/Paket A	%	93,94	94,14	94,14	98,48	79,47
SMP/MTs/Paket B	%	98,68	96,08	96,08	79,76	75,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,94% tetapi kemudian menurun menjadi 79,57% di tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 98,68% di tahun 2020, kemudian menurun menjadi 76,53% di tahun 2024.

Tabel 2.45.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Paket A	%	93,94	94,14	93,63	98,48	79,57
SMP/MTs/Paket B	%	98,68	96,56	94,49	79,76	76,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan tingkat keberhasilan program pendidikan begitu pula sebaliknya. Angka melek huruf (AMH) adalah

proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Berikut perkembangan AMH Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024.

Grafik 2.118.
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Luwu, 2025.

AMH Kabupaten Luwu pada tahun 2024 tercatat sebesar 95,07 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan AMH pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,35 persen. Angka AMH pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 95,07 persen penduduk mampu membaca dan menulis dan masih terdapat 4,93 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

5) Angka Kelulusan

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami fluktuasi. Tahun 2020 angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,84% kemudian meningkat menjadi 99,33% di tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 98,11%.

Tabel 2.46.
Angka Kelulusan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	%	93,84	95,58	96,58	93,73	99,33
SMP/MTs	%	97,46	97,04	96,22	81,59	98,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi yaitu dari 98,86% pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,33% pada tahun 2024. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA cenderung meningkat, yaitu dari 98,93% pada tahun 2020 menjadi 99,46% pada tahun 2023.

Tabel 2.47.
Angka Melanjutkan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI ke SMP/MTs	%	98,86	98,80	97,04	81,90	99,33
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,93	98,03	99,01	99,46	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Angka Putus Sekolah (APtS)

Capaian angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,77 persen di tahun 2020 menurun menjadi 0,09 persen di tahun 2023. Namun di tahun 20204 mengalami peningkatan menjadi 2,56 persen. Sementara itu, Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs padaberfluktuasi dengan capaian terendah di tahun 2021 sebesar 1,04 persen dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3,42 persen.

Tabel 2.48.
Angka Putus Sekolah (APtS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	%	0,77	0,83	0,78	0,09	2,56
SMP/MTs	%	2,74	1,04	3,42	2,79	2,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

8) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 58,27% menjadi 92,18%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami fluktuasi namun, cenderung meningkat dari 35,27% pada tahun 2020 menjadi 87,08% pada tahun 2024.

Tabel 2.49.
Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	438	441	453	2.356	2.240
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	2.683	2.683	2.743	4.043	2.430
Persentase	**%**	**16,33**	**16,44**	**16,51**	**58,27**	**92,18**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	401	413	407	472	1.671
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	1.137	1.137	1.132	1.003	1.919
Persentase	**%**	**35,27**	**36,32**	**35,95**	**47,05**	**87,08**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar per 10.000 Penduduk

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar. Sebagaimana tabel di bawah dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah di tingkat dasar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 adalah sebesar 65,50 poin, yang berarti bahwa tersedia 65 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini menurun menjadi 42,18 poin pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50.
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (Per 10.000 penduduk)	Rasio	65,50	67,25	67,36	31,72	42,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

10) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 1:21. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 21 murid.

Tabel 2.51.
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI + SMP/MTs	Guru : Murid	1:14	1:15	1:14	1:17	1:21
SMA/SMK/MA	Guru : Murid	1:12	1:12	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

11) Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat

Persentase ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 38,30% dari 8,57%. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat pada jenjang SD/MI juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu dari 15,85% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2024.

Sementara itu, ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan drastis yaitu dari 50,36% pada tahun 2020 menurun menjadi 5,58% pada tahun 2024. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat juga mengalami trend yang menurun yaitu dari 7,92% di tahun 2020 menjadi 0,42% di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	1.053	996	46	784	202
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2.356
Persentase	**%**	**45,68**	**42,71**	**1,86**	**38,30**	**8,57**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	324	295	28	288	8

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2.356
Persentase	**%**	**15,85**	**14,06**	**12,65**	**14,06**	**0,34**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	489	461	28	296	107
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**50,36**	**46,90**	**2,69**	**35,07**	**5,58**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	77	61	25	76	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**7,92**	**6,20**	**2,40**	**9,00**	**0,42**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

12) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Secara umum, jika melihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu antara tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, yaitu 84,00% pada tahun 2020 menurun menjadi 67,35% pada tahun 2024. Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru untuk memenuhi kualifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 2.53.
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	84,02	84,24	68,77	65,10	67,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

13) Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta didik non formal mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024, dari 2.754 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 1.666 orang di tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1.037 orang. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 513 orang. Penurunan terbanyak terjadi pada pendidikan Paket C yaitu dari 1.843 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 286 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

Tabel 2.54.
Pendidikan Non Formal
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Paket A	Orang	307	101	59	123	44
Paket B	Orang	604	420	256	200	183
Paket C	Orang	1.843	1.145	540	711	286
Jumlah	Orang	**2.754**	**1.666**	**855**	**1.037**	**513**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

14) Anak Tidak Sekolah (ATS)

Pada tahun 2024 jumlah anak tindak sekolah usia 7 tahun sampai 12 tahun sebanyak 736 orang. Sementara jumlah anak tidak sekolah usia 13 tahun sampai 15 tahun sebanyak 800 orang. Sedangkan anak tidak sekolah usia 16 tahun sampai 18 tahun sebanyak 1.861 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Anak Tidak Sekolah
Kabupaten Luwu Tahun 2024

Tahun	Satuan	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
2024	Orang	736	800	1861

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2.2. Urusan Kesehatan

1) Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan yaitu sebanyak 22 puskemas sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan. Sedangkan untuk cakupan Puskesmas Pembantu pada tahun 2024 baru mencapai 56,39 persen dari seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Luwu.

Tabel 2.56.
Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	Unit	22	22	22	22	22
Jumlah seluruh kecamatan	Kecamatan	22	22	22	22	22
Cakupan Puskesmas	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	112	120	122	122	128
Jumlah desa / kelurahan	desa / kelurahan	227	227	227	227	227
Cakupan Puskesmas Pembantu	**%**	**49,34**	**52,86**	**53,74**	**54,63**	**56,39**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Luwu sejak tahun 2020-2024 cenderung menurun yaitu dari 0,9923 menjadi 0,9886 yang artinya dalam 1000 kelahiran terdapat 984 bayi yang bertahan hidup. Capaian tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sehingga diharapkan setiap bayi yang lahir dapat hidup dengan sehat.

Tabel 2.57.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu	Orang	48	53	80	83	55
Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka (per 1000 KH)	7,70	8,26	13,21	15,34	11,40
AKHB (1-AKB)	Angka	**0,9923**	**0,9917**	**0,9868**	**0,9844**	**0,9886**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dari sajian data pada tabel di bawah menggambarkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 mencapai 70,34 tahun dan meningkat menjadi 71,23 tahun pada tahun 2024.

Tabel 2.58.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,34	70,44	70,75	71,00	71,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan data pada tabel di bawah, kasus kematian balita di Kabupaten Luwu selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup sebesar 9,33 dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,29. Hal ini berarti dalam 1000 kelahiran terdapat 2 balita yang meninggal.

Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare dan pneumonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku

hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit.

Tabel 2.59.
Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian balita pada 1 tahun tertentu	Orang	58	62	85	88	11
Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
AKBa	**Angka (per 1000 KH)**	**9,33**	**9,66**	**14,04**	**16,27**	**2,29**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

5) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian neonatal rata-rata disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR) dan Asfiksa (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O2) ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh). Kondisi ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

Kematian neonatal di Kabupaten Luwu periode tahun 2020 s/d 2024 masih fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian neonatal sebesar 4 bayi per 1000 kelahiran hidup dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 10 bayi per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.60.
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian neonatal pada 1 tahun tertentu	Orang	31	42	64	85	50
Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
AKN	**Angka (per 1000 KH)**	**4,97**	**6,55**	**10,57**	**15,71**	**10,39**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

AKI menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu.

Angka kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah 160,46 yang berarti dari setiap bayi yang lahir hidup terdapat 166 kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Angka ini meningkat menjadi 166,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Tabel 2.61.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Orang	10	15	11	7	8
Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	Orang	6232	6417	6054	5410	4811

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKI	**Angka (per 100.000 KH)**	**160,46**	**233,75**	**181,70**	**129,39**	**166,29**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun, 2025.

7) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 427 unit, meningkat menjadi 436 unit pada tahun 2024. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2020 sebanyak 29.814 jiwa. Kemudian menurun menjadi 28.851 jiwa pada tahun 2024. Rasio Posyandu per satuan balita pada tahun 2020 adalah 14,32 dan meningkat menjadi 15,11 pada tahun 2024. Dengan demikian, pelayanan kesehatan terhadap balita telah masuk kategori yang ideal.

Tabel 2.62.
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu	Unit	427	430	430	432	436
Jumlah Balita	Orang	29814	29831	30340	33029	28851
Rasio per satuan balita	Rasio	**14,32**	**14,41**	**14,17**	**13,08**	**15,11**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

8) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Meski demikian, rasio puskemas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk justru menurun. Pada tahun 2020 jumlah sarana pelayanan kesehatan adalah 230 unit dan meningkat menjadi 238 unit pada tahun 2024. Jika dibandingkan per satuan penduduk, dapat diukur rasio ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu yaitu sebesar 1:1.619 pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa setiap sarana pelayanan kesehatan melayani penduduk sebanyak 1.620 jiwa.

Tabel 2.63.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Unit	234	237	237	238	238
Jumlah Penduduk	Orang	365.608	367.454	369.820	372.161	385.721
Rasio per satuan penduduk	**Rasio**	**1:1.562**	**1:1.550**	**1:1.560**	**1 :1.564**	**1:1.620**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

9) Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk

Sejak tahun 2020-2024, jumlah rumah sakit di Kabupaten Luwu sebanyak 2 unit. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah 0,00001. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru	Unit	0	0	0	0	0

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah						
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Daerah	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah seluruh Rumah Sakit	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah Penduduk	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Rasio	Angka	**0,000055**	**0,000054**	**0,000054**	**0,000054**	**0,00001**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

10) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter di Kabupaten Luwu terus meningkat pada periode tahun 2020-2024, dari 48 orang pada tahun 2020 menjadi 115 orang pada tahun 2024. Jumlah ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00030 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter	Orang	48	44	57	74	115
Jumlah Penduduk	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Rasio per satuan penduduk	Angka	**0,00013**	**0,00012**	**0,00015**	**0,00020**	**0,00030**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

11) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Secara umum tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) masih kurang jumlahnya, serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan

masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

Tabel 2.66.
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Medis	Orang	417	441	501	594	1810
Jumlah penduduk	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	**0,00114**	**0,00120**	**0,00135**	**0,00160**	**0,00469**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2020-2024 terus bertambah yaitu dari 417 orang menjadi 1810 orang. Jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk meningkat. Jika dibandingan dengan jumlah penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2024 sebesar 0,00469.

12) Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sama halnya dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama akan diperoleh gambaran tentang komplikasi kebidanan yang ditangani. Pada tahun 2020-2023, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 100%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 73,34%.

Tabel 2.67.
Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah komplikasi	Kasus	1224	1398	917	1369	1268

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu						
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1224	1398	917	1369	1729
Cakupan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**73,34**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

13) Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sangat fluktuatif tetapi memiliki tren yang menurun. Cakupan upaya pertolongan oleh tenaga kesehatan dengan komptensi kebidanan paling rendah terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 58,52%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 89,45% pada tahun 2021.

Tabel 2.68.
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6229	6410	6064	5404	4829
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7166	7166	8252	7127	8252

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan	**%**	**86,92**	**89,45**	**73,49**	**75,82**	**58,52**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

14) Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Upaya penyebarluasan program *Universal Child Immunization* (UCI) di Desa/ Kelurahan secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cakupan UCI di desa dan kelurahan yang meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 226 desa/kelurahan yang telah dilakukan UCI. mengalami penurunan menjadi 221 desa/kelurahan pada tahun 2021-2023. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 222 desa/kelurahan atau sudah mencapai 97,80%.

Tabel 2.69.
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	226	221	221	221	222
Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel	227	227	227	227	227
Cakupan	**%**	**99,56**	**97,36**	**97,36**	**97,36**	**97,80**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

15) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Penanganan perawatan terhadap balita gizi buruk dapat dikatakan sangat baik. Dengan melihat data jumlah bayi penderita gizi buruk setiap tahunnya mendapatkan perawatan secara menyeluruh. Adapun penanganan yang paling banyak dilakukan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 187 balita dan pada tahun 2024 sebanyak 55 balita yang tertangani. Penyebabnya tentunya karena beberapa faktor salah satunya yaitu kurangnya asupan makanan bergizi yang diakibatkan rendahnya perekonomian keluarga.

Tabel 2.70.
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	Orang	187	72	50	31	55
Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	187	72	50	31	55
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

16) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,1%, tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga mencapai 0,19% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 0,10%.

Tabel 2.71.
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase balita gizi buruk	%	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,19**	**0,10**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

17) Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Pada periode tahun 2020-2024, jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2020 mencapai 96,59%, kemudian meningkat menjadi 100,00% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72.
Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	Orang	6155	6533	7206	6717	6463
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	Orang	6372	6693	6449	6798	6463
Persentase	**%**	**96,59**	**97,61**	**111,74**	**98,81**	**100,00**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

18) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Penanganan terhadap balita penderita pneumonia setiap tahunnya telah dapat dilakukan 100%, meskipun kasusnya terus ditekan. Pada tahun 2024 tercatat 553 kasus, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 548 kasus. Meskipun telah ditangani 100%, namun perkiraan jumlah balita penderita pneumonia sangat tinggi dibanding yang ditangani pada tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap balita penderita pneumonia masih belum menyeluruh dan oleh karena itu dibutuhkan pengecekan rutin terhadap balita secara berkala dan menyeluruh di setiap wilayah.

Tabel 2.73.
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita Pneumonia balita	Orang	28	20	343	548	553
Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	Orang	28	20	343	548	553
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wailayah	Orang	1376	1376	1361	1412	1364

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
kerja pada kurun waktu yang sama						
Persentase	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

19) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2024 sebesar 68,65%. Lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60,82% pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diberikan perhatian khusus karena mengingat penularannya yang sangat mudah. Seperti halnya penanganan penyakit lainnya maka perlu diadakan tes kesehatan khusus penanganan penyakit TBC BTA secara rutin dan berkala tiap tahunnya.

Tabel 2.74.
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	Orang	258	594	258	416	403
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama	Orang	624	624	670	684	587
Cakupan	**%**	**41,35**	**95,19**	**38,51**	**60,82**	**68,65**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

20) Tingkat Prevalensi Tuborkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk periode tahun 2020-2024 di Kabupaten Luwu cenderung fluktuatif, yaitu dari 126,36 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 meningkat menjadi 219.85 per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa tingkat prevalensi tuborkulosis memiliki tren meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka harus dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan dalam penanganan TBC, juga dengan mengingat ancaman dan penularan penyakit ini.

Tabel 2.75.
Tingkat Prevalensi Tuborkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	462	526	797	762	848
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Prevalensi	**Per 100.000 Penduduk**	**126,36**	**143,15**	**215,51**	**204,75**	**219,85**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

21) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Angka kematian yang merupakan salah satu ancaman besar terhadap penderita penyakit tuborkulosis menjadi salah satu tolok ukur penilaian terhadap kebehasilan penanganan penyakit. Tingkat kematian karena penyakit ini, dapat dilihat pada tabel yang disajikan masih fluktuatif dan cenerung meningkat jumlahnya. Pada tahun 2020 persentase tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk sebesar 7,11%. Kemudian meningkat menjadi 16,59% pada tahun 2024. Oleh karenanya pemerintah harus terus melakukan penanganan khusus untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit ini.

Tabel 2.76.
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	26	47	54	38	64
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Persentase	**Per 100.000 Penduduk**	**7,11**	**12,79**	**14,60**	**10,21**	**16,59**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

22) Kasus Tuberkulosis BTA yang Mendapat Pengobatan melalui Program DOTS

Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi beriringan dengan meningkatnya perkiraan jumlah penderita tuberkulosis paru BTA. Persentasi penanganan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 50,58% meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,06%.

Tabel 2.77.
Kasus Tuberkulosis BTA yang Mendapat Pengobatan melalui Program DOTS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	526	797	762	774	848
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Orang	1040	1118	1140	1140	1145
Persentase	**%**	**50,58**	**71,29**	**66,84**	**67,89**	**74,06**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

23) Kasus Tuborkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Penanganan kasus tuborkulosis sembuh dalam program DOTS terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya, walaupun terjadi sedikit peningkatan pada jumlah penderita penyakit tuborkulosis yang sedang diobati dalam program DOTS pada kurun waktu yang sama. Kasus yang sembuh mencapai 16,13% pada tahun 2024, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,23%.

Tabel 2.78.
Kasus Tuborkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	Orang	119	146	209	290	65

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	247	321	437	366	403
Persentase	**%**	**48,18**	**45,48**	**47,83**	**79,23**	**16,13**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

24) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah sangat baik karena tanggap dalam melakukan perawatan terhadap orang yang ditemukan menderita penyakit DBD, sekalipun dalam jumlahnya yang tidak sedikit terkhusus pada tahun 2023 yang mencapai 43 kasus. Namun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 12 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 Tahun	Orang	6	31	72	43	12
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	6	31	72	43	12
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

25) Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Selama kurun waktu 2020-2024 terjadi fluktuasi persentase prevalensi HIV/AIDS dari tahun ke tahun, dimana tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 0,0118% dengan jumlah penderita 44 jiwa dari 372.161 jumlah penduduk yang ada dalam kurun waktu

yang sama. Menurun pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 0,0093% atau sebanyak 36 pasien dari 385.721 orang penduduk.

Tabel 2.80.
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Orang	32	22	56	44	36
Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Persentase	**%**	**0,0088**	**0,0060**	**0,0151**	**0,0118**	**0,0093**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

26) Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 72,71% pada tahun 2020 menjadi 94,22 % dan pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.81.
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Orang	33.476	34,881	38,596	40753	41483
Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	Orang	46.040	46,260	46,500	47670	44240
Cakupan	**%**	**72,71**	**75,40**	**83,00**	**85,49**	**94,22**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

27) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi tiap tahunnya dalam kurun tahun 2020-2023 sudah cukup optimal dengan melihat persentase cakupan

yang disajikan pada tabel dengan capaian di atas 90%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,36%.

Tabel 2.82.
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6150	6271	6007	5424	4822
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	Orang	6232	6417	6054	5410	7859
Cakupan	**%**	**98,68**	**97,72**	**99,22**	**100,26**	**61,36**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

28) Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan Ibu hamil yang memperoleh pelayanan K4 mengalami penurunan pada 2020-2024, dimana pada tahun 2020 mencapai 5869 kunjungan atau 78,17% dari total ibu hamil, menjadi 4630 kunjungan atau 53,56% pada tahun 2024.

Tabel 2.83.
Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	5.869	6.315	6.106	5.258	4630
Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Orang	7.508	7.508	8.645	7.467	8645
Cakupan	**%**	**78,17**	**84,11**	**70,63**	**70,42**	**53,56**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

29) Pelayanan Nifas

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar mengalami penurunan dari tahun 2020-2024 yaitu

sebesar 86,46% atau sebanyak 6196 orang pada tahun 2024 menjadi 58,68% atau sebanyak 4842 orang pada tahun 2024.

Tabel 2.84.
Pelayanan Nifas
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6196	6294	5959	5361	4842
Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7166	7166	8252	7127	8252
Cakupan	**%**	**86,46**	**87,83**	**72,21**	**75,22**	**58,68**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

30) Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Penanganan neonatus dengan komplikasi pada tahun 2020-2023 sudah sangat baik. Dapat dilihat dalam perkembangan jumlah penanganan dari tahun ke tahun yang mencapai 100%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat drastis dimana capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani hanya 32,91%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kedepannya untuk dapat meningkatkan pelayanan pada neonatus yang mengalami komplikasi karena dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, bahkan kematian.

Tabel 2.85.
Neonatus Dengan Kompliklasi yang Ditangani
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	Orang	495	517	373	383	388
Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	Orang	495	517	373	383	1179
Cakupan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**32,91**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

31) Pelayanan Anak Balita

Cakupan anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali pada tiap tahunnya di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi, dimana cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 74,10%.

Tabel 2.86.
Pelayanan Anak Balita
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	18863	20981	21931	21949	22482
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Orang	29814	29831	30340	33029	30340
Cakupan	**%**	**63,27**	**70,37**	**72,28**	**66,45**	**74,10**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

32) Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Luwu masih berfluktuasi dengan cakupan terbesar terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,50% dari total murid SD dan setingkat atau sebanyak 7645 orang.

Tabel 2.87.
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6120	5356	5411	5787	7645
Jumlah murid SD dan setingkat	Orang	7058	6640	6344	6564	8265

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama						
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	**%**	**86,71**	**80,66**	**85,29**	**88,16**	**92,50**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

33) Desa/Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam

Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidomologi <24 jam menunjukkan capaian yang cukup baik selama periode tahun 2020-2024, yaitu mencapai 100%.

Tabel 2.88.
Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	Orang	0	4	3	1	4
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Orang	0	4	3	1	4
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

34) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Luwu baru dilakukan sejak tahun 2020 dengan capaian IKM terhadap pelayanan kesehatan puskesmas yaitu 76,45% atau termasuk kategori B. Begitu pula IKM terhadap pelayanan kesehatan RSUD juga memperoleh kategori B dengan nilai 78,01%.

Sementara itu, capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai namun masih dalam kategori yang sama yaitu kategori B. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.89.
IKM Terhadap Pelayanan Kesehatan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayanan Kesehatan Puskesmas	%	76,45	77,33 (B)	78,01 (B)	84,82 (B)	89,94 (B)
IKM Pelayanan Kesehatan RSUD	%	78,01	77,42 (B)	78,12 (B)	80,15 (B)	n.a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Rasio Jaringan Irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Tabel 2.90.
Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	**Irigasi kabupaten dalam kondisi baik**					
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3.700	4.235	4.777	5.377	6161
	Luas irigasi kabupaten (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Persentase (%)	**41,55**	**47,56**	**53,65**	**60,39**	**69,19**
1.4.	**Rasio Jaringan Irigasi**					
	Jaringan primer (km)	N.A	2.618	3.488	4.063	3129
	Jaringan Sekunder (km)	5.786	3.375	1.693	340	1741
	Jaringan Tersier (km)	N.A	343	1.740	1.855	1200

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	**N.A**	**6.336**	**6.921**	**6.258**	**6070**
	Luas lahan budidaya (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8904
1.5	**Rasio Jaringan Irigasi**	**64,98**	**71,16**	**77,73**	**70,28**	**68,17**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

Luas irigasi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami penambahan yaitu seluas 8.904 Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik selama periode yang sama secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 3.700 Ha atau 41,55%, meningkat menjadi 6.161 Ha atau 69,19% pada tahun 2024.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target "*overstock pangan*" dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan sekunder pada tahun 2024 spanjang 1741 km. Sedangkan panjang jaringan tersier pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1200 km. Sementara itu, rasio jaringan irigasi selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, yaitu dari 64,98% pada tahun 2020 menjadi 68,17% di tahun 2024.

2) Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2020, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 80,78%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 81,83 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadu 79,88%.

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah 247.035 jiwa, dan mengalami kenaikan pada

tahun 2024 menjadi 268.711 jiwa. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan, menurun pada tahun 2024 yaitu 69,66%. dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 69,88%.

Tabel 2.91.
Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	**Penduduk berakses Air Minum**					
	Penduduk berakses air minum (orang)	292.457	299.802	302.302	304.539	308.112
	Jumlah penduduk (orang)	362.027	368.314	369.820	372.157	385.721
	Persentase (%)	**80,78**	**81,40**	**81,74**	**81,83**	**79,88**
1.2.	**Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan**					
	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan (RT)	247.035	251.785	252.592	260.070	268.711
	Jumlah penduduk (orang)	362.027	368.314	369.820	372.157	385.721
	Persentase	**68,24**	**68,36**	**68,30**	**69,88**	**69,66**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

3) Jalan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *International Roughness Index*-IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *Road Condition Index*-RCI).

Jalan raya yang melintas di wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah 3.950,51 Km, yang terdiri dari jalan nasional 112,82 Km, jalan provinsi sepanjang 2014,23 Km dan jalan kabupaten 1823,46 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2024, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 439,65 Km atau 24,11% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak sedang adalah 119,58 Km atau 6,56%, rusak ringan sepanjang 23,56 Km atau 1,29%, dan kondisi rusak berat sepanjang 1.240,61 km atau 68,04%. Namun proporsi jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan dari 31,01% pada tahun 2020 menjadi 30,67% pada tahun 2024. Sementara itu, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu dari 0,00561 poin pada tahun 2020 menjadi 0,00476 poin pada tahun 2024.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih besar 40 Km/jam) pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sepanjang 439,65 Km dari sebelumnya 478,29 Km. Namun persentasenya mengalami peningkatan yaitu dari 23,34% menjadi 24,11% yang disebabkan berkurangnya panjang jalan kabupaten. Adapun persentase panjang jalan yang memiliki drainase minimal 1,5 m selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 0,5721 atau sepanjang 10.432 km.

Tabel 2.92.
Kondisi Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Panjang Jalan di Kabupaten Luwu**					
	Jalan Kabupaten (Km)	2.049,05	2.049,05	2.049,05	2.049,05	1823,46
	Jalan Provinsi (Km)	83,90	83,90	83,90	77,87	2014,23
	Jalan Nasional (Km)	115,5	111,5	111,5	112,82	112,82
	Total Panjang Jalan (Km)	**2.248,5**	**2.244,45**	**2.244,45**	**2.239,74**	**3.950,51**
2.	**Jalan Kabupaten Menurut Kondisi**					
	Kondisi Baik (Km)	332,65	364,06	443,9	478,29	439,65
	Kondisi Sedang (Km)	302,89	343,97	546,31	140,1	119,585
	Kondisi Rusak Ringan (Km)	1.255,93	1.023,41	884,37	1153,55	23,56
	Kondisi Rusak Berat (Km)	157,98	318,01	174,88	277,51	1240,605
	Rasio panjang jalan kondisi baik	**0,162**	**0,178**	**0,217**	**0,2334**	**0,2411**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Panjang jalan kondisi mantap (km)	635,54	708,03	593,54	618,36	559,235
	Panjang jalan seluruhnya (km)	2.049,45	2.049,45	2.049,46	2.049,46	1823,40
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	**31,01**	**34,55**	**28,96**	**30,17**	**30,67**
3.	**Panjang jalan dengan jumlah penduduk**					
	Jumlah panjang jalan (km)	2.049,45	2.049,45	2.049,46	2.049,45	1823,40
	Jumlah penduduk (jiwa)	365.608	368.314	371.039	372.157	383198
	Rasio	**0,00561**	**0,00566**	**0,00552**	**0,00551**	**0,00476**
4.	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	332,65	364,06	452,48	478,29	439,65
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45	1823,40
	Persentase	**16,23**	**17,76**	**22,08**	**23,34**	**24,11**
5.	**Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)**					
	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km)	3.091	5.415	6,028	9,666	10,432
	Persentase	**0,1508**	**0,2642**	**0,2941**	**0,4716**	**0,5721**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

4) Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat yaitu dari 27,3 Ha pada tahun 2020 menjadi 41,00 Ha pada tahun 2024. Luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari 6,68 Ha menjadi 7,95 Ha dan pada tahun 2024. Jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2024 sebanyak 8.846 unit atau 12,20% dari total bangunan.

Tabel 2.93.
RTH dan Bangunan Ber-IMB Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah**					
	Luas ruang terbuka hijau (ha)	27,93	41,89	46,08	46,50	41,00
	Luas wilayah ber HPL/HGB	6,68	7,12	7,48	7,85	7,95

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio	**34,61**	**5,88**	**6,16**	**5,29**	**5,16**
2.	**Bangunan ber- IMB per satuan bangunan**					
	Jumlah bangunan ber – IMB	98,05	98,10	7.231	8.128	8846
	Jumlah bangunan (unit)	N.A	N.A	87.491	70.183	72512
	Rasio	**N.A**	**N.A**	**0,08**	**0,12**	**0,12**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

5) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terus meningkat dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 98,74%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 75,98%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Tabel 2.94.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga Terlayani	RT	52.969	53.648	60.070	105.382	60402
Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Luwu	RT	73.121	73.491	78.365	105.382	79501
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	**%**	**72,44**	**73,00**	**76,65**	**98,74**	**75,98**

Sumber: Dinas PUTR dan Dinas Perkim Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Persentase Rumah dengan SPALD-T

Persentase rumah dengan SPALD-T di Kabupaten Luwu selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dimana capaian rumah tangga terlayani dengan SPALD-T tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1358 rumah tangga atau 1,70% dari jumlah rumah tangga. Kemudian terus menurun hingga tahun 2024 41319 rumah tangga atau 1,06% dari jumlah rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang bergeser menjadi pengguna SPALD-S. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Persentase Rumah dengan SPALD-T
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	RT	79284	79801	80302	76136	41319
Jumlah Rumah Tangga yang Sudah Dilayani	RT	1258	1358	1200	1148	440
Persentase	**%**	**1,59**	**1,70**	**1,49**	**1,51**	**1,06**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Akses Sanitasi Aman

Penyediaan layanan air limbah domestik (sanitasi aman) adalah salah satu urusan pemerintah wajib sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang sehat. Akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan angka dari tahun 2020-2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,52% Berikut adalah data akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Tabel 2.96.
Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Sanitasi Aman	%	1,49	1,50	4,60	4,60	4,52

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

Namun capaian data diatas masih termasuk kedalam angka capaian yang cukup rendah karena disebabkan oleh tidak tersedianya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan akses sanitasi aman.

2.4.4.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2020 jumlah Rumah Tangga (RT) yang menempati rumah layak huni tercatat 75.789 RT dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebanyak 75.771 RT. Hal ini

terjadi karena pada jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) meningkat dan rumah layak huni menurun jumlahnya.

Sementara itu, rasio rumah layak huni pada tahun 2024 juga menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,196. Terjadinya penurunan rasio rumah layak huni disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah rumah layak huni.

Tabel 2.97.
Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah layak huni	Unit	75.789	74.746	75.386	75.057	75.771
Jumlah penduduk	Orang	365.608	367.454	369.820	380.679	385.721
Rasio	**Angka**	**0,207**	**0,203**	**0,204**	**0,197**	**0,196**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun 2020 ke tahun 2024 tadak mengalami perubahan yang signifikan yaitu masih berada diantara 0,97. Namun, secara keseluruhan capaian tersebut sudah sangat baik karena luas permukiman layak huni yang ada hampir sama dengan luas wilayah permukiman.

Tabel 2.98.
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas pemukiman layak huni	Ha	7.030,64	7.034,95	7.010,73	7.010,73	7.027
Luas wilayah permukiman	Ha	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
Rasio	**Angka**	**0,971**	**0,972**	**0,968**	**0,968**	**0,971**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Persentase Rumah Tangga Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah tangga diklasifikasikan

memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi empat kriteria, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*), memliliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan (*durable housing*). Pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menempati hunian layak di Kabupaten Luwu sebesar 89,13%.

4) Persentase Permukiman yang tertata

Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan secara maksimal dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2024, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 17,80 Ha atau 0,24% dari 7.237 Ha keseluruhan luas permukiman.

Tabel 2.99.
Rasio Permukiman yang Tertata
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas area permukiman tertata	Ha	15,20	16,20	17,40	17,40	17,80
Luas area permukiman keseluruhan	Ha	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
Persentase	**%**	**0,21003**	**0,22385**	**0,24043**	**0,24043**	**0,24596**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

5) Luas Permukiman Kumuh di Perkotaan

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2020-2024 belum terlaksana dengan maksimal. Luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah 209,09 Ha, menurun dari kondisi pada tahun 2023 yaitu seluas 231,27 Ha.

Tabel 2.100.
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luasan permukiman	Ha	8	8	13	14,31	13

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
kumuh kota yang tertangani						
Luas pemukiman kumuh Kota	Ha	206,36	206,36	231,27	231,27	209,09
Persentase	**%**	**3,87**	**3,87**	**5,62**	**5,62**	**6,22**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Rumah Tangga Kumuh di Perkotaan

Jumah tangga kumuh perkotaan selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dari 1.339 unit pada tahun 2020 menjadi 5.098 unit pada tahun 2024. Sehingga proporsinya juga turut mengalami peningkatkan dari 1,60% menjadi 5,99% di tahun 2024.

Tabel 2.101.
Rumah Tangga Kumuh di Perkotaan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	1.339	5.098	5.098	5.098	5.098
Jumlah seluruh rumah	Unit	83.625	85.251	85.251	85.251	85.004
Proporsi	**%**	**1,601**	**5,980**	**5,980**	**5,980**	**5,997**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah sebanyak 9.233 unit atau 10,86%. Jumlah rumah tidak layak huni terbanyak berada di Kecamatan Larompong yaitu sebanyak 991 unit rumah atau 16,87%. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni terendah berada di Kecamatan Walenrang Barat yaitu sebanyak 33 unit rumah atau 1,69%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Per Kecamatan
Kabupaten Luwu Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Persen
1	Larompong	22.927	5873	991	16.874

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Persen
2	Larompong Selatan	18.051	4784	543	11,35
3	Suli	21.695	5316	488	91.798
4	Suli Barat	10.264	2710	428	15.793
5	Belopa	20.133	3608	373	10.338
6	Kamanre	12.022	2970	310	10.438
7	Belopa Utara	19.155	3724	336	90.226
8	Bajo	16.642	3619	428	11.826
9	Bajo Barat	10.224	2399	258	10.754
10	Basse sangtempe	5.644	1212	233	19.224
11	Latimojong	5.974	982	246	25.051
12	Basse sangtempe Utara	7.407	1714	73	4.259
13	Bupon	15.541	3627	471	12.986
14	Ponrang	27.693	5557	827	14.882
15	Ponrang Selatan	25.621	6383	563	88.203
16	Bua	32.930	7905	588	74.383
17	Walenrang	18.363	4366	323	73.981
18	Walenrang Timur	15.738	2508	394	15,71
19	Lamasi	23.086	5410	527	97.412
20	Walenrang Utara	18.780	4652	458	98.452
21	Walenrang Barat	8.192	1953	33	16.897
22	Lamasi Timur	13.738	3732	342	9.164
Kabupaten Luwu		**379.300**	**85.004**	**9.233**	**10,862**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

8) Penanganan Rumah Korban Bencana

Jumlah rumah korban bencana yang tertangani di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebanyak 7 unit dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 18 unit dimana semua rumah korban terdampak bencana telah tertangani dengan persentase penanganan rumah korban bencana sebesar 100% setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.
Penanganan Rumah Korban Bencana
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah korban bencana yang telah tertangani	Unit	7	106	76	9	18

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah rumah korban terdampak bencana	Unit	7	106	76	9	18
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Ketenteraman dalam kehidupan masyarakat terus diupayakan peningkatannya antara lain dengan keberadaan Linmas di setiap desa. Jumlah petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 2.344 orang dengan rasio terhadap jumlah penduduk sebesar 0,006. Jumlah ini masih tergolong sedikit mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Luwu yang cukup besar.

Tabel 2.104.
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	2.344	2.344	1.143	2.330	2.330
Jumlah Penduduk	Orang	365608	367454	369820	380679	385361
Rasio	**Angka**	**0,0064**	**0,0064**	**0,0031**	**0,0061**	**0,0060**

Sumber: Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh petugas dari tahun 2020-2024 telah mencapai 100% dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105.
Penegakan Perda dan Perkada
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada	Kasus	33	1	18	13	21
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	33	1	18	13	21
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

3) Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan

Dalam rangka menjaga kondusifitas lingkungan umum dalam wilayah kabupaten Luwu, perlu dilakukan usahan bersama antara seluruh elemen masyarakat beserta stakeholder terkait agar gangguan Trantribum dapat diwujudkan. Pemerintah kabupaten Luwu melalui dinas Satuan Pamong Praja meraih skor yang sempurna yakni 100 persen selama lima tahun terakhir dalam upaya mencegah dan meredam gangguan Tantrantibum yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Tabel 2.106.
Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan
Di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

4) Pelayanan Bencana Kebakaran

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa pelayanan terhadap bencana kebakaran semakin ditingkatkan. Hal ini terlihat dari keberadaan sarana prasarana yaitu mobil pemadam kebakaran yang semakin meningkat jumlahnya dari 8 unit pada tahun 2020 menjadi 9 unit pada tahun 2024. Sedangkan jumlah personil

berfluktuasi namun cenderung menurun dari 177 orang pada tahun 2020 menjadi 169 orang pada tahun 2024.

Tabel 2.107.
Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	8	9	9	9	9
Jumlah Personil Pemadam Kebakaran	Orang	177	174	159	138	169

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

5) Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, tingkat waktu tanggap kebakaran adalah 15 menit. Dari setiap kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Luwu (51 kasus pada tahun 2024), 12 kasus yang telah ditangani dalam waktu tanggap 15 menit. Namun, jika dilihat selama lima tahun terakhir, persentase tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 70,11% menjadi 23,52% pada tahun 2024.

Tabel 2.108.
Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit (kasus)	Kasus	55	47	40	61	12
Jumlah Kejadian Kebakaran	Kasus	63	52	46	87	51
Tingkat waktu tanggap	**%**	**87,30**	**90,38**	**86,95**	**70,11**	**23,52**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

6) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Penilaian secara berkelanjutan terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Nilai IRB Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dan masih berada pada kelas risiko Tinggi dengan nilai IRB 186,59 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya perubahan iklim, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi risiko bencana di suatu wilayah.

Tabel 2.109.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Skor/ Kelas Risiko	192,23 (Tinggi)	187,71 (Tinggi)	187,91 (Tinggi)	187,91 (Tinggi)	186,59 (Tinggi)

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Tahun 2025.

2.4.4.2.6. Urusan Sosial

1) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS yang menerima bantuan sosial mengalami terus meningkat dari tahun 2020-2024. Dimana pada tahun 2024 mencapai 44.031 orang dengan presentase sebesar 54,44%.

Tabel 2.110.
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang menerima bantuan	Orang	27269	32035	39436	42067	44031
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	47447	89572	84400	86990	80874
Persentase	**%**	**57,47**	**35,76**	**46,73**	**48,36**	**54,44**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari 27442 jiwa meningkat menjadi 44.470 jiwa. Pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 14.788 orang dengan persentase sebesar 54,69%.

Tabel 2.111.
PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial
Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Orang	27442	32044	39579	42300	44470
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial	Orang	47620	89581	84543	87223	81313
Persentase	**%**	**57,63**	**35,77**	**46,82**	**48,50**	**54,69**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Selama lima tahun terakhir, seluruh korban bencana telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dimana

jumlah korban bencana yang menerima bantuan pada tahun 2024 sebanyak 3109 orang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 6707.

Tabel 2.112.
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat	Unit	18	18	18	18	21
Jumlah kejadian bencana	Kasus	19	23	39	32	31
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang)	Orang	929	523	1198	6707	3109
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang)	Orang	929	523	1198	6707	3109
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap selama tahun 2020-2023 telah mencapai 100%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 93,44%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	929	523	1198	6707	2905
Jumlah seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala (orang)	Orang	929	523	1198	6707	3109
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**93,44**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

1) Besarnya Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Semua kasus yang terkait dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja dalam 5 tahun terakhir dapat diselesaikan.

Tabel 2.114.
Besarnya Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besarnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Persentase antara pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan

cenderung meningkat yaitu dari 5,45% pada tahun 2020 menjadi 20,89% pada tahun 2024.

Tabel 2.115.
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5,45	11,36	4,71	1,45	20,89

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di tempat kerja, serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif serta mencegah kerugian akibat kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Penerapan K3 pada Perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir telah mencapai 100% sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Besaran Pekerja atau Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan tren yang terus meningkat. Dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 77,94%

meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 56,10%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117.
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	75,79	76,51	71,93	56,10	77,94

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

5) Penanganan Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah seluruhnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.118.
Penanganan Perselisihan Buruh Dan Pengusaha
Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi Dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 87,27% kemudian menurun menjadi 54,93% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119.
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	49,19	41,11	81,68	87,27	54,93

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2023 mencapai 32 orang, kemudian meningkat menjadi 48 orang pada tahun 2024. Capaian ini masih snagat rendah jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif yang ada.

Tabel 2.120.
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	32	80	48	32	48

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan, yaitu dari 700 pekerja di tahun 2023 menjadi 4 pekerja di tahun 2024 dengan persentase 15%.

Tabel 2.121.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	4213	4047	3531	700	4
Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	17183	19191	66120	4636	3437
Persentase	**%**	**24,52**	**21,09**	**5,34**	**15,10**	**0,12**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2) Kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yaitu dari 2 kursi pada tahun 2020 menjadi hanya 1 kursi atau sebesar 2,86% pada tahun 2024. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat pembangunan nasional di bidang politik menargetkan keterlibatan perempuan sebesar 30%.

Tabel 2.122.
Kursi yang diduduki perempuan di DPRD
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan	Kursi	2	2	2	1	1
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Kursi	35	35	35	35	35
Proporsi	**%**	**5,71**	**5,71**	**5,71**	**2,86**	**2,86**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pekerja perempuan dilembaga swasta mengalami penurunan dari 12.970 orang pada tahun 2020 menjadi 290 orang pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	12970	15144	18031	290	n.a
Jumlah pekerja perempuan	Orang	17183	19191	66120	4636	n.a
Persentase	**%**	**75**	**78**	**27**	**6,30**	**n.a**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

4) Rasio KDRT

Rasio KDRT di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 8 kasus. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100% . Sementara Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 26 kasus. Meski demikian, semua kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat diselesaikan 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124.
Rasio KDRT
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio KDRT	Angka	0	0	2	8	1
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	0	0	0	75	100
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kasus	53	25	42	53	26

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Kasus	53	25	42	53	26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

5) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu selama lima tahun terakhir berflukuasi namun, memiliki trend menurun dari 53 kasus pada tahun 2023 menjadi 26 kasus pada tahun 2024. Akan tetapi, semua laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sudah dapat ditangani secara maksimal.

Tabel 2.125.
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (kasus)	Kasus	50	25	42	53	26
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (kasus)	Kasus	50	25	42	53	26
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

6) Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 42 kasus dan menurun di tahun 2024 menjadi 17 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126.
Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	7	5	42	40	17
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Kasus	7	5	42	53	17
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**75**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

7) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebanyak 26 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 40 orang.

Tabel 2.127.
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum (orang)	Orang	7	5	42	40	26
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum (orang)	Orang	7	5	42	53	26
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**75**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2.4.4.2.3. Urusan Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dalam perspektif pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dan multi-dimensi. Bukan hanya sebagai penopang kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi, stabilitas sosial, dan kemandirian wilayah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif namun dengan rata-rata 770 kg menandakan bahwa ketersediaan pangan utama diwilayah Kabupaten Luwu masing cukup stabil.

Tabel 2.128.
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	Kg	270.009.786	310.772.658	304.810.477	292.300.001	287.433.960
Jumlah penduduk (orang)	Orang	364.680	367.454	369.820	372.161	383.198
Kontribusi	**Kg**	740,65	845,75	824,21	785,41	750,09

Sumber : BPS, Dinas Ketahanan Luwu Tahun 2025.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi dan protein per kapita merupakan indikator fundamental dalam pembangunan suatu wilayah. Keduanya tidak hanya mencerminkan kondisi ketahanan pangan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Melalui berbagai upaya optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam beberapa tahun terakhir ketersediaan protein daen energi sudah cukup baik.

Tabel 2.129.
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	Gram/ Kapita/Hari	78	180	181	203	214,7
Ketersediaan energi (ka/kapita/hari)	Ka/ Kapita/Hari	2.498	6.132	6.103	7.590	7.399

Sumber : BPS, Dinas Ketahanan Luwu Tahun 2025.

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di tingkat daerah adalah aspek krusial dalam menjamin kesehatan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting, yang diamanatkan oleh undang-undang, untuk memastikan pangan yang dikonsumsi warganya aman, bermutu, dan bergizi. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sudah cukup dimana daerah rawan pangan menurun hingga 40 daerah saja pada tahun 2024.

Tabel 2.130.
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pencapaian skor pola pangan harapan (skor)	Skor	90,4*	78,8**	78,0**	81,2*	86,27
Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)	%	33,3	66,67	66,7	66,7	66,7
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		11,59	20,84	9,25	0	26,81

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	Daerah	100	95	52,69	100	NA

Sumber : BPS, Dinas Ketahanan Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2.4. Urusan Pertanahan

1) Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikasi aset tanah milik Pemda merupakan hal yang sangat krusial. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif yang mana hal ini dipengaruhi oleh pendataan dan yang belum berjalan secara optimal.

Tabel 2.131.
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (Ha)	Ha	144,4	356.888	148.015	201,500	78.765
Jumlah Luas Wilayah (Ha)	Ha	300025	300025	300025	300025	300025
Persentase	%	0,05	118,95	49,33	0,07	26,25

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2025

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara di pemerintah daerah adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, hingga instansi pemerintah. Tanah negara, yang dikelola oleh pemerintah, sering kali menjadi sumber sengketa karena ketidakjelasan status, tumpang tindih kepemilikan, atau pemanfaatan yang tidak sesuai. Hal ini dipengaruhi oleh faktor utama diantaranya sertifikasi yang belum tuntas dan sengketa yang belum terselesaikan. Adapun dalam lima (5) tahun terakhir penyelesaian kasus tanah negara diwilayah Kabupaten Luwu belum dapat diselesaikan seluruhnya dengan capaian 66,6% pada tahun 2024.

Tabel 2.132.
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus yang diselesaikan	Kasus	3	2	7	7	2
Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	6	10	13	3
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	75	33,33	70	53,85	66,67

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.8. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup pemerintah daerah memiliki urgensi yang sangat tinggi karena secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana. Tanpa tata kelola lingkungan yang efektif, daerah akan menghadapi masalah serius seperti pencemaran air dan udara yang berdampak pada kesehatan publik, kerusakan ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor akibat degradasi lahan. Oleh karena itu, kinerja yang solid di bidang ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi vital untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, menjamin kesejahteraan generasi sekarang, dan melindungi warisan alam untuk masa depan. Adapun capaian kinerja urusan lingkungan hidup dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir secara umum perlu ditingkatkan, terutama pada layanan persampahan.

Tabel 2.133.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Air (nilai indeks)	50	50	50	67	70
5.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup					

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-
6.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten					
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Na	Na	5	2	4
	Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Na	Na	5	2	4
	Persentase	Na	Na	**100**	**100**	**100**
7.	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani (%)	23,02	23,08	22,56	22,60	22.6
8.	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah	30.77	30.77	30.77	30.77	30,59
9.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani dan Terkurangi	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
10.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11.	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	6,42	7,53	7,60	7,65	7.6
12.	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27
13.	Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan	0	0	0	0	0
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0	46.69	71.89	48.15	48.48

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2025.

1) Ketersediaan dan Pengitegrasian RPPLH

Urgensi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sangatlah tinggi karena dokumen ini menjadi landasan strategis dan operasional bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. RPPLH tidak hanya berfungsi sebagai rencana pembangunan biasa, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang mengikat dan memandu seluruh sektor untuk bertindak secara selaras demi melindungi lingkungan. Nyatanya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir RPPLH Kabupaten Luwu belum dapat disediakan yang mana hal ini dipengaruhi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran.

2) Layanan dan Pengelolaan Persampahan

Layanan dan pengelolaan persampahan daerah sangatlah krusial dan memiliki dampak yang luas, mencakup aspek kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas ekonomi wilayah. Tanpa sistem yang terkelola dengan baik, sampah akan menjadi masalah kompleks yang menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas hidup. Dalam kurun 5 (lima) tahun sampah perkotaan yang tertangani hanya sebesar 0,20% dengan rata-rata timbulan sampah yang tertangani sebesar 22,6% dengan cakupan area pelayanan hanya sekitar 27,27% wilayah yang harusnya ditangani.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Urgensi kualitas lingkungan hidup sangatlah mendesak karena secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup manusia, keberlanjutan ekosistem, dan stabilitas ekonomi global. Lingkungan yang sehat adalah fondasi bagi kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan peradaban. Tanpa kualitas lingkungan yang terjaga, segala bentuk kemajuan akan terancam. Dengan capaian 48,48 mengindikasikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu masih dibawah rentang “baik”.

2.4.4.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Penduduk Ber-KTP

Urgensi penduduk ber-KTP bagi pemerintah daerah sangatlah tinggi karena KTP bukan hanya sekadar identitas diri, melainkan fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang efektif, penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, dan pelayanan publik yang adil. Tanpa data kependudukan yang akurat, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir penduduk Ber KTP diwilayah Kabupaten Luwu telah mencapai 98,79% yang mana capaian sudah mengindikasikan capaian yang baik pun demikian halnya dengan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK).

Tabel 2.134.
Penduduk Ber-KTP dan Ber KK Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Penduduk Ber-KTP**						
	Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	Jiwa	243.233	250.704	248.083	261.376	269.996
	Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah	Jiwa	256.823	258.278	268.779	268.071	273.302
	Rasio		**94,71**	**97,07**	**92,30**	**97,50**	**98,79**
2	**Penduduk Ber-KK**						
	Jumlah penduduk ber-KK	Jiwa	67.702	51.205	115.759	120.542	125.078
	Jumlah penduduk yang telah menikah	Jiwa	151.506	151.368	116.396	120.599	163.539
	Rasio		**44,69**	**33,83**	**99,45**	**99,95**	**76,48**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2025.

2) Pasangan Ber-Akte Nikah dan Bayi Ber-Akte Kelahiran

Data ini menjadi kunci untuk memahami struktur sosial dan demografi di suatu wilayah. Tanpa akta nikah, status perkawinan masyarakat tidak tercatat secara resmi, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Disamping itu Bayi Ber-Akte Kelahiran menjadi dokumen ini penting guna memastikan setiap anak terdaftar demi melindungi hak-hak mereka.

Tabel 2.135.
Pasangan Ber-Akte Nikah dan Bay- Ber-Akte Kelahiran
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Pasangan Ber-Akte Nikah**						
	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah	Jiwa	25.315	30.661	66.923	68.520	78573
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jiwa	154.827	155.569	158897	160.800	163539

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio		**16,35**	**19,71**	**42,12**	**42,61**	**48,05**
2	**Bayi Ber-Akte Kelahiran**						
	Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran	Jiwa	6.900	7.947	27.298	33.659	33027
	Jumlah bayi	Jiwa	7.845	8.310	27.748	34.354	33913
	Rasio		**87,95**	**95,63**	**98,38**	**97,98**	**97,39**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2025.

2.4.4.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 57,97% dari 98,07 pada tahun 2020.

Tabel 2.136.
Sarana Prasaran Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	203	204	120	120	120
Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	207	207	207	207	207
Cakupan	**%**	**98,07**	**98,55**	**57,97**	**57,97**	**57,97**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2) Kelompok Binaan LPM

Kelompok binaan LPM di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sudah maksimal dengan capaian sebesar 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137.
Kelompok Binaan LPM
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klp	207	228	207	207	227

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LPM	Klp	207	228	227	227	227
Rata-rata	**Angka**	**100,00**	**100,00**	**91.16**	**91,16**	**100,00**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

3) Kelompok Binaan PKK

Selama lima tahun terakhir jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Luwu mengalami penurunan yakni dari 229 kelompok pada tahun 2020 menjadi 227 kelompok pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 91,16%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138.
Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	229	227	227	227	227
Jumlah PKK	Klp	229	227	249	249	249
Rata-rata jumlah kelompok binaan PK	**Klp**	**100**	**100**	**91.16**	**91.16**	**91.16**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

4) LSM Aktif

Jumlah LSM aktif di perdesaan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 20,34% menjadi 8,06%. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.

Tabel 2.139.
LSM Aktif Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LSM aktif	Lembaga	12	26	26	26	5

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LSM	Lembaga	59	59	59	59	62
Persentase	**%**	**20.34**	**44.07**	**44.07**	**44.07**	**8.06**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

5) PKK Aktif dan Posyandu Aktif

Pada tahun 2024 semua PKK yang ada di Kabupaten Luwu sudah tergolong aktif, begitu pun posyandu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.140.
PKK Aktif dan Posyandu Aktif
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK aktif	Organisasi	249	227	249	249	227
Jumlah PKK	Organisasi	249	227	249	249	227
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Jumlah posyandu aktif	Unit	418	429	400	411	429
Jumlah posyandu	Unit	418	429	430	432	429
Swasembada Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarkat	Program	418	418	150	150	80
Persentase Posyandu Aktif	**%**	**100.00**	**100.00**	**93.02**	**95.14**	**100.00**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

6) Desa Berstatus Desa Tertinggal

Jumlah desa bersatus tertinggal di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, yaitu 66 desa dari 207 desa atau sebesar 31,88 di tahun 2020 menjadi 41 desa atau

sebesar 19,81% pada tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.141.
Desa Berstatus Tertinggal
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	66	52	52	47	41
Jumlah Desa	Desa	207	207	207	207	207
Persentase	**%**	**31.88**	**25.12**	**25.12**	**22.71**	**19.81**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

7) Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu predikat/Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Peraturan Kementerian Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengukur sajauh mana pemerintah melakukan kinerja dalam upaya mengentaskan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Persentase status desa mandiri kabupaten Luwu pada tahun 2024 tercatat 14,49 persen dari 207 desa. Berdasarkan data pencatatan dari dinas DPMD kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang memperoleh status Desa Mandiri seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.142.
Desa Berstatus Mandiri dan Desa Berstatus Swasembada
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	1	2	3	11	30

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa	Desa	207	207	207	207	207
Persentase	**%**	**0.48**	**0.97**	**1.45**	**5.31**	**14.49**

Sumber : Indeks Desa Membangun, Tahun 2025.

Melihat progres perolehan status desa mandiri di kabupaten Luwu di tahun 2024 yakni masih sangat rendah dimana baru terdapat 30 desa mandiri dari 207 desa. Tantangan pemerintah Kabupaten Luwu kedepan adalah perlu meningkatkan upaya pada sektor penunjang untuk meningkatkan jumlah desa dengan status desa mandiri.

2.4.4.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana. Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0,92**	**0,34**	**0,79**	**1,23**	**1,31**
2.	**Total Fretility Rate (TFR)**	**2,86**	**2,86**	**3,11**	**2,41**	**2,33**
3.	**Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk**					
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (OPD)	10	10	10	10	10
	Jumlah semua perangkat daerah	35	35	35	35	35
	Jumlah Kampung KB	59	59	59	167	167

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54
4.	**Akseptor KB**					
	Jumlah Akseptor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Jumlah Pasangan Subur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Rasio	**70.62**	**78.88**	**87.16**	**60.47**	**73.40**
5.	**Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**					
	Jumlah Peserta KB Aktif	33.951	34.3	20.642	29.073	25.261
	Jumlah Pasangan Usia Subur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Angka (%)	**66.71**	**67.96**	**50.26**	**65.29**	**54.80**
6.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**					
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun	1043	447	391	391	165
	Jumlah Pasangan Usia Subur	50893	50473	41074	44527	46100
	Cakupan	**2.05**	**0.89**	**0.95**	**0.88**	**0.36**
7.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.486	6.267	13.786	6.616	6.041
	Jumlah Pasangan Usia Subur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Cakupan (%)	**12.74**	**12.42**	**33.56**	**14.86**	**13.10**
8.	**Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**					
	Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	9.237	9.448	10.949	7.132	8.441
	Jumlah Akseptor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Persentase	**25,70**	**23,73**	**30,58**	**26,48**	**24,94**
9.	**Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**					
	Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Jumlah Akspetor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Persentase	**141,61**	**126,78**	**114,73**	**165,36**	**136,25**
10.	**Anggota Bina Keluarga Balita**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	4.000	3.613	852	627	1.767
	Jmlah Anggota Kelompok BKB	6.32	1.880	1.010	1.655	3.489
	Cakupan (%)	**63,29**	**1,92**	**84,35**	**37,88**	**50,64**
11.	**Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	1.836	1.692	137	313	1.034
	Jmlah Anggota Kelompok BKR	3.864	3.372	1.281	1.930	3.457
	Cakupan (%)	**47,52**	**50,17**	**10,69**	**16,21**	**29,91**
12.	**Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**					

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	1.371	1.145	50	83	156
	Jmlah Anggota Kelompok BKL	3.275	2.812	724	978	2.167
	Cakupan (%)	**41,86**	**40,71**	**6,90**	**8,48**	**7,19**
13.	**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	3
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**13,63**
14.	**Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**					
	Jumlah PIK R/M	34	37	31	31	30
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	**154,55**	**165,18**	**140,9**	**140,9**	**136,36**
15.	**PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	35	41	51	54	90
	Jumlah PKB/PLKB	35	41	51	54	90
	Cakupan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16.	**PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	37	37	37	36	43
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	135	135	135	138	161
	Cakupan (%)	**27,40**	**27,40**	**27,40**	**26,08**	**26,70**
17.	**Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**					
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	227	227	227	227	227
	Jumlah desa/kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18.	**Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	70.965	72.877	65.284	57.988	67.895
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	52.230	40.025	50.981	45.600	47.334
	Cakupan (%)	**135,87**	**182,07**	**128,05**	**127,16**	**143,44**
19.	**Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**					
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	42	42	44	121	195
	Jumlah Faskes dan jejaring	96	96	96	121	195
	Persentase	**43,75**	**43,75**	**45,83**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, antara lain sebagai berikut.

1) Sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,31%. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu.
2) Selama lima tahun terakhir rata-rata jumlah anak yang dilahirkan yang diukur melalui TFR sebesar 2,33 pada tahun 2024 atau rata-rata keluarga memiliki 3 anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan pemerintah adalah dua anak.
3) Dari data yang disajikan mengenai dukungan perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB pada tahun 2024 yaitu sebanyak 10 OPD atau sebesar 17,54%. Sementara itu, jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di tahun yang sama yaitu sebanyak 8 OPD. Adapun kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk sebanyak 3 kebijakan.
4) Jumlah Akseptor KB selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu dari 26.927 pasangan (60,47%) pada tahun 2023 meningkat menjadi 33.836 pasangan pada tahun 2024 (73,40%).
5) Jumlah peserta KB aktif selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 29.073 pasangan (65,29%) menjadi 25.261 pasangan (54,80%).
6) Pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di tahun 2024 berjumlah 165 pasangan atau mencakup 0,36%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 391 pasangan atau dengan cakupan 0,88%.
7) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami fluktuasi dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 33,56%. Sementara capaian pada tahun 2024 sebesar 13,10%.
8) Persentase pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) mengalami fluktuasi setiap tahunnya

dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 30,58%. Sementara capaian pada tahun 2024 menurun menjadi 24,04%

9) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi selama lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 165,36%, sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 136,35%.
10) Jumlah anggota kelompok BKB tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 84,35% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 50,64%.
11) Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 50,17%. Sementara itum capaian pada tahun 2024 menurun menjadi 29,91%.
12) Perkembangan anggota BKL ber-KB juga terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun dimana 2024 mencakup 7,19% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 8,48%.
13) Persentase cakupan PPKS pada tahun 2024 sebesar 13,63% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9,09%.
14) Cakupan remaja dalam PIK Remaja/Mahasiswa di tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 140,90% menjadi 136,36%. Artinya, jumlah remaja dalam PIK R/M sudah lebih banyak dari jumlah kecamatan yang ada.
15) Cakupan jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk selama lima tahun terakhir sudah maksimal yang mencapai angka 100%.
16) PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 26,70%.
17) Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa dalam lima tahun terakhir sudah maksimal yaitu mencapai 100%.
18) Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon Kabupaten melebihi perkiraan

permintaan masyarakat. Pada Tahun 2024 cakupannya sebesar 143,44%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi lebih banyak dibandingkan perkiraan permintaan masyarakat.

19) Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 45,83% pada tahun 2022 meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 dan stagnan di tahun 2024.

2.4.4.2.8. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dengan capaian indikator kinerja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang Angkutan Umum					
	Jumlah penumpang Angkutan Umum	223.325	233.908	244.755	226.623	203.714
	Jumlah penumpang Pesawat udara	20.597	20.705	20.830	30.970	36.725
	Total Jumlah Penumpang	243.922	254.613	265.585	257.593	255.011
2.	Ijin Trayek					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	200	0	0	0	0
	Jumlah penduduk	362.027	364.680	369.820	372.161	383.198
	Rasio	0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.853	1924	1400	0	978
4.	Pelabuhan Laut/Terminal Bis					
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal bis	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	1	1	1
5.	Layanan Angkutan Darat					
	Jumlah angkutan darat	47.585	51.067	55.843	59.472	64.192
	Jumlah penumpang angkutan darat	223.325	233.908	244.755	226.623	218.286
	Persentase	21,31	21,83	22,82	26,24	29,41
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum					
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	1.328	1.260	1.448	2.316	1.338

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah angkutan umum	3.252	3.561	2.848	2.316	2.153
	Persentase	40,84	35,38	50,84	100,0	62,15
7.	Pemasangan Rambu-rambu					
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	450	400	25	125	0
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Persentase	15,00	13,33	0,83	4,17	0,00
8.	Panjang jalan per jumlah kendaraan					
	Panjang Jalan (Km)	2049,45	2049,45	2049,45	2142,45	2142,45
	Jumlah Kendaraan	47.585	51.067	55.843	59.472	64.192
	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
9.	Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum					
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	223.325	233.908	244.755	226.623	203.714
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	409	413	527	415	395
10.	Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal					
	Jumlah Orang	243.922	250.341	265.585	257.593	218.286
	Jumlah Barang (kg)	516	531	588	572	467
11.	Layanan Urusan Perhubungan					
	Angkutan Darat	47.585	51.067	55.843	59.472	64.192
	Traffic Light	3	3	3	4	4
	Warning Light	3	3	3	3	3
12.	Kondisi Sarana dan Prasarana LLAJ					
	Jumlah Sarana LLAJ (Unit)	6	6	6	7	7
	Jumlah Prasarana LLAJ (Unit)	450	850	875	1000	1000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perhubungan periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1) Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan yaitu dari 226.623 orang pada tahun 2023 menjadi 203.714 orang pada tahun 2024. Sementara itu, penumpang pesawat udara pada tahun yang sama mengalami peningkatan yaitu dari 30.970 orang pada tahun 2023 menjadi 36.725 orang pada tahun 2024.
2) Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebanyak 200 namun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak ada ijin trayek yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan.

3) Jumlah uji KIR angkutan umum selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana jumlah tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan jumlah 1.924 kendaraan. Sementara pada tahun 2024 terdapat 978 angkutan umum yang melakukan uji KIR.
4) Jumlah pelabuhan laut dan terminal bus dari tahun 2020-2024 masih tetap yaitu 1 pelabuhan laut dan 1 terminal bis.
5) Persentase layanan angkutan darat dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 29,41%.
6) Persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun 2020-2024 berfluktuasi, di mana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari total angkutan umum. Kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 62,15%. Hal ini berarti masih banyak kendaraan angkutan umum yang belum diuji KIR namun, tetap beroperasi.
7) Persentase pemasangan rambu-rambu masih terbilang minim selama lima tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 15% dari total rambu-rambu yang seharusnya tersedia. Sementara pada tahun 2024 tidak ada pemasangan rambu-rambu.
8) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderun stagna di angka 0,04 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0,03. Hal ini berarti setiap 1 km jalan dilalui oleh 3 kendaraan.
9) Terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu dari 226.623 orang pada tahun 2023 menjadi 203.714 orang pada tahun 2024. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami penurunan yaitu dari 415 ton pada tahun 20203 menjadi 395 ton di tahun 2024.
10) Jumlah orang yang melalui dermaga/bandara/terminal selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 265.585 orang sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 218.286 orang. Sementara itu, jumlah barang yang melalui dermaga/bandara/terminal juga mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu

sebanyak 588 ton kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 467 ton.

11) Jumlah angkutan darat dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari 47.585 menjadi 64.192 , sedangkan jumlah *Traffic light* pada periode yang sama hanya bertambah 1 unit yaitu menjadi 4 unit di tahun 2024. Sementara itu, jumlah *warning light* yang stagnan selama lima tahun terakhir yakni sebanyak 3 unit.

12) Kondisi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, jumlah sarana yaitu dari 6 unit di tahun 2020 menjadi 7 unit di tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah prasarana juga meningkat yaitu dari 450 unit pada tahun 2020 menjadi 1000 unit di tahun 2024.

2.4.4.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	39,84%	55,41%	55,27%	62,56%	67,01%
2.	Jumlah server yang dikelola	10	10	10	11	11
3.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	6	7	8	8	8
4.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	20%	25%	26%	28,57%	28,57%
5.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	50%	60%	65%	67%	69%
6.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Ads	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Persentase Website OPD	28,00%	30,00%	40,00%	43,00%	51,42%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut.

1) Proporsi rumah tangga dengan akses internet dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dari 39,84% menjadi 67,01%.

2) Jumlah server yang dikelola mengalami peningkatan yaitu dari 10 server pada tahun 2022 menjadi 11 server pada tahun 2024.
3) Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terus mengalami peningkatan dari 6 aplikasi pada tahun 2020 menjadi 8 aplikasi pada tahun 2024.
4) Cakupan layanan internet pada OPD yang dikelola selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 20% menjadi 28,57%.
5) Cakupan akses layanan internet di desa meningkat yaitu 50% pada tahun 2020 menjadi 69% pada Tahun 2024.
6) Website Pemerintah Daerah telah tersedia selama lima tahun terakhir.
7) OPD yang memiliki *website* terus meningkat selama lima tahun terakhir yaitu dari 28,00% pada tahun 2020 menjadi 51,42% pada tahun 2024.

2.4.4.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan aktor utama penggerak perekonomian daerah, sehingga harus dibarengi dengan inovasi berbasis penelitian dan teknologi serta pengembangan pasar. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Koperasi Aktif**					
	Jumlah Koperasi	424	450	461	424	430
	Jumlah Koperasi Aktif	192	81	97	175	179
	Persentase	**44,75%**	**18 %**	**21.00%**	**41,27%**	**41,62%**
2.	**Persentase Koperasi Sehat**	**-**	**7,4%**	**6,18%**	**4.00%**	**n.a**
3.	**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**					
	Jumlah UMKM	24,136	25,221	26,121	26,174	26,721
	Jumlah UMKM Aktif	16,761	21,647	22,732	23,685	24,232
	Persentase	**89,68%**	**90,13%**	**90,47%**	**90,49%**	**90,68%**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4.	**Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1) Persentase koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 masih rendah sebesar 41,62% atau sebanyak 179 dari 430 total koperasi.
2) Persentase koperasi sehat di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,00% dari total koperasi aktif.
3) Persentase UMKM aktif terus mengalami perkembangan. Secara umum, UMKM aktif pada Tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 24.232 unit usaha dengan persentase sebesar 90,68%.
4) Jumlah produk asli daerah hasil dari UKM stagnan dalam lima tahun terakhir sebanyak 18 komoditi.

2.4.4.2.11. Urusan Penanaman Modal

Peran swasta melalui investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Investasi harus mampu meningkatkan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Efisien dan efektifitas birokrasi, adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta infrastruktur pendukung yang mencukupi merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan investasi daerah. Urusan penanaman modal menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Presentase indeks kepuasan masyarakat	80,15	82,60	83,33	86,20	87,80
2.	Jumlah investor dalam negeri (PMDN/PMA)	40	49	60	112	44

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Nilai investasi (Milyar Rupiah)	357.000	336.000	1.870.000	2.570.000	1.290.283
4.	Rasio daya serap tenaga kerja pada proyek penanaman modal	35,12	36,88	13,41	48,79	48,05

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang penanaman modal periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perizinan mencapai 87,80 pada tahun 2024 dengan kriteria Baik.
2) Jumlah investor dalam negeri (PMDN) dan investor asing (PMA) di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebanyak 44 investor menurun dari tahun sebelumnya dengan 112 investor.
3) Nilai investasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 1,29 Triliun menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,57 Triliun.
4) Rasio daya serap tenaga kerja pada proyek penanaman modal berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 48,79% dan capaian tahun 2024 sebesar 48,05%.

2.4.4.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu unsur yang penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Oleh karena itu perlu disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Urusan kepemudaan dan olah raga menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	30	30	51	51	51
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	3	3

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Jumlah Kegiatan Olahraga	0	0	0	0	2
4.	Jumlah Organisasi Olahraga	1	1	1	3	3
5.	Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif (%)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Pembinaan Olahraga (cabang olahraga unggulan yang dibina)	2	2	2	2	2
7.	Jumlah cabang olahraga yang memiliki pelatih yang telah sertifikasi	6	6	6	7	8
8.	Jumlah Wasit yang Bersertifikasi	0	0	0	16	16
9.	Jumlah Atlet yang Berprestasi	0	0	0	7	9
10.	Jumlah Klub Olahraga	0	0	0	0	0
11.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	1	1	1	1	30
12.	Cakupan Pembinaan atlet muda	0	0	0	0	0
13.	Jumlah prestasi olahraga	0	0	0	3	3

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut :

1) Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari 30 organisasi pada tahun 2020 menjadi 51 organisasi pada tahun 2024.
2) Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi Pemda sebanyak 3 kegiatan pada tahun 2024.
3) Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan.
4) Jumlah organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Luwu meningkat yaitu dari 1 organisasi pada tahun 2020 menjadi 3 organisasi pada tahun 2024.
5) Persentase organisasi olahraga yang aktif di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mencapai 100%.
6) Pada tahun 2024, terdapat 2 cabang olahraga unggulan yang dibina.
7) Jumlah cabang olahraga yang memiliki pelatih yang telah tersertifikasi pada tahun 2024 sebanyak 8 cabang olahraga.
8) Jumlah wasit yang bersertifikasi pada tahun 2024 sebanyak 16 wasit.
9) Jumlah atlet yang berprestasi pada tahun 2024 sebanyak 9 atlet, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7 atlet.

10) Selama lima tahun terakhir tidak ada klub olahraga yang terbentuk di Kabupaten Luwu.
11) Jumlah gedung/lapangan olahraga pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan yaitu sebanyak 30 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 1 unit.
12) Tidak terdapat pembinaan atlet muda selama lima tahun terakhir.
13) Jumlah prestasi olahraga yang diraih pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 prestasi olahraga.

2.4.4.2.13. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.149.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	2	2	2	2	2
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	8	8	8	8	8
Total benda, situs dan kawasan cagara budaya yang dimiliki daerah	Unit	13	13	13	13	17
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	13	13	13	13	17
Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	60,02	65,05	67,08	67,08	70,01

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kebudayaan periode 2020-2024, antara lain sebagai berikut :

1) Selama lima tahun terakhir penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun dilaksanakan 2 kali.
2) Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 8 unit.
3) Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah pada tahun 2024 sebanyak 13 unit.
4) Tidak ada karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi pada tahun 2024.
5) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu meningkat dari 13 cagar budaya pada tahun 2023 menjadi 17 cagar budaya pada tahun 2024.
6) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi pada tahun 2024 realisasinya sebesar 70,01% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 67,08% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya dukungan anggaran pemeliharaan dari pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga situs cagar budaya.

2.4.4.2.14. Urusan Statistik

Statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan/atau tabel yang isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, ketersediaan data dan informasi yang memadai dapat memberikan dasar dan arahan supaya kebijakan dan program yang dicanangkan dapat tepat sasaran. Urusan statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Buku ”PDRB”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku “kabupaten dalam angka” dan buku PDRB telah tersedia secara berkelanjutan selama periode tahun 2020-2024.

2.4.4.2.15. Urusan Persandian

Urusan persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	PD	57	57	57	57	57
Jumlah Total Perangkat Daerah	PD	57	57	57	57	57
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah selama lima tahun terakhir di Kabupaten Luwu telah mencapai 100%.

2.4.4.2.16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar disekolah tempat perpustakaan tersebut

berada. Urusan perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Pengunjung Perpustakaan**					
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	10.246	10.934	13.112	14.290	15.399
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	10.246	10.934	13.112	14.290	15.399
	Total	**20.492**	**21.868**	**26.224**	**28.580**	**30.798**
	Jumlah Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang)	**854**	**911**	**1.093**	**1.191**	**1.283**
2.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	47.674	48.912	49.746	52.067	52.067
3.	**Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk**					
	Jumlah Perpustakaan	282	282	282	282	282
	Jumlah Penduduk	365.508	365.508	365.508	365.508	365.508
	Rasio	**0,00077**	**0,00077**	**0,00077**	**0,00077**	**0,00077**
4.	**Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang)**					
	Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	7	8
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	3	3	12	13
	Persentase	**100**	**100**	**100**	**58,33**	**61,54**
5.	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelola	113	113	113	113	113
6.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Berprestasi	-	-	-	-	-
7.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	2	2	2	2	2
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,32	65,33	65,34	65,35	78,69

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perpustakaan pada periode tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut.

1) Jumlah pengunjung perpustakaan pemda dan non pemda pada tahun 2024 sebanyak 30.798 orang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 28.580 orang.
2) Jumlah koleksi buku yang tersedia juga meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 52.067 pada tahun 2024.
3) Rasio perpustakaan per satuan penduduk selama lima tahun terakhir tergolong stagnan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,00077.
4) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2024 sebanyak 8 orang atau sebesar 61,54% dari jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang ada di Kabupaten Luwu.
5) Jumlah perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikekola pada tahun 2024 sebanyak 113 perpustakaan.
6) Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak terdapat perpustakaan desa/kelurahan yang berprestasi.
7) Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola stagnan dalam lima tahun terakhir yaitu berjumlah 2 unit.
8) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 78,69 meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 65,35.

2.4.4.2.17. Urusan Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/ nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam

suatu kantor. Urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jumlah Arsip daerah yang dikelola	OPD	4	5	5	7	7
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang	4	5	6	7	8
Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Unit	9	10	11	12	13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kearsipan pada periode tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :

1) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku selama lima tahun terakhir mengalami stagnan dengan capaian yaitu sebesar 80,00%.
2) Jumlah OPD yang mengelola arsip daerah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 7 OPD pada tahun 2024.
3) Jumlah SDM pengelola kearsipan pada tahun 2024 sebanyak 8 orang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7 orang.
4) Jumlah sarana kearsipan daerah selama lima tahun terakhir (2020-2024) meningkat yaitu sebanyak 13 sarana.

2.4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk indikator kinerja kunci terdapat 8 indikator yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas perikanan dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.154.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Produksi Perikanan**					
	Produksi perikanan (ton)	644.286,15	645.919,16	666.829,06	666.787,25	671.054,41
	Target Daerah (Ton)	641.505,99	659.972,12	679.923,92	703.536,37	729.274,81
	Persentase Produksi Perikanan	100,43	97,87	98,07	94,78	92,02
2	Produktivitas Perikanan Tangkap (Kg/Trip)	133,3	141,23	119,93	147,87	150,22
3	Produktivitas Perikanan Budidaya (Kg/m2)	6,66	7,3	7,8	7,86	8,04
4	**Konsumsi Ikan**					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	54,01	54,21	54,84	55,89	56,26
	Target Daerah (Kg)	50,36	54,65	55,96	56,96	57,26
	Persentase Konsumsi Ikan	**107,25**	**99,01**	**98**	**98,12**	**98,25**
5	**Cakupan bina kelompok nelayan**					
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun (kelompok)	25	12	53	10	22
	Jumlah kelompok nelayan	287	299	309	319	319
	Cakupan bina kelompok nelayan	**66,2**	**4,01**	**17,15**	**3,13**	**6,26**
6	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	39,98	41,18	42,25	42,85	45,69
7	Bantuan Alat Tangkap	31	5	37	2	50
8	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**					

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	7.322,84	7.549,24	7.817,01	8.128,86	9.166,83
	Jumlah produksi ikan di daerah (ton)	18.314,50	18.332,30	18.501,81	18.970,50	19.042,15
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	**39,98**	**41,18**	**42,25**	**42,85**	**45,69**

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025.

Untuk mengukur keberhasilan produksi perikanan tahun 2020-2024 terdiri atas produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, maka berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target produksi perikanan 641.505,99 ton dengan capaain 644.286,15 ton telah dicapai sebesar 100,43%, hal ini mengalami penurunan empat tahun berturut-turut sehingga pada tahun 2024 hanya 92,02 persen capaian produksi perikanan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, baik dari sisi sumber daya, teknologi, maupun aspek sosial-ekonomi. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan produksi yang signifikan disebabkan adanya perubahan iklim (kekeringan) dan bencana alam.

Adapun Solusi untuk meningkatkan produksi perikanan yaitu pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, dukungan akses permodalan, fasilitasi izin usaha, dan subsidi BBM), peningkatan keterampilan SDM Perikanan, serta penguatan rantai pasok dan akses pasar khususnya pada industry pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas jaringan pemasaran.

2.4.4.3.2 Urusan Pariwisata

Indikator kinerja kunci urusan pariwisata memiliki 4 indikator dengan menjelaskan capaian tahun 2020-2024 bidang pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.155.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	19.790.000	28.000.000	5.920.000	3.869.000	2.018.963.251
2	Total PAD (Rp)	122.916.342.359	132.456.563.071	163.816.263.664	207.400.000.000	53.659.261.708
3	PAD sektor pariwisata (%)	0,02	0,02	0,004	0,002	3,76
4	Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	4.000	1.800	800	308	55.354
5	Tingkat hunian akomodasi	0,17	0,5	18,3	14,52	0,38

Sumber: Dinas Pariwisata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, hal ini disebabkan karena adanya penentuan objek wisata yang menjadi daya Tarik Masyarakat yaitu banyaknya wahana pada objek wisata di Kecamatan Bua, sama halnya dengan wisata Bahari pada Pantai ponnori dan buntumatabbing. Dinas Pariwisata selaku penyelenggara urusan pariwisata melakukan berbagai strategi yaitu peningkatan promosi pariwisata, pengembangan destinasi wisata serta perbaikan infrastruktur dan layanan wisata.

2.4.4.3.3 Urusan Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan salah satu indikator yang akan menggambarkan capaian kinerja urusan pertanian, dimana kemampuan tanaman untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam kondisi yang diberikan, dengan mempertimbangkan berbagai factor seoerti genetika tanaman, factor lingkungan dan manajemen pertanian. Hal ini dpaat dilihat pada capaian kinerja urusan pertanian tahun 2020-2024 adalah sebaga berikut:

Tabel 2.156.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,61	6,5	6,42	6,3	6,1

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9,3	10	25,09	60	22,32

Sumber: Dinas Pertanian, 2025.

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan produktivitas pertanian. Hal ini disebabkan berbagai factor yakni adanya perubahan iklim yang tidak menentu, pada tahun 2024 Kabupaten Luwu mengalami bencana alam dan terdapat beberapa saran dan prasarana pertanian yang mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Luwu telah berkomitmen untuk memperbaiki sarana dan prasarana pertanian khususnya irigasi sehingga hasil produksi pertanian semakin meningkat. Bukan hanya itu, namun perlu didukung oleh mekanisasi pertanian, penggunaan teknologi dan perluasan akses pasar.

2.4.4.3.4 Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas perdagangan dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.157.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	89,03	92,33	94,1	95,88	97,33
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	82,01	84,22	86,07	91,02	91,73

Sumber: Dinas Perdagangan, 2025.

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, dapat diketahui bahwa alat ukur yang digunakan pada produsen sudah sesuai dengan aturan, dimana dapat melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan pedagang.

2.4.4.3.5 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.158.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Industri	%	-7,21	4,11	4,87	5,02	5,09
2.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	90	90	90	90	90
3.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	1,969	2,050	2,150	2,258	2,373
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	-	-	4	5	7
5.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Kemasan	-	-	20	20	21

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan industry kecul menengah, hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar dapat mengembangkan sektor industry baik dalam sektor rumah tangga atau Perusahaan, hal ini dikembangkan melalui pelatihan keterampilan SDM, Peningkatan kualitas produk melalui standar mutu, kemudahan kredit uaha rakyat, digital marketing agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

2.4.4.3.6 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan capaian indikator tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.159.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal Lahan Transmigrasi yang dikelola	104	43,87	20,5	182,07	184,5
Luas Areal LahanTransmigrasi yang disiapkan	254	254	254	254	254

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luas Lahan yang dikelola	40,94	17,27	8,07	71,68	72,64

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2025.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 pemerintah daerah mengelola lahan untuk Kawasan transmigrasi meningkat dari 104 Ha menjadi 184 Ha. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2024 banyak Pembangunan infrastruktur yang dikelola untuk penggunaan lahan kegiatan produktif. Kegiatan ini dilaksanakan agar mendorong penduduk transmigrant dalam meningkatkan kesejahteraan dan tidak tergantung pada pemerintah daerah.

2.4.4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam mendukung kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, perencanaan kuangan daerah memiliki peran yang sangat penting yakni alokasi anggaran untuk fungsi penunjang. Sinergi dengan prioritas Pembangunan daerah, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, pengawasan dan akuntabilitas serta penyusunan anggaran yang responsisf. Fungsi penunjang urusan pemerintahan mencakup berbagai kegiatan yang mendukung jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien, seperti administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan public, dan pengawasan. Tingkat capaian terkai IKK bidang administrasi pemerintahan yaitu rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2023 57,88% dan terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 54,28%.

Tabel 2.160.
Kinerja Penunjang administrasi pemerintahan Tahun 2023-2024

Indikator	2023	2024
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		
Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	818.469.888.050,00	781.568.532.397
total belanja langsung	1.414.120.264.262,00	1.439.938.558.876
Persentase	57,88%	54,28%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025.

Pada tahun 2024 anggaran pemerintah kabupaten Luwu dialihkan pada belanja hibah untuk pilkada serentak sehingga pada belanja modal mengalami penurunan. Hal ini juga perlu diperhatikan bahwa setiap belanja modal harus melalui pejabat pengadaan yang sudah diatur berdasarkan peraturan presiden no. 16 tahun 2018.

Pada IKK untuk urusan manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengengelola Pendapatan memiliki capaian kinerja tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.161.
Kinerja Penunjang Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,001	0,002	0,002	0,002	0,18
Perbandingan antara belanja operasi terhadap total belanja daerah (%)	0	63.44	64.84	63.7	66.75
Perbandingan antara belanja modal terhadap total belanja daerah (%)	0	17.54	18.08	19.95	17.08
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	8.48	9.43	11.10	12.98	11.37

Sumber: Bapenda dan BKAD, 2025.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio pajak daerah terhadap PDRB masih sangat rendah, hal ini dikarenakan jenis pajak daerah yang terbatas, dunia usaha yang masih didominasi oleh pelaku usaha kecil sehingga potensi penerimaan tidak digali secara optimal, masih adanya keterbatasan SDM dan teknologi dalam pendataan, penagihan serta pengawasan pajak.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang mengalami peningkatan walaupun nilainya masih kecil, sehingga hal ini menjadi perhatian, karena Kabupaten Luwu masih bergantung pada pendapatan transfer, yang menunjukkan kondisi fiskal belum mandiri. Adapun Solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni intensifikasi pajak daerah dan retribusi; Ekstensifikasi basis pajak dengan mendata ulang wajib pajak potensial termasuk sektor informal; mendorong investasi daerah; menggali potensi ekonomi lokal, serta mengembangkan badan usaha milik daerah.

Pada Belanja APBD masih didominasi oleh belanja operasi yang didalamnya terdapat belanja pegawai, dimana tahun 2024 masih

42,36 persen. Hal ini sudah melewati ketentuan terkait belanja pegawai hanya 30 persen. Maka dari itu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah untuk mendorong pendapatan daerah sehingga persentase belanja pegawai dapat disesuaikan dengan peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 146.

Pada indikator kinerja urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah, maka terdapat dua indikator yang di capai tahun 2020-2024 yakni maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.162.
Kinerja Penunjang pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	2,8	3	3	3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2,61	Level 3	Level 3	Level 2,71	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025.

Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dalam rangka memastikan efektivitas SPIP serta menilai Tingkat kematangan penerapannya dilingkungan pemerintah. Penilaian maturitas SPIP merupakan proses penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian dapat diandalkan. Hasil evaluasi atas penilaian SPIP Tahun 2024 berada level 3. Upaya meningkatkan nilai maturitas SPIP, yang telah dilakukan Adalah meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan dan pendampingan dari BPKP khususnya terkait dengan manajemen risiko, memperbaiki sistem dokumentasi agar semua bukti pelaksanaan pengendalian internal terdokumentasi dengan baik, meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan SPIP dan penguatan pengawasan internal, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran strategis dalam emmastikan tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas keuangan negara, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan public. Tahun 2024 pemerintah luwu mendapatkan level 3 pada kapabilitas APIP, Dalam mencapai level

tersebut, upaya yang dilakukan meningkatan SDM dan kompetensi auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis, penguatan sistem pengawasan internal dengan menerapkan standar audit yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penguatan tata kelola dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sedangkan dalam implementasinya kendala yang dihadapi adalah pendokumentasian terkait pengawasan belum sepenuhnya optimal.

Pada indikator kinerja urusan Kepegawaian dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), maka terdapat enam indikator yang di capai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.163.
Kinerja Penunjang Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)	2,7	20,58	11,66	70,77	16,23
2.	**Pendidikan dan Pelatihan Struktural**					
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	18	20	25	57	30
	Jumlah Total Jabatan	1038	1038	693	693	693
	Persentase	1,73	1,92	3,6	8,22	4,62
3.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	38	37	37	37	38
4.	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	201	208	207	201	198
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3043	3348	3935	3812	3709
6.	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**					
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	137	97	99	152	141

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang)	18	199	103	728	140
	Jumlah ASN (orang)	5730	5631	5537	5325	5129
	Persentase	2,71	5,26	3,65	16,53	5,48

Sumber: BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja BKPSDM sudah cukup baik dengan meningkatnya pegawai ASN yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan dengan jam Pelajaran selama 16 Jam. Walaupun pada tahun 2023 selama 70 jam Pelajaran dan menurun pada tahun 2024. Hal ini perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian dengan strategi yang akan dilakukan yakni: pengembangan kompetensi ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan non formal; gerakan Luwu Belajar; Peningkatan layanan kepegawaian berbasis digital; Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara melalui pemberian Reward; Penerapan sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

2.4.5.Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah adalah proses penilaian terhadap sejauh mana target-target pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan telah dicapai oleh suatu daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan/program ke depan. Pada subbab ini akan menguraikan evaluasi capaian penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi capaian standar pelayanan minimal, dan evaluasi capaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

2.4.4.1. Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, terdapat 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 10 (Sepuluh) indikator

kinerja tujuan dan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pada akhir tahun perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah sebesar 85,00% dengan predikat capaian "Tinggi". Adapun capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.164.
Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,25 B	60,8 B	90,41
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	78,8 BB	62,18 B	78,91
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	3	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Predikat	WTP	WTP	100,00
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,88	73,86	102,75
	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	5	Indeks Pendidikan	Indeks	66,35	66,67	100,48
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Indeks	79,09	82,33	104,10
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas		7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,35	78,21	99,82
	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	8	Tingkat Mobilitas	Indeks	0,86	0,95	110,47
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	98	82,0	83,67
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		10	Angka kemiskinan (%)	Persen	11,92	11,7	101,88
	Meningkatkan pendapatan masyarakat	11	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	Juta (Rp)	54,05	59,73	110,51

Tujuan	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat		12	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93	82,23	88,42
	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	13	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Persen	6,22	1,74	27,97
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius		14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,05	73,83	97,08
	Menurunkan angka kriminalitas	15	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Angka	2,34	2,1	111,43
Meningkatkan pembangunan Desa		16	Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal	Jumlah	10	42	23,81
	Meningkatkan Perekonomian Desa	17	Persentase Desa Mandiri	Persen	2,42	5,31	219,42
Meningkatkan perekonomian daerah		18	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,98	4,36	72,91
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	19	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	12,76	3,8	29,78
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah		20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,77	80,2	95,74
	Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	21	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi	Persen	100	100	100,00
Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,91	48,48	66,49
	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	23	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	187,71	187,91	99,89
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama							**85,00**

Dari 23 indikator kinerja utama diatas, indikator yang mencapai target sebanyak 10 indikator, dan yang tidak mencapai target

sebanyak 13 indikator. Dari 13 indikator yang tidak mencapai target, terdapat 3 indikator yang pencapaiannya kategori “Sangat Tinggi” (91%-<100%), 5 indikator yang pencapainnya kategori “Tinggi” (76%-90%), serta ada 5 indikator yang pencapaiannya kategori “Sedang” maupun kategori “Rendah” yakni: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertumbuhan Ekonomi; Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB; Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat tertinggal; serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.4.4.2. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuai kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketetapan sasaran. Penerapan SPM dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Luwu merupakan upaya peningkatan pelayanan publik sebagai usaha pemerintah untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, jenis-jenis SPM yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri dari urusan: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; (6) Sosial. Berikut evaluasi capaian SPM Kabupaten Luwu tahun 2024 :

Tabel 2.165.
Evaluasi Capaian Kinerja SPM Kabupaten Luwu
Tahun 2024

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Interpretasi
1.	PENDIDIKAN						
1.1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang	%	53,56	100	53,56	Tidak Tercapai

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Interpretasi
		berpartisipasi dalam pendidikan PAUD					
		Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	97,6	100	97,6	Tidak Tercapai
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	9,03	100	9,03	Tidak Tercapai
1.2	Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	40,05	100	66,23	Tidak Tercapai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	33,03	100	62,82	Tidak Tercapai
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	67,64	100	75,9	Tidak Tercapai
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	63,18	100	74,2	Tidak Tercapai
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	52,62	100	57,74	Tidak Tercapai
1.3	Pendidikan Menengah Pertama	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	52,08	100	57,35	Tidak Tercapai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa	Angka	51,7	100	49,15	Tidak Tercapai

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Interpretasi
		berdasarkan asesmen nasional					
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	64,04	100	71,31	Tidak Tercapai
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	65,76	100	73,51	Tidak Tercapai
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	54,48	100	57,4	Tidak Tercapai
1.4	Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	61,92	100	61,92	Tidak Tercapai
1.5	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D4	%	65,1	100	65,1	Tidak Tercapai
2.	KESEHATAN						
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	93,92	100	96,82	Tidak Tercapai
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,09	100	99,63	Tidak Tercapai
2.3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	97,84	100	99,29	Tidak Tercapai
2.4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	91,55	100	96,46	Tidak Tercapai
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	90,67	100	96,30	Tidak Tercapai

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Interpretasi
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	95,61	100	99,16	Tidak Tercapai
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	97,42	100	97,97	Tidak Tercapai
2.8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	91,31	100	98,01	Tidak Tercapai
2.9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	97,89	Tidak Tercapai
2.10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96,56	100	99,03	Tidak Tercapai
2.11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	90,41	100	82,10	Tidak Tercapai
2.12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefeciency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefeciency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	92,93	100	75,60	Tidak Tercapai
3	PEKERJAAN UMUM						

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Interpretasi
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81,83	100	80,41	Tidak Tercapai
3.2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestic	%	75,95	100	75,98	Tidak Tercapai
4.	PERUMAHAN RAKYAT						
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	Tercapai
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%	0	100	N.A	Tidak Tercapai
5	TRANTIBUNLINMAS						
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota	%	100	100	89,88	Tidak Tercapai
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	68,08	100	26,68	Tidak Tercapai
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	34,89	100	26,68	Tidak Tercapai
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	%	100	100	26,68	Tidak Tercapai

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Interpretasi
		dan evakuasi korban bencana					
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	70,11	100	100	Tercapai
6	SOSIAL						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100	90,15	Tidak Tercapai
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	Tercapai
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100	100	Tercapai
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	76,25	Tidak Tercapai
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jamninan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	Tercapai

Sumber : OPD Pengampu SPM, 2025.

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten luwu diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan pada RKPD Kabupaten Luwu. Adapun capaian indikator SPM untuk tahun 2024 terdapat 5 indikator yang tercapai dan 36 indikator yang tidak tercapai. Hal ini menjadi perhatian untuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait SPM untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta bencana alam.

2.4.4.3. Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia serta merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target.

Berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, berikut pencapaian SDGs Kabupaten Luwu :

1. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Luwu hanya melaksanakan 15 tujuan yang terbagi dalam 212 indikator, yaitu:
    e. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu: pilar sosial 53,13% (51 dari 96 indikator), pilar ekonomi sebesar 48,21% (27 dari 56 indikator), pilar hukum sebesar 52,38% (11 dari 21), dan pilar lingkungan sebesar 27,03% (10 dari 37).
    f. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 33 (34,38%), pilar ekonomi 15 (26,79%), pilar lingkungan 9 (24,32%) dan pilar hukum dan tata kelola 5 (23,81%).

g. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 11 (11,46%), pilar ekonomi 10 (17,86%), pilar lingkungan 11 (29,73%), dan pilar hukum dan tata kelola adalah 4 (19,05%).
h. Indikator TPB yang yang tidak tersedia datanya di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 1 (1,04%), pilar ekonomi 4 (7,14%), pilar lingkungan 7 (18,92%), pilar hukum dan tata kelola adalah 1 (4,76%).

2. Hasil pemeringkatan isu strategis dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan ditetapkan 11 (sebelas) isu TPB prioritas sebagai berikut:
    - TPB 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
    - TPB 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
    - TPB 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
    - TPB 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
    - TPB 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
    - TPB 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
    - TPB 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
    - TPB 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

- TPB 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- TPB 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- TPB 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

3. OPD yang sudah melaksanakan TPB berdasarkan Kategori pencapaian TPB sebagai berikut :
    e. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 28 OPD dengan total 101 indikator.
    f. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 18 OPD dengan total 62 indikator
    g. OPD yang belum melaksanakan sehingga belum mencapai target sebanyak 14 OPD dengan total 36 indicator.
    h. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 7 OPD dengan total 13 indikator.
4. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
    c. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
        - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 9 indikator strategis
        - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 3 indikator strategis
    d. Perlu upaya tambahan, meliputi :
        - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 8 indikator strategis
        - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 7 indikator strategis
        - Belum/tidak ada data sebanyak 3 indikator strategis prioritas
5. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
    c. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:

- Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 90 isu strategis
- Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 8 indikator strategis

d. Perlu upaya tambahan, meliputi
   - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 43 indikator strategis
   - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target 29 indikator strategis
   - Belum/tidak ada data sebanyak 10 indikator strategis

6. Indikator TPB yang telah mencapai target dengan rekomendasi "diperhatikan" sebanyak 9 indikator dan rekomendasi "dipertahankan" sebanyak 101 indikator.
7. Indikator TPB yang belum mencapai target dengan rekomendasi "ditingkatkan" sebanyak 87 indikator dan rekomendasi "ditambahkan" sebanyak 13 indikator.

Berikut capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Luwu 2024.

Tabel 2.166.

Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDG's)/Tujuan Pembanganan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Luwu Tahun 2024

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Tujuan SDGs 01 :	**MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN**						
Target 1.1 :	**Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari**						
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS	%	1,50	N.A	0,70	N.A
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional**						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,71	10,42	11,70	Belum Tercapai
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	BPS	%	12,71	N.A	11,70	N.A
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan**						
1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	N.A	95,00	90,62	Belum Tercapai
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	56,10	81,28	58,06	Belum Tercapai

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 1.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro**						
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi ren tan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana**						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 orang	879,25	0,54	1855,66	Belum Tercapai
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BPBD	%	37,5	N.A	25,00	N.A
Tujuan SDGs 02 :	**MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MEN INGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**						
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,61	N.A	6,80	N.A
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula**						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	32,10	14,00	23,60	Belum Tercapai
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	1,80	N.A	2,20	N.A
2.2.2.[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	81,20	92,50	86,27	Belum Tercapai
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,49	4,84	9,20	Belum Tercapai
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan**						
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Dinas Pertanian	%	64,41	N.A	55,25	N.A
Tujuan SDGs 03 :	**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**						
Target 3.1 :	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	129,39	45,15	166,29	Belum Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan / BPS	%	75,82	99,10	58,52	Belum Tercapai
Target 3.2 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000**						
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup						
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	16,27	5,57	2,29	Tercapai
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	15,34	0,00	11,40	Belum Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	15,71	5,27	10,39	Belum Tercapai
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya**						
3.3.2*	Insidens Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk	207,97	307,00	222,76	Tercapai
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0,45	0,381	0,38	Tercapai

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0,54	N.A	0,51	Belum Tercapai
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta						
	(a) Filariasis	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	Tercapai
	(b) Kusta	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	Tercapai
Target 3.4 :	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan**						
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	BPJS Kesehatan	Angka	N.A	N.A	N.A	N.A
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan	%	8,8	2,93	8,70	Belum Tercapai
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	13,37	13,32	13,32	Tercapai
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	%	32,7	6,44	32,70	Belum Tercapai
Target 3.7 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional**						
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	2,41	5,82	2,33	Tercapai
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang**						
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
3.8.1.(a)	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan / BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
3.8.2.(a)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	85,38	95,00	88,42	Belum Tercapai
Target 3.c :	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil**						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	63,145	2,78	72,239	Tercapai
Tujuan SDGs 04 :	**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPA TAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**						
Target 4.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif**						
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat						
	(i) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD	Dinas Pendidikan	%	93,73	N.A	99,33	N.A
	(ii) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP	Dinas Pendidikan	%	80,98	N.A	98,11	N.A
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun						
	(i) Angka Anak tidak sekolah usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	0,16	N.A	0,13	N.A
	(ii) Angka Anak tidak sekolah usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	0,57	N.A	0,30	N.A
Target 4.4 :	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 4.5 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan**						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas						
	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat	Dinas Pendidikan	%	98,48	N.A	79,57	N.A
	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	Dinas Pendidikan	%	79,76	N.A	75,70	N.A
Target 4.6 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi**						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek asara penduduk umur ≥15 tahun	BPS : Susenas	%	96,35	98,11	95,07	Belum Tercapai
Tujuan SDGs 05 :	**MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**						
Target 5.5 :	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat**						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah	DINAS P3A	%	2,86	0,17	2,86	Tercapai
Target 5.6 :	**Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DINAS P3A	Ada/Tidak Ada	Ada	N.A	Tidak Ada	N.A
Target 5.b :	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan**						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 06 :	**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUT AN UNTUK SEMUA**						
Target 6.1 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**						
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PUTR	%	N.A	N.A	21,71	N.A
Target 6.2 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan**						
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun						
	(i) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman	PUTR / BPS : Susenas	%	4,60	N.A	4,45	N.A
	(ii) Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	PUTR / BPS : Susenas	%	N.A	100	N.A	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 6.3 :	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global**						
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 6.4 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**						
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	PUTR	Liter/Detik	2	N.A	2	N.A
Tujuan SDGs 07 :	**MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA**						
Target 7.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	99,72	N.A	99,78	N.A
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS	Angka	94,23	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 08 :	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN K ERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**						
Target 8.1 :	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang**						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS, DINAS STATISTIK	%	6,16	11,78	4,13	Belum Tercapai
8.1.1.[a]	PDB per kapita	BPS, DINAS STATISTIK	Juta	57,36	67,09	59,73	Belum Tercapai

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Traget 8.2	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya**						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS : Sakernas	%	61,92	N.A	64,08	N.A
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya**						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	DINAS TENAGA KERJA	Rp	18.752	17.120	19.805	Tercapai
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	3,70	2,78	4,14	Belum Tercapai
8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	9,57	70,45	7,03	Tercapai
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah**						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINAS TENAGA KERJA	%	0,67	9,76	0,29	Tercapai
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal**						
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	19	300	40	Belum Tercapai
8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	BPS : Susenas	Orang	263.054	10.000	55.314	Tercapai
Tujuan SDGs 09 :	**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKEL ANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua**						
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	PUTR	%	98,00	N.A	98,00	N.A
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi						
	1. Angkutan Udara (Pesawat)						
	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Orang	30.970	N.A	36.725	N.A
	Jumlah Barang	Dinas Perhubungan	Ton	181	N.A	201.841	N.A
	2. Angkutan Umum (Mobil)						
	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Orang	226.623	N.A	218.286	N.A
	Jumlah Barang	Dinas Perhubungan	Ton	382	N.A	350	N.A
9.1.2.[a]	Jumlah Bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	Tercapai
9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	0	1	0	Belum Tercapai
Target 9.2 :	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang**						
9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	BPS	%	4,35	N.A	15,33	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 9.5 :	**Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan**						
9.5.1*	Proporsi anggaran riset terhadap PDB	Bappelitbangda	%	0,0045	N.A	0,0011	N.A
Tujua SDGs 10 :	**MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA**						
Target 10.1 :	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional**						
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Angka	0,341	N.A	0,319	N.A
10.1.1 (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,71	10,42	11,70	Belum Tercapai
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	47	50	41	Tercapai
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	11	10	30	Tercapai
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 10.2 :	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya**						
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS : Susenas / DINAS SOSIAL	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 10.3 :	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	DP3A	Kebijakan	0	N.A	0	N.A
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar**						
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	%	56,10	81,28	58,06	Belum Tercapai
Tujuan SDGs 11 :	**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**						
Target 11.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan p elayanan dasar , serta menata kawasan kumuh**						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERKIM / BPS	%	79,50	81,96	71,53	Belum Tercapai
Target 11.3 :	**Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara**						
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	PUTR	Angka	1,68	N.A	1,68	N.A
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansi mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan**						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	3335	69	7151	Belum Tercapai
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto	BPBD	%	14.504.050.000	N.A	259.576.524.000	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 11.6 :	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota**						
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	DLH	%	0,50	N.A	0,50	N.A
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DLH	%	30,77	N.A	30,59	N.A
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	DLH	Angka	91,61	N.A	92,44	N.A
Target 11.b :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030**						
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	**%**	37,5	N.A	25,00	N.A
Tujuan SDGs 12 :	**MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN**						
Target 12.3 :	**Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen**						
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*)	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 12.4 :	**Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.**						
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	DLH	Ton	N.A	N.A	N.A	N.A
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali**						
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka**						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLH	Perusahaan	N.A	Tidak ada	N.A	N.A
Target 12.8 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam**						
12.8.1.[a]	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat	DLH	Unit	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.b :	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*)	Dinas Pariwisata	Destinasi	1	N.A	1	N.A
Tujuan SDGs 13 :	**MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**						
Target 13.1 :	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara**						
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	Orang	3335	69	7151	Belum Tercapai
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	37,5	N.A	25,00	N.A
Target 13.2 :	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional**						
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Bappelitbangda	Ton CO^2 eq	N.A	N.A	N.A	N.A
13.2.2.[a]	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappelitbangda	Ton CO^2 eq	223.729,01	N.A	1.341.279,21	N.A
13.2.2.[b]	Persentase potensi penurunan intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappelitbangda	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 16 :	**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN**						
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	0	N.A	N.A	N.A
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES LUWU	Per 100.000 penduduk	N.A	0	N.A	N.A
Target 16.2 :	**Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak**						
16.2.2*	Angka korban perdagangan orang per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	DP3A/POLRES LUWU	Per 100.000 penduduk	0	N.A	0	N.A
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua**						
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & HAM, BPHN	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.6 :	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**						
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	100	N.A	100	N.A
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	61,81 B	N.A	62,18 B	N.A
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	C	N.A	46,49 C	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Diskominfo	Instansi	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan**						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3A/ SETWAN	%	5,71	5,71	8,57	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	DP3A/ BKPSDM	%	11,43	N.A	11,43	N.A
Target 16.9 :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran**						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS : Susenas	%	97,98	100	97,39	Belum Tercapai
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil / BPS : Susenas	%	98,55	N.A	93,21	N.A
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional**						
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Diskominfo	%	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.b :	**Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan**						

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	DP3A / Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan	0	N.A	1	N.A
Tujuan SDGs 17	**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**						
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya**						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BAPENDA/ BPS	%	7,15	0,55	6,97	Tercapai
17.1.1.[a]	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BAPENDA/ BPS	%	0,23	0,11	0,18	Tercapai
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas t eknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi**						
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo	%	62,56	55,27	67,01	Tercapai
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama**						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	DPMPTSP	Dokumen	0	N.A	0	N.A
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	DPMPTSP	Proyek	0	N.A	0	N.A
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	DPMPTSP	Rp	0	N.A	0	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Interpretasi Capaian
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang**						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	N.A	Tidak Tersedia	N.A

Sumber : OPD Pengampu SDG's, 2025.

2.4.6. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD Tahun 2024

2.4.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2024

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. Mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan

Berikut ini tabel yang menggambarkan konsistensi program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD Tahun 2024.

Tabel 2.167.
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	DINAS PENDIDIKAN	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
2	RSUD BATARA GURU	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1
3	DINAS KESEHATAN	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	12	12	12	11	12	12	11	1	0	0	1
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	3	3	3	2	3	3	2	1	0	0	1
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2
9	DINAS SOSIAL	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	7	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	2
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	1
13	DINAS PERTANAHAN	4	5	5	5	4	5	5	4	1	0	0	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	8	8	7	8	8	6	7	1	0	1	2
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	1
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	4	4	5	4	4	4	5	1	0	1	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	5	6	6	6	5	6	6	5	1	0	0	1
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	1
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	5	5	5	4	5	5	4	1	0	0	1
24	DINAS PERIKANAN	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	1
25	DINAS PARIWISATA	7	9	9	9	7	9	9	7	2	0	0	2
26	DINAS PERTANIAN	8	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	3
27	DINAS PERDAGANGAN	7	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	2
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
29	SEKRETARIAT DPRD	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	6	6	6	4	6	6	4	2	0	0	2
Jumlah		**169**	**161**	**161**	**161**	**152**	**161**	**159**	**152**	**26**	**0**	**2**	**26**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 169 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2024 berjumlah 161 program (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 26 program yang tidak sama.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 161 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD juga berjumlah 161 program (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD sudah konsisten.
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 161 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD juga berjumlah 161 program (jumlah pada kolom 6).
   b. Antara dokumen RKPD dan APBD sudah konsisten.
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 169 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 161 program. Dengan demikian terdapat 26 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut.

Program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.168.
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	14	12	14	12	12	0	2	2
2	RSUD BATARA GURU	3	3	3	3	3	3	0	0	0
3	DINAS KESEHATAN	20	20	20	20	20	20	0	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23	23	21	23	21	21	0	2	2
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18	18	15	18	15	15	0	3	3
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	11	11	11	11	11	0	0	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7	7	7	7	7	7	0	0	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	11	11	11	11	11	0	0	0
9	DINAS SOSIAL	15	15	14	15	14	14	0	1	1
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	13	13	13	13	13	13	0	0	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21	21	21	21	21	21	0	0	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	12	12	13	12	12	12	0	1	1
13	DINAS PERTANAHAN	8	8	8	8	8	8	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	13	14	13	13	13	0	1	1
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	15	14	15	14	14	0	1	1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	9	9	9	9	9	0	0	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12	12	11	12	11	11	0	1	1
18	DINAS PERHUBUNGAN	13	13	13	13	13	13	0	0	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10	10	11	10	10	10	0	1	1
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	12	12	11	12	11	11	0	1	1
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	8	9	8	8	8	0	1	1
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15	15	16	15	15	15	0	1	1
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15	15	15	15	15	15	0	0	0
24	DINAS PERIKANAN	12	12	12	12	12	12	0	0	0
25	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	19	19	20	19	19	19	0	1	1
26	DINAS PERTANIAN	14	14	13	14	13	13	0	1	1

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
27	DINAS PERDAGANGAN	10	10	10	10	10	10	0	0	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	20	20	20	20	20	20	0	0	0
29	SEKRETARIAT DPRD	16	16	16	16	16	16	0	0	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	16	16	16	16	16	16	0	0	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13	13	13	13	13	13	0	0	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8	8	8	8	8	8	0	0	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14	14	14	14	14	14	0	0	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	12	12	12	12	12	12	0	0	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8	8	8	8	8	8	0	0	0
Jumlah		**460**	**460**	**454**	**460**	**448**	**448**	**0**	**18**	**18**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 460 (jumlah pada kolom 3) dan Renja PD juga berjumlah 460 (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD sudah konsisten.
2. RKPD dan APBD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 460 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 454 (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan APBD tedapat 18 kegiatan yang tidak sama (jumlah pada kolom 10).

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2024 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja perangkat daerah dan RKPD terhadap APBD, maka berikut disajikan gambaran mengenai konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.169.
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	109	109	109	109	109	109	0	0	0
2	RSUD BATARA GURU	7	7	7	7	7	7	0	0	0
3	DINAS KESEHATAN	91	91	91	91	91	91	0	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76	76	76	76	76	76	0	0	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	73	73	73	73	73	73	0	0	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	56	56	56	56	56	56	0	0	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	22	22	22	22	22	22	0	0	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33	33	33	33	33	33	0	0	0
9	DINAS SOSIAL	39	39	39	39	39	39	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	33	33	33	33	33	33	0	0	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51	51	51	51	51	51	0	0	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	39	39	39	39	39	39	0	0	0
13	DINAS PERTANAHAN	35	35	35	35	35	35	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35	35	35	35	35	35	0	0	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	41	41	41	41	41	41	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28	28	28	28	28	28	0	0	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33	33	33	33	33	33	0	0	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	34	34	34	34	34	34	0	0	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	36	36	36	36	36	36	0	0	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	34	34	34	34	34	34	0	0	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34	34	35	34	35	35	0	1	1
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	50	50	50	50	50	50	0	0	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	49	49	49	49	49	49	0	0	0
24	DINAS PERIKANAN	30	30	30	30	30	30	0	0	0
25	DINAS PARIWISATA	110	110	110	110	110	110	0	0	0
26	DINAS PERTANIAN	40	40	40	40	40	40	0	0	0
27	DINAS PERDAGANGAN	39	39	39	39	39	39	0	0	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	76	76	76	76	76	76	0	0	0
29	SEKRETARIAT DPRD	65	65	65	65	65	65	0	0	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	69	69	69	69	69	69	0	0	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	78	78	78	78	78	78	0	0	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	48	48	48	48	48	48	0	0	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46	46	46	46	46	46	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
34	INSPEKTORAT DAERAH	43	43	43	43	43	43	0	0	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	50	50	50	50	50	50	0	0	0
Jumlah		**1732**	**1732**	**1733**	**1732**	**1733**	**1733**	**0**	**1**	**1**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1732 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD juga sejumlah 1732 (jumlah pada kolom 4). Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen telah konsisten.
   b. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.
2. RKPD dan APBD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1732 (jumlah pada kolom 3) sedangkan jumlah sub kegiatan APBD adalah sejumlah 1733 (jumlah pada kolom 5). Terdapat selisih jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen yaitu sebanyak 1 sub kegiatan.
   b. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99,94%.
3. Renja-PD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam Renja-PD adalah sejumlah 1732 (jumlah pada kolom 4) dan APBD adalah sejumlah 1733 (jumlah pada kolom 5). Terdapat selisih jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen yaitu sebanyak 1 sub kegiatan.
   b. Persentase konsistensi kegiatan Renja-PD dan APBD adalah sebesar 99,94%.

Sementara itu, capaian kinerja dan anggaran program pada pelaksanaan RKPD tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170.
Capaian Kinerja dan Anggaran Program RKPD Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Capaian Target *Outcome*				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Tercapai	Melampaui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	DINAS PENDIDIKAN	5	69,02	4	1	0
2	RSUD BATARA GURU	3	94,76	1	2	0
3	DINAS KESEHATAN	5	85,86	1	3	1
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	87,95	9	1	1
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	93,14	5	1	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	93,95	0	2	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	90,21	0	2	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	92,33	2	1	0
9	DINAS SOSIAL	6	80,16	5	1	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5	94,79	3	1	1
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	81,62	4	1	2
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	84,24	1	2	2
13	DINAS PERTANAHAN	4	87,22	3	1	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	89,85	6	1	2
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	77,89	3	1	1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	93,68	2	1	2
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	73,54	3	1	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	84,94	2	1	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	84,57	3	2	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	10	87,91	9	1	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	91,85	4	1	2
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	83,73	3	1	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	77,83	3	1	0
24	DINAS PERIKANAN	4	94,7	2	1	1
25	DINAS PARIWISATA	9	93,58	6	1	2
26	DINAS PERTANIAN	6	91,73	3	1	2
27	DINAS PERDAGANGAN	6	92,54	5	1	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	85,52	2	1	0
29	SEKRETARIAT DPRD	2	88,06	1	1	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	4	73,61	0	4	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	32,25	0	2	1
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	64,68	0	1	1

No.	Perangkat Daerah	Capaian Target *Outcome*				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Tercapai	Melampaui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	75,92	2	1	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	3	80,4	0	3	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	99,18	5	1	0
	JUMLAH	**171**	**84,38**	**102**	**48**	**21**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 171 indikator kinerja *outcome* dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2024.
2. Rata-rata capaian kinerja anggaran seluruh program pembangunan daerah tersebut adalah 84,38%.
3. Sejumlah 102 *outcome* belum mencapai target dari yang ditetapkan, sementara 48 *outcome* mencapai target 100%, dan 21 *outcome* melampaui target yang ditetapkan.

B. Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2024

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171.
Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi										
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel										
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Skor Indeks**	**n.a**	**67,25**	**378.020.238**	**60,80**	**95.464.246**	**90,41**	**25,25**
					(B)		**(B)**			
Sasaran 1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		**Nilai SAKIP Kabupaten**	**Skor Indeks**	**51,78**	**78,8**	**50.802.233**	**62,18**	**12.805.519**	**78,91**	**25,21**
				(CC)	**(BB)**		**(B)**			
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100	1.567.240	80,00	1.624.333,59	0,00	103,64
		Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	-	60,00	-	60,00	

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	50	90	829.532	19,12	450.077,42	21,24	54,26
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	108.533	100,00	35.920,74	100,00	33,10
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	-	100,00	-	100,00	-
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	1	1	106.726	-	31.128,61	0,00	29,17
5	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	877.781	100,00	611.718,63	100,00	69,69
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	80	100	930.119	100,00	210.886,85	100,00	22,67

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
7	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Hasil kelitbangan utama	Rekomendasi	0	1	1.275.425	1,00	104.322,35	100,00	8,18
8	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	Angka	0,85	0,85	1.829.221		2.223.650,14	0,00	121,56
		Rasio Pegawai Fungsional	Angka	0,45	0,45	-		-	0,00	-
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Angka	0,15	0,15	-		-	0,00	-
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	%	95	95,04	4.613.997	66,24	200.889,28	69,70	4,35
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	90	90	3.350.133	90,00	1.622.371,68	100,00	48,43
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	82,3	85	-	85,00	-	100,00	-
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	90	90	-	90,00	-	100,00	-
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	90	90	-	100,00	-	111,11	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
11	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100	100	633.652	100,00	193.338,92	100,00	30,51
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100	100	1.545.004	100,00	120.695,03	100,00	7,81
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	22.442.200	100,00	4.810.544,58	100,00	21,44
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	5.621.890	100,00	12.450	100,00	0,22
15	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100	100	2.425.500	100,00	216.239,50	100,00	8,92

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
16	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	2.645.280	100,00	336.952,00	100,00	12,74
Sasaran 1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		**Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI**	**Jenis Opini**	**WTP**	**WTP**	**327.218.005**	**WTP**	**82.658.727**	**100,00**	**25,26**
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	100	100	322.406.565	100	80.730.665,70	100,00	25,04
		Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	95	95	-	98,00	-	103,16	-
		Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	98	98	-	99,00	-	101,02	-
		Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	%	100	100	-	100,00	-	100,00	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	98	98	619.228	99,00	846.262,07	101,02	136,66
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	70,63	90,74	4.192.212	97,40	1.081.799,24	107,34	25,80

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	98,99	98,99	-	79,00	-	79,81	-
		Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	90	90	-	-	-	0,00	-
		Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	80	80	-	96,90	-	121,13	-
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat										
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**69,37**	**71,88**	**302.244.683**	**73,86**	**1.339.647.714**	**102,75**	**443,23**
Sasaran 2.1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat		**Indkes Pendidikan**	**Angka**	**63,19**	**66,35**	**127.093.802**	**66,67**	**5.131.578**	**100,48**	**4,04**
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	35,15	66,28	121.465.698	58,40	2.541.487,42	88,11	2,09
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	98,21	100	-	97,04	-	97,04	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	97,12	97,31	-	40,92	-	42,05	-
2	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulim muatan lokal yang dikembangkan	Kurikulum		1	349.990,00	-	14.261,54	0,00	4,07
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	88,01	98,49	104.975	90	572.081,10	91,34	544,97
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan penyelenggaraan pengendalian perizinan pendidikan	%	100	100	104.000,00	-	-	0,00	-
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	29	40	609.350	-	45.955,59	0,00	7,54
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Angka	68	75	-	-	-	0,00	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	3	3	3.255.134		1.904.065,21	0,00	58,49
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	50	100	254.210	-	22.757,18	0,00	8,95
8	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan kegemaran membaca masyarakat	Angka	0,1	0,1	777.650,00	-	30.969,78	0,00	3,98
9	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Angka	1	1	162.795,00	-	2.850,00	0,00	1,75
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Angka	1	1	-	-	-	0,00	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
10	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang dimusnakhan	Arsip		150	10.000,00	-	-	0,00	-
		Jumlah arsip yang diberikan perlindungan dan penyelamatan	Arsip		3500	-	-	-	0,00	-
Sasaran 2.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		**Indeks Kesehatan**	**Angka**	**77,22**	**79,09**	**175.150.881**	**82,33**	**1.334.516.136**	**104,10**	**761,92**
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	8,33	100	173.780.652	94,86	69.327.217,30	94,86	39,89
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	77,1	77,27	394.482	94,00	1.638.444,09	121,65	415,34
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,00021	0,00021	-	0,00475	-	2261,90	-
		Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Angka	0,01146	0,01146	-	0,00515	-	44,94	-
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100	100	261.891	100,00	181.923,36	100,00	69,47

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	%	100	100	713.856	100,00	207.880,79	100,00	29,12
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan										
Tujuan 3 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Skor Indeks**	**n.a**	**Baik**	**230.829.820**	**78,21**	**125.029.141**	**0,00**	**54,17**
Sasaran 3.1 : Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah		**Tingkat Mobilitas**	**%**	**0,8638**	**0,8660**	**5.054.719**	**0,95**	**6.895.323**	**109,70**	**136,41**
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,37	0,79	4.674.858	0,62	6.864.023,14	78,48	146,83
		V/C Ratio di Jalan kabupaten	Angka	0,8	0,8	-	0,48	-	60,00	-
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	Jaringan lintas	0	1	379.861	-	31.300,00	0,00	8,24
Sasaran 3.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman		**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**Angka**	**97**	**98**	**225.775.101**	**82**	**118.133.818**	**83,67**	**52,32**
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Angka	0,36	0,37	22.155.679	-	15.710.124,64	0,00	70,91

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	40,26	44,54	-	69,19	-	155,34	-
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	47,94	53,74	13.292.291	80,41	612.605,05	149,63	4,61
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	%	22,72	100	750.000	45,00	-	45,00	-
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	%	50,3	50,8	0	0,57	2.541.680,27	1,12	0,00
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	84,52	89,02	4.290.200	75,98	146.714,00	85,35	3,42
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Angka	0,99	0,99	14.589.437	0,00	351.114,65	0,00	2,41

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,1	0,10	2.301.182	0,00	106.216,80	0,00	4,62
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Angka	0,24	0,28	140.829.983	-	90.285.762,99	0,00	64,11
9	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	3,88	9,71	2.707.502	6,19	22.954,20	63,75	0,85
10	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	1.198.479	-	538.940,40	0,00	44,97
11	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	9,91	9,87	5.000.000		499.916,70	0,00	10,00
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	97	97,01	18.635.348		7.317.788,60	0,00	39,27
13	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Cakupan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	25.000	-	-	0,00	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
Misi 4 : Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan										
Tujuan 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		**Angka Kemiskinan**	**%**	**12,78**	**11,92**	**13.918.497**	**11,70**	**276.248.002**	**98,15**	**1984,75**
Sasaran 4.1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat		**PDRB perkapita ADHB**	**Juta Rp**	**43,25**	**54,05**	**13.918.497**	**59,73**	**276.248.002**	**110,51**	**1984,75**
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	0	0,001	350.000	-	-	0,00	0,00
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	0,99	0,99	-	-	-	0,00	-
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	60	60,01	329.505	50,65	679.891,17	84,40	206,34
		Tingkat produktivitivitas tenaga kerja	%	n.a	100	-	64,08	-	64,08	-
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	10	10	291.071	20,97	48.945,10	209,70	16,82

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98	98,00	236.509	16,85	1.110.876,20	17,19	469,70
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan		1	33.670		16.129,70	0,00	47,91
6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala	%	100	100	35.000	-	8.283,79	0,00	23,67
7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala	%		100	75.000	50	-	50,00	-
8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%		60	55.000	1,68	-	2,80	-
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Unit Koperasi	30	34	50.000	11,73	-	34,50	-
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,5	10	170.000	-	10.107,98	0,00	5,95

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
11	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil			3	1.000.000	-	-	0,00	-
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Total produksi perikanan tangkap	ton	17.560	19.193,79	1.426.263		1.982.134,72	0,00	138,97
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	626.653,84	710.081,02	3.624.944		6.208.303,02	0,00	171,27
14	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan	%	100	100	40.000	0,00	-	0,00	-
15	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	90	94	201.309	100	912.958,05	106,38	453,51
		Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan	ton	150,55	159,31	-		-	0,00	-
16	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	5	10	2.727.727	98,58	98.718,90	985,80	3,62
17	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Angka	20	80	33.658	32,14	3.013,29	40,18	8,95

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah lokasi wisata kreatif kabupaten	%	0	2	150.000	0,00	-	0,00	-
19	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata Kabupaten Luwu	Orang	3	3	196.200	276	-	9200,00	-
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	Orang	0	2	-	265	-	13250,00	-
20	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat capaian target pelaksanaan kebijakan perekonomian	%	100	100	2.892.641	-	516.109,95	0,00	17,84
		Tingkat capaian target pelaksanaan administrasi pembangunan	%	100	100	-	-	-	0,00	-
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	-	-	-	0,00	-
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100		-	-	-	0,00	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Tingkat capaian target pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	-	-	-	0,00	-
Misi 5 : Mewujudkan ketahan pangan dan perekonomian daerah										
Tujuan 5 : Meningkatnya produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat		**Indeks Ketahanan Pangan**	**Skor**	**78**	**93**	**23.322.322**	**82,23**	**17.216.700**	**88,42**	**73,82**
Sasaran 5.1 : Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah		**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**%**	**3,98**	**6,22**	**23.322.322**	**1,74**	**17.216.700**	**27,97**	**73,82**
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase keterserdiaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	1.439.271	-	-	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/ Kapita/ Hari	63	68	1.309.947	99,65	359.739,63	146,54	27,46
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan	%	73,18	75,45	25.196	80,18	82.131,15	106,27	325,97

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan setiap bulan	%	100	100	62.923	100,00	-	100,00	-
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	3	3,00	1.582.562	5,53	1.285.906,35	184,33	81,25
		Persentase peningkatan produksi bibit ternak	%	3	3,00	-	-	-	0,00	-
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	%	3	3,00	10.023.684	16,09	12.352.663,90	536,33	123,23
		Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	%	3	3,00	-	0,17	-	5,67	-
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	117.784,00	22,32	4.801,04	22,32	4,08
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha yang dilakukan pengawasan	%		100	20.852,00	-	-	0,00	-
9	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	%	75	82	8.740.103	-	3.131.457,70	0,00	35,83

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	%	100	100	-	100,00	-	100,00	-
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	%	64	80	-	-	-	0,00	-
Misi 6 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius										
Tujuan 6 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius		**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**Skor Indeks**	**n.a**	**76,05**	**6.465.227**	**73,83**	**65.596.962**	**97,08**	**1014,61**
Sasaran 6.1 : Menurunkan angka kriminalitas		**Angka kriminalitas per 10.000 penduduk**	**Angka**	**4**	**2,34**	**6.465.227**	**2,10**	**65.596.962**	**89,74**	**1014,61**
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%	100	100	394.930	70,57	882.008,44	70,57	223,33
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	%	100	100	19.975	77,24	183.100,05	77,24	916,65
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	%	30	30	20.603	-	-	0,00	-
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	20.586	68,61	1.518.220,48	68,61	7375,01

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
5	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kecamatan yang sudah dilakukan penegasan batas	%	4,55	36,36	5.417.884	-	3.519.781,70	0,00	64,97
		Tingkat capaian target penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	100	100	-	-	-	0,00	-
		Tingkat capaian target penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100	100	-	-	-	0,00	-
		Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100	100	-	100,00	-	100,00	-
6	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	48.000	95,00	691.501,50	95,00	1440,63
7	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	100	100	38.600	-	57.388.502,68	0,00	148674,88
8	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100	100	33.468	-	0,00	0,00	0,00

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
9	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100	62.481	50	2.543,80	50,00	4,07
10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	100	100	408.700	-	1.411.303,78	0,00	345,32
Misi 7 : Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa										
Tujuan 7 : Meningkatnya pembangunan desa		**Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal**	**Desa**	**103**	**10**	**6.276.642**	**42**	**4.574.133**	**420,00**	**72,88**
Sasaran 7.1 : Meningkatkan kemandirian desa		**Persentase desa mandiri**	**%**	**0,48**	**2,42**	**6.276.642**	**5,31**	**4.574.133**	**219,42**	**72,88**
1	Program Penataan Desa	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	%	68,94	73	125.000	100		136,99	0,00
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	46,59	96,55	150.158	-	10.966,50	0,00	7,30
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,02	0,04	4.838.398	14,49	3.522.181,65	36225,00	72,80

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Persentase peningkatan status desa maju	%	3,23	5,51	-	39,13	-	710,16	-
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	99	99	1.163.086	-	1.040.984,75	0,00	89,50
Misi 8 : Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif										
Tujuan 8 : Meningkatnya perekonomian daerah		**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**6,26**	**5,98**	**4.880.208**	**4,36**	**1.448.329**	**72,91**	**29,68**
Sasaran 8.1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan		**Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB**	**%**	**10,94**	**12,76**	**4.880.208**	**3,80**	**1.448.329**	**29,78**	**29,68**
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	%		100	377.619		365.745,26	0,00	96,86
		Tingkat penerapan rencana pembangunan industri	%	100	100	-		-	0,00	-
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1	1	-		-	0,00	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dengan RPIP	%		60	-		-	0,00	-
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	15.150,00	-	-	0,00	-
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Kali	100	100	-	-	-	0,00	-
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IKUI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten	Kali	100	100	-	-	-	0,00	-
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%		100	30.000	-	11.422,50	0,00	38,07

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	%	10	10	162.000	96,24	8.646,00	962,40	5,34
5	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	50	300	395.000	12,78	2.744,60	4,26	0,69
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	Angka	87,01	88,75	250.950	99,47	15.307,40	112,08	6,10
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	100	464.200	97,58	304.719,20	97,58	65,64
8	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Sistem		1	73.000	-	-	0,00	0,00
9	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%		100	6.000		-	0,00	0,00
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	%	72,73	100	2.399.792		139.568,78	0,00	5,82

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun	%	< 20	< 20	161.210		539.492,25	0,00	334,65
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	-		-	0,00	-
12	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan ekspor daerah	%	-30,08	1	140.000		-	0,00	-
13	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	80.287		60.683,03	0,00	75,58
14	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan pemasarannya	Produk		7	325.000		-	0,00	-
Misi 9 : Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik										
Tujuan 9 : Meningkatkan kepuasan masyarakat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia		**Indeks Kepuasan Masyarakat atas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia**	**Skor Indeks**	**79,28**	**83,77**	**28.501.423**	**80,20**	**21.467.357**	**95,74**	**75,32**

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
Sasaran 9.1 : Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan		**Cakupan kasus hukum yang difasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**28.501.423**	**100**	**21.467.357**	**100,00**	**75,32**
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	2.940.828	100	5.257.058,98	100,00	178,76
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	-	100,00	-	100,00	-
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	%	100	100	816.063	23,41	5.952,96	23,41	0,73
		Persentase ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	%	100		-	-	-	0,00	-
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	%	100	100	75.503		236,66	0,00	0,31
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	100	635.823	67,40	18.342,77	67,40	2,88

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	424.653	-	247.825,00	0,00	58,36
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	%	100	100	20.247	-	11.902,00	0,00	58,78
7	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	25	25	363.603	54,00	78.643,73	216,00	21,63
8	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	Angka	0,001	0,001	426.029	0,002	42.163,35	200,00	9,90
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	%	77,78	77,78	200.590	-	-	0,00	0,00
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	%	100	100	59.401	-	20.559,23	0,00	34,61
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak	%	n.a	83,33	209.997	-	27.417,14	0,00	13,06
12	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	250.891	50,00	-	50,00	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	95	100	125.000		38.220,50	0,00	30,58
14	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	120.606		12.535,55	0,00	10,39
15	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penyelenggaraan penatagunaan tanah	%	100	100	334.080		119.302,07	0,00	35,71
16	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	94,22	94,65	1.249.307		366.219,19	0,00	29,31
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	25	75	-	54,80	-	73,07	-
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	86,22	93	-	95,75	-	102,96	-
17	Program Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,23	0,32	388.532	0,92	76.482,50	288,97	19,68

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	35	35	507.508	-	199.475,86	0,00	39,30
19	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	%	100	100	45.000	99,00	-	99,00	-
20	Program Pengendalian Penduduk	Total Fretility Rate (TFR)	Angka	2,96	2,96	89.748	2,33	289.327,09	78,72	322,38
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	75	80	4.230.594	66,07	5.259.018,42	82,59	124,31
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,27	14,22	-	9,26	-	65,12	-

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
22	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	100	100	1.220.430	30,00	2.468.000,20	30,00	202,22
23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100	100	13.766.990	85,71	6.928.674,18	85,71	50,33
		Tingkat capaian target atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD	%	100	100	-	85,71	-	85,71	-
Misi 10 : Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana										
Tujuan 10 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**Skor Indeks**	**67,54**	**72,91**	**11.659.201**	**48,48**	**3.284.567**	**66,49**	**28,17**
Sasaran 10.1 : Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana		**Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)**	**Skor Indeks**	**30**	**30**	**11.659.201**	**187,91**	**3.284.567**	**626,37**	**28,17**
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%		100	642.310	5,62	474.175,35	5,62	73,82

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	2.054.937	95,00	367.855,85	95,00	17,90
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100	100	-	90,00	-	90,00	-
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	-	100,00	-	100,00	-
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	3.661.700	100,00	-	100,00	-
		Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran	Menit	15	15	-	15,00	-	100,00	-
4	Program Penanganan Bencana	Pcrsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	413.439	93,12	259.540,16	93,12	62,78

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	310.000	77,71	291.951,02	77,71	94,18
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Angka	26,65	26,65	540.315	68,24	57.900,46	256,06	10,72
7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah B3)	%		100	20.000	-	2.736,04	0,00	13,68
8	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%		37,89	111.500	54,31	9.595,37	143,34	8,61
9	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang telah memperoleh pengakuan	%		100	50.000	-	-	0,00	0,00

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)	
					2024		2024		2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% (K)	% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	
10	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang telah memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%		3	105.000	-	-	0,00	0,00
11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	20.000	7,26	573,80	7,26	2,87
12	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	0	90,19	3.730.000	96,31	1.820.238,52	106,79	48,80
JUMLAH						1.006.118.261		1.949.977.152		193,81

Sumber: OPD Kabupaten Luwu, 2025.

2.4.7. Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Luwu

2.4.6.1. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah Kabupaten Luwu telah menerapkan standar pelayanan minimal guna mengetahui ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar. Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu tahun 2023-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.172.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu
Tahun 2023-2024

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	PENDIDIKAN				
1.1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	53,56	53,56
		Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	97,6	97,6
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	9,03	9,03
1.2	Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	40,05	66,23
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	33,03	62,82
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	67,64	75,9
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	63,18	74,2
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	52,62	57,74
1.3	Pendidikan Menengah Pertama	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	52,08	57,35
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	51,7	49,15
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	64,04	71,31
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	65,76	73,51
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	54,48	57,4

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Capaian 2024
1.4	Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	61,92	61,92
1.5	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D4	%	65,1	65,1
2.	KESEHATAN				
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	93,92	96,82
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,09	99,63
2.3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	97,84	99,29
2.4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	91,55	96,46
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	90,67	96,3
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	95,61	99,16
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	97,42	97,97
2.8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	91,31	98,01
2.9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	97,89
2.10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96,56	99,03
2.11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	90,41	82,1
2.12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefeciency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefeciency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	92,93	75,6
3	PEKERJAAN UMUM				
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81,83	80,41
3.2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestic	%	75,95	75,98
4.	PERUMAHAN RAKYAT				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Capaian 2024
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%	0	N.A
5	TRANTIBUNLINMAS				
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota	%	100	89,88
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	68,08	26,68
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	34,89	26,68
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	26,68
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	70,11	100
6	SOSIAL				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	90,15
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	76,25
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jamninan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM, Kabupaten Luwu 2025.

2.4.6.2. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkenjutan/*Sustainable Develompent Goals*

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan (TPB/SDGs) ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusifdan terlaksananya tatakelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (human development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (social economic development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (environmental development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.173.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tujuan SDGs 01 :	**MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN**							
Target 1.1 :	**Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari**							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS	%	N.A	2,61	1,97	1,50	0,70
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional**							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	BPS	%	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan**							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	N.A	N.A	88,6	N.A	90,62
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	75,79	76,51	71,93	56,10	58,06
Target 1.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro**							
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi ren tan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana**							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 orang	N.A	74,02	73,55	879,25	1855,66

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BPBD	%	N.A	N.A	N.A	37,50	25,00
Tujuan SDGs 02 :	**MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MEN INGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**							
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun**							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Dinas Ketahanan Pangan	%	10,14	7,93	10,79	7,61	6,80
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula**							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	N.A	22,80	25,70	32,10	23,60
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	2,27	1,80	2,20

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.2.2.[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	90,40	78,80	78,00	81,20	86,27
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan	%	22,50	N.A	4,84	5,49	9,20
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan**							
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Dinas Pertanian	%	N.A	N.A	N.A	64,41	55,25
Tujuan SDGs 03 :	**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**							
Target 3.1 :	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup**							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	160,46	233,75	181,70	129,39	166,29
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan / BPS	%	86,92	89,45	73,49	75,82	58,52
Target 3.2 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000**							
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,33	9,66	14,04	16,27	2,29
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,70	8,26	13,21	15,34	11,40
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	4,97	6,55	10,57	15,71	10,39
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya**							
3.3.2*	Insidens Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk	126,36	142,60	214,97	207,97	222,76
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0	0,232	0,435	0,45	0,38
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	N.A	N.A	0,00075	0,54	0,51
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.							
	(a) Filariasis	Dinas Kesehatan	%	19	N.A	N.A	100	100
	(b) Kusta	Dinas Kesehatan	%	19	N.A	N.A	100	100
Target 3.4 :	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan**							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	BPJS Kesehatan	Angka	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan	%	3,05	2,97	2,96	8,8	8,7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	11,15	13,16	13,33	13,37	13,32
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	%	4,12	5,81	6,41	32,7	32,7
Target 3.7 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional**							
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	2,86	2,86	3,11	2,41	2,33
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang**							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3.8.1.(a)	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan / BPS : Susenas	%	12,74	12,41	N.A	N.A	N.A
3.8.2.(a)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	89,27	84,26	88,71	85,38	88,42

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target 3.c :	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil**							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	4,76	5,54	2,78	63,145	72,239
Tujuan SDGs 04 :	**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPA TAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**							
Target 4.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif**							
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat							
	(i) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD	Dinas Pendidikan	%	98,73	93,84	95,58	69,94	99,33
	(ii) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP	Dinas Pendidikan	%	96,78	97,46	97,04	80,98	98,11
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun							
	(i) Angka Anak tidak sekolah usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	N.A	0,13	0,15	0,16	0,13
	(ii) Angka Anak tidak sekolah usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	N.A	0,73	0,25	0,57	0,30
Target 4.4 :	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan**							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	4,08	N.A	N.A
Target 4.5 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan**							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas							
	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat	Dinas Pendidikan	%	93,77	93,94	94,14	98,48	79,57
	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	Dinas Pendidikan	%	98,93	98,68	96,08	79,76	75,70
Target 4.6 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi**							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek asara penduduk umur ≥15 tahun	BPS : Susenas	%	93,91	93,62	96,29	96,35	95,07
Tujuan SDGs 05 :	**MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**							
Target 5.5 :	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat**							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah	DINAS P3A	%	5,71	5,71	5,71	2,86	2,86

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target 5.6 :	**Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut**							
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DINAS P3A	Ada/Tidak Ada	N.A	N.A	N.A	Ada	Tidak Ada
Target 5.b :	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan**							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 06 :	**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUT AN UNTUK SEMUA**							
Target 6.1 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**							
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PUTR	%	N.A	N.A	N.A	N.A	21,71
Target 6.2 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan**							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	(i) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman	PUTR / BPS : Susenas	%	1,49	1,50	4,60	4,60	4,52
	(ii) Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	PUTR / BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 6.3 :	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global**							
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 6.4 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**							
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	PUTR	Liter/Detik	N.A	N.A	N.A	2	2
Tujuan SDGs 07 :	**MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA**							
Target 7.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	97,57	99,02	99,45	99,72	99,78

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS	Angka	87,38	91,63	88,24	94,23	N.A
Tujuan SDGs 08 :	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN K ERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**							
Target 8.1 :	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang**							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS, DINAS STATISTIK	%	1,64	10,44	11,29	6,16	4,13
8.1.1.[a]	PDB per kapita	BPS, DINAS STATISTIK	Juta	43,96	48,55	54,03	57,36	59,73
Traget 8.2	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya**							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS : Sakernas	%	N.A	N.A	N.A	61,92	64,08
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya**							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	DINAS TENAGA KERJA	Rp	15.606	16.025	17.406	18.752	19.805
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	4,94	4,8	3,85	3,70	4,14
8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	13,97	11,82	8,74	9,57	7,03

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah**							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINAS TENAGA KERJA	%	11,16	11,57	9,92	0,67	0,29
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal**							
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	N.A	N.A	N.A	19	40
8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	BPS : Susenas	Orang	N.A	N.A	N.A	263.054	55.314
Tujuan SDGs 09 :	**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKEL ANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**							
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua**							
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	PUTR	%	N.A	N.A	N.A	98,00	98,00
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi							
	1. Angkutan Udara (Pesawat)							
	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Orang	N.A	N.A	N.A	30.970	36.725
	Jumlah Barang	Dinas Perhubungan	Ton	N.A	N.A	N.A	181	201.841
	2. Angkutan Umum (Mobil)							
	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Orang	N.A	N.A	N.A	226.623	218.286

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Jumlah Barang	Dinas Perhubungan	Ton	N.A	N.A	N.A	382	350
9.1.2.[a]	Jumlah Bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1
9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	0	0	0	0	0
Target 9.2 :	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang**							
9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	BPS	%	-6,73	7,66	4,51	4,35	15,33
Target 9.5 :	**Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan**							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset terhadap PDB	Bappelitbangda	%	0,01	0,0042	0,0036	0,0045	0,0011
Tujua SDGs 10 :	**MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA**							
Target 10.1 :	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional**							
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Angka	0,396	0,375	0,364	0,341	0,319
10.1.1 (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	66	52	52	47	41
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	1	2	3	11	30
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	
Target 10.2 :	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya**							
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS : Susenas / DINAS SOSIAL	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 10.3 :	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut**							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	DP3A	Kebijakan	N.A	N.A	0	0	0
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar**							
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	%	75,79	76,51	71,93	56,10	58,06
Tujuan SDGs 11 :	**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target 11.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan p elayanan dasar , serta menata kawasan kumuh**							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERKIM / BPS	%	N.A	87,78	78,98	79,50	71,53
Target 11.3 :	**Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara**							
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	PUTR	Angka	N.A	N.A	N.A	1,68	1,68
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansi mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan**							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	N.A	74,02	73,55	879,25	1855,66
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto	BPBD	%	N.A	N.A	174.445.782.000	14.504.050.000	259.576.524.000
Target 11.6 :	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota**							
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	DLH	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DLH	%	30,77	30,77	30,77	30,77	30,59
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	DLH	Angka	N.A	90,12	91,70	91,61	92,44
Target 11.b :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030**							
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	**%**	N.A	N.A	N.A	37,50	25,00
Tujuan SDGs 12 :	**MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN**							
Target 12.3 :	**Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen**							
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*)	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.4 :	**Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.**							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	DLH	Ton	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali**							
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	1.807,82	2.529,34	1.303.81	N.A	N.A
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka**							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLH	Perusahaan	N.A	N.A	Tidak ada	N.A	N.A
Target 12.8 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam**							
12.8.1.[a]	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH	Unit	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.b :	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal**							
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*)	Dinas Pariwisata	Destinasi	N.A	N.A	N.A	1	1

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tujuan SDGs 13 :	**MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**							
Target 13.1 :	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara**							
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	Orang	217	N.A	272	3335	7151
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	N.A	N.A	N.A	37,50	25,00
Target 13.2 :	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional**							
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Bappelitbangda	Ton CO^2 eq	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
13.2.2.[a]	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappelitbangda	Ton CO^2 eq	218.339,96	218.212,00	219.136,52	223.729,01	1.341.279,21
13.2.2.[b]	Persentase potensi penurunan intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappelitbangda	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 16 :	**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN**							
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun**							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	N.A	N.A	2	0	N.A
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES LUWU	Per 100.000 penduduk	0,81	0	0,58	N.A	N.A
Target 16.2 :	**Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak**							
16.2.2*	Angka korban perdagangan orang per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	DP3A/POLRES LUWU	Per 100.000 penduduk	N.A	N.A	N.A	0	0
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua**							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & HAM, BPHN	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.6 :	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**							
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	N.A	N.A	1,33	61,81 B	62,18 B
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	N.A	N.A	100	C	46,49 C

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Diskominfo	Instansi	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan**							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3A/ SETWAN	%	5,71	5,71	5,71	5,71	11,40
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	DP3A/ BKPSDM	%	N.A	N.A	N.A	8,28	11,43
Target 16.9 :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran**							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS : Susenas	%	85,47	87,61	95,72	97,98	97,39
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil / BPS : Susenas	%	N.A	N.A	8,48	98,55	93,21

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional**							
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Diskominfo	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.b :	**Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan**							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	DP3A / Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan	N.A	N.A	0	0	0
Tujuan SDGs 17	**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**							
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya**							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BAPENDA/ BPS	%	N.A	N.A	26,7	7,15	6,97
17.1.1.[a]	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BAPENDA/ BPS	%	N.A	0,15	0,07	0,23	0,18
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas t eknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi**							
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo	%	N.A	36,54	45,23	62,56	67,01

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama**							
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	DPMPTSP	Dokumen	N.A	N.A	N.A	0	0
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	DPMPTSP	Proyek	N.A	N.A	0	0	0
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	DPMPTSP	Rp	N.A	N.A	N.A	0	0
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang**							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	N.A	N.A	Ada	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber : OPD Pengampu SDG's Kabupaten Luwu, 2025.

2.4.6.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator Pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Penetapan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yakni: Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum. Secara rinci, Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1	Pertumbuhan PDRB	%	7,11	6.03	5,69	5,64	4,36
2	Laju Inflasi	%	3,96	0,65	5,13	2,21	1,87
3	PDRB per Kapita	Juta Rp	38,03	48,55	54,03	57,36	59,73
4	Angka Melek Huruf	%	98,35	93,62	96,29	96,35	95,07
5	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31	8,35	8,48	8,73	8,81
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,39	13,4	13,41	13,43
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,34	70,44	70,75	71	71,23
8	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,19	0,1
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,32	5,06	4,62	1,80	n.a
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	n.a
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,18	64,22	72,94	65,64	68,31
12	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	58,91	66,25	70,13	72,53	65,48
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	40,12	38,11	37,68	n.a	n.a
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,27	9,43	11,33	12,82	11,37
15	Penguatan cadangan pangan		46,94	48,12	48,12	9,25	n.a
16	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	5	4	n.a
17	Ketersediaan pangan utama	%	67,36	68,78	82	78,54	n.a
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,75	53,21	53,8	52,49	51,73

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
19	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,63	10,07	10,27	10,77	11,09
20	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,89	3,94	3,83	3,8	4,1
21	Pertumbuhan Industri	%	6,28	4,10	4,87	5,02	5,09
II	**Aspek Daya Saing Daerah**						
1	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	752,29	771,1	902,65	997,36	1024,29
2	Nilai Tukar Petani	Angka	-	-	-	-	-
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	52,66	53,98	44,51	56,71	45,26
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	87,23	89,41	89,41	93,94	n.a
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan ekonomi	%	0,78	0,79	0,83	0,83	-0,15
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	n.a
7	Rasio ketergantungan	%	61,32	61,33	47,35	46,98	45,51
III	**Aspek Pelayanan Umum**						
A.	**URUSAN WAJIB DASAR**						
1.	**PENDIDIKAN**						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,04	93,66	93,48	40,98	93,53
1.2	Angka partisipasi kasar:						
1.2.1	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	99,425	94,36	94,47	98,48	99,84
1.2.2	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	98,85	80,93	95	79,76	99,46
1.2.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	81,140	83,170	89,71	93,73	79,47
1.3	Angka Partisipasi Murni :						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,23	94,14	93,63	98,48	79,57
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,64	96,56	95,49	79,76	76,53
1.4	Angka partisipasi sekolah :						
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	94,14	94,35	98,48	68,56
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	71,87	96,08	95,06	79,76	75,7
1.5	Angka Putus Sekolah:						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,77	0,83	0,78	0,09	2,56
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,74	1,04	3,42	2,79	2,8
1.6	Angka Kelulusan:						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	95,58	89,71	93,83	2,56
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	97,04	90,51	81,59	2,80
1.7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,67	98,8	98,46	81,9	98,00
1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	98,03	98,16	99,46	n.a
1.9	Fasilitas Pendidikan:						
1.10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	61,77	16,44	14,6	58,27	86,73
1.11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	67,25	67,36	67,25	31,72	42,18
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	763,1	715,44	671,59	08:09	807,36
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,81	98,24	96,21	98,32	98,32
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,23	84,24	72,06	89,96	48,46

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	60,04	91,85	93,48		29,85
2	**KESEHATAN**						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	7,7	8,26	13,21	15,34	11,4
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99,9	98.87	97,36	98,70	98,86
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,33	9,66	14,04	16,27	2,29
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	4,97	6,55	10,57	15,71	10,39
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	160,46	233,75	181,7	129,39	166,29
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Angka	0,0144	0,01	0,014	13,08	15,11
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00062
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0,00013	0,00012	0,00015	0,0002	0,0003
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,00114	0,0012	0,00135	0,0016	0,0047
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	73,34
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	86,92	89,45	73,49	75,82	58,52
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	99,56	97,36	97,36	97,36	97,80
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)						
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	100	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%		0,75	8	6,79	4,3
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Per 100.000	43,.27	54,33	77,31	75,00	68,65
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	126,36	142,6	214,97	207,97	222,76
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	7,11	12,79	14,6	11,02	17,79
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	44,42	50,38	71,11	67,89	74,06
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	48,18	45,48	47,83	34,7	16,13
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.26	Angka kejadian Malaria			117	160	0,37	0,37
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	na	n.a	0	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Angka	0,004	0	0,015	2,57	0,0095
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	n.a	10	n.a	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100	n.a	66	n.a	100
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	72,33	56.66	75,43	100	100
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	101,26	100	93,14	100	61,36
2.35	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	49,34	52,86	53,74	54,63	56,39
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	78,17	84,11	70,63	70,42	53,56
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	86,66	87,83	72,21	75,22	58,68
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	32,91
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	63,27	70,33	72,28	66,45	74,1
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	89,79	n.a	n.a	n.a	100
2.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	86,71	80,66	85,29	88,16	92,5
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	72,71	75,4	83	85,49	94,22
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
2.45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0	100	100	100	100
2.46	Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec	0	22	22	22	22
2.47	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	%	0	1	1	1	1
2.48	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	n.a	n.a	n.a	88,95	89,94

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	23,94	34,55	48,32	30,17	30,67
3.2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	19,44	17,76	21,66	23,34	24,11
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	85,46	86,53	86,53	76,65	76,88
3.4	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	7,71	7,71
3.5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,55	47,56	53,65	60,39	69,19
3.6	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,78	81,4	81,47	81,83	80,41
3.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	68,24	68,36	69,56	69,88	70,12
3.8	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.9	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.10	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	5,88	6,15	5,92	5,29	5,65
3.11	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	n.a	46,18	46,5	46,5	47,3
3.12	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	n.a	8,26	8,91	10,48	0,12
3.13	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
3.14	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	50,4	35,27	35,45	35,45	33,92
3.15	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,87	0,87	0,87	0,683	0,588

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.16	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	100	5,415	6,028	9,66	10,43
3.17	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir	meter	0	n.a	n.a	1.799	2074
3.18	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	100	80	82	n.a	50,75
3.19	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Titik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.20	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.21	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	4	3	3	7	1
3.22	Presentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	100,00	100,00	67,00	n.a	0,12
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**						
4.1	Rasio rumah layak huni	Angka	20,54	0,207	0.202	0,197	0,199
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0685	0,0688	0.075	0,075	0,07
4.3	Rasio permukiman layak huni		n.a	0,97	0.97	0,97	0,971
4.4	Persentase pemukiman yang tertata	%	n.a	0,224	0.240	0.240	0,14
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3,88	3,88	5,62	5,62	6,22
4.6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	n.a	1.60	5.98	5.98	5,99

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	97	97	74,89	3,64	n.a
4.8	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	100	100	-	na	n.a
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,63	0,63	0,31	0,70	0,50
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	76,88	100	70	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	82,00	95,00	95,00	66,14	66,14
5.4	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	87,3	90,38	86,95	70,11	23,52
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	79,95	100,00	75,00	100,00	100,00
5.6	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	%	100,00	100,00	26,67	34,89	0,00
5.7	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	n.a	75,00	0,00
5.8	Cakupan Jumlah Konflik/Ganguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	90,00	80,00	30,00	98,00	100,00
5.9	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	95,00	95,00	84,26	95,00	77,67
5.10	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	50,00	0,00	85,00	100,00	80,00
5.11	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	100,00	60,00	30,00	90,00	85,00
5.12	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100,00	25,00	90,00	100,00	95,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.13	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	100,00	0,00	95,00	100,00	95,00
5.14	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100,00	29,72	80,00	75,00	100,00
5.15	Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0,00	0,00	75,00	75,00	31,58
5.16	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100,00	30,00	70,00	70,00	10,30
5.17	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	n.a	n.a	90,00	90,00	90,00
5.18	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.19	Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	%	0,00	0,00	91,00	91,00	23,52
6	**SOSIAL**						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	100,00	97,00	98,00	54,00
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	20,65	30,45	95,00	97,00	54,00
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	11,95	12,35	98,00	98,00	55,00
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100,00	100,00	100,00	90,00	88,00
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social.	%	100,00	100,00	80,00	98,00	n.a

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	92,00	98,00	100,00
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	93,00
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	67,43	69,12	n.a	98,00	81,00
6.10	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	95,00	98,00	98,00	n.a	n.a
B	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**						
1	**TENAGA KERJA**						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	n.a	n.a	n.a	0	0
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5,45	11,36	4,71	1,45	20,89
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	75,79	76,51	71,93	56,10	77,94
1.6	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	49,19	41,11	81,68	87,27	54,93
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan masyarakat	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	32,00	80,00	48,00	32,00	48,00
1.12	Perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal	%	3,70	3,91	15,48	n.a	66,07
1.13	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	37,04	25,00	n.a	43,48	46,15
1.14	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	51,38	33,33	56,52	27,06	50,64
1.15	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta/Pekerja	104,71	n.a	43,54	n.a	61,90
1.16	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	2,86	22,03	113,51	24,14	16,85
1.17	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	5,45	7,97	22,97	1,45	20,97
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	24,52	21,09	5,34	15,00	0,12
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	5,71	5,71	5,71	2,86	2,86
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	75,00	75,00	27,00	6,30	n.a

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.4	Rasio KDRT	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	35,42	35,42	35,42	n.a	n.a
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100,00	75,00	75,00	100,00
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	55,45	18,51	0,00	75,00	100,00
2.9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	6,85	6,85	100,00	0,00	0,00
2.10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	1,04	94,14	n.a	0,00	100,70
2.12	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	1,24	96,56	n.a	0,00	97,60
2.13	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	1,03	n.a	n.a	0,00	102,90
2.14	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02	1,02	n.a	0,00	98,00
2.15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	35,75	30,00	n.a	n.a	n.a
2.16	Indeks Pembangunan Gender	%	92,12	92,58	92,79	92,79	92,80
2.17	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	35,71	50,00	100,00	60,00	100,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.18	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	52,5	70,00	100,00	90,00	100,00
2.19	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten	%	100	75,00	90,00	75,00	100,00
3	**PANGAN**						
3.1	Ketersediaan pangan utama	Kg	740,65	845,75	824,21	785,41	750,09
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kapita	2.498	6.132	6.103	7.590	7.399
		Protein per kapita	78,00	180,00	181,00	203,00	214,70
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,00	95,00	52,72	100,00	n.a
3.4	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/Perkapita/Perhari	2.498	6.132	6.103	7.590	7.399
3.5	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	%	33,30	66,67	66,70	66,70	66,70
3.6	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kapita/Hari	65,00	66,00	60,68	90,53	56,80
4	**PERTANAHAN**						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,05	118,95	49,33	0,07	26,25
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	75	33,33	70,00	53,85	66,67
4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	50	50	50	67	70
5.5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	n.a	90,12	91,7	91,61	92,44
5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	n.a	n.a	100	100	100
5.8	Timbulan sampah yang ditangani	%	84,50	77,13	69,50	22,60	79,11
5.9	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	17,05	7,53	24,87	7,65	0,20
5.10	Persentase cakupan area pelayanan	%	87,99	27,27	27,00	27,27	50,00
5.11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	87,99	77,13	31,94	30,25	79,11
5.12	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,35	50,00	56,50	50,00	30,00
5.13	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5.14	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	100	0	0	100	n.a

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.15	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	50	n.a	100	22,6	n.a
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,91	0,97	0,92	0,97	0,99
6.2	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,45	0,34	0,99	0,99	0,76
6.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,88	0,96	0,98	0,98	0,97
6.4	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,16	0,2	0,42	0,43	0,48
6.5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	87,95	95,63	98,38	97,98	97,39
6.8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	-	95,63	98,38	98,50	97,39
6.9	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.10	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	98,07	98,55	57,97	57,97	60,39
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah	207,00	228,00	227,00	227,00	227,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
7.4	Persentase LSM aktif	%	20,34	44,06	44,06	44,06	8,60
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88
7.6	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	93,02	95,14	100,00
7.8	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	n.a	0,00	20,00	0,00	0,00
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,92	1,37	1,35	1,35	1,34
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,86	3,11	2,41	2,33
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,9	8,57	20	57,89	62,00
8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	3	3	3	3	3
8.5	Rasio Akseptor KB	Rasio	70,61	78,87	87,16	60,47	73,39
8.6	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,71	67,95	50,25	65,29	66,07
8.7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	2,05	0,89	0,95	0,88	0,36
8.8	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,74	12,41	33,56	14,85	9,26
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	25,70	23,73	30,58	26,48	24,94
8.10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	141,61	126,78	114,73	165,36	136,25
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	63,29	61,44	84,35	37,88	50,64

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	47,52	50,17	10,69	16,21	29,91
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	41,86	40,71	6,90	8,48	7,19
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	9,09	13,63
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	165,18	140,90	140,90	136,36
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	90,00
8.17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
8.18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	135,87	182,07	128,05	127,16	143,44
8.19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	43,75	45,83	100	100
8.20	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100	n.a	n.a	n.a	n.a
8.21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	n.a	n.a	n.a	n.a
9	**PERHUBUNGAN**						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	243.922	254.613	265.585	257.593	255.011
9.2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0006	0	0	0	0
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.853	1.924	1.400	0	978

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.5	Jumlah Bandara	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.6	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Persentase layanan angkutan darat	%	8,54	8,75	8,79	26,24	29,41
9.8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	40,80	35,40	50,80	100,00	62,10
9.9	Pemasangan Rambu-rambu	%	15,00	13,30	0,80	4,20	0,00
9.10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
9.11	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	223.325	233908	244.755	226623	203.714
9.12	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	409	413	527	415	395
9.13	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	243.922	250.341	265.585	257.593	218.286
9.14	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Ton	516	531	588	572	467
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
10.1	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	10	10	10	11	11
10.2	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	6	7	8	8	8
10.3	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia/ Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10.4	Persentase Website OPD	%	28,00	30,00	40,00	43,00	51,42
11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	45,28	18,00	21,04	41,27	41,63

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	35,88	36,77	30,38	35,00	6,40
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	18.183	25.221	26.121	26.500	8.538
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,35	90,13	90,47	6,40	6,40
11.5	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	20,00	18,00	18,00	92,00	18,00
12	**PENANAMAN MODAL**						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13	13	5.046	2.897
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	17,11	17,53	17,53	2.570	5.079
12.3	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7	7	7	15	12
12.4	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2	2	2	2	1
12.5	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14	14	14	9	22
12.6	Lama Proses Perizinan	hari	1-5	1-5	1-5	1-3	1-2
12.7	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4	4	4	-	1
12.8	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7	7	7	-	-
12.9	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	3	3	3	-	-
12.10	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	2,85	2,71	7,46	2,05	2,08
12.11	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,35	87,75	87,75	87,00	87,80
12.12	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	%	85,00	85,00	85,00	25,00	25,00
12.13	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	13	13	13	122	44
12.14	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	65	65	65	90	95
12.15	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	75	75	75	95	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	50	75	25	100
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	5,13	n.a	80	50	0
13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,18	n.a	25	20	58
13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	n.a	65	3	0
13.5	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	11	n.a	25	45	9
13.6	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	11	n.a	8	6	5
13.7	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	25	31	24	28	51
13.8	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	8	2	1	23	3
13.9	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	7		2	9	2
13.10	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	15	1	24	33	3
13.11	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	51	50	80	30	100
13.12	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	52	n.a	15	20	0
13.13	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	2	n.a	5	6	4
13.14	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	22	n.a	22	15	0
13.15	Jumlah Gedung Olahraga	Jumlah	1	1	1	1	1
13.16	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	229	229	229	229	229
13.17	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	11	n.a	2	0	5
14	**STATISTIK**						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.4	Buku ”PDRB”	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**PERSANDIAN**						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
15.2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Kategori	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik
16	**KEBUDAYAAN**						
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	2	2	2
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	8	8	8	8	8
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	-	-	0	2	0
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	13	13	13	13	17
17	**PERPUSTAKAAN**						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	20.492	21.868	26.224	28.580	30.798

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	47.674	48.912	49.746	52.067	52.067
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	Jumlah	854	911	1.093	1.191	1.283
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	15.221	52.377	52.377	52.377	52.067
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	58,33	61,54
17.7	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	113	113	113	113	113
17.8	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	0	0	0	0	0
17.9	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2	2	2	2
18	**KEARSIPAN**						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18.2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	4	5	6	7	8
18.3	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	4	5	5	7	7
18.4	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	9	10	11	12	13
C	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**						
1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.1	Jumlah Produksi perikanan	ton	644.286,15	645.919,16	666.829,06	666.787,25	671.054,41
1.2	Angka Konsumsi ikan	%	107,25	99,01	98	98,12	98,25
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	66,2	4,01	17,15	3,13	6,26

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	39,98	41,18	42,25	42,85	45,69
2	**PARIWISATA**						
2.1	Kunjungan wisata	Jumlah	4.000	1.800	800	308	55.354
2.2	Lama kunjungan Wisata	hari	1	1	1	1	1
2.3	PAD sektor pariwisata	%	0,02	0,02	0,004	0,002	3,76
2.4	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	11	11	11	11	11
2.5	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27	27	27	27
2.6	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	20	20	20	20	20
2.7	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	5	5	5	5	5
2.8	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		0	0	0	0	0
2.9	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	0	1	1	1	1
2.10	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2
2.11	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	3	0	3	1	0
2.12	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1	1	1	1
2.13	Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta	Jumlah	3	3	3	3	3
3	**PERTANIAN**						
3.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.125.325,00	1.249.42	1.249.42	1.448.138,20	
3.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	26,52	7	7	12,68	

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.3	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.620.315,00	2.631.475,00	2.631.475,00	3.822.220,80	
3.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	61,8	53,21	53,21	33,47	n.a
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	-	-	6,4	6,3	6,1
3.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	5,84	9,61	30,47	4,18
4	**PERDAGANGAN**						
4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	-	9.380.224.938.000	291.417.313.600	0	0
4.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	65,64	-	-	-
5	**PERINDUSTRIAN**						
6.1	Pertumbuhan Industri	%	-7,1	4,11	4,87	5,02	5,09
6.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	n.a	n.a	4	5	7
6.3	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	n.a	n.a	20	20	21
7	**TRANSMIGRASI**						
7.1	Transmigran swakarsa	KK	100	50	50	37	26
7.2	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	125	12	12	13	184,5
7.3	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	250	254	254	254	254
D	**PENUNJANG URUSAN**						
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
2	**KEUANGAN**						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,81	4,59	4,43	2,03	2,08
2.3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0,45	0	0	1,99
2.4	Persentase belanja pendidikan	%	25,55	27,76	26,81	29,32	30,01
2.5	Persentase belanja kesehatan	%	16,82	17,13	17,85	18,82	22,27
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	-	-	-	-	-
2.7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,22	0,2	0,2	0,33	0
2.8	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	2,70	20,58	12	70,77	16,23
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,70	5,25	3,64	16,52	5,48
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	13,54	15	13,21	8,23	4,33
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	38	37	37	37	38
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	201	208	207	201	198
3.6	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompetensi	Jumlah	n.a	3348	3935	3812	3709
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4.3	PENERAPAN SIDa :						
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100
5	**PENGAWASAN**						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	82,30	83,00	80,00	81,00	85,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.2	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	90,00	90,00	80,00	90,00	90,00
5.3	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00
5.4	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5.5	Jumlah temuan BPK	Jumlah	14	14	7	12	16
6	**SEKRETARIAT DEWAN**						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	**SEKRETARIAT DAERAH**						
7.1	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	60,00	70,00	90,00	95,00	96,00
7.2	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	852	288	290	504	184
7.3	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	19.703	20.013	21.951	15.838	8.538

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.4	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
7.5	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	97	97
7.6	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100	100	100	100	100
7.7	Persentase Besaran Efesiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	3,83	3,60	5,96	6,90	2,81
7.8	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
7.9	Nilai LPPD	Nilai	29.735	34.502	24.152	n.a	n.a
7.10	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100	90	90	100	100
7.11	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	80	100	100	100	100
7.12	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100	100	100	100	100
7.13	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretaris daerah yang diverifikasi	%	100	100	100	100	100
9	**KECAMATAN**						
9.1	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80%	jumlah	22	22	22	22	22
9.2	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
9.3	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100
9.4	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	100	100	100	n.a	n.a

Sumber : OPD Pengampu, 2021-2025.

Tabel 2.175.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahahan Kabupaten Luwu Tahun 2023-2024

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**						
1.	**PENDIDIKAN**						
1.	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		54,09	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	212	234
				2.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	50	228
				3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-
				4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	188	-
				5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	441	459

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	415	294
				7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	227	88
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang		79,58	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	246	273

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	berpartisipasi dalam pendidikan dasar			2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6135	5823
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		75,70	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1806	1806
				4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-
				5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13376	-
				6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	49	-
				8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2712	2635
				9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1506	1338
				10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2555	2696
				11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1437	1707
				12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1966	690
				13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	861	465

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2698	1398
				15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1479	1278
				16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	219	239
				17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	73	87

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	406	390
				19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	254	348
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		n.a	1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2	2
				2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	855	513
				3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	-	-
				5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	195	48
				6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	132	152
				7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	270	239
				8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	6	8
2.	**KESEHATAN**						

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,098	0,092	1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2 RS	2
2.	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	1.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	2
3.	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,128	96,823	1.	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	39,124	90,972
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	68	339
4.	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,705	99,635	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16,26	14,812
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	68	339
5.	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,586	99,292	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	33,39	29,698
				2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standard	68	2,521
6.		34,474	29,373	1.	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	532,768	302,947

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan balita sesuai standard	2,475	2,694
7.	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,987	96,3	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90,272	587,72
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standard	525	532
8.	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,295	99,158	1.	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	669,982	493,36
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	1,245	1,245
9.	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,421	97,968	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28,584	60,146
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standard	791	337
10.	Presentase Penderita hipertensi yang	91,31	98,005	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	70,795	78,084

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita HT sesuai standard	88	154
11.	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,177	97,894	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5,28	7,854
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	110	381
12.	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,56	99,03	1.	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	66	1,704
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standard	66	68
13.	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	97,776	82,098	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13,19	25,909
				2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	135	134
14.	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	91,213	75,595	1.	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	17,456	28,381

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standard	115	136
3.	**PEKERJAAN UMUM**						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	10,51	10,89	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	305,29 ha	305.29
				2.	Panjang sungai di Kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	32.736,00	32.736,00
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	13,78	13,78	3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	9,29	9.29
				4.	Panjang pantai di Kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	4.857,00	4.857,00
				5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	0
				7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1,12	1.12
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	49,45	68,17	1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	51,41	51.95
				2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	58,92	58.81
				3.	Persentase Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	0
4.	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	81,83	80,41	1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada
				2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	Tidak
				3.	Jumlah BUMD dan atau PTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Ada	Ada

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	tangga di seluruh kabupaten/kota			4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	86 (Terdiri darai 1 PDAm dan 85 KPSPAMS)	86 (Terdiri darai 1 PDAm dan 85 KPSPAMS)
				5.	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain.	80	80
5.	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	4,59	4,90	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2943	3452
				2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	440	440

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan Pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3631	2892
				4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0
				5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	0
				6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah Domestik	0	0
				7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	76,65	57.98
				8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	3,88	5.11

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0,58	1.06
				10	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0
				11	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	0
				12	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	0
				13	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0
6.	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	1	1	1.	Rasio bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	0,008	0.008
				2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	897	718
				3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Ada

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Ada
				5.	Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	0
				6.	Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	0
				7.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	797	823
				8.	Jumlah bangunan Gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	0
7.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	30,17	30,67	1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2049.45	1823.4
				2.	Panjang jalan yang Dibangun	140.650,3 M	40.626,00 M

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				3.	Panjang jembatan yang dibangun	405,16 M	71,00 M
				4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	70.401,60 M	13.152,67 M
				5.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	-
				6.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi	89.253,00 M	37.694 M
				7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	117,56 M	-
				8.	Panjang jalan yang Dipelihara	9.334 M	5.905,00 M
				9.	Panjang jembatan yang dipelihara	-	-
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	49,71	0	1.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	1 kali	-
				2.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	174	174
				3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	174	174

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	0
				5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	0
				6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	0
				7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	0
				9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ada	Ada
				10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	174	174
				12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	174	174
				13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	0
				14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0
				16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0
				17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0
				18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	0
				20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	0
				21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	0
				22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	0
				23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0
				24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0				
4.	**PERUMAHAN RAKYAT**						
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2	18
				2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2	18
				3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	-	-
				4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	2	18
				6.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	-
				8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-	-
				7.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	-
				2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2	18
				4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	-
				5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	-
				6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	-
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1,56	0	1.	Jumlah luasan (Ha) Kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	-	-
				2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	75386	75057
				3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,28	10,86	1.	Jumlah rumah di kab/kota	85251	85004
				2.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	75386	75057
				3.	Jumlah rumah tidak layak huni	9619	9233
				4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	-
				5.	Rasio rumah dan KK	-	-
				6.	Jumlah rumah pembangunan baru	4	1
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	8,87	3,96	1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	-	6
				2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1870	2000
				3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan		
					lingkungan		
				4.	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		
				5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		6
				6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		670

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		55
				8.	Jumlah pengembang yang teregistrasi		55
				9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		30
5.	**Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	13	15
				2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2330	2330
				3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	19	21
				4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	1
				5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	2	1
				6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	60	70

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	86,36	100,00				
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	63238	91751	1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
				2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	20,66	30,50
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	92882	1045	1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	0
				2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	0
				3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	8	32
				4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	8	32

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	80	80
				6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	30	35
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3335	7151	1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	70	75
				2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	70	75
				3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	80	80
				4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	70,11	23,52	1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	84 kali 8 Jenis	188 Kali 8 Jenis
				2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	4
				3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	ada
				4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4	4
				5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	109	109

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	108	108
				7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakara dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	218	218
				8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	0
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	70,11	23,52				
6.	**SOSIAL**						
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	-	92,72	1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	11	11

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		228
				3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	-	-
				4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		228
				5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	4
				6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		214
				7.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		96
				9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		4
				10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	-	-
				11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		1 (Obat Umum)
				12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		4
				13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				14.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	134	136
				15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		14
				16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		1 Kegiatan
				17l.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		4

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		49
				19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		13
				20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		11
				21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		16
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	0	100	1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		
				2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		
				4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		
				5.	Jumlah Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		
				6.	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**						
1.	**TENAGA KERJA**						
1.	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	39,13	46,15	1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	1
				2.	Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	70,12	129,25
				3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	0	0
2.	Presentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	28,65	50,64	1.	Presentase penetapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	100

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				2.	Presentase instruktur bersertifikat kompetensi	85	64,29
				3.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9,38	8,97
				4.	Presentase LPK yang terakreditasi	88,89	70
				5.	Presentase LPK yang memiliki	100	100
				6.	Jumlah penganggur yamg dilatih	192	156
				7.	Presentase lulusan bersertifikat pelatihan	192	156
				8.	Presentase penterapan lulusan	22,92	45,51
				9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	28,68	50,64
				10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	0
				11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	61,92	64,08	1.	Presentase perusahaan yang merupakan program peningkatan produktivitas	n.a	n.a
				2.	Data tingkat produktivitas total	-7,03	-1,74
4.	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Striktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	24,08	16,85	1.	Presentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10,09	10,2
				2.	Presentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	9,17	8,87
				3.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di peerusahaan	1701	1479
				4.	Presentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	25	25
				5.	Presentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	37,61	37,47

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Presentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	0
				7.	Jumlah mogok kerja	0	0
				8.	Jumlah penutupan perusahaan	0	0
				9.	Jumlah perselisihan kepentingan	0	0
				10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	0
				11.	Jumlah perselisihan PHK	0	0
				12.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	0
				13.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	0	0
				14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/kota yang diberdayakan	0	0
				15.	Presentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
5.	Presentaase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	1,45	20,97	1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	113	189
				2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/kota	6532	4030
				3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	8	11
				4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	0
				5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	6
				6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	0
				7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	11	15
				8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	95	845

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapakan sosialisasi	0	0
				10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	259	15
				11.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	0
				12.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0
				13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	0
				14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1.	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	16,58	4,91	1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	33
				2.	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	3	n.a
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,026	0,017	1.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	9
				2.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	2
				3.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100
				4.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	1

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				5.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/kota)	1	0
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,573	1,578	1.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	24	12
				2.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota	0	0
				3.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	24	12
				4.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				5.	Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	1
				6.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	1
				7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100
3.	**PANGAN**						
1.	Persentase kesediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	716,31	786,58	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk menyimpan cadangan pangan	Ada	
				2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	3.364,26 ton	
				3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada	
				5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	
				6.	Tertanganinya kerawanan pangan	Tertangani	
				7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tersalurkan sebanyak 24.588 Kg	
				8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	18 Sampel	
4.	**PERTANAHAN**						
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanah di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	1.	SK Izin Lokasi yang Diterbitkan oleh Bupati/ Wali Kota	-	-
				2.	SK Bupati/ Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
2.	Persentase penetapan tanah untuk membangun fasilitas umum	-	-	3.	SK Bupati/ Wali kota tentang Penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ abstantee	-	-
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	-	-	4.	Dolumen izin pembuka tanah	-	-
				5.	Dukumen perencanaan pembangunan tanah Kabupaten/Kota	-	-
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	35.87				
5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-				
6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	53.85	100				
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**						

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	48,15	48,48	1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap:		
					a. Indeks Kualitas Air (IKA)	0	0
					b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.61	92.44
					c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	50.43	50.43
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	30,15	30,63	1.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	Ada
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerak Kab/kota	0	0	1.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	1.981	2.004
				2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	0
				3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	-
				5.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	2	4
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1.	Perkaman KTP Elektronik	97,5	86,34	1.	Penerbitan akta pekawinan	69	85
				2.	Penerbitan akta perceraian	382	2,339
				3.	Penerbitan akta kematian	2	6
				4.	Penyajian data kependudukan	Ada	Ada
2.	Peresentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	34,46	33,73				
3.	Kepemilikan akta kelahiran	98,55	93,21				

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja bersama	2,86	2,86				
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	45,00	39,61	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	102	5
				2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebulumnya	0	0
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,09	40,50	3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	0
				4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	207	207
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,41	2,33	1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak	Tidak
				2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	32,01	22,3
				3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28,5	29,4
				4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi peran Program KKBPK (advokasi dan KIE)	49,06	75,17
				5.	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang ber[eran serta aktif dalam pengelolaan progran KKBPK	8	9
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	65,29	66,07	1.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			2.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,01	19,01
				3.	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	287	486
				4.	Persentese pelayanan KB Pasca Persalinan	63,76	77,46
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,85	13,10	1.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	50,10	54,05
				2.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	23,8	23,35
9.	**PERHUBUNGAN**						
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,45	0,48	1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	50	60
				2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	85

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	64,7	64,7
				4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	65	69
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,6	0,62				
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	19,30	19,30	1.	Persentase prangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25,71	25,71
				2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan ases internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfi	25,71	25,71

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, vidio, teks, data dan sinyal lainnya)	Ya	Ya
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60,00	60,00	1.	Persentase kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan sistem pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	60	60
				2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	40	51,42
				3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Persentase layanan SPBE (layanan sistem dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	85	85
				5.	Persentase layanan SPBE (layanan sistem dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	25	25
				6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	83,33	83,33
				7.	Persentase layanan sistem dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	85	85
				8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	100

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				9.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	100
				10.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	0
				11.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	50	50
				12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	22,86	22,86
				13.	Persentese ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	13,33	13,33
				14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedia	Tersedia

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	0,28	0,68	1.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada
				2.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	67,89	80,76
				3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanankan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Tidak ada	Tidak ada
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	20,62	12,00	1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	0
				3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah dalam daerah kabupaten/kota	18,81	11,17
				4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15,84	8,93
				5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,69	1,67

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	49,50	1,67
				7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0
				8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	0
				9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31,68	1,11

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0
				11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0
				12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	3,35
				13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0
2.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,66	6,41	1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	32,00	32,00

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (DOS)	100	100
				3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,66	6,41
				4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,07	0,07
				5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	0
				6.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,21	0
				7.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,21	0
12.	**PENANAMAN MODAL**						

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	37,01	-49,81	1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	Ada
				2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Ada	Ada
				3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	-
				4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak dilaksanakan	Ada (IPRO)
				5.	Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kali	Tidak dilaksanakan
				6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	-
				7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	16 Konsultasi	16 Konsultasi

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6906 Perizinan dan 2537 non perizinan	Perizinan = 3.106, Non Perizinan = 2.825
				9.	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 2.570.604.531.514	Rp 1,290,283,842,795
				10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5 Orang	3 Orang
				11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	123 Pelaku Usaha	490 Pelaku Usaha
				12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	25	24
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3,05	3,05	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	0
				2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	0

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,78	3,78	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	50	50
				2.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	0
3.	Peningkatan prestasi olahraga	0	0	1.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	10	10
				2.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	0
14.	**STATISTIK**						
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	1.	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada
				2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7	8
				3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	11	15

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	1
				5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	1
				6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	100
				7.	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	100
15.	**PERSANDIAN**						
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	12,20	12,20	1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Tidak Ada	Tidak Ada

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				2.	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	24,56	24,56
				3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	0
				4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	100
16.	**KEBUDAYAAN**						
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	0		1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		
				3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
				4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, stnadarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		
				5.	Registrasi cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		
				6.	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				7.	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		
				8.	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		
				9.	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)		
				10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		
				11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		
				12.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		
				13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	2	
				15.	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	2	
				16.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman		
				17.	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota		
				18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		
				19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		
17.	**PERPUSTAKAAN**						
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,35	65,35	1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,48	3,48
				2.	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,042	0,042
				3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,087	0,087

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,308	0,308
				5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	78,69	78,69
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,69	78,69	1.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya)	-	-
				2.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-	-
				3.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	196	196
18.	**KEARSIPAN**						
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor	-	-	1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	100
				2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	100
				3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	100

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	-
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	-	1.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	40	40
				2.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	3	3
				3.	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	2	2
				4.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	4	4
				5.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	22	22

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	2	2
III.	**URUSAN PILIHAN**						
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	666.778,08	671.054,41	1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	2	2.203
				2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan operasional	22.22	22.22
				3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	22	46

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	576	420
				5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	832	1.000.200
2.	**PARIWISATA**						
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan	0	110,53	1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1	1
				2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	3	1
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-55,56	21,03	3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	-	-
				4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
3.	Tingkat hunian akomodasi	14,52	0,38	5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	3
				6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	2	3
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	0,29	7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	50
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,002	3,76	8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,73	-
				9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	-	-
				10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	-	-
3.	**PERTANIAN**						
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,37	6,10	1.	Sarana pertanian yang diberikan	1076	107
				2.	Prasarana pertanian yang digunakan	56	72
				3.	Penerbitan izin usaha pertanian	n.a	n.a

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				4.	Persentase prasarana yang digunakan	100	100
				5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	n.a	n.a
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	60,00	-22,32	1.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	n.a	n.a
4.	**PERDAGANGAN**						
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	94,59	97,33	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	100	97
				2.	Persentase penerbitan TDG	1,33	83
				3.	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	-	71
				4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	-	-
				5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	-

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
				6.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	-	-
				7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	-	-
				8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-	0.25
2.	Persentase realisasi kinerja pupuk	0	-	1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	23.553	-
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97,65	91,73	1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	97,60	91.72
				2.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Na	82.5
5.	**PERINDUSTRIAN**						
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	128	-	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Na	

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Na	-	2.	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10	-	1.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	80,00	84,00
			-	2.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	-
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-				

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	-	-				
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70	-	1.	Persentase data perusahaan indsutri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	75,00	95,00
6.	**TRANSMIGRASI**						
				1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	
				2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	
				3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
IV.	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN**						
1.	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**						
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,32	11.73				
2.	Rasio PAD	0,79	0,96				
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3				
4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3				
5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	83,91	83,91				
6.	Opini Laporan Keuangan	WTP	Sementara Proses				
2.	**MANAJEMEN KEUANGAN**						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	93,93	93,88				
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0,21	-				
3	Assets Management :						

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya				
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Tidak	Tidak				
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya	Ya				
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya				
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	2,18	2.34				
3.	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**						
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-	-				
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-				
4.	**PENGADAAN**						

No	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		No	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024			2023	2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,69	0				
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	10,3	17,56				
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	57,88	100				
5.	**KEPEGAWAIAN**						
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	478	0,29				
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,00	24,00				
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100				

Sumber : OPD Pengampu, Tahun 2025.

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah, sebuah kebijakan publik selalu selalu diawali dengan identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*). Suatu analisis dilakukan guna menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa mendatang adalah kesempatan yang memberi peluang positif atau yang memberi dampak buruk bagi masyarakat. Hal-hal semacam ini harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Subbab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan

masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan Pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan. Dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, sebagaimana telah disajikan di Bab II Gambaran Umum, maka selanjutnya dirumuskan sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Tingkat Kesejahteraan Yang Masih Rendah dan Belum Merata**

   Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa pendekatan kondisi sosial ekonomi, salah satunya ialah kemiskinan yang acap kali menjadi polemik bagi suatu daerah karena banyaknya variabel yang berpengaruh terhadapnya. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2024 dapat mencapai 11,70%. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik namun sayangnya capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Dengan gini ratio yang berada pada angka 0,319 menandakan ketimpangan pendapatan yang cukup rendah, mamun kondisi ini justru dapat mengindikasikan bahwa sebagaian besar penduduk memiliki pendapatan yang rendah.

   Rendahnya pendapatan masyarakat sangat erat berhubungan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dimana apabila pendapatan masyarakat yang rendah maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Secara statistik, pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Luwu dalam beberapa tahun terakhir cenderung membaik (59,7 Juta) namun masih jauh tertinggal dari

beberapa daerah lainnya hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan diangka 4,14%. Kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 10,86% juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu masih tergolong rendah.

2. Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah Yang Belum Merata

Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah yang eksistensinya diukur tidak hanya dari kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar, serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Merujuk pada capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan permukiman, secara umum ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar daerah masih tergolong rendah.

Tercatat panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 2.049,05 km, dimana pada tahun 2024 jaringan jalan yang berada dalam kondisi baik hanya sekitar 485,7 km atau 24%, jauh dari angka provinsi Sulawesi Selatan yang di atas 80%. Hal ini tentu saja berdampak pada mobilitas manusia dan barang serta konektifitas antar wilayah yang terhambat. Kondisi ini diperparah dengan layanan sistem drainase yang rendah, dimana drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik hanya sekitar 10,43%. Pun demikian halnya dengan kualitas layanan irigasi dan pengairan, dimana irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya sekitar 69,19%, padahal Kabupaten Luwu termasuk dalam kategori kawasan rawan bencana dan kawasan lumbung pangan.

Di bidang perumahan dan permukiman, penyediaan PSU juga belum optimal dimana luasan kumuh diwilayah perkotaan mencapai 6,22% dengan rumah tangga yang mengakses sanistasi aman hanya sebesar 4,52%. Sedangkan penyediaan air minum sudah tergolong baik yakni sebesar 80,41% namun capaian ini menunjukan layanan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Tingkat Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Rendah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Pendidikan yang berkualitas berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Berdasarkan kinerja capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu, berbagai data menunjukan bahwa layanan pendidikan yang berkualitas belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Hal ini ditandai salah satunya oleh capaian Rerata lama sekolah (RLS) Kabupaten Luwu pada tahun 2024 hanya mencapai 8,81 Tahun dimana hal ini berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP kelas 3. Hal ini diperparah dengan angka putus sekolah pada tingkat SD sebesar 2,56% dan tingkat SMP sebanyak 2,8%.

Berbagai kondisi ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah dengan meningkatkan mutu pendikan melalui perbaikan sistem dan layanan yang inklusif, pengajar berkompeten dan sarana prasana pendidikan yang memadai. Pemerintah juga perlu menunjukan keberpihakan terhadap anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah agak tidak ada lagi anak-anak sekolah yang harus putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya.

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan secara Inklusif. Secara umum derajat kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat Kesehatan bagi masyarakat yang terutama pada kasus-kasus penyakit menular, gizi buruk, tingginya angka stunting sampai dengan masih adanya kasus kematian bayi dan balita. Kesenjangan aksesibilitas layanan kesehatan selain dipengaruhi oleh aspek morfologi wilayah, juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan dokter dan paramedis, serta tingkat pendapatan masyarakat.

Kebijakan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi pondasi dasar dalam membangun upaya kesehatan yang kemudian juga harus diikuti dengan peningkatan

layanan pada fasilitas kesehatan tingkat dasar, dimana hanya terdapat sekitar 60 persen unit layanan kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap. Hal ini juga diperparah dengan rasio ketesediaan dokter yang hanya mencapai 0,00020. Dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, berbagai hal lain juga harus diperhatikan seperti aspek kemudahan, dan kenyamanan layanan yang dapat dilaksanakan dengan pemanfataan teknologi seperti seperti layanan konsultasi dan pemeriksaaan kesehatan jarak jauh untuk mengatasi masalah aksesibilitas masyarakat yang terbatas.

4. **Tata Kelola dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Belum Optimal**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dalam penyelenggaraannya mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean* and *good governance*, dimana aspek tranparansi dan akuntabilitas memegang peranan penting didalamnya. Disamping itu pelayanan prima sebagai aspek penting dalam pemerintahan harus didukung dengan sistem dan aparatur yang handal dan terampil, berbagai variabel ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola dan tata laksana pemerintahan yang baik.

Berdasarkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79,92 menggambarkan perlu adanya perbaikan, terutama pada aspek kemandirian keuangan. Disamping itu, sebagaimana laporan hasil evaluasi SAKIP sebesar 62,81 juga mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. Kedua capaian ini menjadi penting untuk diperhatikan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengelolaan keuangan, perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Sedangkan dari aspek pelayanan publik, Nilai IKM hanya mencapai angka 2,4 (Cukup) merefleksikan perlu adanya upaya peningkatan yang masif dan terutama pada aspek kemudahan layanan dimana dengan capaian 2,6, elektonifikasi sistem pemerintahan (SPBE) juga memang belum berjalan optimal.

Dari aspek pengelolaan kepegawaian daerah, penerapan merit sistem dalam penempataan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang masih rendah (rerata 16,23 JP per orang/tahun)

menjadi salah satu aspek yang harus ditingkatkan mengingat aparatur menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan dan ujung tombak pelayan masyarakat. Disisi lain, berdasarkan pengukuran kemandirian desa, hanya terdapat 11 (sebelas) desa berstatus mandiri dari total 207 desa yang berada diwilayah Kabupaten Luwu yang mana hal ini menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan desa belum berjalan baik sehingga pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pedesaan.

Pengelolaan potensi perekonomian daerah merupakan suatu upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kemudian nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan karakteristik wilayah yang khas sumber daya alam yang melimpah nyatanya belum mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusif bagi masyarakat.

Belum optimalnya pengelolaan perekonomian daerah diantaranya dapat terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB tetapi belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani yang signifikan, pun demikian halnya dengan para nelayan. Dengan produktifitas pertanian sebesar 6,37 ton/tahun dan perikanan 7,9 ton/tahun seharusnya dapat lebih dioptimalkan mengingat moderenisasi berbagai sarana dan prasarana serta teknik/metode pertanian dan perikanan yang berkembang pesat.

Upaya-upaya lain seperti pengembangan sektor UMKM dan pariwisata juga harus terus didorong sehingga kontribusinya dapat meningkat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya promosi investasi daerah sejalan dengan kebijakan kemudahan proses perizinan didalamnya. Dengan tren investasi dan penanaman modal yang meningkat, menggambarkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki

potensi yang besar sehingga upaya penguatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sehingga nantinya dapat mendorong kegiatan-kegiatan yang menstimulasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

5. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana Yang Rendah

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi perhatian dunia. Dengan fenomena perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pemerintah di seluruh dunia dituntut dapat melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan dan menjamin kelestarian lingkungan. Gagasan mengenai konsep Pembangunan yang beriorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam Pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dokumen tata ruang mengatur peruntukan kawasan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berpengaruh tidak hanya dari sisi kepentingan ekonomi tetapi juga menjamin jasa ekosistem lingkungan tetap terjaga. Dengan perkembangunan pembangunan, alih fungsi lahan menjadi kegiatan yang tidak dapat terbantahkan namun perubahan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dapat meminimalisir degradasi lingkungan. Dengan persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang hanya sebesar 5,32% mengindikasikan banyaknya pembangunan yang belum berkesesuaian dengan peruntukannya atau bahkan tidak melalui proses dan mekanisme perizinan yang ditetapkan. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti

dengan memperkuat aspek pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Degradasi lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang berkegiatan didalamnya. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang tidak terkontrol pada wilayah-wilayah pegunungan dan bantaran sungai dapat mempengaruhi turunnya jasa ekosistem disekitarnya yang kemudian dapat memicu terjadinya bencana, terutama banjir dan longsor dimana tercatat bahwa 7,71% sempadan sungai digunakan oleh bangunan liar. Berbagai potret permasalahan ini tentunya perlu mendapat perhatian penting, semisal dengan pembatasan dan pengaturan jenis vegetasi dan tanaman yang diperbolehkan untuk dibudidayakan. Disisi lain dalam lima tahun terakhir tercatat rata-rata timbulan sampah yang tertangani hanya 80% yang juga mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan dan layanan persampahan diwilayah Kabupaten Luwu yang keserluruhannya akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

6. Pemanfaatan Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Masih Belum Optimal

Pengelolaan potensi perekonomian daerah merupakan suatu upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kemudian nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan karakteristik wilayah yang khas sumber daya alam yang melimpah nyatanya belum mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusif bagi masyarakat.

Belum optimalnya pengelolaan perekonomian daerah diantaranya dapat terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB tetapi belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani yang signifikan, pun demikian halnya dengan para nelayan. Dengan produktifitas pertanian sebesar 6,37 ton/tahun dan perikanan 7,9 ton/tahun

seharusnya dapat lebih dioptimalkan mengingat moderenisasi berbagai sarana dan prasarana serta teknik/metode pertanian dan perikanan yang berkembang pesat.

Upaya-upaya lain seperti pengembangan sektor UMKM dan pariwisata juga harus terus didorong sehingga kontribusinya dapat meningkat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya promosi investasi daerah sejalan dengan kebijakan kemudahan proses perizinan didalamnya. Dengan tren investasi dan penanaman modal yang meningkat, menggambarkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki potensi yang besar sehingga upaya penguatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sehingga nantinya dapat mendorong kegiatan-kegiatan yang menstimulasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

7. Peran Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Belum Berjalan Secara Optimal

Desa memiliki peran strategis sebagai fondasi perekonomian nasional karena menyimpan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya yang sangat besar. Di tingkat kabupaten, desa seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, kerajinan tangan, dan industri rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, banyak desa di wilayah kabupaten belum mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Berbagai potensi lokal yang dimiliki sering kali belum diidentifikasi dan dikembangkan secara menyeluruh karena keterbatasan data, kurangnya perencanaan pembangunan yang berbasis potensi wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Banyak desa hanya menjalankan program-program yang bersifat seremonial atau mengikuti instruksi dari pemerintah pusat tanpa memahami kebutuhan dan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya peran desa dalam mendorong perekonomian daerah adalah

minimnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, baik dalam aspek manajerial, kewirausahaan, maupun pengelolaan potensi lokal. Aparatur desa masih banyak yang belum memiliki kemampuan teknis dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, irigasi, pasar desa, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian masih belum merata dan memadai. Hal ini menyulitkan pelaku ekonomi di desa untuk mengembangkan usahanya atau mengakses pasar yang lebih luas. Tak hanya itu, lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan turut memperburuk kondisi ini. Perencanaan pembangunan yang seharusnya bersifat bottom-up sering kali menjadi top-down, sehingga banyak kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Lebih lanjut, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi desa juga belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan fungsi usaha secara profesional karena kurangnya pembinaan, modal kerja, dan akses terhadap jaringan usaha yang lebih luas. Di sisi lain, keterlibatan pemuda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi desa juga masih rendah, padahal mereka merupakan aset penting dalam menggerakkan inovasi ekonomi desa berbasis potensi lokal. Selain itu, ketergantungan desa pada dana transfer dari pusat seperti Dana Desa juga sering kali menyebabkan inisiatif lokal menjadi pasif dan menunggu arahan dari pemerintah kabupaten atau pusat, bukan tumbuh dari inisiatif internal desa sendiri. Ini menjadi indikasi bahwa belum terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, sebagaimana data tahun 2024 menunjukan hanya terdapat (satu) 1 Bumdes dengan kategori maju dan dan 21 Bumdes berkategori berkembang diwilayah Kabupaten Luwu.

2.5.2. Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah

Permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Pendidikan	a. Tingginya Angka Putus Sekolah Tingkat SD/SMP/MTs b. Rendahnya Angka Literasi dan Numerasi c. Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah d. Kurangnya Infrastruktur Pendidikan e. Kurangnya Tenaga Pengajar yang Berkompetensi
2.	Kesehatan	a. Minimnya Peralatan Kesehatan b. Terbatasnya Tenaga Dokter c. Tingginya angka kematian ibu d. Tingginya angka stunting e. Tingginya kasus TBC
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Kurangnya Jaringan irigasi b. Rendahnya Kualitas jaringan jalan c. Banyaknya bangunan yang belum memiliki izin;
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Luasnya wilayah kumuh b. Tingginya angka rumah tidak layak huni
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	a. Kurangnya Kesiapan Terhadap Mitigasi Bencana b. Belum Maksimalnya Sarana dan Prasarana Layanan Kebakaran c. Sumber Daya Manusia masih Kurang Baik dari Segi Kuantitas Maupun dari Segi Kualitas

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
6.	Sosial	a. Kurangnya Infrastruktur Rehabilitasi Sosial b. Kurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosil yang tertangani c. Rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Tenaga Kerja	✓ Rendahnya angka penempatan kerja pencari kerja terlatih ✓ Rendahnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ✓ Sistem informasi belum terintegrasi dengan baik antara penyedia kerja dan pencari kerja ✓ Rendahnya tenaga kerja disabilitas di sektor formal
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓ Tingginya angka kekerasan pada anak ✓ Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan ✓ Masih rendahnya kualitas keluarga
3.	Ketahanan Pangan	✓ Kurang terkendalinya Stabilitas harga pangan ✓ Tingginya jumlah daerah rawan pangan
4.	Pertanahan	✓ Tingginya Aset Daerah yang Belum Tersertifikasi
5.	Lingkungan Hidup	✓ Rendahnya kualitas lingkungan hidup ✓ Rendahnya Kualitas Pengelolaan dan pelayanan persampahan ✓ Kurangnya Infrastruktur persampahan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓ Belum Optimalnya Pelayanan administrasi kependudukan ✓ Minimnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ✓ Rendahnya pasangan yang berakte nikah
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	✓ Kurangnya desa berstatus desa mandiri ✓ Banyaknya desa berstatus desa tertinggal ✓ Minimnya pembinaan Pembangunan desa ✓ Rendahnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat desa
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓ Rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang; ✓ Rendahnya partisipasi KB pada pasangan usia subur
9.	Perhubungan	✓ Rendahnya Pengawasan Layanan Perizinan Angkutan Umum ✓ Minimnya Infrastruktur Perhubungan
10.	Komunikasi dan Informatika	✓ Terbatasnya Jangkauan Layanan Internet ✓ Belum Optimalnya Website OPD
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	✓ Kurangnya koperasi yang aktif dan koperasi sehat ✓ Kurangnya Promosi Produk UMKM yang aktif
12.	Penanaman Modal	✓ Rendahnya daya serap tenaga kerja pada proyek investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga	✓ Rendahnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam Pembangunan daerah ✓ Rendahnya pembinaan olahraga
14.	Statistik	✓ Rendahnya pengelolaan data statistic sektoral
15.	Persandian	✓ Minimnya kesadaran system keamanan informasi
16.	Kebudayaan	✓ Rendahnya pengelolaan cagar budaya ✓ Rendahnya kesadaran Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		terhadap pelestarian budaya
17.	Perpustakaan	✓ Rendahnya minat baca Masyarakat ✓ Rendahnya ketersediaan infrastruktur perpustakaan
18.	Kearsipan	✓ Rendahnya jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai ketentuan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Kelautan dan Perikanan	✓ Rendahnya kesejahteraan nelayan
2.	Pariwisata	✓ Rendahnya kualitas infrastrutur sarana pariwisata ✓ Rendahnya pelaku ekonomi kreatif ✓ Banyaknya potensi pariwisata yang belum dikelola
3.	Pertanian	✓ Belum maksimalnya Produktifitas pertanian;
4.	Transmigrasi	✓ Minimnya pengelolaan Kawasan transmigrasi;
5.	Perdagangan	✓ Rendahnya daya saing produk
6.	Perindustrian	✓ Rendahnya binaan kelompok pengrajin yang dikelola ✓ Rendahnya produk kemasan yang dikelola

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Sekretariat DPRD	✓ Kurangnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir
2.	Sekretariat Daerah	✓ Belum optimalnya pengelolaan informasi produk hukum; ✓ Belum optimalnya pengelolaan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		pengadaan barang dan jasa; ✓ Belum optimalnya sosialisasi dan akses informasi pada pelaku usaha terhadap pembiayaan; ✓ Belum optimalnya penyelesaian tapal batas
3	Kesbangpol	✓ Rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan pada generasi muda ✓ Tingginya angka penyalahgunaan narkoba

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Perencanaan	✓ Rendahnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan;
2.	Keuangan (BKAD dan BAPENDA)	✓ Rendahnya kualitas pengelolaan asset daerah ✓ Belum optimalnya potensi penataan pajak dan retribusi daerah
3.	Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	✓ Minimnya jumlah ASN dengan peningkatan pengembangan diri ✓ Minimnya peningkatan kapasitas ASN dengan Jabatan Fungsional Teknis (JFT)
4.	Penelitian dan Pengembangan	✓ Minimnya inovasi daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan di daerah

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Inspektorat	✓ Rendahnya Tingkat kapabilitas APIP

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	Daerah	✓ Belum Optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan

2.5.3. Isu Strategis

2.5.3.1. Isu Starategis Global

2.5.3.1.1. Perang Rusia – Ukraina

Perang Rusia – Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Keterbatasan transfer energi dari Rusia ke benua Eropa juga memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu, dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global.

Dalam hubungan perdagangan Rusia-Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia – Indonesia meningkat, namun di tahun 2023 antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

2.5.3.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjuta/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.

Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi terhadap capaian TPB Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian antara lain:

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
b. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas;
c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;

d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat;
f. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN;
g. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita;
h. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari;
i. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan;
j. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup;
k. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi dasar lengkap pada bayi;
l. Kejadian Malaria per 1000 orang;
m. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern;
n. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
o. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat;
p. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun;
q. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki
r. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun;
s. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
t. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;
u. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak;
v. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET);
w. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB;
x. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
y. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita;
z. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri;
aa. Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca;

bb. Koefisien Gini;

cc. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

2.5.3.1.3. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris *(Paris Agreement)* dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP)* 24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue.*

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan

keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO^2eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

2.5.3.1.4. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-

commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerse, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha MIkro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah Usaha Mikro Sulawesi Selatan adalah pada tahun 2020 adalah 121.097 atau 3,09% dibanding seluruh pelaku usaha mikro di Indonesia.

Namun demikian, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada

keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

2.5.3.2. Isu Strategis Nasional

2.5.3.2.1. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

a. Pelayanan pendidikan menengah;

b. Pelayanan pendidikan khusus;
c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2.5.3.2.2. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan.

Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2.5.3.2.3. Inflasi

Inflasi merupakan Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus dalam jangka waktu tertentu dimana kenaikan harga beberapa barang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang kemudian memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kondisi Inflasi di Indonesia pada sebesar 2,57 persen year on year (yoy) di Januari 2024, merupakan salah satu yang terendah di dunia dan dikalahkan oleh Jepang, Arab Saudi, Italia dan China.

Perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bisa merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam tim pegendalian inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Penjelasan kondisi inflasi nasional adalah sebagai berikut :

1. Inflasi inti pada Januari 2024 sebesar 0,20% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm). Realisasi inflasi inti disumbang oleh komoditas emas, perhiasa, biaya sewa rumah, dan biaya kontrak rumah.
2. Kelompok volatile food pada Januari 2024 inflasi sebesar 0,01% (mtm), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,42 (mtm).

Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan pasokan komoditas aneka cabai seiring perbaikan produksi. Penurunan inflasi volatile food lebih lanjut tertahan oleh inflasi komoditas tomat, bawang merah, dan beras. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi 7,22% (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnnya sebesar 6,73% (yoy).

3. Kelompok administrated prices pada Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,48 (mtm), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39 (mtm). Deflasi dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubbsidi. Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,74% (yoy), relative stabil dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya.

2.5.3.2.4. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi seseorang hidup dengan kurang dari US$ 1,9 per hari atau setara kurang lebih Rp. 45.000 per hari. Untuk memastikan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Arahan Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang “Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ditetapkan pada 8 Juni 2022 yang selaras dengan SDGs yang menarget penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Inpres No. 4 Tahun 2022 telah menginstruksikan kepada 22 Kementerian dan 6 Lembaga serta seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk bekerja sama antar kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui keterpaduan dan sinergi program kegiatan dalam rangka penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial; (2) peningkatan pendapatan Masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin; dan (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana

dan prasarana permukiman atau infrastruktur dasar lainnya. Menurut data BPS September 2023, angka kemiskinan Ekstrem Nasional belum mencapai angka 0 dan masih dibesaran 1,74%, begitupula halnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan masih di besaran 1,01% dan masih kurang 0,02% untuk menyentuh angka 0.

2.5.4. Isu Strategis Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. **Pemulihan Pasca Bencana dan Resiko Bencana Yang Masih Tinggi**

   Pasca kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang masif terjadi pada sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu pada tanggal 3 Mei 2024, pemerintah menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Dokumen R3P berisi informasi kerusakan dan kerugian, kewenangan, kebutuhan serta indikasi program dan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan pada sektor-sektor yang terdampak oleh kejadian bencana selama 3 (tiga) tahun mendatang. Penting bagi pemangku kepentingan agar R3P menjadi pertimbangan dalam meletakkan prioritisasi arah kebijakan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang holistik dan integratif dalam urusan kebencanaan dan penangangan pasca bencana daerah.

   Berdasarkan data hasil pengukuran Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kabupaten Luwu memiliki nilai indeks yang cenderung membaik, namun hal ini tidak menunjukan tingkat resiko yang menurun karena nyatanya Kabupaten Luwu masih memiliki kelas resiko tinggi dengan nilai indeks yang tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (186,58) dengan nilai kerugian ekonomi langsung sebesar Rp. 259,6 miliar pada tahun 2024.

Hal ini tidak terlepas dari karakteristik dan morfologi wilayah yang banyak didominasi oleh pegungungan dengan sungai-sungai besar yang melintasi wilayah dataran rendah yang diperparah dengan minimnya keberpihakan terhadap kebijakan upaya pengurangan resiko bencana yang ada wilayah Kabupaten Luwu.

Upaya mitigasi struktural dan nonstruktual menjadi pendekatan yang wajib dilakukan. Mitigasi Nonstruktural dilakukan salah satunya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dengan penerapan skema insentif dan disentif terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian ruang sehingga proses perizinan dan pengawasannya menjadi sangat penting. Disamping itu berbagai upaya adaptasi bencana semisal dengan penguatan aspek kesiapsiagaan masayarakat terhadap kejadian bencana juga menjadi penting untuk diperluas. Sedangkan Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai tindakan rekayasa teknis pada wilayah-wilayah dataran tinggi yang menjadi hunian atau tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti menormalisasi sedimen dan aliran sungai, perkuatan tebing pada wilayah-wilayah berpotensi longsor dan upaya teknis lainnya. Pemerintah juga harus terus mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan terutama masyarakat dengan memastikan jasa ekosistem dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi bencana dengan menjamin ketersediaan cadangan pangan guna memastikan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok dapat dijangkau oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat pada situasi tanggap darurat bencana. Pengembangan dan penerapan teknologi serta hasil-hasil riset yang memberikan rekomendasi dan pengetahuan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan juga perlu dioptimalkan, semisal dengan mengembangkan varietas tanaman pangan dan ternak yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem dan potensi dampak perubahan iklim yang terjadi.

2. Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Seiring dengan perluasan pasar global dunia, kesempatan dan peluang bisnis juga semakin terbuka lebar. Dengan bentangan wilayah yang luas dan letak geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang beragam, Kabupaten Luwu menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun sayangnya belum diikuti dengan pendapatan perkapita yang besar (59,73 juta) dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi (11,70%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum mampu memperoleh manfaat yang signfikan terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional, hal ini salah satunya dapat dilihat dengan munculnya beberapa perusahaan skala besar yang berinvestasi dan beroperasi diwilayah Kabupaten Luwu terutama pada sektor barang konsumsi bergerak cepat atau fast moving consumer goods (FCMG), sektor industri, sektor pertambangan dan sektor konstruksi serta real estate yang cenderung meningkat pertumubuhannya bila mengacu pada sektor lapangan usaha PDRB 5 (lima) tahun terakhir.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan multiplier effect yang seyogyanya perlu diantisipasi kedepannya. Pemerintah daerah perlu berinovasi dengan menstimulasi sub-sektor yang berperan dalam supply chain atau rantai distribusi yang memiliki daya ungkit tinggi. Disamping itu, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah juga dapat terlibat langsung melalui pembentukan badan-badan usaha yang terafiliasi dengan kegiatan tersebut sehingga dapat mengilhami masyarakat dan menginisiasi pembentukan kerjasama pada bidang-bidang usaha lainnya yang kemudian diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Keterlitbatan aktor-aktor dan mitra pembangunan seperti sektor swasta dan organisasi atau Lembaga swadaya

masyarakat juga dapat menjadi hal lain yang perlu ditingkatkan. Program-program pemerintah diseluruh sektor yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan kementerian/lembaga, Non-Government Organization (NgO) atau kegiatan yang bersumber dari funding sektor swasta harus dilaksanakan secara optimal dan dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak signifikan pada lokasi fokus kegiatan yang dilaksanakan sekaligus dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan kawasan baru serta mendorong praktik-praktik baik pada wilayah sekitarnya.

3. Hilirasi dan Pemerataan Pendapatan

Dengan penetapan Kabupaten Luwu sebagai Kawasan Komoditas Unggulan (Kakao dan Kopi), Kawasan Swasembada Pangan dan Kawasan Afirmasi Teluk Bone dan Sekitarnya dalam kebijakan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan mempertegas potensi kekayaan sumber daya alam daerah yang sangat besar didalamnya. Dengan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah (6,1 ton/tahun) sepatutnya perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

Selain itu, dengan rata-rata produktivitas perikanan sebesar 7,9 ton/tahun, Kabupaten Luwu juga berperan penting dalam sektor perikanan sebagai salahsatu kawasan andalan Teluk Bone. Disamping menjaga ketersediaan pangan, berbagai komoditas pada kedua sektor ini juga perlu terus ditopang dan ditingkatkan melalui mekanisme hilirisasi sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga dapat mendorong pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai solusi jangka panjang pembangunan berkelanjutan.

Hiilirasi produk menjadi salah satu faktor kunci keberhasilaan dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi dan penanaman modal disektor industri pengolahan melalui regulasi yang memberikan kemudahan kepada para perlaku dan calon pelaku usaha didaerah mengingat pertumbuhan industri

yang rata-ratanya hanya sekitar 5% pertahun. Kebijakan hilirisasi diharapkan juga nantinya dapat berimplikasi terhadap langsung terhadap pencipataan lapangan kerja sehingga berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

4. Konektifitas dan Kesenjangan Antar Wilayah

Ditinjau dari sisi kondisi geografis, Kabupaten Luwu secara umum terbagi kedalam wilayah utara dan selatan, wilayah utara Kabupaten Luwu mencakup seluruh kecamatan Walenrang-Lamasi (Walmas) dan wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Bua sampai dengan Kecamatan Larompong Selatan. Wilayah Walmas yang terdiri dari enam (6) kecamatan berada sekitar 60 - 75 Km dengan jarak tempuh 90 – 120 menit via kendaraan bermotor dari wilayah perkotaan Belopa yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu. Selain itu dengan wilayah yang juga didominasi oleh wilayah pegunungan menjadikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta jangkauan layanan infrastruktur yang merata bagi masyarakat.

Guna menanggulangi hal ini, pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan pada wilayah-wilayah yang ditetapkan pada pusat pengembangan kawasan dengan menangkap berbagai kebijakan pembangunan Infrastruktur, dan sarana-prasarana pemerintah pusat dan provinsi serta sumber-sumber lainnya wilayah di Kabupaten Luwu. Selain itu seluruh layanan pemerintahan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah melalui pembentukan pusat-pusat layanan terpadu dan terintegrasi yang tidak hanya terbatas pada layanan administrasi tetapi juga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

5. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas) merupakan gagasan yang muncul atas respons dari berbagai

tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut, terutama setelah pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa. Berbagai faktor penting yang memperkuat isu ini diantaranya kondisi geografis yang unik, di mana wilayah Walmas terpisah dari ibu kota Kabupaten Luwu, yakni Belopa, dan diapit oleh Kota Palopo sehingga menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengoptimalkan pemerataan penyediaan infrastruktur, layanan dasar dan terutama pada aspek layanan administrasi publik karena masyarakat akan terbebani oleh besarnya biaya dan waktu yang digunakan untuk memperoleh layanan mengingat jarak yang cukup jauh.

Dalam dekade terakhir berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan legislator baik ditingkat daerah maupun pusat dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, namun sayangnya usulan ini terkendala oleh moratorium pemerintah di tingkat pusat, untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yang masif oleh seluruh pemangku kepentingan mengingat hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik.

6. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal Daerah

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah adalah dua pilar utama yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks otonomi daerah. Keduanya adalah prasyarat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Dengan capaian Indeks SPBE yang cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah cukup baik, namun hal ini belum memberikan gambaran utuh terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dari aspek akuntabilitas belanja, pendapatan dan pengelolaan aset daerah serta pemenuhan layanan-layanan dasar masyarakat.

Disisi lain, mengacu pada postur anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu hanya berkontribusi sekitar 28,7%

terhadap seluruh pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mana kondisi ini juga diperparah dengan besarnya pos belanja pegawai terhadap APBD. Situasi ini tentunya akan berdampak pada fleksibilitas pembangunan daerah mengingat dana transer pusat ke daerah umumnya diikuti dengan kebijakan penggunaannya yang diarahkan untuk menunjang prioritas pembangunan nasional sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber pendapatan dan retribusi daerah, memperkuat pengawasan dalam rangka perencanaan dan penganggaran belanja daerah, serta mendorong berbagai skema kerjasama pembangunan yang dimungkinkan dalam rangka mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

7. Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital

Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting. Perkembangan teknologi diikuti oleh kemajuan pertukaran informasi yang begitu masif karena ditunjang oleh konektivitas digital yang berperan penting bagi kemajuan pada seluruh bidang dan sektor-sektor vital didunia. Disisi lain kemajuan teknologi dan transformasi menjadi dua mata pisau yang perlu diantisipasi guna mengoptimalkan peluang yang ada dan meminimalisir dampak buruk yang timbul. Konektivitas memainkan peran yang sangat strategis dalam menghubungkan individu, komunitas, dan pemerintah. Dengan persentase pengguna layanan internet yang hanya 67% pemerintah perlu mendorong penyediaan dan pemerataan serta kesiapan jaringan telekomunikasi dan internet yang terjangkau dan dapat diandalkan terutama pada daerah-daerah rural Kabupaten Luwu, dimana layanan Internet yang baik hanya dapat diakses oleh sekitar 65% desa saja.

Sekaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Luwu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengoptimalkan seluruh bentuk kegiatan pelayanan publik yang teritegrasi dengan berbagai jenis platform dan layanan digital sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) juga sangat penting, dengan capaian indeks SPBE 2,6 menandakan bahwa upaya yang masif perlu dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat aspek keterbukaan informasi publik yang selama ini hanya berkategori “cukup”

Dengan pemanfaatan yang tepat, kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital pada sektor sosial ekonomi masyarakat dapat mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mendorong produktifitas masyarakat. Semisal pemanfaatan layanan digital dapat digunakan oleh pelaku ekonomi dalam perolehan informasi pengetahuan, pengembangan produk, harga pasar, dan kondisi cuaca sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan mengefisiensikan biaya produksi, dan atau memasarkan hasil usaha secara luas baik secara langsung maupun daring.

Dengan perkembangan yang begitu pesat, kemajuan dibidang teknologi informasi dan konektivitas digital juga memberikan dampak pada pengaruh masuknya budaya luar dan atau informasi serta konten-konten negatif yang berpotensi tersebar diberbagai platform. Untuk itu intervensi pemerintah dan peran orangtua menjadi hal sangat esensial. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pembatasan terhadap berbagai informasi dan konten sensitif yang dapat memicu kekerasan, pelecehan dan kerusakan norma serta tatanan sosial, sebagaimana yang tergambar pada capaian Indeks Perlindungan Anak yang cenderung turun (56,57). Orangtua juga harus memberi andil penting dalam pemberian bimbingan

dan pengawasan terhadap penggunaan gawai, media dan platform digital yang digunakan oleh anak-anaknya.

8. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu wilayah memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), dimana berdasarkan proyeksi kependudukan kondisi ini terjadi di Kabupaten Luwu dalam rentang tahun 2025 sampai dengan tahun 2034.

Pembangunan sumber daya manusia yang diawali dari pendidikan anak usia dini hingga pembangunan kepemudaan menjadi critical path (jalur kritis) dalam menyikapi manfaat dari fenomena ini. Untuk itu peningkatan kualitas asupan gizi anak hingga kualitas layanan pendidikan serta peningkatan keterampilan dan media kreatifitas pemuda menjadi hal yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Sebaliknya, bila fenomena ini tidak dapat diantisipasi dengan baik maka akan memberi dampak buruk terhadap potensi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Seiring perkembangan wilayah, sektor agraris yang menjadi ciri khas sektor perekonomian pedesaan secara alami lambat laun terkikis oleh berbagai kemajuan teknologi dan informasi. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan penyiapan kelompok usia produktif yang tidak hanya memiliki keterampilan dan kemapuan mengolah lahan-lahan pertanian, perkebunan dan perikanan secara modern, tetapi juga mampu memperkuat kelembagaan dan sistem pasar yang terintegrasi. Hal ini penting, selain untuk menjaga keberlangsungan dan kemandirian pangan daerah, juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi petani dan nelayan dimasa mendatang.

9. Wajah Perkotaan dan Daya Saing Daerah

Dalam konteks perkotaan "wajah kota" merujuk pada tampilan fisik, karakter, dan ciri khas suatu kota yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti arsitektur, infrastruktur, lingkungan, hingga aktivitas sosial dan budaya yang terjadi di dalamnya. Sejak ditetapkannya wilayah Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu 18 tahun silam, kawasan perkotaan belopa mengalami perkembangan yang begitu signifikan dari berbagai aspek sejalan dengan ditetapkan Kecamatan Belopa dan Belopa Utara sebagai kawasan perkotaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu. Hal ini menjadi sebuah isu tersendiri dimana karakteristik perkotaan akan selalu berkembang dengan dominasi aktifitas pemerintahan, hunian, perdagangan dan jasa didalamnya.

Polarisasi yang terjadi diwilayah perkotaan menuntut penyediaan Infrastruktur yang memadai dan mumpuni sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan wilayah. Dengan berbagai dinamika kegiatan pembangunan, pemerintah daerah perlu tetap memperhatikan aspek-aspek penting pembentuk ciri khas yang menjadi identitas dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu, terutama pada tampilan visual bangunan-bangunannya, namun tetap mendorong percepatan pembangunan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah perkotaan melalui mekanisme tertentu, semisal dengan pengaturan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Karakteristik wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan handal. Pemenuhan fasilitas umum seperti fasilitas olahraga dan rekreasi menjadi hal yang penting guna mempertegas karakteristik wilayah perkotaan. Selain itu ketersediaan penyediaan sarana dan prasarana yang berkarakter dapat menjadi Landmark yang mampu mendorong kegiatan-kegitan perekonomian seperti aktifitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang diarea sekitarnya. Pemenuhan Infrastruktur perkotaan diharapkan nantinya dapat menjadi daya tarik bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala

regional maupun nasional diwilayah Kabupaten Luwu sekaligus menjadi pengungkit terhadap peningkatan daya saing daerah.

2.6. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dijelaskan bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi daerah menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh Kabupaten Luwu, Penerapan inovasi daerah nantinya akan melibatkan seluruh Perangkat daerah di kabupaten Luwu sehingga diharapkan setiap Perangkat daerah menciptakan satu atau beberapa inovasi yang dikembangkan, hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah cara baru dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan meningkatkan produktifitas sebuah pekerjaan/keadaan secara dinamis dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Pengembangan Inovasi daerah, Kabupaten Luwu berupaya untuk mengembangkan berbagai inovasi yang mampu menciptakan sebuah hal baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut daftar inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2023 dan tahun 2024 :

Tabel 2.176.
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Penataan UMKM Kuliner IDAMAN (Indah, Aman dan Nyaman) Kabupaten Luwu

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	Satu Pintu Cegah dan Atasi Stunting di Kabupaten Luwu (Satu Hatiku)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Luwu	Peningkatan Pemeliharaan Jalan Melalui Pembentukan Tim Reaksi Cepat (PERAN TRC)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Luwu	Wadah dan Ruang Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (WARUNG MASIJA'KI)
5	Dinas Kesehatan Kab.Luwu	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan (SI KEPO NAKES)
6	Dinas Kesehatan Kab.Luwu	Transformasi Layanan Puskesmas Melalui Akselerasi Badan Layanan Umum Daerah (SIAP MEKA BLUD)
7	Dinas Perhubungan Kab.Luwu	Penataan Parkir di Tepi Jalan (PAK DILAN)
8	Dinas Pertanahan Kab.Luwu	Pendaftaran Pensertipikatan Aset Tanah On-Line Aset Tanah Kabupaten Luwu
9	Kecamatan Larompong	Penguatan Karakter Masyarakat Desa Dengan Menumbuhkan Kembali Nilai-Nilai Kearifan Lokal
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Luwu	Komunitas Belajar Pendidik Dalam Menyuksseskan Implementasi Kurikulum Merdeka (KOPIKU MERDEKA)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Luwu	Sistem Informasi Pemetaan dan Pemantauan Gedung (SIPEMANDU)
12	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Luwu	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Melalui Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SMART DESA)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu	Cegah Stunting Dengan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (ChatingAN KeReN)
14	Walenrang Timur	WARKOP KELILING DESA (Warung Koordinasi Keliling Desa)
15	Dinas Perdagangan	Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Secara Non Tunai (SIRUNTU)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu	Petugas Peduli Stunting Melalui Bimbingan dan Pendampingan Dalam Rangka Pencegahan Stunting (PEPES BANDENG)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.Luwu	Penghargaan ASN Teladan Organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu (PESAN OPU)

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Luwu	Gerakan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Yang Menyenangkan (GEBRAK PAUD)
19	Kecamatan Basse Sangtempe' Kab.Luwu	Potensi PBB yang Terpendam
20	Kecamatan Bajo Barat	Menuju Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Kelompok Dasawisma (MENU PEDAS)
21	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan dan Persandian Kab.Luwu	Digitalisasi Persandian Berita (DPE BERITA)
22	Kecamatan Bajo Kab.Luwu	Polisi dan Rakyat Bersatu Dalam Kemanan Lingkungan (PRABU TEMANKU)
23	Bappelitbangda Kab. Luwu	Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat Secara Elektronik
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Luwu	Efektifitas Proses Penerbitan SPM Alokasi Dana Desa Pada Sub Bagian Keuangan BKAD ("TASEPPE" SPM ADD)
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu	Sistem Informasi Pengarsipan Data Evaluasi Dokumen Dan Laporan Kinerja
26	Dinas Kesehatan Kab.Luwu	Buku Tamu Berbasis Digital (Bukuta Di)
27	Kecamatan Belopa Utara Kab.Luwu	Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Forum Komunikasi Pemerhati Pemuda Sabe FKP2S (OPEN PBB-P2)
28	Bappelitbangda Kab. Luwu	Sistem Digital Keuangan (SIDAK)
29	Kecamatan Suli Barat Kab.Luwu	Penggalakan Tanaman Obat Keluarga Di Halaman Rumah (TOGA)
30	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Penertiban Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
31	Kecamatan Bajo Kab.Luwu	Gerakan Kampanye Lingkungan (GAMPANG)
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Luwu	Digitalisasi Penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DIPAMONEV-RK-DP3A)
33	Dinas Sosial Kab.Luwu	Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran (SiPAPA)
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Informasi Berbasis Digital (Narsis Di') Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Kecamatan Ponrang Kab.Luwu	Pojok Layanan Aduan PBB

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
36	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu	Inventarisasi Barang Milik Daerah Berbasis Qr Code Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kab. Luwu (INDAH BARCODE)
37	Kecamatan Basse Sangtempe Kab.Luwu	Optimalisasi Layanan Posyandu Balita Melalui Pemberdayaan Kader Posyandu Di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kecamatan Basse Sangtempe Kab.Luwu
38	Bappelitbangda Kab. Luwu	Pengelolaan Arsip Digital (One Click)
39	Badan Pendapatan Daerah Kab.Luwu	Smart Pajak Bapenda
40	Kecamatan Larompong Selatan Kab.Luwu	Meningkatkan Kedisiplinan ASN Dan Non ASN Dikantor Lurah Bonepute
41	Kecamatan Bua Kab.Luwu	Manajemen Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Sakti (MASSIPAKI)
42	Dinas Sosial Kab.Luwu	Pengarsipan Dokumen Melalui Arsip Digital (PANADA)
43	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Panduan Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Non Asn Pada Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga Pimpinan (JAGA Non ASN)
44	Kecamatan Ponrang Kab.Luwu	Digitalisasi Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Kerja Pada Kecamatan Ponrang (DILAMAR KA')
45	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Optimalisasi Penyusunan Agenda Kegiatan Pimpinan Menuju Protokol Yang Lebih Profesional (TEMAN PROTOKOL)
46	Bappelitbangda Kab. Luwu	Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu New Generation (Badik Luwu-NG)
47	Kecamatan Basse Sangtempe Kab.Luwu	Pengarsipan Surat Masuk Dan Keluar Berbasis Digital Dikantor Kecamatan Basse Sangtempe (SiSUMARDI)
48	Kecamatan Belopa Utara Kab.Luwu	Penataan Arsip Digitalisasi (PADI)
49	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
50	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Peningkatkan Pemahaman Tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah
51	Dinas Perdagangan Kab.Luwu	Literasi Finansial Pedagang Dan Pengelola Pasar
52	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Sistem Informasi Pelayanan Akurasi Cermat (SiPAC)

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
53	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Luwu	Sistem Informasi Penyaluran Dana Transfer Daerah (PAMDAWA)
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Luwu	Sinkronisasi Integrasi Data Kepegawaian (SEDATAKI)
55	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	System Informasi Pengolahan Data Pengadaan Barang/Jasa (SISOLA PBJ)
56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Luwu	Sistem Perhitungan Data Kebutuhan Guru (Sipakatau)

Sumber : Sistem Inovasi Daerah.

Tabel 2.177.
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1.	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	Kolaborasi Aksi Pengembangan Pusat Kuliner Kawasan Strategis
2.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu	“JIKA DIBAKAR” Jangan Panik Apabila Terjadi Kebakaran
3.	Sekretariat DPRD	“DAPOTE” Data Pokok Pikiran Terpadu DPRD
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu	“TRANSFORMERS” Transformasi Linmas Penguatan Peran dan Fungsi
5.	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	“MIMPI INDAH DI LUWU” Mitigasi Komoditas Pangan Dalam Pengendalian Inflasi Daerah di Kab. Luwu
6.	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	“BANG KUMIS” Bantuan Penanganan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
7.	Kecamatan Basse Sangtempe	“PANEN BUMDES” Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Basse Sangtempe
8.	Bappelitbangda Kab. Luwu	Sahabat Perencanaan
9.	Kecamatan Suli	“PENA SULI” Gerakan Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Suli
10.	Dinas Pertanahan Kab. Luwu	Satu Data Aset Tanah (TU.DA.TA)
11.	BKPSDM Kab. Luwu	“OPA PEKAT” Optimalisasi Proses Kenaikan Pangkat ASN
12.	BPBD Kab. Luwu	Brigade Penanganan Bencana di Desa “GENANGAN DESA”
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu	“GAMACCA” Gerakan Taman Baca Pada Fasilitas Umum

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
14.	Dinas Pendidikan Kab. Luwu	Optimalisasi Penyusunan Arkas melalui WARKOP SEKOLAH
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu	“ASSIPA-E” Aksi Sistem Penyelamatan Ular dan Edukasi
16.	Kecamatan Lamasi	“TERAS DATA” Integrasi Data Kecamatan
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu	SAPA DESA NO STUNTING
18.	Kecamatan Ponrang	Optimalisasi Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu	“RESEH LU” Optimalisasi Rekonsiliasi Aset Daerah Kab. Luwu
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu	“PEDAS PANGAN” Peningkatan Daya Saing Produk IKM Pengelolaan Makanan Melalui Pembenahan Kemasan dan Labeling
21.	Kecamatan Larompong	“GEBRAK PBB” Gerakan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
22.	Kecamatan Walenrang Barat	“PERAMAH” Pemanfaatan Pekarangan Melalui Poilibag
23.	Dinas Pendidikan Kab. Luwu	Integrasi WEBKU berAKHLAK Solusi Digital Pelayanan Publik
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu	“WALMAS MAGATTI”
25.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu	“PUGALU” Pemuda Unggulan Luwu dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Pelatihan Kepeloporan Kewurausahaan Pemuda di Kab. Luwu
26.	Dinas Perdagangan Kab. Luwu	“PERMATA HATI” Percepatan Informasi Berita Harga Komoditi
27.	Puskesmas Bajo Barat	“PENTAS To Bajo Barat” Masyarakat Bajo Barat Peduli dan Tanggap Stunting
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu	“MABASSA PROFIL DESA” Manajemen Database Profil Desa
29.	Kecamatan Bajo	“GREBEK PUTIN” Gerakan Berdayakan Masyarakat Peduli Stunting
30.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu	“MATA DESA” Manajemen Database Perangkat Desa
31.	Dinas Pertanian Kab. Luwu	Sinkronisasi Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Pada Dinas Pertanian Kab. Luwu (SIRETA)

Sumber : Sistem Inovasi Daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini menggambarkan arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Luwu tahun 2026. Dimana arah kebijakan ekonomi menjelaskan terkait proyeksi ekonomi makro tahun 2026 yang mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Luwu. Sedangkan keuangan daerah memuat realisasi pendapatan dan belanja daerah serta memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiataan untuk Pembangunan tahun 2026.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi daerah merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan tahunan daerah serta mengatasi isu strategis dan menyelesaikan permasalahan daerah yang dilakukan melalui prioritas perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, diarahkan pada “Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik serta infrastruktur dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal “Luwu Berdaya”; Layanan public yang professional dan bermartabat “Luwu Malebbi”; Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; Pelopor kedaulatan

pangan " Luwu Mappatuwo"; Infrastruktur merata dan berkelanjutan; dan Desa mandiri; serta Lingkungan yang sehat dan Tangguh bencana "Luwu Lestari"

3.1.1.Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Kabupaten Luwu memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan dan dapat mendukung perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu memberikan kontribusi sebesar 3,29 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam kaitan itu Kabupaten Luwu dapat mengambil Langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian di Kawasan Palopo.

Prospek perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2026 diperkirakan tubuh lebih baik dibandingkan tahun 2025. Pemerintah berupaya menggerakkan Kembali roda perekonomian yakni pengembangan UMKM, membuat Kawasan destinasi wisata, meningkatkan pengembangan produksi komoditas unggulan, meningkatkan pertumbuhan investasi bidang industry pengolahan, energi, dan pertambangan di Kabupaten Luwu, serta meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.

Prospek perekonomian Kabupaten Luwu dikaitkan dengan tema Pembangunan Tahun 2026 yaitu Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik serta infrastruktur dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah. Berdasarkan tema tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 51,73 persen terhadap PDRB Kabupaten Luwu, sama halnya dengan perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 11,09 persen dan konstruksi sebesar 9,11 persen. Berdasarkan kontribusi tersebut, Pembangunan ekonomi akan upayakan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian, Perkebunan dan pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah dan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar.

Aspek lain Pembangunan ekonomi tahun 2026 adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi dan akan berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk kedepan harus diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan serta memperhatikan pengelolaan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Inovasi di bidang pertanian, Perkebunan dan perikanan sangat diperlukan, agar Masyarakat Kabupaten Luwu dapat berinovasi dalam mengolah hasil panen menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, sehingga dapat bernilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Menjelang datangnya tahun 2026, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomIndonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakantetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakanmasih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi globalyang melambat. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskalmenyebabkan ketatnya likuiditas global. Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebihcepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan SelandiaBaru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan

peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasimunculnya risiko stabilitas keuangan.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain:

1. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara mitra dagang.
2. Fluktuasi harga komoditas global
3. Inflasi dunia yang menujukkan arah penurunan karena gangguan rantai pasok dan perang dagang
4. Penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR)
5. Ketidakpastian geopolitik
6. Konflik perang Rusia-Ukraina
7. Konflik Timur Tengah (Palestina-Israel)
8. Resesi global yang mungkin terjadi
9. Pesatnya perkembangan teknologi digital
10. Perubahan iklim
11. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
12. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto

3.1.1.3. Tantangan Perekonomian Nasional

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 5,03 % (c to c), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,05 % (y o y) pada akhir tahun 2023. Kemudian pada tahun 2025 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3 –5,7 % sedangkan tahun 2026 sebesar 4,9 – 5,7 %.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2024 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2024 tercatat menguat sebesar 1,65 % secara ytd (*year to date*) ke level Rp. 7.314,10. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2024 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp.7.657 triliun (tumbuh 10,92% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp. 8.837 triliun (tumbuh 4,48 % secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2024 mencapai sebesar Rp. 150,53 triliun (tumbuh 2,74% secara yoy) dan dibulan desember 2024 dari industry Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp. 503,43 triliun (tumbuh sebesar 10,47 % secara yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2024 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh positif, Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih

akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Harga komoditas yang terus melemah dan mengalami fluktuasi.
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.1.4. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulsel diprakirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diprakirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diprakirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2026 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diprakirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi

rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan pada tahun 2024.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2025 diprakirakan kembali ke rentang sasaran 3,0±1,0% (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diprakirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2025.

3.1.1.5. Tantangan Perekonomian Kabupaten Luwu

Tantangan perekonomian Kabupaten Luwu mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dimana diarahkan dapat mendorong pencapaian pembangunan lain yaitu PDRB Per kapita, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.

Tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan perkapita, menurunkan ketimpangan, stunting, kemiskinan, mengendalikan harga pasar (inflasi) dan menyediakan lapangan pekerjaan serta membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Dimana dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang ditargetkan sebesar 10,46 persen dengan kebijakan Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Tingkat pengangguran terbuka terus diupayakan untuk menurun di tahun 2026 dengan target 3,05 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Dengan ini perlu menjadi perhatian untuk pemerintah Luwu agar lebih menyaipak sumber daya manusia dengan keahlian Angkatan kerja melalui Lembaga pelatihan serta

mempersiapkan penempatan tenaga kerja. Sehingga target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.

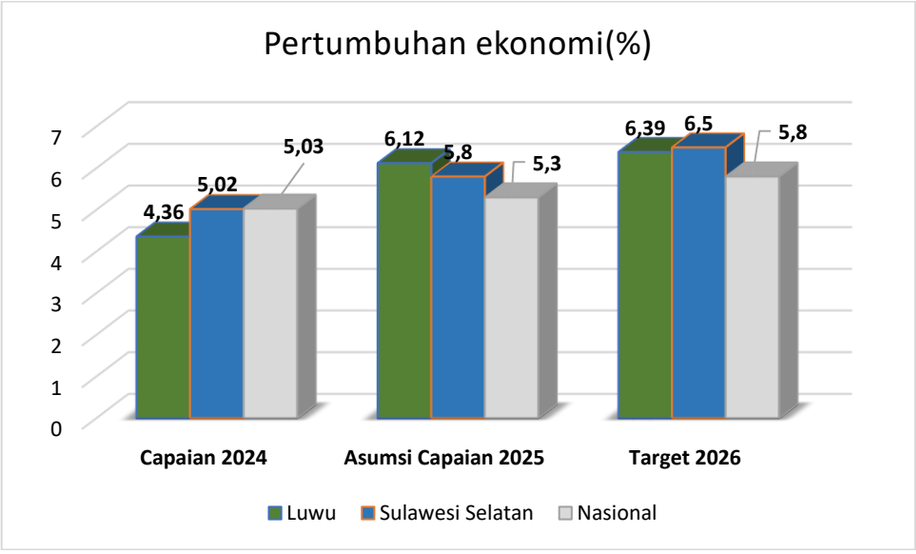
Kemiskinan dan Gini rasio saling terkait untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu. Sehingga Gini Rasio diprakirakan untuk terus menurun sebesar 0,310. Meskipun gini rasio Luwu terndah ke tiga di Provinsi Sulawesi Selatan, namun pemerataan pendapatan di Luwu adalah merata berpendapatan rendah. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan seiiring dengan menurunnya kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat.

3.1.1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2024 perekonomian Luwu tumbuh sebesar 4,36 persen, meskipun terjadi perlambatan yang disebabkan bencana alam sehingga terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, Perkebunan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Dengan menurunnya sektor unggulan Luwu, namun terdapat sektor perdagangan dan industry pengolahan yang menjadi penopang perekonomian sehingga tetap berada pada 4,36 persen. Dengan beberapa sektor yang mulai membaik pada tahun 2024, sehingga Pemerintah Optimis untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,39 persen pada tahun 2026.

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



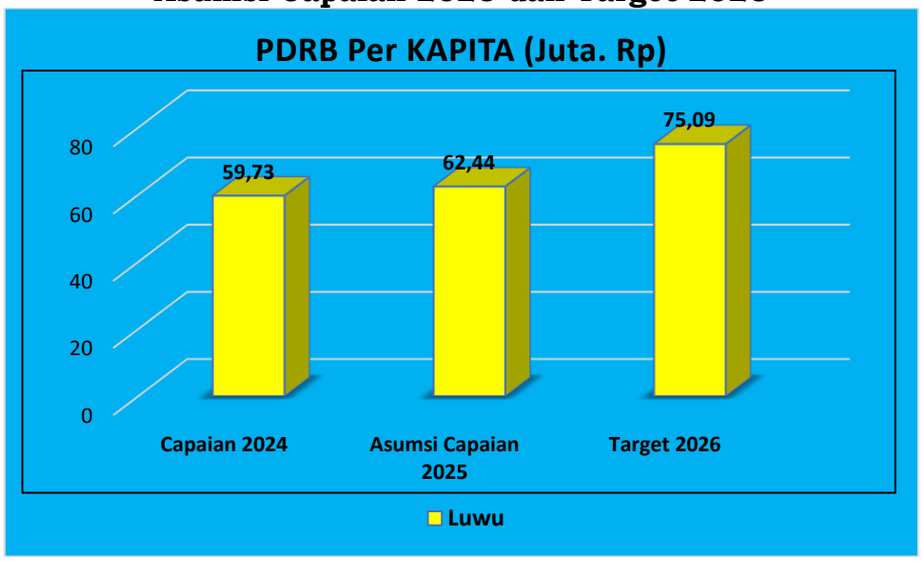
Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu di 2026, Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah juga dapat memetakan kawasan-kawasan yang memiliki proporsi cukup besar, dalam menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Luwu, yaitu kawasan industri, agro eko-wisata, pertanian dan perikanan, pertambangan serta energi.

3.1.1.5.2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB per kapita Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah 59,73 Juta Rupiah, tahun 2024 diperkirakan meningkat menjadi 62,44 juta rupiah. Proyeksi Nilai PDRB perkapita ADHB tahun 2026 sebesar 75,09 juta rupiah.

Grafik 3.2.
Capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



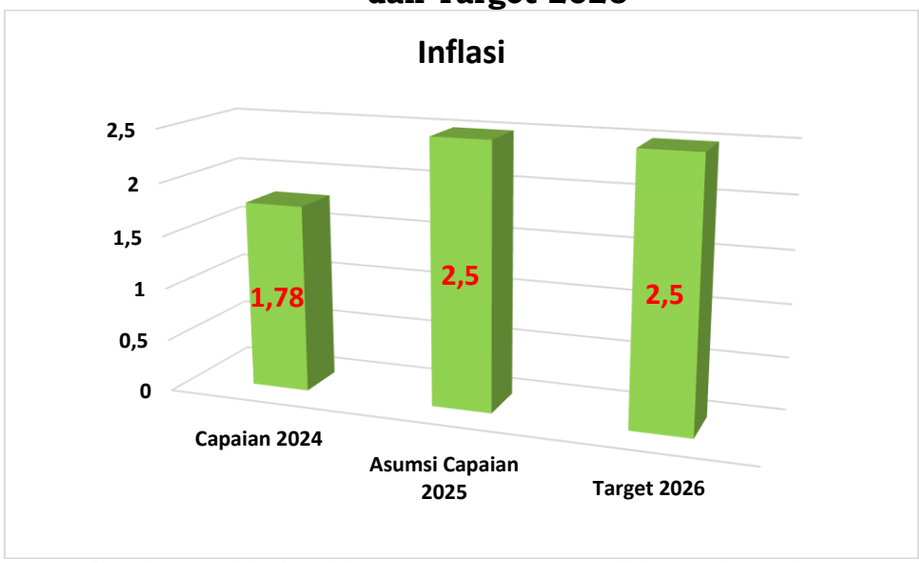
Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Dengan meningkatnya pendapatan perkapita akan mewujudkan beberapa langkah strategis, yaitu melalui revitalisasi industri, mendorong modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, transformasi sektor jasa, dan mendorong investasi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah optimis dalam meningkatkan pendapatan perkapita karena adanya perusahaan industry besar yang telah beroperasi di Kabupaten Luwu dan membuka lapangan pekerjaan serta mendatangkan investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

3.1.1.5.3. *Inflasi*

Inflasi merefleksikan kenaikan harga akibat tingginya permintaan, semakin tinggi permintaan maka semakin bertambah pula aktivitas ekonomi yang berjalan. Artinya, dengan peningkatan inflasi Kabupaten Luwu merefleksikan Kembali normalnya aktivitas ekonomi Masyarakat.

Grafik 3.3.
Inflasi Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam rangka menjaga 4 K (Keterjangkauan harga, ketersediaan harga, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), hal ini mencakup operasi pasar, Gerakan pangan murah, pengelolaan Cadangan pangan pemerintah, konektivitas antar wilayah serta penguatan koordinasi antar daerah dan pusat.

Dengan arahan diatas, maka pemerintah optimis untuk mengikuti target nasional dalam menurunkan inflasi atau menjaga kestabilan harga dengan target sebesar 2,5 pada tahun 2026. Sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku perangkat daerah agar tetap mempertahankan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja TPID Kabupaten Luwu.

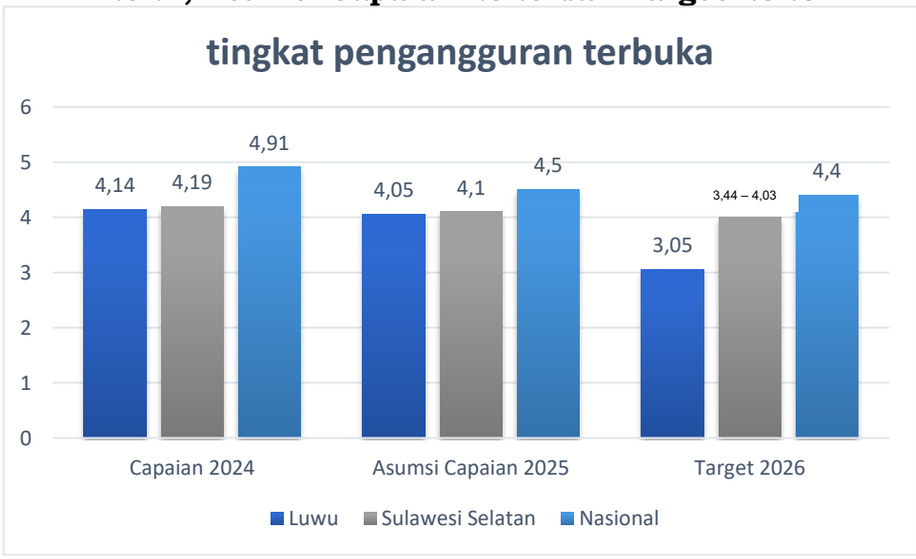
3.1.1.5.4. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu program prioritas nasional, program tersebut masih menemui tantangan yakni tingginya angka pengangguran. Untuk itu, dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) dapat mengatasi tantangan tersebut. Dengan lebih menekankan pada pentingnya penguasaan dan keterampilan di berbagai bidang termasuk penguasaan teknologi dan

kemampuan berbahasa asing agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,14 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya petani yang tidak mengelolah lahannya akibat bencana banjir serta konstruksi Perusahaan Bumi Mineral Sulawesi sudah beralih ke industry pengolahan. Namun pada tahun 2025 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu akan berada pada 4,05 persen, sementara untuk tahun 2026 tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,05 persen.

Grafik 3.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

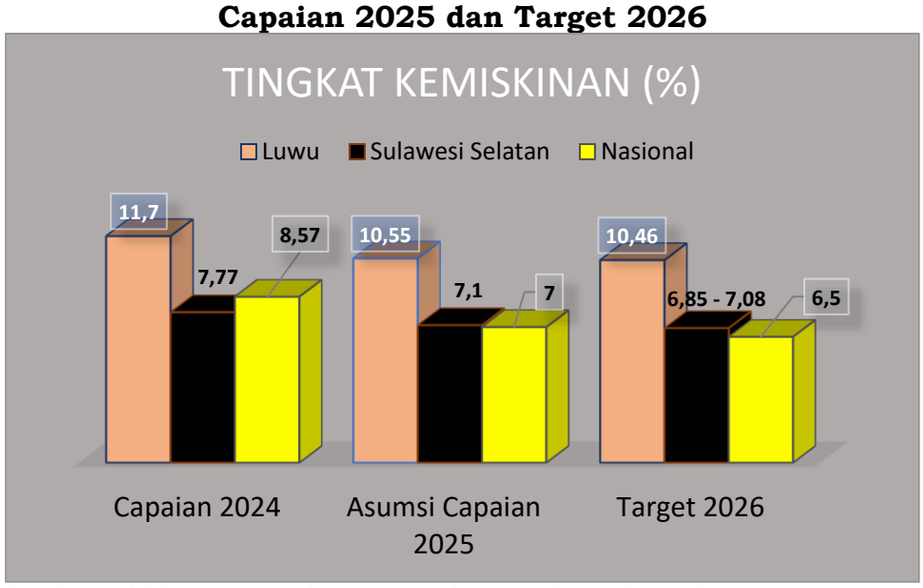
Pemerintah Kabupaten Luwu sangat optimis dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2026, dikarenakan pemerintah akan bekerja keras dalam mengatasi masalah tersebut yakni mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, dan fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja,

fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri.

3.1.1.5.5. *Tingkat Kemiskinan*

Tingkat kemiskinan pada tahun 2024 menurun menjadi 11,70 persen dibanding pada tahun 2023 yang mencapai 12,71 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa kebijakan pemerintah yang mampu menurunkan penduduk miskin diantaranya pemberian bantuan sosial, Pembangunan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur dasar, serta bantuan Pendidikan, Kesehatan, pertanian dan perikanan. Pendapatan Masyarakat Luwu akan terus di tingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat Luwu agar pengeluaran berada pada diatas garis kemiskinan.

Grafik 3.5.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Berdasarkan asumsi bahwa tahun 2025 kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan diupayakan untuk tetap membaik sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Luwu, maka dari itu ditargetkan tingkat kemiskinan menurun sebesar 10,55 persen (2025) dan 10,46 persen (2026). Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mewujudkan manusia yang unggul, pelayanan kesehatan berbasis e-KTP, bantuan pertanian dan perikanan berbasis

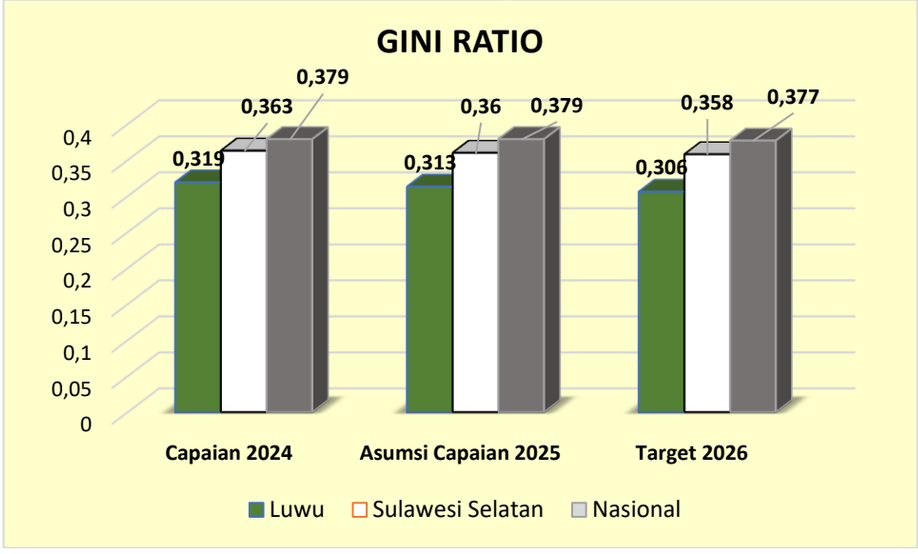
masyarakat serta adanya program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan 2026.

3.1.1.5.6. Gini Rasio

Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai gini rasio yang semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan gini rasio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.

Gini rasio Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebesar 0,319, hal ini masih berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Selatan (0,363). Untuk tahun 2025 Kabupaten Luwu memperkirakan capaian sebesar 0,313 yang artinya semakin mendekati angka 0, hingga penurunan ini terus ditargetkan tahun 2026 sebesar 0,306, hal ini masih tergolong ketimpangan menengah.

Grafik 3.6.
Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu.

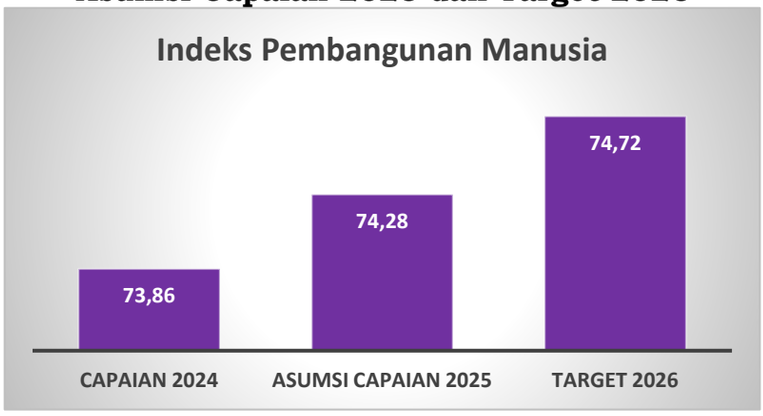
Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan beberapa strategi dalam menurunkan gini rasio yakni sinkronisasi dokumen Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, Membangun infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tertinggal dapat membuka akses bagi masyarakat di sana

untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi, serta Pemberdayaan digital, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal, dapat membuka peluang kerja jarak jauh, meningkatkan akses ke informasi, serta membuka peluang pasar hasil produksi Masyarakat Desa.

3.1.1.5.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 3.7.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Tahun 2024, Asumsi Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Luwu tahun 2024 berada dalam kategori tinggi dengan angka indeks sebesar 73,86. Pemerintah terus optimis untuk meningkatkan pada asumsi capaian

2025 sebesar 74,28 dan ditargetkan tahun 2026 sebesar 74,72. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah dibidang Kesehatan, pendidikan dan pendapatan Masyarakat. Bidang Kesehatan agar meningkatkan Upaya promotive dan preventif, meningkatkan pelayanan Kesehatan ibu anak dan perbaikan gizi. Bidang pendidikan agar mempercepat peningkatan taraf pendidikan di seluruh Masyarakat untuk memenuhi hal seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas. Serta pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill Masyarakat sehingga dapat berusaha sendiri dan memingkatkan pendapatan Masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan Tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** RKP Tahun 2026 menetapkan fokus pada dua kata kunci utama yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik.

Pemerintah fokus pada swasembada pangan yang didukung oleh ***Prioritas Nasional 2***. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Sedangkan untuk ekonomi yang produktif dan inklusif didukung oleh ***prioritas nasional 1***. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); ***prioritas nasional 3***. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal; ***prioritas nasional 4***. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; ***prioritas***

nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; ***prioritas nasional 6***. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; ***prioritas nasional 7***. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; ***prioritas nasional 8.*** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (blue food) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target 2026
1.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80-6,30
		GNI Per Capita (US$)	5.870
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%	37,14
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,67

No.	Sasaran	Indikator	Target 2026
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 – 4,96
		Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,380
		Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan teatap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuan. Dengan demikian, arah kebijakan keaungan daerah akan diuraikan pada maisng-masing komponen keuangan daerah sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa adanya peningkatan PAD pada tahun 2026 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 masih bergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2026 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensfikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Untuk itu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Perluasan dan Pemuktahitan Data Base Pajak dengan melaksanakan uji petik.
2. Perlu dilaksanakan perencanaan nilai-nilai integritas pelatihan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah
3. Dilaksanakannya uji potensi/uji petik dan sosialisasi PERDA/PERBUB yang berlaku di Kab. Luwu tentang pajak dan retribusi daerah.
4. Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait digitalisasi pajak.
5. Dilaksanakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif terhadap OPD pengelola retribusi maupun organisasi yang terlibat dalam penerimaan PAD Kab. Luwu
6. Perluasan pemutakhiran data wajib pada kawasan cepat tumbuh.
7. Kolaborasi dengan berbagai stekholder dalam pemutakhiran data wajib pajak (KPP Pratama, ATR/BPN)
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sertifikasi juru hitung dan juru sita)

9. Pencegahan kebocoran yang terkait pengumpulan pajak langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
10 Pengembangan system informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengumpulan, pemantauan dan analisis data pajak, sehingga mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah dan pajak retribusi daerah serta melakukan analisis yang lebih akurat terhadap potensi pajak yang dapat ditingkatkan (data pajak berbasis spasial)

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

1. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah;
2. Digitalisasi pemungutan/pendaftaran objek pajak dan retribusi daerah;
3. updating data objek pajak PBB P2 dan BPHTB;
4. Penambahan objek pajak dalam hal ini pajak parkir;
5. Peningkatan kulitas sumber daya aparat pengelolah pendapatan;
6. Kordinasi intensif dengan pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), lintas Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
7. Pemanfaatan barang milik daerah yang berpotensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu 2023-2027

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Luwu bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2023-2024, target APBD Pokok Tahun 2025 serta proyeksi pendapatan tahun 2026 dan 2027 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023-2027

Uraian (PP 12/2019)	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Proyeksi	
				2026	2027
PENDAPATAN	**1.476.102.745.149,00**	**1.472.270.281.395**	**1.562.022.082.341**	**1.702.235.574.147**	**1.728.985.660.109**
Pendapatan Asli Daerah	**163.816.263.663**	**146.849.671.320**	**233.481.386.943**	**247.722.125.637**	**265.126.568.201**
Pajak Daerah	31.976.533.528	33.336.750.000	72.833.386.943,00	80.116.725.637	88.128.398.201
Retribusi Daerah	8.199.399.144	11.612.900.000	145.648.000.000,00	156.605.400.000	165.998.170.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.996.278.246	6.400.000.000	5.500.000.000,00	5.500.000.000	5.500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	117.644.052.745	95.500.021.320	9.500.000.000,00	5.500.000.000	5.500.000.000
Pendapatan Transfer	**1.277.720.437.034**	**1.323.346.610.075**	**1.304.735.556.631,00**	**1.428.117.052.805,26**	**1.437.613.926.417,00**
Pendapatan Transfer Pusat	1.195.160.035.030	1.202.223.094.000	1.201.433.498.000,00	1.349.897.931.230	1.357.676.561.178
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.560.402.004	121.123.516.075	103.302.058.631,00	78.219.121.575	79.937.365.239
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**34.566.044.452**	**2.074.000.000**	**23.805.138.767,00**	**26.396.395.705,00**	**26.245.165.491,00**
Hibah	4.223.606.452	2.074.000.000			-
Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	30.342.438.000		23.805.138.767,00	26.396.395.705	26.245.165.491

Sumber: Bapenda dan BAPPEDA 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah merupakan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2026 akan dititik beratkan pada :

1. Pencapaian Visi Misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029;
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan;
4. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;
5. Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Kawasan Permukiman;
6. Penguatan Kelembagaan dan Komptensi ASN;
7. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan pengembangan sektor industri melalui pengembangan komoditas unggulan berupa jagung, padi, durian, rambutan, kopi, kakao, rumput laut, ikan bandeng, serta Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan tangkap;
8. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim;
9. Peningkatan pengendalian inflasi melalui menetapkan harga maksimum serta melakukan pengawasan dan distribusi barang;
10. Penguatan perencanaan mitigasi bencana dan mendorong tersedianya sistem peringatan dini bencana;
11. Peningkatan ketersidiaan dan kualitas infrastruktur pelatihan kerja;
12. Mendukung kebijakan nasional tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencegahan Stunting, Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs);

Dalam rangka mewujudkan Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan BelanjaTransfer dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3.2.2.1.3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja UrusanPemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

1. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

5. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4. Belanja Transfer

3.2.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan epada pemerintah daerah Iainnya dalam

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Nomor 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2025 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan tersebut adalah Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2025 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019

Uraian (PP12/2019)	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Proyeksi	
				2026	2027
BELANJA	**1.499.998.049.538**	**1.569.395.658.038**	**1.593.287.451.679,00**	**1.701.235.574.148**	**1.723.985.660.109**
Belanja Operasi	**1.011.443.186.661**	**1.051.280.109.148**	**1.129.757.672.243,36**	**1.167.330.779.359**	**982.360.809.423**
Belanja Pegawai	604.323.502.511	640.891.196.834	686.630.180.019,40	665.139.408.316	503.122.763.979
Belanja Barang dan Jasa	393.728.787.951	360.339.697.410	426.646.402.772,52	487.834.065.579	468.738.045.444
Belanja Hibah	12.952.396.199	47.658.824.904	16.268.089.451,44	14.126.805.464	10.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	438.500.000	2.390.390.000	213.000.000,00	230.500.000	500.000.000
Belanja Modal	**236.917.577.894**	**246.096.681.236**	**175.589.803.532,64**	**266.405.196.366**	**454.686.267.267**
Belanja Tak Terduga	**3.000.000.000**	**17.017.161.000**	**28.819.286.094,00**	**5.000.000.000**	**20.000.000.000**
Belanja Transfer	**248.637.284.983**	**255.001.706.654**	**259.120.689.809,00**	**262.499.598.424**	**266.938.583.419**
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.497.877.983	4.884.786.000	8.768.838.809,00	9.282.172.563	8.902.212.564
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	244.139.407.000	250.116.920.654	250.351.851.000,00	253.217.425.861	258.036.370.855

Sumber: BKAD dan BAPPEDA 2025.

sebagaiman Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.1.702.235.574.145 yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.167.330.779.359, Belanja Modal sebesar Rp.266.405.196.366, Belanja Tidak Terduka sebesar Rp. 5.000.000.000, serta Belanja Transfer sebesar Rp. 262.499.598.424. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2026.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.729.816.218.694 atau 43 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 1.702.235.574.145 dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2026

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	348.900.994.781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	143.487.333.461	Dinas Kesehatan
			134.464.872.250	RSUD Batara Guru
3	Pekerja Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	81.979.784.287	Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.250.132.389	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.737.000.000	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	2.481.037.018	Dinas Perumahan dan Pemukiman

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.378.816.726	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	364.696.593	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penanggulangan Bencana	293.070.947	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	478.480.242	Dinas Sosial
TOTAL			**729.816.218.694**	

Sumber: data diolah tim penyusun Bappeda, 2025

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkanatas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran telah menentukan porsi besaran anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sebesar Rp.1.671.351.144.652 atau 98% persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp.1.702.235.574.145 untuk membiayai 70 program prioritas yang rinciannya telah tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah							
	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase peningkatan omzet UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4,5	4.092.162.854	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
		Meningkatnya Skala Usaha Pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		463.975.303	
		Meningkatnya kunjungan wisata	Tingkat Hunian Akomodasi, makanan dan minuman	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	0,45	419.665.994	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	2	149.973.770	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	63,63	208.130.092	Dinas Perdagangan
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	53,52	830.886.940	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
			Tingkat produktivitas tenaga kerja		63,15		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Program penempatan tenaga kerja	50,32	302.950.953	
	Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri		356.568.800	UNSUR KOPERASI DAN UMKM
		Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	80,23	221.399.026	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	10,23	275.090.731	
		Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10,75	11.646.698.953	URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat							
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	66	478.480.242	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial	100	77.997.969	
		Terpenuhinya jaminan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program hubungan industrial	20,25	2.352.527.773	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif							
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase SOP yang diterapkan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	747.628.550.075	Seluruh OPD
		Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	80	7.943.597.017	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	9.613.320.145	Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggaraan pengawasan	90	3.004.978.806	Inspektorat Daerah
			Persentase tindak lanjut temuan BPK		85		
			Persentase tindak lanjut temuan BPKP		90		
			Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi		90		
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani		100		
		meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	75	1.247.504.574	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	100	3.394.697.735	BKPSDM
	meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	876.390.997	Bappelitbangda
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra-PD		100		
		meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Program pengelolaan keuangan daerah	85	270.515.075.256	BKAD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu		98		
			Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu		100		
		meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	14,68	2.151.664.020	BAPENDA
	Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	21,68	1.430.147.636	Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan statistik
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	83,1	1.174.431.740	
			Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		57		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	80,22	587.149.160	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak		34,5		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Hasil kelitbangan yang diimplementasikan	Program penelitian dan pengembangan daerah	100	835.945.758	Bappelitbangda
		meningkatnya hasil inovasi dan riset pemerintah daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program riset dan inovasi daerah	100	207.126.865	
		meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	70,23	837.213.860	BKPSDM
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100	2.378.816.726	Satpol PP
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100		
		meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penangan konflik sosial	80	622.090.975	Kesbangpol

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	100	137.757.066.240	Dinas Pendidikan
			Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		100		
			Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		100		
		meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum	100	193.903.680	
		meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga pendidik	80	276.046.112	
		meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase tingkat kegemaran membaca	Program pembinaan perpustakaan	68,21	783.848.934	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
	meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	237.952.205.711	Dinas Kesehatan
		meningkatnya pelayanan dalam upaya pencegahan penyakit menular					
		menurunnya angka stunting					
		meningkatnya kecamatan dengan puskesmas yang memiliki layanan rawat inap dan terakreditasi					
		Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase Peningkatan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	89,23	398.771.100	RSUD Batara Guru
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	30,23	1.417.539.000	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar		80,22		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	23	200.590.000	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	2,3	530.713.667	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	30	2.090.868.960	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30	389.410.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	Program pengembangan daya saing keolahragaan	20	4.444.705.320	
	meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Meningkatnya sarana, prasarana	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Program kesejahteraan Rakyat	78,22	9.613.320.145	Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		dan aktivitas keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi		80,33		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kearifan lokal	Program pengembangan kebudayaan	75,62	1.502.463.798	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan							
	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian						Dinas Pertanian
		Meningkatnya produksi hewan ternak	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9,21	11.646.698.953	
		Meningkatnya bibit unggul yang terdistribusi ke petani	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		10		
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		10,76		
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		11,89		
		meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	30,22	1.582.458.523	
	Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,5	4.285.572.714	Dinas Perikanan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	0,5	2.861.225.422	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	56,45	490.808.019	
			Persentase produk UMKM perikanan		80,67		
	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan bergizi	Persentase jumlah cadangan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	46	41.004.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya ketahanan pangan desa	Skor pola pangan harapan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	81,34	548.347.590	
			Persentase desa rawan pangan		80,75		
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah							
	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	33,64	81.979.784.287	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang
		Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	60,35	7.329.345.664	Dinas Perhubungan
	Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	71	12.250.132.389	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
	produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,82	2.737.000.000	
	Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	81,82	5.705.888.872	
		Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	10,16	1.386.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
		meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman	4,78	2.481.037.018	
		Meningkatnya ketersediaan tanah lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaiakn tepat waktu	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	20,55	2.460.000.000	Dinas Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa							
	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	4,83	3.883.315.306	Dinas pemberdayaan dan masyarakat desa
		Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa		30,25		
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	10	1.070.000.000	
Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim							
	Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	100	293.070.947	Badan penanggulangan bencana daerah
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100		
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	100	389.022.548	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
			persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100		
		meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	364.696.593	Dinas Pemadam kebakaran
			Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit		30,46		
		meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Program penangan bencana	100	293.972.130	Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	77,48	106.413.026	Dinas lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Program pengelolaan persampahan	24,02	5.335.800.998	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	94,15	1.485.254.142	PUTR
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian akses sanitasi	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	77,88	6.824.200.900	

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mana nomenkelatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Tabel 3.6.
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	486.907.696.576
DINAS KESEHATAN	228.236.181.531
RSUD BATARA GURU	162.312.186.288
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	143.358.437.440
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.612.486.791
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.955.198.032
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	9.601.573.995
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.645.891.869
DINAS SOSIAL	5.486.556.245
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	9.460.086.075
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.708.432.930
DINAS KETAHANAN PANGAN	4.486.911.701
DINAS PERTANAHAN	4.639.791.398
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.895.592.025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.729.305.702
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.694.397.859
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.678.685.985
DINAS PERHUBUNGAN	12.623.553.883
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.563.366.889
DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	4.482.933.523

PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.301.949.252
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.140.525.664
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.445.826.790
DINAS PERIKANAN	12.595.666.543
DINAS PARIWISATA	6.144.080.660
DINAS PERTANIAN	58.443.556.543
DINAS PERDAGANGAN	7.073.115.022
SEKRETARIAT DAERAH	44.000.000.000
SEKRETARIAT DPRD	26.457.784.881
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	8.721.589.006
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	278.971.386.141
BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.115.372.050
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.203.438.084
INSPEKTORAT DAERAH	12.528.075.177
KECAMATAN BAJO	2.886.564.699
KECAMATAN BAJO BARAT	1.480.957.120
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	1.780.007.342
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	1.884.224.086
KECAMATAN BELOPA	5.083.137.605
KECAMATAN BELOPA UTARA	3.271.353.437
KECAMATAN BUPON	2.271.638.252
KECAMATAN KAMANRE	2.121.053.331
KECAMATAN LAMASI	3.109.003.869
KECAMATAN LAMASI TIMUR	1.348.640.740
KECAMATAN LAROMPONG	2.129.262.356
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	2.057.543.388
KECAMATAN LATIMOJONG	1.670.893.471
KECAMATAN PONRANG	4.432.752.339
KECAMATAN PONRANG SELATAN	2.609.806.991

PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2026
KECAMATAN SULI	2.080.485.515
KECAMATAN SULI BARAT	1.713.323.857
KECAMATAN WALENRANG	3.279.997.958
KECAMATAN WALENRANG BARAT	2.659.925.486
KECAMATAN WALENRANG TIMUR	1.815.643.046
KECAMATAN WALENRANG UTARA	3.418.999.290
KECAMATAN BUA	4.298.802.021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.609.925.400
Total	**1.701.235.574.148**

Sejak berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada tahun 2015, Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Belajar dari pengalaman MDGs lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dan euphoria implementasi SDGs masyarakat dunia.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalanpersoalan

Warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagaiwujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Sehinggga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.876.622.786.915 atau 51 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp.1.702.235.574.145 untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 3.7.
Alokasi Anggaran Program Pendukung TPB/SDGs

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
1	Tujuan 1	1	Pengelolaan Pendidikan	137.757.066.240
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	277.952.205.711
		3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.737.000.000
		4	Program Pengembangan Perumahan	389.022.548
		5	Program Kawasan Permukiman	2.481.037.018
		6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.386.000.000
		7	Program Pemberdayaan Sosial	77.997.969
		8	Program Rehabilitasi Sosial	113.941.253
		9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	478.480.242

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.762.695.060
		11	Program Penanggulangan Bencana	293.070.947
		12	Program Pencatatan Sipil	293.070.947
		13	Program Pengendalian Penduduk	530.713.667
		14	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.203.872.017
		15	Program Pendaftaran Penduduk	364.696.593
2	Tujuan 2	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Tanpa Kelaparan : Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	Program Penanganan Bencana	293.972.130
		5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	548.347.590
		6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.260.592
		7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	19.945.823.210
		8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.646.698.953
		9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99.999.729
3	Tujuan 3	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada tujuan 1

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.417.539.000
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	398.771.100
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
4	Tujuan 4	1	Pengelolaan Pendidikan	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Pendidikan Berkualitas : menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	2	Program Pengembangan Kurikulum	193.903.680
		3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.642.595
5	Tujuan 5	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	111.392.305
	Kesetaraan Gender :	2	Program Perlindungan Perempuan	99.999.797
	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Telah dianggarkan pada tujuan 2
6	Tujuan 6	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.250.132.389
	Air Bersih dan Sanitasi Layak :	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Telah dianggarakan pada tujuan 1
	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	106.413.026
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	599.989.328
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	398.771.100

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		7	Program Perencanaan Lingkungan	34.813.770
7	Tujuan 7	1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarakan pada tujuan 1
	Energi Bersih dan Terjangkau :			
	Menjamin akses energi yang			
	terjangkau, andal, berkelanjutan, dan			
	modern untuk semua;			
8	Tujuan 8	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Telah dianggarkan pada tujuan 2
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Telah dianggarkan pada tujuan 2
	Ekonomi :			
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja	3	Program Penyuluhan Pertanian	1.582.458.523
	yang produktif dan menyeluruh, serta	4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.285.572.714
		5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.861.225.422
		6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	490.808.019
		7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	419.665.994
		8	Program Pemasaran Pariwisata	247.739.290
		9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	149.973.770

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		10	Program Perizinan Usaha Pertanian	-
		11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-
		12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	208.130.092
		13	Program Pengembangan Ekspor	61.503.940
		14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-
		15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	356.568.800
		16	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	830.886.940
		17	Program Penempatan Tenaga Kerja	302.950.953
		18	Program Hubungan Industrial	2.352.527.773
9	Tujuan 9	1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur :	2	Program Pengelolaan Pelayaran	64.876.500
	meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.329.345.664
10	Tujuan 10	1	Program Pemberdayaan Sosial	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Berkurangnya kesenjangan :	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.705.888.872

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		5	Program Penyelenggaraan Jalan	81.979.784.287
		6	Program Pengembangan Perumahan	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		7	Program Kawasan Permukiman	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		10	Program Pengelolaan Pendidikan	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		11	Program Penempatan Tenaga Kerja	302.950.953
		12	Program Hubungan Industrial	2.352.527.773
11	Tujuan 11	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Telah dianggarakan pada tujuan 10
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan.	2	Program Pengembangan Perumahan	Telah dianggarakan pada tujuan 10
	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	3	Program Kawasan Permukiman	Telah dianggarakan pada tujuan 10
		4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Telah dianggarakan pada tujuan 10
		5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		6	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarakan pada tujuan 1
		7	Program Pengelolaan Persampahan	5.335.800.998
12	Tujuan 12	1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.130.889

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan :	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang	3	Program Pengelolaan Persampahan	Telah dianggarkan pada tujuan 11
	berkelanjutan;	4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Telah dianggarkan pada tujuan 11
13	Tujuan 13	1	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarakan pada tujuan 1
	Penanganan Perubahan Iklim :	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi			
	perubahan iklim dan dampaknya			
14	Tujuan 14	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Telah dianggarkan pada tujuan 8
	Ekosistem Lautan :	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Telah dianggarkan pada tujuan 8
	Melestarikan dan memanfaatkan secara			
	berkelanjutan sumber daya kelautan dan			
	samudera untuk pembangunan berkelanjutan			
15	Tujuan 15	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,mengelola hutan secara lestari, menghentikan	2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Telah dianggarkan pada tujuan 11

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
	penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan Keanekaraman hayati			
16	Tujuan 16	1	Program Perlindungan Khusus Anak	99.999.788
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-
	yang Tangguh :	3	Program Perlindungan Perempuan	Telah dianggarkan pada tujuan 5
	Menguatkan masyarakat yang inkluif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,	4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	270.515.075.256
	menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.004.978.806
		6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	722.479.864
		7	Program Pendaftaran Penduduk	587.149.160
		8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.389.600.920
17	Tujuan 17	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.151.664.020
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan :	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	747.180.430
		3	Program Pendaftaran Penduduk	Telah dianggarkan pada tujuan 1
Total Anggaran				**876.622.786.915**

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2023-2027

Uraian (PP12/2019)	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Proyeksi	
				2026	2027
Penerimanaan Pembiayaan	60.206.662.407,00	23.360.119.134	31.265.369.338	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
Pembiayaan Netto	60.206.662.407	23.360.119.134	31.265.369.338	-1.000.000.000	-1.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kab.Luwu 2025.

3.2.4. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Luwu selain bersumber dari APBD Kabupaten Luwu, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan berupa Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati Luwu yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 beserta permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2011-2031, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan potensi sektor unggulan di Kabupaten Luwu.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi Kabupaten Luwu selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun pelaksanaan 2026 yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, maka perlu penjabaran lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu rumusan tujuan dan sasaran RKPD berpedoman pada atau diturunkan secara langsung dari RPJMD. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan implementasi pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

Visi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah ***"LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS".*** Sasaran rumusan Visi tersebut dijabarkan pada 3 (Tiga) pokok visi yang menjadi pilar utama dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN
Luwu Unggul, Berkarakter Dan Berbasis Agribisnis	Unggul	Mewujudkan Kabupaten Luwu yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan pengembangan lokasi yang spesifik berdasarkan karakter lingkungan dan tersebar serta didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
	Berkarakter	Membangun pribadi Masyarakat yang memiliki sikap berahlak mulia, berkesadaran, sikap mental dan kualitas kehidupan, religius yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang memiliki nilai etika, disiplin, bertanggungjawab, cinta tanah air, berpikir kritis hormat pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan
	Agribisnis	Berkembangnya perekonomian pedesaan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu.

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

Adapun Misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif;
3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal;
4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan;

6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa;
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan melalui sinergi yang harmonis antara daya dukung sosial dan sumber daya potensial. Daya dukung sosial sebagai pilar keukuata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup modal sosial yang terjalin erat, seperti kepercayaan, gotong royong, dan partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Pembangunan. Sedangkan sumber daya potensial sebagai motor penggerak yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Ini mencakup kekayaan alam yang melimpah yakni pertanian, perikanan, industri dan pertambangan	Unggul
2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaran pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional	Berkarakter
3	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya visi berkarakter. Oleh karena itu pembangunan harus diawali	Berkarakter

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
		dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan	
4	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	Pembangunan agribisnis yang berkelanjutan agar diupayakan pengembangan sistem agribisnis tidak hanya focus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi untuk suatu daerah, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini dilakukan dengan pendekatan holistic yang mengentegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam seluruh rantai nilai agribisnis mulai dari produksi hulu, hingga pengolahan, pemasaran dan konsumsi hilir	Agribisnis
5	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan merupakan pondasi utama kemajuan suatu daerah yang akan membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur bertujuan mendukung pelayanan dasar untuk meningatkan akses, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas.	Unggul
6	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa	Pembangunan desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata Kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa agar mengidentifikasi daan memetakan secara komprehensif seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya. Pengembangan ekonomi local bebrbasis potensi dan mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Agribisnis
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan	Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara	Unggul

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	hidup dan mitigasi bencana	bertanggungjawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan Masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem	

Sumber : RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD, tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026

NO.	RPJMD TAHUN 2026				RKPD TAHUN 2026			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	75,09	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	75,09
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6,39		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6,39
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,05		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,05
		Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)]	6,29		Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)]	6,29
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Ribu. Rp)	13.789	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Ribu. Rp)	13.789
		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	10,46		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	10,46
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	57,9	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	57,9
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,48		Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,48

NO.	RPJMD TAHUN 2026				RKPD TAHUN 2026			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,51		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,51
		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,4		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,4
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,87			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,87
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,04		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,04
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	74,6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	74,6
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	81,71		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	81,71
		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	83,79		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	83,79
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	61,38		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	61,38
			Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	49,09			Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	49,09
		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,71		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,71
5	Meningkatnya usaha		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	50,66	Meningkatnya usaha		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	50,66

NO.	RPJMD TAHUN 2026				RKPD TAHUN 2026			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	agribisnis yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Biru (Angka)	111,98	agribisnis yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Biru (Angka)	111,98
		Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7		Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7
			Nilai Tukar Petani (Angka)	103,44			Nilai Tukar Petani (Angka)	103,44
		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	10,36		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	10,36
			Nilai Tukar Nelayan (Angka)	111,03			Nilai Tukar Nelayan (Angka)	111,03
		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	83,05		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	83,05
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	2,9	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	2,9
		Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	14,98		Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	14,98
		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,75		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,75

NO.	RPJMD TAHUN 2026				RKPD TAHUN 2026			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
			akses rumah tangga terhadap air minum am an (Angka)	31			akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	31
		Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	8,36		Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	8,36
7	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	74,27	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	74,27
		Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	21,74		Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	21,74
8	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	15	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	15
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	188		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	188
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	77,02		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	77,02

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Tahun 2026 adalah Gambaran prioritas Pembangunan tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan prioritas Pembangunan nasional tahun 2026, prioritas Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 dan program Pembangunan daerah tahun 2026 pada rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2026 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan Tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 yaitu **Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan public serta infrastruktur dalam mendukung peningkatan pendapatan Masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah**.

Pemerintah fokus pada swasembada pangan yang didukung oleh ***Prioritas Nasional 2***. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Sedangkan untuk ekonomi yang produktif dan inklusif didukung oleh ***prioritas nasional 1***. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

(HAM); ***prioritas nasional 3***. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal; ***prioritas nasional 4***. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; ***prioritas nasional 5***. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; ***prioritas nasional 6***. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; ***prioritas nasional 7***. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; ***prioritas nasional 8.*** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

RKP TAHUN 2026				RKPD KABUPATEN LUWU TAHUN 2026			
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**No.**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
1.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80-6,30	1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6,39
		GNI Per Capita (US$)	5.870	2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,05
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%	37,14	3	Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)]	6,29
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,67	4	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	10,46
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,48

RKP TAHUN 2026				RKPD KABUPATEN LUWU TAHUN 2026			
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**No.**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 – 4,96	6	meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,51
		Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,380	7	Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,4
		Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,87
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	8	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,04
				9	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	81,71
				10	meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	83,79
				11	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	61,38

RKP TAHUN 2026				RKPD KABUPATEN LUWU TAHUN 2026			
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**No.**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
					pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	49,09
				12	meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,71
				13	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7
						Nilai Tukar Petani (Angka)	103,44
				14	Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	10,36
						Nilai Tukar Nelayan (Angka)	111,03
				15	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	83,05
				16	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	14,98

RKP TAHUN 2026				RKPD KABUPATEN LUWU TAHUN 2026			
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**No.**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
				17	Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,75
						akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	31
				18	Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	8,36
				19	Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	21,74
				20	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	188
				21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	77,02

Sumber: Rancangan RKP 2026

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP). Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5.
Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

TEMA RKPD PROVINSI	TEMA RKPD KABUPATEN
Peningkatan kualitas SDM yang berakhlak dan infrastruktur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan public serta infrastruktur dalam mendukung peningkatan pendapatan Masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah

Tabel 4.6.
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
1	Meningkatnya kualitas Modal Manusia		Indeks Modal Manusia (Angka)	0,53	1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	75,09
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara Merata	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,06			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6,39
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua secara Merata dan Inklusif	Rata rata lama sekolah (Tahun)	9,59-9,60			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,05
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,87 - 13,88			Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)]	6,29
			Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi (%)	17,22	2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Ribu. Rp)	13.789

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
2	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif		Indeks Ketahanan Nasional (Angka)	3,09			Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	10,46
		Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi (Angka)	83,54	3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	57,9
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Pemajuan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	79,46			Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,48
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)	56,99 - 57,11			meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,51
			Indeks Perlindungan Anak (Angka)	61,97 - 63,48			Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,4
		Meningkatnya Kualitas Generasi Muda dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	56,98				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,87
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,336 - 0,331			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,04

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**		**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 6,5	4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	74,6
			Rasio Gini (Angka)	0,358			Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	81,71
			Indeks Ekonomi Biru (Angka)	84,06			meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	83,79
		Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	13,13			Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	61,38
			Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%)	1				Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	49,09
			Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi pangan (%)	6,52			meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,71
			Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	86,01	5	Meningkatnya usaha agribisnis		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	50,66

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
		Meningkatnya Integrasi Ekonomi Regional dan Global	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	10,9		yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Biru (Angka)	111,98
		Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi	Tingkat Inflasi (%)	3,05-3,72			Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7
			Inklusi Keuangan (Angka)	85,03				Nilai Tukar Petani (Angka)	103,44
		Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri (%)	34,05			Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	10,36
		Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%)	6,85 - 7,08				Nilai Tukar Nelayan (Angka)	111,03
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,64 - 4,03			Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	83,05

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
4	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital		Indeks Transformasi Digital Nasional (Angka)	55,06	6	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	2,9
		Meningkatnya Jangkauan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Pilar Infrastruktur Indeks TDN (Angka)	62,12			Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	14,98
		Meningkatnya Ketrampilan Digital Masyarakat	Nilai Pilar Masyarakat Indeks TDN (Angka)	62,12			Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,75
5	Meningkatnya kualitas tata kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	81,86				akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	31

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**		**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP (Angka)	70,03			Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	8,36
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,44	7	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	74,27
		Meningkatnya Inovasi Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	61,5			Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	21,74
6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan		Indeks williamson (Angka)	0,54	8	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	15
			indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) (Angka)	77,82			Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	188

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**		**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**
			Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (%)	33,46			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	77,02
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur (Angka)	88,83					
		Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (Angka)	134,20 - 133,12					

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan arah kebijakan serta menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu: **"Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik serta infrastruktur dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya";
2. Layanan public yang professional dan bermartabat "Luwu Malebbi";
3. Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing;
4. Pelopor kedaulatan pangan " Luwu Mappatuwo";
5. Infrastruktur merata dan berkelanjutan; dan
6. Desa mandiri; serta
7. Lingkungan yang sehat dan Tangguh bencana "Luwu Lestari"

Untuk melihat sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Luwu, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
Desa mandiri	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

4.2.3.1 Target Indikator Makro Pembangunan

Perekonomian suatu daerah tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi yang dampaknya mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Ekonomi makro memberikan penjelasan tentang perubahan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada masyarakatnya. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui serangkaian kebijakan. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah terkait perekonomian, dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, untuk menjadi tolok ukur dalam menentukan kebijakan maupun mengukur keberhasilan, untuk masing-masing aspek ditetapkan suatu target.

Dalam pencapaian target indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi daerah dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya. adapun tabel keselarasan target indikator makro pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8-6,5	5,23	6,39
2.	PDRB Per Kapita (juta)	86,9-89,5	65,71	75,09
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota			3,34
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,85 - 7,08	10,66-9,76	10,46
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,64 - 4,03	3,96	3,05
6.	Rasio Gini	0,358	0,306	0,306
7.	Indeks Modal Manusia *)	0,53	-	-

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indeks Pembangunan Manusia	-	74,72	74,72
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca(%)	33,46	23,22	23,22
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,82	-	77,02

Sumber : Tim Penyusun RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026

4.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan yang termasuk dalam program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3405 Tahun 2024 dan format penentuan outcome program telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Adapun Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.9
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2026

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
1	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	59,73	75,09					
			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	4,36	6,39	Meningkatnya skala usaha pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	4,5	URUSAN KOPERASI DAN UMKM
							Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2,3	
							Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	0,45	URUSAN PARIWISATA
							berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2	URUSAN PARIWISATA

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	63,63	URUSAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat penganggura n terbuka (%)	4,14	3,05	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	53,52	URUSAN KETENAGAKERJAAN
								Tingkat produktivitas tenaga kerja		63,15	
							meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Program penempatan tenaga kerja	50,32	
			Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	4,09	6,29	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30,25	UNSUR KOPERASI DAN UMKM
							Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	80,23	URUSAN PENANAMAN MODAL

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	10,23	
							Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10,75	URUSAN PERTANIAN
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran perkapita (Ribu. Rp)	11.121	13.789					
			Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	11,71	10,46	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	66	URUSAN SOSIAL
							Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial	100	
							Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	URUSAN KESEHATAN

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan/ penyedia kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Program hubungan industrial	20,25	URUSAN KETENAG AKERJAAN
2	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	57,1	57,9					
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,18	62,3	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase SOP yang diterapkan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	Seluruh OPD
							Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	80	URUSAN PEMERINT AHAN
							Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan		100	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,2	
							Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik		60,51	
							Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		100	
							Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggaraan pengawasan	90	URUSAN PENGAWASAN
								Persentase tindak lanjut temuan BPK		85	
								Persentase tindak lanjut temuan BPKP		90	
								Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi		90	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
								Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani		100	
							meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	75	URUSAN PEMERINTAHAN
							Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematanagan UKPBJ		9	
							Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	100	URUSAN KEPEGAWAIAN
							Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		12	
							Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		7	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
			meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	79,92	81,51	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase keselarasan nomenklatur dan anggaran antara program RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	URUSAN PERENCANAAN
								Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja program "Sangat Tinggi"		100	
							meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran	Program pengelolaan keuangan daerah	85	URUSAN KEUANGAN
							meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	14,68	
			Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	2,6	3,4	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	21,68	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	83,1	
								Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		57	
							Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	80,22	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
								Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		34,5	
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,22	44,87	Meningkatnya jumlah kelitbangan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	100	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							meningkatnya kualitas riset dan ekosistem inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada tahun pelaporan	Program riset dan inovasi daerah	100	
							meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	70,23	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,49	2,04	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masayarakat berkat Aparatur yang Berkompeten serta Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Daerah	Persentase capaian SPM bidang pelayananTrantibum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penangan konflik sosial	80	URUSAN KESBANG POL
3	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	73,86	74,6					
			Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	73,78	83,79	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	100	URUSAN PENDIDIKAN
								Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		100	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
								Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		100	
							meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum	100	
							meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga pendidik	80	
							meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang ber Standar Nasional Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	68,21	URUSAN PERPUSTAKAAN
			meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	82,23	83,79	Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	URUSAN KESEHATAN

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase Peningkatan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	89,23	
							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	80,22	
			Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan keluarga (Angka)	56,07	61,38	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	23	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2,3	
							Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	30	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
				Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	60,23	60,67	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
							meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	Program pengembangan daya saing keolahragaan	20	
			meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks kerukunan umat beragama (Angka)	73,83	74,22	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	Program kesejahteaan Rakyat	2,3	Urusan Pemerintahan
							Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik		78,22	
							Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		100	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan	75,62	URUSAN KEBUDAYAAN
4	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks ekonomi hijau (Angka)	49,82	50,66					
				indeks ekonomi biru (Angka)	90,31	111,98					
			Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	6,1	7	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9,21	Urusan Pertanian
								Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		10	
								Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		10,76	
								Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		11,89	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
				Nilai Tukar Petani (NTP) (Angka)	100,66	103,44	meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	30,22	
			Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas perikanan (Rp/Jiwa)	8,04	10,36	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,5	Urusan Perikanan
							Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	0,5	
				Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Angka)	109,22	111,03	Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	56,45	
			Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan pangan (Angka)	82,23	83,05	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	46	Urusan Ketahanan Pangan
							Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		0,57	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
5	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	2,63	2,9					
			Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas infrastruktur (%)	13,2	14,98	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	33,64	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
							Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat pelayanan lalu lintas (V/C)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	60,35	Urusan Perhubungan
			Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,9	10,75	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	71	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
				Akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	21,71	31	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,28	
			Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	0,14	8,36	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	81,08	
							Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	10,16	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
							meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman	4,78	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
							Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	33	Urusan Pertanahan
6	Desa mandiri	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks desa (Angka)	70,32	74,27					
			Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	14,49	21,74	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	55	Urusan pemberdayaan dan masyarakat desa
							Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa		10	
							Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	23	
7	Lingkungan yang sehat dan tangguh	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	10	15					

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
	bencana "Luwu Lestari"		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Angka)	186,59	188	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100	
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	
							terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	100	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
								persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan		100	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
								rumah yang layak huni			
							meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	Urusan Pemadam kebakaran
								Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit		30,46	
							meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Program penangan bencana	100	Urusan Sosial
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	48,48	77,02	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	77,48	Urusan lingkungan hidup

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2026	URUSAN
				(IKLHD) (Angka)			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Program pengelolaan persampahan	24,02	
							Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	94,15	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
							Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampaham regional	77,88	

4.2.3.3. Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan nasional harus terstruktur dalam program pembangunan daerah. Adapun dukungan program prioritas pembangunan daerah terhadap program dan kegiatan prioritas nasional tahun 2024 sebagai mana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10.
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	8	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	15000	15000.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	240	240.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	2	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
5	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2500	2500.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur	Unit	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p				
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
9	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
11	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
12	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			nilai tambah di dalam negeri.	pangan, energi, dan air									
13	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
15	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
16	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
17	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	90	500.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			nilai tambah di dalam negeri.	pangan, energi, dan air									
19	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	90	500.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
22	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
23	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
24	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	50.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
25	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	20	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
26	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	2	6.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
27	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau,	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dan berkelanjutan		UTILITAS UMUM (PSU)							: APIP :
28	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
29	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
30	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	2	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		N MASYARAKAT		pemadam kebakaran sesuai standar									
31	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	2	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
32	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
33	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
34	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
35	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	kebakaran sesuai standar									
36	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
37	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
38	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	Lembaga			PROVINSI : KABKOTA : SKPD

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				: APIP :
39	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
40	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
41	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
42	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
43	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
44	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	155.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
45	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	155.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
46	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	64	64	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
47	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	64	64	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
48	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	Perusahaan	4	4	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			pemberantasan kemiskinan.	tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja					Terdaftar di WLKP Online				
49	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	4	4	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
50	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	13.616	13.616	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
51	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	13.616	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
52	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			penyandang disabilitas.										
53	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
54	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
55	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
56	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	210	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
57	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
58	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
59	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
60	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
61	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
62	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	10	10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
63	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
64	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
65	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
66	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
67	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
68	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
69	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
70	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	5000	5000	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
71	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	5000	5000	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								peraturan perundangan					
72	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
73	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			masyarakat yang adil dan makmur.										
74	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
75	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
76	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	Laporan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
77	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kependudukan berbasis digital									
78	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
79	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
80	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	42	42.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
81	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	42	42.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
82	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
83	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	227	227	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
84	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	22	22	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
85	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok	9		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
86	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	20	20.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
87	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	20	20.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
88	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
89	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
90	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
91	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
92	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
93	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
94	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
95	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
96	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	3	3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
97	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	3	3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
98	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	35	35	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			dan penyeludupan.										
99	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	35	35	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
100	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	67	67	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
101	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	67	67	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
102	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
103	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
104	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
105	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung	Aplikasi	1	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		DAN INFORMATIKA	manusia (HAM).	digital di daerah				Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Layanan Pemerintah Daerah				: APIP :
106	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	107	55.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
107	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	107	55.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
108	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
109	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
110	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	227	227	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
111	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangk	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	257	257	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			an industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
112	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	1000	50.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
113	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	1000	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					n melalui Pendidikan dan Pelatihan					
114	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	4	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
115	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	20	500.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
116	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	60	60.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
117	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			penyandang disabilitas.										
118	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
119	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	75	45.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
120	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
121	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	40	75.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			dan penyeludupan.										
122	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	80	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
123	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	57	35.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
124	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	57	35.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintah Daerah									
125	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
126	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
									menjalankan penyelenggar				
127	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
128	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
129	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	50.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
130	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	50.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
131	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	5	5	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
132	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	5	5	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			masyarakat yang adil dan makmur.										
133	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	3	3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
134	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	3	3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			masyarakat yang adil dan makmur.										
135	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	53	53	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
136	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	53	53	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			yang adil dan makmur.										
137	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	1000	1000	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
138	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	1000	1000	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			yang adil dan makmur.										
139	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	23	23.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
140	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	23	23	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			yang adil dan makmur.										
141	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
142	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			yang adil dan makmur.										
143	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	20	20	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
144	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
145	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
146	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
147	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	122	122	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
148	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
149	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	20	20	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
150	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
151	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
152	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Nasional									
153	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
154	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
155	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			produksi melalui peran aktif koperasi.										
156	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
157	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	5	5.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
158	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
159	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Nasional		KEKAYAAN INTELEKTUAL							
160	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
161	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
162	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			produksi melalui peran aktif koperasi.										
163	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
164	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
165	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	180	180	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
166	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
167	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	22	22	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
168	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
169	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
170	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	6	6	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
171	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	3	3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
172	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
173	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			di dalam negeri.										
174	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
175	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	4	4	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
176	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
177	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
178	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	37	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
179	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Orang	300	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
						BUDAYA POLITIK		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				
180	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	300	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
181	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	300	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
182	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORT EKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
183	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
184	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

Tabel 4.6.
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2		Transformasi digital layanan publik prioritas		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
3		Transformasi digital layanan publik prioritas		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	
4		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
6		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
7	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
8		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
9		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
10	Prioritas Nasional 2	Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
11		Konservasi sumberdaya air		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
12		Konservasi sumberdaya air		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
13		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
14		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
15		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
16	Prioritas Nasional 2	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
17		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
18		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
19		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
20		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
21		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
22		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
23		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
24		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
25		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
26		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
27		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
28		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
29		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
30		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
31		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
32		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
33		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Ekstraksi Garam	
34		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
35		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
36		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
37		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
38		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
39		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
40	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
41		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
42		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
43	Prioritas Nasional 2	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
44		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
45		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
46		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
47		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
48	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
49		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
50		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
51		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
52		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
53		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
54	Prioritas Nasional 6	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
55		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
56		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
57		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
58		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
59		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
60	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
61		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
62		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
63		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
64		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
65		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	
66		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
67		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
68		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
69		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
70		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
71		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Akses Internet	
72		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
73	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
74		Penguatan karakter dan jati diri bangsa		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
75		Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
76		Penguatan karakter dan jati diri bangsa		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
77	Prioritas Nasional 3	Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
78		Pengembangan koperasi sektor produksi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
79		Pengembangan koperasi sektor produksi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
80	Prioritas Nasional 8	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
81		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
82		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
83		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
84		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	
85		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya	
86	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
87		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
88		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
89		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
90		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
91		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
92		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
93		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	
94		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
95		Penuntasan TBC		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
96		Investasi pelayanan kesehatan primer		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
97		Penurunan kematian ibu dan anak		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
98		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
99		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
100	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
101		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
102		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
103		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
104		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
105		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
106	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
107		Pencegahan dan penurunan stunting		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
108		Pencegahan dan penurunan stunting		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
109	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
110		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah	
111		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
112		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
113		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
114		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
115		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
116		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
117		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
118		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	

Tabel 4.7.
Dukungan Program Kabupaten Luwu
Terhadap Program Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
10	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
11	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
15	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
23	Program Pengembangan UMKM	
24	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
27	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
32	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluh Pertanian
33	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
34	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
35	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
36	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
37	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
38	Progam Pengembangan Ekspor	Progam Pengembangan Ekspor
39	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-
41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
42	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
43	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
44	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
45	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
46	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
47	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
48	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
49	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
50	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
51	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
52	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
53	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
54	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
55	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
56	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
57	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
58	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
59	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
60	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
61	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
62	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
63	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
64	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan
65	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
66	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
67	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
68	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
69	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
70	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
71	Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan
72	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
73	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
74	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	-
75	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
76	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
77	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
78	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
79	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
80	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
81	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
82	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
83	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
84	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	-
85	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	-
86	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
87	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
88	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
89	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
90	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
91	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

Tabel 4.8.
Hubungan Prioritas Pembangunan dengan Permasalahan dan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Tingkat Kesejahteraan yang masih Rendah dan Belum Merata	Hilirasi dan Pemerataan Pendapatan	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"
2	Pemanfaatan Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Masih Belum Optimal	Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"
3	Peran Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Belum Berjalan Secara Optimal	Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital	Desa mandiri
4	Tingkat Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Rendah	Bonus Demografi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing
5	Tata Kelola dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Belum Optimal	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal Daera Pembentukan Daerah Otonomi Baru	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"
6	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wulayah yang Belum Merata	Konektifitas dan Kesenjangan Antar Wilayah Wajah Perkotaan dan Daya Saing Daerah	Infrastruktur merata dan berkelanjutan
7	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana Yang Rendah	Pemulihan Pasca Bencana dan Resiko Bencana Yang Masih Tinggi	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"

4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan uraian penjelasan tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

4.3.1 Strategi Pembangunan Daerah

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana

tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah.

4.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari perencanaan pembangunan agar lebih optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Sedangkan arah kebijakan menjadi pedoman untuk mengoperasionalisasikan strategi yang dipilih agar lebih fokus terhadap capaian yang diinginkan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program/kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Adapun rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Luwu untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
Misi 1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial				
T1-S1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Meningkatkan efisiensi distribusi produk unggulan serta penguatan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, disertai penguatan kapasitas dan pengawasan kelembagaan koperasi	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berbasis agro-ekologi, Fasilitasi penyusunan Rippow destinasi wisata, serta Meningkatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu melalui promosi terpadu dan pemanfaatan teknologi digital

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T1-S2		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri
T1-S3		Berkembangnya hilirisasi sumber daya unggulan	Meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan investasi di sektor industri pengolahan, energi, dan pertambangan	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor.

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T2-S4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat dengan penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, jaminan kesehatan, perlindungan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, Monitoring dan Evaluasi terhadap penerima manfaat bantuan sosial, pemberian bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T3-S5	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta mendukung implementasi pembangunan daerah melalui penyusunan regulasi yang efektif	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.
T3-S6		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan, disertai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan peran Perseroda.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak seperti pengembangan usaha baru berbasis aset daerah, retribusi jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata, Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM), potensi lokal lainnya, serta peningkatan iklim investasi; pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Intensifikasi Pajak dan Retribusi; serta pembentukan Perusahaan Perseroan daerah untuk berkontribusi pada kemandirian fiscal daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T3-S7		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan riset., pengembangan smart government dan digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur TIK dan ekosistem inovasi, serta penyediaan kajian kelayakan dan perencanaan yang komprehensif dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal; Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik
T3-S8		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif dan kolaboratif, serta pengendalian dan penegakan hukum/Perda, termasuk implementasi tata ruang daerah	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda
MISI 3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas tenaga pendidik; penguatan pendidikan digital berbasis TIK/IoT; serta pengembangan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S10		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu; pembudayaan hidup sehat dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas, pemerataan, dan insentif tenaga kesehatan; serta perluasan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di seluruh wilayah	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S11		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda, penguatan sumber daya dan kelembagaan olahraga; integrasi GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) pada seluruh sektor Pembangunan, serta menguatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak dan Perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, dan integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas melalui perencanaan pembangunan stadion dan sirkuit, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
T4-S12		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	membangun kehidupan beragama yang harmonis dan bermanfaat, serta pelestarian kebudayaan lokal dan penguatan karakter masyarakat melalui warisan budaya dan seni tradisional.	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.
Misi 4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T5-S13	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan rantai pasok yang efisien, pemberdayaan petani dan nelayan secara inklusif, serta Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan bergizi seimbang	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bibit-bibit unggul sektor pertanian; Percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian; Mendorong pemanfaatan pupuk organik dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; Mendorong optimalisasi lahan dalam pencapaian IP 200-300; Mendorong pemanfaatan teknologi reproduksi ternak melalui inseminasi buatan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani
T5-S14		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan		Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T5-S15		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan		Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan
Misi 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan				
T6-S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata untuk mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, serta daya saing daerah	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.
T6-S17		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat		Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)

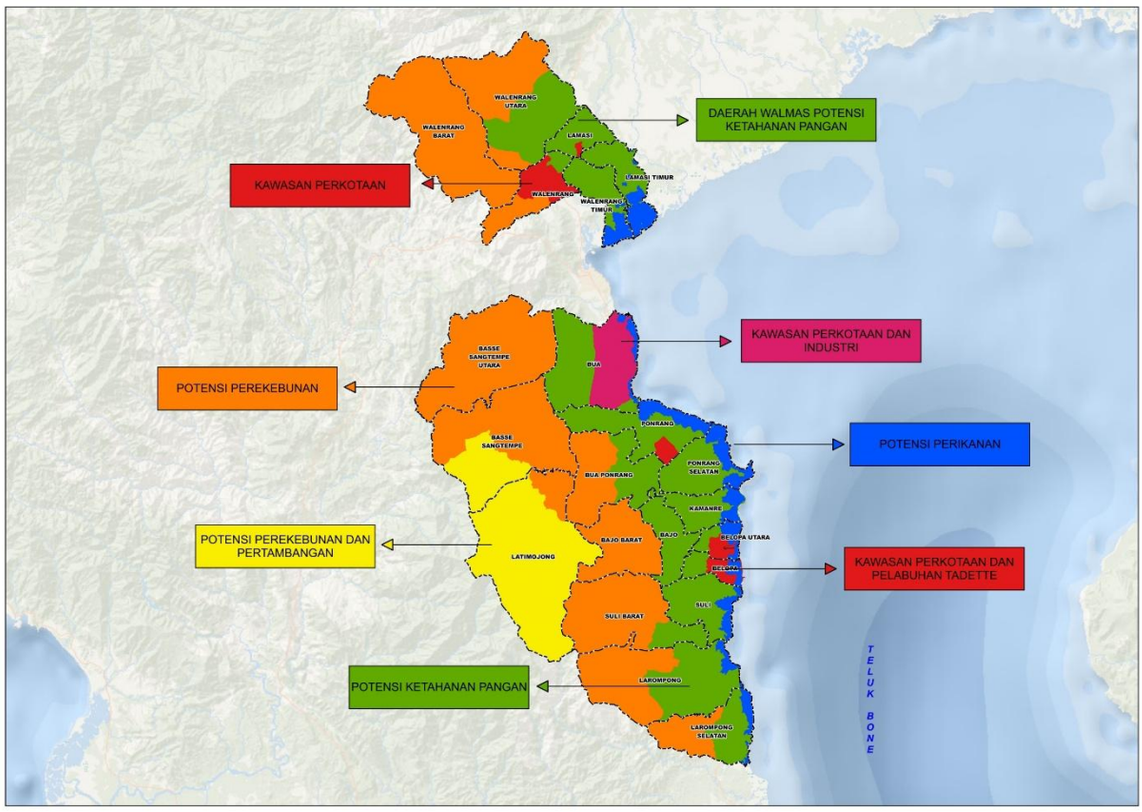
NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T6-S18		Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan		Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan; serta Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Misi 6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa				
T7-S19	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan peran desa secara inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa yang adaptif	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa
Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T8-S20	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Menurunnya risiko bencana	Penguatan ketangguhan, mitigasi, dan manajemen risiko bencana serta integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam seluruh sektor pembangunan	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana
T8-S21		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan upaya pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dan sampah berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Pengembangan kawasan konservasi ex-situ; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan

4.3.3.Arah Kebijakan Wilayah

Sejatinya pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan namun di Kabupaten Luwu masih terdapat kesenjangan yang relatif besar antar kawasan. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut maka disetiap kawasan pembangunan akan diterapkan beberapa potensi wilayah yang akan dukung oleh beberapa intervensi program.

Gambar 4.1.
Peta Potensi Ekonomi Kabupaten Luwu



Sebagai Upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu maka ditetapkan highlight intervesi program pada Kawasan-kawasan tertentu yang disesuaika dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu, Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Luwu

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
1.	Larompong Selatan, Larompong, Suli dan Suli Barat	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	**perwujudan luwu berdaya akan dilakukan intervensi berupa:** Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendataan Masyarakat Miskin

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Penguatan ekosistem kuliner
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Transformasi digital layanan publik prioritas
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
2.	Belopa, Belopa Utara, Kamanre dan Bajo	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan ekosistem kuliner
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
				Transformasi digital layanan publik prioritas
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Optimalisasi Layanan MPP di Walenrang
				Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
				Pemberian Beasiswa S1, S2, S3 Bagi ASN
				Luwu belajar (Magang, pelatihan dan Pengembangan)
				Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)
				Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda
				Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah
				Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Kebijakan Berbasis Riset
				Peningkatan kualitas apartur di lingkup keamanan dan ketertiban

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
				pembentukan Perusahaan Perseroan daerah
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik untuk Daerah otonomi baru
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Pembangunan Sirkuit dan Peningkatan Kualitas Lapangan Olahraga
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Pemanfaatan TPA Tallangbulawang
3	Ponrang, Ponrang Selatan, Bua Ponrang dan Bua	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan ekosistem kuliner
				Pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi dan kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel;
				Pengembangan kawasan industri
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
				Transformasi digital layanan publik prioritas

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	bermartabat " Luwu Malebbi"	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
				Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit Listrik terbarukan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Pembangunan TPA Tanjong

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
4	Latimojong, Bajo Barat, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan tata kelola industri nikel dan pertambangan serta ketereediaan bahan baku dan energi
				Pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi
				Penguatan ekosistem kuliner
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Transformasi digital layanan publik prioritas
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
				Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit Listrik terbarukan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
5	Walenrang, Walenrang Utara, Walenrang	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
	Timur, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur	akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan ekosistem kuliner
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
				Transformasi digital layanan publik prioritas
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Optimalisasi Layanan MPP di Walenrang
				Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				pembentukan Perusahaan Perseroan daerah
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik untuk Daerah otonomi baru
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Wilayah Walmas
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pembangunan Sirkuit dan Peningkatan Kualitas Lapangan Olahraga

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
				Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit Listrik terbarukan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Pembangunan TPST Lamasi Timur

Tabel 4.11.
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN LUWU

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2		Transformasi digital layanan publik prioritas		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
3		Transformasi digital layanan publik prioritas		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	
4		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
6		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
7	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
8		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
9		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
10	Prioritas Nasional 2	Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			SUMBER DAYA AIR (SDA)			
11		Konservasi sumberdaya air		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
12		Konservasi sumberdaya air		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
13		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
14		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
15		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
16	Prioritas Nasional 2	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
17		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
18		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
19		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
20		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
21		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
22		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
23		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
24		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
25		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
26		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
27		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
28		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
29		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
30		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
31		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
32		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
33		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Ekstraksi Garam	
34		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
35		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
36		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
37		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
38		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
39		Pembangunan pangan lokal dan nabati		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
40	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
41		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
42		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
43	Prioritas Nasional 2	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
44		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
45		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
46		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
47		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
48	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
49		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
50		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
51		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
52		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
53		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
54	Prioritas Nasional 6	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
55		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
56		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
57		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
58		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
59		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
60	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
61		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
62		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
63		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
64		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
65		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	
66		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
67		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Daerah Kabupaten/Kota		
68		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
69		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
70		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
71		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Akses Internet	
72		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
73	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
74		Penguatan karakter dan jati diri bangsa		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
75		Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
76		Penguatan karakter dan jati diri bangsa		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
77	Prioritas Nasional 3	Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
78		Pengembangan koperasi sektor produksi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
79		Pengembangan koperasi sektor produksi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
80	Prioritas Nasional 8	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
81		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
82		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
83		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
84		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	
85		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya	
86	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
87		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
88		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
89		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Kapasitas Bidang Pendidikan	
90		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
91		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
92		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
93		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		bergerak dan daerah sulit akses				
94		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
95		Penuntasan TBC		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
96		Investasi pelayanan kesehatan primer		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
97		Penurunan kematian ibu dan anak		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
98		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
99		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
100	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
101		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pendaftaran Penduduk	
102		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
103		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
104		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
105		Transformasi digital layanan publik prioritas		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
106	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
107		Pencegahan dan penurunan stunting		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
108		Pencegahan dan penurunan stunting		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
109	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
110		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah	
111		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
112		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
113		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
114		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
115		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
116		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
117		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
118		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Adalah rumusan aspirasi yang dihimpun dari hasil kegiatan DPRD (seperti reses, penjaringan aspirasi, dan hasil kajian komisi) yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Pokir Adalah usulan program dan kegiatan Pembangunan yang berasal dari suara rakyat yang diwakili oleh legislator.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 153 menyebutkan bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Oleh karena itu dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2026 harus memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu. Pokok-pokok pikiran DPRD ini harus diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pada RKPD Tahun 2026 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 1.805 Usulan, usulan tersebut disinkronkan dengan prioritas Pembangunan sebanyak 1.433 Usulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Kesesuaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Pelatihan Kerja	13	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Bantuan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	4	Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Wisata	8	Pariwisata dan kebudayaan
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3	
	Fasilitasi Bantuan keluarga Miskin	5	Sosial
layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Pengadaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet	4	Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Pengadaan mobil ambulance	2	Kesehatan
	Pembangunan Puskesmas	3	
	Pengadaan alat kesehatan	2	
	Rehabilitasi Pagar Puskesmas	1	
	Pembangunan Pagar Puuskesmas	1	
	Pembangunan Gedung PAUD	5	Pendidikan
	Pembangunan Pagar Sekolah	48	
	Pembangunan Perpustakaan SD	1	
	Pembangunan Ruang Guru	2	
	Pembangunan Ruang kelas	1	
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	3	
	Pembangunan Toilet	16	
	Penambahan ruang kelas baru SD	5	
	Pengadaan Mebeler PAUD	1	
	Pengadaan sarana bermain PAUD	1	

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
	Penimbunan Halaman Sekolah	33	
	Rehabilitasi Ruang Kelas	22	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru	3	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Perpustakaan	2	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung PAUD	2	
	Rehabilitasi sedang/berat pagar sekolah	7	
	Rehabilitasi sedang/berat Toilet (jamban) SD	3	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah SD	1	
	Rehabilitasi dan Penimbungan Lapangan Olahraga	28	
	Pembangunan Lapangan Olahraga	9	Kepemudaan dan Olahraga
	Pembangunan Tribun Lapangan	21	
	Pembangunan Rumah Adat	3	Kepariwisataan dan Kebudayaan
Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar	22	Perikanan
	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/peternakan	305	Pertanian
Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pelebaran Jalan	44	
	Pemasangan Bronjong	25	
	Pembangunan Drainase	96	
	Irigasi	43	
	Jembatan	55	
	Pembangunan Rabat Beton	152	
	Pembangunan Talud	64	
	Pembangunan Tanggul Sungai	7	
	Jalan	255	
	Pembangunan SPAM Jaringan	4	PUTR
	Pembangunan Pasar Rakyat	4	
	Rehabilitasi Pasar Rakyat	1	
	Pembangunan Drainase Pasar	1	Perdagangan
	Pengadaan lampu Jalan Kabupaten	12	Perhubungan
	Pembebasan lahan	11	Pertanahan
	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	49	Perumahan dan Permukiman Rakyat
	Peningkatan Jalan Permukiman	13	
Desa mandiri	-	-	-
Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Kendaraan Pengangkut Sampah	6	Lingkungan Hidup
	Pembangunan TPA	1	PUTR

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

Sebagaimana tertuang pada Bab III, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sejumlah Rp.1.702.235.574.148 yang bersumber dari PAD sebesar Rp.247.722.125.637, pendapatan Transfer sejumlah Rp.1.428.117.052.805 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.26.396.395.705. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2024, dengan jumlah proyeksi belanja sebesar Rp.1.701.235.574.148.

Belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, taransparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah Tahun 2026 antara lain diarahkan untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayana dasar, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Uraian (PP 12/2019)	Proyeksi 2026
PENDAPATAN	**1.702.235.574.147**
Pendapatan Asli Daerah	**247.722.125.637**
Pajak Daerah	80.116.725.637
Retribusi Daerah	156.605.400.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	5.500.000.000
Pendapatan Transfer	**1.428.117.052.805,26**
Pendapatan Transfer Pusat	1.349.897.931.230
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.219.121.575
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**26.396.395.705,00**
Hibah	
Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	26.396.395.705
BELANJA	**1.701.235.574.148**
Belanja Operasi	**1.167.330.779.359**
Belanja Pegawai	665.139.408.316
Belanja Barang dan Jasa	487.834.065.579
Belanja Hibah	14.126.805.464
Belanja Bantuan Sosial	230.500.000
Belanja Modal	**266.405.196.366**
Belanja Tak Terduga	**5.000.000.000**
Belanja Transfer	**262.499.598.424**
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.282.172.563
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	253.217.425.861

Sumber : Diolah tim penyusun RKPD, Tahun 2025.

5.2. Program Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2026

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta BIdang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik.

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah							
	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase peningkatan omzet UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4,5	4.092.162.854	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
		Meningkatnya Skala Usaha Pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		463.975.303	
		Meningkatnya kunjungan wisata	Tingkat Hunian Akomodasi, makanan dan minuman	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	0,45	419.665.994	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	2	149.973.770	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	63,63	208.130.092	Dinas Perdagangan
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	53,52	830.886.940	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
			Tingkat produktivitas tenaga kerja		63,15		
		meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan	Program penempatan tenaga kerja	50,32	302.950.953	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			antar kerja dalam wilayah kabupaten				
	Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri		356.568.800	UNSUR KOPERASI DAN UMKM
		Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	80,23	221.399.026	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	10,23	275.090.731	
		Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10,75	11.646.698.953	URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat							
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan	Program perlindungan dan jaminan sosial	66	478.480.242	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			perlindungan jaminan sosial				
		Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial	100	77.997.969	
		Terpenuhinya jaminan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program hubungan industrial	20,25	2.352.527.773	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif							
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase SOP yang diterapkan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	747.628.550.075	Seluruh OPD
		Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	80	7.943.597.017	Sekretariat DPRD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	9.613.320.145	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggaraan pengawasan	90	3.004.978.806	Inspektorat Daerah
			Persentase tindak lanjut temuan BPK		85		
			Persentase tindak lanjut temuan BPKP		90		
			Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi		90		
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani		100		
		meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	75	1.247.504.574	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	100	3.394.697.735	BKPSDM
	meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100	876.390.997	Bappelitbangda
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra-PD		100		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		pembangunan daerah		pembangunan daerah			
		meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Program pengelolaan keuangan daerah	85	270.515.075.256	BKAD
			Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu		98		
			Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu		100		
		meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	14,68	2.151.664.020	BAPENDA
	Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	21,68	1.430.147.636	Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan statistik
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	83,1	1.174.431.740	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		57		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	80,22	587.149.160	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak		34,5		
		Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Hasil kelitbangan yang diimplementasikan	Program penelitian dan pengembangan daerah	100	835.945.758	Bappelitbangda
		meningkatnya hasil inovasi dan riset pemerintah daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program riset dan inovasi daerah	100	207.126.865	
		meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	70,23	837.213.860	BKPSDM
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Program peningkatan	100	2.378.816.726	Satpol PP

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		terhadap peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	ketenteraman dan ketertiban umum	100		
		meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penangan konflik sosial	80	622.090.975	Kesbangpol
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia							
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	100	137.757.066.240	Dinas Pendidikan
			Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		100		
			Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		100		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum	100	193.903.680	
		meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga pendidik	80	276.046.112	
		meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase tingkat kegemaran membaca	Program pembinaan perpustakaan	68,21	783.848.934	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	237.952.205.711	Dinas Kesehatan
		meningkatnya pelayanan dalam upaya pencegahan penyakit menular					
		menurunnya angka stunting					
		meningkatnya kecamatan dengan puskesmas yang memiliki layanan rawat inap dan terakreditasi					

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase Peningkatan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	89,23	398.771.100	RSUD Batara Guru
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	30,23	1.417.539.000	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar		80,22		
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	23	200.590.000	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	2,3	530.713.667	Dinas pengendalian penduduk dan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	30	2.090.868.960	keluarga berencana
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30	389.410.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	Program pengembangan daya saing keolahragaan	20	4.444.705.320	
	meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Meningkatnya sarana, prasarana dan aktivitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Program kesejahteraan Rakyat	78,22	9.613.320.145	Sekretariat Daerah
			Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi		80,33		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kearifan lokal	Program pengembangan kebudayaan	75,62	1.502.463.798	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan							
	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian						Dinas Pertanian
		Meningkatnya produksi hewan ternak	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9,21	11.646.698.953	
		Meningkatnya bibit unggul yang terdistribusi ke petani	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		10		
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		10,76		
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		11,89		
		meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	30,22	1.582.458.523	
	Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,5	4.285.572.714	Dinas Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	0,5	2.861.225.422	
			angka konsumsi ikan		56,45	490.808.019	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	Persentase produk UMKM perikanan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	80,67		
	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan bergizi	Persentase jumlah cadangan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	46	41.004.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya ketahanan pangan desa	Skor pola pangan harapan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	81,34	548.347.590	
			Persentase desa rawan pangan		80,75		
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah							
	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	33,64	81.979.784.287	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang
		Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	60,35	7.329.345.664	Dinas Perhubungan
	Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	71	12.250.132.389	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
	produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,82	2.737.000.000	
	Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	81,82	5.705.888.872	
		Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	10,16	1.386.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
		meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman	4,78	2.481.037.018	
		Meningkatnya ketersediaan tanah lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	20,55	2.460.000.000	Dinas Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			yang diselesaiakn tepat waktu				
Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa							
	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	4,83	3.883.315.306	Dinas pemberdayaan dan masyarakat desa
		Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa		30,25		
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	10	1.070.000.000	
Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim							
	Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	100	293.070.947	Badan penanggulangan bencana daerah
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100		
		terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	100	389.022.548	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
			persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100		
		meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	364.696.593	Dinas Pemadam kebakaran
			Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit		30,46		
		meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Program penangan bencana	100	293.972.130	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	Proyeksi 2026		PERANGKAT DAERAH
					Target 2026	Pagu 2026	
			bencana daerah kabupaten				
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	77,48	106.413.026	Dinas lingkungan hidup
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Program pengelolaan persampahan	24,02	5.335.800.998	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	94,15	1.485.254.142	PUTR
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian akses sanitasi	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	77,88	6.824.200.900	

5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Perumusan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan kedalam beberapa urusan dan unsur pemerintahan antara lain 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, dan urusan Bidang sosial. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, pertanahan, lingkungan hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi, disamping urusan tersebut berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 ditambah dengan 5 (lima) unsur antara lain Unsur Pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 5 (Lima) unsur yaitu Perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah Inspektorat Daerah, Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara rinci rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	14	8	16	17
						DINAS PENDIDIKAN			487.122.850.751					482.325.897.828	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			487.122.850.751					482.325.897.828	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			487.122.850.751					482.325.897.828	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	347.918.496.646				100 Persen	347.921.436.142	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	175.825.052			ASN dan Pemangku Kebijakan	3 Dokumen	178.764.548	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	74.315.955	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Pemangku Kebijakan	2 Dokumen	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.708.910	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	20.964.361	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.651.256	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	20.651.256	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.785.025	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	25.785.025	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.992.492	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	10.992.492	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.623.854	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Pemangku Kebijakan	2 Laporan	5.623.854	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19.747.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN dan Pemangku Kebijakan	5 Laporan	19.747.560	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	345.778.295.008			-	-	345.778.295.008	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2750 Orang/bulan	345.280.233.928	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	2750 Orang/bulan	345.280.233.928	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	431.760.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	431.760.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	32.480.780	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	32.480.780	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	33.820.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	33.820.300	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	57.191.760			-	-	57.191.760	
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	31.991.760	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	31.991.760	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	25.200.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	243.790.370			-	-	243.790.370	
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	79.955.125	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	79.955.125	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	70.880.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Orang	70.880.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									

							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	650 Orang	92.955.245	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	650 Orang	92.955.245	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	627.823.316			-	-	627.823.316	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.725.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Paket	15.725.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	33.866.975	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Paket	33.866.975	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.868.680	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	24.868.680	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.419.880	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Paket	35.419.880	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	45.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	153.637.620	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	153.637.620	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.950.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	49.950.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	269.355.161	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Laporan	269.355.161	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	34.938.000			-	-	34.938.000	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	34.938.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Unit	34.938.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	501.688.990			-	-	501.688.990	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	227.688.990	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	227.688.990	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	274.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	274.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	498.944.150			-	-	498.944.150	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	114.224.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 Unit	114.224.150	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	14.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 Unit	14.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	20.220.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	22 Unit	20.220.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	137.553.221.165				-	132.753.328.746	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	80.454.245.136			-	-	80.454.245.136	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.767.912.420	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	1.767.912.420	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	212.040.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	212.040.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	257.289.562	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	257.289.562	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	120 Unit	10.523.253.737	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	120 Unit	10.523.253.737	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									

							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	329.520.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Unit	329.520.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	320.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	597.060.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Unit	597.060.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	50 Paket	1.099.679.005	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Paket	1.099.679.005	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	500.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	15 Unit	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	407.049.490	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	250 Peserta Didik	407.049.490	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	65.408.660	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	200 Orang	65.408.660	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	150 Satuan Pendidikan	387.606.812	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	150 Satuan Pendidikan	387.606.812	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	275 Satuan Pendidikan	27.130.897	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	275 Satuan Pendidikan	27.130.897	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	275 Orang	216.510.248	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	275 Orang	216.510.248	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	30 Ruang	2.888.306.137	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Ruang	2.888.306.137	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar									
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang	14.202.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Orang	14.202.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	13.227.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	25 Orang	13.227.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	25 Konten Digital	13.227.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	25 Konten Digital	13.227.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	63.772.338	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	400 Orang	63.772.338	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275 Dokumen	297.088.408	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	275 Dokumen	297.088.408	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	8 Dokumen	276.327.056	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	8 Dokumen	276.327.056	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	275 Komunitas	105.820.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	275 Komunitas	105.820.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK									

							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	25 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	25 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8 Kegiatan	101.820.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	8 Kegiatan	101.820.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	220.480.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	100 Buku	220.480.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5907 Paket	1.045.620.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5907 Paket	1.045.620.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	3.538.021.380	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	20 Ruang	3.538.021.380	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	368.825.527	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Unit	368.825.527	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	76.220.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	200 Orang	76.220.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	275 Satuan Pendidikan	279.306.717	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	275 Satuan Pendidikan	279.306.717	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	13.629.325.242	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Ruang	13.629.325.242	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35865 Peserta Didik	37.450.194.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	35865 Peserta Didik	37.450.194.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	3.112.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Paket	3.112.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	45.831.916.968			-	-	41.032.024.549	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	754.740.556	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4 Ruang	754.740.556	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	163.806.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	163.806.300	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	619.744.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Ruang	619.744.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium									
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	5.134.300.485	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10 Ruang	5.134.300.485	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	397.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Unit	397.800.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	3.416.717.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Unit	3.416.717.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1.104.141.305	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	20 Ruang	1.104.141.305	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	130.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Ruang	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	774.432.645	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4 Ruang	774.432.645	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium									
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.090.830.111	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Ruang	1.090.830.111	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Unit	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	970.948.496	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10 Unit	970.948.496	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	40 Paket	1.005.152.005	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	40 Paket	1.005.152.005	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	490.145.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	15 Unit	490.145.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta Didik	18.025.096.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	15000 Peserta Didik	18.025.096.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	386.466.989	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	200 Peserta Didik	386.466.989	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	47.314.452	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	100 Orang	47.314.452	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan	227.801.393	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Satuan Pendidikan	227.801.393	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	97.579.931	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	200 Orang	97.579.931	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama									
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	60 Orang	28.405.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	60 Orang	28.405.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	14.202.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Orang	14.202.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	30 Konten Digital	14.202.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Konten Digital	14.202.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	14.202.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Orang	14.202.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130 Dokumen	438.753.954	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	130 Dokumen	438.753.954	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	8 Dokumen	246.222.356	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	8 Dokumen	246.222.356	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	105 Komunitas	56.410.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	105 Komunitas	56.410.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	54.410.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Kegiatan	54.410.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	105 Satuan Pendidikan	298.590.425	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	105 Satuan Pendidikan	298.590.425	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	730.837.091	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Ruang	730.837.091	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									

							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	110.820.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	240 Orang	110.820.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6260 Paket	1.145.300.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6260 Paket	1.145.300.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	5.430.593.974	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Ruang	630.701.555	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	24 Paket	2.161.950.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	24 Paket	2.161.950.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	8.568.592.280			-	-	8.568.592.280	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	1.136.674.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10 Unit	1.136.674.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD									
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	90.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Paket	90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8135 Peserta Didik	3.935.920.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	8135 Peserta Didik	3.935.920.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	438.289.527	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	700 Orang	438.289.527	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	227 Satuan Pendidikan	350.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	227 Satuan Pendidikan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD									
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	95.120.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	100 Orang	95.120.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	43.090.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Dokumen	43.090.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	168.217.366	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4 Dokumen	168.217.366	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	427.912.928	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Ruang	427.912.928	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	773.358.578	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	8 Ruang	773.358.578	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	25.455.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Kegiatan	25.455.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Paket	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	345.045.011	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Unit	345.045.011	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	300.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7875 Satuan Pendidikan	26.212.302	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7875 Satuan Pendidikan	26.212.302	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	313.297.568	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4 Ruang	313.297.568	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.698.466.781			-	-	2.698.466.781	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	1.984.890.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	2500 Peserta Didik	1.984.890.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14 Orang	117.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	14 Orang	117.600.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan	7.484.915	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	8 Satuan Pendidikan	7.484.915	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	77.059.866	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4 Dokumen	77.059.866	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium									
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	346.792.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Ruang	346.792.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Paket	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	144.640.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Paket	144.640.000	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	193.797.987				-	193.797.987	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	193.797.987			-	-	193.797.987	
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	193.797.987	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Dokumen	193.797.987	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	1.447.479.953				-	1.447.479.953	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.447.479.953			-	-	1.447.479.953	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	990.870.007	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Dokumen	990.870.007	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	456.609.946	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Laporan	456.609.946	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	9.855.000				-	9.855.000	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	5.777.500			-	-	5.777.500	
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	5.777.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Dokumen	5.777.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	4.077.500			-	-	4.077.500	
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	4.077.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Dokumen	4.077.500	DINAS PENDIDIKAN
						RSUD BATARA GURU			162.312.186.288					162.312.186.288	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			162.312.186.288					162.312.186.288	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			162.312.186.288					162.312.186.288	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	33.612.186.288				-	33.612.186.288	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	33.612.186.288			-	-	33.612.186.288	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4230 Orang/bulan	33.612.186.288	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4230 Orang/bulan	33.612.186.288	RSUD BATARA GURU

7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	128.700.000.000				-	128.700.000.000	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15.000.000.000			-	-	15.000.000.000	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	5.000.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Unit	5.000.000.000	RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5.000.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	5.000.000.000	RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	5.000.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	5.000.000.000	RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	113.700.000.000			-	-	113.700.000.000	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
							0	12 0	113.700.000.000	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	12 0	113.700.000.000	RSUD BATARA GURU
						PUSKESMAS BELOPA			1.622.782.180					1.622.782.180	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.622.782.180					1.622.782.180	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.622.782.180					1.622.782.180	
8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.617.432.180				-	1.617.432.180	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.617.432.180			-	-	1.617.432.180	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	48.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	48.000.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	70.050.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	70.050.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	12.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	12.900.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	27.868.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	27.868.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	225.040.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	225.040.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	14.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	14.400.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	30.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	30.600.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	18.000.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	5.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	5.400.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	87.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	87.300.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	765.414.180	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	765.414.180	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	229.576.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	229.576.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	5.784.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	5.784.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	12.150.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	12.150.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.350.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	1.350.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	33.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	33.750.000	PUSKESMAS BELOPA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	29.850.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	29.850.000	PUSKESMAS BELOPA
9	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.350.000				-	5.350.000	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.350.000			-	-	5.350.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.350.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	5.350.000	PUSKESMAS BELOPA
						PUSKESMAS LATIMOJONG			1.805.782.200					1.805.782.200	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.805.782.200					1.805.782.200	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.805.782.200					1.805.782.200	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.795.878.200				-	1.795.878.200	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.795.878.200			-	-	1.795.878.200	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	45.534.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	120 Orang	45.534.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	44.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1200 Orang	44.000.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	26.400.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Orang	26.400.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang	8.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	70 Orang	8.000.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50 Dokumen	269.832.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	50 Dokumen	269.832.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	8.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3 Dokumen	8.800.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	87.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	24 Dokumen	87.800.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	17.377.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	5 Dokumen	17.377.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	9.600.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Orang	9.600.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	159.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Dokumen	159.200.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	717.913.200	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	717.913.200	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	227.022.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Dokumen	227.022.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	13.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3 Dokumen	13.200.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	15 Dokumen	74.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	15 Dokumen	74.800.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	15 Dokumen	86.400.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	15 Dokumen	86.400.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	9.904.000				-	9.904.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.904.000			-	-	9.904.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	9.904.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2 Dokumen	9.904.000	PUSKESMAS LATIMOJONG
						PUSKESMAS NOLING			2.298.723.200					2.298.723.200	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.298.723.200					2.298.723.200	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.298.723.200					2.298.723.200	
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.292.369.200				-	2.292.369.200	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.292.369.200			-	-	2.292.369.200	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	356 Orang	56.700.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	356 Orang	56.700.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2449 Orang	57.500.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2449 Orang	57.500.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	13.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	35 Orang	13.200.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	20.800.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	283 Orang	20.800.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	229.232.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	229.232.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.000.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	23.200.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	23.200.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	23.202.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	23.202.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2968 Orang	4.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2968 Orang	4.000.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	107.900.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	107.900.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.431.925.200	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	1.431.925.200	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	229.572.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	229.572.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	18.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	18.400.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.038.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	1.038.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12.600.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	12.600.000	PUSKESMAS NOLING
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	54.100.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	54.100.000	PUSKESMAS NOLING
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.354.000				-	6.354.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.354.000			-	-	6.354.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.354.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	6.354.000	PUSKESMAS NOLING
						PUSKESMAS BASTEM			1.745.779.200					1.745.779.200	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.745.779.200					1.745.779.200	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.745.779.200					1.745.779.200	
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.737.679.200				-	1.737.679.200	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.737.679.200			-	-	1.737.679.200	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	115.200.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	140 Orang	115.200.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	34.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	828 Orang	34.500.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	47.600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	20 Orang	47.600.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	14.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	60 Orang	14.000.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dokumen	269.232.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	25 Dokumen	269.232.000	PUSKESMAS BASTEM

	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14 Dokumen	7.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	14 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	15.000.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5.697.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	5.697.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	12.900.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	20 Orang	12.900.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144 Dokumen	120.750.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	144 Dokumen	120.750.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	732.445.200	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	12 Dokumen	732.445.200	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	228.823.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	16 Dokumen	228.823.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	19.200.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	19.200.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	2.332.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	4 Dokumen	2.332.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	144 Dokumen	45.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	144 Dokumen	45.000.000	PUSKESMAS BASTEM
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	180 Dokumen	68.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	180 Dokumen	68.000.000	PUSKESMAS BASTEM
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.100.000				-	8.100.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.100.000			-	-	8.100.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.100.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	8.100.000	PUSKESMAS BASTEM
						PUSKESMAS WALENRANG			1.710.645.308					1.710.645.308	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.710.645.308					1.710.645.308	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.710.645.308					1.710.645.308	
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.699.075.308				-	1.699.075.308	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.699.075.308			-	-	1.699.075.308	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648000 Orang	70.560.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	648000 Orang	70.560.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192 Orang	28.100.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	192 Orang	28.100.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	228 Orang	11.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	228 Orang	11.450.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	108 Orang	15.300.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	108 Orang	15.300.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	230.882.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	230.882.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.850.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.850.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.150.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	6.150.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	11.100.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	54 Orang	4.600.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	54 Orang	4.600.000	PUSKESMAS WALENRANG

	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	59.350.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	59.350.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	941.093.508	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	941.093.508	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	223.356.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	223.356.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria										
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	6 Orang	316.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	6 Orang	316.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	18.017.800	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	18.017.800	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.250.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	1.250.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	14.700.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	14.700.000	PUSKESMAS WALENRANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	53.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	53.000.000	PUSKESMAS WALENRANG
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	11.570.000				-	11.570.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.570.000			-	-	11.570.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.570.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	11.570.000	PUSKESMAS WALENRANG
						PUSKESMAS WALENRANG TIMUR			2.004.180.835					2.004.180.835	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.004.180.835					2.004.180.835	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.004.180.835					2.004.180.835	
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.997.080.835				-	1.997.080.835	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.997.080.835			-	-	1.997.080.835	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	24.320.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	60 Orang	24.320.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	101.700.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2500 Orang	101.700.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	2.700.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Orang	2.700.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	15.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Orang	15.000.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	230.244.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	230.244.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	13.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	13.400.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	19.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	19.200.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	19.057.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	19.057.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	20.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Orang	20.500.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	93.880.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	93.880.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.147.803.835	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	1.147.803.835	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	227.826.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	227.826.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	4.800.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	30.000.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	45.450.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	45.450.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	7.100.000				-	7.100.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.100.000			-	-	7.100.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.100.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	7.100.000	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
						PUSKESMAS LAMASI TIMUR			1.617.277.864					1.617.277.864	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.617.277.864					1.617.277.864	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.617.277.864					1.617.277.864	
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.613.927.864				-	1.608.685.364	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.611.577.864			-	-	1.608.685.364	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	40.500.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	100 Orang	40.500.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2850 Orang	24.300.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2850 Orang	27.600.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	11.800.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	150 Orang	11.800.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	200.232.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	10 Dokumen	178.822.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	6.400.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	10 Dokumen	11.425.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5.319.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	5 Dokumen	14.559.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	190.596.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	20 Dokumen	208.786.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dokumen	829.504.864	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	20 Dokumen	829.504.864	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	232.576.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	15 Dokumen	204.278.500	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	1.600.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7 Laporan	7.200.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	1.100.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	50 Orang	1.100.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	20 Dokumen	30.600.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	20 Dokumen	33.300.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	15 Dokumen	37.050.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	15 Dokumen	39.810.000	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	2.350.000			-	-	0,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2.350.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2 Dokumen	0,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	3.350.000				-	8.592.500	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.350.000			-	-	8.592.500	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	3.350.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	10 Dokumen	8.592.500	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
						DINAS KESEHATAN			184.945.912.174					178.947.954.036	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			184.473.112.174					178.475.154.036	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			184.473.112.174					178.475.154.036	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	82.234.714.857				100 %	82.174.814.857	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	412.000.000			-	100 %	412.000.000	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	189.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Dokumen	189.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Dokumen	13.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Laporan	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4 Laporan	150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	80.379.214.506			-	100 %	80.339.214.506	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	79.958.214.506	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3500 Orang/bulan	79.958.214.506	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	354.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	354.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	65.600.000			-	100 %	65.600.000	
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	15.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	80.000.000			-	100 %	80.000.000	
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	384.900.351			-	100 %	385.000.351	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	20.000.000	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.351	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Laporan	300.000.351	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	40.000.000			-	100 %	40.000.000	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	543.000.000			-	100 %	543.000.000	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	543.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	543.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 %	330.000.000			-	75 %	310.000.000	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Unit	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	300.000.000	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 % 100 %	100.094.203.817				100 % 100 %	94.134.339.179	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	75 %	39.142.361.982			Masyarakat kabupaten Luwu	75 %	33.182.497.344	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Bulo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas									
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	3.959.864.638	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Unit	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	550.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Unit	550.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	8.578.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	3 Unit	8.578.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	2.500.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	0 Unit	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	10.000.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	4 Unit	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	3.000.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	10 Unit	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3.000.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	3 Unit	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	22 Unit	155.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	22 Unit	155.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	7.200.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Masyarakat kabupaten Luwu	2 Paket	7.200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)									
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Layanan	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	164.497.344	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Paket	164.497.344	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	60.891.841.835			Masyarakat kabupaten Luwu	100 %	60.891.841.835	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	NA Orang	143.515.981	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	NA Orang	143.515.981	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6303 Orang	122.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	6303 Orang	122.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6197 Orang	145.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	6197 Orang	145.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28106 Orang	87.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	28106 Orang	87.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58889 Orang	140.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	58889 Orang	140.900.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222198 Orang	95.774.790	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	222198 Orang	95.774.790	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28540 Orang	54.179.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	28540 Orang	54.179.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70524 Orang	21.396.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	70524 Orang	21.396.700	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4432 Orang	280.726.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	4432 Orang	280.726.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	871 Orang	19.408.350	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	871 Orang	19.408.350	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	17.610.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	6579 Orang	17.610.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	35.107.120	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	35.107.120	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	374.167.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	374.167.460	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	41.774.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	41.774.700	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.905.088	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	40.905.088	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	288.005.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	288.005.000	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.006.612	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	25.006.612	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	108.720.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	108.720.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	250 Orang	9.794.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	250 Orang	9.794.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	25.445.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	na Orang	25.445.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	327.889.322	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	327.889.322	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	50.040.000.390	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	50.040.000.390	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	NA Paket	18.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	NA Paket	18.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	400.027.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	7 Dokumen	400.027.200	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	5.847.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	5.847.900.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.072.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	1.072.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Laporan	5.400.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	6.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	299.999.910	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Unit	299.999.910	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	9.977.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	NA Orang	9.977.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	7.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	NA Orang	7.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	NA Orang	1.080.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	NA Orang	1.080.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	29.990.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	7 Tatanan	29.990.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	124.992.212	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	124.992.212	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	559.050.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	559.050.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	15.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	15.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kabupaten Luwu	1 Dokumen	30.000.000	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	30.000.000			-	100 %	30.000.000	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	30.000.000			-	100 %	30.000.000	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	22 Unit	30.000.000	DINAS KESEHATAN
24	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	0,027 Angka 100 % 79,56 %	1.417.539.000				0,027 Angka 100 % 79,56 %	1.440.000.000	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesetahatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	45.000.000			-	100 %	45.000.000	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKm dan UKP	100 %	95.000.000			-	100 %	95.000.000	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	95.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1 Dokumen	95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100 %	1.277.539.000			-	100 %	1.300.000.000	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	1.277.539.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	150 Orang	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
25	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 %	369.654.500				100 %	369.000.000	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	100 %	135.000.000			-	100 %	135.000.000	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	135.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	1 Dokumen	135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	230 Produk	1.000.000			-	230 Produk	0,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	75 %	30.000.000			-	75 %	30.000.000	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1 Dokumen	30.000.000	DINAS KESEHATAN

	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	203.654.500			-	-	204.000.000	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	203.654.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	40 Unit	204.000.000	DINAS KESEHATAN
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100 %	357.000.000				100 %	357.000.000	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22 Kelompok	150.000.000			-	22 Kelompok	150.000.000	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1 Dokumen	150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam rangka Promotif Preventif	100 %	10.000.000			-	100 %	10.000.000	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	100 %	197.000.000			-	100 %	197.000.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	197.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1 Dokumen	197.000.000	DINAS KESEHATAN
	X					NON URUSAN			472.800.000					472.800.000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			472.800.000					472.800.000	
27	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	472.800.000				100 %	472.800.000	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	322.800.000			-	100 %	322.800.000	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	16.800.000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	306.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	306.000.000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 %	150.000.000			-	75 %	150.000.000	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN			1.834.444.124					1.834.444.124	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.834.444.124					1.834.444.124	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.834.444.124					1.834.444.124	
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.831.890.124				-	1.831.890.124	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.831.890.124			-	-	1.831.890.124	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	76.400.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Orang	76.400.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	57.550.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 Orang	57.550.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	11.400.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Orang	11.400.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	12.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Orang	12.000.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	243.632.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	243.632.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	5.900.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	5.900.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	13.997.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	13.997.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	14.350.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	14.350.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	5.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Orang	5.000.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	96.450.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	96.450.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	968.726.124	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	968.726.124	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	232.372.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	232.372.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.500.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	10.500.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	813.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	813.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	10.000.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	72.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	72.800.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	2.554.000				-	2.554.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.554.000			-	-	2.554.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	2.554.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Dokumen	2.554.000	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
						PUSKESMAS LAROMPONG			1.921.828.800					1.921.828.800	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.921.828.800					1.921.828.800	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.921.828.800					1.921.828.800	
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.917.463.800				-	1.913.053.800	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.917.463.800				-	1.913.053.800	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	43.860.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	300 Orang	43.860.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	58.165.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1000 Orang	58.165.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	4.365.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	54 Orang	4.365.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	20.370.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	55 Orang	20.370.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	468 Dokumen	254.897.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	468 Dokumen	254.897.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	520 Dokumen	13.810.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	520 Dokumen	10.900.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	350 Dokumen	23.430.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	350 Dokumen	23.430.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	250 Dokumen	10.365.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	250 Dokumen	10.365.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	280 Orang	5.360.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	280 Orang	5.360.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	400 Dokumen	69.399.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	400 Dokumen	69.399.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23 Dokumen	1.086.874.800	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	23 Dokumen	1.086.874.800	PUSKESMAS LAROMPONG

	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	650 Dokumen	218.288.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	650 Dokumen	213.878.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	280 Dokumen	16.005.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	280 Dokumen	16.005.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	20 Dokumen	1.455.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	20 Dokumen	1.455.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	500 Dokumen	21.825.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	500 Dokumen	24.735.000	PUSKESMAS LAROMPONG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	750 Dokumen	68.995.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	750 Dokumen	68.995.000	PUSKESMAS LAROMPONG
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.365.000				-	8.775.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.365.000			-	-	8.775.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	4.365.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	20 Dokumen	8.775.000	PUSKESMAS LAROMPONG
						PUSKESMAS SULI			1.896.219.372					1.896.219.372	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.896.219.372					1.896.219.372	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.896.219.372					1.896.219.372	
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.887.115.372				-	1.887.115.372	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.887.115.372			-	-	1.887.115.372	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	104.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	104.000.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	48.700.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	48.700.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	9.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	9.000.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	18.200.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	18.200.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	225.682.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	225.682.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	4.650.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	4.650.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.900.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.900.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.442.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	17.442.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	3.900.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	3.900.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	71.600.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	71.600.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.050.771.372	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	1.050.771.372	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	225.822.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	225.822.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	30.148.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	30.148.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	2.250.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	13.500.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	13.500.000	PUSKESMAS SULI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	51.550.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	51.550.000	PUSKESMAS SULI
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	9.104.000				-	9.104.000	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.104.000			-	-	9.104.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.104.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.104.000	PUSKESMAS SULI
						PUSKESMAS SULI BARAT			1.991.358.796					1.990.758.796	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.991.358.796					1.990.758.796	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.991.358.796					1.990.758.796	
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.986.158.796				-	1.985.558.796	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.986.158.796			-	-	1.985.558.796	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	44.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	160 Orang	44.500.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1116 Orang	45.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1116 Orang	44.500.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	12.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	24 Orang	12.800.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	22.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	200 Orang	22.500.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	229.354.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	229.354.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.211.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	15.211.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	22.650.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	22.650.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.083.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	18.083.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	25.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	24 Orang	25.500.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	111.868.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	111.868.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.100.267.796	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	12 Dokumen	1.100.167.796	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	230.725.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	230.725.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	28.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	28.800.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	5.600.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	5.600.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	19.200.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	19.200.000	PUSKESMAS SULI BARAT
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	54.100.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	54.100.000	PUSKESMAS SULI BARAT
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.200.000				-	5.200.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.200.000			-	-	5.200.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.200.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	5.200.000	PUSKESMAS SULI BARAT
						PUSKESMAS BELOPA UTARA			1.593.145.272					1.593.145.272	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.593.145.272					1.593.145.272	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.593.145.272					1.593.145.272	
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.588.091.272				-	1.588.091.272	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.588.091.272			-	-	1.588.091.272	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	427 Orang	74.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	427 Orang	74.900.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3368 Orang	46.450.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3368 Orang	46.450.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	13.450.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	45 Orang	13.450.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	12.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	305 Orang	12.900.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	211.032.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	211.032.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.700.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	8.700.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.200.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	10.200.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.487.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	24.487.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	2.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	45 Orang	2.900.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	69.600.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	69.600.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 tahun Dokumen	802.939.272	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 tahun Dokumen	802.939.272	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	229.872.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	229.872.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	29.961.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	29.961.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.700.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	1.700.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	21.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	21.800.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	27.200.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	27.200.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.054.000				-	5.054.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.054.000			-	-	5.054.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.054.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	5.054.000	PUSKESMAS BELOPA UTARA
						PUSKESMAS BAJO			2.012.002.020					1.132.826.020	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.012.002.020					1.132.826.020	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.012.002.020					1.132.826.020	
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.000.448.020				-	1.132.826.020	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.000.448.020			-	-	1.132.826.020	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	88.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	240 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5600 Orang	34.900.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	5600 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Orang	13.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	22 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	310 Orang	24.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	310 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	246.232.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.300.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	30.400.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	14.720.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	17017 Orang	20.600.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	17017 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	79.300.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.132.826.020	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	1.132.826.020	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	226.972.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	19.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	998.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	49.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	11.554.000				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.554.000			-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.554.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO
						PUSKESMAS BAJO BARAT			1.886.808.200					995.485.200	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.886.808.200					995.485.200	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.886.808.200					995.485.200	
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.878.754.200				-	995.485.200	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.878.754.200				-	995.485.200	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	71.640.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	120 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	75.200.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1200 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	5.400.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	25 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	23.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	20 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	249.832.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	20 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	27.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	3.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	25 Orang	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	95.703.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	995.485.200	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	995.485.200	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	231.472.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.320.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	4.302.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	21.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	37.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.054.000				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.054.000			-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.054.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
						PUSKESMAS KAMANRE			1.565.661.410					1.537.401.410	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.565.661.410					1.537.401.410	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.565.661.410					1.537.401.410	
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.554.907.410				-	1.526.647.410	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.554.907.410			-	-	1.526.647.410	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	66.225.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	288 Orang	66.225.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1742 Orang	31.400.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1742 Orang	3.140.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	4.800.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	41 Orang	4.800.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	284 Orang	15.270.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	284 Orang	15.270.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	254.542.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	254.542.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.860.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	15.860.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.670.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	15.670.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.390.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.390.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang	2.400.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	41 Orang	2.400.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	76.032.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	76.032.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	742.301.410	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	742.301.410	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	224.172.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	224.172.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14.240.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	14.240.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	9.845.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.845.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	23.700.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	23.700.000	PUSKESMAS KAMANRE
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	49.060.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1 Dokumen	49.060.000	PUSKESMAS KAMANRE
43	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	10.754.000				-	10.754.000	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.754.000			-	-	10.754.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	10.754.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	10.754.000	PUSKESMAS KAMANRE
						PUSKESMAS PONRANG SELATAN			2.267.438.076					2.267.438.076	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.267.438.076					2.267.438.076	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.267.438.076					2.267.438.076	
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.256.248.076				-	2.256.248.076	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.256.248.076			-	-	2.256.248.076	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	127.786.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	127.786.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	58.800.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	58.800.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	27.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	27.000.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	30.750.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	30.750.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	228.488.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	228.488.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	9.000.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.850.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	8.850.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.950.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	17.950.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	15.850.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	15.850.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	55.693.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	55.693.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.360.091.066	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	1.360.091.066	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	227.420.010	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	227.420.010	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.520.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	13.520.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	1.500.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	26.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	26.000.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	47.550.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	47.550.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	11.190.000				-	11.190.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.190.000			-	-	11.190.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.190.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	11.190.000	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
						PUSKESMAS PONRANG			2.488.577.176					0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.488.577.176					0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.488.577.176					0,00	
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.480.223.176				-	0,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.480.223.176			-	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	49.400.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	150 Orang	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	81.050.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1000 Orang	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	7.526.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	13 Orang	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	19.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Orang	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 % Dokumen	205.832.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 % Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	18.450.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	16.185.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	28.036.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	12.300.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	25 Orang	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119.536.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	1.612.174.176	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	0 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	226.572.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8.100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	762.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	24.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	50.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.354.000				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.354.000			-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.354.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS PONRANG
						PUSKESMAS BUA			3.162.405.848					3.162.405.848	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.162.405.848					3.162.405.848	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.162.405.848					3.162.405.848	
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.149.075.848				-	3.149.075.848	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.149.075.848			-	-	3.149.075.848	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	59.360.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	59.360.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	42.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	42.000.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	7.800.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	7.800.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	36.400.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	36.400.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	263.232.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	263.256.200	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.100.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	2.100.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.700.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	12.700.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	28.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	28.000.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	3.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Orang	3.000.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.560.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	132.560.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.256.447.648	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	2.256.447.648	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	221.676.200	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	221.652.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	21.600.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	21.600.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	3.000.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	10.500.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	10.500.000	PUSKESMAS BUA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	48.700.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	48.700.000	PUSKESMAS BUA
49	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	13.330.000				-	13.330.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	13.330.000			-	-	13.330.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	13.330.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	13.330.000	PUSKESMAS BUA
						PUSKESMAS BASTEM UTARA			1.844.358.200					1.844.367.200	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.844.358.200					1.844.367.200	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.844.358.200					1.844.367.200	
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.838.438.200				-	1.838.447.200	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.838.438.200				-	1.838.447.200	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102 Orang	51.480.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	102 Orang	51.480.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	61.630.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 Orang	61.630.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	16.888.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Orang	16.888.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	98 Orang	17.307.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	98 Orang	17.307.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	220.352.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 Dokumen	220.352.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20 Dokumen	16.560.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	20 Dokumen	16.560.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	10.070.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Dokumen	10.070.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	14.450.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Dokumen	14.450.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	11.040.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	15 Orang	11.040.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200 Dokumen	145.580.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	200 Dokumen	145.580.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA

	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	851.245.200	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	100 Dokumen	851.254.200	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	232.756.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 Dokumen	232.756.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	40 Dokumen	21.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	40 Dokumen	21.400.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	40 Dokumen	25.440.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	40 Dokumen	25.440.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	100 Dokumen	76.800.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 Dokumen	76.800.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	100 Dokumen	65.440.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	100 Dokumen	65.440.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
51	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.920.000				-	5.920.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.920.000			-	-	5.920.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	5.920.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Dokumen	5.920.000	PUSKESMAS BASTEM UTARA
						PUSKESMAS WALENRANG UTARA			1.804.991.684					1.804.991.684	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.804.991.684					1.804.991.684	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.804.991.684					1.804.991.684	
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.800.037.684				-	1.800.037.684	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.800.037.684			-	-	1.800.037.684	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	85.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Orang	85.800.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 dokumen Orang	18.100.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 dokumen Orang	18.100.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	14.700.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Orang	14.700.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	21.600.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Orang	21.600.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen Dokumen	209.932.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 dokumen Dokumen	209.932.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.600.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	8.600.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	18.800.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	41.393.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	41.393.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	7.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Orang	7.000.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	108.150.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	108.150.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	933.255.684	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	933.255.684	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	231.472.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	231.472.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.185.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	13.185.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	2.200.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	28.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	28.800.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	57.050.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	57.050.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.954.000				-	4.954.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.954.000			-	-	4.954.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.954.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	4.954.000	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
						PUSKESMAS WALENRANG BARAT			2.159.863.200					2.159.863.200	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.159.863.200					2.159.863.200	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.159.863.200					2.159.863.200	
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.148.323.200				-	2.148.323.200	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.148.323.200			-	-	2.148.323.200	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198 Orang	27.145.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	198 Orang	27.145.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	49.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1200 Orang	49.000.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	9.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Orang	9.000.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75 Orang	30.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	75 Orang	30.500.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	265.232.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	265.232.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	5.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2 Dokumen	5.500.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Dokumen	25.000.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	19.250.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Dokumen	19.250.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Orang	12.000.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	197.652.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	50 Dokumen	197.652.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							0	100% 0	1.103.991.200	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	100% 0	1.103.991.200	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	224.753.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Dokumen	224.753.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	18.300.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	5 Dokumen	18.300.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2 Dokumen	1.000.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	15 Dokumen	67.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	15 Dokumen	67.500.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	15 Dokumen	92.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	15 Dokumen	92.500.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
55	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	11.540.000				-	11.540.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.540.000			-	-	11.540.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	11.540.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	4 Dokumen	11.540.000	PUSKESMAS WALENRANG BARAT

						PUSKESMAS LAMASI			2.055.996.392						2.055.996.392	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.055.996.392						2.055.996.392	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.055.996.392						2.055.996.392	
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.043.996.392					-	2.043.996.392	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.043.996.392				-	-	2.043.996.392	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	76.037.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	128 Orang	76.037.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2338 Orang	38.950.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2338 Orang	38.950.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	6.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	56 Orang	6.000.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang	13.900.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	26 Orang	13.900.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138 Dokumen	199.532.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	138 Dokumen	199.532.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25 Dokumen	6.100.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	25 Dokumen	6.100.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	19.100.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	60 Dokumen	19.100.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	7.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	188 Orang	9.400.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	188 Orang	9.400.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	474 Dokumen	90.210.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	474 Dokumen	90.210.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.241.641.392	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1 Dokumen	1.241.641.392	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	840 Dokumen	222.926.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	840 Dokumen	222.926.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	320 Dokumen	28.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	320 Dokumen	28.000.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	18 Dokumen	900.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	18 Dokumen	900.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	30 Dokumen	24.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	30 Dokumen	24.000.000	PUSKESMAS LAMASI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	280 Dokumen	60.300.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	280 Dokumen	60.300.000	PUSKESMAS LAMASI
57	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	12.000.000					-	12.000.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.000.000				-	-	12.000.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	20 Dokumen	12.000.000	PUSKESMAS LAMASI
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			19.792.871.968						276.317.812.435	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.792.871.968						276.317.812.435	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			19.792.871.968						276.317.812.435	
58	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.364.971.788					-	19.241.812.435	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	41.509.726				-	-	90.000.000	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.453.789	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	40.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	510.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	510.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.035.937	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Laporan	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.052.397.130			-	-	12.350.312.435	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296 Orang/bulan	11.738.495.278	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1296 Orang/bulan	12.010.500.435	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	301.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	322.812.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12.901.852	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	17.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 Persen	11.009.375			-	100 Persen	13.000.000	
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	11.009.375	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Laporan	13.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	13.000.000			-	-	265.000.000	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Paket	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Orang	45.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	13.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	14 Orang	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	619.437.421			-	-	908.500.000	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							-	-	8.647.109	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.208.100	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	5 Paket	124.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							-	-	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							0	0 0	31.232.167	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	0 0	35.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Paket	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	66.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	80.544.195	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Paket	95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.921.450	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	402.884.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	510.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	4.008.000.000	
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	-	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Unit	108.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	3 Unit	720.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							-	-	0,00	-	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	-	-	10 Unit	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.053.679.205			-	-	970.000.000	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							0	0 0	24.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	0 0	24.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							0	0 0	171.679.205	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	0 0	160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	858.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	786.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	573.938.931			-	-	637.000.000	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	68.663.572	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	43 Unit	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									
							0	0 0	400.775.359	-	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	0 0	420.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							-	-	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
59	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Persentase irigasi dalam kondisi baik	12.87 Angka 72.00 %	2.427.016.728				12.87 Angka 72.00 %	39.066.000.000	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA	40 Titik/Lokasi	900.005.040			-	40 Titik/Lokasi	4.350.000.000	
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai									
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	100.001.520	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 KM	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
							0	4,80 0	800.003.520	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4,80 0	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing									
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	2,93 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2,93 KM	1.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai									
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 KM	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir									
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik	8904 Ha	1.527.011.688			-	8904 Ha	34.716.000.000	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,35 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,35 KM	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,50 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	1,50 KM	9.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 KM	18.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,83 KM	760.492.538	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4,83 KM	690.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	66.517.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Lembaga	76.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi									
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	25 Lembaga	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	25 Lembaga	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0051	Pembangunan Bendung Irigasi									

							Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 UNIT	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 UNIT	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi									
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 UNIT	700.002.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 UNIT	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	2.437.000.000				100 %	15.470.000.000	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	71.42 %	2.437.000.000			-	71.42 %	15.470.000.000	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1-1,5 Liter/Detik	700.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1-1,5 Liter/Detik	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,5-1 Liter/Detik	837.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	0,5-1 Liter/Detik	9.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	400.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5 Unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	6 Unit	200.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	6 Unit	570.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	300.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	500 SR	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	0,00				-	5.500.000.000	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			Masyarakat	-	5.500.000.000	
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat	1 Unit	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat	1 Ton/hari	4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	77,15 %	0,00				77,15 %	5.400.000.000	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	77,03 %	0,00			-	77,03 %	5.400.000.000	
	1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	5 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5 Unit	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat									
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	2 M^3/Hari	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 M^3/Hari	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan									
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M^3/Hari	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	20 M^3/Hari	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat									
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	20 M^3/Hari	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	20 M^3/Hari	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									

							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2 M³/Hari	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 M³/Hari	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	1,9716 %	0,00				1,9716 %	16.550.000.000	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	1,9716 Persen	0,00			-	1,9716 Persen	16.550.000.000	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7500 M	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	7500 M	9.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan									
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	5 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5 Sistem Drainase Lingkungan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan									
							Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Kawasan Genangan	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang dikembangkan	0,034 %	0,00				0,034 %	4.500.000.000	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan	0,034 Persen	0,00			-	0,034 Persen	4.500.000.000	
	1	03	07	2.01	0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 UNIT	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 UNIT	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	07	2.01	0011	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 UNIT	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 UNIT	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	2,5 Ton/hari	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2,5 Ton/hari	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	11,13 %	45.024.058				11,13 %	11.150.000.000	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	820 Angka	45.024.058			-	820 Angka	11.150.000.000	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	13 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	13 Bangunan Gedung	6.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	7 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	7 Bangunan Gedung	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800 Dokumen	45.024.058	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	800 Dokumen	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

66	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0,00002 %	0,00				0,00002 %	2.000.000.000	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3 Angka	0,00			-	3 Angka	2.000.000.000	
	1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	3 Kawasan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3 Kawasan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	720 Angka	0,00				720 Angka	155.500.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	37,25 Persen	0,00			-	37,25 Persen	155.500.000.000	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5 Dokumen	6.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1823,4 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1823,4 KM	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0049	Pelebaran Jembatan									
							Panjang jembatan yang dilebarkan	20 Meter	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	20 Meter	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2 KM	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan									
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	150 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	150 KM	22.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan									
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5 KM	6.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	11 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	11 KM	15.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan									
							Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	4 Meter	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4 Meter	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan									
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	60 Meter	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	60 Meter	13.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan									
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	6 KM	54.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
							Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	1823,40 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1823,40 KM	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan									
							Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	20 Meter	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	20 Meter	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3 Jembatan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar									
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6 KM	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	6 KM	9.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan									
							Panjang jembatan yang dibangun	660 Meter	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	660 Meter	20.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 angka 30,02 angka	278.587.352				100 angka 30,02 angka	500.000.000	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih	350 Orang	249.380.852			-	350 Orang	300.000.000	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									

							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	249.380.852	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	60 Orang	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan	70 Sistim Informasi	29.206.500			-	70 Sistim Informasi	115.000.000	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2 Perangkat Pendukung	29.206.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 Perangkat Pendukung	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI									
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4 Orang	23.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	2 Layanan Informasi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 Layanan Informasi	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio paket pekerjaan konstruksi yang mendapat pengawasan cakupan Kab./Kota	70 Persen	0,00			-	70 Persen	85.000.000	
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	250 Paket Pekerjaan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	250 Paket Pekerjaan	55.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	20 Bangunan Konstruksi	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	20 Badan Usaha	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	5,51 Persen	240.272.042				5,51 Persen	1.440.000.000	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten	17,39 Persen	0,00			-	17,39 Persen	600.000.000	
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota									
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang									
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Publikasi	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota									
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota									
							-	-	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	2 Dokumen	0,00			-	2 Dokumen	500.000.000	
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar									
							Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Peta	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten	2 Laporan	0,00			-	2 Laporan	65.000.000	

	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	60 Layanan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	60 Layanan	65.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Sistem Informasi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten	1 Laporan	240.272.042			-	1 Laporan	275.000.000	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	240.272.042	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK									
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2 Laporan	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9.820.159.834					10.153.167.816	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.820.159.834					10.153.167.816	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9.820.159.834					10.153.167.816	
70	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.600.087.777				100 %	4.829.592.156	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	46.080.568			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100 %	48.384.586	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.001.505	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2 Dokumen	21.001.580	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.021.661	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Dokumen	5.272.744	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.003.211	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Dokumen	3.153.372	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.022.428	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Dokumen	5.273.549	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.025.041	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Dokumen	3.176.283	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.006.722	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Laporan	10.507.058	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	3.473.469.108			Aparatur dilingkungan perangkat daerah	100 %	3.647.142.564	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan	3.210.159.833	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	448 Orang/bulan	3.370.667.825	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	249.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	12 Dokumen	262.290.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.002.635	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Laporan	5.252.767	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	2.508.368	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	3 Dokumen	2.633.786	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.998.272	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	18 Laporan	6.298.186	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	25.024.200			Aparatur dilingkungan perangkat daerah	100 %	26.275.410	
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.024.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	4 Laporan	26.275.410	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	90 %	32.000.000			Aparatur dilingkungan perangkat daerah	90 %	33.100.000	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Paket	23.100.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	2 Orang	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	452.624.427			Aparatur dilingkungan perangkat daerah	100 %	475.255.648	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.007.123	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Paket	5.257.479	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	3 Paket	78.750.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.513.277	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Paket	7.888.941	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.356.899	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Paket	23.474.744	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.034.470	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Paket	5.286.194	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	3 Dokumen	15.750.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.001.206	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Paket	15.751.266	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	300.208.926	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	150 Laporan	315.219.372	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.502.526	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Dokumen	7.877.652	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	369.500.000			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100 %	387.975.000	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Laporan	115.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							-	-	259.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	-	272.475.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	201.389.474			Aparatur dilingkungan perangkat daerah	100 %	211.458.948	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	93.469.474	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	37 Unit	98.142.948	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	7.920.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	45 Unit	8.316.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur dilingkungan perangkat daerah	1 Unit	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

71	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	439.000.000				100 %	460.950.000	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Dilakukan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	100 %	270.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	283.500.000	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan									
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani									
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	5.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana									
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	2 Dokumen	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Diberikan Sosialisasi Penyediaan, Rehabilitasi dan Relokasi	100 %	70.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	73.500.000	
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana									
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	70 Orang	26.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
							Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	50 Orang	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	50 Orang	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	70 Orang	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	70 Orang	26.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	100 %	30.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	31.500.000	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	10 Unit Rumah	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	10 Unit Rumah	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	10 Rumah Tangga	5.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	10 Rumah Tangga	5.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang Telah Didistribusikan dan Diserahterimakan Kepada yang Berhak	100 %	4.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	4.200.000	
	1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	2.100.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	2.100.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	15.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	15.750.000	
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									

							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	15.750.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Difasilitasi	100 %	50.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	52.500.000	
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Laporan	52.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	11 %	3.061.072.057				11 %	3.134.125.660	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	50.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	52.500.000	
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	2 Laporan	52.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata	100 %	115.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	120.750.000	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Rumah Tangga	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	10 Rumah Tangga	5.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Kumuh di Kawasan Rumah Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	10 Kawasan	2.896.072.057			Masyarakat Kab. Luwu	10 Kawasan	2.960.875.660	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	50 Unit Rumah	1.312.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	5.250.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	31.072.057	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Laporan	32.625.660	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	10.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	2 Unit	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	5 Ha	1.500.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	5 Ha	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
73	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	14 % 2,2 %	1.350.000.000				14 % 2,2 %	1.350.000.000	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian	100 %	1.350.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	100 %	1.350.000.000	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	50 Unit Rumah	1.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	2 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	2 Unit	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
74	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6,94 %	370.000.000				6,94 %	378.500.000	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	6 Perumahan	370.000.000			Masyarakat Kab. Luwu	6 Perumahan	378.500.000	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Laporan	52.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU									
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	1 Kelompok	21.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	5 Laporan	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan										
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	6 Lokasi	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	6 Lokasi	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan										
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Luwu	2 Lokasi	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			7.955.198.032					8.117.723.746	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.955.198.032					8.117.723.746	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7.955.198.032					8.117.723.746	
75	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.202.272.719				-	5.310.228.925	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	103.001.468			-	-	105.061.496	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.984.814	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	45.884.510	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.140.260	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	9.323.065	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.627.406	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	9.819.954	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.750.124	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	8.925.126	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.969.056	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	5.068.437	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.359.658	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	3 Laporan	15.666.851	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.170.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	5 Laporan	10.373.553	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.430.151.311			-	-	4.519.029.222	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	4.218.005.158	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	121 Orang/bulan	4.302.365.261	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	186.255.636	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	187.255.636	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.511.421	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	2.561.649	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5.351.541	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	5.458.571	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	5 Dokumen	3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.910.193	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	15.208.396	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.117.362	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	3.179.709	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	33.801.672			-	-	35.637.704	
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.310.880	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	2.357.097	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	2.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.490.792	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	28.040.607	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	90.782.980			-	-	91.918.332	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	84.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	84 Paket	85.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen	2.019.969	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	37 Dokumen	2.060.062	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.760.769	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	2.815.984	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.002.242	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	2.042.286	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	315.997.286			-	-	325.473.230	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Paket	2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	3 Paket	6.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.464.513	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	14.753.803	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	5.300.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	3 Dokumen	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8.352.184	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Paket	8.519.227	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.008.899	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	11.229.077	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.427.518	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	201.376.068	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	62.544.172	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	63.795.055	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.281.000			-	-	16.606.620	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.281.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Unit	16.606.620	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	186.258.517			-	-	189.983.687	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	38.268.057	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	39.033.418	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.818.460	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	50.814.829	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98.172.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	100.135.440	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.998.485			-	-	26.518.634	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.525.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	2.575.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	13.732.485	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	27 Unit	14.007.314	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	9.741.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	11 Unit	9.935.820	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
76	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2.752.925.313				-	2.807.494.821	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.285.997.804			-	-	2.331.237.757	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	29.270.210	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	29.855.614	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	43.753.237	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	44.628.301	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	18.601.234	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	18.973.258	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat									
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.703.510	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 Dokumen	2.757.580	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional									
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 Orang	112.980.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	10 Orang	115.239.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat									
							Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	2330 Orang	64.482.468	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	2330 Orang	65.772.117	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									

							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	163 Orang	23.131.874	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	163 Orang	23.594.511	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	1.802.429.403	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 laporan	1.838.477.991	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	10.057.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Laporan	10.258.344	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah									
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	5.543.740	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Laporan	5.654.615	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	94.484.030	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	30 Unit	96.373.710	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota									
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	18.560.898	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	18.932.116	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
							0	0 0	20.000.000	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	0 0	20.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum									
							0	0 0	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	0 0	20.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota									
							Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	20.000.000	-	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	20.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	344.215.531			-	-	351.090.843	
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	9.456.236	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 laporan	9.645.361	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	3.253.602	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1 dokumen	3.318.674	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)									
							0	0 0	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	0 0	35.700.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							0	0 0	3.920.665	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	0 0	3.990.078	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah									
							Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 laporan	5.129.983	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 laporan	5.232.583	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	12 Dokumen	3.251.866	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	3.316.903	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	26.010.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Laporan	26.530.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	22.190.609	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Laporan	22.634.421	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	209.360.170	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Laporan	213.547.373	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada									
							Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	12 Dokumen	26.642.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	27.175.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	122.711.978			-	-	125.166.221	
	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS									
							Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	12 Dokumen	15.728.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	16.042.968	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12.338.012	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Dokumen	12.584.772	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah									
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan	66.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3 Laporan	67.320.002	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS									
							Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	28.645.566	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	12 Laporan	29.218.479	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN			6.632.339.645					4.658.304.043	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.632.339.645					4.658.304.043	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.632.339.645					4.658.304.043	

77	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.552.681.655				-	4.658.304.043	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00				-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	1 Dokumen Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	1 Dokumen Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	1 Dokumen Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	1 Dokumen Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.811.664.043			-	-	4.658.304.043	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 OB Orang/bulan	4.658.304.043	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	131 OB Orang/bulan	4.658.304.043	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	-	-	-	1 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	12 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	192 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	192 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	3 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	5 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	3 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	25 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	15 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	15 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	10 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	25 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	25 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	1 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	10 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.511.607.410			-	-	0,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	12 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	12 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.511.607.410	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	229.410.202			-	-	0,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	48.106.800	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							0	0 0	170.933.611	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	2 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.369.791	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
78	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	79.657.990				-	0,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	79.657.990			-	-	0,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	25 Dokumen	11.742.190	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	25 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	-	0 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	67.915.800	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	15 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	12 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.02	0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
							Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	0 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	0,00			-	-	0,00		
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia										
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.602.116.287					4.812.037.661		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.602.116.287					4.812.037.661		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.602.116.287					4.812.037.661		
79	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.878.895.585				-	3.173.376.559		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	60.479.000			-	-	60.479.000		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52.070.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Dokumen	52.070.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.710.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	1.710.250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.390.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	1.390.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.589.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	1.589.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.299.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	1.299.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.420.450	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	4 Laporan	2.420.450	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	735.300.226			-	-	2.015.281.200		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan	639.446.026	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	348 Orang/bulan	1.919.427.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	92.040.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	92.040.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.938.750	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Laporan	1.938.750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.875.450	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	14 Laporan	1.875.450	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.061.100			-	-	8.061.100		
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1.061.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	0 Laporan	1.061.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	12 Laporan	7.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	302.972.850			-	-	317.472.850		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							0	0 0	7.000.000	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	0 0	6.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3 Dokumen	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	29.690.650	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	30 Paket	29.690.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							0	0 0	17.477.500	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	0 0	17.477.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							-	-	238.804.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	238.804.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000			-	-	10.000.000		
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3 Unit	10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	595.200.000			-	-	595.200.000	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	91.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	400 Laporan	91.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	12 Laporan	54.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	12 Laporan	450.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.882.409			-	-	166.882.409	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	80.122.740	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	20 Unit	80.122.740	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.067.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	8 Unit	5.067.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	81.692.669	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Unit	81.692.669	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
80	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	1.723.220.702				-	1.638.661.102	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	78.687.290			-	-	78.687.290	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
							0	500 0	78.687.290	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	500 0	78.687.290	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.106.768.250			-	-	1.022.208.650	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	88 Unit	269.251.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	88 Unit	269.251.250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							0	0 0	72.935.000	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	0 0	72.935.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
							0	10 0	100.000.000	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 0	15.440.400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
							0	0 0	111.450.000	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	0 0	111.450.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									
							0	0 0	70.350.000	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	0 0	70.350.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	12 laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	300.932.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	300.932.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300 Kawasan	181.850.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	300 Kawasan	181.850.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	113.127.950			-	-	113.127.950	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
							0	10 0	29.591.700	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 0	29.591.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							0	10 0	24.306.700	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 0	24.306.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	10 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							-	-	34.235.350	-	-	-	-	34.235.350	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	10 Laporan	24.994.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 Laporan	24.994.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	424.637.212			-	-	424.637.212	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							-	-	27.298.550	-	-	-	-	27.298.550	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	19.704.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3 Dokumen	19.704.600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10 Laporan	13.386.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 Laporan	13.386.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	50 Orang	10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	8.247.362	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Kegiatan	8.247.362	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga	16.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	10 Lembaga	16.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota									
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	330.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1 Dokumen	330.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL			0,00					5.685.400.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					5.685.400.000	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			0,00					5.685.400.000	
81	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	0,00				100 %	4.735.400.000	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	0,00			-	100 %	34.500.000	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	13.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	3.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	12.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	0,00			-	100 %	3.647.000.000	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	336 Orang/bulan	3.500.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	140.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	3.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	14 Laporan	4.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %	0,00			-	100 %	10.000.000	
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0,00			-	100 %	456.900.000	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9 Paket	3.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Paket	200.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	9.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Paket	2.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	14.400.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							0	0 0	0,00	-	-	-	0 0	26.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	2.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	90 Laporan	200.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	100 %	0,00			-	100 %	310.000.000	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1500 Laporan	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	100.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	195.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0,00			-	100 %	277.000.000	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Unit	120.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	7.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	150.000.000	DINAS SOSIAL
82	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pemberdayaan	100 %	0,00				100 %	80.000.000	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	2 PSKS	0,00			-	2 PSKS	80.000.000	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Lembaga	30.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	22 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	22 Orang	30.000.000	DINAS SOSIAL
83	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	0,00				100 %	140.000.000	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	4 Layanan	0,00			-	4 Layanan	120.000.000	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Orang	60.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL

	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Layanan	0,00			-	1 Layanan	20.000.000	
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	20.000.000	DINAS SOSIAL
84	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	0,00				100 %	350.000.000	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	0,00			-	100 %	350.000.000	
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	155 Orang	230.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12 Usulan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Usulan	120.000.000	DINAS SOSIAL
85	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	0,00				100 %	350.000.000	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15 Layanan	0,00			-	15 Layanan	50.000.000	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2160 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2160 Orang	50.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Layanan	0,00			-	1 Layanan	300.000.000	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	27 Orang	300.000.000	DINAS SOSIAL
86	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	100 %	0,00				100 %	30.000.000	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Direhabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	0,00			-	1 Unit	30.000.000	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Makam	30.000.000	DINAS SOSIAL
						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			4.969.565.735					8.618.096.075	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.969.565.735					8.578.096.075	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.969.565.735					8.578.096.075	
87	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.966.926.075				-	5.801.096.075	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	15.270.000	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	12.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							0	1 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 0	580.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	580.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	580.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	580.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	950.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.966.926.075			-	-	5.086.926.075	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.966.926.075	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	46 Orang/bulan	4.966.926.075	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	120.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	6.800.000	
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	6.800.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	10.000.000	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang	10.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	288.600.000	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Paket	4.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	30.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	5.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	12.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	8.400.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	32.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	11.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	185.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	279.500.000	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	18.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	90.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	6.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	165.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	114.000.000	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Unit	74.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	40.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
88	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	2.639.660				-	50.000.000	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	2.639.660			-	-	50.000.000	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro									
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									
							0	10 0	2.639.660	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 0	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
89	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	0,00				-	1.267.000.000	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	0,00			-	-	1.250.000.000	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
							0	64 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	64 0	750.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									
							0	5 Unit 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit 0	500.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	0,00			-	-	17.000.000	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									

							0	0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 0	17.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
90	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	0,00				-	185.000.000	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	155.000.000	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Walenrang Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Orang	55.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Orang	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	30.000.000	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Orang	30.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
91	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	0,00				-	1.275.000.000	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	40.000.000	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	40.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	1.235.000.000	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Perkara	35.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
							0	0 0	0,00	-	PAJAK ROKOK, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	0 0	1.200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			0,00					40.000.000	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			0,00					40.000.000	
92	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	0,00				-	40.000.000	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	0,00			-	-	40.000.000	
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman									
							0	30 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 0	40.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.708.432.933					3.840.604.052	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.708.432.933					3.840.604.052	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.708.432.933					3.840.604.052	
93	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.364.978.825				-	3.392.149.944	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	28.226.450			-	-	32.500.000	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	26.306.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.920.450	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.767.312.931			-	-	2.767.312.931	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	2.668.432.931	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	300 Orang/bulan	2.668.432.931	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98.880.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	98.880.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.068.431			-	-	8.500.000	
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.068.431	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	8.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	231.640.061			-	-	253.106.061	
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.919.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Paket	86.385.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	3.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Dokumen	3.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	11.662.061	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	19 Paket	11.662.061	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	139.308.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Laporan	139.308.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	50.000.000			-	-	50.000.000	
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	231.149.878			-	-	231.149.878	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.749.878	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	48.749.878	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	182.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	182.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.581.074			-	-	49.581.074	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	49.581.074	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Unit	49.581.074	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
94	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	80.000.000				-	80.000.000	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000			-	-	30.000.000	
	2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Lembaga	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000			-	-	50.000.000	
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	5 Lembaga	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5 Lembaga	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
95	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	100.000.000				-	150.000.000	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000			-	-	150.000.000	
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 orang	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
96	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	38.454.108				-	38.454.108	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	38.454.108			-	-	38.454.108	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	38.454.108	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	38.454.108	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
97	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	25.000.000				-	30.000.000	

	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000			-	-	30.000.000	
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
98	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	100.000.000				-	150.000.000	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000			-	-	150.000.000	
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota									
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS KETAHANAN PANGAN			4.486.911.701					4.947.918.005	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.486.911.701					4.947.918.005	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.486.911.701					4.947.918.005	
99	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.650.517.995				-	4.024.544.120	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	18.031.513			-	-	26.250.876	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.999.049	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Dokumen	5.208.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.019.063	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	3.019.063	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.022.963	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	3.248.726	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.359.020	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	2.356.948	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.194.373	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	2.048.796	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.946.056	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	4.022.022	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							0	4 0	1.490.989	-	-	-	4 0	6.347.321	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.986.155.280			-	-	3.131.231.758	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan	2.866.626.299	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	312 Orang/bulan	2.966.626.299	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	102.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	145.270.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.693.640	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	7.165.847	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12.235.341	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	18 Laporan	12.169.612	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.183.281			-	-	5.850.027	
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.183.281	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	5.850.027	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	22.450.244			-	-	25.827.930	
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	9.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	26 Paket	9.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	5.450.244	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	8 Dokumen	8.827.930	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	8.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Orang	8.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	318.015.887			-	-	359.816.579	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Paket	6.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.893.622	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Paket	2.469.839	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.400.637	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	4.371.378	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.369.738	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	8.499.236	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	9.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	15.305.992	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	17.689.526	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	6.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	275.045.898	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	80 Laporan	305.786.600	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	41.036.950			-	-	41.036.950	
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	6.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Unit	6.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	31.036.950	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Unit	31.036.950	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Unit	4.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	203.883.502			-	-	279.260.000	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	20.283.502	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	25 Laporan	47.660.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	231.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.761.338			-	-	155.270.000	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	45.301.338	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	25 Unit	47.660.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	4.060.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	25 Unit	7.550.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Unit	100.060.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
100	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	641.329.672				-	711.091.351	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	191.309.499			-	-	234.002.686	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	8.010.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	8.010.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	32.628.258	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	100 Keluarga	61.048.906	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota									
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	64.446.894	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 laporan	54.716.765	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	11.456.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	15.106.365	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota									
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	8 Unit	13.919.930	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	8 Unit	54.959.978	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan									

							Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	10.010.630	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	15.307.455	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota									
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	13 Laporan	1.229.298	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	13 Laporan	1.229.298	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	39.546.035	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	10.148.615	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	6.769.512	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	6.769.512	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota									
							Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.292.792	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	6.705.792	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	309.932.008			-	-	337.035.560	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	13,79 Ton	299.917.488	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	13,79 Ton	326.352.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota									
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton	10.014.520	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	10 Ton	10.683.560	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	140.088.165			-	-	140.053.105	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	16.679.940	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	16.644.880	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	116.863.225	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Laporan	116.863.225	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun									
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	6.545.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	6.545.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
101	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	147.280.788				-	160.920.804	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	16.392.679			-	-	18.782.099	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	16.392.679	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	18.782.099	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	130.888.109			-	-	142.138.705	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.568.640	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	9.180.840	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	8.416.840	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	10.466.840	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	103.760.759	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	116.285.435	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.141.870	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	6.205.590	DINAS KETAHANAN PANGAN
102	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	47.783.246				-	51.361.730	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	47.783.246			-	-	51.361.730	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.814.941	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	12.854.330	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	26.767.850	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	25.307.400	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	13.200.455	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	13.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
						DINAS PERTANAHAN			2.324.791.434					2.782.300.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.324.791.434					2.782.300.000	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.324.791.434					2.782.300.000	
103	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.929.791.434				-	2.312.300.000	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.000.000			-	-	18.000.000	
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	5.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.287.500.000			-	-	1.603.500.000	
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.200.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Orang/bulan	1.500.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	1.500.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	90.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.000.000			-	-	6.000.000	
	2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	71.000.000			-	-	71.000.000	
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	25.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	40 Paket	25.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang	10.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Orang	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	175.491.434			-	-	209.000.000	
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Paket	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Paket	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Paket	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Paket	5.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Paket	5.000.000	DINAS PERTANAHAN

	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Dokumen	10.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Paket	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	10.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	121.491.434	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	150.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	24.000.000			-	-	24.000.000	
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	7.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	17.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	315.800.000			-	-	345.800.000	
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	7.200.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	8.600.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	330.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.000.000			-	-	33.000.000	
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	25.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	13 Unit	25.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Unit	3.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	5.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	2.000.000			-	-	2.000.000	
	2	10	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	2.000.000	DINAS PERTANAHAN
104	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	40.000.000				-	40.000.000	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000			-	-	40.000.000	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Berita Acara	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Berita Acara	25.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
105	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	125.000.000				-	180.000.000	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000			-	-	180.000.000	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	30.000.000	DINAS PERTANAHAN
106	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	30.000.000				-	30.000.000	

	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000			-	-	30.000.000	
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									
							Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
107	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	200.000.000				-	220.000.000	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000			-	-	220.000.000	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Laporan	20.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	3 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Dokumen	170.000.000	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			0,00					13.065.865.963	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					13.065.865.963	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			0,00					13.065.865.963	
108	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0,00				-	3.251.555.596	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	19.647.713	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	12.726.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	1.168.396	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	749.648	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	2.099.085	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	754.085	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Laporan	1.045.318	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5 Laporan	1.105.181	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	2.658.850.613	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	25 Orang/bulan	2.550.742.132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Dokumen	105.480.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	1.379.185	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Laporan	1.249.296	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	8.724.136	
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Laporan	8.724.136	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	247.075.842	

	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							0	0 0	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	0 0	714.788	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	977.077	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	4.148.880	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	11.911.508	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	50 Laporan	229.323.589	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	157.949.892		
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	49.199.892	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	1.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	94.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	159.307.400		
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	15 Unit	159.307.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
109	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	0,00				-	175.673.770		
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	9.474.000		
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota										
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	9.474.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	166.199.770		
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	7.054.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang										
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup										
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	9.145.770	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
110	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	0,00				-	88.082.549		
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	88.082.549		
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	63.472.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	9.830.477	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Lokasi	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan										
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota										
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	14.779.172	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
111	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	0,00				-	8.114.000		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	8.114.000		
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	0 Ha	8.114.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

112	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atu Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
113	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	0,00				-	17.668.273	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	17.668.273	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	7.952.774	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
							Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Badan Usaha	9.715.499	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
114	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-	0,00				-	0,00	
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
115	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	0,00				-	7.902.598	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	7.902.598	
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Sanksi	7.902.598	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0011	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup									
							Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
116	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	0,00				-	9.516.869.177	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-	0,00			-	-	9.516.869.177	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Mobil & 8 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Mobil & 8 Unit	7.333.170.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	11.487.307	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	6077,54 Ton	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6077,54 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah									
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	100 Persentase	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6077,54 Ton	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6077,54 Ton	2.172.211.870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6077,54 Ton	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6077,54 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.729.308.527						5.859.000.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.729.308.527						5.859.000.000	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.729.308.527						5.859.000.000	
117	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.188.236.947				-		5.369.000.000	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.961.750				-	-	24.000.000	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.009.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Dokumen	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.318.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Dokumen	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	994.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Dokumen	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.098.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Dokumen	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	935.650	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Dokumen	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.605.950	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	5 Laporan	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.419.006.445				-	-	3.435.000.000	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.287.280.945	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	33 Orang/bulan	3.300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	127.236.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	5 Dokumen	130.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.676.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	5 Laporan	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.812.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	4 Laporan	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	9.589.000				-	-	10.000.000	
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	764.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	4 Laporan	1.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.824.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2 Laporan	9.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	37.253.820				-	-	40.000.000	
	2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	37.253.820	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	953.257.711				-	-	1.065.000.000	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	10.757.761	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9 Paket	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	750.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	4 Paket	850.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	13.724.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Paket	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.119.920	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	13.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	14.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket	11.155.180	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	17 Paket	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	157.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	300.000.000				-	-	335.000.000	

	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Unit	335.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	313.886.000			-	-	322.000.000	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	248.086.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	64.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	135.282.221			-	-	138.000.000	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	128.172.221	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	29 Unit	130.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	3.450.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	18 Unit	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	3.660.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	18 Unit	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	227.106.736				-	154.000.000	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	199.569.836			-	-	124.000.000	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
							0	0 0	84.584.100	-	PAJAK DAERAH	-	0 0	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	26.192.980	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	28.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
							Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	12.779.756	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk									
							Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	4 Dokumen	76.013.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	27.536.900			-	-	30.000.000	
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	27.536.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
119	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	85.572.180				-	95.000.000	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	58.537.060			-	-	65.000.000	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	42.724.520	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	3 Layanan	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	15.812.540	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	27.035.120			-	-	30.000.000	
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	27.035.120	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
120	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	220.717.590				-	230.000.000	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	51.722.780			-	-	55.000.000	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	51.722.780	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	168.994.810			-	-	175.000.000	
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	36.372.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan									
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	132.622.210	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	135.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

121	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	7.675.074				-	11.000.000	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	7.675.074			-	-	11.000.000	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.699.133	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2.975.941	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.628.685.985					10.529.000.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.628.685.985					10.529.000.000	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.628.685.985					10.529.000.000	
122	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.775.370.457				-	5.179.000.000	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	38.500.000			-	-	65.000.000	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.676.557.643			-	-	3.750.000.000	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.538.544.909	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	37 Orang/bulan	3.600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	132.012.734	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	17 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	59.532.096			-	-	60.000.000	
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	59.532.096	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000			-	-	37.000.000	
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	36 Paket	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Dokumen	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	482.336.632			-	-	611.000.000	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	10 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	25.336.632	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Paket	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	400.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Laporan	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	75.000.000			-	-	116.000.000	
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	320.600.000			-	-	380.000.000	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	272.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	320.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	102.844.086			-	-	160.000.000	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	92.844.086	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	23 Unit	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Unit	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
123	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	0,00				-	50.000.000	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	0,00			-	-	50.000.000	
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa										
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	207 Desa	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	207 Desa	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
124	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	25.000.000				-	80.000.000	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	25.000.000			-	-	80.000.000	
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota										
							0	5 0	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 0	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
125	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	3.758.315.528				-	4.000.000.000	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	3.758.315.528			-	-	4.000.000.000	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
							-	-	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	633 Dokumen	3.413.315.528	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	633 Dokumen	3.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	42 Dokumen	185.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	42 Dokumen	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa										
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	207 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	207 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	25 Dokumen	35.000.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20 Desa	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Desa	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	52 Dokumen	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

126	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	1.070.000.000				-	1.220.000.000	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.070.000.000			-	-	1.220.000.000	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 Dokumen	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	30 Dokumen	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
							0	207 0	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	207 0	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	207 Dokumen	1.000.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	207 Dokumen	1.100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			10.794.397.859					12.639.500.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.794.397.859					12.639.500.000	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			10.794.397.859					12.639.500.000	
127	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.864.367.385				-	2.959.500.000	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.195.000			-	-	9.000.000	
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	1.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	1.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	1.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	1.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	1.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	1.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.189.744.858			-	-	2.200.000.000	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.189.744.858	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	16 Orang/bulan	2.200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	292.372.309			-	-	320.000.000	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	933.808	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Paket	1.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	46.439.350	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	4.995.184	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9 Paket	6.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.321.859	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Paket	6.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							0	9 Jenis 0	10.800.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9 Jenis 0	12.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39 Paket	23.446.643	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	39 Paket	25.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	40.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	161.535.465	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Laporan	180.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	260.634.336			-	-	280.500.000	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	10.382.336	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1000 Laporan	10.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.842.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	231.410.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.420.882			-	-	150.000.000	
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	115.420.882	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	36 Unit	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
128	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	489.528.014				-	675.000.000	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	0,00			-	-	125.000.000	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	125.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	489.528.014			-	-	550.000.000	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	259.994.268	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2 Laporan	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	229.533.746	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
129	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	5.357.070.066				-	6.785.000.000	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1.907.000.000			-	-	2.105.000.000	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana									
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22 Kecamatan Unit	440.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	22 Kecamatan Unit	470.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	1.342.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	5 Laporan	1.500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	125.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3 Dokumen	135.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	1.816.000.000			-	-	2.000.000.000	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	908 Orang	1.816.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	908 Orang	2.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.329.670.066			-	-	2.355.000.000	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	42.300.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Laporan	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2092 Orang	720.848.060	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2092 Orang	760.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	531.872.006	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	5 Unit	1.500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	34.650.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2 Laporan	45.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	304.400.000			-	-	325.000.000	
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3 Dokumen	304.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3 Dokumen	325.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
130	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	2.083.432.394				-	2.220.000.000	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.083.432.394			-	-	2.220.000.000	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	10 Unit	140.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang	73.032.394	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Orang	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	282 Tim Kelompok	1.880.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	282 Tim Kelompok	2.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PERHUBUNGAN			10.902.389.575					15.763.000.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.902.389.575					15.763.000.000	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			10.902.389.575					15.763.000.000	
131	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.099.083.211				-	7.708.000.000	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.489.200			-	-	48.500.000	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.489.200	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	12.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	9.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	12 Dokumen	6.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	6.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.856.651.806			-	-	6.418.000.000	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.848.862.446	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	37 Orang/bulan	6.400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.789.360	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Laporan	8.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	60.800.360			-	-	89.000.000	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	28.380.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	40 Paket	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	10.420.360	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	3 Dokumen	9.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	22.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Orang	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	326.585.590			-	-	383.500.000	

	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	36.205.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Paket	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.994.590	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	3 Paket	9.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	11 Paket	8.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	5 Dokumen	8.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	22 Paket	44.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							0	0 0	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	0 0	9.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							-	-	282.386.000	-	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	285.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	31.036.950			-	-	30.000.000	
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.036.950	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	4 Unit	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	505.777.305			-	-	515.000.000	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							0	0 0	28.529.705	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	0 0	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.247.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	115.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	370.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	305.742.000			-	-	224.000.000	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	137.967.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	21 Unit	139.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	10 Unit	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	167.775.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	1 Unit	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
132	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	5.738.429.864				-	7.780.000.000	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	420.000.000	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	4.830.807.146			-	-	5.000.000.000	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	450 Unit	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	350 Unit	1.516.341.146	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	350 Unit	1.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	3.314.466.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	20 Unit	3.300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	0,00			-	-	200.000.000	
	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C									
							0	0 0	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Barammamase	PAJAK DAERAH	-	0 0	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	132.375.578			-	-	340.000.000	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3 Unit	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1000 Unit	73.511.578	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1000 Unit	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	21.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	-	1000 Dokumen	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	37.864.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5 Unit	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	756.308.560			-	-	1.800.000.000	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	756.308.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	800.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	10 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	10 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	18.938.580			-	-	20.000.000	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	18.938.580	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
133	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	64.876.500				-	275.000.000	
	2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0,00			-	-	200.000.000	
	2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal									
							Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	64.876.500			-	-	75.000.000	
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	64.876.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			5.963.367.290					5.962.470.172	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.963.367.290					5.962.470.172	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.730.362.827					5.729.070.772	
134	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.766.329.766				-	3.766.142.763	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	61.831.620			-	-	59.755.388	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	39.485.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	25.696.564	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.386.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	18.026.260	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.393.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.566.720	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	10.532.564	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.121.912.709			-	-	3.155.866.538	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.952.316.209	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	39 Orang/bulan	2.949.155.998	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	155.460.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Dokumen	192.300.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.731.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	3.731.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	10.405.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	16 Laporan	10.679.040	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	374.617.681			-	-	356.244.037	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.996.014	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5 Paket	2.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	89.720.551	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5 Paket	80.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.943.375	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Paket	3.958.039	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.566.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Paket	2.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	22.085.041	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Paket	17.785.998	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	254.306.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	139.001.796			-	-	129.400.000	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.001.796	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	104.400.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	68.965.960			-	-	64.876.800	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.263.648	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Unit	41.356.800	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	27.702.312	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Unit	23.520.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
135	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	86.90 % 92,80 %	1.389.600.920				86.90 % 92,80 %	1.388.492.850	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	86.90 % 92.80 %	1.389.600.920			-	86.90 % 92.80 %	1.388.492.850	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	981.970.204	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	981.486.820	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
							0	1 Komunitas 0	22.650.822	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Komunitas 0	22.448.052	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan Permohonan	32.106.292	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Permohonan Permohonan	32.110.932	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
							Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	335.586.900	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Konten	335.160.344	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 orang Orang	17.286.702	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 orang Orang	17.286.702	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
136	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	574.432.141				-	574.435.159	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	574.432.141			-	-	574.435.159	
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Aplikasi	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	38.385.489	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	38.413.159	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	55 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	55 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
							Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Layanan	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	4 Aplikasi	64.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Aplikasi	64.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan									
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Aplikasi	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE									
							Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet									
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	55 Perangkat Daerah	469.246.652	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	55 Perangkat Daerah	469.222.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi									
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			189.594.337					190.000.000	
137	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	189.594.337				-	190.000.000	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	189.594.337				-	190.000.000	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	20 %	9.338.188	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 %	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	40 %	26.997.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	40 %	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	70 %	48.178.713	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	70 %	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	35 Orang	71.349.648	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 Orang	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	20 %	6.338.188	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 %	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	3 Laporan	27.392.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			43.410.126					43.399.400	
138	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	43.410.126				-	43.399.400	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.131.200				-	10.218.100	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	35 Perangkat Daerah	6.450.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	35 Perangkat Daerah	6.358.100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	4.681.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	3.860.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.278.926				-	33.181.300	
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									

							Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	32.278.926	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Kegiatan	33.181.300	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN			4.083.364.275					1.154.250.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.558.364.275					519.250.000	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			3.558.364.275					519.250.000	
139	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.248.364.275				-	319.250.000	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	24.250.000			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	25.250.000	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Dokumen	1.500.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Dokumen	1.750.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Dokumen	2.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Dokumen	2.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Laporan	3.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.365.114.275			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	163.500.000	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.212.614.275	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	22 Orang/bulan	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	140.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	14 Dokumen	150.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	1 Laporan	4.500.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	14 Laporan	9.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.500.000			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	3.000.000	
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	2 Laporan	3.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000			Aparat Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	0,00	
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparat Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	50 Paket	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	371.500.000			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	67.500.000	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	6 Paket	2.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	12 Dokumen	22.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	40 Paket	20.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	12 Laporan	17.500.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	160 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	12 Dokumen	6.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	125.000.000			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	0,00	
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	2 Unit	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	65.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	8 Unit	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	155.000.000			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	0,00	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	12 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	12 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	155.000.000			Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	-	60.000.000	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	8 Unit	60.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	12 Unit	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Koperasi,Ukm dan Perindustrian kab. luwu	2 Unit	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
140	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	25.000.000				-	35.000.000	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten undefined	100 PERSEN undefined undefined	25.000.000			Koperasi	100 PERSEN undefined undefined	35.000.000	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	450 Unit Usaha	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Koperasi	450 Unit Usaha	35.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
141	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	50.000.000				-	55.000.000	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000			Koperasi	-	55.000.000	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	450 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Koperasi	450 Unit Usaha	55.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
142	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	50.000.000				-	0,00	

	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000			Pengurus Koperasi	-	0,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengurus Koperasi	50 Orang	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
143	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	20.000.000				-	15.000.000	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000			Koperasi	-	15.000.000	
	2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	25 Unit Usaha	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Koperasi	25 Unit Usaha	15.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
144	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	165.000.000				-	95.000.000	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	165.000.000			Pelaku Usaha	-	95.000.000	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	50 Unit Usaha	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	100 Unit Usaha	60.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	27500 Unit Usaha	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	27500 Unit Usaha	35.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	30 Orang	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			525.000.000					635.000.000	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			525.000.000					635.000.000	
145	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	500.000.000				-	600.000.000	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	500.000.000			Pelaku Usaha	-	600.000.000	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	500.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	4 Dokumen	600.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri									
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
146	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	25.000.000				-	35.000.000	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000			Pelaku Usaha	-	35.000.000	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	35.000.000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.201.949.559					5.156.000.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.201.949.559					5.156.000.000	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.201.949.559					5.156.000.000	
147	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.622.448.781				-	4.374.500.000	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.860.533			-	5 Dokumen	32.500.000	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.436.431	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.436.329	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.436.329	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.432.360	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	4.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.924.478	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.151.978	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.042.628	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.871.540.009			-	1 Laporan	2.481.000.000	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396 Orang/bulan	2.729.849.558	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	396 Orang/bulan	2.300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	116.760.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.514.165	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.840.780	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	4.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.575.506	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	17.743.415			-	1 Laporan	21.500.000	
	2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.743.415	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	13.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	120.000.000			-	1 Laporan	128.000.000	
	2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Paket	38.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Orang	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	25 Orang	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	290.731.962			-	1 Laporan	379.500.000	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	7.682.707	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	30 Paket	8.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	37.962.739	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	39.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.046.366	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.304.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	11.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	195.236.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	66.116.300			-	1 Laporan	90.000.000	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	66.116.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.069.247.189			-	-	1.112.000.000	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.347.189	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	11.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	617.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	650.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	1.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	440.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	161.209.373			-	2 Kegiatan	130.000.000	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	93.298.701	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Unit	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	67.910.672	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	56 Unit	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
148	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	250.000.000				-	260.000.000	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Membuat Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100 Dokumen	250.000.000			-	100 Dokumen	260.000.000	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	260.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
149	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	170.000.000				3 Kegiatan	270.000.000	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	170.000.000			-	3 Kegiatan	270.000.000	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
150	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	4 Laporan	74.000.000				4 Laporan	115.000.000	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	4 Laporan	74.000.000			-	4 Laporan	115.000.000	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	70.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	200 Pelaku Usaha	80.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	200 Pelaku Usaha	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	200 Kegiatan Usaha	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
151	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	1 Laporan	84.500.778				1 Laporan	126.500.000	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	84.500.778			-	300 Pelaku Usaha	126.500.000	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									

							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha.	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Kegiatan Usaha.	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Pelaku Usaha	51.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	39.500.778	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	500 Kegiatan Usaha	60.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
152	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	1.000.000				-	10.000.000	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	1 Laporan	1.000.000			-	1 Laporan	10.000.000	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			5.590.525.664					13.888.500.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.590.525.664					13.888.500.000	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			5.590.525.664					13.888.500.000	
153	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.136.327.555				-	4.693.500.000	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	42.975.078			-	-	53.000.000	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.286.692	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							0	1 0	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 0	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							0	1 0	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 0	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							0	1 0	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 0	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							0	1 0	4.571.216	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 0	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.860.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	3.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.257.170	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	10.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.356.537.317			-	-	3.357.000.000	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.196.996.975	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	32 Orang/bulan	3.200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							0	0 0	145.992.706	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 0	147.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.161.636	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.386.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	34.755.274			-	-	35.000.000	
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	34.755.274	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	35.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	32.300.000			-	-	350.000.000	
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Orang	150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	242.965.386			-	-	436.500.000	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.041.198	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							0	6 0	2.163.864	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 0	2.500.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.464.912	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	8.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	2.330.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Paket	3.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							0	0 0	8.400.000	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 0	9.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							-	-	7.464.912	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	210.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	100 Laporan	300.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	73.347.000			-	-	115.000.000	
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	40.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	73.297.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	75.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	277.600.000			-	-	253.000.000	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	45.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	208.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	75.847.500			-	-	94.000.000	
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	65.347.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	16 Unit	67.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Unit	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
154	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	477.450.703				-	2.000.000.000	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	477.350.703			-	-	1.600.000.000	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	49.864.336	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Dokumen	150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	60 Orang	262.825.012	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	60 Orang	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	100 Orang	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Kegiatan	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	60 Orang	91.295.712	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	60 Orang	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	73.215.643	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Orang	150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Unit	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000			-	-	400.000.000	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									

							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Organisasi	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	100 Orang	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
155	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	828.121.615				-	6.345.000.000	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	150.000			-	-	1.400.000.000	
	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Unit	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10 Unit	1.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Dokumen	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	238.468.115			-	-	925.000.000	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	82.438.446	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Kegiatan	550.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota									
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Kegiatan	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	50 Orang	155.979.669	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Orang	175.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	286.266.528			-	-	1.100.000.000	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	100 Orang	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	20 Orang	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)									
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Pelatda	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	45 Orang	186.350.690	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	45 Orang	400.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota									
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	99.765.838	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	150.050.000			-	-	2.200.000.000	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota									
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Dokumen	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Dokumen	2.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	153.186.972			-	-	720.000.000	
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi									

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Laporan	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan									
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Laporan	80.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	59.335.272	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Unit	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	93.701.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Lembaga	180.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
156	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	148.625.791				-	850.000.000	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	148.625.791				-	850.000.000	
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik									
							Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Dokumen	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah									
							0	1 0	100.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 0	150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
							0	60 0	48.475.791	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	60 0	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Unit	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan									
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Organisasi	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			6.445.826.790					7.430.100.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.445.826.790					7.430.100.000	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.337.326.790					7.242.500.000	
157	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.556.226.790				100 %	6.121.400.000	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	80 % 80 %	92.426.790			-	80 % 80 %	152.600.000	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.826.790	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Data	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Berita Acara	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu									
							Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0 Substansi	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Substansi	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan									
							Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	0 Berita Acara	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adminstrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	4.030.400.000			-	100 %	4.150.400.000	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.900.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	34 Orang/bulan	4.000.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	120.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	130.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	14 Laporan	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							-	-	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.600.000			-	100 %	20.600.000	
	2	23	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Laporan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Laporan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Laporan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	34 orang	35.900.000			-	34 orang	45.900.000	
	2	23	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Paket	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									

							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas									
							Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Laporan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN									
							Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	400.200.000			-	100 %	530.200.000	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Dokumen	35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Paket	60.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	115.900.000			-	100 %	175.900.000	
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
							Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Unit	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	505.000.000			-	100 %	580.000.000	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	280.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	360.800.000			-	100 %	465.800.000	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Unit	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	350.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah									
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Ha	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
158	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pertumbuhan kegemaran membaca masyarakat	0,89 Angka	760.800.000				0,89 Angka	1.070.800.000	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kegemaran membaca	100 %	380.600.000			-	100 %	570.600.000	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25 Perpustakaan	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Perpustakaan	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Perpustakaan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	25 Layanan	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Layanan	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Perpustakaan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat									
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	0 Eksemplar	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Eksemplar	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi									
							Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	25 Dokumen	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Dokumen	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	300 Eksemplar	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Eksemplar	200.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Eksemplar	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									

							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	0 Perpustakaan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Perpustakaan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kegemaran membaca	100 %	380.200.000			-	100 %	500.200.000	
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0 Perpustakaan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Perpustakaan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Perpustakaan	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	250 Orang	170.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	250 Orang	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2 Lokus	190.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Lokus	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
159	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	90 %	20.300.000				90 %	50.300.000	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100 %	20.100.000			-	100 %	50.100.000	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno									
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	25 Orang	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Orang	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0 Eksemplar	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Eksemplar	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100 %	200.000			-	100 %	200.000	
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0 Eksemplar	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Eksemplar	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0 Eksemplar	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Eksemplar	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			108.500.000					187.600.000	
160	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	"Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku"	53,14 %	107.000.000				53,14 %	186.100.000	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	71.600.000			-	100 %	125.700.000	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25 Berkas	25.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Berkas	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	25 Berkas	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Berkas	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis									
							Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	0 Unit	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	0 Lembaga	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Lembaga	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0006	Penyusunan Database Arsiparis									
							Jumlah arsiparis	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan									
							Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Orang	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip									
							Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	0 Lembaga	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Lembaga	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	0 Laporan	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Laporan	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	0 Instansi	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Instansi	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	10.300.000			-	100 %	10.300.000	
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI									

							Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip									
							Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	0 Naskah	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Naskah	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	15 Arsip	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Arsip	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan									
							Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	0 Dokumen	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	25.100.000			-	100 %	50.100.000	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0 Pengguna	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Pengguna	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
161	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dokumen Arsip daerah yang diselamatkan dan dilindungi	90,54 %	1.300.000				90,54 %	1.300.000	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	200.000			-	100 %	200.000	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Berkas	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	200.000			-	100 %	200.000	
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	400.000			-	100 %	400.000	
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Daftar	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Daftar	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	200.000			-	-	200.000	
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-	300.000			-	-	300.000	
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang									
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)									

							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
162	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	90 %	200.000				90 %	200.000	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	85 %	200.000			-	85 %	200.000	
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	0 SOP	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 SOP	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0 Arsip	100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Arsip	100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PERIKANAN			6.995.666.543					300.000.000	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.995.666.543					300.000.000	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			6.995.666.543					300.000.000	
163	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.096.666.543				-	0,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	91.946.158			-	-	0,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	34.985.126	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.457.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.457.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.252.105	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.252.105	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.096.702	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.445.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.526.079.519			-	-	0,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	4.359.776.541	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	51 Orang/bulan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	158.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.902.978	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.400.000			-	-	0,00	
	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	54.985.126			-	-	0,00	
	3	25	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 Paket	34.985.126	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	51 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	236.061.740			-	-	0,00	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.401.876	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.834.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	47.325.364	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	162.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	65.000.000			-	-	0,00	
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	42.364.000			-	-	0,00	
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.364.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	71.830.000			-	-	0,00	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.830.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
164	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	284.000.000				-	300.000.000	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	262.000.000			-	-	0,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	128.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	124.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000			-	-	300.000.000	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	20 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Unit	300.000.000	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	12.000.000			-	-	0,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	12.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Layanan	0,00	DINAS PERIKANAN
165	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	1.540.000.000				-	0,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	10.000.000			-	-	0,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	22 Kelompok	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	22 Kelompok	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	1.530.000.000			-	-	0,00	

	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	895.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	635.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
166	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	0,00				-	0,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota										
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota										
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota										
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERIKANAN
167	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	75.000.000				-	0,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	10.000.000			-	-	0,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko										
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	65.000.000			-	-	0,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Ton	0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	55.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERIKANAN
						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			3.055.826.866					0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					0,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			0,00					0,00	
168	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	0,00				-	0,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan										
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0004	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan										
							Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	1 Lembaga	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Lembaga	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00				-	0,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional										
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat										

							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat									
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
169	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	0,00				-	0,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	50 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Lembaga	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
170	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	0,00				-	0,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
171	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	0,00				-	0,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	1 Objek	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Objek	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.055.826.866					0,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.055.826.866					0,00	
172	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.055.826.866				-	0,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.296.810			-	-	0,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.149.010	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.229.560	-	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							-	-	1.229.560	-	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							-	-	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.040.281.601			-	-	0,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	126.840.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.840.480	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17.570.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.248.455			-	-	0,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.153.115	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	5 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.808.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.286.940	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	12 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	5 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	403 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	19 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
173	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	0,00				-	0,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									

							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lokasi	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
174	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	0,00				-	0,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Kegiatan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Promosi	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
175	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	0,00				-	0,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah									
							Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
176	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	0,00				-	0,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha									
							Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						DINAS PERTANIAN			53.644.479.754					64.574.093.127	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			53.644.479.754					64.574.093.127	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			53.644.479.754					64.574.093.127	
177	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.795.967.058				-	25.847.094.343	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.574.300			-	-	11.619.860	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.033.995	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Dokumen	3.042.515	DINAS PERTANIAN

	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.033.995	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	3.042.515	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.033.995	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	3.042.515	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.472.315	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	2.492.315	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	24.225.426.175			-	-	25.221.760.000	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2244 Orang/bulan	24.003.306.175	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2244 Orang/bulan	25.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	222.120.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Dokumen	221.760.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	262.559.900			-	-	303.467.000	
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.615.246	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Paket	8.389.246	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	18.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	15 Dokumen	18.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	27.121.954	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Paket	27.077.754	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	209.222.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	250.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	210.241.683			-	-	210.247.483	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.241.683	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	66.247.483	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	144.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	86.165.000			-	-	100.000.000	
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	86.165.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	89 Unit	100.000.000	DINAS PERTANIAN
178	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	16.123.777.882				-	19.100.000.000	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	4.739.865.500			-	-	5.000.000.000	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	4.739.865.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	12 Laporan	5.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	9.517.692.382			-	-	12.000.000.000	
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	9.517.692.382	Kab. Luwu, Ponrang, Tirowali Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	12 Dokumen	12.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	1.866.220.000			-	-	2.100.000.000	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	148 Ekor	1.846.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	148 Ekor	2.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 Dosis	20.220.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Dosis	100.000.000	DINAS PERTANIAN
179	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	11.538.897.150				-	17.250.000.000	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	165.243.400			-	-	250.000.000	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	165.243.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	250.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	11.373.653.750			-	-	17.000.000.000	

	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	474.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Unit	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	26 Unit	3.999.990.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	26 Unit	6.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	450.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Unit	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air									
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	450.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	33 Unit	5.999.663.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	33 Unit	8.000.000.000	DINAS PERTANIAN
180	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	21.248.000				-	100.000.000	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.248.000			-	-	100.000.000	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	21.248.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	100.000.000	DINAS PERTANIAN
181	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	1.164.589.664				-	2.276.998.784	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	1.164.589.664			-	-	2.276.998.784	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Unit	109.590.880	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	500 Unit	1.200.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22 Unit	1.054.998.784	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	22 Unit	1.076.998.784	DINAS PERTANIAN
						DINAS PERDAGANGAN			7.073.115.022					7.171.457.613	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.073.115.022					7.171.457.613	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			7.073.115.022					7.171.457.613	
182	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.435.524.461				-	5.901.457.613	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.000.000			-	-	18.500.000	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	2.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	4 Laporan	3.500.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.904.000.000			-	-	5.006.157.613	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan	4.900.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	576 Orang/bulan	5.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	1 Laporan	3.500.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2 Dokumen	2.657.613	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	393.000.000			-	-	301.500.000	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Paket	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	8 Paket	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Paket	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	12 Paket	3.500.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	5 Paket	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	18.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	30 Dokumen	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	35.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Paket	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Laporan	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500 Laporan	270.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	2500 Laporan	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.054.524.461			-	-	525.000.000	
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	24 Laporan	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	1.024.524.461	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	100 Laporan	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	65.000.000			-	-	50.300.000	
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	60.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	20 Unit	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Unit	300.000	DINAS PERDAGANGAN
183	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	0,00				-	0,00	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik									
							Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	0 laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
184	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	400.000.000				-	1.150.000.000	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	400.000.000			-	-	1.150.000.000	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	12 Unit	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	16 Unit	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN
185	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	115.000.000				-	20.000.000	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	5.000.000			-	-	3.000.000	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Laporan	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000			-	-	10.000.000	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							0	90 0	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	90 0	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							-	-	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN

	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000			-	-	7.000.000	
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan									
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	5 Laporan	3.500.000	DINAS PERDAGANGAN
186	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	0,00				-	0,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	0,00	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERDAGANGAN
187	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	122.590.561				-	100.000.000	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	122.590.561			-	-	100.000.000	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10 Unit	60.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Unit	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 Orang	62.590.561	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	10 Orang	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						SEKRETARIAT DAERAH			31.609.235.075					34.349.159.894	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			31.609.235.075					34.349.159.894	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			31.609.235.075					34.349.159.894	
188	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	26.706.602.885				-	29.179.248.760	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	456.756.722			-	-	542.300.000	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	278.252.044	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.701.834	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	24.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	27.803.947	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	41.718.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	28.476.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	32.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.803.947	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	20.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.219.420.650			-	-	11.247.809.973	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	8.544.817.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Orang/bulan	9.544.817.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.583.654.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	1.600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	15.350.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	15.230.223	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	22.348.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	22.488.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	14 Laporan	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	15.762.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	17.762.750	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	172.270.750			-	-	191.294.241	
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	109.244.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	120.528.438	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.532.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	15.321.456	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50.494.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	55.444.347	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	174.170.000			-	-	176.281.821	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	159.170.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	90 Paket	160.294.587	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Orang	15.987.234	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.832.210.325			-	-	3.309.530.142	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	32.341.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Paket	35.672.194	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	16.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Paket	17.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Paket	247.769.120	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	237.037.475	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	24 Paket	250.467.521	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	48.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	49.637.852	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	180.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	182.497.354	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.162.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	1.260.347.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	896.617.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	42 Laporan	997.324.651	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75 Dokumen	258.814.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	75 Dokumen	268.814.450	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.030.110			-	-	44.475.539	
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	28.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Unit	29.365.189	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	11.530.110	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Unit	15.110.350	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.699.591.150			-	-	6.910.950.247	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.937.520.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Laporan	541.457.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	21 Laporan	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	4.220.613.350	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	24 Laporan	4.360.950.247	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.124.755.650			-	-	1.343.692.500	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	83.720.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	84.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	486 Unit	1.016.785.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	486 Unit	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	128.832.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	14.250.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	15.360.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Unit	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1.491.773.377			-	-	1.570.547.000	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	671.623.377	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang/Bulan	680.377.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	57 Paket	150.150.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Paket	170.170.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	220.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang	220.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	450.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang/Bulan	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.689.273.092			-	-	3.000.992.297	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.331.316.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	1.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.008.922.976	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	1.100.992.297	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	349.034.116	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	522.864.009			-	-	550.808.000	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	165.014.929	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	57 Laporan	107.208.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Laporan	120.208.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	63.831.930	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	9.033.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	177.776.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	180.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	283.487.050			-	-	290.567.000	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	70 Laporan	166.920.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	70 Laporan	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50 Laporan	116.567.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Laporan	120.567.000	SEKRETARIAT DAERAH
189	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	3.551.780.720				-	3.701.911.134	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	391.928.650			-	-	450.000.000	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	169.867.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	180.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	110.271.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	111.790.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	2.313.991.430			-	-	2.330.000.000	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	518.320.130	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11 Dokumen	530.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1.099.231.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	696.439.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	796.345.940			-	-	870.000.000	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	900 Dokumen	411.649.820	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	900 Dokumen	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	223.318.210	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Kasus	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	93 Dokumen	161.377.910	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	93 Dokumen	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	49.514.700			-	-	51.911.134	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	28.066.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	29.066.134	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	21.448.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	22.845.000	SEKRETARIAT DAERAH
190	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	1.350.851.470				-	1.468.000.000	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	328.814.633			-	-	333.000.000	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	22.754.290	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	23.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	154.557.623	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	155.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	78.997.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	72.505.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	74.405.200			-	-	75.000.000	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	74.405.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	899.846.687			-	-	1.010.000.000	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	600.301.787	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	195.101.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	104.443.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Orang	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	47.784.950			-	-	50.000.000	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	47.784.950	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD			26.336.378.761					35.489.395.619	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			26.336.378.761					35.489.395.619	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			26.336.378.761					35.489.395.619	
191	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	22.495.525.457				-	23.972.109.489	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	39.703.206			-	-	87.174.479	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.336.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	16.519.679	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	11.430.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	11.430.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	11.430.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	11.430.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9.726.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	24.934.800	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.025.427.042			-	-	4.102.097.653	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/bulan	3.732.997.653	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	540 Orang/bulan	3.732.997.653	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	277.370.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	341.670.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.066.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.926.183	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.066.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6 Laporan	11.430.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.666.183			-	-	8.666.183	
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.666.183	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	8.666.183	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	329.473.750			-	-	474.161.000	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	35.860.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	46 Paket	35.860.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.909.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	12.080.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	60.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Orang	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	229.804.750	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	18 Orang	306.221.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	382.371.040			-	-	892.350.120	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.613.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Paket	10.685.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	47 Paket	121.406.120	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.726.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6 Paket	12.328.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	60.146.040	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	10 Paket	78.115.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.162.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Paket	40.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	106.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	261.900.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	65.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.123.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	301.916.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	112.793.900			-	-	403.000.000	
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	83.758.900	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Unit	152.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29.035.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Unit	251.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	959.793.400			-	-	959.793.400	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	9.600.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	378.993.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	378.993.400	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	9.600.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	561.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	561.600.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	596.113.072			-	-	656.863.390	

	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	143.010.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Unit	143.010.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	287.050.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	13 Unit	287.050.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	12.512.208	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	155 Unit	46.460.380	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	143.375.864	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Unit	160.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	10.165.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7 Unit	20.343.010	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	15.400.185.552			-	-	15.367.285.552	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan	15.230.685.552	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	420 Orang/Bulan	14.980.785.552	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	127.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Paket	356.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	42.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 Orang	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	640.998.312			-	-	1.020.717.712	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	96.613.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Laporan	96.613.600	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	544.384.712	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Paket	924.104.112	SEKRETARIAT DPRD
192	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	3.840.853.304				-	11.517.286.130	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	512.230.400			-	-	2.958.313.000	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	457.730.400	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	2.811.313.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	45.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	135.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	379.833.450			-	-	596.968.000	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	10.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	15.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	10.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	15.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	126.570.100	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	202.796.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	126.570.100	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	202.796.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	105.693.250	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	160.376.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	133.193.250			-	-	214.376.000	
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	27.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	54.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan									
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	105.693.250	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	160.376.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.285.224.940			-	-	2.960.275.050	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	985.917.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	2.511.371.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	96.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Orang	96.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	144.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Orang	144.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	16.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	67.664.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	10.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	19.600.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	32.307.940	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	121.639.550	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	991.471.773			-	-	1.653.527.080	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	39.439.250	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	204.867.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	9.181.603	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	34.383.200	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	942.850.920	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	1.414.276.380	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	538.899.491			-	-	3.133.827.000	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	536.343.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	3.127.827.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	2.556.491	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH			8.914.191.757					9.507.620.268	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.914.191.757					9.507.620.268	
	5	01				PERENCANAAN			7.814.191.757					8.407.620.268	
193	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.175.691.757				-	6.634.120.268	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.500.000			-	-	33.500.000	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	22.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	2.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1 Dokumen	2.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan									
							Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Berita Acara	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.768.020.268			-	-	3.768.020.268	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.708.020.268	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	38 Orang/bulan	3.708.020.268	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.900.000			-	-	2.900.000	
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	1.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	1.200.000			-	-	1.200.000	

	5	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	1.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	93.700.000			-	-	46.200.000	
	5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Unit	2.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	38 Paket	2.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	2.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Orang	2.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN									
							Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 Orang	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Orang	2.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	34.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6 Orang	34.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.108.900.000			-	-	1.606.400.000	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	94.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Dokumen	94.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Paket	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	212.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	212.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	131.571.489			-	-	140.000.000	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Unit	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	91.571.489	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Unit	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	385.900.000			-	-	385.900.000	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	14.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	203.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	168.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	168.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	650.000.000			-	-	650.000.000	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	320.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Unit	320.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	80.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Unit	80.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Unit	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
194	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	949.000.000				-	1.084.000.000	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	759.000.000			-	-	894.000.000	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	200.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	350.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	85.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Berita Acara	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Berita Acara	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan	24.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1000 Usulan	24.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	90.000.000			-	-	90.000.000	
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah									
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	8 Kerja Sama	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	8 Kerja Sama	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	65.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Laporan	65.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	100.000.000			-	-	100.000.000	
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
195	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	689.500.000				-	689.500.000	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	379.500.000			-	-	379.500.000	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	4.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	4.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	8.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	8.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH	-	1 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	35.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	7.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	7.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	245.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	8 Laporan	245.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	136.000.000			-	-	136.000.000	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	22.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	22.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	2.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 Laporan	7.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	7.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 Laporan	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Laporan	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	174.000.000			-	-	174.000.000	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	18.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	18.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	12.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	12.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	45.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	45.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	7.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	7.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	12.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	12.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.100.000.000					1.100.000.000	
196	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	870.000.000				-	870.000.000	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	210.000.000			-	-	210.000.000	
	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	10 Laporan	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	10 Laporan	60.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	100.000.000			-	-	100.000.000	
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	10 Dokumen	100.000.000	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	520.000.000			-	-	520.000.000	
	5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	10 Dokumen	200.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	10 Dokumen	85.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	10 Dokumen	85.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	10 Dokumen	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	40.000.000			-	-	40.000.000	
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	10 Laporan	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
197	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	230.000.000				-	230.000.000	
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	-	-	230.000.000			-	-	230.000.000	
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi									
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	10 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi									
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	10 Laporan	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi									
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	10 Laporan	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			285.603.052.272					383.067.531.560	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			285.603.052.272					383.067.531.560	
	5	02				KEUANGAN			285.603.052.272					383.067.531.560	
198	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.066.136.000				-	10.484.911.600	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	110.107.000			-	-	142.073.900	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.004.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	8.040.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.755.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	11.381.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.901.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	8.971.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	40.479.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	52.622.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.399.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	4.418.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41 Laporan	1.751.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	41 Laporan	2.276.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	41.818.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	54.363.400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.188.728.000			-	-	6.745.346.400	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.277.384.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	41 Orang/bulan	5.560.599.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	886.933.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	2500 Dokumen	1.153.012.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.343.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	1 Laporan	10.845.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	7.725.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	5 Dokumen	10.042.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.343.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	2 Laporan	10.845.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	94.863.000			-	-	123.321.900	

	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	94.863.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	2 Laporan	123.321.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	238.651.000			-	-	310.246.300	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	78.280.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Paket	101.764.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41 Dokumen	7.107.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	41 Dokumen	9.239.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.107.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	9.239.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41 Dokumen	7.107.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	41 Dokumen	9.239.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	51.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Orang	66.950.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	25.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Orang	33.475.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	61.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Orang	80.340.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	917.524.000			-	-	1.192.781.200	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.828.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	10.176.400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.844.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	46.597.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	40.170.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	135.342.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	45 Dokumen	175.944.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	32.239.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Paket	41.910.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	80.340.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Laporan	104.442.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	595.031.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	150 Laporan	773.540.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	803.400.000			-	-	1.044.420.000	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	566.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	1 Unit	736.450.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	40.170.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	206.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Unit	267.800.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	286.958.000			-	-	373.045.400	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.416.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	9.640.800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	242.462.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	315.200.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.080.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	48.204.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	425.905.000			-	-	553.676.500	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	242.977.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Unit	315.870.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	15.450.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 Unit	20.085.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	167.478.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	217.721.400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
199	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	276.485.698.272				-	371.405.044.560	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.657.270.000			-	-	2.110.799.600	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									

						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	33.578.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	31.106.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	40.437.800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	13.390.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	17.407.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	12.463.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	16.201.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	13.184.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	17.139.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	13.184.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	17.139.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	620.472.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	806.613.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	534.570.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	694.941.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	51.603.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	67.083.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	70.143.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	14 Dokumen	91.185.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57 Dokumen	139.977.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	181.970.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	20.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	26.780.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	103.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	114 Orang	133.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	707.198.000			-	-	919.357.400	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	57 Dokumen	94.142.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	122.384.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1300 Dokumen	64.375.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1300 Dokumen	83.687.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15 Dokumen	156.251.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Dokumen	203.126.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen	41.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	53.560.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	130.089.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Laporan	169.115.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57 Dokumen	87.241.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	113.413.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	30.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	40.170.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	103.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	114 Orang	133.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	684.641.000			-	-	890.033.300	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	57 Laporan	62.212.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Laporan	80.875.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	57 Dokumen	28.325.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	36.822.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	57.577.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	74.850.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								

							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	131.943.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Laporan	171.525.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	67.362.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	87.570.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	22.454.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Dokumen	29.190.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 Dokumen	108.459.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Dokumen	140.996.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	26.059.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	33.876.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	51.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	66.950.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	103.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	114 Orang	133.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota								
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	25.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga	33.475.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	272.494.448.272			-	-	366.260.070.960	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	828 Laporan	248.386.639.072	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	828 Laporan	334.919.919.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
							-	-	18.144.109.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	-	23.587.341.960	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	414 Laporan	5.963.700.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	414 Laporan	7.752.810.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	942.141.000			-	-	1.224.783.300	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	57 Dokumen	839.141.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Dokumen	1.090.883.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	414 Orang	103.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	414 Orang	133.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
200	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	1.051.218.000				-	1.177.575.400	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.051.218.000			-	-	1.177.575.400	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga								
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	104.030.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	135.030.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	36.050.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	46.865.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	38.316.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	49.810.800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	72.100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	93.730.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	57 Laporan	79.722.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Laporan	103.638.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	57 Laporan	161.401.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57 Laporan	210.223.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	83.430.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Laporan	108.459.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 Laporan	161.710.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Laporan	21.022.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	116.905.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Dokumen	151.976.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	114 Laporan	51.397.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	114 Laporan	66.816.100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	57.783.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	75.117.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	88.374.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	114 Orang	114.886.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH			11.702.689.164					11.993.823.634	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			11.702.689.164					11.993.823.634	
	5	02				KEUANGAN			11.702.689.164					11.993.823.634	

201	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.102.769.332				-	10.607.907.534	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	67.584.673			-	-	70.963.903	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	18.886.434	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	-	7 Dokumen	19.830.755	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	7.513.372	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	7.889.040	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	6.467.087	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	6.790.441	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.733.569	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	7.070.247	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	6.452.307	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	6.774.922	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.026.577	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	5.277.905	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.505.327	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	17.330.593	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.162.531.593			-	-	7.520.658.169	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2683 Orang/bulan	6.894.338.111	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2683 Orang/bulan	7.239.055.016	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	227.003.171	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Dokumen	238.353.329	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	9.314.807	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	9.780.547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.588.271	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	16.367.684	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.908.826	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	8.304.267	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	4.369.837	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	17 Laporan	4.588.328	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4.008.570	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	4.208.998	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	33.019.413			-	-	34.670.070	
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							0	4 0	11.969.688	-	PAJAK DAERAH	-	4 0	12.568.172	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	21.049.725	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	22.101.898	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	399.840.141			-	-	419.832.147	
	5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen	393.648.609	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	16 Dokumen	413.331.039	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen	6.191.532	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	16 Dokumen	6.501.108	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	174.922.564			-	-	183.668.692	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	118.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Paket	124.740.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	11.584.564	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	12.163.792	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	12.810.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.150.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	9.607.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	130.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Orang	136.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	23.058.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6 Orang	24.210.900	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	979.512.713			-	-	1.028.488.407	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.095.467	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	10 Paket	11.650.240	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.398.800	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7 Paket	11.968.740	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	29.362.243	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	30 Paket	30.830.355	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	276.094.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Paket	289.898.700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	62.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	65.100.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	55.852.013	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	58.644.613	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	22.017.790	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	30 Laporan	23.118.679	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 Laporan	511.692.400	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	162 Laporan	537.277.080	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.093.629.570			-	-	1.148.311.048	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.289.570	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	118.954.048	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Laporan	11.940.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	21 Laporan	12.537.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	968.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	21 Laporan	1.016.820.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	191.728.665			-	-	201.315.098	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	173.788.665	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	20 Unit	182.478.098	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	17.940.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	20 Unit	18.837.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
202	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	1.599.919.832				-	1.385.916.100	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1.599.919.832			-	-	1.385.916.100	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	40.334.398	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	12 Dokumen	42.351.117	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	37.704.940	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5 Dokumen	39.590.187	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	28.520.934	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1 Laporan	29.946.980	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	5.010.890	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3 Unit	5.261.434	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	60.580.465	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	8 Laporan	63.609.488	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	137.699.692	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	144.584.960	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	17518 Obyek Pajak	14.228.820	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	17518 Obyek Pajak	14.940.261	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11 Dokumen	42.359.689	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	11 Dokumen	44.477.673	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	175180 Layanan	441.530.494	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	175180 Layanan	463.607.018	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	32.449.978	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	11 Dokumen	34.072.476	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	315.478.985	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	11 Dokumen	37.252.934	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	14.006.918	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	14.707.263	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	345.748.907	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	363.036.352	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	48.938.330	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	51.385.246	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	35.326.392	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	37.092.711	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.203.437.447					9.902.987.447	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.203.437.447					9.902.987.447	
	5	03				KEPEGAWAIAN			8.364.093.376					9.063.643.376	
203	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.899.215.113				-	4.898.765.113	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	134.186.998			-	-	134.186.998	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	36.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	36.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.022.016	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	1 Dokumen	19.022.016	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							-	-	18.508.772	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	18.508.772	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.494.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	18.494.650	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.344.622	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	12.344.622	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.384.060	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	14.384.060	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.932.878	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	14.932.878	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.364.388.180			-	-	3.363.938.180	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	3.033.730.885	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	44 Orang/bulan	3.033.730.885	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	300.060.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	300.060.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.938.600	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	14.488.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.658.695	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	15.658.695	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.400.000			-	-	8.400.000	
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	8.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	628.891.867			-	-	628.891.867	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.837.167	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Paket	7.837.167	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Paket	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	19.754.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	19.754.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Dokumen	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	29.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	29.300.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	250 Laporan	300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	669.300.000			-	-	669.300.000	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	115.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	115.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	100.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	453.600.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	453.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	94.048.068			-	-	94.048.068	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	76.628.068	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Unit	76.628.068	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	17.420.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Unit	17.420.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
204	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	3.464.878.263				-	4.164.878.263	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	562.122.425			-	-	562.122.425	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	300 Dokumen	68.903.164	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	300 Dokumen	68.903.164	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	300 Dokumen	247.739.334	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	300 Dokumen	247.739.334	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi									
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen	56.132.824	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	200 Dokumen	56.132.824	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	56.154.080	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Lembaga	56.154.080	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2000 Dokumen	60.831.569	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2000 Dokumen	60.831.569	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	72.361.454	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	72.361.454	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	520.829.520			-	-	520.829.520	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	174.351.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	300 Dokumen	174.351.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	346.477.770	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1000 Dokumen	346.477.770	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	2.173.241.032			-	-	2.873.241.032	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	215.463.654	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	215.463.654	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	34 Dokumen	450.740.728	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	34 Dokumen	500.740.728	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	30 Dokumen	780.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Dokumen	650.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	420.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 Orang	1.200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5 Dokumen	93.841.529	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Dokumen	93.841.529	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	50 Orang	113.195.121	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	113.195.121	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	200 Orang	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	208.685.286			-	-	208.685.286	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	88.057.810	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	500 Orang	88.057.810	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	120.627.476	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Laporan	120.627.476	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			839.344.071					839.344.071	

205	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	839.344.071				-	839.344.071	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	839.344.071				-	839.344.071	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	295 Laporan	839.344.071	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	295 Laporan	839.344.071	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT DAERAH			12.528.075.267					0,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.528.075.267					0,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			12.528.075.267					0,00	
206	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.877.795.292				-	0,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	137.635.085				-	0,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60.585.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	2 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.019.550	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.281.725	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.642.759	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.339.406	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.766.145	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	5 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.051.524.865				-	0,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.730.545.836	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang/bulan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	283.970.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.205.860	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	24.803.169	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	21.715.080				-	0,00	
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	21.715.080	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	473.841.000				-	0,00	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	100.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	3 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	373.041.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50 Orang	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.091.190.511				-	0,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.585.736	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	9 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	195 Paket	454.183.680	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	195 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	10.462.725	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	11 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.768.400	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	26.633.600	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	5 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	75.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	71.825.370	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	12 Paket	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	10 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	367.731.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	50 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	333.992.315			-	-	0,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	239.982.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	6 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	69.125.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	10 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	24.885.315	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	5 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	447.408.236			-	-	0,00	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.408.236	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	320.488.200			-	-	0,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	161.962.300	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	0 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	36.550.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	53 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	121.975.900	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	-	3 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
207	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	2.993.955.475				-	0,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	2.045.543.760			-	-	0,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38 Laporan	707.827.880	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	38 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	110.512.460	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	18 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	13 Laporan	102.485.880	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	13 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	26 Laporan	207.030.880	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	26 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	676.983.930	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	80 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	44.864.800	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Kesepakatan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	195.837.930	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	948.411.715			-	-	0,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	203.854.320	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	744.557.395	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	37 Laporan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
208	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	656.324.500				-	0,00	

	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	63.635.300			-	-	0,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	63.635.300	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Rekomendasi	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	592.689.200			-	-	0,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 perangkat daerah	309.433.110	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah	76.951.179	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	161.019.650	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Kegiatan	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35 perangkat daerah	45.285.261	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	35 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
						KECAMATAN BAJO			55.491.460					2.816.792.796	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			55.491.460					2.814.792.796	
	7	01				KECAMATAN			55.491.460					2.814.792.796	
209	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	55.491.460				-	2.808.792.796	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	291.460			-	-	8.850.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	291.460	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Dokumen	3.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	350.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Dokumen	500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	-	-	1 Dokumen	500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	3.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	49.200.000			-	-	2.456.442.796	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Orang/bulan	2.403.442.796	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000			-	-	7.500.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	7.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	69.000.000	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Paket	5.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Paket	2.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	2.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Paket	11.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	16.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	30.000.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	30.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	167.500.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	16.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	69.500.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	17.000.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Unit	2.500.000	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	50.000.000	KECAMATAN BAJO
210	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	0,00				-	6.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	0,00			-	-	6.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	KECAMATAN BAJO
	X					NON URUSAN			0,00					2.000.000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0,00					2.000.000	
211	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0,00				-	2.000.000	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	2.000.000	
	X	XX	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Unit	2.000.000	KECAMATAN BAJO
						KELURAHAN BAJO			252.799.851					379.200.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			252.799.851					379.200.000	
	7	01				KECAMATAN			252.799.851					379.200.000	
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	252.799.851				-	379.200.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	252.799.851			-	-	379.200.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	252.799.851	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	379.200.000	KELURAHAN BAJO
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	0,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	0,00	KELURAHAN BAJO
						KECAMATAN BAJO BARAT			1.480.957.120					1.582.730.905	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.480.957.120					1.582.730.905	
	7	01				KECAMATAN			1.480.957.120					1.582.730.905	
213	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.433.573.620				-	1.540.574.405	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.650.400			-	-	9.063.900	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.274.400	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	2.867.900	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.844.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.549.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.844.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.549.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.844.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.549.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.844.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.549.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.255.485.120			-	-	1.265.899.520	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.213.217.120	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	13 Orang/bulan	1.213.217.120	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.055.600	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	48.151.200	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.112.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	2.265.600	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.100.400	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	2.265.600	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.567.000			-	-	5.567.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.567.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	5.567.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	14.220.000			-	-	13.000.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	14.220.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	21 Paket	13.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	64.948.203			-	-	80.210.497	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.631.600	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	6.454.600	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	1.200.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	14.256.603	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	14.234.397	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	25.860.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Laporan	30.321.500	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.726.500			-	-	50.000.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	16.726.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	50.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.075.000			-	-	51.531.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.475.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	13.731.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	37.800.000	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.901.397			-	-	65.302.488	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	9.487.597	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	30.302.488	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.413.800	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	35.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
214	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	11.383.500				-	24.156.500	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	11.383.500			-	-	24.156.500	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							0	1 0	8.883.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 0	9.156.500	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	2.500.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
215	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	36.000.000				-	18.000.000	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	36.000.000			-	-	18.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	36.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN BAJO BARAT
						KECAMATAN BASSE SANGTEMPE			1.730.009.820					1.763.285.255	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.730.009.820					1.763.285.255	
	7	01				KECAMATAN			1.730.009.820					1.763.285.255	
216	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.721.673.989				-	1.751.785.255	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.500.000			-	-	4.200.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Dokumen	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.530.009.820			-	-	1.545.529.820	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan	1.480.009.820	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	192 Orang/bulan	1.480.009.820	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	63.840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	700.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000			-	-	7.200.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	7.200.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	81.282.419			-	-	86.531.763	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	816.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	1.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.800.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Paket	5.400.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	61.360	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	920.400	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	2.400.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	4.908.059	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Paket	7.014.363	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.797.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	59.797.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	34.310.000			-	-	34.310.000	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	34.310.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	34.310.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	41.928.500			-	-	41.928.500	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.360.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	6.360.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.168.500	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	3.168.500	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	32.400.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.643.250			-	-	32.085.172	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22.265.250	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	29.707.172	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.378.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	2.378.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
217	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	7.335.831				-	10.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.335.831			-	-	10.000.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.335.831	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
218	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.000.000				-	1.500.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	1.000.000			-	-	1.500.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
						KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA			1.834.224.086					1.834.224.086	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.834.224.086					1.834.224.086	
	7	01				KECAMATAN			1.834.224.086					1.834.224.086	
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.795.224.086				-	1.793.724.086	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.011.900			-	-	2.161.200	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	855.500	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	885.600	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	289.100	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	318.900	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	289.100	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	318.900	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	289.100	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	318.900	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	289.100	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	318.900	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.649.422.287			-	-	1.649.422.287	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.585.582.287	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Orang/bulan	1.585.582.287	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	63.840.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	14 Dokumen	63.840.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Laporan	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Laporan	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000			-	-	6.000.000	

	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	6.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Paket	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	58.540.813			-	-	52.497.537	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.327.458	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	1.100.845	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.159.008	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	2.106.268	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	1.752.890	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	14 Paket	1.752.890	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	1.200.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	7.487.457	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	5.384.758	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	2.500.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	29.114.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	15 Laporan	38.452.776	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	14.310.450			-	-	20.505.450	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.310.450	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	20.505.450	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	51.759.333			-	-	51.760.400	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	18.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.359.333	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	1.360.400	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	32.400.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.179.303			-	-	11.377.212	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	13.179.303	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Unit	11.377.212	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
220	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.000.000				-	5.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	5.000.000			-	-	5.000.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.500.000				-	1.500.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	1.500.000			-	-	1.500.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
222	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	32.500.000				-	34.000.000	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	32.500.000			-	-	34.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	32.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	34.000.000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
						KECAMATAN BELOPA			4.097.738.190					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.095.338.190					0,00	
	7	01				KECAMATAN			4.095.338.190					0,00	
223	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	4.049.838.190				100 %	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00			-	1 Dokumen	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.901.378.190			-	42 Orang/bulan	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.847.738.190	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	42 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen	53.640.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000			-	12 Laporan	0,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	44.924.676			-	1 Paket	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	618.600	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.145.850	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	19.172.226	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14.988.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		83.850.450			-		0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.250.450	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6 Unit	13.684.874			-	6 Unit	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	12.384.874	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Unit	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Unit	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	0,00	KECAMATAN BELOPA
224	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	3.000.000				100 %	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000			-	1 Laporan	0,00	

	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA
225	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	3.000.000				100 %	0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000			-	1 Laporan	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA
226	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	39.500.000				100 %	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	39.500.000			-	1 Dokumen	0,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	39.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA
	X					NON URUSAN			2.400.000					0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.400.000					0,00	
227	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	2.400.000				100 %	0,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.400.000			-	1 Paket	0,00	
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA
						KELURAHAN BALO BALO			240.200.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			240.200.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			240.200.000					0,00	
228	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	240.200.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	240.200.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	240.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Balo-Balo	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN BALO BALO
						KELURAHAN SENGA			243.200.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			243.200.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			243.200.000					0,00	
229	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	243.200.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	243.200.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	243.200.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN SENGA
						KELURAHAN TAMPUMIA RADDA			273.800.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			273.800.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			273.800.000					0,00	
230	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	273.800.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	273.800.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	273.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN TAMPUMIA RADDA
						KELURAHAN TANAMANAI			228.200.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			228.200.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			228.200.000					0,00	
231	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	228.200.000				100 %	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	4 Kelurahan	228.200.000			Kab. Luwu	4 Kelurahan	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	228.200.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Kab. Luwu	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN TANAMANAI
						KECAMATAN BELOPA UTARA			2.683.358.960					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.683.358.960					0,00	
	7	01				KECAMATAN			2.683.358.960					0,00	

232	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.649.958.960				-	0,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.481.478.959			-	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.433.358.959	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	36 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	48.120.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.800.000			-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	75.227.250			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.359.470	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	23.301.840	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	25.565.940	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	7.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	74.316.203			-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.916.203	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56.400.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.136.548			-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	11.695.998	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Unit	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	2.440.550	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	13 Unit	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
233	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.400.000				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	6.400.000			-	-	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.400.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
234	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	27.000.000				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	27.000.000			-	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	27.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
						KELURAHAN PAMMANU			299.600.000					299.600.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			299.600.000					299.600.000	
	7	01				KECAMATAN			299.600.000					299.600.000	

235	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	299.600.000				-	299.600.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	299.600.000			-	-	299.600.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	299.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	299.600.000	KELURAHAN PAMMANU
						KELURAHAN SABE			288.600.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			288.600.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			288.600.000					0,00	
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	288.600.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	288.600.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	288.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN SABE
						KECAMATAN BUPON			1.982.838.439					1.986.484.014	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.982.838.439					1.986.484.014	
	7	01				KECAMATAN			1.982.838.439					1.986.484.014	
237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.940.906.738				-	1.944.552.313	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.786.818.240			-	-	1.786.818.240	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.732.818.240	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Orang/bulan	1.732.818.240	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	54.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	54.000.000	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.076.700			-	-	6.076.700	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.076.700	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	6.076.700	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	61.120.933			-	-	61.120.933	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.300.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Paket	1.300.000	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.174.333	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	1.174.333	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	2.400.000	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	10.173.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	10.173.000	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	33.996.900	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	33.996.900	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.076.700	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	12.076.700	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	59.554.425			-	-	63.200.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.154.425	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	23.000.000	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	40.200.000	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	27.336.440			-	-	27.336.440	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	27.336.440	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	27.336.440	KECAMATAN BUPON
238	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.156.701				-	6.156.701	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	6.156.701			-	-	6.156.701	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.156.701	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	6.156.701	KECAMATAN BUPON

239	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	35.775.000				-	35.775.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	35.775.000				-	35.775.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	35.775.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Dokumen	35.775.000	KECAMATAN BUPON
						KELURAHAN NOLING			288.800.000					288.800.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			288.800.000					288.800.000	
	7	01				KECAMATAN			288.800.000					288.800.000	
240	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	288.800.000				-	288.800.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	288.800.000				-	288.800.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	86.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	86.000.000	KELURAHAN NOLING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas	202.800.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	42 Pokmas / Ormas	202.800.000	KELURAHAN NOLING
						KECAMATAN KAMANRE			1.836.053.503					1.934.198.942	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.836.053.503					1.934.198.942	
	7	01				KECAMATAN			1.836.053.503					1.934.198.942	
241	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.811.053.503				-	1.892.678.740	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.899.405				-	2.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.899.405	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.617.799.266				-	1.679.634.756	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.556.053.676	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Orang/bulan	1.617.799.266	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.110.100	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	60.200.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.635.490	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	1.635.490	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.230.100				-	6.500.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.230.100	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	6.500.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00				-	13.200.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Paket	13.200.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	71.137.028				-	73.481.240	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.021.339	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	1.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.472.615	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	1.500.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.643.967	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	4.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	4.200.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	13.019.107	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	12.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10.000.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Laporan	12.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.380.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	26.781.240	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	14.310.450				-	10.000.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.310.450	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	10.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	86.403.490				-	88.700.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.003.490	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	20.000.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.400.000	Kab. Luwu, Kamanre, Kamanre	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	68.700.000	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.273.764			-	-	19.162.744	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	12.577.564	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	18.162.744	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	696.200	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	1.000.000	KECAMATAN KAMANRE
242	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	6.500.000				100 %	6.520.202	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	6.500.000			-	-	6.520.202	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.500.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	6.520.202	KECAMATAN KAMANRE
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	18.500.000				-	35.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	18.500.000			-	-	35.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	18.500.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	35.000.000	KECAMATAN KAMANRE
						KELURAHAN CILALLANG			284.999.733					285.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			284.999.733					285.000.000	
	7	01				KECAMATAN			284.999.733					285.000.000	
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	284.999.733				-	285.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	284.999.733			-	-	285.000.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	284.999.733	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	285.000.000	KELURAHAN CILALLANG
						KECAMATAN LAMASI			2.739.203.869					2.916.884.500	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.739.203.869					2.916.884.500	
	7	01				KECAMATAN			2.739.203.869					2.916.884.500	
245	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.682.453.869				-	2.841.134.500	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.750.000			-	-	8.250.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.650.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.650.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.650.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.650.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.650.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.546.828.109			-	-	2.565.500.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.489.203.869	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Orang/bulan	2.500.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.624.240	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Dokumen	65.500.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.534.000			-	-	8.684.500	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.534.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	8.684.500	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.607.800			-	-	21.000.000	

	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	25 Paket	15.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.607.800	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.230.169			-	-	64.500.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	950.920	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	3.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.999.249	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	25.500.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	12.280.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	65 Laporan	36.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	60.000.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	100 Unit	10.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Unit	50.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	97.343.791			-	-	102.200.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	24.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	350 Laporan	24.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.143.791	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	35.000.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	43.200.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.160.000			-	-	11.000.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2.050.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	4.500.000	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.110.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	15 Unit	6.500.000	KECAMATAN LAMASI
246	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.000.000				-	8.750.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	3.000.000			-	-	8.750.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	3.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Laporan	8.750.000	KECAMATAN LAMASI
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.000.000				-	7.750.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	3.000.000			-	-	7.750.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	3.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6 Laporan	7.750.000	KECAMATAN LAMASI
248	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	12.000.000				-	12.000.000	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	12.000.000			-	-	12.000.000	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	12.000.000	KECAMATAN LAMASI
249	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	36.250.000				-	39.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	36.250.000			-	-	39.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	36.250.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	39.000.000	KECAMATAN LAMASI
250	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	2.500.000				-	8.250.000	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.500.000			-	-	8.250.000	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	9 Laporan	8.250.000	KECAMATAN LAMASI
						KELURAHAN LAMASI			369.800.000					436.400.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			369.800.000					436.400.000	
	7	01				KECAMATAN			369.800.000					436.400.000	
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	369.800.000				-	436.400.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	369.800.000			-	-	436.400.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	111.800.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	178.400.000	KELURAHAN LAMASI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	258.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Pokmas / Ormas	258.000.000	KELURAHAN LAMASI
						KECAMATAN LAMASI TIMUR			1.348.641.593					1.417.206.236	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.348.641.593					1.417.206.236	
	7	01				KECAMATAN			1.348.641.593					1.417.206.236	
252	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.303.641.593				-	1.369.706.236	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.980.000			-	-	2.500.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	300.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	300.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	300.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	300.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	260.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	300.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	760.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.146.881.932			-	-	1.203.574.028	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.098.641.932	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11 Orang/bulan	1.153.574.028	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	48.240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000			-	-	6.600.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	6.600.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.560.000			-	-	11.000.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	10.560.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	15 Paket	11.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	79.115.977			-	-	82.800.000	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	1.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	417.342	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	500.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.020.378	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	2.500.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	1.800.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	4.944.757	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	40 Paket	5.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	71.733.500	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	72.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	500.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Unit	500.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.885.390			-	-	48.440.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	6.600.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.085.390	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	5.300.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.800.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	36.540.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.218.294			-	-	14.292.208	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.278.294	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	10.792.208	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	690.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Unit	1.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.250.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	2.500.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
253	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.500.000				-	4.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	3.500.000			-	-	4.000.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.500.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	4.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
254	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	37.500.000				-	37.500.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	37.500.000			-	-	37.500.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	37.500.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	37.500.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
255	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	4.000.000				-	6.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	4.000.000			-	-	6.000.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	9 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	9 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN LAMASI TIMUR
						KECAMATAN LAROMPONG			2.129.262.356					2.120.652.356	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.129.262.356					2.120.652.356	
	7	01				KECAMATAN			2.129.262.356					2.120.652.356	
256	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.089.262.356				-	2.083.652.356	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.000.000			-	-	1.500.000	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN LAROMPONG

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.936.582.356			-	-	1.922.852.356	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							-	-	1.879.262.356	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	1.879.262.356	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.320.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	41.490.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	2.100.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000			-	-	7.000.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	7.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	63.300.000			-	-	63.800.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	2.500.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Paket	3.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	1.800.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	15.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	15.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	44.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Laporan	44.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	8.080.000			-	-	12.000.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	8.080.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	53 Unit	12.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	60.800.000			-	-	63.000.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.600.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	22.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	21.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	20.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.500.000			-	-	13.500.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	11.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	11.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Unit	2.500.000	KECAMATAN LAROMPONG
257	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	8.000.000				-	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	8.000.000			-	-	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
258	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	32.000.000				-	32.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	32.000.000			-	-	32.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	32.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Dokumen	32.000.000	KECAMATAN LAROMPONG
						KELURAHAN LAROMPONG			324.800.000					325.500.992	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			324.800.000					325.500.992	
	7	01				KECAMATAN			324.800.000					325.500.992	
259	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	324.800.000				-	325.500.992	

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	37.080.000			-	-	37.100.000	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.080.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	12 Dokumen	37.100.000	KELURAHAN LAROMPONG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.800.000			-	-	4.800.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.800.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4 Laporan	4.800.000	KELURAHAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.800.000			-	-	1.800.000	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	12 Dokumen	1.800.000	KELURAHAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	280.870.000			-	-	281.550.992	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	46.752.344	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	12 Laporan	43.433.336	KELURAHAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	12 Laporan	7.000.000	KELURAHAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.117.656	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	12 Laporan	231.117.656	KELURAHAN LAROMPONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	250.000			-	-	250.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	250.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	12 Unit	250.000	KELURAHAN LAROMPONG
						KECAMATAN LAROMPONG SELATAN			1.732.744.843					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.732.744.843					0,00	
	7	01				KECAMATAN			1.732.744.843					0,00	
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.662.924.843				-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.116.778			-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.689.150	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.020.680	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	540.346	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	469.526	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	520.620	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	876.456	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.534.968.733			-	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.482.744.843	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	16 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	50.280.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.943.890	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.414.180			-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.414.180	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	44.943.044			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.298.075	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.411.190	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	10.503.949	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	12.500.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	30 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	17.429.830	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	30 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	61.148.208			-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.443.208	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	7.905.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.333.900			-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	10.333.900	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Unit	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
261	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	9.120.000				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	9.120.000			-	-	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	9.120.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
262	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	59.000.000				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	59.000.000			-	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	59.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	0 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
263	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.700.000				-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.700.000			-	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1.700.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
						KELURAHAN BONEPUTE			324.800.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			324.800.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			324.800.000					0,00	
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	324.800.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	324.800.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN BONEPUTE
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas	169.800.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	28 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BONEPUTE
						KECAMATAN LATIMOJONG			1.620.893.471					1.631.708.548	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.620.893.471					1.631.708.548	
	7	01				KECAMATAN			1.620.893.471					1.631.708.548	

265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.599.759.971				-	1.589.925.048	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.219.000			-	-	4.817.880	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.895.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	1.493.880	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.581.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	831.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.581.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	831.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.581.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	831.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.581.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	831.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.328.895.011			-	-	1.326.363.771	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.272.893.471	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	14 Orang/bulan	1.272.893.471	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.491.140	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	49.679.300	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.790.500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	1.525.400	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.719.900	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	2.265.600	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.419.500			-	-	5.567.000	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.419.500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	5.567.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	19.860.000			-	-	15.000.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	19.860.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	21 Paket	15.000.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	45.978.385			-	-	65.469.297	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.784.560	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Paket	5.465.566	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.190.280	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	6.454.600	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	1.200.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	13.923.545	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Paket	14.379.546	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	5.000.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	16.880.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Laporan	32.969.585	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	28.360.710			-	-	22.425.900	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.360.710	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Unit	22.425.900	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000			-	-	33.000.000	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	33.000.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	133.027.365			-	-	117.281.200	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	109.244.865	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	112.540.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.380.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Unit	690.000	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22.402.500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	4.051.200	KECAMATAN LATIMOJONG

266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	12.133.500				-	23.783.500	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	12.133.500			-	-	23.783.500	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.383.500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	8.783.500	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3.750.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN LATIMOJONG
267	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	9.000.000				-	18.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	9.000.000			-	-	18.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	9.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN LATIMOJONG
						KECAMATAN PONRANG			3.738.755.641					3.738.755.641	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.707.669.559					3.707.669.559	
	7	01				KECAMATAN			3.707.669.559					3.707.669.559	
268	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.665.169.559				-	3.665.169.559	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.003.021			-	-	2.003.021	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	344.506	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	344.506	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	335.420	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	335.420	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	325.095	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	325.095	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	335.420	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	335.420	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	325.095	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Dokumen	325.095	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	337.485	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Laporan	337.485	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.542.095.641			-	-	3.542.095.641	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.488.755.641	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	45 Orang/bulan	3.488.755.641	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	52.840.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	13 Dokumen	52.840.000	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	250.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Laporan	250.000	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	250.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	250.000	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.935.334			-	-	4.935.334	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	135.334	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	135.334	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							0	1 0	4.800.000	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 0	4.800.000	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.739.425			-	-	6.739.425	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	481.646	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	481.646	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	915.200	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	915.200	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	747.355	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Paket	747.355	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	3.600.000	KECAMATAN PONRANG

	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	995.224	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	25 Paket	995.224	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	0,00	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	93.291.023			-	-	93.291.023	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	93.291.023	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	93.291.023	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.105.115			-	-	16.105.115	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.105.115	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	16.105.115	KECAMATAN PONRANG
269	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.000.000				-	5.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	5.000.000			-	-	5.000.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PONRANG
270	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	5.000.000				-	5.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	5.000.000			-	-	5.000.000	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PONRANG
271	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	32.500.000				-	32.500.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	32.500.000			-	-	32.500.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
							0	4 0	32.500.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 0	32.500.000	KECAMATAN PONRANG
	X					NON URUSAN			31.086.082					31.086.082	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			31.086.082					31.086.082	
272	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	31.086.082				-	31.086.082	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.085.640			-	-	11.085.640	
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	11.085.640	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	20 Laporan	11.085.640	KECAMATAN PONRANG
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.000.442			-	-	20.000.442	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.755.747	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	3.755.747	KECAMATAN PONRANG
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.244.695	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Laporan	16.244.695	KECAMATAN PONRANG
						KELURAHAN PADANG SUBUR			376.998.068					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			376.998.068					0,00	
	7	01				KECAMATAN			376.998.068					0,00	
273	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	376.998.068				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	376.998.068			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	117.198.068	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN PADANG SUBUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	259.800.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PADANG SUBUR
						KELURAHAN PADANG SAPPA			317.000.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			317.000.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			317.000.000					0,00	

274	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	317.000.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	317.000.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	317.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN PADANG SAPPA
						KECAMATAN PONRANG SELATAN			2.388.206.991					2.746.706.991	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.353.206.991					2.706.706.991	
	7	01				KECAMATAN			2.353.206.991					2.706.706.991	
275	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.321.206.991				-	2.662.706.991	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.000.000			-	-	15.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.500.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.112.861.407			-	-	2.118.861.407	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan	2.044.361.407	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	348 Orang/bulan	2.044.361.407	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	65.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	70.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.500.000			-	-	10.000.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.500.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	58.900.000			-	-	75.900.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	20 Paket	7.500.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Paket	10.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	2.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	25 Paket	2.500.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.900.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4 Dokumen	3.900.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	20 Paket	7.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	36 Laporan	35.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000			-	-	40.000.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	8 Unit	40.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.945.584			-	-	102.945.584	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	8.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	24 Laporan	10.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	15.509.500	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	24 Laporan	15.509.500	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	77.436.084	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Laporan	77.436.084	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00			-	-	300.000.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Unit	300.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
276	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	30.000.000				-	41.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	20.000.000			-	-	24.000.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	17.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	10.000.000			-	-	17.000.000	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
277	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	2.000.000				-	3.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.000.000			-	-	3.000.000	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	X					NON URUSAN			35.000.000					40.000.000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			35.000.000					40.000.000	
278	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	35.000.000				-	40.000.000	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	35.000.000			-	-	40.000.000	
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Unit	40.000.000	KECAMATAN PONRANG SELATAN
						KELURAHAN PATTEDONG			221.600.000					250.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			221.600.000					250.000.000	
	7	01				KECAMATAN			221.600.000					250.000.000	
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	221.600.000				-	250.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	221.600.000			-	-	250.000.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	221.600.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	250.000.000	KELURAHAN PATTEDONG
						KECAMATAN SULI			1.710.685.515					1.726.060.661	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.710.685.515					1.726.060.661	
	7	01				KECAMATAN			1.710.685.515					1.726.060.661	
280	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.672.144.215				-	1.686.560.661	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100 Persen	1.505.445.586			PNS Kantor Kecamatan Suli	100 Persen	1.505.445.586	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan	1.460.685.586	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	PNS Kantor Kecamatan Suli	192 Orang/bulan	1.460.685.586	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.760.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	PNS Kantor Kecamatan Suli	12 Dokumen	44.760.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.020.650			-	-	6.020.650	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.020.650	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	6.020.650	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.600.000			-	-	6.600.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	6.600.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	6.600.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	41.333.742			-	-	64.000.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							-	-	161.442	-	-	-	-	2.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.500.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Paket	10.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.006.540	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	2.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	6.676.460	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Paket	10.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.541.300	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.448.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.494.425			-	-	100.494.425	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.694.425	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	17.694.425	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	82.800.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.249.812			-	-	4.000.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	11.344.812	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Unit	0,00	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	610.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	14 Unit	2.000.000	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	295.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	2.000.000	KECAMATAN SULI
281	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.541.300				-	7.500.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	6.541.300			-	-	7.500.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.541.300	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN SULI
282	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	32.000.000				-	32.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	32.000.000			-	-	32.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	32.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	32.000.000	KECAMATAN SULI
						KELURAHAN SULI			369.800.000					380.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			369.800.000					380.000.000	
	7	01				KECAMATAN			369.800.000					380.000.000	

283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	369.800.000				-	380.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	369.800.000			-	-	380.000.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	369.800.000	Kab. Luwu, Suli, Suli	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	380.000.000	KELURAHAN SULI
						KECAMATAN SULI BARAT			1.469.523.857					1.564.012.600	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.469.523.857					1.564.012.600	
	7	01				KECAMATAN			1.469.523.857					1.564.012.600	
284	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.415.523.857				-	1.512.512.600	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.000.000			-	-	8.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.256.016.866			-	-	1.352.000.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.204.107.126	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	17 Orang/bulan	1.300.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.909.740	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	52.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.309.740			-	-	6.500.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.309.740	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	6.500.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	92.994.560			-	-	93.712.600	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	4.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	20.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.212.600	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	6.212.600	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	4.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.281.860	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	8.500.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	31.500.100	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	31.500.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.461.500			-	-	36.500.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.461.500	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	12.500.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	24.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.741.191			-	-	15.800.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.741.191	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Unit	15.800.000	KECAMATAN SULI BARAT
285	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	7.500.000				-	7.500.000	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.500.000			-	-	7.500.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN SULI BARAT
286	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	8.000.000				-	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	8.000.000			-	-	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	8.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Laporan	5.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
287	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2.500.000				-	3.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	2.500.000			-	-	3.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
288	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	36.000.000				-	36.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	36.000.000			-	-	36.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	36.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	36.000.000	KECAMATAN SULI BARAT
						KELURAHAN LINDAJANG			243.800.000					260.800.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			243.800.000					260.800.000	
	7	01				KECAMATAN			243.800.000					260.800.000	
289	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	243.800.000				-	260.800.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	243.800.000			-	-	260.800.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	113.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000	KELURAHAN LINDAJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	130.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Pokmas / Ormas	130.800.000	KELURAHAN LINDAJANG
						KECAMATAN WALENRANG			2.785.598.281					3.201.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.785.598.281					3.201.000.000	
	7	01				KECAMATAN			2.785.598.281					3.201.000.000	
290	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.704.598.281				-	3.110.000.000	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.000.000			-	-	2.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.169.598.281			-	-	2.552.000.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	2.117.598.281	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	420 Orang/bulan	2.500.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	50 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000			-	-	6.000.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	6.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	225.000.000			-	100 %	247.000.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Paket	7.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	100.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	100.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	50.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	30.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	45.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	300 Laporan	60.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	200.000.000			-	-	200.000.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Unit	100.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Unit	100.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	72.000.000			-	-	68.000.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	20.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	18.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000			-	-	35.000.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Unit	35.000.000	KECAMATAN WALENRANG
291	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	4.000.000				100 %	4.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	2.000.000			-	100 %	2.000.000	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	2.000.000			-	-	2.000.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN WALENRANG
292	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.000.000				-	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.000.000			-	-	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	KECAMATAN WALENRANG
293	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2.000.000				-	2.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	2.000.000			-	-	2.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN WALENRANG
294	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	50.000.000				-	60.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	50.000.000			-	-	60.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	50.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN WALENRANG
295	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	20.000.000				-	20.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	20.000.000			-	-	20.000.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN WALENRANG
						KELURAHAN BULO			244.400.000					244.400.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			244.400.000					244.400.000	
	7	01				KECAMATAN			244.400.000					244.400.000	
296	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	244.400.000				-	244.400.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	244.400.000			-	-	244.400.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	244.400.000	Kab. Luwu, Walenrang, Bulo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	244.400.000	KELURAHAN BULO
						KECAMATAN WALENRANG BARAT			2.592.928.021					2.454.250.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.592.928.021					2.454.250.000	
	7	01				KECAMATAN			2.592.928.021					2.454.250.000	
297	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.528.928.021				100 %	2.370.250.000	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	2.000.000			Kab. Luwu	100 %	2.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	3 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	2 Laporan	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.029.088.021			Kab. Luwu	100 %	2.049.160.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	1.979.928.021	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Luwu	240 Orang/bulan	2.000.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.160.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	12 Dokumen	47.160.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	6.000.000			Kab. Luwu	100 %	6.000.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	2 Laporan	6.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	154.400.000			Kab. Luwu	100 %	106.650.000	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	75.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	6 Paket	25.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.300.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	2 Paket	6.300.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	25.750.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	5 Paket	25.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.350.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	12 Laporan	50.350.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	130.000.000			Kab.Luwu	100 %	40.000.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	50.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	20 Unit	20.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	80.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	6 Unit	20.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	51.600.000			Kab.Luwu	100 %	45.600.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	2 Laporan	30.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.600.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	1 Laporan	3.600.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	12 Laporan	12.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	155.840.000			Kab.Luwu	100 %	120.840.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	155.840.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	8 Unit	120.840.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
298	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000				100 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamata	100 %	5.000.000			Kab.Luwu	100 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
299	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	39.000.000				100 %	59.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	39.000.000			Kab. Luwu	100 %	59.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	39.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab. Luwu	1 Dokumen	59.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
300	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	20.000.000				100 %	20.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	20.000.000			Kab.Luwu	100 %	20.000.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Kab.Luwu	1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN WALENRANG BARAT
						KECAMATAN WALENRANG TIMUR			1.815.643.046					1.901.450.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.815.643.046					1.901.450.000	
	7	01				KECAMATAN			1.815.643.046					1.901.450.000	
301	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.759.143.046				-	1.842.450.000	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.750.000			-	-	3.500.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.250.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	400.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	400.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	400.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	400.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Laporan	400.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.614.614.686			-	-	1.655.500.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.565.114.686	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Orang/bulan	1.600.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	49.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	14 Dokumen	55.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	500.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.200.000			-	-	8.400.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	8.400.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.800.000			-	-	7.650.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	6.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	17 Paket	7.650.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	86.420.610			-	-	89.400.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.839.600	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Paket	4.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.225.010	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	10 Paket	3.800.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	3.600.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	31.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	32.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	45.456.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	30 Laporan	46.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	12.800.000			-	-	13.000.000	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	12.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Unit	13.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.500.000			-	-	38.000.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	4.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Laporan	34.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.057.750			-	-	27.000.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	20.057.750	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Unit	21.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	6.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
302	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.000.000				-	7.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	6.000.000			-	-	7.000.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	7.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
303	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	43.500.000				-	45.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	43.500.000			-	-	45.000.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									

							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	43.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	8 Dokumen	45.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
304	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	7.000.000				-	7.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.000.000			-	-	7.000.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	7.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	24 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
						KECAMATAN WALENRANG UTARA			3.141.000.703					5.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.141.000.703					5.000.000	
	7	01				KECAMATAN			3.141.000.703					5.000.000	
305	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.135.100.703				100 %	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 % 100 %	1.000.000			-	100 % 100 %	0,00	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	3.010.752.477			-	100 %	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2.953.137.105	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	32 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	54.120.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	1.061.160	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.434.212	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	6.000.000			-	100 %	0,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	25.985.375			-	100 %	0,00	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	12.706.375	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Paket	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	13.279.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	23 Laporan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	83.023.875			-	100 %	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.623.875	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.338.976			-	100 %	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	8.338.976	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5 Unit	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
306	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	3.500.000				100 %	5.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	3.500.000			-	100 %	5.000.000	

	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN WALENRANG UTARA
307	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	2.400.000				100 %	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	2.400.000			-	100 %	0,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	2.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
						KELURAHAN BOSSO			278.000.000					280.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			278.000.000					280.000.000	
	7	01				KECAMATAN			278.000.000					280.000.000	
308	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	278.000.000				-	280.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	278.000.000			-	-	280.000.000	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	278.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Pokmas / Ormas	280.000.000	KELURAHAN BOSSO
						KECAMATAN BUA			4.017.802.021					4.325.781.695	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.935.002.021					4.268.781.695	
	7	01				KECAMATAN			3.935.002.021					4.268.781.695	
309	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.842.701.237				-	4.228.741.695	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.250.000			-	-	13.105.200	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	2.355.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	2.400.100	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	2.400.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	2.400.100	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.687.630.749			-	-	3.901.940.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	3.617.790.749	Kab. Luwu, Bua, Sakti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	51 Orang/bulan	3.836.940.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.840.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Dokumen	65.000.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.953.400			-	-	6.351.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.953.400	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	6.351.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	10.150.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	30 Paket	10.050.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Orang	100.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	95.321.843			-	-	111.030.788	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.733.998	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Paket	6.150.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.726.500	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Paket	3.550.788	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.340.490	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7 Paket	6.450.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Paket	4.250.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3 Dokumen	3.300.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	15.767.255	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	19 Paket	13.120.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	4.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6 Laporan	8.050.000	KECAMATAN BUA

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	39.153.600	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	79 Laporan	66.160.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	200.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	100.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	100.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.479.125			-	-	34.106.707	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	4.950.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	28.479.125	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	29.156.707	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.066.120			-	-	151.858.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							-	-	14.416.120	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	151.658.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.650.000	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	100.000	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Unit	100.000	KECAMATAN BUA
310	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	12.050.000				-	12.010.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	12.050.000			-	-	12.010.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.050.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	8.005.000	KECAMATAN BUA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	4.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	4.005.000	KECAMATAN BUA
311	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.000.000				-	4.005.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.000.000			-	-	4.005.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Laporan	4.005.000	KECAMATAN BUA
312	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	8.050.000				-	8.005.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	8.050.000			-	-	8.005.000	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	8.050.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Laporan	8.005.000	KECAMATAN BUA
313	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	54.700.784				-	4.005.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	54.700.784			-	-	4.005.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	54.700.784	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1 Dokumen	4.005.000	KECAMATAN BUA
314	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	12.500.000				-	12.015.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	12.500.000			-	-	12.015.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	4.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	4.005.000	KECAMATAN BUA
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	4.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	4.005.000	KECAMATAN BUA

	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	4.500.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2 Dokumen	4.005.000	KECAMATAN BUA
	X					NON URUSAN			82.800.000					57.000.000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			82.800.000					57.000.000	
315	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	82.800.000				-	57.000.000	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	82.800.000			-	-	57.000.000	
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	82.800.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5 Laporan	57.000.000	KECAMATAN BUA
						KELURAHAN SAKTI			281.000.000					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			281.000.000					0,00	
	7	01				KECAMATAN			281.000.000					0,00	
316	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	281.000.000				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	281.000.000			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	281.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KELURAHAN SAKTI
						BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.591.205.106					6.575.258.200	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.591.205.106					6.575.258.200	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.591.205.106					6.575.258.200	
317	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.092.575.202				-	3.137.805.040	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.500.000			-	-	58.000.000	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	45.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	6 Dokumen	45.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	750.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	7.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.585.960.205			-	-	2.586.805.040	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.363.600.205	Kab. Luwu, Belopa, Senga	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Orang/bulan	2.364.445.040	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	147.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	147.360.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Laporan	35.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.500.000			-	-	2.500.000	
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	4 Laporan	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.500.000			-	-	32.200.000	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	45 Paket	29.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	240 Dokumen	2.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	240 Dokumen	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	145.290.997			-	-	159.200.000	

	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	10 Paket	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	10 Paket	3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	7.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	1.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	45 Paket	42.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	45 Paket	42.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	88.090.997	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	75 Laporan	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	25.000.000			-	-	25.000.000	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Unit	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.824.000			-	-	221.100.000	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.224.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Laporan	7.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	213.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	213.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	53.000.000			-	-	53.000.000	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	9 Unit	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	15 Unit	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
318	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	650.500.000				-	1.306.000.000	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	650.500.000			-	-	1.306.000.000	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	200 Orang	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	35 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									
							Jumlah Paskibraka	73 Orang	650.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	73 Orang	1.250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
319	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	1.180.029.904				-	1.221.000.000	

	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	1.180.029.904			-	-	1.221.000.000	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	1.179.529.904	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	30 Orang	1.185.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
320	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	0,00				-	61.000.000	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	0,00			-	-	61.000.000	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	12 Dokumen	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Orang	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
321	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	45.500.000				-	108.203.160	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	45.500.000			-	-	108.203.160	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Orang	57.203.160	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Orang	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2 Laporan	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
322	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	622.600.000				-	741.250.000	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	622.600.000			-	-	741.250.000	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	50 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125 Orang	22.100.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	125 Orang	55.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3 Laporan	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	600.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PENDAPATAN BAGI HASIL	-	12 Dokumen	650.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
								J U M L A H	**1.701.235.574.148**					**1.723.985.660.109**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu gambaran capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Tercapainya suatu kinerja akan terlihat dari capaian indikator sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi *Indikator Kinerja Makro*, *Indikator Kinerja Utama (*IKU*)* maupun *Indikator Kinerja Daerah (IKD).*

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro adalah ukuran atau parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pembangunan daerah secara makro.

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Luwu
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025 (*)	Target Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,36	4,53	6,39
2	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	59,73	62,44	75,09
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,7	11,16 – 10,57	10,46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,14	4,05	3,05
5	Gini Ratio	Angka	0,319	0,313	0,306
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,86	74,28	74,72

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025 (*)	Target Tahun 2026
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N.A	20,77	23,22
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	48,48	76,54	76,75
9	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	Persen	3,29	3,298	3,3

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh kepala daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu periode 2024-2026 tertuang pada tabel berikut :

Tabel. 6.2
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu
Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Asumsi Capaian 2025	Target RPJMD Tahun 2026	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	59,73	74,23	75,09	75,09
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	6,12	6,39	6,39
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,2	3,05	3,05
4.	Pengeluaran perkapita	*Rp Juta*	11.121	12.482	13.789	13.789
5.	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	10,55	10,46	10,46
6.	SAKIP	*Skor*	62,18	62,3	62,48	62,48
7.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	*Skor*	79,92	80,37	81,51	81,51
8.	Indeks Inovasi Daerah	*Skor*	44,22	44,4	44,87	44,87
9.	Indeks Pembangunan Manusia	*Poin*	73,86	74,02	74,6	74,72
10.	Indeks Ekonomi Hijau	*Skor*	49,82	50,22	50,66	50,66
11.	Indeks Ekonomi Biru	*Skor*	90,31	101,14	111,98	111,98
12.	Produktivitas Pertanian	*Ton/ha*	6,1	6,5	7	7
13.	Produktivitas Perikanan Budidaya	*(Rp/Jiwa)*	8,04	10,22	10,36	10,36
14.	Indeks Ketahanan Pangan	*Skor*	82,23	82,77	83,05	83,05
15.	Tingkat Konektivitas Wilayah	%	13,2	14,02	14,98	14,98
16.	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	10,89	10.66	10,75	10,75
17.	Persentase desa mandiri	%	14,49	19,32	21,74	21,74
18.	Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	N.A	20,77	23,22	23,22

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Asumsi Capaian 2025	Target RPJMD Tahun 2026	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*Skor*	48,48	76,54	76,75	76,75

Sumber Data : BPS dan RPJMD 2025-2029.

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tersebut sangat bergantung kepada data dan informasi yang diolah sehingga dapat dibandingkan antara target yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Indikator Kinerja ini juga diperlukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 6.3

Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	**ASPEL GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan				
	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,23	82,77	83,05
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,8	7,12	6,86
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	77,00	79,90	81,34
	Indeks pertanaman padi	Poin	180,0	188	208
	Proporsi sawah irigasi	%	10,00	10,66	10,75
	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	25.019,29	26.019,00	904,87
	Kapasitas Air Baku	M3/det	N.A	5,31	6,09
	Lingkungan Hidup Berkualitas				
	Akses air minum jaringan perpipaan	%	14,69	25,66	25,97
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	42,77	60,00	63,00
	Akses Rumah Tangga Terhadap air minum aman	%	21,71	28,00	31,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	48,48	76,54	76,75
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4,45	6	8
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,88	16,70	17,10

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	3,12	21,86	24,04
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N.A	20,77	23,22
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	1,5	1,84	2,18
	Indeks Risiko Bencana	Poin	186,59	189,22	188
	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36	0,38	0,39
	Demografi				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,31	1,3	1,25
	Rasio Penduduk	%	127,68	127,68	127,68
	Kepadatan Penduduk	Org/km2	129	130	131
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	Kesejahteraan Ekonomi				
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	6,12	6,39
	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	10,55	10,46
	PDRB Per Kapita	Rp Juta	59,73	63,89	67,23
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,2	3,05
	Indeks Gini	Angka	0,319	0,329	0,326
	Kesehatan Untuk Semua				
	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,86	73,86	74,02
	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,83	74,15
	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,37	0,39	0,40
	Prevalensi Stunting	%	32,1	22,34	20,33
	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	58,52	59	59
	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	8	7	6
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	166,29	112,2	111,31
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	54	56,766	59,882
	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment success rate)	%	89	92,96	93,52
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	88,42	90,00	91,00
	Pendidikan Berkualitas Yang Merata				
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	9,07	9,16
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,54	14,72
	Angka Literasi	%	65,59	66,78	68,36
	Angka Numerasi	%	65,19	65,89	67,94
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62,35	64,28	66,78
	Indeks Literasi Digital	Angka	N.A	3	3,16
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	15,41	17,50	19,00
	Persentase penduduk usia 15 ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	96,51	98,316	99,358
	Perlindungan Sosial Yang Adaptif				

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,029	0,1	0,12
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	58,06	95	95,3
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	79,04	74,22	74,71
	Persentase kegiatan keagaamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah	%	N.A	77,34	80,465
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,62 (Bertumbuh)	0,64	0,66
	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	70,01	79,04	79,86
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif				
	Indeks Perlindungan Anak	Angka	56,47	60	61
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	56,07	78,03	78,38
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,80	93	93
	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,535	0,52	0,515
	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N.A	53,56	54,59
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
	Angka Ketergantungan	%	45,51	44,368	43,581
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas				
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,1	0,0399	0,042
	Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum	%	0,8	0,0088	0,0098
	Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jiwa	55.354	56120	56500
	Jumlah industri ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif	67	87	107
	Jumlah Industri kecil dan menengah	Pelaku industri	2.373	2466	2569
	Persentase Koperasi sehat di kabupaten	%	24	28	32
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,0088**	0,0088	0,0098
	Rasio Kewirausahaan	%	6,4	0,0088	0,0098
	Proporsi Individu yang menggunakan internet	%	67,01	73,865	80,014
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,31	68,47	68,78
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,77	55,89	56,71
	Indeks Inovasi Daerah	Skor	44,22 (Inovatif)	44,4	44,87
	Return On Aset (ROA) BUMD	%	-6,3463	-6,227	-6,109
	Produktivitas padi	Ton/ha	6,1	6,2	6,3
	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	0,37	0,49	0,57
	Jumlah produksi perikanan	Ton	671.054	684.720,66	701.838,70
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	652.012,26	662.021,00	669.280,50
	Produktivitas budidaya perikanan tangkap	%	5,90	6,1	6,2

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Angka konsumsi ikan	%	56,26	56,90	57,51
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	%	60	60,89	61,4
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	17,54	19,87	21,68
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru				
	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	49,82	50,22	50,66
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	90,31	101,14	111,98
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	46,12**	46,12’	47,09
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	37,87	38,07	38,12
	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-1,5	1,23	1,29
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	%	14	13,76	13,31
	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi	%	3,29	3,298	3,3
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	71,53	78,49	81,71
	Persentase desa mandiri	%	14,49	19,32	21,74
	Indeks Layanan Infrastruktur	%	2,63	2,72	2,9
	Stabilitas Ekonomi Makro				
	Tingkat Inflasi	%	1,87	2,5	2,5
	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,18	0,20	0,25
	Pertumbuhan Investasi daerah	%	-50	5,7	5,75
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Skor	79,92	80,37	81,51
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,50	3,59	3,63
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif				
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,08	98,72	99,28
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,6	2,9	3,4
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,40 (C-)	3,45	3,45
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	73,98	74,18	75,19
	Indeks Maturitas SPIP	%	3	3	3
	Monitoring Centre for Prevenstion (MCP) KPK	Nilai	49	69	69,6
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial				
	Persentase penegakan perda	%	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	92,72	93,24	93,57
	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	11,4	11,4	11,4
	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	perda	2	3	4
	Persentase perempuan pengurus partai politik	%	30	30	30
	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
	Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti	kerjasama	6	32	35
	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,23	3,77	3,97
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**				
1	**PENDIDIKAN**				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	54,09	95,00	96,00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	79,48	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	%	75,70	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	40,92	100	100
	Jumlah Kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang ditetapkan	Kurikulum	2	100	100
	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	54,09	100	100
	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	71,87	100	100
	Rata-rata kemampuan literasi	%	57,25	2	2
	Rata-Rata kemampuan numerasi	%	56,68	100	100
	Persentase kurikulum yang diterapkan	%	20	100	100
	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	80	81,34	81,56
	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	89,96	100	100
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,96	100	100
	Persentase kegiatan pengendalian perizinan pendidikan	%	100,00	100	100
	Indeks Literasi	Indeks	65,59	66,78	68,36
	Angka Literasi	%	65,59	66,78	68,36
	Angka Numerasi	%	65,19	65,89	67,94

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**KESEHATAN**				
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0.091	0,10	0,10
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100.00	100.00
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	96,82	100.00	100.00
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,63	100.00	100.00
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,29	100.00	100.00
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,30	100.00	100.00
	Persentase orang usia 15-49 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,16	100.00	100.00
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,97	100.00	100.00
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,01	100.00	100.00
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,89	100.00	100.00
	Persentanse ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	99.03	100.00	100.00
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	82,10	100.00	100.00
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	%	75,60	100.00	100.00
	Rata-rata indicator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	94,86	100.00	100.00
	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	%	94	90	91
	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	4,70	4,77	4,84
	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100	100	100
	Persentase desa/kelurahan yang terlah menerapkan PHBS	%	100	100	100
	Akses Rumah Tangga Terhadap air minum aman	%	21,71	28,00	31,00
	Indeks SPM	Indeks	60,34	62,25	64,75
	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	%	90,27	91,28	92,33
	Persentase toko obat, apotek, alat Kesehatan, TPP, depot air minum yang berizin	%	100	100	100
	Persentase status akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan minimal madya atau sederajat	%	80	81,22	82,34
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	%	10,89	10,95	11,02

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	13.78	13.78	13.78
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	10.9	10.66	10,75
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalu SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	80.41	82.05	82.07
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestik	%	76.88	77.15	77.88
	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	1	1	1
	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	30.67	32.54	33.64
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	21,24	36,57
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0,02	0,02
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100
	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	-	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0,07	2,44	4,78
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,86	10,39	10,16
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	3,96	6,18	6,22
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	80	80	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	63,238	91,751	93,001
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	92,882	1,045	2,545
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	3.335	7.151	5.654
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
	Persentase warga negara memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapgaan bencana	%	100	100	100
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15
6.	**SOSIAL**				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	92,72	93	95
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.	%	93,12	100	100
B.	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				
1.	**TENAGA KERJA**				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang	%	46,15	48,20	50,12

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	mengacu ke rencana tenaga kerja.				
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	50,64	52,77	53,52
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta/Pekerja	61,90	62,52	63,15
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	16,85	18,50	20,25
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	%	20,97	21,43	8,12
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,91	4,95	4,97
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,017	100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	1,578	1,05	1,02
3.	**PANGAN**				
	Persentase Cadangan pangan terhadap kebutuhan Cadangan pangan	%	0,24 (24 %)	0,32 (32 %)	0,46 (46 %)
4.	**PERTANAHAN**				
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	N.A	100	100
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	N.A	100	100
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	N.A	100	100
	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL)	%	5.945,637	23.949,41	23.949,41

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N.A	30,00	32,65
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66	90	90
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	48,48	76,54	76,75
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	%	100	100	100
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	70,98	100	100
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	86,34	98,85	98,90
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	33,73	34,00	34,50
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	93,21	97,42	97,45
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	2,86	3	3
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	19.8	30	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	14.49	70	80
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,33	2,35	2,30

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	%	50,25	60,00	73,00
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	33,56	25,00	10,00
9.	**PERHUBUNGAN**				
	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,62	0,62	0,63
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Unit/Smp/Jam	0,48	0,49	0,49
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	19.29	19.29	21.05
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	43	43	57
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	80	82,23	83
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	11,17	39,06	40.28
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	6,40	8,02	9,58
12.	**PENANAMAN MODAL**				
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	100	100	100
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3.05	20	30
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	3.78	10	20

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	%	0	10	20
14.	**STATISTIK**				
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukakn evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100	100
15.	**PERSANDIAN**				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00
16.	**KEBUDAYAAN**				
	Terlestarikannya cagar budaya	%	68,61	75,00	80,00
17.	**PERPUSTAKAAN**				
	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,35	65,35	68,21
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	62,35	64,28	66,78
18.	**KEARSIPAN**				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	N.A	100	100
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	N.A	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C.	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**				
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	Jumlah Total Produksi perikanan	ton	671.054,41	678.436,01	685.898,80
2.	**PARIWISATA**				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	1	5
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten	%	- 0,8	1	10
	Tingkat hunian akomodasi	%	0,38	0,40	0,45
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,29	0,3	0,4
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0,001	0,2	0,3
3.	**PERTANIAN**				
	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,1	6,5	7
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-22,32	11	11,20
4.	**PERDAGANGAN**				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%	97	97	98
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,29	99,30	100
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,94	100	100
5.	**PERINDUSTRIAN**				
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	80,02	81,98	82,98
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1	5	10
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	N.A	N.A	N.A
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten .	%	N.A	N.A	N.A
	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	%	75	80	85
6.	**TRANSMIGRASI**				
	Persentase Cadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	10	11	12
	Persentase luas Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	9,8	10,7	11,8
	Transmigran swakarsa	KK	26	26	26
	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	184,5	184,5	184,5
	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254	254	254
	Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	1	1	1
D.	**PENUNJANG URUSAN**				
1	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**				
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11,73	11,70	11,65
	Rasio PAD	%	14,11	14,39	14,82
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	Level 3	Level 3	Level 3

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	Level 2,62	Level 3	Level 3
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	3.88	0.33	0.33
	Opini Laporan Keuangan	%	WTP	WTP	WTP
2	**PENGADAAN**				
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	17,56	17,59	18
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	54,28	56,78	57,64
3	**KEPEGAWAIAN**				
	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,293	0,293	0,293
	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,243	0,243	0,243
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100
4	**MANAJEMEN KEUANGAN**				
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,88	93,78	93,68
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,96	0,95	0,94
	Manajemen Asset	Data	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	2,34	2,30	2,27
5	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI**				
	Informasi tentang sumber daya yang	%	100	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	tersedia untuk pelayanan				
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100

Sumber : BPS, RPJMD 2025-2029.

Data yang tertuang dalam tabel diatas bersumber dari data BPS dan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, merupakan Gambaran kondisi tahun 2024 dan menjadi baseline perencanaan, perkiraan capaian tahun 2026 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2025, serta target tahun 2027 yang diturunkan dari RPJMD tahun berkenaan.

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ukuran kuantitafif yang digunakan untuk menilai Tingkat pencapaian pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) berfokus pada pelayanan dasar di enam urusan wajib, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Capaian dan Target Kinerja SPM Kabupaten Luwu
Tahun 2024-2026

Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Perkiraan Target	Target
				2025	2026
PENDIDIKAN					
Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	97,6	100	100
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	%	73,93	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	9,03	100	100
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	73,70	100	100
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	53,56	100	100
KESEHATAN					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	96,82	100	100
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,63	100	100
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,29	100	100
Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96,46	100	100
Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96,30	100	100
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,16	100	100
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	97,97	100	100
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	98,01	100	100
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas	%	97,89	100	100

Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Perkiraan Target	Target
				2025	2026
	yang mendapatkan pelayanan kesehatan				
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,03	100	100
Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	82,10	100	100
Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	75,60	100	100
PEKERJAAN UMUM					
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,41	100	100
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestic	%	75,98	100	100
PERUMAHAN RAKYAT					
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%	0	100	100
TRANTIBUNLINMAS					
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota	%	89,88	100	100
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	26,68	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	26,68	100	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	26,68	100	100

Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Perkiraan Target	Target
				2025	2026
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	23,52	100	100
SOSIAL					
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	90,15	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	76,25	100	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jamninan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM Kabupaten Luwu.

6.5 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian terhadap 17 tujuan global pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini telah berupaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pencapaian TPB yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan kedepan.Kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap indikator TPB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5
Capaian, Proyeksi dan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2024 – 2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Tujuan SDGs 01 :	**MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN**						
Target 1.1 :	**Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari**						
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	0,71	0,59	0,47	Bappelitbangda
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11,7	10,55	10,46	Bappelitbangda
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%	11,7	10,55	10,46	Bappelitbangda
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BPJS Kesehatan	%	90,62	98	100	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	90,62	98	100	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, BPS : Sakernas	%	56,94	57	58,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 1.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro**						
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS : Susenas	%	80.32	80.75	81.17	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	PM	PM	Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana**						
1.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 Orang	7151	5510	4715	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD	%	20	40	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 02 :	**MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**						
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun**						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	%	6,8	6,5	6,3	Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula**						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN, Survei Kesehatan Indonesia (SKI)	%	6	14	14	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,2	7	7	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	77	90,5	90,7	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	NA	4,84	4,84	Dinas Kesehatan
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.**						
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS PERTANIAN	%	55,25	55,25	55,25	Dinas Pertanian
Target 2.a	**Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.**						
Target 2.c	**Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim**						
Tujuan SDGs 03 :	**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**						
Target 3.1 :	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN; BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)	Per 100.000 HK	166,29	70	70	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN /BPS	%	99	99	100	Dinas Kesehatan
Target 3.2 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.**						
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.						
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	2,29	0	16,27	Dinas Kesehatan
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	11,4	11,4	15,71	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	10,39	10,4	5,27	Dinas Kesehatan
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**						
3.3.2*	Insidens Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINAS KESEHATAN	Per 1000 penduduk	**222.760**	**190**	**180**	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.		DINAS KESEHATAN	Per 1000 penduduk	0,38	0,23	0,35	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.		DINAS KESEHATAN	Per 100.000 Penduduk	**0,51**	**0,88**	**0,48**	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.							
	(a)	Filariasis	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
	(b)	Kusta	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.4.1.	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan**							
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis		BPJS Kesehatan	%	N.A	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.		DINAS KESEHATAN	%	8,7	8,7	8,7	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		DINAS KESEHATAN	%	13,32	13,32	13,32	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		DINAS KESEHATAN	%	32,7	32,7	32,7	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 3.5	**Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan**						
Target 3.7	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional**						
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS; SDKI	%	5,82	5,82	5,82	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang**						
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial.	DINAS KESEHATAN	%	N.A	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	DINAS KESEHATAN / BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	90,00	91,00	92,00	Dinas Kesehatan
Target 3.c	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil**						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINAS KESEHATAN	rasio	72.239	74.866	77.493	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 04 :	**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**						
Target 4.1	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.						
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	98,93	98,93	98,95	Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP	DINAS PENDIDIKAN	%	98,93	98,93	98,95	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; usia 16-18 tahun	DINAS PENDIDIKAN	%	3397	0	0	
	(i) Angka Anak tidak sekolah usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	3397	0	0	Dinas Pendidikan
	(ii) Angka Anak tidak sekolah usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	3397	0	0	Dinas Pendidikan
Target 4.4	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan**						
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	Dinas Pendidikan
Target 4.5	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan**						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.						
	1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	100	100	100	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
	2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	60	70	80	Dinas Pendidikan
Target 4.6	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi**							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	98,24	99,00	99,00	Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 05 :	**MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**							
Target 5.5	**.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat**							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.		DINAS P3A	%	14,28	14,28	14,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.6	**Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut**							
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi		DINAS P3A	**Adda/Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Ada**	**Ada**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.b	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan,khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan**							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informatika & Stastik
Tujuan SDGs 06 :	**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**						
Target 6.1	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**						
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Kesehatan : Susveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga BPS : Survei Nasional	%	21,71	28,00	31,00	Dinas Kesehatan
Target 6.2	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan**						
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.	PUTR	%	4,29	4,6	4,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Target 6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global						
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	Dinas Lingkungan Hidup	%	N.A	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 6.4	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**						
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya .	PUTR	ltr/dtk	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang`

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Tujuan SDGs 07 :	**MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA**						
Target 7.1	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	90.08	92,56	93,84	PLN
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS	%	N.A	N.A	N.A	BPS
Tujuan SDGs 08 :	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**						
Target 8.1	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang**						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	%	4,13	6,96	5,23	Bappelitbangda
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	Juta	59,73	74,23	75,09	Bappelitbangda
Target 8.2	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya**						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	64,08	65,05	65,87	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya**						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp	19,805	20,103	20,355	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	4,14	3,7	3,55	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	7,03	7,01	6,98	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.**						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	11,7	10,08	10,05	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusu dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal**						
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	40	45	50	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	55.314	60.000	65.000	Dinas Pariwisata
Tujuan SDGs 09 :	**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**						
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua**						
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	PUTR	**%**	98	98	98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi							
	1	Angkutan Udara (Pesawat)						
		Jumlah Penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Orang	36.725	40.000	42.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Barang	DINAS PERHUBUNGAN	Ton	201.841	220	230	Dinas Perhubungan
	2	Angkutan Umum (Mobil)						
		Jumlah Penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Orang	218.286	217.000	216.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Barang	DINAS PERHUBUNGAN	Ton	350	330	310	Dinas Perhubungan
9.1.2(a)	Jumlah Bandara		DINAS PERHUBUNGAN	Unit	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.1.2(b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan		DINAS PERHUBUNGAN	Unit	N.A	PM	PM	Dinas Perhubungan
Target 9.2	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**							
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan		BPS	%	4,35	4,46	4,58	Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 9.5	**Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan**						
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPPELITBANGDA	%	N.A	PM	PM	BAPPELITBANGDA
Tujuan SDGs 10 :	**MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA**						
Target 10.1	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional**						
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Angka	0,319	0,329	0,326	BAPPELITBANGDA
10.1.1 (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	N.A	PM	PM	BPS
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	41	20	15	DPMD
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	30	115	130	DPMD
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	BPS
Target 10.2	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	BPS/DINAS SOSIAL	%	62	60	57	Dinas Sosial
Target 10.3	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.**						
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A	Kebijakan	0	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar**						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	%	58,06	58,28	58,52	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Tujuan SDGs 11 :	**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**						
Target 11.1	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.**						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERKIM\/BPS	%	71,53	78,49	81,71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.3	**Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara**						
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	BIGPUTR	%	1,68	1,75	1,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**						
11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Org	7151	5510	4715	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBD	%	259.576.524.000	50.000.000.000	43.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.6	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**						
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	40	70	80	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	40	70	80	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	92,44	80,41	80.71	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.b :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.**						
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	**%**	20	40	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Tujuan SDGs 12 :	**MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN**						
Target 12.3	**Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.**						
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	NA	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.4	**Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.**						
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	N.A	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.**						
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	NA	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.**						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usaha	NA	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.8	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
12.8.1. (a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan	NA	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.b	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal**						
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*).	Dinas Pariwisata	Destinasi	1	2	3	Dinas Pariwisata
Tujuan SDGs 13 :	**MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**						
Target 13.1	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara**						
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	per 100.000 orang	7151	5510	4715	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	25	37,5	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 13.2	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional**						
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	BAPPELITBANGDA	Ton co2 eq	N.A	PM	PM	BAPPELITBANGDA
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA	Ton co2 eq	1.341.279,21	1.345.279,21	1.350.591,38	BAPPELITBANGDA
13.2.2.(b)	Persentase potensi penurunan intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA	%	N.A	14,82	15	BAPPELITBANGDA
Tujuan SDGs 16 :	**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.**						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	N.A	PM	PM	Polres Luwu
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES LUWU	Org	N.A	PM	PM	Polres Luwu
Target 16.2 :	**Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.**						
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	DP3A/POLRES LUWU	%	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proprosi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3A/POLRES LUWU	%	0,017	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**						
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia, BPHN	%	N.A	PM	PM	Biro Hukum
Target 16.5 :	**Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.**						
Target 16.6 :	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**						
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	62,18 B	B	B	Biro Organisasi (Sekretariat Daerah)
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	46,49 (C)	B	B	Biro Organisasi (Sekretariat Daerah)
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Diskominfo	Instansi	NA	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DP3A/SETWAN	%	14,28	14,28	14,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	DP3A/BKPSDM	%	11,43	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 16.9 :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	97,39	97,42	97,45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Disdukcapil/ BPS : Susenas	%	93,21	93,25	93,30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.**						
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	DISKOMINFO	%	34,28	40	42,85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Target 16.b :	**Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.**						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A	Kebijakan	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan SDGs 17	**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**						
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BAPENDA/BPS	%	6,97	6,99	6,71	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA/BPS	%	0,18	0,22	0,22	Badan Pendapatan Daerah

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi**						
17.8.1*	Persentase pengguna internet	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	67.01	67.25	67.48	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.**						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	DPMPTSP	Dokumen	0	2	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	DPMPTSP	Proyek	0	1	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	DPMPTSP	Rp	0	1.000.000.000,00	2.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.**						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	

Sumber : BPS, OPD Pengampu TPB/SDGs Kabupaten Luwu dan Tim Penyusun RKPD.

Tabel di atas menunjukkan target dan capaian masing-masing indikator TPB yang diperoleh dari BPS maupun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang dimuat tersebut, diketahui bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan. Hal ini menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dimasa depan, khususnya program/kegiatan yang terkait langsung dengan indikator.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabuapten Luwu dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijkan pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kab. Luwu Tahun 2025-2029 yaitu: **“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Penyanan Publik serta Infrastruktur dalam Mendukung Peningkatan Masyarakat Berbasis Komoditas Unggulan Daerah”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Luwu 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Selawesi Selatan maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING